



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025**



Nomor : 23A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Ahmad Yani Pontianak



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025**

Nomor : 23A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	3
2. Standar Pemeriksaan	3
3. Tujuan Pemeriksaan	3
4. Entitas yang Diperiksa	3
5. Lingkup Pemeriksaan.....	3
6. Metodologi Pemeriksaan.....	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	5
8. Batasan Pemeriksaan.....	5
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025 AUDITED	





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

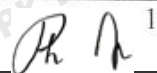
Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

 1

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 23B/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tanggal 21 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pontianak, 21 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

2 Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Sri Haryati S.E., M.M., CSFA, CRMP
Register CSFA Nomor R.0099

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki 50 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hasil tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dilakukan dalam dua tahap selama 65 hari yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan interim dilakukan selama 33 hari mulai tanggal 26 Januari s.d. 1 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 8/B/ST/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/01/2026 tanggal 21 Januari 2026; dan
- b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 32 hari mulai tanggal 6 April s.d. 5 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 39/B/ST/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/04/2026 tanggal 1 April 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



**PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU
SEMAKIN HEBAT!**



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025 - AUDITED

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
NERACA
LAPORAN ARUS KAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PID85285.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN	xiv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xv
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xvii
NERACA	xviii
LAPORAN OPERASIONAL	xx
LAPORAN ARUS KAS	xxii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1 Ekonomi Makro Kabupaten Kapuas Hulu	5
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5
2.1.2 Angka Kemiskinan	8
2.1.3 Angka Pengangguran	9
2.1.4 Pertumbuhan ekonomi	10
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	16
2.1.6 Mandatory Spending	17
2.1.7 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	26
2.2 Kebijakan Keuangan	26
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	26
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	29
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	33
2.2.4 Strategi Pencapaian	34
2.3 Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	35
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	38
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	46
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	46
3.1.1 Pendapatan Daerah	46
3.1.2 Belanja Daerah	49
3.1.3 Pembiayaan Daerah	65
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	65
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	67
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	67
4.1.1 Domisili dan Bentuk Hukum	67
4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Entitas	67
4.1.3 Entitas Akuntansi dan Pelaporan	69
4.2. Basis Akuntansi Dan Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	70
4.2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	70
4.2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	71
4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	73
4.3.1 Aset Lancar	73
4.3.2 Investasi	75
4.3.3 Aset Tetap	76
4.3.4 Dana Cadangan	81
4.3.5 Aset Lainnya	82
4.3.6 Utang/Kewajiban	85
4.3.7 Ekuitas	86
4.3.8 Pendapatan-Lo	86
4.3.9 Beban	89
4.3.10 Koreksi Kesalahan	91
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	94
5.1 Penjelasan Pos- Pos Laporan Realisasi Anggaran	94
5.1.1 Pendapatan Daerah	94
5.1.2 Belanja Daerah	125
5.1.3 Surplus/Defisit	154
5.1.4 Pembiayaan Daerah	154
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	156
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	157
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	157
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	157
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	157
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	157
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	157
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	158
5.3.1 Aset	158
5.3.2 Kewajiban	213
5.3.3 Ekuitas	216
5.3.4 Kewajiban Dan Ekuitas	216
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	217

5.4.1	Pendapatan - Lo	217
5.4.2	Beban – Lo	233
5.4.3	Beban Transfer	267
5.4.4	Surplus /Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	268
5.4.5	Pos Luar Biasa	270
5.4.6	Surplus/Defisit Laporan Operasional	272
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	273
5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	273
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	274
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	275
5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	275
5.5.5	Kenaikan / Penurunan Kas Bersih	276
5.5.6	Saldo Awal Kas	276
5.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	278
5.6.1	Ekuitas Awal	278
5.6.2	Surplus/Defisit - LO	278
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	278
5.6.4	Ekuitas Akhir	282
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN	283
BAB VII	PENUTUP	284

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	7
Grafik 2. 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha(miliar rupiah), 2020–2025	13
Grafik 2. 3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	16
Grafik 2. 4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (ribu orang), 2022–2026	10
Tabel 2.3	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Barat 2022-2025	12
Tabel 2.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kapuas Hulu, 2017–2025	14
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2021–2025	17
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021–2025	19
Tabel 2.7	Perhitungan Anggaran Belanja Pendidikan	24
Tabel 2.8	Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	25
Tabel 2.9	Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	27
Tabel 2.10	Rincian Pengadaan Pegawai TA 2023 - 2025	28
Tabel 2.11	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 - 2025	28
Tabel 2.12	Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB	29
Tabel 2.13	Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik	29
Tabel 2.14	Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok	30
Tabel 2.15	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPJMD 2021-2026	41
Tabel 2.16	Target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 RPJMD 2025-2029	42
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Tujuan (RPJMD 2021-2026)	43
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Tujuan (RPJMD 2025-2029)	44
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran (RPJMD 2021-2026)	45
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran (RPJMD 2025-2029)	46
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2021-2026	48
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2025-2029	49
Tabel 3.1	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025	53
Tabel 3.2	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Belanja Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025	55
Tabel 3.3	Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025	70
Tabel 5.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	101
Tabel 5.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	101
Tabel 5.3	Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	102
Tabel 5.4	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	106
Tabel 5.5	Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	108
Tabel 5.6	Rincian Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	109
Tabel 5.7	Rincian Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	110
Tabel 5.8	Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	112
Tabel 5.9	Rincian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	114
Tabel 5.10	Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	115
Tabel 5.11	Rincian Jasa Giro Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025	117
Tabel 5.12	Rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	118
Tabel 5.13	Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025	119

Tabel 5.14	Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025	120
Tabel 5.15	Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	122
Tabel 5.16	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025	123
Tabel 5.17	Rincian Dana Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	124
Tabel 5.18	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	124
Tabel 5.19	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	125
Tabel 5.20	Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	126
Tabel 5.21	Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	127
Tabel 5.22	Rincian Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	131
Tabel 5.23	Rincian Belanja Operasi Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	131
Tabel 5.24	Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	132
Tabel 5.25	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	133
Tabel 5.26	Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	134
Tabel 5.27	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	135
Tabel 5.28	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	136
Tabel 5.29	Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	137
Tabel 5.30	Rincian Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	139
Tabel 5.31	Rincian Belanja Barang Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	139
Tabel 5.32	Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	140
Tabel 5.33	Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	141
Tabel 5.34	Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	142
Tabel 5.35	Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	143
Tabel 5.36	Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	144
Tabel 5.37	Rincian Belanja Hibah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	146
Tabel 5.38	Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	149
Tabel 5.39	Rincian Belanja Hibah Dana BOSP Kabupaten	150
Tabel 5.40	Rincian Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	151
Tabel 5.41	Rincian Belanja Modal Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	151
Tabel 5.42	Rincian Belanja Modal Peralatan dan mesin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	152
Tabel 5.43	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	153
Tabel 5.44	Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	154
Tabel 5.45	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	154
Tabel 5.46	Rincian Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	156
Tabel 5.47	Rincian Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	157
Tabel 5.48	Rincian Surplus (Defisit) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	160
Tabel 5.49	Rincian Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	161
Tabel 5.50	Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	161
Tabel 5.51	Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024	162
Tabel 5.52	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024	165
Tabel 5.53	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025	166
Tabel 5.54	Rincian Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025	166
Tabel 5.55	Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025	167

Tabel 5.56	Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025	168
Tabel 5.57	Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025	168
Tabel 5.58	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	169
Tabel 5. 59	Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025	170
Tabel 5.60	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	170
Tabel 5.61	Rincian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan di RSUD dr.Achmad Diponegoro per 31 Desember 2025	171
Tabel 5.62	Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2025 dan 2024	172
Tabel 5.63	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025	173
Tabel 5.64	Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025	173
Tabel 5.65	Penyisihan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025	173
Tabel 5.66	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2025	174
Tabel 5.67	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025	174
Tabel 5.68	Penyisihan Piutang Pokok PBBP2 per 31 Desember 2025	174
Tabel 5.69	Rincian Penyisihan Lain-lain PAD Yang Sah- Piutang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau per 31 Desember 2025	175
Tabel 5.70	Rincian Penyisihan Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025	177
Tabel 5.71	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa Piutang Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025	178
Tabel 5.72	Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	178
Tabel 5.73	Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024	179
Tabel 5.74	Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024	179
Tabel 5.75	Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024	179
Tabel 5.76	Investasi Permanen Penyertaan pada Bank Kalbar per 31 Desember 2025 dan 2024	180
Tabel 5.77	Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024	181
Tabel 5.78	Nilai Penyertaan Modal pada Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024	182
Tabel 5. 79	Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida per 31 Desember 2025 dan 2024	183
Tabel 5.80	Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri per 31 Desember 2025 dan 2024	183
Tabel 5.81	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	184
Tabel 5.82	Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan	184
Tabel 5.83	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	186
Tabel 5.84	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024	186
Tabel 5.85	Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024	187
Tabel 5.86	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat Tahun 2025 dan 2024	187
Tabel 5.87	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan Tahun 2025	188
Tabel 5.88	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025	190
Tabel 5.89	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian Tahun 2025	190
Tabel 5.90	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025	191
Tabel 5.91	Mutasi Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2025	193
Tabel 5.92	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Studio Komunikasi, dan Pemancar	193
Tabel 5.93	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025	194
Tabel 5.94	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Tahun 2025	195
Tabel 5.95	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Peralatan Komputer Tahun 2025	196
Tabel 5.96	Rincian Belanja Modal Peralatan Komputer	196
Tabel 5.97	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Tahun 2025	198

Tabel 5.98	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi Tahun 2025	198
Tabel 5.99	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025	199
Tabel 5.100	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat Peraga Tahun 2025	200
Tabel 5.101	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu Tahun 2025 dan 2024	200
Tabel 5.102	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin -Alat Olah Raga Tahun 2025 dan 2024	201
Tabel 5.103	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum Per 31 Desember 2025 dan 2024	202
Tabel 5.104	Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Gedung	202
Tabel 5.105	Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Bangunan dan Gedung Kabupaten Kapuas Hulu TA 2024	203
Tabel 5.106	Mutasi Aset Tetap Monumen	203
Tabel 5. 107	Mutasi Aset Tetap Menara	204
Tabel 5.108	Mutasi Aset Tetap Tugu Titik Kontrol Prasasti	204
Tabel 5.109	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	206
Tabel 5.110	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025	206
Tabel 5.111	Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan	206
Tabel 5.112	Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan	207
Tabel 5.113	Biaya Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan	207
Tabel 5.114	Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air	207
Tabel 5. 115	Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi)	208
Tabel 5.116	Mutasi Aset Instalasi Per 31 Desember 2025 dan 2024	209
Tabel 5.117	Mutasi Aset Tetap Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024	210
Tabel 5.118	Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Lainnya	210
Tabel 5.119	Mutasi Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan	211
Tabel 5.120	Mutasi Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	211
Tabel 5.121	Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan, Ternak dan Tumbuhan	212
Tabel 5.122	Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	212
Tabel 5.123	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	213
Tabel 5.124	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	214
Tabel 5.125	Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024	215
Tabel 5.126	Rincian Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025	216
Tabel 5.127	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024	216
Tabel 5.128	Rincian Aset Tidak Berwujud Per SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024	216
Tabel 5.129	Mutasi Aset Lain – Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024	217
Tabel 5.130	Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD per 31 Desember 2025 dan 2024	218
Tabel 5.131	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per OPD per 31 Desember 2025	218
Tabel 5.132	Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 dan 2024	219
Tabel 5. 133	Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	220
Tabel 5.134	Mutasi Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024	220
Tabel 5. 135	Rincian Realisasi Pendapatan – LO	224
Tabel 5.136	Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO	225
Tabel 5. 137	Rincian Pendapatan Pajak – LO	225
Tabel 5. 138	Koreksi atas pendapatan pajak LO	226
Tabel 5. 139	Rincian PBJT- Jasa Perhotelan- LO	228

Tabel 5. 140	Rincian PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	228
Tabel 5. 141	Rincian PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	228
Tabel 5. 142	Rincian Pajak Reklame – LO	229
Tabel 5. 143	Rincian PBJT- Tenaga Listrik-LO	229
Tabel 5. 144	Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	230
Tabel 5. 145	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO	230
Tabel 5. 146	Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	232
Tabel 5. 147	Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	232
Tabel 5. 148	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	233
Tabel 5. 149	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO	234
Tabel 5. 150	Rincian Pendapatan Transfer – LO	236
Tabel 5. 151	Koreksi Pendapatan Transfer Pusat-LO	237
Tabel 5. 152	Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Pusat-LO	239
Tabel 5. 153	Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Antar Daerah	239
Tabel 5. 154	Rincian Beban Operasi – LO	240
Tabel 5. 155	Rincian Beban Pegawai – LO	241
Tabel 5. 156	Rincian Jenis Utang Koreksi Beban Pegawai –LO	246
Tabel 5. 157	Rincian Beban Persediaan – LO	251
Tabel 5. 158	Rincian Beban Jasa – LO	256
Tabel 5. 159	Rincian Beban Pemeliharaan – LO	263
Tabel 5. 160	Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO	263
Tabel 5. 161	Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat – LO	264
Tabel 5. 162	Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD – LO Tahun Anggaran 2025	264
Tabel 5. 163	Rincian Beban Hibah – LO	265
Tabel 5. 164	Koreksi Hibah kepada Pemerintah Pusat	266
Tabel 5. 165	Koreksi hibah kepada Pemerintah Pusat Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	266
Tabel 5. 166	Hibah persediaan diserahkan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	271
Tabel 5. 167	Rincian Beban Bantuan Sosial per Jenis Beban – LO	272
Tabel 5. 168	Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD – LO	272
Tabel 5. 169	Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO	272
Tabel 5. 170	Beban Penyusutan per Jenis Aset Tetap – LO	273
Tabel 5. 171	Rincian Beban Transfer – LO	275
Tabel 5. 172	Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024	276
Tabel 5. 173	Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025	276
Tabel 5. 174	koreksi atas pelepasan atau penghapusan aset tetap	277
Tabel 5. 175	Rincian SP2D Beban Tidak Terduga Tahun 2025	277
Tabel 5. 176	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	280
Tabel 5. 177	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	280
Tabel 5. 178	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	280
Tabel 5. 179	Rincian Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan	281
Tabel 5. 180	Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	281
Tabel 5. 181	Rincian Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	281

Tabel 5. 182	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	282
Tabel 5. 183	Rincian Perhitungan Fihak Ketiga	282
Tabel 5. 184	Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Bersih	283
Tabel 5. 185	Rincian Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS, BOP, BOK dan Kas Lainnya	284
Tabel 5. 186	koreksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	285

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa di Sekretariat Daerah
Lampiran	2	Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir
Lampiran	3	Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2
Lampiran	4	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa
Lampiran	5	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset -Tetap
Lampiran	6	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Berat
Lampiran	7	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan
Lampiran	8	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Alat Ukur
Lampiran	9	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Pertanian
Lampiran	10	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
Lampiran	11	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Lampiran	12	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat – Kedokteran dan Kesehatan
Lampiran	13	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium
Lampiran	14	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer
Lampiran	15	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
Lampiran	16	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Eksplorasi
Lampiran	17	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja
Lampiran	18	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga
Lampiran	19	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu
Lampiran	20	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Olah Raga
Lampiran	21	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum
Lampiran	22	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan –Monumen
Lampiran	23	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan –Menara
Lampiran	24	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Tugu Titik Kontrol/ Prasasti
Lampiran	25	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan
Lampiran	26	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi)
Lampiran	27	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Instalasi
Lampiran	28	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Jaringan
Lampiran	29	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan
Lampiran	30	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Lampiran	31,32,33	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan
Lampiran	34	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan
Lampiran	35	Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran	36	Pendapatan diterima dimuka pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



BUPATI KAPUAS HULU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Putussibau, 21 Mei 2026

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
2						
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	46.306.128.060,00	54.094.384.309,53	116,82	26.579.810.709,77
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.994.788.998,00	4.729.489.349,00	118,39	6.899.180.489,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	17.524.575.448,00	17.524.575.448,85	100,00	17.074.176.833,76
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	43.140.938.585,00	56.849.672.391,57	131,78	41.764.809.129,41
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)	5.1.1.1	110.966.431.091,00	133.198.121.498,95	120,03	92.317.977.161,94
8						
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	32.961.601.000,00	28.291.408.200,00	85,83	24.307.680.390,00
10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		130.620.600.000,00	134.576.737.000,00	103,03	86.863.402.000,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	943.874.692.000,00	946.039.985.059,00	100,23	997.502.079.545,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.3	253.191.074.796,00	234.146.450.729,17	92,48	300.705.764.602,00
13	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN (9 s.d. 12)	5.1.1.2.1	1.360.647.967.796,00	1.343.054.580.988,17	98,71	1.409.378.926.537,00
14						
15	Dana Desa	5.1.1.2.1.4	242.696.655.000,00	188.999.864.222,00	77,87	253.262.296.832,00
16	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.5	7.329.568.000,00	7.329.568.000,00	100,00	7.042.841.000,00
17	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA (15 + 16)	5.1.1.2.1	250.026.223.000,00	196.329.432.222,00	78,52	260.305.137.832,00
18						
19	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	54.311.060.987,00	50.380.117.963,00	92,76	54.143.592.042,00
20	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	8.302.500.000,00	5.568.879.729,00	67,07	1.580.613.000,00
21	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH (19 + 20)	5.1.1.2.2	62.613.560.987,00	55.948.997.692,00	89,36	55.724.205.042,00
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (13 + 17 + 21)	5.1.1.2	1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17	95,34	1.725.408.269.411,00
23						
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	86.953.783,00	501.374.337,78	576,60	1.053.282.442,11
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	13.660.708.391,00	13.420.227.516,00	98,24	10.492.027.869,00
26	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (24 + 25)	5.1.1.3	13.747.662.174,00	13.921.601.853,78	101,27	11.545.310.311,11
27						
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 22 + 26)	5.1.1	1.798.001.845.048,00	1.742.452.734.254,90	96,91	1.829.271.556.884,05
29						
30						
31	BELANJA DAERAH					
32						
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	772.929.895.447,00	698.419.746.937,64	90,36	628.077.888.879,00
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	358.359.339.771,00	338.154.391.659,08	94,36	392.692.858.955,72
35	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	748.800.000,00	748.800.000,00	100,00	0,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	104.677.374.220,00	100.613.676.445,27	96,12	176.714.597.658,29
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	407.200.000,00	398.902.720,00	97,96	429.850.750,00
38	JUMLAH BELANJA OPERASI (33 s.d. 37)	5.1.2.1	1.237.122.609.438,00	1.138.335.517.761,99	92,01	1.197.915.196.243,01
39						
40	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	240.000.000,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	35.094.941.049,00	34.723.736.544,00	98,94	35.193.168.507,00
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	86.988.241.000,00	86.455.438.903,73	99,39	70.599.092.543,10
43	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.3	62.564.023.471,00	61.136.012.061,00	97,72	162.423.124.362,00
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4	20.415.104.801,00	20.374.452.400,00	99,80	10.556.710.339,00
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.5	105.400.000,00	104.588.000,00	99,23	324.848.640,00
46	JUMLAH BELANJA MODAL (40 s.d. 45)	5.1.2.2	205.167.710.321,00	202.794.227.908,73	98,84	279.336.944.391,10
47						
48	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	5.500.000.000,00	3.659.746.914,00	66,54	933.056.277,00
49	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA (48)		5.500.000.000,00	3.659.746.914,00	66,54	933.056.277,00
50						
51	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	5.258.858.000,00	4.973.717.564,00	94,58	3.119.275.000,00
52	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	350.565.308.000,00	296.616.103.627,00	84,61	360.341.602.772,00
53	JUMLAH BELANJA TRANSFER (51 + 52)	5.1.2.4	355.824.166.000,00	301.589.821.191,00	84,76	363.460.877.772,00
54						
55	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49 + 53)	5.1.2	1.803.614.485.759,00	1.646.379.313.775,72	91,28	1.841.646.074.683,11
56						
57	SURPLUS/(DEFISIT) (28 - 55)	5.1.3	(5.612.640.711,00)	96.073.420.479,18	(1.711,73)	(12.374.517.799,06)
58						
59						
60	PEMBIAYAAN DAERAH					
61						
62	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	25.987.158.510,53
63	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	2.000.000.000,00
64	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (62 + 63)	5.1.4.1	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53
65						



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7
66	Penyertaan Modal Daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
67	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (66)	5.1.4.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
68						
69	PEMBIAYAAN NETTO (64 - 67)	5.1.4	5.612.640.711,00	5.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53
70						
71	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (57 + 69)	5.1.5	-	101.686.061.190,65	-	15.612.640.711,47

*) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	15.612.640.711,47	25.987.158.510,53
2	PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5.2.2	15.612.640.711,47	25.987.158.510,53
3	SUBTOTAL (1 - 2)		-	-
4	SILPA/(SIKPA)	5.2.3	101.686.061.190,65	15.612.640.711,47
5	SUBTOTAL (3 + 4)		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	-	-
7	LAIN-LAIN		-	-
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5 + 6 + 7)	5.2.5	101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

*) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	ASET	5.3.1		
2				
3	ASET LANCAR	5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	90.884.935.566,82	10.488.646.925,55
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	1.215.302,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	197.937.032,00	888,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	7.652.552.149,40	1.464.500.074,95
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.5	173.806.227,08	46.263.999,52
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.6	-	34.800.000,00
10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.7	31.336.146,35	33.829.228,45
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.8	2.745.494.069,00	3.543.384.293,00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	1.317.855.009,50	1.156.626.625,41
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	11.605.071.162,26	5.097.528.443,10
14	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11	-	-
15	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(2.624.806.401,52)	(2.707.441.241,82)
16	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.12	15.937.500,00	14.976.410,85
17	Persediaan	5.3.1.1.13	28.608.988.732,12	42.492.783.268,32
18	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 17)		140.609.107.193,01	61.667.114.217,34
19				
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
21	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
22	Dana Bergulir		862.539.000,00	862.539.000,00
23	Penyisihan Dana Bergulir		(862.539.000,00)	(862.539.000,00)
24	Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s.d. 23)		-	-
25	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
26	Penyertaan Modal		164.237.423.844,95	154.767.170.639,90
27	Jumlah Investasi Permanen (26)		164.237.423.844,95	154.767.170.639,90
28	Jumlah Investasi Jangka Panjang (24 + 27)		164.237.423.844,95	154.767.170.639,90
29				
30	ASET TETAP	5.3.1.3		
31	Tanah	5.3.1.3.1	242.777.245.472,30	242.777.245.472,30
32	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	551.124.801.215,28	500.744.877.277,01
33	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.779.716.957.329,81	1.588.697.933.685,69
34	Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	3.665.615.937.753,24	3.589.990.166.611,55
35	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	36.695.054.097,75	32.702.662.647,76
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	114.678.040.197,59	256.990.787.233,54
37	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.613.048.623.888,60)	(3.365.654.831.588,45)
38	Jumlah Aset Tetap (31 s.d. 37)		2.777.559.412.177,37	2.846.248.841.339,39
39				
40	DANA CADANGAN	6.6.1.4		
41	Dana Cadangan	6.6.1.4.1	-	-
42	Jumlah Dana Cadangan (41)		-	-
43				



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025	TAHUN 2024
44	ASET LAINNYA	6.6.1.5		
45	Tagihan Jangka Panjang	6.6.1.5.1	1.987.894.004,00	1.987.894.004,00
46	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	6.6.1.5.2	(1.987.894.004,00)	(1.987.894.004,00)
47	Aset Tidak Berwujud	6.6.1.5.3	2.015.772.082,99	1.911.184.082,99
48	Aset Lain-lain	6.6.1.5.4	284.311.083.517,04	295.121.607.903,25
49	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6.6.1.5.5	(1.373.786.734,32)	(1.184.597.132,79)
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	6.6.1.5.6	(140.655.930.335,80)	(140.418.121.029,33)
51	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	6.6.1.5.7	-	5.036.117.000,00
52	Jumlah Aset Lainnya (45 s.d. 51)		144.297.138.529,91	160.466.190.824,12
53				
54	PROPERTI INVESTASI	6.6.1.6		
55	Properti Investasi - Tanah	6.6.1.6.1	2.696.520.000,00	2.696.520.000,00
56	Properti Investasi - Gedung Bangunan	6.6.1.6.2	1.257.046.000,00	1.257.046.000,00
57	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	6.6.1.6.3	(691.375.300,00)	(659.949.150,00)
58	Jumlah Properti Investasi (55 s.d. 57)		3.262.190.700,00	3.293.616.850,00
59				
60	JUMLAH ASET (18 + 28 + 38 + 42 + 52 +58)		3.229.965.272.445,24	3.226.442.933.870,75
61				
62	KEWAJIBAN	6.6.2		
63				
64	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
65	Pendapatan Diterima Dimuka		141.040.241,39	159.805.923,34
66	Utang Belanja		27.081.779.670,19	33.537.640.585,21
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (65 s.d. 66)		27.222.819.911,58	33.697.446.508,55
68				
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
70	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
71	Utang Dalam Negeri – Obligasi		-	-
72	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (70 s.d. 72)		-	-
74	Jumlah Kewajiban (67 + 73)		27.222.819.911,58	33.697.446.508,55
75				
76	EKUITAS	6.6.3		
77				
78	Ekuitas		3.202.742.452.533,66	3.192.745.487.362,20
79				
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+78)		3.229.965.272.445,24	3.226.442.933.870,75

*) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1				
4	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	54.274.378.375,57	26.586.247.671,26	27.688.130.704,31	104,14
5	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	17.524.575.448,85	16.881.281.349,76	643.294.099,09	3,81
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	63.710.572.237,74	40.714.375.918,41	22.996.196.319,33	56,48
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO (4 s.d. 7)		140.239.015.411,16	91.081.085.428,43	49.157.929.982,73	53,97
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2				
11	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		157.832.028.200,00	92.931.358.390,00	64.900.669.810,00	69,84
13	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		946.039.985.059,00	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)	(5,16)
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		234.146.372.298,00	300.705.764.602,00	(66.559.392.304,00)	(22,13)
15	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN (12 s.d. 14)		1.338.018.385.557,00	1.391.139.202.537,00	(53.120.816.980,00)	(3,82)
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2				
18	Insentif Fiskal-LO		7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA (18)		7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
20						
21	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.3				
22	Pendapatan Bagi Hasil-LO		50.380.117.963,00	50.177.619.863,00	202.498.100,00	0,40
23	Bantuan Keuangan		5.568.879.729,00	1.580.613.000,00	3.988.266.729,00	252,32
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO (22 s.d. 23)		55.948.997.692,00	51.758.232.863,00	4.190.764.829,00	8,10
25	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO (15 + 19 + 24)		1.401.296.951.249,00	1.449.940.276.400,00	(48.643.325.151,00)	(3,35)
26						
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3				
28	Pendapatan Hibah-LO		3.650.950.837,78	1.095.272.442,11	2.555.678.395,67	233,34
29	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		13.420.227.516,00	10.492.027.869,00	2.928.199.647,00	27,91
30	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO (28 s.d. 29)		17.071.178.353,78	11.587.300.311,11	5.483.878.042,67	47,33
31	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 25 + 30)		1.558.607.145.013,94	1.552.608.662.139,54	5.998.482.874,40	0,39
32						
33	BEBAN	5.4.2				
34	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
35	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	688.032.498.678,64	628.714.818.144,42	59.317.680.534,22	9,43
36	Beban Barang	5.4.2.1.2.1	135.645.467.106,90	128.144.112.797,21	7.501.354.309,69	5,85
37	Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	127.242.072.146,27	142.805.737.747,25	(15.563.665.600,97)	(10,90)
38	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	8.299.976.710,57	10.537.389.568,97	(2.237.412.858,40)	(21,23)
39	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	65.720.932.759,00	97.338.362.189,00	(31.617.429.430,00)	(32,48)
40	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.2.5	20.639.149.282,00	28.342.358.009,00	(7.703.208.727,00)	(27,18)
41	Beban Subsidi	5.4.2.1.2	748.800.000,00	-	748.800.000,00	-
42	Beban Hibah	5.4.2.1.3	115.196.828.047,91	163.860.314.613,52	(48.663.486.565,61)	(29,70)
43	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	398.902.720,00	429.850.750,00	(30.948.030,00)	(7,20)
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	302.692.015,77	1.406.854.070,45	(1.104.162.054,68)	(78,48)
45	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	253.863.255.882,78	260.516.412.582,72	(6.653.156.699,94)	(2,55)
46	JUMLAH BEBAN OPERASI (35 s.d. 45)		1.416.090.575.349,84	1.462.096.210.472,54	(46.005.635.122,70)	(3,15)
47						
48	BEBAN TRANSFER	5.4.3				
49	Beban Bagi Hasil		4.973.717.564,00	3.119.275.000,00	1.854.442.564,00	59,45
50	Beban Bantuan Keuangan		107.616.239.405,00	107.079.305.940,00	536.933.465,00	0,50
51	JUMLAH BEBAN TRANSFER (49 s.d. 50)		112.589.956.969,00	110.198.580.940,00	2.391.376.029,00	2,17
52	JUMLAH BEBAN (46 + 51)		1.528.680.532.318,84	1.572.294.791.412,54	(43.614.259.093,70)	(2,77)
53	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI (31 - 52)		29.926.612.695,10	(19.686.129.273,00)	49.612.741.968,10	(252,02)
54						



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
55	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
56	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO					
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		607.682.519,85	326.921.531,18	280.760.988,67	85,88
58	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO (57)		607.682.519,85	326.921.531,18	280.760.988,67	85,88
59						
60	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO					
61	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.5	17.558.995.825,73	13.205.541.457,16	4.353.454.368,57	32,97
62	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO (61)		17.558.995.825,73	13.205.541.457,16	4.353.454.368,57	32,97
63	JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (58 - 62)		(16.951.313.305,88)	(12.878.619.925,98)	(4.072.693.379,90)	31,62
64	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (53 + 63)		12.975.299.389,22	(32.564.749.198,97)	45.540.048.588,19	(139,84)
65						
66	POS LUAR BIASA	5.4.5				
67	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
68	Beban Luar Biasa		3.659.746.914,00	933.056.277,00	2.726.690.637,00	292,23
69	SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA (67 - 68)		(3.659.746.914,00)	(933.056.277,00)	(2.726.690.637,00)	292,23
70						
71	SURPLUS/(DEFISIT)-LO (64 + 71)	5.4.6	9.315.552.475,22	(33.497.805.475,97)	42.813.357.951,19	(183,53)

*) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		54.094.384.309,53	26.579.810.709,77
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.729.489.349,00	6.899.180.489,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.524.575.448,85	17.074.176.833,76
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		56.637.111.391,57	41.549.639.329,41
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		21.033.664.200,00	-
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		28.291.408.200,00	24.307.680.390,00
9	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam		106.505.416.800,00	86.863.402.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		7.037.656.000,00	-
11	Penerimaan Dana Alokasi Umum		946.039.985.059,00	997.502.079.545,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		234.146.450.729,17	300.705.764.602,00
13	Penerimaan Dana Insentif Fiskal		7.329.568.000,00	7.042.841.000,00
14	Penerimaan Dana Desa		188.999.864.222,00	253.262.296.832,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		50.380.117.963,00	54.143.592.042,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		5.568.879.729,00	1.580.613.000,00
17	Penerimaan Hibah		501.374.337,78	1.053.282.442,11
18	Penerimaan Lainnya		13.420.227.516,00	10.492.027.869,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 18)		1.742.240.173.254,90	1.829.056.387.084,05
20	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2		
21	Pembayaran Pegawai		698.419.746.937,64	628.077.888.879,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa		338.154.391.659,08	392.692.858.955,72
23	Pembayaran Subsidi		748.800.000,00	-
24	Pembayaran Hibah		100.613.676.445,27	176.714.597.658,29
25	Pembayaran Bantuan Sosial		398.902.720,00	429.850.750,00
26	Pembayaran Tidak Terduga		3.659.746.914,00	933.056.277,00
27	Pembayaran Bagi Hasil		4.973.717.564,00	3.119.275.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		296.616.103.627,00	360.341.602.772,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d. 28)		1.443.585.085.866,99	1.562.309.130.292,01
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 29)		298.655.087.387,91	266.747.256.792,04
31				
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
33	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1		
34	Pencairan Dana Cadangan		-	2.000.000.000
35	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	47.971.800
36	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		182.577.000,00	139.167.000
37	Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		29.984.000,00	-
38	Penjualan Aset Lainnya		-	28.031.000
39	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 39)		212.561.000,00	2.215.169.800,00
41	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2		
42	Perolehan Tanah		-	240.000.000,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin		34.723.736.544,00	35.193.168.507,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan		86.455.438.903,73	70.599.092.543,10
45	Perolehan Jalan Jaringan dan Irigasi		61.136.012.061,00	162.423.124.362,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya		20.374.452.400,00	10.556.710.339,00
47	Perolehan Aset Lainnya		104.588.000,00	324.848.640,00
48	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
49	Penyertaan Modal Daerah		10.000.000.000,00	-
50	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s.d. 49)		212.794.227.908,73	279.336.944.391,10
51	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (40 - 50)		(212.581.666.908,73)	(277.121.774.591,10)
52				
53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
54	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1		
55	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
57	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
58	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s.d. 57)			



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025	TAHUN 2024
59	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.2		
60	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
61	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
62	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
63	Jumlah Arus Keluar Kas (60 s.d. 62)			
64	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (58 - 63)		-	-
65				
66	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
67	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1		
68	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
69	Jumlah Arus Masuk Kas (68)		97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
70	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2		
71	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
72	Jumlah Arus Keluar Kas (71)		97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
73	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (69 - 72)		-	-
74				
75	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS (30+51+64+73)	5.5.5	86.073.420.479,18	(10.374.517.799,06)
76				
77	Saldo Awal Kas	5.5.6		
78	Saldo Awal Kas di BUD & Kas Bendahara Pengeluaran		10.488.647.813,55	20.505.285.925,97
79	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		1.215.302,00	8.165.000,00
80	Saldo Awal Kas BLUD		1.464.500.074,95	1.322.334.839,61
81	Saldo Awal Kas FKTP		46.263.999,52	106.741.380,75
82	Saldo Awal Kas BOSP dan Kas Lainnya BOS		68.629.228,45	74.132.505,20
83	Saldo Awal Kas- BOK		3.543.384.293,00	3.970.498.859,00
84	Jumlah Saldo Awal (77 s.d. 83)		15.612.640.711,47	25.987.158.510,53
85				
86	SALDO AKHIR KAS (75 + 84)		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

*) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	3.192.745.487.362,20	3.486.783.525.512,67
2	SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.6.2	9.315.552.475,22	(33.497.805.475,97)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR (4 s.d. 17)	5.6.3	681.412.696,24	(260.540.232.674,49)
4	Koreksi Ekuitas - Kas		(86.363,10)	-
5	Koreksi Ekuitas - Piutang		-	142.894.565,16
6	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		0,01	(25.820,00)
7	Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka		-	-
8	Koreksi Ekuitas - Persediaan		31.019.854,55	(6.122.043,25)
9	Koreksi Ekuitas - Investasi		-	-
10	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		89.704.958,86	(1.644.754.781,18)
11	Koreksi Ekuitas - Penyusutan Aset Tetap		489.174.891,92	(256.977.377.596,51)
12	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		-	(389.142.204,01)
13	Koreksi Ekuitas - Penyusutan Aset Lainnya		-	(3.061.241.140,97)
14	Koreksi Ekuitas - Kewajiban		71.599.354,00	1.395.536.346,27
15	Koreksi Ekuitas - Lainnya		-	-
16	Koreksi Nilai Pendapatan LO		-	-
17	Lain-Lain		-	-
	EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)	5.6.4	3.202.742.452.533,66	3.192.745.487.362,20

*) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- t. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro Kabupaten Kapuas Hulu
 - 2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.2. Angka Kemiskinan
 - 2.1.3. Angka Pengangguran
 - 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.5. Pendapatan Per Kapita

- 2.1.6. *Mandatory Spending*
- 2.1.7. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
- 2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Neraca
 - 5.4 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Operasional
 - 5.5 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Arus Kas
 - 5.6 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO KABUPATEN KAPUAS HULU

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Capaian kinerja makro Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Selisih
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,77	69,24	0,47%
2.	Angka Kemiskinan	7,40%	6,86%	(0,54%)
3.	Angka Pengangguran	2,18%	2,09%	(0,09%)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,75%	4,77%	(0,02%)
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp53,96 Juta	Rp57,83 Juta	Rp3,87 Juta

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

Penjelasan atas capaian kinerja makro Kabupaten Kapuas Hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2021-2035, penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 berjumlah 5.695,48 ribu jiwa sementara penduduk Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 269,05 ribu jiwa. Tiga urutan kabupaten/kota yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya yang masing-masing jumlahnya 686,02 ribu jiwa, 661,45 ribu jiwa dan 660,37 ribu jiwa, adapun rincian data tersebut terlihat pada Grafik sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (ribu orang), 2022–2026

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	641,27	648,18	654,91	661,45	667,83
Bengkayang	294,50	298,98	303,42	307,82	312,15
Landak	407,99	413,59	419,09	424,47	429,74
Mempawah	308,80	312,79	316,73	320,63	324,46
Sanggau	497,28	503,94	510,41	516,71	522,80
Ketapang	584,95	592,52	599,89	607,05	614,00
Sintang	432,21	438,02	443,68	449,21	454,58
Kapuas Hulu	258,99	262,40	265,77	269,05	272,26
Sekadau	216,86	219,72	222,51	225,22	227,87
Melawi	235,67	239,50	243,25	246,92	250,49

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kayong Utara	130,59	132,86	135,09	137,29	139,48
Kubu Raya	628,56	639,25	649,87	660,37	670,76
Kota Pontianak	669,85	675,47	680,85	686,02	690,97
Kota Singkawang	242,18	246,11	250,00	253,81	257,57
Kalimantan Barat	5.549,70	5.623,33	5.695,48	5.766,03	5.834,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Pada tahun 2021, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami kontraksi karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terguncangnya perekonomian di Kalimantan Barat. Namun sejak tahun 2022, kabupaten/kota di Kalimantan Barat mulai membangun kembali perekonomiannya yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,80 persen tahun 2022, 5,07 persen tahun 2023, dan 4,46 persen pada tahun 2024. Selanjutnya untuk tahun 2025 PDRB Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 4,90 persen. Hasil sementara penghitungan PDRB menunjukkan dari 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat pada tahun 2025, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB terbesar, yaitu masing-masing 6,62 persen; 5,06 persen; dan 5,03 persen. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki laju PDRB sebesar 4,75 persen.

Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021-2025 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Barat memiliki 366,77 ribu penduduk miskin, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 367,89 ribu penduduk miskin. Selanjutnya perubahan banyak penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan dan penurunan hingga mencapai 336,08 penduduk miskin di tahun 2025. Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten/ kota yang memiliki penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 46,59 ribu penduduk miskin, disusul Kabupaten Sambas sebanyak 35,87 ribu penduduk miskin, dan Kabupaten Landak sebanyak 35,38 ribu penduduk miskin. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu menempati urutan ke-6 yang memiliki penduduk miskin paling sedikit seKalimantan Barat dengan penduduk miskin ada sebanyak 20,77 ribu penduduk.

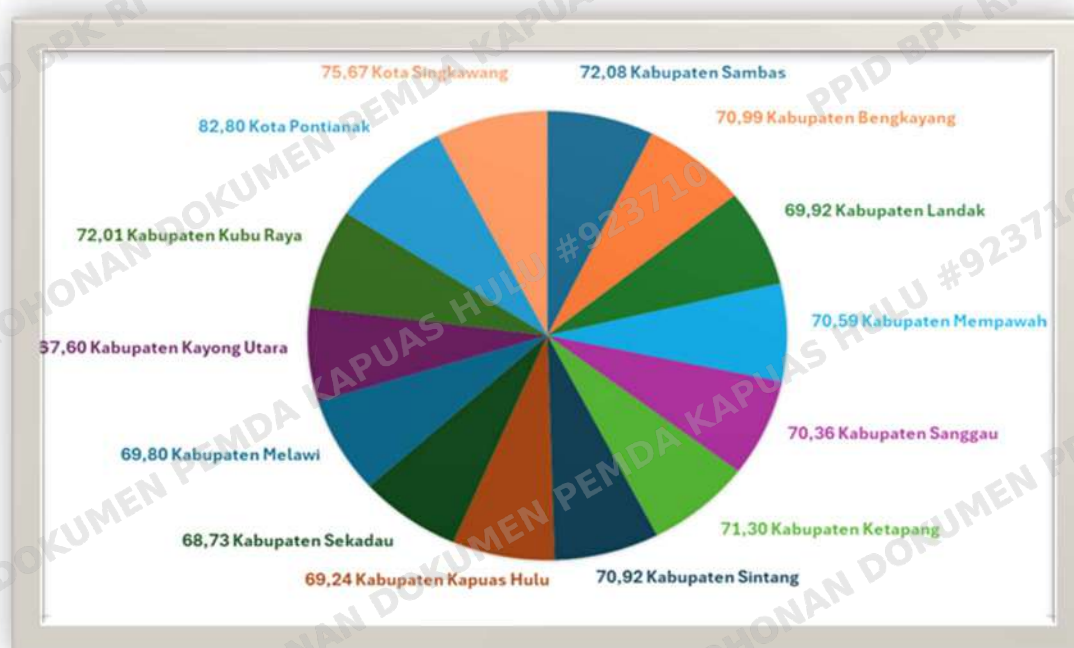
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2021-2025 selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025, angka IPM Provinsi Kalimantan Barat mencapai 72,09. Berdasarkan kabupaten/kota, IPM tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 82,80; diikuti posisi kedua Kota Singkawang sebesar 75,67; posisi ketiga Kabupaten Sambas sebesar 72,08; posisi keempat Kabupaten Kubu Raya 72,01; posisi kelima Kabupaten Ketapang 71,30; posisi keenam Kabupaten Bengkayang 70,99; posisi ketujuh Kabupaten Sintang 70,92; posisi kedelapan Kabupaten Mempawah 70,59; posisi kesembilan Kabupaten Sanggau 70,36; posisi kesepuluh Kabupaten Landak 69,92; posisi kesebelas Kabupaten Melawi 69,80; posisi keduabelas Kabupaten Kapuas Hulu 69,24; posisi ketigabelas Kabupaten Sekadau 68,73 serta posisi keempat belas Kabupaten Kayong Utara 67,60 adapun rincian data tersebut terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Barat 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Kota Pontianak	81,10	81,63	82,22	82,80
Kota Singkawang	73,66	74,13	74,68	75,67
Kabupaten Sambas	69,88	70,60	71,20	72,08
Kabupaten Kubu Raya	69,83	70,50	71,14	72,01
Kabupaten Ketapang	68,86	69,61	70,34	71,30
Kabupaten Bengkayang	68,74	69,53	70,30	70,99
Kabupaten Sintang	68,59	69,39	70,13	70,92
Kabupaten Mempawah	67,91	68,91	69,63	70,59
Kabupaten Sanggau	67,87	68,73	69,40	70,36
Kabupaten Landak	67,28	68,22	69,13	69,92
Kabupaten Melawi	66,99	67,92	68,81	69,80
Kabupaten Kapuas Hulu	66,91	67,86	68,77	69,24
Kabupaten Sekadau	66,13	66,83	67,74	68,73
Kabupaten Kayong Utara	65,09	66,06	67,05	67,60
Kalimantan Barat	69,71	70,47	71,19	72,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2022-2025

Grafik : 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2025

2.1.2 Angka Kemiskinan

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan tren yang secara umum menurun, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Hal ini tercermin dari perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin, serta peningkatan nilai garis kemiskinan dari tahun ke tahun.

Garis kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan secara konsisten, dari sebesar 384.275 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi 579.450 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya standar kebutuhan minimum masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, pada periode 2017–2019 terjadi peningkatan, yaitu dari 23,96 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 25,22 ribu jiwa pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 23,93 ribu jiwa, meskipun pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 24,03 ribu jiwa.

Selanjutnya, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 23,43 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 19,47 ribu jiwa pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah serta efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dari 9,62 persen pada tahun 2019 menjadi 6,86 persen pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara relatif terhadap jumlah penduduk.

Meskipun demikian, peningkatan nilai garis kemiskinan yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat semakin meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan berpotensi kembali menjadi miskin apabila terjadi guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau penurunan pendapatan.

Dalam perspektif tersebut, meskipun kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan capaian yang positif, tetap diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terarah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga perlu diarahkan pada pengurangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi produktif, serta peningkatan akses terhadap layanan

dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan penurunan tingkat kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.4 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kapuas Hulu, 2017–2025

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Number of Poor People (thousand people)	Persentase Penduduk Miskin (%) Percentage of Poor People (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	384.275	23,96	9,45
2018	430.652	24,76	9,60
2019	452.471	25,22	9,62
2020	465.360	23,93	8,99
2021	481.826	24,03	8,93
2022	508.087	23,43	8,59
2023	543.301	22,59	8,16
2024	572.644	20,77	7,40
2025	579.450	19,47	6,86

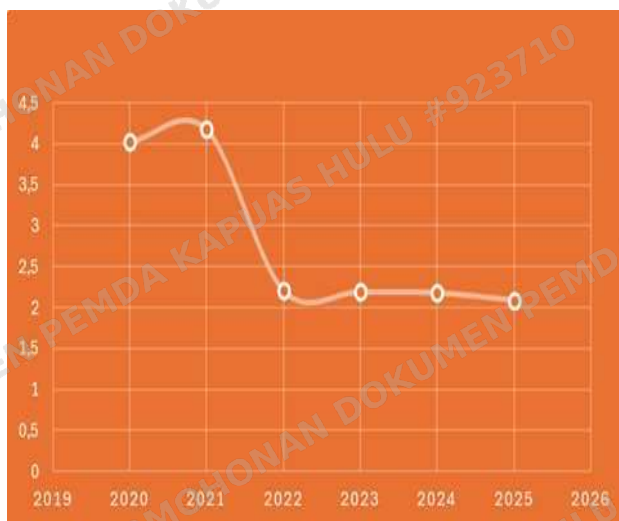
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan data resmi BPS Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 27 Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- pengangguran adalah
 - penduduk yang aktif mencari pekerjaan
 - penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
 - penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
 - kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

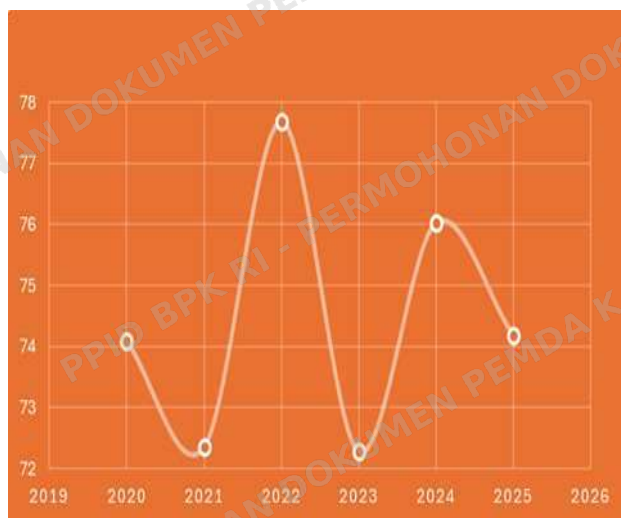
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2025



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas Hulu	
Tahun	Total
2020	4,02
2021	4,18
2022	2,21
2023	2,19
2024	2,18
2025	2,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2025

Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2025



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kapuas Hulu	
Tahun	Total
2020	74,09
2021	72,35
2022	77,68
2023	72,28
2024	76,02
2025	74,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2025

2.1.4 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perekonomian daerah dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha (sektoral) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan). Selain itu, PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan, dengan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sehingga mencerminkan kemampuan ekonomi nominal suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga.

PDRB Kabupaten Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 tercatat sebesar 15.561,58 miliar rupiah. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor konstruksi menempati posisi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3.582,12 miliar rupiah, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3.524,03 miliar rupiah. Dominasi kedua sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan fisik dan pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Pada kelompok berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1.835,36 miliar rupiah, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 1.587,25 miliar rupiah. Keberadaan sektor perdagangan yang cukup besar mencerminkan tingginya aktivitas distribusi barang dan jasa, sementara kontribusi industri pengolahan menunjukkan adanya potensi pengembangan hilirisasi, meskipun perannya masih belum dominan.

Sektor pertambangan dan penggalan serta sektor administrasi pemerintahan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 1.124,04 miliar rupiah dan 1.094,87 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa selain sektor riil, aktivitas pemerintahan juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, terutama melalui belanja pemerintah.

Sementara itu, sektor-sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan real estat memberikan kontribusi pada kelompok menengah, yang masing-masing berada di bawah 700 miliar rupiah. Kontribusi ini mencerminkan mulai berkembangnya sektor jasa dalam mendukung aktivitas ekonomi, meskipun belum menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, serta jasa perusahaan masih memiliki kontribusi yang relatif terbatas. Demikian pula sektor utilitas seperti pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air yang menunjukkan kontribusi paling kecil terhadap PDRB.

Struktur tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, khususnya sektor konstruksi dan sektor berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi ekonomi daerah masih terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ketergantungan terhadap sektor dominan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya strategis untuk mendorong pengembangan sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti industri pengolahan dan sektor jasa

modern. Penguatan diversifikasi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, mengurangi risiko ketergantungan sektoral, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Adapun rincian data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha terlihat pada tabel dan grafik berikut ini

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2021–2025

	Lapangan Usaha <i>Industry</i>	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.535,35	2.774,05	2.869,18	3.254,84	3.524,03
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	869,87	920,69	930,98	1.021,46	1.124,04
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.267,90	1.409,87	1.417,18	1.498,14	1.587,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,59	0,64	0,75	0,78	0,82
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	9,78	10,36	11,05	11,88	12,50
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.589,17	2.793,11	3.021,06	3.195,35	3.582,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.119,21	1.342,10	1.554,79	1.713,17	1.835,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	148,78	206,86	249,85	272,33	298,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	189,28	217,73	251,30	273,04	289,46
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	438,41	473,39	522,05	567,00	619,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	156,60	170,87	185,68	194,32	202,27
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	248,41	255,48	290,73	321,19	342,44

	Lapangan Usaha Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	47,53	55,87	66,67	71,72	74,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	804,74	837,40	933,92	1.031,17	1.094,87
P	Jasa Pendidikan/Education	338,42	370,06	406,41	448,08	469,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	243,17	270,21	339,43	364,85	394,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	64,72	78,40	93,32	102,45	110,56
Produk Domestik Regional Bruto		11.071,94	12.187,10	13.144,36	14.341,78	15.561,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Grafik : 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas
Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah), 2020–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,77 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap tumbuh secara stabil.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 9,48 persen, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,04 persen, serta sektor pertambangan dan penggalan sebesar 7,78 persen. Pertumbuhan tinggi pada sektor konstruksi mencerminkan masih kuatnya aktivitas pembangunan, sedangkan sektor informasi dan komunikasi menunjukkan meningkatnya peran digitalisasi dalam perekonomian.

Sektor lain seperti transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan, jasa lainnya, serta perdagangan juga mencatat pertumbuhan yang cukup baik, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas distribusi dan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami pertumbuhan relatif rendah, antara lain industri pengolahan, jasa keuangan, jasa perusahaan, serta jasa pendidikan. Selain itu, sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama hanya tumbuh sebesar 1,38 persen, yang menunjukkan adanya perlambatan pada sektor berbasis sumber daya alam.

Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pergeseran sumber pertumbuhan dari sektor tradisional menuju sektor konstruksi, pertambangan, dan jasa. Namun demikian, peran industri pengolahan masih belum optimal sebagai sumber nilai tambah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pemerataan pertumbuhan antar sektor melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan kualitas sektor jasa, sehingga tercipta struktur ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan berdaya tahan. Adapun rincian data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 terlihat pada tabel dan grafik sebagai ini.

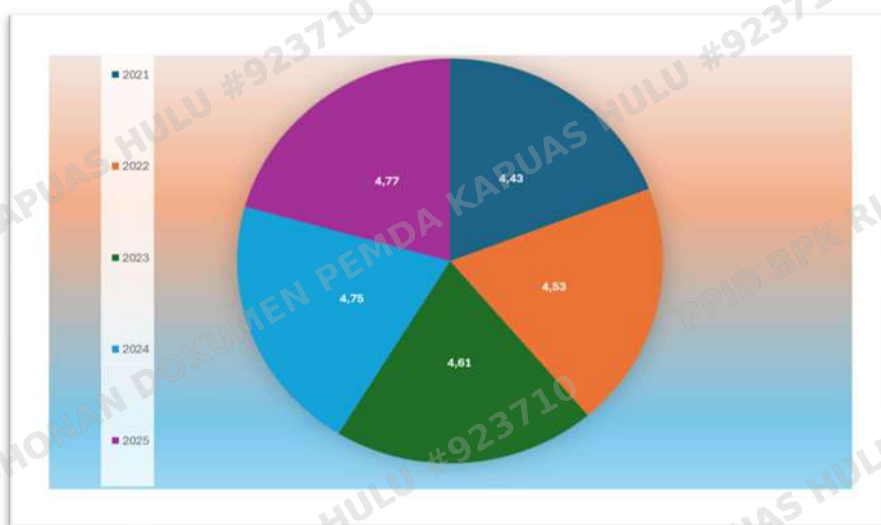
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021–2025

	Lapangan Usaha Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2,24	2,77	0,43	3,63	1,38
B	Pertambangan dan Penggalan/Mining and Quarrying	1,84	1,90	-0,96	5,59	7,78
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,16	4,26	2,16	3,92	2,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-0,14	4,91	14,04	3,98	3,88

	Lapangan Usaha Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,93	5,63	5,95	5,31	2,37
F	Konstruksi/Construction	8,13	0,84	3,33	2,74	9,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,56	13,44	9,68	5,79	5,10
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-7,72	25,43	6,54	5,13	6,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	8,24	12,44	11,73	5,98	4,27
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	6,09	7,77	9,33	7,28	9,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	2,72	6,21	8,67	3,15	2,13
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,82	0,60	13,15	7,26	5,08
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,38	12,12	14,92	4,49	2,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-0,78	-1,61	5,33	7,54	2,69
P	Jasa Pendidikan/Education	4,74	6,15	7,84	8,06	2,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	27,15	7,18	20,12	5,90	6,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	1,34	13,94	14,85	6,69	6,04
Produk Domestik Regional Bruto		4,43	4,53	4,61	4,75	4,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Grafik : 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

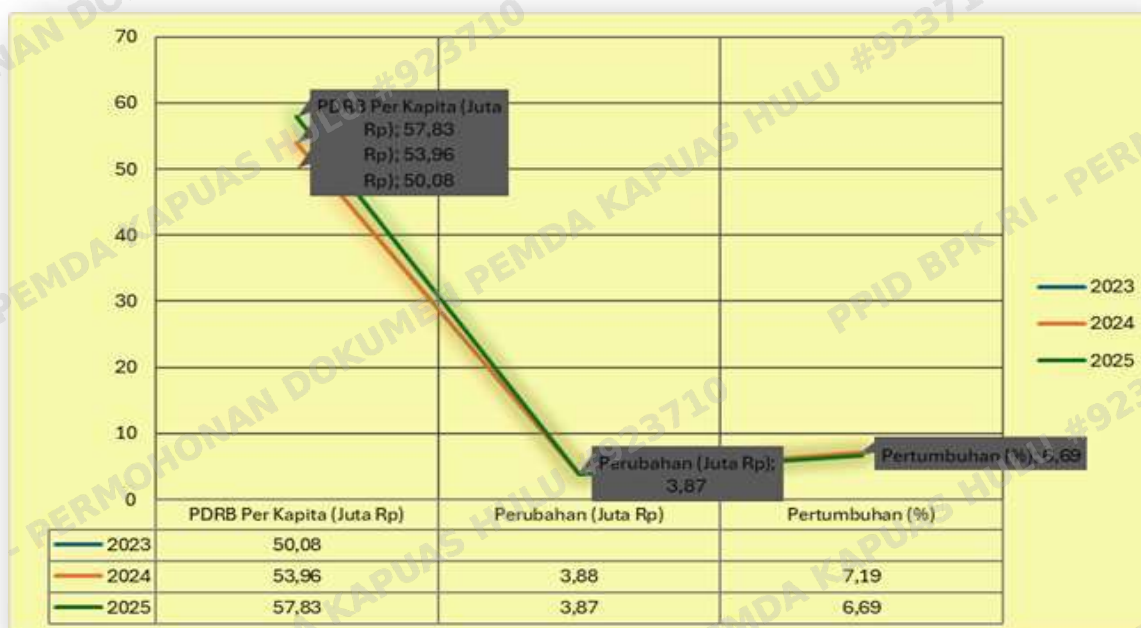
Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat di suatu daerah. Dalam pengukurannya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, di mana salah satu yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi per penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran umum mengenai kemampuan ekonomi masyarakat, meskipun tidak secara langsung mencerminkan distribusi pendapatan antar penduduk.

Dalam dokumen ini, data PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang dipublikasikan pada tanggal 27 Februari 2026. Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode yang bersangkutan.

Selama periode tahun 2023–2025, PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp50,08 juta, meningkat menjadi Rp53,96 juta pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp57,83 juta pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 7,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik : 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Periode 2023-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

Peningkatan PDRB per kapita tersebut menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pendapatan yang dihasilkan per penduduk, yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, tren ini mencerminkan perbaikan kapasitas ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, peningkatan PDRB per kapita tidak serta merta menunjukkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengingat indikator ini bersifat rata-rata dan belum memperhitungkan aspek distribusi pendapatan. Selain itu, dinamika PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk dan kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan.

Secara historis, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu sempat mengalami tekanan pada periode pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup baik, yang mengindikasikan semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah.

2.1.6 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah alokasi belanja yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, serta agar APBD fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD TA berkenaan, di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk TPG, TKG, Tamsil Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- d. Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - 1) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - 2) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha;
 - 3) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.
 - 4) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10%

(sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.

Dalam Penyusunan APBD TA. 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan Belanja atau Pengeluaran wajib (*mandatory spending*) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Belanja wajib tersebut meliputi:

a. Anggaran Belanja Pendidikan

Anggaran Belanja Pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan terealisasi sebesar 28,28% dari Belanja Daerah, melebihi yang diamanatkan sebesar 20%. Perhitungan Anggaran Belanja Pendidikan memedomani Penandaan Belanja Wajib berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rincian perhitungan Anggaran Belanja Pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perhitungan Anggaran Belanja Pendidikan

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	497.941.802.168	503.984.987.646	460.110.532.345
2	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.100.705.000	756.433.000	391.552.320
3	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	263.170.000	114.185.000	112.210.500
4	1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	60.500.000	178.238.600	177.952.050
5	1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48.797.500	24.780.000	23.847.600
6	2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	123.973.500	100.262.500	100.153.520
7	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	959.197.680	976.449.180	963.392.497
8	2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	-	-	-
9	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.143.750.000	3.396.032.000	3.379.248.839
10	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	112.881.000	94.480.000	92.884.936

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
11	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	266.000.000	72.650.000	72.650.000
12	4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD	110.138.000	60.878.000	60.413.000
13	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	60.000.000	60.000.000	59.674.000
14	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	51.200.000	-	-
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (Rp.)		504.242.114.848	509.819.375.926	465.544.511.607
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)		1.887.255.875.100	1.803.614.485.759	1.646.412.093.713
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)		26,72%	28,27 %	28,28%

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD TA berkenaan, di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terealisasi sebesar 24,28% dari Belanja Daerah, kurang dari yang diamanatkan sebesar 40%. Perhitungan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik memedomani Penandaan Belanja Wajib berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rincian perhitungan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	31.473.615.752	35.087.814.854	34.839.498.778
2	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	114.104.320.140	112.608.285.288	59.458.561.211
3	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	219.963.197.664	153.029.759.464	150.562.791.839
4	1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.926.086.100	7.548.276.073	7.503.067.272
5	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.577.882.400	2.088.141.684	2.075.939.794
6	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	486.669.400	605.786.350	595.964.121
7	1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	415.700.200	332.784.777	316.929.449
8	2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	2.218.739.900	1.510.543.875	1.500.889.267

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
9	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.792.748.900	1.461.477.761	1.383.913.773
10	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.414.991.955	752.678.071	733.278.007
11	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	3.014.151.800	3.536.764.872	3.521.534.284
12	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.097.131.350	1.069.403.976	1.049.855.037
13	2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	433.795.100	484.121.384	477.432.171
14	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	815.545.000	721.451.926	718.034.255
15	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.262.874.700	1.493.784.982	1.452.532.448
16	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	465.091.000	483.727.408	449.042.430
17	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	5.895.813.496	2.070.861.590	2.034.625.498
18	3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	27.386.759.775	28.371.874.715	25.170.484.697
19	4.01.2.10.2.21.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	11.901.376.345	13.668.650.275	13.519.053.409
20	4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD	6.329.946.800	5.876.576.925	5.563.508.562
21	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.427.535.400	2.512.762.921	2.486.602.595
22	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.128.179.964	2.261.698.850	2.067.356.042
23	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.722.164.970	1.804.526.947	1.639.432.004
24	5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	643.093.750	641.606.216	616.039.081
25	5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	515.366.600	404.877.104	399.893.128
26	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.975.966.285	1.041.104.869	1.022.382.829
27	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	856.357.200	624.584.885	601.075.390
28	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	740.278.800	506.254.977	439.433.908
29	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BIKI	227.805.000	197.456.913	190.629.146
30	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS	251.169.700	169.910.141	169.683.385
31	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN EMBALOH HILIR	232.947.000	173.302.553	173.276.496
32	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN EMBALOH HULU	161.764.400	106.278.344	104.846.264
33	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BUNUT HILIR	277.631.724	230.760.233	223.689.483
34	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN BOYAN TANJUNG	335.646.700	185.800.122	175.844.215
35	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BUNUT HULU	218.654.200	137.242.812	134.779.848
36	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH	293.390.800	219.680.141	218.838.368
37	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN JONGKONG	267.301.980	214.648.006	213.313.500
38	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN PENGKADAN	328.386.800	298.271.510	280.703.706
39	7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN HULU GURUNG	288.011.232	262.877.165	249.907.697
40	7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN SELIMBAU	307.977.900	240.048.087	235.877.683
41	7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN BADAU	156.908.800	118.760.909	118.267.378
42	7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BATANG LUPAR	211.529.276	187.359.090	183.423.212
43	7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN EMPANANG	165.999.000	148.318.860	146.274.912
44	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN PURING KENCANA	184.849.600	157.404.455	156.451.597
45	7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN SEMITAU	390.427.200	294.213.498	293.665.442

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
46	7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN SUHAID	205.248.000	154.022.037	153.554.177
47	7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG	166.992.000	121.823.233	120.803.900
48	7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN SILAT HILIR	272.676.900	226.828.013	218.853.760
49	7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SILAT HULU	158.577.400	144.689.276	144.238.510
50	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	473.444.550	390.572.319	383.587.179
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)		461.562.720.908	386.980.450.736	326.489.661.135
TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR BELANJA TRANSFER (Rp.)		1.525.086.700.100	1.447.790.319.759	1.344.822.272.522
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)		30,26%	26,73%	24,28%

c. **Alokasi Anggaran Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk TPG, TKG, Tamsil Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Anggaran Belanja Pegawai terealisasi sebesar 37,40% dari Belanja Daerah, melebihi yang diamanatkan sebesar 30%, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

No.	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
a.	Total Belanja Daerah dalam APBD	1.887.255.875.100	1.803.614.485.759	1.646.412.093.713
b.	Belanja Pegawai	760.863.905.612	772.929.895.447	698.419.746.938
c.	<i>Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)</i>	<i>76.438.166.000</i>	<i>78.641.918.500</i>	<i>67.399.351.137</i>
d.	<i>Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG)</i>	<i>19.727.421.000</i>	<i>19.746.642.600</i>	<i>13.194.977.219</i>
e.	<i>Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru</i>	<i>4.468.750.000</i>	<i>4.468.750.000</i>	<i>1.443.972.500</i>
f.	<i>Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN</i>	-	<i>630.252.000</i>	<i>630.252.000</i>
g.	Belanja Pegawai diluar belanja untuk TPG, TKG, Tamsil Guru & Tunjangan Khusus Dokter Spesialis $g = b - (c+d+e+f)$	660.229.568.612	669.442.332.347	615.751.194.082
h.	Persentase (%) Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dalam APBD, $h = (g / a) \times 100\%$	34,98%	37,12%	37,40%

Perhitungan mandatory spending Belanja Pegawai belum dilakukan oleh Pemerintah Kapuas Hulu baik pada saat penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD TA 2025. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan tren Belanja Pegawai dari TA 2023 hingga TA 2025. Adanya kebijakan pusat untuk mendorong penuntasan tenaga honorer menjadi penyebab meningkatnya tren penerimaan pegawai selama 2023 – 2025. Kondisi ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2.10 Rincian Pengadaan Pegawai TA 2023 - 2025

Jabatan	2023			2024			2025		
	CPNS	PPPK	Jumlah	CPNS	PPPK	Jumlah	CPNS	PPPK	Jumlah
Teknis		12	12		152	152	122	1385	1507
Nakes		160	160		538	538	41	166	207
Guru		108	108		896	896	0	350	350
	0	280	280	0	1586	1586	163	1901	2064

Peningkatan penerimaan pegawai selama 2023 – 2025 menyebabkan meningkatnya anggaran dan realisasi Belanja Pegawai hingga 37,40% di TA 2025. Adapun peningkatan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai selama 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 - 2025

Tahun	Anggaran	Realisasi s.d. Akhir Tahun
2023	562,013,334,092,00	534.539.096.164,00
2024	641.303.597.728,00	628.077.888.879,00
2025	772.929.895.447,00	698.419.746.937,64
2026	819.837.109.097,00	

d. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari sebagai berikut:

1. Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB terealisasi sebesar 31,63 % dari Pendapatan Opsen PKB, melebihi yang diamanatkan sebesar 10%, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB

No.	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.170.960.000	-	-
2	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	-	2.588.819.922	2.588.819.922
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN OPSEN PKB (Rp.)			2.170.960.000	2.588.819.922	2.588.819.922
TOTAL PENDAPATAN OPSEN PKB			4.500.000.000	7.337.699.000	8.185.727.500
PERSENTASE ALOKASI OPSEN PKB (MINIMAL 10%)			48,24%	35,28%	31,63%

2. Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha. Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik terealisasi sebesar 11,25 % dari Pendapatan PBJT atas Tenaga Listrik, melebihi yang diamanatkan sebesar 10 %, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

No.	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	600.000.000	783.834.655	777.761.891
2	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	585.000.000	611.489.000	611.284.786
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PBJT-TL (Rp.)			1.185.000.000	1.395.323.655	1.389.046.677

No.	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
TOTAL PENDAPATAN PBJT-TL (Rp.)			11.850.000.000	11.850.000.000	12.344.420.197
PERSENTASE ALOKASI PBJT-TL (MINIMAL 10%)			10,00%	11,77%	11,25%

3. Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok. Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok terealisasi sebesar 72,44 % dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, melebihi yang diamanatkan sebesar 50 %, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok

No.	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6.961.466.400	7.270.334.400	6.849.393.605
2	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	5.276.750.000	5.276.247.402
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			6.961.466.400	12.547.084.400	12.125.641.007
TOTAL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			10.611.119.200	20.397.512.788	16.738.118.821
TOTAL PERSENTASE ALOKASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (MINIMAL 50%)			65,61%	61,51%	72,44%

4. Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu tidak menganggarkan Pendapatan pajak Air tanah karena tidak ada potensi penerimaan di Tahun Anggaran 2025, sehingga Anggaran Belanja

Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah juga tidak di anggarakan.

2.1.7 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran, Analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indicator dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 – Semester I 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 2) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer
- 3) Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah
- b. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan target Tahun 2024 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2024 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dapat diproyeksikan dari sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya.

- 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan target Tahun 2024 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2024 maka Pendapatan Transfer Tahun 2025 diproyeksikan dari sumber-sumber Pendapatan Transfer berdasarkan obyek pendapatannya

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kapuas Hulu target Tahun 2024 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2024 maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 diproyeksikan dari sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan obyek pendapatannya dari Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD

- 4) Upaya-upaya Dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

- a) Pembaruan database pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;
- b) Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c) Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan Pendapatan Transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lainlain pendapatan daerah yang sah secara intensif;

- e) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

1) Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, serta untuk Akselerasi Pertumbuhan ekonomi dan Penguatan Kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan belanja Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pelayanan publik, selain itu juga kebijakan daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- a) Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
- b) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas pendidikan serta pemenuhan tenaga pendidik.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun

peningkatan kapasitas.

- e) Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pembukaan daerah yang terisolir serta konektivitas antar daerah.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 bahwa Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, yaitu meliputi:

- a) Belanja Operasi.

Kebijakan untuk belanja operasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Belanja Pegawai
- (2) Belanja Barang dan Jasa
- (3) Belanja Hibah
- (4) Belanja Bantuan Sosial

- b) Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja, terdiri atas: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap lainnya, Belanja Aset lainnya,
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c) Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan untuk Belanja Tak Terduga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Belanja tak terduga tahun 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan dengan kualifikasi antara lain: tidak dapat diprediksi sebelumnya; di luar kendali pemerintah daerah; apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah; apabila ditunda akan menimbulkan kerugian serta berdampak langsung bagi masyarakat dan amanat peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi bencana alam dan bencana non alam; bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai: keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; keperluan mendesak; dan/atau pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPASKPD
- (5) Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi, maka menggunakan: dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dikelompokkan atas jenis:

e) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025.

Struktur pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan akan diarah dalam beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat, kehati-hatian dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2024, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
 - c) Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus menutup defisit anggaran di dalam APBD.

- d) Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
- e) Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adanya pengeluaran berupa Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Putussibau (Bank Kalbar).

2.2.4 Strategi Pencapaian

Kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025. Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan mendorong peran serta fungsi dari Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan pendapatan;
- 2) Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi serta sinkronisasi regulasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Mengembangkan pengelolaan aset dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah;
- 6) Penyempurnaan terhadap sistem administrasi untuk peningkatan kinerja pendapatan daerah;
- 7) Terobosan serta promosi yang gencar terhadap pemanfaat pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- 8) Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah Strategi Pencapaian target belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- 9) Melakukan optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
- 10) Kontrol secara berkala terhadap penyerapan anggaran dimasingmasing Perangkat Daerah;
- 11) Pemanfaatan secara tepat guna teknologi informasi dalam pelaksanaan anggaran;
- 12) Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pembiayaan daerah, yaitu:
- 13) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah agar berimplikasi terhadap target penerimaan PAD;
- 14) Pelampauan terhadap penerimaan pembiayaan, apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan

2.3 TARGET KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Kapuas Hulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen dan kesepakatan antara Bupati Kapuas Hulu dengan para Kepala Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yg disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap-tiap sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026. Selain itu, pada tahun 2025 juga terdapat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 memuat 2 (dua) perjanjian kinerja dengan berpedoman RPJMD 20021-2026 dan RPJMD 2025-2029 yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

No	Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2025
1.	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
2.	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja Sama Antar Umat Beragama	2	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	86
3.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	3	Indeks Resiko Bencana	118,9
4.	Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah	4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	78
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,40%
		6	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40%
		7	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78%
		8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,53%
6	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri	9	Jumlah Desa Mandiri	61 desa
7.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	10	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	38,45%
8.	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	11	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	19,99%
9.	Meningkatnya Investasi Daerah	12	Nilai Realisasi Investasi	615,63 milyar
10.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing	13	Persentase Usaha Mikro	93,52%
		14	Persentase Koperasi Aktif	48,25%
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,96
12.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	16	Persentase RDTR	52,17%
13.	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	17	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92 tahun
14.	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	18	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun
15.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	19	Angka Harapan Hidup	73,35 tahun
16.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	20	Pengeluaran Perkapita (000 Rp/Kapita/Thn)	7.842
17.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21	Nilai SAKIP	BB

No	Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2025
18.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9
19.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	23	Opini BPK	WTP
20.	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	24	Predikat SPBE	Baik
21.	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	25	Predikat KIP	Informatif
22.	Meningkatnya Maturitas SPIP	26	Level Maturitas SPIP	3

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.16 Target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 RPJMD 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kondisivitas Wilayah	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	100
		Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang di Lestarkan	100
		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,44
3	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata	PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,14
		PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,875
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,4
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2,51
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	8
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,38
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	128,21
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,66
10	Terjaminnya Ketersediaan Pangan Sebagai Kebutuhan Dasar	Indeks Ketahanan Pangan	74,44
		Harapan Lama Sekolah	12,25
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,12
		Indeks Pembangunan Literasi	56,37
12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	8.770
13	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	63,96
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Efektif, Informatif dan Kolaboratif	Predikat Pemerintahan Digital	Baik
		Predikat KIP	Informatif
		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,26

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
		Indeks Sistem Merit	76,93
16	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Tertib, Profesional dan Berintegritas	Nilai Survei Penilaian Integritas	71,98
		Level Maturitas SPIP Terintegrasi	3,01
		Opini BPK	WTP
		Indeks Kearsipan Daerah	83,63
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,9
18	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas di Kapuas Hulu	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,28

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

2.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029, berdasarkan target perjanjian kinerja pada Tahun 2025, maka perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Tujuan (RPJMD 2021-2026)

No	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					2024	Target	Capaian	%	Target
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31		97			96,08	
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi								
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	4,75	4	4,77	119,25	5	95,4
2.2	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	36,69	21,94	41,01	186,91	24,1	170,15
2.3	1. Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,4	7,33	6,86	106,41	7,08	103,11
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	2,18	3,17	2,09	134,07	3	130,33
2.4	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sedang	100	Baik	100
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	68,77	68,66	69,24	100,84	69,17	100,1

D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	BB	B			BB	
4.2	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	71,79	80,92			83,83	
E	MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat								
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Score	0	83,5	79,5	82,78	104,13	82,5	100,34
Rata-Rata Capaian Kinerja							85,16		79,94

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Tujuan (RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Berbudaya, Sosial dan Keamanan							
1.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	NA	71	100.00	140.85	75	133.33
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan							
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.75	4.72	4.77	101.06	5.12	93.16
2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	kriteria	Baik	Baik	Sedang	100.00	Baik	100.00
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan							
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68.77	69.68	69.24	99.37	73.32	94.44
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86.52	86.69	86.83	100.16	87.49	99.25
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas							
4.1	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	BB	100.00	BB	
E	MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya							
5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	.18	2.18	2.09	104.13	.14	102.34
Rata-Rata Capaian Kinerja						106.51		88.93

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran (RPJMD 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1	1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
	2 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76		86	0	0	88	0
	3 Indeks No. Bencana	Indeks	129,23	135,17	118,9	137,63	84,25	116,3	81,66
	4 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A		78	0	0	80	0
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi								
1	5 LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	3,92	1,4	2,22	158,57	1,5	148
	6 LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	5,79	3,4	5,1	150	4,2	121,43
	7 LPE Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,98	3,63	5,78	1,38	23,88	5,98	23,08
	8 LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,9		4,53	0	0	5,58	0
2	9 Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	102	61	114	186,89	67	170,15
3	10 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	35,43	52,15	38,45	28,09	73,06	39,12	71,8
	11 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	2,85	19,99	3,97	19,86	20,82	19,07
	12 Nilai Realisasi Investasi	Milyar	546,57	907,84	615,63	894,79	145,34	620,2	144,27
	13 Persentase Usaha Mikro	%	92,56	99,93	93,52	99,91	106,83	93,72	106,6
	14 Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	47,54	48,25	54,61	113,18	51,36	106,33
4	15 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	79,79	74,96	82,82	110,49	75,05	110,35
	16 Persentase RDTR	%	4,35	4,35	52,17	11,11	21,3	65,22	17,03
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
1	17 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,23	12,92	12,24	94,74	13,04	93,87
	18 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,03	8,39	8,04	95,83	8,54	94,15
	19 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,49	73,35	73,69	100,46	73,51	100,24
	20 Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/ Thn	7.162	8.470	7.842	8.765	111,77	7.963	110,07
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
1	21 Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	B	96,2	A	87,49
	22 Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	80,3	83,63	80,9	84,1	103,96	81	103,83
	23 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
	24 Predikat SPBE	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
	25 Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100	Informatif	100
	26 Level Maturitas SPIP	Level	3	3,01	3	3,01	100,33	3	100,33
	27 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	76,64	49,5	67,43	136,22	50	134,86
2	28 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	64	34,25	76	34,77	45,75	79	44,01
	29 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	59	28,62	67	28,89	43,12	69	41,87
	30 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	%	78,76	58,52	84,2	58,29	69,23	87,03	66,98
	31 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	74,46	78,65	79,83	79,08	99,06	82,64	95,69
	32 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	77,71	83,66	78,23	93,51	86,66	90,27
	33 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	0
	34 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	37,55	6,06	62,75	0	0	69,05	0
	35 Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	6,25	69,57	75,8	53,8	70,98	80,7	66,67
E	MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat								
1	36 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	Score		84,04	83	84,34	101,61	85	99,22
	37 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	Score		85,18	76	84,92	111,74	80	106,15
Rata-Rata Capaian Kinerja							80,22		77,18

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran (RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025 Target	Capaian	%	Akhir RPJMD (2029)	%
								Target	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Berbudaya, Sosial dan Keamanan								
1	1 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
	2 Persentase konflik sosial yang tertangani	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
	3 Persentase Kebudayaan lokal yang dilestarikan	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan								
1	4 PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	persen	0.44	3.63	2.10	1.38	65.71	3	46.00
	5 PDRB Sektor industri pengolahan	persen	2.14	3.92	2.64	2.22	84.09	3.64	60.99
	6 PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	5.79	5.79	3.20	5.10	159.38	3.6	141.67
	7 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen	5.750	5.98	3.11	4.27	137.30	2.24	190.63

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kon disi Kine rja Awal RPJ MD	Capaia n Tahun Sebelu mnya 2024	Tahun 2025 Target	Cap aian	%	Akhir RPJMD (2029) Target	%
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
2	8	Tingkat Kemiskinan	persen	7.4	7.40	7.40	6.86	107.30	6.5	94.46
3	9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	nilai	N		2.51		0.00	2.55	0.00
	10	Persentase peningkatan investasi daerah	persen	35.35	-35.35	8.00	-1.44	18.00	8	-18.00
	11	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	79.79	79.79	83.38	82.82	99.33	83.7	98.95
	12	Indeks No. Bencana	indeks	135.17	135.17	128.21	137.63	92.65	123.29	88.37
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan									
1	13	Angka Harapan Hidup	tahun	73.49	73.49	73.66	73.69	100.04	74.34	99.13
	14	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	74.43		74.44	68.28	91.72	74.48	91.68
	15	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.23	12.23	12.25	12.24	99.92	12.33	99.27
	16	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8.03	8.03	8.12	8.04	99.01	8.48	94.81
	17	Indeks Pembangunan Literasi	skor	54.87		56.37	21.77	38.62	62.57	34.79
	18	Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/ Thn	8,47	8,47	8,77	8,765	99.94	9,97	87.91
	19	Indeks pemberdayaan gender	indeks	63.76		64.16	86.83	135.33	64.76	134.08
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas									
1	20	Predikat SAKIP	predika t	B	B	B	B	100.00	BB	87.49
	21	Predikat Pemerintahan Digital	predika t	Baik		Baik	Baik	100.00	Baik	100.00
	22	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	predika t	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	100.00	Infor matif	100
	23	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	indeks	2.26	2.26	2.26		0.00	2.6	100.00
	24	Indeks Sistem Merit	angka	76.43	253.5	76.93		0.00	76.53	0.00
	25	Nilai Survei Penilaian Integritas	nilai	71.98	76.12	71.98	71.98	100.00	71.98	100.00
2	26	Level maturitas SPIP terintegrasi	level	3.01	3.01	3.01	3.01	100.00	3.01	100.00
	27	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00
	28	Indeks kearsipan daerah	indeks	83.13		83.63	69.84	83.51	85.63	81.56
	29	Indeks pelayanan publik	indeks	3.08	3.08	3.18	3.99	125.47	3.58	111.45
	30	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82.74	84.1	82.9	84.10	101.45	84.9	99.06
E	MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya									
1	31	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	72.28	76.02	73.28	74.19	101.24	75.28	98.55
Rata-Rata Capaian Kinerja								80.13		80.76

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
2	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	86	0	0
3	Indeks No. Bencana	118,9	137,63	84,25
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	78	0	0
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,40%	2,22%	158,57
6	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40%	5,10%	150
7	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78%	1,38%	23,88
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,53%	0,00%	0
9	Jumlah Desa Mandiri	61 desa	114 desa	186,89
10	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	38,45%	28,09%	73,06
11	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	19,99%	3,97%	19,86
12	Nilai Realisasi Investasi	615,63 milyar	894,79 milyar	145,34
13	Persentase Usaha Mikro	93,52%	99,91%	106,83
14	Persentase Koperasi Aktif	48,25%	54,61%	113,18
15	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,96	82,82	110,49
16	Persentase RDTR	52,17%	11,11%	21,3
17	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92 tahun	12,24 tahun	94,74
18	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun	8,04 tahun	95,83
19	Angka Harapan Hidup	73,35 tahun	73,69 tahun	100,46
20	Pengeluaran Perkapita	7842 Rp/kapita/thn	8765 Rp/kapita/thn	111,77
21	Nilai SAKIP	BB	B	96,2
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9	84,1	103,96
23	Opini BPK	WTP	WTP	100
24	Predikat SPBE	Baik	Baik	100
25	Predikat KIP	Informatif	Informatif	100
26	Level Maturitas SPIP	3	3,01	100,33
27	Indeks Profesionalitas ASN	49,5	67,43	136,22
28	Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	76%	34,77%	45,75
29	Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	67%	28,89%	43,12
30	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	84,20%	58,29%	69,23
31	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	79,83%	79,08%	99,06
32	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	83,66%	78,23%	93,51
33	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100	100
34	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	62,75%	0	0
35	Rasio Konektivitas Kabupaten	75,8	53,8	70,98
36	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	83	84,34	101,61
37	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	76	84,92	111,74

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2025-2029

Indikator Sasaran		Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100	100.00	100.00%
2	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100.00	100.00%
3	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan	100	100.00	100.00%
4	PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	2.10	1.38	65.71%
5	PDRB Sektor industri pengolahan	2.64	2.22	84.09%
6	PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.20	5.10	159.38%
7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.11	4.27	137.30%
8	Tingkat Kemiskinan	7.40	6.86	107.30%
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2.51	0	0.00%
10	Persentase peningkatan investasi daerah	8.00	-1.44	-18.00%
11	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83.38	82.82	99.33%
12	Indeks No. Bencana	128.21	137.63	92.65%
13	Angka Harapan Hidup	73.66	73.69	100.04%
14	Indeks Ketahanan Pangan	74.44	68.28	91.72%
15	Harapan Lama Sekolah	12.25	12.24	99.92%
16	Rata-Rata Lama Sekolah	8.12	8.04	99.01%
17	Indeks Pembangunan Literasi	56.37	21.77	38.62%
18	Pengeluaran Perkapita	8,77	8,765.00	99.94%
19	Indeks pemberdayaan gender	63.96	86.83	135.76%
20	Predikat SAKIP	B	B	100.00%
21	Predikat Pemerintahan Digital	Baik	Baik	100.00%
22	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100.00%
23	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2.26	2.26	100.00%
24	Indeks Sistem Merit	258	253.5	98.26%
25	Nilai Survei Penilaian Integritas	71.98	71.98	100.00%
26	Level maturitas SPIP terintegrasi	3.01	3.01	100.00%
27	Opini BPK	WTP	WTP	100.00%
28	Indeks kearsipan daerah	83.63	69.84	83.51%
29	Indeks pelayanan publik	3.18	3.99	125.47%
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.9	84.10	101.45%
31	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73.28	74.19	101.24%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Berdasarkan tabel diatas dalam rata – rata kinerja sasaran pada indikator makro telah tercapai 80,22%. Meskipun secara makro tercapai 100% lebih, namun masih ada beberapa beberapa indikator sasaran strategis yang masih belum tercapai. Secara umum capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah

tercapai bahkan ada beberapa target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah melampaui target Tahun 2025 dan bahkan melampaui target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang sudah ditetapkan.

Adapun 8 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih tercapai 3,97%, Persentase RDTR tercapai 11,11%, Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten, Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah. APBD menggambarkan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat dinilai dalam bentuk keuangan. Sebagai instrumen utama dalam tata kelola keuangan daerah, APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan layanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi terhadap pencapaian kinerja keuangan menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup berbagai aspek, termasuk Realisasi Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi ini juga mencakup perhitungan setelah dilakukan memorial terhadap dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan sumber pendanaan penting dalam mendukung program pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, capaian kinerja keuangan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menyajikan perbandingan antara target dan realisasi dari masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah. Data ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dalam pengelolaan APBD ke depan.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang meningkatkan ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran tanpa kewajiban untuk dikembalikan. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP No. 58 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah. APBD menggambarkan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peran strategis dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, khususnya pada Pendapatan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp110.966.431.091,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp133.199.336.800,95 atau 120,04% atau pelampauan pencapaian target sebesar Rp22.232.905.709,95 atau 20,04%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp92.317.977.161,94. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.881.359.639,01 atau 44,28%.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.673.287.751.783,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.595.333.010.902,17 atau 95,34% atau tidak mencapai target sebesar Rp77.954.740.880,83 atau 4,66%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.725.408.269.411,00. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp130.075.258.508,83 atau sebesar 7,54%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp13.747.662.174,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp13.921.601.853,78 atau 101,27% atau Pelampauan anggaran sebesar Rp173.939.679,78 atau 1,27%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp11.545.310.311,11 maka Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.376.291.542,67 atau sebesar 20,58%.

Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.798.001.845.048,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.742.453.949.556,90 atau 96,91%, atau tidak mencapai target sebesar Rp55.547.895.491,10 atau 3,09%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.829.271.556.884,05 jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp86.817.607.327,15 atau 4,75%. Adapun rincian Pendapatan daerah dapat dikelompokkan terlihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
4	PENDAPATAN DAERAH	34.400.801.000,00	42.306.541.530,45	122,98	35.651.612.093,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.400.801.000,00	42.306.541.530,45	122,98	35.651.612.093,18
4.1.02	Retribusi Daerah	2.772.189.000,00	3.026.378.764,00	109,17	5.664.957.127,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.628.612.000,00	39.280.162.766,45	124,19	29.986.654.966,18
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
4	PENDAPATAN DAERAH	175.000.000,00	578.458.185,00	330,55	160.341.562,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.000.000,00	578.458.185,00	330,55	160.341.562,00
4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000,00	578.458.185,00	330,55	160.341.562,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	PENDAPATAN DAERAH	89.000.000,00	94.030.000,00	105,65	77.940.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.000.000,00	94.030.000,00	105,65	77.940.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	89.000.000,00	94.030.000,00	105,65	77.940.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERHUBUNGAN					
4	PENDAPATAN DAERAH	98.099.998,00	148.039.000,00	150,91	91.459.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.099.998,00	148.039.000,00	150,91	91.459.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	98.099.998,00	148.039.000,00	150,91	91.459.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN					
4	PENDAPATAN DAERAH	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00
4.1.02	Retribusi Daerah	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA					
4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	88.700.000,00	118,27	79.025.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	88.700.000,00	118,27	79.025.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	88.700.000,00	118,27	79.025.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERIKANAN					
4	PENDAPATAN DAERAH	241.000.000,00	186.730.000,00	77,48	225.250.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	241.000.000,00	186.730.000,00	77,48	225.250.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	241.000.000,00	186.730.000,00	77,48	225.250.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SEKRETARIAT DAERAH					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
4	PENDAPATAN DAERAH	1.716.054.417.381,00	1.644.252.540.635,92	95,82	1.765.791.252.477,10
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.019.003.424,00	34.997.927.879,97	120,60	28.837.672.754,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.524.575.448,00	17.524.575.448,85	100,00	17.074.176.833,76
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.494.427.976,00	17.473.352.431,12	152,02	11.763.495.921,23
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17	95,34	1.725.408.269.411,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17	95,57	1.669.684.064.369,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.613.560.987,00	55.948.997.692,00	89,36	55.724.205.042,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.747.662.174,00	13.921.601.853,78	101,27	11.545.310.311,11
4.3.01	Pendapatan Hibah	86.953.783,00	501.374.337,78	576,60	1.053.282.442,11
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.660.708.391,00	13.420.227.516,00	98,24	10.492.027.869,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
4	PENDAPATAN DAERAH	46.324.026.669,00	54.190.541.503,53	116,98	26.594.468.951,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.324.026.669,00	54.190.541.503,53	116,98	26.594.468.951,77
4.1.01	Pajak Daerah	46.306.128.060,00	54.094.384.309,53	116,82	26.579.810.709,77
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.898.609,00	96.157.194,00	537,23	14.658.242,00

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Dan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp1.237.122.609.438,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.138.335.517.761,99 atau 92,01% atau tidak mencapai target sebesar Rp98.787.091.676,01 atau 7,99%. Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.197.915.196.243,01. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp59.579.678.481,02 atau 4,97%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp205.167.710.321,00 dengan realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp202.794.227.908,73 atau 98,84% atau tidak mencapai target sebesar Rp2.373.482.412,27 atau 1,16% apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp279.336.944.391,10. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.542.716.482,37 atau 27,40%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3.659.746.914,00 atau 66,54% atau tidak mencapai target sebesar Rp1.840.253.086,00 atau 33,46% apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp933.056.277,00 Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.726.690.637,00 atau 292,23%.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.803.614.485.759,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.646.379.313.775,72 atau 91,28%, atau tidak mencapai target sebesar Rp157.235.171.983,28 atau 8,72%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.841.646.074.683,11 Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp195.266.760.907,39 atau 10,60%.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp355.824.166.000,00 dan terealisasi sebesar Rp301.589.821.191,00 atau mencapai 84,76 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada belanja transfer tergolong cukup baik, meskipun belum mencapai target optimal sebesar 100 persen.

Selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan adanya anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp54.234.344.809,00 atau sebesar 15,24%. Tidak terserapnya anggaran tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai 50emban, antara lain keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan penyaluran, penyesuaian kebijakan pemerintah, serta dinamika pelaksanaan kegiatan pada entitas penerima transfer, khususnya pemerintah desa.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp363.460.877.772,00, maka realisasi belanja transfer pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp61.871.056.581,00 atau sebesar 17,02 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah, baik dari sisi pengalokasian anggaran maupun realisasi penyaluran dana transfer kepada pihak penerima.

Penurunan realisasi belanja transfer tersebut juga dapat mencerminkan adanya peningkatan

kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kesiapan administratif maupun teknis dari pihak penerima.

Secara umum, belanja transfer merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui mekanisme penyaluran dana kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, efektivitas dan ketepatan waktu penyaluran belanja transfer menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan di tingkat daerah.

Dengan demikian, meskipun capaian realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya optimal, secara keseluruhan pengelolaan belanja transfer telah berjalan dengan cukup baik. Ke depan, diperlukan peningkatan koordinasi, perencanaan yang lebih akurat, serta penguatan pengendalian dalam proses penyaluran dana agar realisasi anggaran dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan daerah. Adapun rincian Belanja Daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Belanja Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
5	BELANJA DAERAH	510.682.432.000,00	466.665.196.377,27	91,38	467.243.878.365,20
5.1	BELANJA OPERASI	468.953.109.275,00	425.077.711.917,27	90,64	412.578.255.719,20
5.1.01	Belanja Pegawai	404.191.312.238,00	360.595.379.626,00	89,21	335.859.259.868,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.819.361.037,00	50.674.896.347,00	99,72	61.664.934.601,20
5.1.05	Belanja Hibah	13.942.436.000,00	13.807.435.944,27	99,03	15.054.061.250,00
5.2	BELANJA MODAL	41.729.322.725,00	41.587.484.460,00	99,66	54.665.622.646,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.688.237.924,00	16.595.735.265,00	99,45	18.806.459.557,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.625.980.000,00	4.617.296.795,00	99,81	25.302.452.750,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.415.104.801,00	20.374.452.400,00	99,80	10.556.710.339,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
5	BELANJA DAERAH	323.484.007.000,00	300.425.717.194,44	92,87	258.206.563.052,07
5.1	BELANJA OPERASI	276.471.149.475,00	254.097.810.734,44	91,91	240.909.279.711,07
5.1.01	Belanja Pegawai	153.294.838.665,00	143.696.025.711,00	93,74	120.854.830.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.339.010,00	110.225.935.023,44	89,61	118.960.097.744,07
5.1.05	Belanja Hibah	175.971.800,00	175.850.000,00	99,93	1.094.351.160,00
5.2	BELANJA MODAL	47.012.857.525,00	46.327.906.460,00	98,54	17.297.283.341,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.482.057.525,00	10.320.279.902,00	98,46	10.084.385.674,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.647.550.000,00	35.124.376.558,00	98,53	5.124.254.367,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	883.250.000,00	883.250.000,00	100,00	2.088.643.300,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
5	BELANJA DAERAH	167.748.096.000,00	163.575.619.802,50	97,51	266.547.119.221,80
5.1	BELANJA OPERASI	60.055.413.489,00	57.313.231.251,50	95,43	70.846.942.189,80
5.1.01	Belanja Pegawai	12.415.169.479,00	10.763.907.946,00	86,70	8.071.236.645,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.004.702.010,00	37.913.881.305,50	97,20	35.951.748.076,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.635.542.000,00	8.635.442.000,00	100,00	26.823.957.468,80
5.2	BELANJA MODAL	107.692.682.511,00	106.262.388.551,00	98,67	195.700.177.032,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.998.040,00	102.715.490,00	97,83	271.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.906.911.000,00	45.906.911.000,00	100,00	35.617.267.970,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.680.773.471,00	60.252.762.061,00	97,68	159.811.309.062,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
5	BELANJA DAERAH	14.691.340.000,00	13.927.851.197,73	94,80	15.766.547.477,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.854.980.000,00	12.092.361.658,00	94,07	12.653.118.477,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.295.377.127,00	5.582.969.885,00	88,68	4.790.165.006,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.384.602.873,00	6.339.391.773,00	99,29	7.567.953.471,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	175.000.000,00	170.000.000,00	97,14	295.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.836.360.000,00	1.835.489.539,73	99,95	3.113.429.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	-	240.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.689.360.000,00	1.688.681.850,00	99,96	120.750.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.000.000,00	146.807.689,73	99,87	2.752.679.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
5	BELANJA DAERAH	10.819.669.000,00	9.725.692.978,64	89,89	9.941.022.052,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.278.964.600,00	9.185.758.978,64	89,36	9.836.825.927,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.543.413.416,00	6.513.827.215,64	86,35	6.026.100.826,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.735.551.184,00	2.671.931.763,00	97,67	3.810.725.101,00
5.2	BELANJA MODAL	540.704.400,00	539.934.000,00	99,86	104.196.125,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	540.704.400,00	539.934.000,00	99,86	104.196.125,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	5.623.718.000,00	5.372.742.078,60	95,54	5.193.666.920,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.623.718.000,00	5.372.742.078,60	95,54	5.145.172.920,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.748.534.650,00	4.512.625.677,00	95,03	3.699.540.512,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.183.350,00	860.116.401,60	98,28	1.445.632.408,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	48.494.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	48.494.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
5	BELANJA DAERAH	4.130.332.000,00	3.863.711.053,70	93,54	3.605.275.695,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.130.332.000,00	3.863.711.053,70	93,54	3.593.525.695,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.637.284.923,00	2.431.279.123,00	92,19	2.166.150.343,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.287.347.077,00	1.230.029.210,70	95,55	1.417.024.602,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	205.700.000,00	202.402.720,00	98,40	10.350.750,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	11.750.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	11.750.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI					
5	BELANJA DAERAH	7.521.420.000,00	7.153.548.479,00	95,11	8.639.316.183,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.506.420.000,00	7.138.585.679,00	95,10	8.397.628.371,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.883.677.545,00	3.650.907.876,00	94,01	3.523.265.181,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.622.742.455,00	3.487.677.803,00	96,27	4.087.506.699,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	-	786.856.491,00
5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.962.800,00	99,75	241.687.812,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.962.800,00	99,75	106.898.062,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	134.789.750,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
5	BELANJA DAERAH	7.091.262.000,00	6.600.244.278,80	93,08	7.150.587.630,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.793.360.350,00	6.302.638.671,80	92,78	6.749.114.940,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.417.530.789,00	4.037.590.031,00	91,40	3.184.143.925,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.829.561,00	2.265.048.640,80	95,34	3.564.971.015,00
5.2	BELANJA MODAL	297.901.650,00	297.605.607,00	99,90	401.472.690,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.901.650,00	297.605.607,00	99,90	169.739.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	231.733.690,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
5	BELANJA DAERAH	11.702.607.000,00	11.303.649.705,00	96,59	10.778.838.872,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.702.607.000,00	11.303.649.705,00	96,59	10.648.493.872,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.299.255.984,00	3.935.969.204,00	91,55	3.402.215.049,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.283.351.016,00	6.247.680.501,00	99,43	6.246.278.823,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	130.345.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	130.345.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERHUBUNGAN					
5	BELANJA DAERAH	8.792.247.000,00	8.403.794.613,00	95,58	7.040.795.533,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.665.197.000,00	8.277.618.091,00	95,53	6.636.556.966,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.970.347.628,00	3.598.174.297,00	90,63	2.888.239.642,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.694.849.372,00	4.679.443.794,00	99,67	3.748.317.324,00
5.2	BELANJA MODAL	127.050.000,00	126.176.522,00	99,31	404.238.567,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.250.000,00	30.535.500,00	97,71	40.450.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.800.000,00	95.641.022,00	99,83	363.788.567,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK					
5	BELANJA DAERAH	4.477.826.000,00	4.115.401.436,00	91,91	5.321.942.668,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.322.426.000,00	3.961.029.936,00	91,64	4.675.496.028,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.613.695.954,00	2.284.248.726,00	87,40	2.064.649.441,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.730.046,00	1.676.781.210,00	98,13	2.610.846.587,00
5.2	BELANJA MODAL	155.400.000,00	154.371.500,00	99,34	646.446.640,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.783.500,00	99,57	329.548.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-	16.950.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	105.400.000,00	104.588.000,00	99,23	299.948.640,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN					
5	BELANJA DAERAH	7.617.447.810,00	6.950.556.930,00	91,25	5.486.662.964,10
5.1	BELANJA OPERASI	7.617.447.810,00	6.950.556.930,00	91,25	5.241.970.335,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.129.419.665,00	3.697.957.888,00	89,55	3.050.649.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.739.228.145,00	2.503.799.042,00	91,41	2.191.320.528,00
5.1.04	Belanja Subsidi	748.800.000,00	748.800.000,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	244.692.629,10
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	244.692.629,10
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
5	BELANJA DAERAH	3.593.744.000,00	3.359.979.123,00	93,50	3.758.267.874,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.498.069.000,00	3.265.030.836,00	93,34	3.728.535.754,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.382.787.074,00	2.156.213.340,00	90,49	1.986.832.736,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.281.926,00	1.108.817.496,00	99,42	1.741.703.018,00
5.2	BELANJA MODAL	95.675.000,00	94.948.287,00	99,24	29.732.120,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.675.000,00	94.948.287,00	99,24	29.732.120,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA					
5	BELANJA DAERAH	7.392.905.588,00	7.018.327.379,00	94,93	10.926.150.902,49
5.1	BELANJA OPERASI	7.050.117.300,00	6.676.493.203,00	94,70	10.823.668.682,49
5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.395.706,00	2.403.012.266,00	88,33	2.583.362.263,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.413.321.594,00	2.357.289.439,00	97,68	3.201.326.231,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.916.400.000,00	1.916.191.498,00	99,99	5.038.980.188,49
5.2	BELANJA MODAL	342.788.288,00	341.834.176,00	99,72	102.482.220,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.788.288,00	157.087.200,00	99,56	6.496.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	184.746.976,00	99,86	95.986.220,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
5	BELANJA DAERAH	3.897.658.000,00	3.435.263.451,97	88,14	3.769.028.486,22
5.1	BELANJA OPERASI	3.873.658.000,00	3.414.506.451,97	88,15	3.716.038.486,22
5.1.01	Belanja Pegawai	2.950.061.592,00	2.545.629.910,00	86,29	2.049.937.339,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.596.408,00	868.876.541,97	94,08	1.666.101.147,22
5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	20.757.000,00	86,49	52.990.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	20.757.000,00	86,49	52.990.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERIKANAN					
5	BELANJA DAERAH	8.336.671.000,00	7.525.599.073,00	90,27	10.147.166.045,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.174.661.000,00	7.365.815.989,00	90,11	9.422.484.045,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.265.541.210,00	4.499.932.035,00	85,46	3.543.717.518,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.909.119.790,00	2.865.883.954,00	98,51	5.041.686.327,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	-	837.080.200,00
5.2	BELANJA MODAL	162.010.000,00	159.783.084,00	98,63	724.682.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.010.000,00	159.783.084,00	98,63	218.460.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-	506.222.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
5	BELANJA DAERAH	48.870.968.000,00	44.133.837.422,00	90,31	59.285.844.133,00
5.1	BELANJA OPERASI	48.690.968.000,00	43.954.020.622,00	90,27	58.325.909.733,00
5.1.01	Belanja Pegawai	18.447.216.060,00	17.459.360.366,00	94,64	16.763.449.712,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.617.780.520,00	6.606.584.251,00	86,73	10.147.951.121,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.625.971.420,00	19.888.076.005,00	87,90	31.414.508.900,00
5.2	BELANJA MODAL	180.000.000,00	179.816.800,00	99,90	959.934.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	228.486.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	179.816.800,00	99,90	731.447.600,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SEKRETARIAT DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	109.910.889.604,00	106.441.878.336,04	96,84	109.607.695.485,88
5.1	BELANJA OPERASI	107.766.360.854,00	104.307.380.846,04	96,79	107.960.220.435,88
5.1.01	Belanja Pegawai	17.343.887.480,00	15.448.331.133,00	89,07	13.943.279.474,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.723.473.374,00	35.290.421.715,04	98,79	40.351.592.961,88
5.1.05	Belanja Hibah	54.699.000.000,00	53.568.627.998,00	97,93	53.665.348.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.144.528.750,00	2.134.497.490,00	99,53	1.647.475.050,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.144.528.750,00	2.134.497.490,00	99,53	1.622.575.050,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	-	24.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SEKRETARIAT DPRD					
5	BELANJA DAERAH	45.511.749.000,00	43.252.667.531,00	95,04	48.672.663.838,00
5.1	BELANJA OPERASI	44.439.179.000,00	42.182.441.031,00	94,92	47.788.155.038,00
5.1.01	Belanja Pegawai	25.372.753.075,00	24.479.185.752,00	96,48	19.651.003.645,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.066.425.925,00	17.703.255.279,00	92,85	28.137.151.393,00
5.2	BELANJA MODAL	1.072.570.000,00	1.070.226.500,00	99,78	884.508.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.072.570.000,00	1.070.226.500,00	99,78	884.508.800,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	8.435.144.494,00	8.024.873.612,00	95,14	9.808.169.157,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.404.744.494,00	7.994.637.212,00	95,12	9.758.169.157,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.964.909.573,00	4.584.872.182,00	92,35	3.975.608.683,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.439.834.921,00	3.409.765.030,00	99,13	5.782.560.474,00
5.2	BELANJA MODAL	30.400.000,00	30.236.400,00	99,46	50.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.400.000,00	30.236.400,00	99,46	50.000.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	381.713.300.806,00	320.678.831.531,55	84,01	379.504.862.681,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.021.884.806,00	15.053.349.189,00	75,18	14.686.017.632,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.923.011.295,00	4.577.793.674,00	57,78	3.924.224.806,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.098.873.511,00	10.475.555.515,00	86,58	10.761.792.826,00
5.2	BELANJA MODAL	367.250.000,00	343.134.300,00	93,43	424.911.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.250.000,00	343.134.300,00	93,43	424.911.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000,00	3.692.526.851,55	67,14	933.056.277,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	3.692.526.851,55	67,14	933.056.277,00
5.4	BELANJA TRANSFER	355.824.166.000,00	301.589.821.191,00	84,76	363.460.877.772,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.258.858.000,00	4.973.717.564,00	94,58	3.119.275.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	350.565.308.000,00	296.616.103.627,00	84,61	360.341.602.772,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	BELANJA DAERAH	8.698.586.000,00	7.840.399.419,00	90,13	6.604.363.594,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.959.638.500,00	7.164.221.250,00	90,01	6.548.988.594,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.959.405.665,00	4.310.545.234,00	86,92	2.782.854.326,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.232.835,00	2.853.676.016,00	95,12	3.766.134.268,00
5.2	BELANJA MODAL	738.947.500,00	676.178.169,00	91,51	55.375.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	738.947.500,00	676.178.169,00	91,51	55.375.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
5	BELANJA DAERAH	11.023.366.000,00	10.357.244.699,25	93,96	10.422.587.385,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.017.366.000,00	10.351.417.199,25	93,96	9.874.563.385,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.299.508.534,00	3.998.460.879,00	93,00	3.635.508.991,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.717.857.466,00	6.352.956.320,25	94,57	6.239.054.394,00
5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	5.827.500,00	97,13	548.024.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.827.500,00	97,13	548.024.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	2.404.260.000,00	2.183.680.584,40	90,83	2.579.265.608,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.380.660.000,00	2.160.148.584,40	90,74	2.547.939.289,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.757.390.896,00	1.541.880.956,00	87,74	1.605.690.367,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.269.104,00	618.267.628,40	99,20	942.248.922,00
5.2	BELANJA MODAL	23.600.000,00	23.532.000,00	99,71	31.326.319,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.600.000,00	23.532.000,00	99,71	31.326.319,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
INSPEKTORAT					
5	BELANJA DAERAH	11.379.465.000,00	10.902.356.796,00	95,81	10.014.925.145,35
5.1	BELANJA OPERASI	11.043.487.212,00	10.570.369.233,00	95,72	9.932.246.145,35
5.1.01	Belanja Pegawai	6.515.880.936,00	6.106.661.279,00	93,72	5.557.134.215,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.527.606.276,00	4.463.707.954,00	98,59	4.375.111.930,35
5.2	BELANJA MODAL	335.977.788,00	331.987.563,00	98,81	82.679.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.977.788,00	132.145.500,00	97,18	82.679.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.842.063,00	99,92	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA					
5	BELANJA DAERAH	6.698.023.650,00	6.357.481.473,00	94,92	6.853.600.716,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.698.023.650,00	6.357.481.473,00	94,92	6.787.700.716,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.159.406.165,00	4.843.124.083,00	93,87	4.727.707.344,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.538.617.485,00	1.514.357.390,00	98,42	2.059.993.372,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	65.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	65.900.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN					
5	BELANJA DAERAH	7.279.286.000,00	6.881.500.486,00	94,54	7.154.249.276,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.279.286.000,00	6.881.500.486,00	94,54	7.154.249.276,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.944.182.023,00	5.659.335.198,00	95,21	5.092.512.896,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.278.103.977,00	1.175.165.288,00	91,95	1.756.536.380,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.000.000,00	47.000.000,00	82,46	305.200.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BIKA					
5	BELANJA DAERAH	1.780.828.000,00	1.599.082.348,00	89,79	1.581.468.821,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.780.828.000,00	1.599.082.348,00	89,79	1.581.468.821,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.409.373.087,00	1.234.477.202,00	87,59	1.106.158.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.454.913,00	364.605.146,00	98,16	475.310.321,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN KALIS					
5	BELANJA DAERAH	2.651.501.000,00	2.495.767.582,00	94,13	2.536.129.457,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.651.501.000,00	2.495.767.582,00	94,13	2.536.129.457,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.306.268.859,00	2.150.762.197,00	93,26	1.976.605.614,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.232.141,00	335.005.385,00	99,93	556.523.843,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN EMBALOH HILIR					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	BELANJA DAERAH	2.211.751.000,00	1.949.678.436,08	88,15	2.125.107.032,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.211.751.000,00	1.949.678.436,08	88,15	2.113.607.032,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.788.418.447,00	1.526.371.940,00	85,35	1.490.622.760,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.332.553,00	373.306.496,08	99,99	472.984.272,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	11.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	11.500.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN EMBALOH HULU					
5	BELANJA DAERAH	2.277.181.000,00	2.136.987.793,00	93,84	2.238.489.742,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.277.181.000,00	2.136.987.793,00	93,84	2.211.639.742,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.962.071.656,00	1.823.310.529,00	92,93	1.611.802.689,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.109.344,00	313.677.264,00	99,55	599.837.053,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	26.850.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	26.850.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BUNUT HILIR					
5	BELANJA DAERAH	2.505.370.000,00	2.313.531.813,00	92,34	2.389.090.346,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.505.370.000,00	2.313.531.813,00	92,34	2.389.090.346,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.156.699.767,00	1.971.979.330,00	91,44	1.885.039.424,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.670.233,00	341.552.483,00	97,96	504.050.922,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BOYAN TANJUNG					
5	BELANJA DAERAH	2.624.477.000,00	2.496.541.849,00	95,13	2.795.639.371,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.624.477.000,00	2.496.541.849,00	95,13	2.701.969.371,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.150.914.378,00	2.036.234.134,00	94,67	2.103.453.701,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.562.622,00	460.307.715,00	97,20	598.515.670,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	93.670.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	93.670.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BUNUT HULU					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	BELANJA DAERAH	2.096.148.000,00	2.017.134.369,00	96,23	2.130.974.189,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.067.828.000,00	1.988.814.369,00	96,18	2.091.760.189,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.748.408.188,00	1.672.140.141,00	95,64	1.689.077.590,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.919.812,00	290.174.228,00	99,06	318.182.599,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	84.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	28.320.000,00	28.320.000,00	100,00	39.214.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.320.000,00	28.320.000,00	100,00	39.214.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN MENTEBAH					
5	BELANJA DAERAH	2.515.858.000,00	2.349.106.604,00	93,37	2.633.828.382,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.515.858.000,00	2.349.106.604,00	93,37	2.633.828.382,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.141.747.859,00	1.975.988.236,00	92,26	2.137.687.964,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.110.141,00	373.118.368,00	99,73	496.140.418,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN JONGKONG					
5	BELANJA DAERAH	2.153.699.000,00	2.017.106.118,00	93,66	2.117.425.593,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.153.699.000,00	2.017.106.118,00	93,66	2.117.425.593,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.723.224.994,00	1.588.418.817,00	92,18	1.557.469.392,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.974.006,00	411.187.301,00	99,57	528.456.201,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	31.500.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PENGKADAN					
5	BELANJA DAERAH	2.820.853.000,00	2.644.228.854,00	93,74	2.794.372.505,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.722.753.000,00	2.546.766.354,00	93,54	2.718.422.505,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.308.531.490,00	2.159.175.148,00	93,53	2.007.261.795,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.956.510,00	328.326.206,00	92,50	529.160.710,00
5.1.05	Belanja Hibah	59.265.000,00	59.265.000,00	100,00	142.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	-	40.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	98.100.000,00	97.462.500,00	99,35	75.950.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.100.000,00	97.462.500,00	99,35	75.950.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN HULU GURUNG					
5	BELANJA DAERAH	2.625.834.996,00	2.419.586.859,00	92,15	2.536.167.260,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.625.834.996,00	2.419.586.859,00	92,15	2.475.117.260,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.147.324.031,00	1.956.765.362,00	91,13	1.976.223.696,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.510.965,00	412.821.497,00	96,34	468.893.564,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	61.050.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	61.050.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SELIMBAU					
5	BELANJA DAERAH	2.674.954.000,00	2.472.580.411,60	92,43	2.690.580.357,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.647.254.000,00	2.444.880.411,60	92,36	2.690.580.357,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.244.649.413,00	2.052.355.227,00	91,43	2.074.876.715,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.604.587,00	392.525.184,60	97,50	595.703.642,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	-	20.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	0,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BADAU					
5	BELANJA DAERAH	2.269.279.000,00	2.086.591.408,00	91,95	1.977.411.247,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.269.279.000,00	2.086.591.408,00	91,95	1.977.411.247,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.813.942.591,00	1.632.648.530,00	90,01	1.382.633.792,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.336.409,00	453.942.878,00	99,69	594.777.455,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BATANG LUPAR					
5	BELANJA DAERAH	2.340.412.000,00	2.171.060.695,00	92,76	2.266.495.421,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.302.551.516,00	2.134.097.695,00	92,68	2.238.410.421,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.891.100.410,00	1.726.300.280,00	91,29	1.658.911.657,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.451.106,00	407.797.415,00	99,11	579.498.764,00
5.2	BELANJA MODAL	37.860.484,00	36.963.000,00	97,63	28.085.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.860.484,00	36.963.000,00	97,63	28.085.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN EMPANANG					
5	BELANJA DAERAH	1.996.067.000,00	1.740.010.937,00	87,17	1.620.418.944,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.992.067.000,00	1.736.010.937,00	87,15	1.586.808.944,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.517.140,00	1.360.424.625,00	84,47	1.037.345.564,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.549.860,00	375.586.312,00	98,44	549.463.380,00
5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	33.610.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	33.610.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PURING KENCANA					
5	BELANJA DAERAH	1.770.940.000,00	1.510.796.963,00	85,31	1.595.382.867,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.770.940.000,00	1.510.796.963,00	85,31	1.535.932.867,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.421.983.545,00	1.165.043.366,00	81,93	1.021.382.867,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.956.455,00	345.753.597,00	99,08	514.550.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	59.450.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	59.450.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SEMITAU					
5	BELANJA DAERAH	2.546.914.000,00	2.335.781.943,00	91,71	2.525.567.403,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.546.914.000,00	2.335.781.943,00	91,71	2.525.567.403,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.032.739.502,00	1.822.167.501,00	89,64	1.770.828.689,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.174.498,00	513.614.442,00	99,89	754.738.714,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SUHAID					
5	BELANJA DAERAH	2.341.671.351,00	2.133.320.771,00	91,10	2.307.097.925,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.341.671.351,00	2.133.320.771,00	91,10	2.307.097.925,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.971.763.314,00	1.763.927.594,00	89,46	1.661.445.390,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.148.037,00	363.633.177,00	99,86	547.312.535,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	98.340.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SEBERUANG					
5	BELANJA DAERAH	2.550.756.000,00	2.399.557.123,00	94,07	2.411.708.080,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.550.756.000,00	2.399.557.123,00	94,07	2.386.358.080,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.168.719.767,00	2.018.560.223,00	93,08	1.908.727.356,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.036.233,00	380.996.900,00	99,73	477.630.724,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	25.350.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	25.350.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SILAT HILIR					
5	BELANJA DAERAH	1.876.384.460,00	1.660.379.910,00	88,49	2.176.044.445,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.835.680.760,00	1.619.676.210,00	88,23	2.105.224.445,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.430.193.447,00	1.222.651.150,00	85,49	1.279.735.426,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.487.313,00	397.025.060,00	97,91	825.489.019,00
5.2	BELANJA MODAL	40.703.700,00	40.703.700,00	100,00	70.820.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.703.700,00	40.703.700,00	100,00	70.820.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SILAT HULU					
5	BELANJA DAERAH	2.153.979.000,00	1.946.909.464,00	90,39	2.148.507.599,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.153.979.000,00	1.946.909.464,00	90,39	2.086.467.599,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.807.610.724,00	1.602.011.954,00	88,63	1.541.922.081,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.368.276,00	344.897.510,00	99,58	544.545.518,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	62.040.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	62.040.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
5	BELANJA DAERAH	5.301.207.000,00	5.038.704.420,70	95,05	44.719.517.037,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.301.207.000,00	5.038.704.420,70	95,05	44.640.017.037,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.247.497.491,00	2.042.831.959,00	90,89	1.795.404.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.741.181.509,00	1.733.344.461,70	99,55	2.625.198.187,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.312.528.000,00	1.262.528.000,00	96,19	40.219.414.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	79.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	79.500.000,00

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp Rp15.612.640.711,47 Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.612.640.711,47 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.612.640.711,00 Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp101.686.061.190,65 Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.612.640.711,00	5.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	25.987.158.510,53
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	2.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian target pendapatan maupun realisasi belanja daerah.

Pada sisi pendapatan daerah, beberapa jenis pendapatan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada realisasi beberapa komponen pajak dan transfer daerah yang masih berada di bawah 100%. Pajak Sarang Burung Walet hanya terealisasi sebesar 33,49%, Pajak Reklame sebesar 79,05%, serta Dana Desa sebesar 77,87%. Selain itu, Bantuan Keuangan pada kelompok Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya

mencapai 67,07%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan potensi objek pajak, belum optimalnya kepatuhan wajib pajak, serta ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya yang pencairannya bergantung pada kebijakan dan jadwal penyaluran dari pihak pemberi transfer.

Di sisi lain, beberapa jenis pendapatan mengalami realisasi yang melampaui target, seperti Pendapatan Bunga sebesar 2.814,57%, Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 603,44%, Pendapatan Hibah sebesar 576,60%, dan Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar 537,23%. Tingginya realisasi tersebut menunjukkan adanya pendapatan yang sifatnya insidental dan sulit diproyeksikan secara akurat pada saat penyusunan anggaran, sehingga target awal ditetapkan relatif rendah.

Pada sisi belanja daerah, realisasi Belanja Daerah mencapai 91,28%, yang menunjukkan masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Terduga hanya terealisasi sebesar 67,14% karena penggunaannya bersifat situasional dan disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang terjadi selama tahun berjalan. Selain itu, Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 84,61% dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 83,59%, yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan riil, efisiensi belanja, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya.

Kendala lainnya juga terlihat pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang hanya mencapai 57,76%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi jabatan, penyesuaian pembayaran hak keuangan, serta realisasi kebutuhan yang lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran yang telah direncanakan.

Selain faktor internal, pencapaian target juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain perubahan regulasi, penyesuaian kebijakan transfer pemerintah pusat, dinamika kondisi ekonomi daerah, serta keterlambatan administrasi dan proses pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, masih terdapat tantangan dalam perencanaan anggaran agar lebih akurat terhadap potensi riil pendapatan maupun kebutuhan belanja daerah, sehingga ke depan diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan APBD secara lebih optimal.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

4.1.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Kapuas Hulu terletak antara 111,40° sampai dengan 114,10° Bujur Timur dan antara 0,50° Lintang Utara sampai dengan 1,40° Lintang Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2023 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 31.318,246 km². Apabila dibandingkan dengan luas Provinsi, luas Kabupaten Kapuas Hulu merupakan yang terluas di Kalimantan Barat sebesar 21,30% persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Divisi Kapit, Sarawak, Malaysia Timur
Sebelah Timur	:	Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam ulu, Kalimantan Timur
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Sintang dan Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
Sebelah Barat	:	Kabupaten Sintang dan Malaysia

Wilayah administrasi Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa.

4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Entitas

Berdasarkan Keputusan Gabungan Kerajaan-Kerajaan Borneo Barat pada tanggal 22 Oktober 1946 Nomor 20L, wilayah Kalimantan Barat terbagi kedalam 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. Wilayah Kapuas Hulu termasuk salah satu wilayah Neo Swapraja. Dengan dukungan *Besluit Luitenant Gouverneur General* Nomor 8 tanggal 2 Maret 1948 yang berisi pengakuan Belanda terhadap status Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri beserta sebuah dewan Kalimantan Barat, maka pada tahun 1948, melalui Surat Keputusan Nomor 161 tanggal 10 Mei 1948 Presiden Kalimantan Barat membentuk suatu ikatan federasi dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).

Dengan adanya tuntutan rakyat, maka DIKB yang dipandang sebagai peninggalan pemerintah Belanda, dihapuskan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), daerah Kalimantan Barat berstatus sebagai daerah bagian yang terdiri dari Daya Besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Banjar. Setelah bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, maka pada tanggal 13 Januari 1953 dibentuklah Pemerintahan Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau. Bupati pertama yang menjabat adalah J. C. Oevang Oeray (1951-1955).

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Telah membentuk Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

- a. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata;
- i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan

- a. Dinas Perikanan;
- b. Dinas Pertanian dan Pangan.

4. Urusan pendukung urusan pemerintahan

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD.

5. Urusan penunjang urusan pemerintahan

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Badan Pengelola Perbatasan.

6. Urusan pengawasan urusan pemerintahan

- a. Inspektorat

7. Urusan kewilayahan

- a. Kecamatan Putussibau Utara;
- b. Kecamatan Putussibau Selatan;
- c. Kecamatan Bika;

- d. Kecamatan Kalis;
 - e. Kecamatan Embaloh Hilir;
 - f. Kecamatan Embaloh Hulu;
 - g. Kecamatan Bunut Hilir;
 - h. Kecamatan Boyan Tanjung;
 - i. Kecamatan Bunut Hulu;
 - j. Kecamatan Mentebah;
 - k. Kecamatan Jongkong;
 - l. Kecamatan Pengkadan;
 - m. Kecamatan Hulu Gurung;
 - n. Kecamatan Selimbau;
 - o. Kecamatan Badau;
 - p. Kecamatan Batang Lupar;
 - q. Kecamatan Empanang;
 - r. Kecamatan Puring Kencana;
 - s. Kecamatan Semitau;
 - t. Kecamatan Suhaid;
 - u. Kecamatan Seberuang;
 - v. Kecamatan Silat Hilir;
 - w. Kecamatan Silat Hulu.
8. Urusan pemerintahan umum
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.3 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Akuntansi. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari 50 SKPD dan 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana setiap SKPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun yang berkenaan.



4.2. BASIS AKUNTANSI DAN PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1) Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2) Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat



ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

5) Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Basis pengukuran aset pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:



- (a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.
- 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
 - 6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 7) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - 8) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - 9) Aset moneter dalam mata uang asmg dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - 10) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
 - 11) Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 12) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/ SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.
 - 13) Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - (a) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
 - (b) sebesar estimasi nilai wajar barang/ jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
 - 14) Pengukuran Beban:
 - (a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - (b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.



4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.3.1 Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

b. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

d. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.



Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

e. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

f. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitor. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.



4.3.2 INVESTASI

a. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

b. Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari



investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi.

Hasil pengelolaan investasi non permanen jangka panjang dalam bentuk dana bergulir berupa bunga, bagi hasil dan bentuk lainnya, diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Jika hasil pengelolaan investasi non permanen dana bergulir tersebut digulirkan kembali ke masyarakat, maka pendapatan tersebut juga diakui sebagai penambah nilai investasi dan mempengaruhi pencatatan pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.3 ASET TETAP

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau



biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan



tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Laporan keuangan mengungkapkan penambahan, pelepasan/penghapusan, perubahan nilai (jika ada) dan mutasi peralatan dan mesin lainnya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset

Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk



kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak



memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
- 3) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah total biaya penyusutan yang berjalan untuk aset yang dicatat di neraca. Nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun fiskal untuk mencerminkan nilai saat ini yang disusutkan.

4.3.4 DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana



relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4.3.5 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi



dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

c. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu loss contingency, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) yang tersaji di neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal).



d. Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- 1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai



dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

f. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

g. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan beban penyusutan secara periodik. Keduanya pun berbeda di dalam pencatatan keuangan, yang mana beban penyusutan harus dicatat dalam laporan operasional, dan akumulasi penyusutan harus dicatat pada neraca. Besarnya akumulasi penyusutan di tahun pertama penggunaan aktiva tetap akan sama dengan besaran beban penyusutan selama satu tahun pertama pemakaian aktiva tetap tersebut, lalu pada tahun kedua penggunaan, besarnya akumulasi penyusutan adalah hasil dari penjumlahan beban penyusutan di tahun pertama dan kedua aktiva tetap. Pun sama halnya dengan tahun ketiga dan seterusnya lagi. Dalam laporan keuangan, sifat dari akumulasi penyusutan adalah mengurangi nilai pada aktiva tetap.

4.3.6 UTANG/KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah



Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

4.3.7 EKUITAS

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.3.8 PENDAPATAN-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);
- 2) Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam;
- 3) Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:



- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

c. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

a. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer diakui berdasarkan penetapan dalam dokumen resmi yang menginformasikan dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/



Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani.

c. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

d. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
- d) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.



- f) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

4.3.9 BEBAN

a. Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

c. Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada



Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

d. Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk



memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

4.3.10 KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- b) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun



belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- e. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain- lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain- lain- LO/ekuitas.
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- j. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan



ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum menyesuaikan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan PSAP 18 dan PSAP 19. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BKAD diketahui bahwa penyesuaian tersebut belum dilaksanakan karena standar ini baru akan berlaku efektif mulai laporan keuangan tahun anggaran 2026 sehingga masih menyiapkan susunan draft, kebutuhan penyesuaian regulasi, dan peningkatan kapasitas SDM.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN POS- POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dalam satu tahun anggaran tertentu. Laporan ini memberikan gambar kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Dalam LRA terdapat beberapa unsur utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan menggambarkan seluruh penerimaan daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun berjalan. Belanja merupakan seluruh pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pembiayaan mencerminkan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dengan demikian, LRA menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai dasar evaluasi dalam perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	1.798.001.845.048,00	1.742.452.734.254,90

Pendapatan Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.798.001.845.048,00 dan terealisasi sebesar Rp1.742.452.734.254,90 atau mencapai 96,91% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp55.549.110.793,10 atau 3,09% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.829.271.556.884,05, Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp86.818.822.629,15 atau 4,75%. Adapun pendapatan daerah TA 2025 dapat dikelompokkan sebagai berikut:



Tabel 5.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110.966.431.091,00	133.198.121.498,95	120,03	92.317.977.161,94	40.880.144.337,01
2 Pendapatan Transfer	1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17	95,34	1.725.408.269.411,00	(130.075.258.508,83)
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.747.662.174,00	13.921.601.853,78	101,27	11.545.310.311,11	2.376.291.542,67
Total	1.798.001.845.048,00	1.742.452.734.254,90	96,91	1.829.271.556.884,05	(86.818.822.629,15)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**Anggaran 2025
(Rp)****110.966.431.091,00****Realisasi 2025
(Rp)****133.198.121.498,95**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp110.966.431.091,00 dan terealisasi sebesar Rp133.198.121.498,95 atau mencapai 120,03% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp22.231.690.407,95 atau 20,03% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp92.317.977.161,94, PAD mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp40.880.144.337,01 atau 44,28%. Adapun Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Pajak Daerah	46.306.128.060,00	54.094.384.309,53	116,82	26.579.810.709,77	27.514.573.599,76
2 Retribusi Daerah	3.994.788.998,00	4.729.489.349,00	118,39	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.524.575.448,00	17.524.575.448,85	100,00	17.074.176.833,76	450.398.615,09
4 Lain-lain PAD yang Sah	43.140.938.585,00	56.849.672.391,57	131,78	41.764.809.129,41	15.084.863.262,16
Total	110.966.431.091,00	133.198.121.498,95	120,03	92.317.977.161,94	40.880.144.337,01

5.1.1.1.1 Pajak Daerah**Anggaran 2025
(Rp)****46.306.128.060,00****Realisasi 2025
(Rp)****54.094.384.309,53**

Pajak Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp46.306.128.060,00 dan terealisasi sebesar Rp54.094.384.309,53 atau mencapai 116,82% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp7.788.256.249,53 atau 16,82% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp26.579.810.709,77, Pajak Daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp27.514.573.599,76 atau 103,52%.



Adapun pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Pajak Reklame	520.000.000,00	411.061.429,62	79,05	503.980.954,68	(92.919.525,06)
2	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	6.697.600,00	33,49	26.016.960,00	(19.319.360,00)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000,00	1.128.965.459,72	86,84	1.300.860.854,91	(171.895.395,19)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.600.000.000,00	1.576.097.058,00	98,51	1.535.119.869,00	40.977.189,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.471.536.560,00	11.908.927.000,00	113,73	7.931.788.492,00	3.977.138.508,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.768.000.000,00	16.025.684.262,19	116,40	15.282.043.579,18	743.640.683,01
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.337.699.000,00	8.185.727.500,00	111,56	0,00	8.185.727.500,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.288.892.500,00	14.851.224.000,00	131,56	0,00	14.851.224.000,00
Total		46.306.128.060,00	54.094.384.309,53	116,82	26.579.810.709,77	27.514.573.599,76

Pajak Daerah di kabupaten Kapuas Hulu dengan memakai Mekanisme dan dasar hukum untuk pemungutan Pajak Daerah diatur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2019 tentang Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP); Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
4. Perbup Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air;
5. Perbup Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2;
6. Perbup Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan PBJT;
7. Perbup Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
8. Perbup Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat



Berpenghasilan Rendah;

9. Perbup Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB;
10. Perbup Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Peralatan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Perbup Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB; dan
12. Peraturan terkait lainnya yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi serta kenaikan atau penurunan dari masing-masing objek Pajak Daerah TA 2025 dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Reklame	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	520.000.000,00	411.061.429,62

Pajak Reklame tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp520.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp411.061.429,62 atau mencapai 79,05% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan kekurangan sebesar Rp108.938.570,38 atau 20,95% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp503.980.954,68, terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp92.919.525,06 atau 18,44%. Hal ini menunjukkan adanya tren penurunan kinerja pada sektor Pajak Reklame.

Tidak tercapainya target dan penurunan realisasi penerimaan terhadap Pajak Reklame disebabkan oleh berkurangnya aktivitas pemasangan reklame.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, Bapenda akan melakukan pendataan terhadap objek pajak reklame secara berkala, meningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban terhadap reklame yang terpasang di wilayah kabupaten Kapuas hulu.

5.1.1.1.2 Pajak Sarang Burung Walet	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	20.000.000,00	6.697.600,00

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.697.600,00 atau hanya mencapai 33,49% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan belum optimal dengan kekurangan sebesar Rp13.302.400,00 atau 66,51% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp26.016.960,00, terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp19.319.360,00 atau 74,26%. Hal ini menunjukkan adanya



penurunan kinerja yang tajam pada jenis pajak ini.

Secara umum, tidak tercapainya target serta penurunan realisasi Pajak Sarang Burung Walet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya produksi sarang burung walet, turunnya harga sarang burung walet, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, keterbatasan data potensi yang akurat, serta kendala dalam pengawasan dan penagihan.

Sebagai tindak lanjut, Bapenda akan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak, melakukan pendataan kembali terhadap objek pajak sarang burung walet secara menyeluruh, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan pihak kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pendataan dan pemungutan

5.1.1.1.1.3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.300.000.000,00	1.128.965.459,72

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.128.965.459,72 atau mencapai 86,84% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan kekurangan sebesar Rp171.034.540,28 atau 13,16% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.300.860.854,91, terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp171.895.395,19 atau 13,21%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pada sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Secara umum, tidak tercapainya target penerimaan Pajak MBLB disebabkan oleh menurunnya aktivitas produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan, terbatasnya jumlah wajib pajak aktif, serta faktor cuaca dan kondisi lapangan yang memengaruhi kegiatan penambangan. Serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan, melakukan pendataan dan pemutakhiran basis data wajib pajak, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

5.1.1.1.1.4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.600.000.000,00	1.576.097.058,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.576.097.058,00 atau mencapai 98,51% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan hampir mencapai target yang ditetapkan, dengan kekurangan sebesar Rp23.902.942,00 atau 1,49% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.535.119.869,00, terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp40.977.189,00 atau 2,67%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan



kinerja pada penerimaan PBB-P2 meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Secara umum, belum tercapainya target atas penerimaan PBB-P2 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, adanya penolakan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, adanya objek pajak yang belum terdata atau belum diperbarui nilainya.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan memberikan sosialisasi atau edukasi pada WP PBB-P2, melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak PBB-P2, melakukan penagihan terhadap tunggakan/piutang pajak, pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan dan pembayaran PBB-P2.

5.1.1.1.1.5 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

**Anggaran 2025
(Rp)**

**Realisasi 2025
(Rp)**

10.471.536.560,00

11.908.927.000,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.471.536.560,00 dan terealisasi Rp11.908.927.000,00 atau mencapai 113,73% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp1.437.390.440,00 atau 13,73%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.931.788.492,00, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp3.977.138.508,00 atau 50,14%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan serta peralihan hak atas properti di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan HGU, peningkatan pelayanan dan pemungutan BPHTB, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perbaikan sistem administrasi dan koordinasi antar instansi terkait juga turut mendukung peningkatan penerimaan.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan melakukan penguatan sistem monitoring, evaluasi dan validasi nilai transaksi, pelayanan berbasis digital terus dikembangkan guna meningkatkan kemudahan transaksi dan transparansi serta peningkatan koordinasi dengan PPAT/Notaris dan instansi terkait.

5.1.1.1.1.6 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

**Anggaran 2025
(Rp)**

**Realisasi 2025
(Rp)**

13.768.000.000,00

16.025.684.262,19

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.768.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.025.684.262,19 atau mencapai 116,40% dari target. Capaian ini



menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp2.257.684.262,19 atau 16,40% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp15.282.043.579,18, penerimaan PBJT mengalami peningkatan sebesar Rp743.640.683,01 atau 4,87%, adapun rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025		%	TA 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1 PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.258.000.000,00	2.802.877.656,50	222,80	2.330.773.660,50	472.103.996,00
2 PBJT-Tenaga Listrik	11.850.000.000,00	12.344.420.196,69	104,17	12.155.715.868,88	188.704.327,81
3 PBJT-Jasa Perhotelan	580.000.000,00	725.762.027,30	125,13	679.737.837,00	46.024.190,30
4 PBJT-Jasa Parkir	50.000.000,00	73.882.240,00	147,76	68.344.940,00	5.537.300,00
5 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	30.000.000,00	78.742.141,70	262,47	47.471.272,80	31.270.868,90
Total	13.768.000.000,00	16.025.684.262,19	116,40	15.282.043.579,18	743.640.683,01

Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor barang dan jasa yang menjadi objek PBJT, serta adanya optimalisasi pemungutan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan perbaikan sistem administrasi juga turut berkontribusi terhadap kenaikan realisasi.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan. Optimalisasi penggunaan sistem digital melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik terhadap WP PBJT serta memberikan sosialisasi atau edukasi kepada WP PBJT.

5.1.1.1.1.7 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

**Anggaran 2025
(Rp)
7.337.699.000,00**

**Realisasi 2025
(Rp)
8.185.727.500,00**

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.337.699.000,00 dan terealisasi Rp8.185.727.500,00 atau mencapai 111,56% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp848.028.500,00 atau 11,56%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00, terjadi peningkatan sebesar Rp8.185.727.500,00 atau 100,00%. Hal ini disebabkan karena opsen PKB merupakan jenis penerimaan yang mulai diimplementasikan atau dioptimalkan pada tahun 2025, sehingga pada tahun sebelumnya belum terdapat realisasi.



Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas pemungutan opsen PKB antara Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak terkait lainnya, serta adanya perbaikan sistem bagi hasil dan administrasi perpajakan daerah. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan juga turut mendorong tingginya realisasi.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian ini melalui penguatan koordinasi dan sinergitas dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan pihak terkait lainnya, pemutakhiran data kendaraan bermotor, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, optimalisasi sistem digital dan integrasi data perpajakan juga perlu terus dikembangkan guna meningkatkan akurasi dan transparansi penerimaan opsen PKB.

5.1.1.1.1.8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		11.288.892.500,00	14.851.224.000,00

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp11.288.892.500,00 dan terealisasi Rp14.851.224.000,00 atau mencapai 131,56% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp3.562.331.500,00 atau 31,56%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00, terjadi peningkatan sebesar Rp14.851.224.000,00 atau 100,00%. Hal ini disebabkan karena opsen BBNKB merupakan jenis penerimaan yang mulai diimplementasikan atau dioptimalkan pada tahun 2025, sehingga pada tahun sebelumnya belum terdapat realisasi.

Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi jual beli dan balik nama kendaraan bermotor, serta optimalisasi pemungutan opsen melalui sistem yang lebih baik dan terintegrasi. Selain itu, meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan efektivitas koordinasi dengan pemerintah provinsi juga turut mendorong tingginya realisasi penerimaan.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian ini melalui penguatan koordinasi dan sinergitas dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait lainnya, pemutakhiran data kendaraan dan transaksi balik nama, serta peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, optimalisasi sistem digital dan integrasi data perpajakan perlu terus dikembangkan guna meningkatkan transparansi, akurasi, dan potensi penerimaan opsen BBNKB di masa mendatang.



5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran 2025
(Rp)
3.994.788.998,00

Realisasi 2025
(Rp)
4.729.489.349,00

Retribusi Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.994.788.998,00 dan terealisasi sebesar Rp4.729.489.349,00 atau mencapai 118,39% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp734.700.351,00 atau 18,39% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.899.180.489,00, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp2.169.691.140,00 atau 31,45%. Adapun rincian Retribusi Daerah tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5 Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Jasa Umum	3.253.339.000,00	3.601.135.164,00	110,69	6.151.117.927,00	(2.549.982.763,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	666.449.998,00	675.776.000,00	101,40	688.411.000,00	(12.635.000,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	75.000.000,00	452.578.185,00	603,44	59.651.562,00	392.926.623,00
Total		3.994.788.998,00	4.729.489.349,00	118,39	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)

Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 dihitung dan dipungut berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 619 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Sewa Kamar dan Kantin Pada Mess Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 437 Pontianak;
5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 529/UPT-BI/2021 Tentang Penetapan Harga Benih Ikan dan Persentase Penggunaan Hasil Penjualan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Arwana pada UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin;
6. Perbup Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan;
7. Perbup Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi



Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Peralatan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

8. Perbup Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
9. Perbup Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di Air.

Berdasarkan rincian Retribusi Daerah tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa objek Retribusi Daerah sudah melampaui target penerimaan masing-masing objek Retribusi Daerah, untuk penjelasannya dapat dilihat dengan penjelasan berikut ini:

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Anggaran 2025
(Rp)
3.253.339.000,00

Realisasi 2025
(Rp)
3.601.135.164,00

Retribusi Jasa Umum tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.253.339.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.601.135.164,00 atau mencapai 110,69% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp347.796.164,00 atau 10,69% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.151.117.927,00, Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp2.549.982.763,00 atau 41,46%. Adapun rincian Retribusi Jasa Umum tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.6 Rincian Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.772.189.000,00	3.026.378.764,00	109,17	5.664.957.127,00	(2.638.578.363,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	86.000.000,00	89.480.000,00	104,05	77.940.000,00	11.540.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.650.000,00	82.288.000,00	162,46	46.308.000,00	35.980.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00	41.075.600,00
Total		3.253.339.000,00	3.601.135.164,00	110,69	6.151.117.927,00	(2.549.982.763,00)

Secara umum, meskipun sebagian besar jenis retribusi jasa umum melampaui target, penurunan signifikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan total dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan pola layanan, kebijakan pembiayaan, serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap potensi dan



kebijakan tarif retribusi, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan, serta peningkatan pendataan dan pengawasan terhadap objek retribusi. Selain itu, optimalisasi kualitas layanan publik, peningkatan kepatuhan pembayaran, dan pemanfaatan sistem digital dalam pemungutan retribusi juga perlu terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Anggaran 2025
(Rp)
666.449.998,00

Realisasi 2025
(Rp)
675.776.000,00

Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp666.449.998,00 dan terealisasi sebesar Rp675.776.000,00 atau mencapai 101,40% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp9.326.002,00 atau 1,40% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp688.411.000,00, Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar Rp12.635.000,00 atau 1,84%. Adapun rincian Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.7 Rincian Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024	Naik/Turun
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	178.000.000,00	219.130.000,00	123,11	179.715.000,00	39.415.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	55.000.000,00	55.680.000,00	101,24	52.250.000,00	3.430.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.299.998,00	6.705.000,00	80,78	7.956.000,00	(1.251.000,00)
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00	(34.130.000,00)
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	39.150.000,00	59.046.000,00	150,82	37.195.000,00	21.851.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	186.000.000,00	131.050.000,00	70,46	173.000.000,00	(41.950.000,00)
Total		666.449.998,00	675.776.000,00	101,40	688.411.000,00	(12.635.000,00)

Secara umum, meskipun sebagian jenis retribusi jasa usaha menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target, terdapat beberapa komponen yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas usaha, tingkat pemanfaatan fasilitas daerah, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi permintaan terhadap layanan dan produk usaha daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset dan fasilitas daerah, peningkatan kualitas layanan usaha, serta penguatan pengelolaan dan pengawasan terhadap objek retribusi. Diperlukan evaluasi terhadap potensi dan strategi pemungutan, serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi jasa usaha.

**5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu****Anggaran 2025
(Rp)
75.000.000,00****Realisasi 2025
(Rp)
452.578.185,00**

Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp452.578.185,00 atau mencapai 603,44% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp377.578.185,00 atau 503,44% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp59.651.562,00, Retribusi Perizinan Tertentu mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp392.926.623,00 atau 658,70%.

Secara umum, capaian yang jauh melampaui target ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha, serta adanya optimalisasi pelayanan perizinan. Selain itu, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pengurusan izin, serta kemungkinan adanya penyesuaian regulasi dan tarif juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target agar lebih realistis sesuai potensi yang ada, serta mempertahankan kualitas pelayanan perizinan. Selain itu, diperlukan pemutakhiran data perizinan, peningkatan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki izin, serta optimalisasi sistem digital guna mendukung transparansi dan kemudahan layanan, sehingga penerimaan retribusi dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**Anggaran 2025
(Rp)
17.524.575.448,00****Realisasi 2025
(Rp)
17.524.575.448,85**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.524.575.448,00 dan terealisasi sebesar Rp17.524.575.448,85 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran, dengan pelampauan yang sangat kecil sebesar Rp0,85 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp17.074.176.833,76, pos ini mengalami peningkatan sebesar Rp450.398.615,09 atau 2,64%. Adapun rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.8 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.467.868.342,00	17.467.868.342,85	100,00	16.881.281.349,76	586.586.993,09
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	56.707.106,00	56.707.106,00	100,00	192.895.484,00	(136.188.378,00)
	Total	17.524.575.448,00	17.524.575.448,85	100,00	17.074.176.833,76	450.398.615,09

Secara umum, capaian yang sesuai target ini mencerminkan bahwa penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, dan hasil tagihan *Collection* Kredit telah berjalan sesuai dengan proyeksi. Pembagian Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat” Nomor 1 tanggal 14 Maret 2025. Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh kinerja BUMD yang relatif baik sehingga mampu memberikan kontribusi dividen yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah, dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebagai *standing point*.

Berdasarkan rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sudah sesuai target penerimaan masing-masing objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, untuk penjelasannya dapat dilihat dengan penjelasan berikut ini:

5.1.1.1.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		17.467.868.342,00	17.467.868.342,85

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.467.868.342,00 dan terealisasi sebesar Rp17.467.868.342,85 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran, dengan



pelampauan yang sangat kecil sebesar Rp0,85 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.881.281.349,76, penerimaan dividen ini mengalami peningkatan sebesar Rp586.586.993,09 atau 3,47%.

Secara umum, tidak terdapat selisih yang signifikan terhadap target karena penetapan anggaran dividen telah memperhatikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2024 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat” Nomor 1 tanggal 14 Maret 2025. Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja keuangan, peningkatan laba usaha, serta pengelolaan yang lebih efisien pada BUMD sektor lembaga keuangan.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan upaya menjaga kinerja positif ini melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi potensi usaha. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD dan penyesuaian strategi bisnis agar kontribusi dividen kepada pemerintah daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

5.1.1.1.3.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		56.707.106,00	56.707.106,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp56.707.106,00 dan terealisasi sebesar Rp56.707.106,00 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran tanpa adanya pelampauan. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp192.895.484,00, penerimaan dividen pada bidang air minum mengalami penurunan sebesar Rp136.188.378,00 atau 70,60%. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan telah sesuai dengan target yang ditetapkan tanpa selisih.

Secara umum, penurunan tersebut dapat disebabkan oleh menurunnya laba usaha BUMD air minum yang dipengaruhi oleh tingginya biaya operasional, peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, serta efisiensi operasional yang belum optimal. Selain itu, faktor tarif layanan, tingkat kehilangan air (non-revenue water), serta keterbatasan cakupan pelayanan juga dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan membagikan dividen.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian biaya, optimalisasi pendapatan melalui perluasan layanan dan peningkatan kualitas distribusi air, serta penguatan manajemen dan tata kelola perusahaan.



Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan tarif dan strategi bisnis agar kinerja keuangan BUMD air minum dapat meningkat dan memberikan kontribusi dividen yang lebih optimal kepada pemerintah daerah.

5.1.1.1.4	Lain -Lain PAD yang Sah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		43.140.938.585,00	56.849.672.391,57

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp43.140.938.585,00 dan terealisasi sebesar Rp56.849.672.391,57 atau mencapai 131,78% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp13.708.733.806,57 atau 31,78% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp41.764.809.129,41, Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp15.084.863.262,16 atau 36,12%. Adapun realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	158.446.000,00	212.561.000,00	134,15	215.169.800,00	(2.608.800,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	402.530.722,82	402,53	188.939.150,32	213.591.572,50
3	Jasa Giro	1.300.000.000,00	1.405.114.574,77	108,09	1.606.543.280,86	(201.428.706,09)
4	Pendapatan Bunga	50.000.000,00	1.407.285.021,75	2.814,57	1.488.872.595,11	(81.587.573,36)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00	5.482.952,60	54,83	54.929.043,24	(49.446.090,64)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	17.898.609,00	96.157.194,00	537,23	14.658.242,00	81.498.952,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	9.875.981.976,00	14.040.378.159,18	142,17	8.209.042.051,70	5.831.336.107,48
8	Pendapatan BLUD	31.628.612.000,00	39.280.162.766,45	124,19	29.986.654.966,18	9.293.507.800,27
	Total	43.140.938.585,00	56.849.672.391,57	131,78	41.764.809.129,41	15.084.863.262,16

Berdasarkan rincian pendapatan Lain -Lain PAD tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa objek pendapatan Lain -Lain PAD secara total sudah melampaui target penerimaan masing-masing objek pendapatan Lain -Lain PAD, untuk penjelasannya dapat dilihat dengan penjelasan berikut ini:

5.1.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		158.446.000,00	212.561.000,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp158.446.000,00 dan terealisasi sebesar Rp212.561.000,00 atau mencapai 134,15% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar



Rp54.115.000,00 atau 34,15% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp215.169.800,00, penerimaan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp2.608.800,00 atau 1,21%. Adapun realisasi dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	47.971.800,00	(47.971.800,00)
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	158.446.000,00	182.577.000,00	115,23	139.167.000,00	43.410.000,00
3	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	29.984.000,00	-	0,00	29.984.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-	28.031.000,00	(28.031.000,00)
Total		158.446.000,00	212.561.000,00	134,15	215.169.800,00	(2.608.800,00)

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dengan pelampauan sebesar Rp54.115.000,00 atau 34,15%. Peningkatan ini terutama berasal dari penjualan bangunan gedung kantor, serta adanya penjualan bangunan kesehatan dan bangunan pendidikan yang pada tahun sebelumnya tidak terealisasi.

Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2025 tidak dianggarkan, namun terealisasi sebesar Rp29.984.000,00. Realisasi ini seluruhnya merupakan penjualan bangunan air irigasi lainnya dan menunjukkan adanya optimalisasi aset yang sebelumnya belum direncanakan untuk dijual.

Sementara itu, Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin serta Hasil Penjualan Aset Lain-Lain tidak terealisasi pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang masing-masing terealisasi sebesar Rp47.971.800,00 dan Rp28.031.000,00, terjadi penurunan pada kedua jenis pendapatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tidak terdapat objek aset sejenis yang dapat dijual atau belum memenuhi persyaratan administratif untuk dilakukan penjualan.

Secara umum, meskipun realisasi tahun 2025 melampaui target anggaran, penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh tidak terealisasinya penjualan pada beberapa jenis aset serta perbedaan ketersediaan objek penjualan antar tahun anggaran. Selain itu, proses administrasi dan mekanisme penjualan aset turut memengaruhi waktu dan capaian realisasi.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan penjualan aset melalui inventarisasi dan identifikasi potensi BMD yang lebih optimal. Selain itu, percepatan proses administrasi penilaian dan penghapusan aset perlu ditingkatkan agar



pelaksanaan penjualan dapat lebih tepat waktu. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan metode penjualan serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah guna mendukung peningkatan realisasi pendapatan dari penjualan BMD secara lebih efektif dan akuntabel.

5.1.1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		100.000.000,00	402.530.722,82

Hasil Sewa Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai landasan operasional utama pengelolaan aset daerah. Selain itu, penganggaran pendapatan dari sewa BMD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penetapan tarif sewa juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta hasil Rapat Penetapan Tarif Sewa BMD Kabupaten Kapuas Hulu 22 November 2024 yang menetapkan tarif sewa tahun 2025 dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian yang berlaku.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp402.530.722,82 atau mencapai 402,53% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp302.530.722,82 atau 302,53% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp188.939.150,32, penerimaan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp213.591.572,50 atau 113,05%.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan dari pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa. Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target karena realisasi telah jauh melampaui anggaran. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta meningkatnya permintaan atau penggunaan aset oleh pihak ketiga.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan pemutakhiran data aset yang berpotensi untuk disewakan, optimalisasi tarif sewa sesuai nilai ekonomis aset, serta peningkatan pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan aset. Selain itu, perencanaan target pendapatan perlu disusun lebih realistis sesuai dengan potensi riil agar dapat mencerminkan kinerja yang lebih akurat.

5.1.1.1.4.3	Jasa Giro	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.300.000.000,00	1.405.114.574,77

Jasa Giro tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar



Rp1.405.114.574,77 atau mencapai 108,09% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp105.114.574,77 atau 8,09% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.606.543.280,86, penerimaan dari Jasa Giro mengalami penurunan sebesar Rp201.428.706,09 atau 12,54%, adapun realisasi dari Jasa Giro tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Jasa Giro Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00	1.181.166.367,50	107,38	1.222.617.890,60	(41.451.523,10)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	223.948.207,27	111,97	275.926.675,90	(51.978.468,63)
3	Jasa Giro pada Rekening Cadangan Dana	0,00	0,00	-	107.998.714,36	(107.998.714,36)
Total		1.300.000.000,00	1.405.114.574,77	108,09	1.606.543.280,86	(201.428.706,09)

Secara umum, meskipun realisasi tahun 2025 melampaui target anggaran, penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh fluktuasi saldo kas dan tingkat suku bunga giro yang memengaruhi besaran jasa giro yang diterima.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan pengelolaan kas yang lebih optimal melalui penataan saldo kas yang efisien serta pemilihan rekening penempatan dana yang memberikan imbal hasil optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dalam pengelolaan kas daerah dan pemanfaatan sistem monitoring kas secara real time guna mengoptimalkan penerimaan jasa giro.

5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

**Anggaran 2025
(Rp)
50.000.000,00**

**Realisasi 2025
(Rp)
1.407.285.021,75**

Pendapatan Bunga tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi Rp1.407.285.021,75 atau mencapai 2.814,57% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp1.357.285.021,75 atau 2.714,57% yang diantaranya dipengaruhi oleh penempatan deposito ditahun 2025 yang sebelumnya tidak direncanakan dalam penyusunan APBD tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.488.872.595,11, terjadi penurunan sebesar Rp81.587.573,36 atau 5,48%. Hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan penerimaan bunga meskipun realisasi tetap jauh melampaui target yang ditetapkan. Adapun rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terlihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 5.12 Rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Uraian	Pendapatan Bunga
1	Pendapatan Bunga dari TDF	49.995.673,00
2	Pendapatan Bunga dari Penempatan Deposito	1.357.289.348,75
	Jumlah	1.407.285.021,75

Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target karena realisasi telah jauh melebihi anggaran. Namun, penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dapat dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga serta perubahan pola penempatan dana pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan optimalisasi strategi penempatan dana pada instrumen yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif, serta peningkatan perencanaan kas agar saldo yang mengendap dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, penetapan target anggaran perlu disesuaikan dengan potensi riil agar lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

5.1.1.1.4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Anggaran 2025 (Rp) 10.000.000,00	Realisasi 2025 (Rp) 5.482.952,60

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi Rp5.482.952,60 atau mencapai 54,83% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan tidak mencapai target dengan kekurangan sebesar Rp4.517.047,40 atau 45,17%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp54.929.043,24, terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp49.446.090,64 atau 90,02%. Hal ini menunjukkan penurunan penerimaan dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2025.

Secara umum, tidak terealisasinya target disebabkan oleh menurunnya jumlah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atau meningkatnya kepatuhan penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Selain itu, faktor pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik juga dapat memengaruhi rendahnya penerimaan denda.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penetapan target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan tren kepatuhan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak tetap perlu dilakukan guna menjaga kualitas pekerjaan, serta optimalisasi pencatatan dan penagihan denda agar seluruh potensi penerimaan dapat terealisasi dengan baik.

**5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah****Anggaran 2025
(Rp)
17.898.609,00****Realisasi 2025
(Rp)
96.157.194,00**

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.898.609,00 dan terealisasi sebesar Rp96.157.194,00 atau mencapai 537,23% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp78.258.585,00 atau 437,23% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp14.658.242,00, Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp81.498.952,00 atau 555,99%. Adapun rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	254.777,00	-	0,00	254.777,00
2	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	69.985.348,00	-	0,00	69.985.348,00
3	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	7.870.832,00	13.474.069,00	171,19	14.658.242,00	(1.184.173,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	108.977,00	19.800,00	18,17	0,00	19.800,00
5	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.918.800,00	12.390.600,00	124,92	0,00	12.390.600,00
6	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	32.600,00	-	0,00	32.600,00
Total		17.898.609,00	96.157.194,00	537,23	14.658.242,00	81.498.952,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh adanya penerimaan denda yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan anggaran, sementara pada beberapa komponen yang tidak mencapai target disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif lebih baik.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan target berbasis data historis dan potensi riil, peningkatan pengawasan dan penagihan pajak, serta optimalisasi sistem informasi perpajakan guna memastikan seluruh potensi penerimaan denda dapat teridentifikasi dan terealisasi secara maksimal.



5.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran 2025
(Rp)
9.875.981.976,00Realisasi 2025
(Rp)
14.040.378.159,18

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.875.981.976,00 dan terealisasi sebesar Rp14.040.378.159,18 atau mencapai 142,17% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp4.164.396.183,18 atau 42,17% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.209.042.051,70, pendapatan dari pengembalian mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp5.831.336.107,48 atau 71,04%. Adapun rincian realisasi dari Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.14 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	-	545.758.177,22	(545.758.177,22)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Perjalanan Dinas	12.240.000,00	13.754.000,00	112,37	142.050.000,00	(128.296.000,00)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	111.844.411,00	591.971.267,00	529,28	81.492.865,00	510.478.402,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.231.508,00	4.025.243,00	28,28	20.511.785,36	(16.486.542,36)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	-	7.351.290,00	(7.351.290,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	127.850.000,00	1.719.842.000,00	1.345,20	528.350.000,00	1.191.492.000,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	115.920.000,00	-	0,00	115.920.000,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Barang	18.000.000,00	511.859.575,00	2.843,66	12.000,00	511.847.575,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Jasa	186.261.500,00	186.261.500,00	100,00	2.170.461.000,00	(1.984.199.500,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	7.126.000,00	103.146.982,00	1.447,47	0,00	103.146.982,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelembihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat	9.346.877.107,00	9.350.582.886,00	100,04	0,00	9.350.582.886,00



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	yang Berbadan Hukum Indonesia					
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	543.566.000,00	-	0,00	543.566.000,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.290.500,00	33.290.500,00	100,00	0,00	33.290.500,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	18.260.950,00	716.992.950,69	3.926,37	4.455.731.845,57	(3.738.738.894,88)
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	37.789.188,63	-	257.323.088,55	(219.533.899,92)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	31.484.000,00	-	0,00	31.484.000,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan	0,00	2.000.000,00	-	0,00	2.000.000,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	77.892.066,86	-	0,00	77.892.066,86
Total		9.875.981.976,00	14.040.378.159,18	142,17	8.209.042.051,70	5.831.336.107,48

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 secara umum, pelampauan target terjadi karena adanya pengembalian belanja yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan anggaran, sedangkan penurunan pada beberapa komponen dipengaruhi oleh bertambahnya temuan atau koreksi pembayaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar meminimalkan terjadinya kelebihan pembayaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan pencatatan dan monitoring pengembalian secara lebih optimal untuk memastikan bahwa rekomendasi tindak lanjut temuan atau koreksi pembayaran telah dipenuhi secara memadai.

**5.1.1.1.4.8 Pendapatan BLUD**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
31.628.612.000,00	39.280.162.766,45

Pendapatan BLUD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp31.628.612.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.280.162.766,45 atau mencapai 124,19% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp7.651.550.766,45 atau 24,19% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp29.986.654.966,18, Pendapatan BLUD mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp9.293.507.800,27 atau 30,99%.

Secara umum, capaian yang melampaui target menunjukkan peningkatan kinerja layanan BLUD, baik dari sisi volume pelayanan maupun optimalisasi pendapatan yang dihasilkan.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan cakupan layanan, optimalisasi pengelolaan pendapatan, serta penyesuaian target yang lebih realistis sesuai dengan potensi riil dan tren kinerja BLUD.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17

Pendapatan Transfer tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.673.287.751.783,00 dan terealisasi sebesar Rp1.595.333.010.902,17 atau mencapai 95,34% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp77.954.740.880,83 atau 4,66% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.725.408.269.411,00, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp130.075.258.508,83 atau 7,54%. Adapun Rincian Pendapatan Transfer tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15 Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17	95,57	1.669.684.064.369,00	(130.300.051.158,83)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.613.560.987,00	55.948.997.692,00	89,36	55.724.205.042,00	224.792.650,00
Total		1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17	95,34	1.725.408.269.411,00	(130.075.258.508,83)



		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah		
	Pusat	1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.610.674.190.796,00 dan terealisasi sebesar Rp1.539.384.013.210,17 atau mencapai 95,57% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp71.290.177.585,83 atau 4,43% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.669.684.064.369,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp130.300.051.158,83 atau 7,80%.

Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	163.582.201.000,00	162.868.145.200,00	99,56	111.171.082.390,00	51.697.062.810,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	943.874.692.000,00	946.039.985.059,00	100,23	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	253.191.074.796,00	234.146.450.729,17	92,48	300.705.764.602,00	(66.559.313.872,83)
5	Dana Desa	242.696.655.000,00	188.999.864.222,00	77,87	253.262.296.832,00	(64.262.432.610,00)
6	Insentif Fiskal	7.329.568.000,00	7.329.568.000,00	100,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00
Total		1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17	95,57	1.669.684.064.369,00	(130.300.051.158,83)

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	163.582.201.000,00	162.868.145.200,00

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp163.582.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp162.868.145.200,00 atau mencapai 99,56% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat kekurangan realisasi sebesar Rp714.055.800,00 atau 0,44% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp111.171.082.390,00, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp51.697.062.810,00 atau 46,50%. Adapun rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.17 Rincian Dana Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	DBH Pajak	32.961.601.000,00	28.291.408.200,00	85,83	24.307.680.390,00	3.983.727.810,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	125.288.786.000,00	127.539.081.000,00	101,80	73.415.945.000,00	54.123.136.000,00
3	DBH Lainnya	5.331.814.000,00	7.037.656.000,00	131,99	13.447.457.000,00	(6.409.801.000,00)
Total		163.582.201.000,00	162.868.145.200,00	99,56	111.171.082.390,00	51.697.062.810,00

Secara umum, tidak tercapainya sebagian target pada DBH Pajak disebabkan oleh fluktuasi penerimaan pajak pusat yang menjadi dasar perhitungan DBH, sedangkan pelampauan pada DBH SDA dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara. Sementara itu, penurunan pada DBH lainnya disebabkan oleh penurunan dari realisasi penerimaan.

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2025
(Rp)
943.874.692.000,00

Realisasi 2025
(Rp)
946.039.985.059,00

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp943.874.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp946.039.985.059,00 atau mencapai 100,23% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp2.165.293.059,00 atau 0,23% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp997.502.079.545,00, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp51.462.094.486,00 atau 5,16%.

Tabel 5.18 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	741.508.403.000,00	758.271.389.820,00	102,26	752.731.260.000,00	5.540.129.820,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	202.366.289.000,00	187.768.595.239,00	92,79	244.770.819.545,00	(57.002.224.306,00)
Total		943.874.692.000,00	946.039.985.059,00	100,23	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2025 Dana Alokasi Umum (DAU), tidak terealisasinya sebagian DAU yang ditentukan penggunaannya disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran dari pemerintah pusat serta dinamika pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar penggunaan dana tersebut. Sementara itu, pelampauan pada DAU yang tidak ditentukan penggunaannya menunjukkan fleksibilitas penggunaan yang lebih optimal dalam mendukung kebutuhan daerah.



Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan yang didanai DAU, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar penyaluran dan pemanfaatan dana dapat lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang menetapkan alokasi DAU tiap tahunnya.

5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		253.191.074.796,00	234.146.450.729,17

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp253.191.074.796,00 dan terealisasi sebesar Rp234.146.450.729,17 atau mencapai 92,48% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp19.044.624.066,83 atau 7,52% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp300.705.764.602,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar Rp66.559.313.872,83 atau 22,13%.

Tabel 5.19 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	DAK Fisik	56.294.603.000,00	54.820.117.283,00	97,38	144.413.509.665,00	(89.593.392.382,00)
2	DAK Non Fisik	196.896.471.796,00	179.326.333.446,17	91,08	156.292.254.937,00	23.034.078.509,17
Total		253.191.074.796,00	234.146.450.729,17	92,48	300.705.764.602,00	(66.559.313.872,83)

Secara umum penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 terutama disebabkan oleh penyesuaian alokasi dari pemerintah pusat, perubahan kebijakan pada beberapa bidang (khususnya DAK Fisik), seperti pada beberapa sub kegiatan seperti layanan kesehatan, tunjangan guru, dan penyuluhan pertanian.

Adapun upaya tindak lanjut ke depan, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta perbaikan perencanaan dan kesiapan teknis agar penyerapan DAK dapat lebih optimal dan tepat waktu sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. dengan jumlah realisasi di TA 2024.

5.1.1.2.1.4	Dana Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		242.696.655.000,00	188.999.864.222,00

Dana Desa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp242.696.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp188.999.864.222,00 atau mencapai 77,87% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp53.696.790.778,00 atau 22,13% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp253.262.296.832,00, Dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp64.262.432.610,00 atau 25,37%.

Secara umum, tidak terealisasinya Dana Desa disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran



dari pemerintah pusat, keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran oleh pemerintah desa, serta dinamika pelaksanaan kegiatan di tingkat desa yang mempengaruhi penyerapan dana. Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pemenuhan persyaratan penyaluran, percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa dapat lebih optimal dan sesuai target dengan jumlah realisasi di TA 2025.

5.1.1.2.1.5 Insentif Fiskal	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	7.329.568.000,00	7.329.568.000,00

Insentif Fiskal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.329.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.329.568.000,00 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran tanpa adanya pelampauan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.042.841.000,00, Insentif Fiskal mengalami peningkatan sebesar Rp286.727.000,00 atau 4,07%.

Secara umum, realisasi insentif fiskal berdasarkan penilaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kinerja daerah yang diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan Insentif Fiskal, serta penyesuaian perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan potensi penerimaan yang akan diperoleh.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	62.613.560.987,00	55.948.997.692,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp62.613.560.987,00 dan terealisasi sebesar Rp55.948.997.692,00 atau mencapai 89,36% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp6.664.563.295,00 atau 10,64% di bawah target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp55.724.205.042,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp224.792.650,00 atau 0,40%.

Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.20 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Bagi	54.311.060.987,00	50.380.117.963,00	92,76	54.143.592.042,00	(3.763.474.079,00)



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	Hasil					
2	Bantuan Keuangan	8.302.500.000,00	5.568.879.729,00	67,07	1.580.613.000,00	3.988.266.729,00
Total		62.613.560.987,00	55.948.997.692,00	89,36	55.724.205.042,00	224.792.650,00

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

**Anggaran 2025
(Rp)
54.311.060.987,00**

**Realisasi 2025
(Rp)
50.380.117.963,00**

Pendapatan Bagi Hasil tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp54.311.060.987,00 dan terealisasi sebesar Rp50.380.117.963,00 atau mencapai 92,76% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp3.930.943.024,00 atau 7,24% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp54.143.592.042,00, Pendapatan Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar Rp3.763.474.079,00 atau 6,95%. Adapun rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.805.233.185,00	3.168.636.022,00	112,95	6.277.872.798,00	(3.109.236.776,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.836.519.070,00	3.837.650.222,00	100,03	7.535.645.125,00	(3.697.994.903,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.580.424.893,00	23.491.746.288,00	95,57	19.893.203.661,00	3.598.542.627,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.691.371.051,00	3.143.966.610,00	116,82	3.404.926.703,00	(260.960.093,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.397.512.788,00	16.738.118.821,00	82,06	17.031.943.755,00	(293.824.934,00)
Total		54.311.060.987,00	50.380.117.963,00	92,76	54.143.592.042,00	(3.763.474.079,00)

Adapun rincian per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.805.233.185,00 dan terealisasi sebesar Rp3.168.636.022,00 atau mencapai 112,95% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp363.402.837,00 atau 12,95% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.277.872.798,00, Pendapatan



Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp3.109.236.776,00 atau 49,53%.

2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.836.519.070,00 dan terealisasi sebesar Rp3.837.650.222,00 atau mencapai 100,03% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp1.131.152,00 atau 0,03% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.535.645.125,00, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp3.697.994.903,00 atau 49,07%.
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.580.424.893,00 dan terealisasi sebesar Rp23.491.746.288,00 atau mencapai 95,57% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp1.088.678.605,00 atau 4,43% di bawah target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp19.893.203.661,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp3.598.542.627,00 atau 18,09%.
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.691.371.051,00 dan terealisasi sebesar Rp3.143.966.610,00 atau mencapai 116,82% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp452.595.559,00 atau 16,82% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.404.926.703,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sebesar Rp260.960.093,00 atau 7,66%.
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.397.512.788,00 dan terealisasi sebesar Rp16.738.118.821,00 atau mencapai 82,06% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp3.659.393.967,00 atau 17,94% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp17.031.943.755,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok mengalami penurunan sebesar Rp293.824.934,00 atau 1,73%.

Secara umum, tidak tercapainya target disebabkan oleh fluktuasi realisasi penerimaan pajak di tingkat pemerintah provinsi sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, serta adanya penyesuaian kebijakan penyaluran. Penurunan pada beberapa jenis pendapatan juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan tingkat aktivitas objek pajak yang menjadi basis penerimaan.

Tindak lanjut ke depan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data



dengan pemerintah provinsi terkait penyaluran dana bagi hasil, serta penguatan monitoring terhadap realisasi penerimaan pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil guna meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan.

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	8.302.500.000,00	5.568.879.729,00

Bantuan Keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.302.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.568.879.729,00 atau mencapai 67,07% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp2.733.620.271,00 atau 32,93% di bawah target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.580.613.000,00, Bantuan Keuangan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp3.988.266.729,00 atau 252,32%.

Secara umum, tidak tercapainya target disebabkan oleh penyaluran bantuan keuangan yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai dengan alokasi yang direncanakan, yang dipengaruhi oleh proses verifikasi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pencairan dari pemerintah provinsi. Di sisi lain, kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan alokasi maupun realisasi bantuan keuangan yang diterima pada tahun berjalan.

Tindak lanjut ke depan diarahkan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kepastian alokasi dan jadwal penyaluran bantuan keuangan, percepatan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kegiatan, serta peningkatan kesiapan pelaksanaan program agar penyerapan bantuan keuangan dapat lebih optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	13.747.662.174,00	13.921.601.853,78

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.747.662.174,00 dan terealisasi sebesar Rp13.921.601.853,78 atau mencapai 101,27% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp173.939.679,78 atau 1,27% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.545.310.311,11, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp2.376.291.542,67 atau 20,58%.



5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		86.953.783,00	501.374.337,78

Pendapatan Hibah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp86.953.783,00 dan terealisasi sebesar Rp501.374.337,78 atau mencapai 576,60% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp414.420.554,78 atau 476,60% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.053.282.442,11, Pendapatan Hibah mengalami penurunan sebesar Rp551.908.104,33 atau 52,40%.

Pelampauan target terjadi karena adanya penerimaan hibah yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan anggaran, mengingat sifatnya yang insidental dan bergantung pada komitmen serta partisipasi pihak ketiga.

5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		13.660.708.391,00	13.420.227.516,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.660.708.391,00 dan terealisasi sebesar Rp13.420.227.516,00 atau mencapai 98,24% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan realisasi sebesar Rp240.480.875,00 atau 1,76% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp10.492.027.869,00, pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.928.199.647,00 atau 27,91%.

Tidak tercapainya target secara penuh antara lain disebabkan oleh fluktuasi jumlah peserta JKN yang terdaftar dan aktif, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta adanya penyesuaian kebijakan penyaluran dana kapitasi dari pemerintah pusat.

Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akurasi perencanaan target berdasarkan tren peserta, memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait penyaluran dana kapitasi, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan FKTP agar layanan tetap optimal, serta mempercepat proses administrasi dan pelaporan agar pendapatan dapat diakui secara tepat waktu.



5.1.2	BELANJA DAERAH	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.803.614.485.759,00	1.646.379.313.775,72

Jumlah Belanja Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.803.614.485.759,00 dan terealisasi sebesar Rp1.646.379.313.775,72 atau mencapai 91,28% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp157.235.171.983,28 atau 8,72% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.841.646.074.683,11, Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp195.266.760.907,39 atau 10,60%.

Secara keseluruhan, realisasi Belanja Daerah tahun 2025 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran pada beberapa komponen belanja serta penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Operasi	1.237.122.609.438,00	1.138.335.517.761,99	92,01	1.197.915.196.243,01	(59.579.678.481,02)
2	Belanja Modal	205.167.710.321,00	202.794.227.908,73	98,84	279.336.944.391,10	(76.542.716.482,37)
3	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	3.659.746.914,00	66,54	933.056.277,00	2.726.690.637,00
4	Belanja Transfer	355.824.166.000,00	301.589.821.191,00	84,76	363.460.877.772,00	(61.871.056.581,00)
Total		1.803.614.485.759,00	1.646.379.313.775,72	91,28	1.841.646.074.683,11	(195.266.760.907,39)

5.1.2.1	BELANJA OPERASI	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.237.122.609.438,00	1.138.335.517.761,99

Belanja Operasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.237.122.609.438,00 dan terealisasi sebesar Rp1.138.335.517.761,99 atau mencapai 92,01% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp98.787.091.676,01 atau 7,99% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.197.915.196.243,01, Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp59.579.678.481,02 atau 4,97%. Dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Belanja Operasi Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Pegawai	772.929.895.447,00	698.419.746.937,64	90,36	628.077.888.879,00	70.341.858.058,64
2	Belanja Barang dan Jasa	358.359.339.771,00	338.154.391.659,08	94,36	392.692.858.955,72	(54.538.467.296,64)



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
3	Belanja Subsidi	748.800.000,00	748.800.000,00	100,00	0,00	748.800.000,00
4	Belanja Hibah	104.677.374.220,00	100.613.676.445,27	96,12	176.714.597.658,29	(76.100.921.213,02)
5	Belanja Bantuan Sosial	407.200.000,00	398.902.720,00	97,96	429.850.750,00	(30.948.030,00)
Total		1.237.122.609.438,00	1.138.335.517.761,99	92,01	1.197.915.196.243,01	(59.579.678.481,02)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2025
(Rp)
772.929.895.447,00

Realisasi 2025
(Rp)
698.419.746.937,64

Belanja Pegawai tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp772.929.895.447,00 dan terealisasi sebesar Rp698.419.746.937,64 atau mencapai 90,36% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp74.510.148.509,36 atau 9,64% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp628.077.888.879,00, Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp70.341.858.058,64 atau 11,20%, dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.24 Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	506.119.956.504,00	472.543.571.521,00	93,37	407.420.383.429,00	65.123.188.092,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	247.627.510.885,00	206.995.054.410,64	83,59	113.643.994.310,00	93.351.060.100,64
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	-	90.575.955.898,00	(90.575.955.898,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.643.398.300,00	17.599.375.688,00	99,75	15.428.447.995,00	2.170.927.693,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	608.804.958,00	351.635.318,00	57,76	244.727.247,00	106.908.071,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000,00	712.440.000,00	99,99	558.100.000,00	154.340.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	217.744.800,00	217.670.000,00	99,97	206.280.000,00	11.390.000,00
Total		772.929.895.447,00	698.419.746.937,64	90,36	628.077.888.879,00	70.341.858.058,64

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran 2025
(Rp)
506.119.956.504,00

Realisasi 2025
(Rp)
472.543.571.521,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp506.119.956.504,00 dan terealisasi sebesar Rp472.543.571.521,00 atau mencapai 93,37% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar



Rp33.576.384.983,00 atau 6,63% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp407.420.383.429,00, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan sebesar Rp65.123.188.092,00 atau 15,98%. Adapun total dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Gaji Pokok ASN	384.361.124.857,00	363.447.858.245,00	94,56	313.312.561.918,00	50.135.296.327,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.687.993.270,00	30.822.157.614,00	91,49	27.545.182.023,00	3.276.975.591,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.097.635.000,00	4.582.596.000,00	89,90	4.829.751.000,00	(247.155.000,00)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.247.804.000,00	16.427.972.528,00	95,25	16.813.428.710,00	(385.456.182,00)
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.672.579.000,00	10.529.783.472,00	90,21	6.982.437.240,00	3.547.346.232,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.330.729.220,00	19.258.794.640,00	90,29	16.376.463.962,00	2.882.330.678,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	697.172.842,00	501.483.790,00	71,93	422.373.383,00	79.110.407,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.174.393,00	5.874.094,00	52,57	4.892.256,00	981.838,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.723.074.368,00	23.959.887.823,00	83,42	18.510.142.335,00	5.449.745.488,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	822.778.625,00	751.767.932,00	91,37	646.299.825,00	105.468.107,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.467.890.929,00	2.255.395.383,00	91,39	1.976.850.777,00	278.544.606,00
Total		506.119.956.504,00	472.543.571.521,00	93,37	407.420.383.429,00	65.123.188.092,00

Tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada belanja gaji dan tunjangan ASN disebabkan oleh adanya formasi pegawai yang belum terisi, perubahan status kepegawaian, pergeseran waktu pengangkatan atau pensiun ASN, serta adanya efisiensi dalam pembayaran komponen tunjangan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi riil. Selain itu, beberapa komponen belanja sangat bergantung pada realisasi aktual jumlah pegawai dan hak yang diterima, sehingga tidak seluruh anggaran dapat terserap.

Peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2024 secara umum dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah ASN, penyesuaian gaji dan tunjangan, serta peningkatan kewajiban pemerintah daerah terhadap pembayaran iuran jaminan sosial ASN.

Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akurasi perencanaan anggaran berbasis data kepegawaian yang mutakhir, melakukan pemutakhiran data ASN secara berkala, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan belanja pegawai, serta mengoptimalkan pengendalian dan monitoring realisasi belanja agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil.



5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		247.627.510.885,00	206.995.054.410,64

Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp247.627.510.885,00 dan terealisasi sebesar Rp206.995.054.410,64 atau mencapai 83,59% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp40.632.456.474,36 atau 16,41% yang tidak terealisasi. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp113.643.994.310,00, Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp93.351.060.100,64 atau 82,14%. Adapun total dari Belanja Tambahan Penghasilan ASN terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	630.252.000,00	630.252.000,00	100,00	0,00	630.252.000,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	132.174.665.000,00	113.074.517.973,64	85,55	105.409.502.690,00	7.665.015.283,64
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.395.875.000,00	968.440.000,00	69,38	1.039.820.000,00	(71.380.000,00)
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.747.048.271,00	8.574.570.000,00	98,03	7.194.671.620,00	1.379.898.380,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.679.670.614,00	83.747.274.437,00	80,00	0,00	83.747.274.437,00
Total		247.627.510.885,00	206.995.054.410,64	83,59	113.643.994.310,00	93.351.060.100,64

Secara umum, tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada belanja tambahan penghasilan ASN disebabkan oleh penyesuaian pemberian tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja, kehadiran, serta evaluasi beban kerja yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria pembayaran. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dan penataan kembali skema tambahan penghasilan ASN juga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2024 secara umum dipengaruhi oleh kebijakan optimalisasi pemberian tambahan penghasilan ASN, penyesuaian besaran tunjangan, serta peningkatan jumlah ASN yang memenuhi kriteria penerima.

Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran berbasis kinerja, memperkuat sistem penilaian kinerja ASN yang terukur dan akuntabel, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tambahan penghasilan, serta meningkatkan pengendalian dan monitoring agar realisasi belanja lebih optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

**Anggaran 2025
(Rp)
0,00**

**Realisasi 2025
(Rp)
0,00**

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp90.575.955.898,00. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak menganggarkan lagi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dikarenakan Akun Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TPO ASN) telah dinonaktifkan sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

**Anggaran 2025
(Rp)
17.643.398.300,00**

**Realisasi 2025
(Rp)
17.599.375.688,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.643.398.300,00 dan terealisasi sebesar Rp17.599.375.688,00 atau mencapai 99,75% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.022.612,00 atau 0,25% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp15.428.447.995,00, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami peningkatan sebesar Rp2.170.927.693,00 atau 14,07%. Adapun total dari Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	667.905.000,00	3.885.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.470.000,00	64.077.300,00	89,66	67.076.100,00	(2.998.800,00)
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	78.400.000,00	75.244.380,00	95,97	78.286.020,00	(3.041.640,00)
4	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	100,00	57.193.500,00	388.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	100,00	968.462.250,00	5.633.250,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.446.200,00	80.022.600,00	86,56	77.099.400,00	2.923.200,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.279.700,00	14.844.375,00	58,72	12.469.275,00	2.375.100,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan	5.292.000.000,00	5.292.000.000,00	100,00	3.722.500.000,00	1.569.500.000,00



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	Anggota DPRD					
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	100,00	630.000.000,00	693.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	756.900,00	297.585,00	39,32	290.736,00	6.849,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.277.378.000,00	5.272.221.948,00	99,90	5.241.040.714,00	31.181.234,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.774.200.000,00	3.774.200.000,00	100,00	3.672.500.000,00	101.700.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	233.625.000,00	(233.625.000,00)
Total		17.643.398.300,00	17.599.375.688,00	99,75	15.428.447.995,00	2.170.927.693,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD secara umum, untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akurasi perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil dan komposisi keanggotaan DPRD, memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan kedewanan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap komponen belanja agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		608.804.958,00	351.635.318,00

Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp608.804.958,00 dengan realisasi sebesar Rp351.635.318,00 atau mencapai 57,76% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp257.169.640,00 42,24% yang tidak terserap sesuai rencana. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp244.727.247,00, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp106.908.071,00 atau naik 43,68%. Adapun total dari Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada tahun 2025 terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	339.031.000,00	116.220.000,00	34,28	54.600.000,00	61.620.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.324.000,00	6.708.000,00	50,35	7.140.000,00	(432.000,00)
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	95.367.000,00	91.260.000,00	95,69	98.280.000,00	(7.020.000,00)
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.957.000,00	6.228.120,00	34,68	7.097.160,00	(869.040,00)
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.783.000,00	226.838,00	2,91	231.674,00	(4.836,00)



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	1.880,00	47,00	2.040,00	(160,00)
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.290.000,00	5.472.000,00	87,00	5.486.400,00	(14.400,00)
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00	112.320,00	93,60	112.320,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	355.000,00	336.960,00	94,92	336.960,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	124.879.548,00	122.234.446,00	97,88	68.186.033,00	54.048.413,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.694.410,00	2.834.754,00	76,73	3.254.660,00	(419.906,00)
Total		608.804.958,00	351.635.318,00	57,76	244.727.247,00	106.908.071,00

Peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah yang berdampak pada insentif, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan masa jabatan efektif KDH/WKDH, memperbaiki proyeksi komponen belanja variabel, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja agar lebih sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku.

Belanja Penerimaan Lainnya		Anggaran 2025	Realisasi 2025
5.1.2.1.1.6 Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		(Rp)	(Rp)
		712.480.000,00	712.440.000,00

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp712.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp712.440.000,00 atau mencapai 99,99% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp40.000,00 atau 0,01%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp558.100.000,00, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp154.340.000,00 atau naik 27,65%.

Tabel 5.29 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	100,00	184.800.000,00	127.680.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.960.000,00	99,99	373.300.000,00	26.660.000,00
Total		712.480.000,00	712.440.000,00	99,99	558.100.000,00	154.340.000,00



Kenaikan realisasi dibandingkan Tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan dukungan operasional terhadap tugas dan fungsi Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik dari sisi intensitas kegiatan maupun penyesuaian kebijakan belanja daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat berbasis kebutuhan riil, peningkatan ketepatan estimasi belanja operasional, serta penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tetap efisien namun optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.

5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		217.744.800,00	217.670.000,00

Belanja Pegawai BLUD pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp217.744.800,00 dengan realisasi sebesar Rp217.670.000,00 atau mencapai 99,97% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp74.800,00 atau 0,03%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp206.280.000,00, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp11.390.000,00 atau naik 5,52%.

Kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan belanja pegawai BLUD, yang dapat dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan penghasilan, peningkatan jumlah atau kinerja pegawai, serta optimalisasi layanan BLUD.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih presisi berdasarkan data kepegawaian terkini, peningkatan akurasi perhitungan kebutuhan belanja pegawai, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar realisasi anggaran tetap optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		358.359.339.771,00	338.154.391.659,08

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp358.359.339.771,00 dengan realisasi sebesar Rp338.154.391.658,08 atau mencapai 94,36% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.204.948.111,92 atau 5,64% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp392.692.858.955,72, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp54.538.467.296,64 atau turun 13,89%. Dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.30 Rincian Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Belanja Barang	95.654.530.392,00	87.303.920.369,87	91,27	81.363.897.304,61	5.940.023.065,26
2 Belanja Jasa	99.347.261.434,00	91.043.429.289,07	91,64	110.864.512.923,50	(19.821.083.634,43)
3 Belanja Pemeliharaan	7.266.131.284,00	7.166.144.588,57	98,62	9.710.297.990,57	(2.544.153.402,00)
4 Belanja Perjalanan Dinas	63.354.306.661,00	61.386.569.992,00	96,89	93.289.041.979,00	(31.902.471.987,00)
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.040.705.450,00	20.511.856.525,00	93,06	28.310.558.009,00	(7.798.701.484,00)
6 Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	-	40.310.624.304,20	(40.310.624.304,20)
7 Belanja Barang dan Jasa BOSP	38.533.037.275,00	38.580.003.276,00	100,12	0,00	38.580.003.276,00
8 Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.163.367.275,00	32.162.467.618,57	100,00	28.843.926.444,84	3.318.541.173,73
Total	358.359.339.771,00	338.154.391.659,08	94,36	392.692.858.955,72	(54.538.467.296,64)

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Anggaran 2025
(Rp)
95.654.530.392,00

Realisasi 2025
(Rp)
87.303.920.369,87

Realisasi Belanja Barang pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp95.654.530.392,00 dengan realisasi sebesar Rp87.303.920.369,87 atau mencapai 91,27% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.350.610.022,13 atau 8,73% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp81.363.897.304,61, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp5.940.023.065,26 atau naik 7,30%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Barang di Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Belanja Barang Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Belanja Barang Pakai Habis	95.486.146.192,00	87.150.209.440,87	91,27	80.846.874.015,61	6.303.335.425,26
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.065.000,00	1.028.000,00	96,53	9.601.800,00	(8.573.800,00)
3 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	167.319.200,00	152.682.929,00	91,25	507.421.489,00	(354.738.560,00)
Total	95.654.530.392,00	87.303.920.369,87	91,27	81.363.897.304,61	5.940.023.065,26

Tidak terealisasinya anggaran belanja barang pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau mengalami penghematan dalam pelaksanaannya. Selain itu, faktor perencanaan yang belum sepenuhnya akurat dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan juga memengaruhi tingkat serapan anggaran.

Kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas



operasional pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih berbasis kebutuhan riil, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar tingkat serapan anggaran dapat lebih maksimal tanpa mengurangi prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

**Anggaran 2025
(Rp)
99.347.261.434,00**

**Realisasi 2025
(Rp)
91.043.429.289,07**

Belanja Jasa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp99.347.261.434,00 dengan realisasi sebesar Rp91.043.429.289,07 atau mencapai 91,64% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.303.832.144,93 atau 8,36% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp110.864.512.923,50, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp19.821.083.634,43 atau turun 17,88%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Jasa pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Belanja Jasa Kantor	74.233.677.934,00	69.007.915.116,04	92,96	89.143.650.540,62	(20.135.735.424,58)
2 Belanja Jaminan/Asuransi Iuran	14.942.448.357,00	12.495.654.549,78	83,63	12.346.479.866,88	149.174.682,90
3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.470.415.000,00	1.391.122.500,00	94,61	2.015.060.000,00	(623.937.500,00)
4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	884.356.200,00	839.150.000,00	94,89	668.215.000,00	170.935.000,00
5 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	7.500.000,00	(7.500.000,00)
6 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.317.750.000,00	1.212.711.123,00	92,03	2.287.092.200,00	(1.074.381.077,00)
7 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	586.860.000,00	384.180.550,00	65,46	310.409.400,00	73.771.150,00
8 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	751.800.000,00	748.518.013,00	99,56	0,00	748.518.013,00
9 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.717.658.055,00	4.555.243.055,25	96,56	3.659.176.002,00	896.067.053,25
10 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	427.608.388,00	394.301.252,00	92,21	404.518.784,00	(10.217.532,00)
11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	-	8.000.000,00	(8.000.000,00)
12 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	14.687.500,00	14.633.130,00	99,63	14.411.130,00	222.000,00
Total	99.347.261.434,00	91.043.429.289,07	91,64	110.864.512.923,50	(19.821.083.634,43)

Tidak terealisasinya anggaran belanja jasa pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil, serta adanya kegiatan yang tidak



terlaksana atau mengalami pengurangan ruang lingkup. Selain itu, faktor perencanaan yang belum sepenuhnya tepat dan dinamika pelaksanaan kegiatan turut memengaruhi tingkat serapan anggaran.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya kebutuhan belanja jasa pada beberapa komponen utama seperti jasa kantor dan konsultasi konstruksi, sedangkan pada beberapa komponen lainnya tetap menunjukkan peningkatan sesuai kebutuhan operasional.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil, peningkatan akurasi estimasi belanja jasa, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran lebih optimal, efektif, dan efisien.

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	7.266.131.284,00	7.166.144.588,57

Belanja Pemeliharaan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.266.131.284,00 dengan realisasi sebesar Rp7.166.144.588,57 atau mencapai 98,62% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp99.986.695,43 atau 1,38% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp9.710.297.990,57, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp2.544.153.402,00 atau turun 26,20%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Pemeliharaan pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.33 Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025			TA 2024	Naik/Turun (Rp)
				Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.332.074.800,00	4.250.270.611,00	98,11	5.423.977.897,00 (1.173.707.286,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.155.340.350,00	1.153.633.227,57	99,85	2.005.079.653,57 (851.446.426,00)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.548.996.134,00	1.532.815.700,00	98,96	1.987.267.940,00 (454.452.240,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	229.720.000,00	229.425.050,00	99,87	293.972.500,00 (64.547.450,00)
Total		7.266.131.284,00	7.166.144.588,57	98,62	9.710.297.990,57 (2.544.153.402,00)

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun adanya prioritas anggaran yang dialihkan ke kegiatan lain. Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan akurasi perencanaan kebutuhan pemeliharaan berbasis kondisi riil aset, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi penganggaran agar lebih tepat sasaran dan tetap menjaga kualitas serta keberlanjutan fungsi aset daerah.

**5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas**

Anggaran 2025
(Rp)
63.354.306.661,00

Realisasi 2025
(Rp)
61.386.569.992,00

Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp63.354.306.661,00 dengan realisasi sebesar Rp61.386.569.992,00 atau mencapai 96,89% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.967.736.669,00 atau 3,11% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp93.289.041.979,00, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp31.902.471.987,00 atau turun 34,20%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.784.286.840,00	30.172.146.164,00	98,01	48.745.543.465,00	(18.573.397.301,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.395.904.821,00	31.044.798.828,00	95,83	43.843.049.514,00	(12.798.250.686,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	107.255.000,00	105.865.000,00	98,70	481.949.000,00	(376.084.000,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66.860.000,00	63.760.000,00	95,36	218.500.000,00	(154.740.000,00)
Total		63.354.306.661,00	61.386.569.992,00	96,89	93.289.041.979,00	(31.902.471.987,00)

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja perjalanan dinas, kemungkinan berkurangnya intensitas kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi pada tahun berjalan, serta optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi sebagai pengganti sebagian kegiatan tatap muka.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan perjalanan dinas yang lebih selektif dan berbasis prioritas kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi, serta penguatan pengendalian dan evaluasi agar penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan tugas pemerintahan.

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Anggaran 2025
(Rp)
22.040.705.450,00

Realisasi 2025
(Rp)
20.511.856.525,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp22.040.705.450,00 dengan realisasi sebesar Rp20.511.856.525,00 atau mencapai 93,06% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.528.848.925,00 atau 6,94% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp28.310.558.009,00, terjadi penurunan



realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp7.798.701.484,00 atau turun 27,55%, dengan jumlah rincian Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.993.267.450,00	12.113.983.118,00	93,23	19.045.227.304,00	(6.931.244.186,00)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	647.433.000,00	647.432.999,00	100,00	1.135.058.000,00	(487.625.001,00)
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	136.900.000,00	130.722.669,00	95,49	31.907.104,00	98.815.565,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	11.948.534.450,00	11.075.427.450,00	92,69	17.617.862.200,00	(6.542.434.750,00)
Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	260.400.000,00	260.400.000,00	100,00	260.400.000,00	0,00
2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.047.438.000,00	8.397.873.407,00	92,82	9.265.330.705,00	(867.457.298,00)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.866.638.000,00	3.656.633.407,00	94,57	5.466.430.705,00	(1.809.797.298,00)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.180.800.000,00	4.741.240.000,00	91,52	3.798.900.000,00	942.340.000,00
Total	22.040.705.450,00	20.511.856.525,00	93,06	28.310.558.009,00	(7.798.701.484,00)

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 tidak terealisasinya anggaran secara umum disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan riil penerima manfaat, efisiensi pelaksanaan program, serta adanya kegiatan atau bantuan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana. Selain itu, faktor administratif dan verifikasi kelayakan penerima juga turut memengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 mencerminkan adanya pengurangan alokasi atau perubahan kebijakan dalam pemberian bantuan kepada pihak ketiga/masyarakat, serta penyesuaian terhadap prioritas program yang lebih selektif dan terarah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan yang lebih akurat berbasis data penerima manfaat, peningkatan kualitas verifikasi dan validasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.



5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp) 0,00	(Rp) 0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 sebesar Rp40.310.624.304,20. Untuk tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa BOSP dikarenakan penonaktifan Akun Belanja Barang dan Jasa BOS sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOSP	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp) 38.533.037.275,00	(Rp) 38.580.003.276,00

Belanja Barang dan Jasa BOSP pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp38.533.037.275,00 dengan realisasi sebesar Rp38.580.003.276,00 atau mencapai 100,12% dari target. Capaian ini menunjukkan terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp46.966.001,00 atau 0,12%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	37.924.757.275,00	37.905.025.276,00	99,95	0,00	37.905.025.276,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	35.829.349.475,00	35.809.617.476,00	99,94	0,00	35.809.617.476,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.095.407.800,00	2.095.407.800,00	100,00	0,00	2.095.407.800,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	608.280.000,00	674.978.000,00	110,97	0,00	674.978.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	608.280.000,00	674.978.000,00	110,97	0,00	674.978.000,00
	Total	38.533.037.275,00	38.580.003.276,00	100,12	0,00	38.580.003.276,00

Secara umum, pelampauan pada Belanja BOP PAUD disebabkan adanya ketidaksesuaian pada saat penganggaran, dimana Dinas Pendidikan belum melakukan pembaruan (*update*) data penganggaran BOP PAUD ke dalam aplikasi SIPD RI, sehingga pagu anggaran yang tercantum lebih rendah dibandingkan kebutuhan riil yang terealisasi. Di sisi lain, realisasi Belanja BOSP-BOS tetap terkendali dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan peningkatan ketelitian dalam proses penganggaran, khususnya melalui sinkronisasi dan pemutakhiran data pada aplikasi SIPD RI, agar perencanaan anggaran dapat mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya serta meminimalisir terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi. Selain itu, penguatan koordinasi antar unit terkait dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran juga perlu dilakukan guna memastikan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	32.163.367.275,00	32.162.467.618,57

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp32.163.367.275,00 dengan realisasi sebesar Rp32.162.467.618,57 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp899.656,43. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp28.843.926.444,84, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp3.318.541.173,73 atau naik 11,51%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 mencapai 100,00% dari anggaran dengan tingkat penyerapan yang sangat optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan operasional BLUD telah dilakukan secara cukup akurat dan pelaksanaannya berjalan efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi sebesar 11,51% yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan layanan dan operasional BLUD seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan penyusunan perencanaan anggaran yang lebih presisi berbasis kebutuhan riil layanan, peningkatan akurasi perhitungan standar biaya, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja agar tetap efisien namun mendukung peningkatan kualitas layanan BLUD secara berkelanjutan.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	748.800.000,00	748.800.000,00

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp748.800.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp748.800.000,00 atau 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp748.800.000,00 atau 100,00%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Daerah mulai mengalokasikan belanja subsidi sebagai bagian dari kebijakan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang tertentu di masyarakat.

Pelaksanaan Belanja Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi belanja daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman teknis dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja. Selain itu, pengalokasian subsidi dalam APBD mengacu



pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Subsidi dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Realisasi belanja subsidi tersebut digunakan untuk mendukung penyediaan barang dan/atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga harga atau tarif yang dibebankan kepada masyarakat tetap berada dalam batas yang terjangkau.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian subsidi, khususnya terkait dampaknya terhadap stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan perencanaan yang lebih matang serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan subsidi dapat terus berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

5.1.1.3.1 Belanja Hibah

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
104.677.374.220,00	100.613.676.445,27

Belanja Hibah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp104.677.374.220,00 dan terealisasi sebesar Rp100.613.676.445,27 atau mencapai 96,12% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.063.697.774,73 atau 3,88% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp176.714.597.658,29, Belanja Hibah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp76.100.921.213,02 atau 43,06%. Dengan jumlah rincian Belanja Hibah pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Belanja Hibah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Rincian Belanja	TA 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)			
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.053.748.800,00	3.053.182.748,00	99,98	16.063.339.678,80	(13.010.156.930,80)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	90.571.276.420,00	86.642.869.703,00	95,66	151.351.877.179,49	(64.709.007.476,49)
3	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	3.985.960.000,00	(3.985.960.000,00)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.212.528.000,00	1.212.528.000,00	100,00	1.096.530.000,00	115.998.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	9.839.821.000,00	9.705.095.994,27	98,63	4.216.890.800,00	5.488.205.194,27
Jumlah		104.677.374.220,00	100.613.676.445,27	96,12	176.714.597.658,29	(76.100.921.213,02)

Secara umum, tidak terealisasinya dari beberapa anggaran belanja hibah disebabkan oleh adanya



penyesuaian kebijakan pemerintah daerah terhadap prioritas pemberian hibah, belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh calon penerima hibah, serta efisiensi dan selektivitas dalam proses penyaluran. Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi dan penyaluran hibah pada beberapa jenis penerima, khususnya kepada badan/lembaga dan pemerintah pusat.

Belanja Hibah Dana BOSP pada tahun 2024 direalisasikan pada Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Dana BOSP masing-masing sebesar Rp3.985.960.000,00 dan Rp4.216.890.800,00. Untuk tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa BOSP dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Hibah Dana BOSP dikarenakan penonaktifan Akun Belanja Barang dan Jasa BOS sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan perencanaan hibah yang lebih terarah dan berbasis prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas verifikasi dan validasi penerima hibah, serta penguatan koordinasi dengan pihak penerima agar persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyaluran hibah guna memastikan belanja hibah lebih optimal, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pelaksanaan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Nomor 411/KESRA/2025 (Perubahan Kedua), yang mengatur pemberian bantuan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 380/SETDA/KESRA tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144/SETDA/KESRA mengenai pemberian dana hibah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025.



5.1.1.3.1.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		3.053.748.800,00	3.053.182.748,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.053.748.800,00 dan terealisasi sebesar Rp3.053.182.748,00 atau mencapai 99,98% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp566.052,00 atau 0,02% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.063.339.678,80, Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami penurunan signifikan sebesar Rp13.010.156.930,80 atau 80,99%.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana pada instansi vertikal yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Sekretariat Daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan perencanaan yang lebih cermat dan berbasis kebutuhan riil, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar alokasi hibah lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat perlu terus dilakukan untuk memastikan kontribusinya terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah.

5.1.1.3.1.2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		90.571.276.420,00	86.642.869.703,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp90.571.276.420,00 dan terealisasi sebesar Rp86.642.869.703,00 atau mencapai 95,66% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.928.406.717,00 atau 4,34% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp151.351.877.179,49, Belanja Hibah pada kelompok ini mengalami penurunan signifikan sebesar Rp64.709.007.476,49 atau 42,75%, dengan jumlah rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.38 Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No	Rincian Belanja	TA 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)			
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.713.265.000,00	8.663.265.000,00	99,43	40.832.884.000,00	(32.169.619.000,00)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	627.500.000,00	577.500.000,00	92,03	40.832.884.000,00	(40.255.384.000,00)
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.085.765.000,00	8.085.765.000,00	100,00	0,00	8.085.765.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	76.263.576.420,00	72.395.378.205,00	94,93	102.206.647.641,00	(29.811.269.436,00)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.588.500.000,00	52.458.228.000,00	97,89	62.090.483.000,00	(9.632.255.000,00)
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.675.076.420,00	19.937.150.205,00	87,93	40.116.164.641,00	(20.179.014.436,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.594.435.000,00	5.584.226.498,00	99,82	8.312.345.538,49	(2.728.119.040,49)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.408.435.000,00	5.398.435.000,00	99,82	6.929.345.200,00	(1.530.910.200,00)
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	186.000.000,00	185.791.498,00	99,89	1.383.000.338,49	(1.197.208.840,49)
	Jumlah	90.571.276.420,00	86.642.869.703,00	95,66	151.351.877.179,49	(64.709.007.476,49)

Adapun rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terbagi lagi beberapa sub kegiatan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

5.1.1.3.1.3	Belanja Hibah Dana BOS	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS tahun 2024 sebesar Rp3.985.960.000,00. Sedangkan untuk tahun 2025, belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan dan direalisasikan pada akun Belanja Hibah Dana BOSP.



5.1.1.3.1.4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.212.528.000,00	1.212.528.000,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.212.528.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.212.528.000,00 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang optimal tanpa sisa anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.096.530.000,00, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengalami peningkatan sebesar Rp115.998.000,00 atau 10,58%.

Ketentuan mengenai Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 terdapat pada Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor:106/BKBP/2025 Tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.3.1.5	Belanja Hibah Dana BOSP	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		9.839.821.000,00	9.705.095.994,27

Belanja Hibah Dana BOSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.839.821.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.705.095.994,27 atau mencapai 98,63% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp134.725.005,73 atau 1,37% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.216.890.800,00, Belanja Hibah Dana BOSP mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp5.488.205.194,27 atau 130,15%.

Tabel 5.39 Rincian Belanja Hibah Dana BOSP Kabupaten

No	Rincian Belanja	TA 2025			Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%		
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.536.885.000,00	4.534.999.550,00	99,96	0,00	4.534.999.550,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.361.616.000,00	4.237.234.594,27	97,15	3.447.970.800,00	789.263.794,27
3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	941.320.000,00	932.861.850,00	99,10	768.920.000,00	163.941.850,00
	Jumlah	9.839.821.000,00	9.705.095.994,27	98,63	4.216.890.800,00	5.488.205.194,27

5.1.1.3.2	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		407.200.000,00	398.902.720,00

Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp407.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp398.902.720,00 atau mencapai 97,96% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.297.280,00 atau 2,04% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar



Rp429.850.750,00, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp30.948.030,00 atau 7,20%.

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dianggarkan serta dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 dan beberapa SK Bupati (seperti 49/KESRA/2025 dan 411/KESRA/2025). Kebijakan ini mencakup tata cara, penganggaran, hingga persyaratan teknis pencairan bagi individu, kelompok, dan lembaga masyarakat Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Rincian Belanja	TA 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)			
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	205.700.000,00	202.402.720,00	98,40	10.350.750,00	192.051.970,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	175.000.000,00	170.000.000,00	97,14	295.000.000,00	(125.000.000,00)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	84.500.000,00	(58.000.000,00)
	Jumlah	407.200.000,00	398.902.720,00	97,96	429.850.750,00	(30.948.030,00)

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
205.167.710.321,00	202.794.227.908,73

Belanja Modal Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp205.167.710.321,00 dan terealisasi sebesar Rp202.794.227.908,73 atau mencapai 98,84% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.373.482.412,27 atau 1,16% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp279.336.944.391,10, Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp76.542.716.482,37 atau 27,40%. Rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 terlihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Belanja Modal Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	-	240.000.000,00	(240.000.000,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.094.941.049,00	34.723.736.544,00	98,94	35.193.168.507,00	(469.431.963,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.988.241.000,00	86.455.438.903,73	99,39	70.599.092.543,10	15.856.346.360,63
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.564.023.471,00	61.136.012.061,00	97,72	162.423.124.362,00	(101.287.112.301,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.415.104.801,00	20.374.452.400,00	99,80	10.556.710.339,00	9.817.742.061,00



No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
6	Belanja Modal Aset Lainnya	105.400.000,00	104.588.000,00	99,23	324.848.640,00	(220.260.640,00)
	Total	205.167.710.321,00	202.794.227.908,73	98,84	279.336.944.391,10	(76.542.716.482,37)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025 (Rp) 0,00	Realisasi 2025 (Rp) 0,00

Belanja Modal Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi Rp0,00, sehingga capaian terhadap target anggaran tidak dapat dihitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tidak terdapat alokasi maupun pelaksanaan Belanja Modal Tanah. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp240.000.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp240.000.000,00 atau 100,00%

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp240.000.000,00. Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp240.000.000,00.

Tidak adanya anggaran dan realisasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan pengadaan tanah pada tahun berjalan. Hal ini umumnya disebabkan oleh telah terpenuhinya kebutuhan lahan pada tahun sebelumnya atau adanya penyesuaian prioritas pembangunan daerah sehingga tidak memerlukan pengadaan tanah baru.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025 (Rp) 35.094.941.049,00	Realisasi 2025 (Rp) 34.723.736.544,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp35.094.941.049,00 dan terealisasi sebesar Rp34.723.736.544,00 atau mencapai 98,94% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp371.204.505,00 atau 1,06% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp35.193.168.507,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp469.431.963,00 atau 1,33%. Untuk rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.42 Rincian Belanja Modal Peralatan dan mesin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Modal Alat Besar	1.780.000.000,00	1.779.380.000,00	99,97	69.952.000,00	1.709.428.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.564.510.100,00	3.474.570.173,00	97,48	3.705.198.819,00	(230.628.646,00)



No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
3	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	-	53.940.000,00	(53.940.000,00)
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.802.652.425,00	9.704.138.349,00	99,00	6.137.711.332,00	3.566.427.017,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	340.339.000,00	333.174.124,00	97,89	7.680.093.925,00	(7.346.919.801,00)
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.145.325.000,00	6.103.859.934,00	99,33	4.107.764.288,00	1.996.095.646,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.589.807.200,00	1.579.557.473,00	99,36	1.424.424.000,00	155.133.473,00
8	Belanja Modal Komputer	2.837.639.400,00	2.714.921.469,00	95,68	4.849.144.300,00	(2.134.222.831,00)
9	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	773.000.000,00	772.966.725,00	100,00	0,00	772.966.725,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	7.549.667.924,00	7.549.195.224,00	99,99	6.370.656.557,00	1.178.538.667,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	712.000.000,00	711.973.073,00	100,00	794.283.286,00	(82.310.213,00)
	Total	35.094.941.049,00	34.723.736.544,00	98,94	35.193.168.507,00	(469.431.963,00)

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**Anggaran 2025
(Rp)**

86.988.241.000,00

**Realisasi 2025
(Rp)**

86.455.438.903,73

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp86.988.241.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.455.438.903,73 atau mencapai 99,39% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp532.802.096,27 atau 0,61% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp70.599.092.543,10, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp15.856.346.360,63 atau 22,46%.

Untuk rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.43 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	84.849.061.000,00	84.322.974.103,73	99,38	69.569.118.143,10	14.753.855.960,63
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.139.180.000,00	2.132.464.800,00	99,69	1.029.974.400,00	1.102.490.400,00
	Total	86.988.241.000,00	86.455.438.903,73	99,39	70.599.092.543,10	15.856.346.360,63

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

**Anggaran 2025
(Rp)**

62.564.023.471,00

**Realisasi 2025
(Rp)**

61.136.012.061,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan



sebesar Rp62.564.023.471,00 dan terealisasi sebesar Rp61.136.012.061,00 atau mencapai 97,72% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.428.011.410,00 atau 2,28% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp162.423.124.362,00, Belanja Modal pada kelompok ini mengalami penurunan signifikan sebesar Rp101.287.112.301,00 atau 62,36%.

Untuk rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.44 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.480.420.387,00	59.258.110.017,00	97,98	154.595.764.685,00	(95.337.654.668,00)
2	Belanja Modal Bangunan Air	1.194.250.000,00	989.232.044,00	82,83	4.781.280.077,00	(3.792.048.033,00)
3	Belanja Modal Instalasi	799.353.084,00	798.685.000,00	99,92	2.681.379.000,00	(1.882.694.000,00)
4	Belanja Modal Jaringan	90.000.000,00	89.985.000,00	99,98	364.700.600,00	(274.715.600,00)
	Total	62.564.023.471,00	61.136.012.061,00	97,72	162.423.124.362,00	(101.287.112.301,00)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

**Anggaran 2025
(Rp)**

20.415.104.801,00

**Realisasi 2025
(Rp)**

20.374.452.400,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.415.104.801,00 dan terealisasi sebesar Rp20.374.452.400,00 atau mencapai 99,80% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp40.652.401,00 atau 0,20% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp10.556.710.339,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp9.817.742.061,00 atau 93,00%. Untuk rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.45 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14.695.196.000,00	14.660.861.299,00	99,77	6.360.944.560,00	8.299.916.739,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.719.908.801,00	5.713.591.101,00	99,89	4.195.765.779,00	1.517.825.322,00
	Total	20.415.104.801,00	20.374.452.400,00	99,80	10.556.710.339,00	9.817.742.061,00



5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	105.400.000,00	104.588.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp105.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp104.588.000,00 atau mencapai 99,23% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp812.000,00 atau 0,77% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp324.848.640,00, Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp220.260.640,00 atau 67,80%.

Belanja Modal Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik, merupakan belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tidak berwujud dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan demikian, Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 menunjukkan fokus pada penguatan infrastruktur dan sistem teknologi informasi, khususnya melalui pengadaan lisensi perangkat lunak dan aplikasi, guna meningkatkan kualitas layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	5.500.000.000,00	3.659.746.914,00

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.659.746.914,00 atau mencapai 66,54% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.840.253.086,00 atau 33,46% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp933.056.277,00, Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp2.726.690.637,00 atau 292,23%.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan secara selektif dan hanya untuk kegiatan yang memenuhi kriteria darurat serta tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, penggunaan belanja ini tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh sifat Belanja Tidak Terduga yang sangat bergantung pada kejadian insidental, sehingga tidak seluruh pagu anggaran dapat digunakan. Selain itu, terdapat pula efisiensi dalam penanganan



kegiatan darurat serta optimalisasi penggunaan anggaran melalui prioritas penanganan yang benar-benar mendesak, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.

Kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa frekuensi dan kebutuhan penanganan kondisi darurat meningkat secara signifikan, baik dari sisi bencana maupun kebutuhan mendesak lainnya, sehingga pemanfaatan BTT menjadi lebih tinggi.

5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		355.824.166.000,00	301.589.821.191,00

Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp355.824.166.000,00 dan terealisasi sebesar Rp301.589.821.191,00 atau mencapai 84,76% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp54.234.344.809,00 atau 15,24% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp363.460.877.772,00, Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp61.871.056.581,00 atau 17,02%. Rincian realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.46 Rincian Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	5.258.858.000,00	4.973.717.564,00	94,58	3.119.275.000,00	1.854.442.564,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	350.565.308.000,00	296.616.103.627,00	84,61	360.341.602.772,00	(63.725.499.145,00)
	Jumlah	355.824.166.000,00	301.589.821.191,00	84,76	363.460.877.772,00	(61.871.056.581,00)

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang digunakan untuk mentransfer dana kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan serta mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Keputusan Bupati Nomor:239/DPMD/2025 Tanggal 2 Juli 2025 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Transfer. Belanja Transfer pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi beberapa jenis, antara lain:

1. Belanja Bagi Hasil, yaitu transfer kepada pemerintah desa yang bersumber dari pendapatan daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa diprioritaskan untuk:

- a. Operasional pemerintah desa dan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. Pembinaan kemasyarakatan.
2. Belanja Bantuan Keuangan, yaitu bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. ADD digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	5.258.858.000,00	4.973.717.564,00

Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.258.858.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.973.717.564,00 atau mencapai 94,58% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp285.140.436,00 atau 5,42% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.119.275.000,00, Belanja Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp1.854.442.564,00 atau 59,45%. Untuk rincian Belanja Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.754.010.000,00	4.469.132.000,00	94,01	2.534.595.000,00	1.934.537.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	504.848.000,00	504.585.564,00	99,95	584.680.000,00	(80.094.436,00)
Jumlah		5.258.858.000,00	4.973.717.564,00	94,58	3.119.275.000,00	1.854.442.564,00

5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	4.754.010.000,00	4.469.132.000,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.754.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.469.132.000,00 atau mencapai 94,01% dari target. Capaian ini



menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp284.878.000,00 atau 5,99% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.534.595.000,00, Belanja Bagi Hasil pada kelompok ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.934.537.000,00 atau 76,33%.

Peningkatan realisasi ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak daerah yang berdampak langsung pada meningkatnya alokasi bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, sejalan dengan peningkatan kinerja pendapatan daerah serta optimalisasi pemungutan pajak daerah.

Tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh adanya selisih antara target anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah, yang secara langsung memengaruhi besaran penyaluran bagi hasil. Selain itu, terdapat penyesuaian perhitungan distribusi berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang bersifat fluktuatif, sehingga tidak seluruh pagu dapat terserap sepenuhnya.

Kenaikan dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada meningkatnya kewajiban penyaluran bagi hasil kepada pemerintah desa dan kabupaten/kota sebagai bagian dari pemerataan fiskal.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan peningkatan optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penguatan sistem administrasi dan pengawasan pajak, serta peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan desa dalam rangka sinkronisasi data objek pajak. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan target pendapatan agar lebih realistis dan berbasis potensi riil, sehingga alokasi bagi hasil dapat direncanakan lebih akurat dan tidak terjadi selisih signifikan antara anggaran dan realisasi.

5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		504.848.000,00	504.585.564,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp504.848.000,00 dan terealisasi sebesar Rp504.585.564,00 atau mencapai 99,95% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp262.436,00 atau 0,05% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp584.680.000,00, Belanja Bagi Hasil pada kelompok ini mengalami penurunan sebesar Rp80.094.436,00 atau 13,70%.

Secara umum, realisasi tahun 2025 menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat optimal



karena hampir seluruh anggaran dapat direalisasikan. Tidak terealisasinya anggaran secara penuh hanya disebabkan oleh efisiensi teknis dalam penyaluran dan adanya sisa pembulatan administratif pada proses akhir penyaluran bagi hasil, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan retribusi daerah di tingkat kabupaten/kota, yang secara langsung memengaruhi besaran dana bagi hasil yang disalurkan kepada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pendapatan retribusi bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi serta intensitas layanan retribusi di daerah.

Meskipun terjadi penurunan, pelaksanaan bagi hasil tetap berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada pemerintah desa sebagai bagian dari dukungan fiskal daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan penguatan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam pelaporan objek retribusi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pola penerimaan retribusi daerah untuk menyusun proyeksi yang lebih akurat, sehingga perencanaan anggaran bagi hasil dapat lebih realistis, stabil, dan mendukung keberlanjutan pendanaan desa secara berkesinambungan.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	350.565.308.000,00	296.616.103.627,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp350.565.308.000,00 dan terealisasi sebesar Rp296.616.103.627,00 atau mencapai 84,61% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp53.949.204.373,00 atau 15,39% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp360.341.602.772,00, Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp63.725.499.145,00 atau 17,68%.

Secara umum, tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan administratif dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desa, antara lain adanya penyesuaian hasil verifikasi data penerima, keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi dari beberapa desa, serta adanya perubahan atau penyesuaian kegiatan yang dibiayai melalui bantuan keuangan sehingga tidak seluruh pagu dapat disalurkan secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Selain itu, sebagian anggaran juga tidak terserap akibat efisiensi pelaksanaan kegiatan di tingkat desa serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.



Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat penurunan volume penyaluran bantuan keuangan kepada desa, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan prioritas, penyesuaian alokasi berdasarkan kemampuan fiskal daerah, serta evaluasi terhadap efektivitas program bantuan keuangan sebelumnya. Meskipun demikian, penyaluran tetap dilakukan sesuai ketentuan dan diprioritaskan pada kegiatan yang benar-benar mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan penguatan proses perencanaan dan verifikasi alokasi Dana Desa sejak awal tahun anggaran, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pemenuhan persyaratan administrasi. Selain itu, perlu dilakukan percepatan proses penyaluran, penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan dana, serta evaluasi efektivitas program bantuan keuangan agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, terserap optimal, dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan desa secara berkelanjutan.

5.1.3	SURPLUS/DEFISIT	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		(5.612.640.711,00)	96.073.420.479,18

Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Surplus (Defisit) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	Pendapatan Daerah	1.798.001.845.048,00	1.742.452.734.254,90	96,91	1.829.271.556.884,05
2	Belanja Daerah	1.803.614.485.759,00	1.646.379.313.775,72	91,28	1.841.646.074.683,11
	SURPLUS/DEFISIT	(5.612.640.711,00)	96.073.420.479,18	(1.711,73)	(12.374.517.799,06)

5.1.4	Pembiayaan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		5.612.640.711,00	5.612.640.711,47

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp15.612.640.711,47 dan Rp10.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing Rp15.612.640.711,47 dan Rp10.000.000.000,00. Berdasarkan nilai realisasi tersebut maka nilai Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp5.612.640.711,47. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:



5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		15.612.640.711,00	15.612.640.711,47

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.612.640.711,00 dan terealisasi sebesar Rp15.612.640.711,47 atau mencapai 100,00% dari target. Realisasi ini menunjukkan capaian yang sesuai dengan anggaran dengan selisih pelampauan sebesar Rp0,47. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp27.987.158.510,53, maka terjadi penurunan sebesar Rp12.374.517.799,06 atau 44,21%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5.49 Rincian Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	25.987.158.510,53	(10.374.517.799,06)
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	Jumlah	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53	(12.374.517.799,06)

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		15.612.640.711,00	15.612.640.711,47

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.612.640.711,47 dan Rp25.987.158.510,53. Nilai anggaran dan realisasi SiLPA Tahun 2025 merupakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	1.216.190,00	1.216.190,00	100,00	8.165.000,00	(6.948.810,00)
2	Penghematan Belanja	0	0	-	1.213.360.265,00	(1.213.360.265,00)
3	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	15.611.424.521,00	15.611.424.521,47	100,00	24.765.633.245,53	(9.154.208.724,06)
	Jumlah	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	25.987.158.510,53	(10.374.517.799,06)



5.1.4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp10.000.000.000,00 atau 100,00%. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang optimal tanpa sisa anggaran.

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2025 merupakan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Tanggal 11 Juni 2025 senilai Rp10.000.000.000,00. Penyertaan Modal tersebut telah sesuai dengan perencanaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2025.

5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu yang berakhir untuk periode 31 Desember 2025 menunjukkan SILPA sebesar Rp101.686.061.190,65 yang merupakan jumlah dari Surplus/(Defisit) dengan Pembiayaan Netto. Kas dan Setara Kas Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp101.654.496.555,53. Saldo tersebut merupakan akumulasi dari kas yang berada pada kas daerah maupun kas yang dikelola oleh bendahara dan unit layanan lainnya.

Tabel 5.51 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Kas Tahun 2024	Saldo Akhir 2025
p1	Kas di Kas Daerah	10.488.646.925,55	90.884.935.566,82
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.215.302,00	0,00
3	Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	888,00	197.937.032,00
4	Kas di BLUD	1.464.500.074,95	7.652.552.149,40
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	46.263.999,52	173.806.227,08
6	Kas Lainnya	34.800.000,00	-
7	Kas Dana BOSP	33.829.228,45	31.336.146,35
8	Kas Dana BOK Puskesmas	3.543.384.293,00	2.745.494.069,00
	Jumlah	15.612.640.711,47	101.686.061.190,65



5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Penjelasan dari komponen-komponen perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		15.612.640.711,47	25.987.158.510,53

Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 sebesar Rp15.612.640.711,47 merupakan nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.987.158.510,53.

5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		15.612.640.711,47	25.987.158.510,53

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 sebesar Rp15.612.640.711,47 merupakan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp25.987.158.510,53.

5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		101.686.061.190,65	25.987.158.510,53

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2025 sebesar Rp101.686.061.190,65 dan TA 2024 sebesar Rp25.987.158.510,53 merupakan sisa lebih atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pengurangan dari Saldo Anggaran Lebih Awal dan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*).

5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp101.686.061.190,65 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp15.612.640.711,47.



5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2024 yang merupakan penyajian untuk saldo awal Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

5.3.1	ASET	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		3.229.965.272.445,24	3.226.442.933.870,75

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.229.965.272.445,24 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.226.442.933.870,75 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.1	ASET LANCAR	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		140.609.107.193,01	61.667.114.217,34

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp140.609.107.193,01 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp61.667.114.217,34 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar di Muka, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kas di Kas Daerah	90.884.935.566,82	10.488.646.925,55
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	1.215.302,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	197.937.032,00	888,00
4	Kas Lainnya – Kas Di BLUD	7.652.552.149,40	1.464.500.074,95
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	173.806.227,08	46.263.999,52
6	Kas Lainnya	0,00	34.800.000,00
7	Kas Dana BOSP	31.336.146,35	33.829.228,45
8	Kas Dana BOK Puskesmas	2.745.494.069,00	3.543.384.293,00
9	Piutang Pajak Daerah	1.317.855.009,50	1.156.626.625,41
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.605.071.162,26	5.097.528.443,10
11	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
12	Penyisihan Piutang	(2.624.806.401,52)	(2.707.441.241,82)
13	Beban Dibayar Dimuka	15.937.500,00	14.976.410,85
14	Persediaan	28.608.988.732,12	42.492.783.268,33
Jumlah Aset Lancar		140.609.107.193,01	61.667.114.217,34

5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		90.884.935.566,82	10.488.646.925,55

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.884.935.566,82 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp10.488.646.925,55. Saldo tersebut merupakan nilai Kas Daerah di Bendahara Umum Daerah pada Rekening Bank Kalbar Cabang Kapuas Hulu dengan nomor



rekening 6001003906.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.215.302,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 Rp0,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.215.302,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	197.937.032,00	888,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.197.937.032,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp.888,00.

Tabel 5.53 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	Uraian	No Rek	Bank	Per 31 Des 2025
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6001000274	Kalbar	8.570.444,00
2	Kecamatan Embaloh Hulu	6001008290	Kalbar	67.553.000,00
3	Kecamatan Batang Lupar	6401000001	Kalbar	86.425.000,00
4	Kecamatan Puring Kencana	6701000050	Kalbar	28.733.500,00
5	Kecamatan Semitau	6501001501	Kalbar	6.654.200,00
6	Kecamatan Badau	6701000014	Kalbar	888,00
Jumlah				197.937.032,00

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah dikembalikan ke Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tanggal Setor	Nilai yang Disetor
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15 Januari 2026	8.570.444,00
2	Kecamatan Embaloh Hulu	3 dan 26 Februari 2026	67.553.000,00
3	Kecamatan Batang Lupar	5 dan 27 Januari 2026	86.425.000,00
4	Kecamatan Puring Kencana	28 Januari 2026	28.733.500,00
5	Kecamatan Semitau	28 Januari 2026	6.654.200,00
6	Kecamatan Badau	6 Mei 2026	888,00
Jumlah			197.937.032,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Badau sebesar Rp888,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Sisa saldo tersebut merupakan bagian dari nilai penarikan kas sebesar Rp221.189,00 pada tanggal 30 Desember 2026. Atas sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp888,00 telah di disetorkan kembali ke RKUD pada 6 Mei 2026.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4 Kas di BLUD	7.652.552.149,40	1.464.500.074,95

Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro di Bank Kalbar dengan nomor rekening



6001000266 per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.652.552.149,40 dan saldo kas di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp1.464.500.074,95.

5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP**31 Desember 2025
(Rp)****173.806.227,08****31 Desember 2024
(Rp)****46.263.999,52**

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas pada Puskesmas-Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2025 sebesar Rp173.806.227,08 dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp46.263.999,52.

Tabel 5.55 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025

No	FKTP	Saldo Bank
1	Puskesmas Putussibau Utara	11.159,40
2	Puskesmas Putussibau Selatan	39.694,30
3	Puskesmas Bika	75,65
4	Puskesmas Kalis	146.688,78
5	Puskesmas Embaloh Hilir	22.612.958,00
6	Puskesmas Embaloh Hulu	1.652.251,90
7	Puskesmas Bunut Hilir	20.352,00
8	Puskesmas Boyan Tanjung	19.607,77
9	Puskesmas Bunut Hulu	16.801.581,89
10	Puskesmas Mentebah	9.988,40
11	Puskesmas Jongkong	1.027,48
12	Puskesmas Pengkadan	402.899,04
13	Puskesmas Hulu Gurung	101.688,00
14	Puskesmas Selimbau	20.339,56
15	Puskesmas Batang Lupar	319,00
16	Puskesmas Badau	71.712.547,57
17	Puskesmas Empanang	1.917.012,32
18	Puskesmas Puring Kencana	1.345,12
19	Puskesmas Semitau	31.191.872,56
20	Puskesmas Suhaid	15.727.808,60
21	Puskesmas Seberuang	2.316.586,20
22	Puskesmas Silat Hilir	8.887.660,24
23	Puskesmas Silat Hulu	210.763,30
TOTAL		173.806.227,08

5.3.1.1.6 Kas Lainnya**31 Desember 2025
(Rp)
0,00****31 Desember 2024
(Rp)
34.800.000,00**



Kas Lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 merupakan Kas atas Sekolah yang tutup dan dikembalikan ke Kasda sementara untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.7 Kas Dana BOSP

31 Desember 2025

(Rp)

31.336.146,35

31 Desember 2024

(Rp)

33.829.228,45

Merupakan sisa dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.336.146,35 dan Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp33.829.228,45. Kas Dana BOSP digunakan untuk mencatat kas dana BOS atas satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai nilai akumulasi dari total dana BOSP yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana yang belum dibelanjakan per 31 Desember 2025.

Tabel 5.56 Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas Tunai
SD Negeri 04 Kurak	SD	Negeri	6025165363	330.000,00
SD Negeri 10 Libung	SD	Negeri	6025171091	800,00
SD Negeri 05 Nanga Ret	SD	Negeri	6025165089	3.651.900,00
SD Negeri 02 Nanga Suruk	SD	Negeri	6025164931	1.200.000,00
SD Negeri 01 Nanga Kantuk	SD	Negeri	6025171121	5.856.000,00
SMP Negeri 1 Empanang	SMP	Negeri	6025164929	2.850.000,00
SD Negeri 02 Suka Maju	SD	Negeri	6025164103	13.030.500,00
SD Negeri 04 Merakai Panjang	SD	Negeri	6025171247	429.000,00
SD Negeri 05 Kedang	SD	Negeri	6025171259	1.599,00
SMP Negeri 2 Putussibau	SMP	Negeri	6025164139	1.800.000,00
SD Negeri 04 Putussibau	SD	Negeri	6025164206	270.000,00
SMP Negeri 8 Putussibau	SMP	Negeri	6025186718	30.000,00
SD Negeri 04 Bati	SD	Negeri	6525194378	450.000,00
SD Negeri 15 Bekuan	SD	Negeri	6525194238	10.000,00
SD Negeri 11 Setunggul	SD	Negeri	6525194080	750.000,00
SD Negeri 17 Engkaras	SD	Negeri	6025171442	500.000,00
SMP Negeri 4 Satap Silat Hulu	SMP	Negeri	6801000787	60.000,00
SMP Negeri 6 Silat Hulu	SMP	Negeri	6025278338	9.000,00
TKN Pembina Kalis	TK	Negeri	6021618541	302,38
TKN Pembina Silat Hilir	TK	Negeri	6021618495	82.044,97
TKN Pembina Jongkong	TK	Negeri	6021618550	25.000,00
Jumlah				31.336.146,35

5.3.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2025

(Rp)

2.745.494.069,00

31 Desember 2024

(Rp)

3.543.384.293,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.745.494.069,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.543.384.293,00.



Tabel 5.57 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Puskesmas	Saldo
1	Puskesmas Badau	62.719.815,00
2	Puskemsmas Batang Lupa	100.220.029,00
3	Puskesmas Bika	71.992.422,00
4	Puskesmas Boyan Tanjung	175.372.577,00
5	Puskesmas Bunut Hilir	86.578.832,00
6	Puskesmas Bunut Hulu	246.681.025,00
7	Puskesmas Embaloh Hilir	148.175.311,00
8	Puskesmas Embaloh Hulu	136.287.524,00
9	Puskesmas Empanang	74.314.551,00
10	Puskesmas Hulu Gurung	191.013.062,00
11	Puskesmas Jongkong	136.236.167,00
12	Puskesmas Kalis	202.484.112,00
13	Puskesmas Mentebah	194.998.765,00
14	Puskesmas Pengkadan	81.202.439,00
15	Puskesmas Puring Kencana	136.669.426,00
16	Puskesmas Putussibau Selatan	24.093.666,00
17	Puskesmas Putussibau Utara	50.162.143,00
18	Puskesmas Seberuang	140.706.989,00
19	Puskesmas Selimbau	83.651.154,00
20	Puskesmas Semitau	171.848.529,00
21	Puskesmas Silat Hilir	89.633.000,00
22	Puskesmas Silat Hulu	18.132.000,00
23	Puskesmas Suhaid	122.320.531,00
Jumlah		2.745.494.069,00

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025

(Rp)

1.317.855.009,50

31 Desember 2024

(Rp)

1.156.626.625,41

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.317.855.009,50 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.156.626.625,41. Rincian saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Piutang	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00	1.765.000,00
2	Piutang Pajak Reklame	79.052.421,57	74.811.919,65
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	32.535.642,36	21.697.005,97
4	Piutang Pajak Parkir	26.400,00	1.892.400,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	209.356.105,79	209.356.105,79
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	981.840.211,00	847.104.194,00
7	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.279.228,78	0,00
Jumlah		1.317.855.009,50	1.156.626.625,41

**Penjelasan:**

1. Jumlah Piutang Pajak Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp1.156.626.625,41. Piutang Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.128.996.388,64 dan penambahan sebesar Rp13.279.228,78 di tahun 2025 sehingga saldo akhir Piutang Pajak Daerah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.317.855.009,50
2. Mutasi masing-masing jenis rincian Piutang Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian Piutang	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00			1.765.000,00
2	Piutang Pajak Reklame	74.811.919,65	8.233.996,32	3.993.494,40	79.052.421,57
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	21.697.005,97	25.235.525,63	14.396.889,24	32.535.642,36
4	Piutang Pajak Parkir	1.892.400,00		1.866.000,00	26.400,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	209.356.105,79			209.356.105,79
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	847.104.194,00	243.476.022,00	108.740.005,00	981.840.211,00
7	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	13.279.228,78		13.279.228,78
Jumlah		1.156.626.625,41	290.224.772,73	128.996.388,64	1.317.855.009,50

5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD**31 Desember 2025****(Rp)****11.605.071.162,26****31 Desember 2024****(Rp)****5.097.528.443,10**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.605.071.162,26 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.097.528.443,10. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Piutang Hasil Sewa BMD	28.630.780,14	21.562.180,14
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.378.500.000,00	1.378.500.000,00
3	Piutang Pendapatan Denda (PBB-P2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	154.954.143,12	122.152.242,96
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	77.075.731,00	57.228.600,00



No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	340.179.000,00	340.179.000,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	51.587.400,00	51.587.400,00
7	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	9.574.144.108,00	3.126.319.020,00
Jumlah		11.605.071.162,26	5.097.528.443,10

Penjelasan masing-masing jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- Piutang Sewa Tanah dan Bangunan merupakan piutang yang tidak tertagih sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.630.780,14 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Piutang bunga dana bergulir sebesar Rp1.378.500.000,00 adalah merupakan hasil inventarisasi ulang pemisahan antara pokok dana bergulir dengan bunga yang belum pernah dibayarkan oleh koperasi-koperasi penerima dana bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- Piutang Pendapatan Denda (PBB-P2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Rp154.954.143,12. Dari saldo piutang Denda (PBB-P2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan tahun 2024 sebesar Rp122.152.242,96, dilunasi tahun 2025 sebesar Rp6.471.911,76, penambahan tahun 2025 sebesar Rp39.273.811,92 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.954.143,12.
- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp77.075.731,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan untuk PNS yang pensiun dan mutasi yang belum tertagih per 31 Desember 2025. Dari saldo piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2024 sebesar Rp57.228.600,00 telah dilunasi tahun 2025 sebesar Rp21.850.000,00, penambahan tahun 2025 sebesar Rp41.697.131,00 sehingga menyisakan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.075.731,00.
- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp340.179.000,00 dengan rincian pada Lampiran 1.
- Piutang pada pihak ketiga CV. K sebesar Rp51.587.400,00 merupakan uang muka pembangunan Gedung Kantor Camat Hulu Kapuas yang tidak dilanjutkan pembangunan akibat pembatalan status pengembangan ibu kota Kecamatan Hulu Kapuas.
- Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp9.574.144.108,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Rincian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan di RSUD dr.Achmad Diponegoro per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo 2024 (Audited)	Pengurangan	Koreksi	Penambahan	Saldo 2025 (Audited)
1	Kadaluarsa 2020	41.360.000,00	41.360.000,00			-
2	Kadaluarsa 2020	636.471.100,00	636.471.100,00			-
3	Reguler 2022	6.146.000,00	6.146.000,00			-
4	Bln Layanan Nov. 2024	2.066.533.900,00	2.066.503.900,00	30.000,00		-
6	Susulan Juli 2024 Bagian 2	21.590.500,00	21.587.600,00	2.900,00		-
7	Piutang RITL/RJTL tahun 2022	65.236.127,00				65.236.127,00



No	Uraian	Saldo 2024 (Audited)	Pengurangan	Koreksi	Penambahan	Saldo 2025 (Audited)
8	Piutang RITL/RJTL tahun 2023	96.816.830,00	3.323.988,00			93.492.842,00
9	Piutang RITL/RJTL tahun 2024	192.164.563,00	5.111.242,00			187.053.321,00
10	Piutang RITL/RJTL tahun 2025				170.947.187,00	170.947.187,00
11	BPJS – Bln Layanan Nov. 2025				1.647.188.800,00	1.647.188.800,00
12	BPJS – Bln Layanan Des . 2025 (Estimasi)				2.470.103.800,00	2.470.103.800,00
13	BPJS Kesehatan – Susulan Juli – Des 2025 (Estimasi)				4.780.412.625,00	4.780.412.625,00
14	BPJS Ketenagakerjaan (Kurang Bayar)				55.129.987,00	55.129.987,00
15	BPJS Ketenagakerjaan				104.579.419,00	104.579.419,00
Jumlah		3.126.319.020,00	2.780.503.830,00	32.900,00	9.228.361.818	9.574.144.108,00

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah**31 Desember 2025
(Rp)****0,00****31 Desember 2024
(Rp)****0,00**

Saldo Piutang Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang**31 Desember 2025
(Rp)****(2.624.806.401,52)****31 Desember 2024
(Rp)****(2.707.441.241,82)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.624.806.401,52) dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp2.707.441.241,82). Rincian Penyisihan Piutang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	577.371.705,37	443.371.234,48
1	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00	1.765.000,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	14.663.270,11	4.002.370,78
3	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.640,00	169.632,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.309.008,37	2.199.252,17
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	162.979.283,08	128.755.990,13
6	Penyisihan Piutang PBB-P2	396.652.503,81	306.478.989,40
B	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.007.157.129,15	2.237.067.925,22
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	144.211.625,69	395.689.741,32
2	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.378.500.000,00	1.378.500.000,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2	92.679.103,46	71.111.783,90
4	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	340.179.000,00	340.179.000,00
5	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	51.587.400,00	51.587.400,00
C	Penyisihan Piutang Lainnya	40.277.567,00	27.002.082,12
1	Penyisihan Piutang Gaji dan Tunjangan	21.204.185,66	15.277.980,00



No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2	Penyisihan Piutang Sewa Tanah dan Bangunan	19.073.381,35	11.724.102,12
	Jumlah A + B + C	2.624.806.401,52	2.707.441.241,82

Rincian Penyisihan Piutang dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan piutang pajak mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyisihan Piutang Pajak yaitu dengan menggolongkan Kualitas Piutang Pajak berdasarkan ketentuan di bawah ini:

- Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun disisihkan sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 10%;
- Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 50%; dan
- Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan sebesar 100%.

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Hiburan

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.765.000,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp1.765.000,00.

Tabel 5.63 Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				%	Jumlah	
1	Piutang Tahun	2018	1.765.000,00	100%	1.765.000,00	-
	JUMLAH		1.765.000,00		1.765.000,00	-

b) Penyisihan Piutang Pajak Reklame

Rincian penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.663.270,11 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 5.64 Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif Beban				Nilai Residu	Beban
				Tarif 2025(%)	Tarif 2024	Tarif Beban	Penyisihan		
1	Tahun 2019	2019	2.352.000,00	100,0%	100,0%	0%	2.352.000,00	-	-
2	Tahun 2023	2023	13.558.644,00	50,0%	10,0%	40%	6.779.322,00	6.779.322,00	5.423.457,60
3	Tahun 2024	2024	54.907.781,25	10,0%	0,5%	10%	5.490.778,13	49.417.003,13	5.216.239,22
4	Tahun 2025	2025	8.233.996,32	0,5%		1%	41.169,98	8.192.826,34	41.169,98
	JUMLAH		79.052.421,57				14.663.270,11	64.389.151,46	10.680.866,80

c) Penyisihan Piutang Pajak Parkir

Rincian penyisihan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.640,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Penyisihan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				%	Jumlah	
1	Piutang Parkir	2024	26.400,00	10%	2.640,00	23.760,00



	Jumlah		26.400,00		2.640,00	23.760,00

d) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan

Rincian penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.309.008,37 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif Beban				Nilai Residu	Beban
				Tarif 2025(%)	Tarif 2024	Tarif Beban	Penyisihan		
1	Tahun 2023	2023	914.786,00	50%		50,0%	457.393,00	457.393,00	457.393,00
2	Tahun 2024	2024	7.300.116,73	10,0%	0,5%	9,5%	730.011,67	6.570.105,06	693.511,09
3	Tahun 2025	2025	24.320.739,63	0,5%		0,5%	121.603,70	24.199.135,93	121.603,70
	JUMLAH		32.535.642,36				1.309.008,37	31.226.633,99	1.272.507,79

e) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp162.979.283,08 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp128.755.990,13 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025

No	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif Beban			Jumlah Penyisihan	Nilai Residu	Beban Penyisihan
			Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Tarif Beban			
1	2011	17.895,15	100%	100%	0%	17.895,15	-	-
2	2012	83.665.394,30	100%	100%	0%	83.665.394,30	-	-
3	2013	21.915.000,00	100%	100%	0%	21.915.000,00	-	-
4	2017	1.669.250,00	100%	100%	0%	1.669.250,00	-	-
5	2019	9.393.910,00	100%	100%	0%	9.393.910,00	-	-
6	2021	2.080.200,00	50,0%	50,0%	0%	1.040.100,00	1.040.100,00	-
7	2022	5.000.000,00	50,0%	50,0%	0%	2.500.000,00	2.500.000,00	-
8	2023	85.540.720,00	10,0%	50,0%	40%	42.770.360,00	42.770.360,00	34.216.288,00
9	2024	73.736,34	0,5%	10,0%	9,5%	7.373,63	66.362,71	7.004,95
		209.356.105,79				162.979.283,08	46.376.822,71	34.223.292,95

f) Penyisihan Piutang Pokok PBBP2

Penyisihan Piutang Pokok PBBP2 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp396.652.503,81 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp306.478.989,40 dengan uraian pada

Tabel 5.68 Penyisihan Piutang Pokok PBBP2 per 31 Desember 2025

Tahun	Nilai Pokok Piutang s.d 2025	Kategori	Umur	Tarif 2025	Tarif 2024	Tarif beban	Penyisihan Piutang	Nilai Buku	Beban 2025
Tahun 2008	1.466.814,00	Macet	18	100%	100%	0%	1.466.814,00	-	-
Tahun 2009	2.598.723,00	Macet	17	100%	100%	0%	2.598.723,00	-	-
Tahun		Macet	16	100%	100%	0%			



Tahun	Nilai Pokok Piutang s.d 2025	Kategori	Umur	Tarif 2025	Tarif 2024	Tarif beban	Penyisihan Piutang	Nilai Buku	Beban 2025
2010	5.037.314,00						5.037.314,00	-	-
Tahun 2011	3.225.107,00	Macet	15	100%	100%	0%	3.225.107,00	-	-
Tahun 2012	8.928.748,00	Macet	14	100%	100%	0%	8.928.748,00	-	-
Tahun 2013	18.066.314,00	Macet	13	100%	100%	0%	18.066.314,00	-	-
Tahun 2014	14.282.119,00	Macet	12	100%	100%	0%	14.282.119,00	-	-
Tahun 2015	15.574.054,00	Macet	11	100%	100%	0%	15.574.054,00	-	-
Tahun 2016	13.753.751,00	Macet	10	100%	100%	0%	13.753.751,00	-	-
Tahun 2017	18.267.569,00	Macet	9	100%	100%	0%	18.267.569,00	-	-
Tahun 2018	18.701.073,00	Macet	8	100%	100%	0%	18.701.073,00	-	-
Tahun 2019	25.215.399,00	Macet	7	100%	100%	0%	25.215.399,00	-	-
Tahun 2020	55.744.155,00	Macet	> 5	100%	50%	50%	55.744.155,00	-	27.872.078
Tahun 2021	71.456.586,00	Diragukan	> 4	50%	50%	0%	35.728.293,00	35.728.293	-
Tahun 2022	120.323.578,00	Diragukan	> 3	50%	50%	0%	60.161.789,00	60.161.789	-
Tahun 2023	160.279.033,00	Diragukan	> 2	50%	10%	40%	80.139.516,50	80.139.517	64.111.613
Tahun 2024	185.443.852,00	Kurang Lancar	> 1	10,0%	0,5%	10%	18.544.385,20	166.899.467	17.617.166
Tahun 2025	243.476.022,00	Lancar		0,5%		1%	1.217.380,11	242.258.642	1.217.380
Jumlah	981.840.211,00						396.652.503,81	585.187.707,19	110.818.236,75

2) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah mengacu penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
- Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%.

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Penyisihan Piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau

Jumlah penyisihan piutang BLUD RSUD dr. Ahmad Diponegoro Putussibau terdiri dari Piutang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp144.211.625,69 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Penyisihan Lain-lain PAD Yang Sah- Piutang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau per 31 Desember 2025

No	Piutang	Pokok	Tarif Beban Penyisihan			Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
			Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Jumlah			
1	Piutang Pelayanan Kesehatan Pasien 2022	65.236.127,00	50,00%	50,00%	32.618.063,50	32.618.063,50	0%	-



No	Piutang	Pokok	Tarif Beban Penyisihan			Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
			Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Jumlah			
2	Piutang RTL 2023	93.492.842,00	10,0%	50,00%	46.746.421,00	46.746.421,00	40%	37.397.136,80
3	Piutang Tahun 2024	187.053.321,00	0,50%	10,00%	18.705.332,10	168.347.988,90	9,5%	17.770.065,50
4	Piutang Tahun 2025	9.228.361.818,00		0,5%	46.141.809,09	9.182.220.008,91	0,50%	46.141.809,09
		9.574.144.108,00			144.211.625,69	9.429.932.482,31		101.309.011,39

b) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo penyisihan piutang Hasil bunga dana bergulir mengacu penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%.

Saldo Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.378.500.000,00 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.378.500.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 2**.

Pada TA 2025 tidak terdapat penysetoran bunga dana bergulir sehingga posisi saldo piutang bunga dana bergulir masih belum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2

Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2 untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp92.679.103,46 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.111.783,90. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

d) Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp340.179.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 4**.

Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I

Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp51.587.400,00 dan tahun 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp51.587.400,00 atau telah disisihkan sepenuhnya.



e) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah

penyisihan piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah mengacu pada penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.073.381,34 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp11.724.102,12. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025 sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 5.70 Rincian Penyisihan Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025

No	Piutang	Pokok	Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Jumlah	Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
1	Tahun 2014	111.653,71	100%	100%	111.653,71	-	-	-
2	Tahun 2015	223.307,42	100%	100%	223.307,42	-	-	-
3	Tahun 2016	-			0,00	-	-	-
4	Tahun 2017	151.757,04	100%	100%	151.757,04	-	-	-
5	Tahun 2018	249.382,86	100,0%	100%	249.382,86	-	-	-
6	Tahun 2019	1.149.923,07	50,0%	100%	1.149.923,07	-	0,50	574.961,54
7	Tahun 2020	14.627.872,43	50,0%	100%	14.627.872,43	-	0,50	7.313.936,22
8	Tahun 2021	2.677.707,85	50,0%	50%	1.338.853,93	1.338.853,93	-	-
9	Tahun 2022	2.370.575,76	50,0%	50%	1.185.287,88	1.185.287,88	-	-
10	Tahun 2025	7.068.600,00		0,5%	35.343,00	7.033.257,00	0,05	35.343,00
	JUMLAH	28.630.780,14			19.073.381,34	9.557.398,81		7.924.240,75

g) Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

penyisihan piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%.



Saldo Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa piutang Gaji dan Tunjangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp40.277.567,00 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp27.002.082,12.

Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa Piutang Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025

No	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif 2024(%)	Tarif 2025(%)	Jumlah	Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
1	2015	5.100.000,00	100%	100%	5.100.000,00	-	-	-
2	2021	1.512.800,00	50%	100%	1.512.800,00	-	0,50	756.400,00
3	2022	500.000,00	50%	50%	250.000,00	250.000,00	-	-
4	2023	28.265.800,00	10%	50%	14.132.900,00	14.132.900,00	0,40	11.306.320,00
5	2025	41.697.131,00		0,5%	208.485,66	41.488.645,35	0,01	208.485,66
	Jumlah	77.075.731,00			21.204.185,66	55.871.545,35		12.271.205,66

5.3.1.1.12 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

15.937.500,00

14.976.410,85

Saldo beban dibayar dimuka pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.937.500,00 merupakan beban sewa tanah dan bangunan yang telah dibayarkan dahulu dimuka pada Sekretariat Daerah dengan rincian:

- 1) Bangunan Jl. M. Yasin Putussibau an. Pemilik Jumadi Azhari Sandi dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp25.875.000,00 untuk tahun 2026 terhitung mulai 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026. Jumlah sewa yang dibayar dimuka sebesar Rp12.937.500,00 (6/12 bulan x Rp25.875.000,00); dan
- 2) Bangunan di Jalan Ngurah Rai Nomor 3 Putussibau dengan jumlah sewa per tahun sebesar Rp4.000.000,00, terhitung dari 6 Oktober 2025 sampai dengan 6 Juli 2026 . Jumlah sewa yang dibayar dimuka sebesar Rp3.000.000,00 (9/12 bulan x Rp4.000.000,00).

5.3.1.1.13 Persediaan

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

28.608.988.732,12

42.492.783.268,32

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.608.988.732,12 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp42.492.783.268,32. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 tersebut merupakan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah yang masih tersisa sampai dengan akhir tahun dan persediaan barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Bahan Bakar dan Pelumas	234.000,00	265.000,00
2	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.250.000,00	5.500.000,00
3	Bahan Lainnya	1.304.530.559,70	1.910.922.186,26
4	Alat Tulis Kantor	27.897.183,00	452.401.730,00
5	Kertas dan Cover	0,00	7.551.200,00
6	Bahan Cetak	498.516.100,00	168.124.480,00
7	Bahan Komputer	300.000,00	444.000,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.122.043,25	1.081.000,00



No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
9	Obat	10.859.414.371,86	9.435.785.294,15
10	Obat-obatan Lainnya	21.627.382,00	16.136.000,00
11	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	15.889.097.092,31	30.494.572.377,92
Jumlah		28.608.988.732,12	42.492.783.268,33

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

164.237.423.844,95

154.767.170.639,90

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp164.237.423.844,95 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp154.767.170.639,90. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Urai	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	164.237.423.844,95	154.767.170.639,90
Jumlah		164.237.423.844,95	154.767.170.639,90

Nilai penyertaan modal berdasarkan komposisi penyertaan modal per 31 Desember 2025

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

0,00

0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Dana Bergulir	862.539.000,00	862.539.000,00
2	Penyisihan Dana Bergulir	(862.539.000,00)	(862.539.000,00)
Jumlah		0,00	0,00

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

164.237.423.844,95

154.767.170.639,90

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp164.237.423.844,95 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp154.767.170.639,90. Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar	129.106.000.000,00	119.106.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Uncak Kapuas	20.703.951.702,95	20.144.637.556,91
3	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas	5.455.370.608,00	6.565.366.834,00
4	Penyertaan Modal pada JAMKRIDA	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00



No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
5	Penyertaan Modal BUMD Perseroda Uncak Kapuas Mandiri	5.472.101.534,00	5.451.166.249,00
Jumlah		164.237.423.844,95	154.767.170.639,91

1.	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		129.106.000.000,00	119.106.000.000,00

Saldo Investasi Permanen Penyertaan pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.106.000.000,00 dan per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp119.106.000.000,00 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut

Tabel 5.76 Investasi Permanen Penyertaan pada Bank Kalbar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penyertaan sampai dengan Tahun 2005	4.707.000.000,00	4.707.000.000,00
2	Penyertaan Modal Tahun 2006	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00
3	Penyertaan Modal Tahun 2008	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
4	Penyertaan Modal Tahun 2009	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal Tahun 2010	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6	Penyertaan Modal Tahun 2011	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
7	Penyertaan Modal Tahun 2012	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
8	Penyertaan Modal Tahun 2013	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
9	Penyertaan Modal Tahun 2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
10	Penyertaan Modal Tahun 2015	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
11	Penyertaan Modal Tahun 2016	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
12	Penyertaan Modal Tahun 2017	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
13	Penyertaan Modal Tahun 2018	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
14	Penyertaan Modal Tahun 2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
15	Penyertaan Modal Tahun 2020	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
16	Penyertaan Modal Tahun 2021	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
17	Penyertaan Modal Tahun 2022	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
18	Penyertaan Modal Tahun 2025	10.000.000.000,00	
Jumlah		129.106.000.000,00	119.106.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.



2. **Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Uncak Kapuas**

**31 Desember 2025
(Rp)**

20.703.951.702,95

**31 Desember 2024
(Rp)**

20.144.637.556,91

Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.703.951.702,95 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp20.144.637.556,91. Rincian penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1.	Penyertaan sampai dengan 2003	4.682.000.000,00	4.682.000.000,00
2.	Penyertaan tahun 2004	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.	Penyertaan tahun 2005	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.	Penyertaan tahun 2006	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.	Penyertaan tahun 2007	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.	Penyertaan Modal Tahun 2008	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
7.	Penyertaan Modal Tahun 2009	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
8.	Penyertaan Modal Tahun 2010	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
9.	Penyertaan Modal Tahun 2011	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
10.	Penyertaan Modal Tahun 2012	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
13.	Penyertaan Modal Tahun 2013	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
14.	Penyertaan Modal Tahun 2014	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
15.	Rekon By admin aset PU yang belum dicatat sebagai penambah nilai	136.443.930,00	136.443.930,00
16.	Akumulasi Kerugian 2003- 2014 (perhitungan Ekuitas)	-10.949.240.124,72	-10.949.240.124,72
17.	Koreksi ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM setelah Audit	32.575.970.490,72	32.575.970.490,72
18.	Koreksi ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM 2015	-31.632.415.529,42	-31.632.415.529,42
19.	Penyertaan Modal 2016	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
20.	Koreksi ekuitas s.d 2016	-4.935.873.596,38	-4.935.873.596,38
21.	Penyertaan Modal 2017	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
22.	Koreksi Ekuitas s.d 2017	-4.507.207.900,71	-4.507.207.900,71
23.	Penyertaan Modal 2018	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
24.	Koreksi Ekuitas 2018	-3.200.108.272,10	-3.200.108.272,10
25.	Koreksi Ekuitas 2019	-940.037.208,95	-940.037.208,95
27.	Koreksi Ekuitas 2020	-1.188.109.738,70	-1.188.109.738,70
28.	Koreksi Ekuitas 2021	-727.947.001,03	-727.947.001,03
29.	Koreksi Ekuitas 2022	448.268.769,87	448.268.769,87
30.	Koreksi Ekuitas Tahun 2023	2.859.239.658,68	2.859.239.658,68
31.	Koreksi Ekuitas Tahun 2024 terhadap Laba	216.549.563,65	216.549.563,64
32.	Pengurang Invetasi karena pembagian deviden tahun 2024	-192.895.484,00	-192.895.484,00
33.	Pengurang Invetasi karena pembagian deviden tahun 2025	-56.707.106,00	
34.	Koreksi ekuitas terhadap laba tahun 2025 <i>Audited</i>	616.021.252,04	
	Jumlah	20.703.951.702,95	20.144.637.556,90



Saldo Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2025 setelah dilakukan perhitungan metode ekuitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas, dan PDAM merupakan Perusahaan Daerah dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi komposisi dewan komisaris dan manajemen inti. Berdasarkan perhitungan ekuitas nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.703.951.702,95.

3. Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	5.455.370.608,00	6.565.366.834,00

Saldo Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.455.370.608,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.565.366.834,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Nilai Penyertaan Modal pada Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1	Penyertaan TA 2005	356.575.250,00	356.575.250,00
2	Penyertaan TA 2006	450.000.000,00	450.000.000,00
3	Penyertaan TA 2008	500.000.000,00	500.000.000,00
4	Koreksi Kurang	(852.212.039,00)	(852.212.039,00)
5	Penyertaan TA 2012	750.000.000,00	750.000.000,00
6	Koreksi methode ekuitas Tahun 2013	(148.549.490,00)	(148.549.490,00)
7	Akumulasi Rugi sampai Tahun 2014 (koreksi Audited)	(666.644.563,00)	(666.644.563,00)
8	Koreksi berdasar Ekuitas Dana Lapkeu PD. Uncak Kapuas Unaudited 2015	9.027.735.878,00	9.027.735.878,00
9	Laba Perusahaan Tahun 2016	4.772.507,00	4.772.507,00
10	Koreksi Ekuitas 2016	(17.184.362,00)	(17.184.362,00)
11	Laba Perusahaan Tahun 2017	89.677.064,00	89.677.064,00
12	Penyertaan modal (uang)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
13	Penyertaan modal aset tanah	8.238.285.000,00	8.238.285.000,00
14	Laba Tahun 2018	5.297.764,00	5.297.764,00
15	Rugi Perusahaan Tahun 2019	(68.969.079,14)	(68.969.079,14)
16	Laba Perusahaan Tahun 2020	115.039.637,00	115.039.637,00
18	Koreksi ekuitas atas rugi tahun 2021	(576.088.067,32)	(576.088.067,32)
19	Koreksi ekuitas atas rugi tahun 2022	(1.269.031.540,70)	(1.269.031.540,70)
20	Koreksi atas Jasa Giro Tahun 2021 Rek Perumda Bank Kalbar 6003001677	1.736.800,00	1.736.800,00
21	Penyesuaian Nilai atas Rugi Audited tahun 2021	(390.980.707,68)	(390.980.707,68)
22	Penyesuaian Nilai atas rugi 2024	(12.984.093.217,16)	(12.984.093.217,16)
23	Penyesuaian Nilai atas rugi tahun 2025	(1.109.996.226,00)	
Jumlah		5.455.370.608,00	6.565.366.834,00



4	Penyertaan Modal pada PT Jamkrida	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp3.500.000.000,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.500.000.000,00. Rincian Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.79 Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
1.	Penyertaan Modal Tahun 2015	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2016	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2017	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
4.	Penyertaan Modal Tahun 2018	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00

5.	Penyertaan Modal pada Perseroda Uncak Kapuas Mandiri	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		5.472.101.534,00	5.451.166.249,00

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.472.101.534,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.451.166.249,00. Pada tahun 2024 tidak terdapat penyertaan modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri. Perhitungan penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

Tabel 5.80 Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun	
		2025	2024
1.	Penyertaan Modal Tahun 2015	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2017	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
3.	Penyesuaian Ekuitas 2016	(980.784.005,00)	(980.784.005,00)
4.	Penyesuaian Ekuitas 2017	(914.014.050,25)	(914.014.050,25)
5.	Penyesuaian Ekuitas 2018	(347.836.871,88)	(347.836.871,88)
6.	Penyesuaian Ekuitas 2019	(352.267.306,87)	(352.267.306,87)
7.	Penyesuaian Ekuitas 2020	(698.285.795,00)	(698.285.795,00)
8.	Penyesuaian Ekuitas 2021	(874.593.447,58)	(874.593.447,58)
9.	Penyesuaian Ekuitas 2022	(1.030.562.614,39)	(1.030.562.614,39)
10.	Penyesuaian Nilai atas Rugi 2023	(1.364.284.720,48)	(1.364.284.720,48)
11.	Penyesuaian Nilai atas Rugi 2024	(82.966.820,00)	(82.966.820,00)
12.	Penyesuaian Nilai atas Rugi 2023	96.761.880,45	96.761.880,45
13.	Penyesuaian Nilai atas Laba 2025	20.935.285,00	
	Jumlah	5.472.101.534,00	5.451.166.249,00

5.3.1.3	ASET TETAP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		2.777.559.412.177,37	2.846.248.841.339,39

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.777.559.412.177,37 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.846.248.841.339,39. Nilai Aset Tetap di atas merupakan



akumulasi dari Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 ditambah dengan mutasi Aset Tetap dalam TA 2025 yang meliputi Realisasi Belanja Modal TA 2025, maupun koreksi dan reklasifikasi yang dilakukan dengan menelusuri kembali Aset Tetap serta Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2025 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terkait Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, penyusutan dilaksanakan semenjak aset tetap telah siap dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Perhitungan beban penyusutan pada tanggal 31 Desember menggunakan metode garis lurus yaitu mengalokasikan nilai perolehan aset tetap secara rata pada setiap tahun pengoperasian aset tetap meskipun aset tetap tersebut baru dioperasikan 1 hari pada tanggal 31 Desember.

Secara umum Kebijakan Akuntansi pengakuan Belanja Modal Aset Tetap yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah apabila nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran atau perolehan pertama untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana tabel ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Harga/Unit	Keterangan
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan		Tidak dibatasi
	Jembatan		Tidak dibatasi
	Bangunan Air		Tidak dibatasi
	Instalasi		Tidak dibatasi
	Jaringan Air		Tidak dibatasi
	Jaringan Listrik dan telepon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Kemudian kebijakan akuntansi untuk belanja pemeliharaan atau pengeluaran berikutnya menetapkan batasan nilai kapitalisasi minimum dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.82 Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Harga/Unit	Ket.
1	Tanah		Tidak dibatasi



No	Uraian	Harga/Unit	Ket.
2	Peralatan dan Mesin		
	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jembatan	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Air	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Instalasi	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jaringan Air	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jaringan Listrik dan telepon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Aset tetap yang memiliki nilai di bawah nilai kapitalisasi minimum akan dilakukan reklasifikasi pencatatan ke aset tetap bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum (Ekstrakomptabel).

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- biaya perencanaan;
- biaya lelang;
- biaya persiapan tempat;
- biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- biaya pemasangan (*installation cost*);
- biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- biaya konstruksi.

Metode yang digunakan untuk mengatribusi biaya perolehan aset tetap adalah dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.



Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.777.559.412.177,37 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.846.248.841.339,39. Rincian saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Tetap	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Tanah	242.777.245.472,30	242.777.245.472,30
2	Peralatan dan Mesin	551.124.801.215,28	500.744.877.277,01
3	Gedung dan Bangunan	1.779.716.957.329,81	1.588.697.933.685,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.665.615.937.753,24	3.589.990.166.611,55
5	Aset Tetap Lainnya	36.695.054.097,75	32.702.662.647,76
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	114.678.040.197,59	256.990.787.233,54
7	Akumulasi Penyusutan	(3.613.048.623.888,60)	(3.365.654.831.588,45)
	JUMLAH	2.777.559.412.177,37	2.846.248.841.339,39

5.3.1.3.1 Tanah

**31 Desember 2025
(Rp)**

242.777.245.472,30

**31 Desember 2024
(Rp)**

242.777.245.472,30

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap tanah dapat dijelaskan secara ringkas. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp242.777.245.472,30 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp242.777.245.472,30. Mutasi aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		242.777.245.472,30
Penambahan		
1	Belanja Modal	
2	Mutasi Masuk antar OPD	
3	Kapitalisasi/Koreksi/Penilaian	
4	Hibah Masuk	
Pengurangan		0
5	Mutasi Keluar antar OPD	
6	Mutasi ke Properti Investasi	
Saldo Akhir		242.777.245.472,30

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap - Tanah dapat dilihat pada Lampiran 5.

Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi aset tetap tanah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

**31 Desember 2025
(Rp)**

551.124.801.215,28

**31 Desember 2024
(Rp)**

500.744.877.277,01

Kebijakan Akuntansi terkait Peralatan dan Mesin terkait biaya perolehan peralatan dan mesin yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan peralatan dan mesin



menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp551.124.801.215,28 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp500.744.877.277,01. Mutasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Alat Besar	26.161.709.349,62	23.387.819.142,37
2	Alat Angkutan	118.241.468.312,25	115.737.018.094,29
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.308.733.064,64	3.308.733.064,64
4	Alat Pertanian	1.803.035.546,00	1.796.702.651,60
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	98.844.026.336,22	69.906.095.561,08
7	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.702.057.409,65	19.878.078.491,91
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	126.016.047.628,34	119.640.730.771,25
6	Alat Laboratorium	27.359.471.124,17	26.152.778.662,51
7	Komputer	112.272.544.911,53	105.571.184.330,30
8	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	296.902.382,91	296.902.382,91
9	Alat Bantu Eksplorasi	773.227.673,50	0,00
10	Alat Keselamatan Kerja	228.885.136,67	66.806.439,69
11	Alat Peraga	7.749.010.634,70	7.634.345.979,80
12	Rambu-rambu	6.734.454.161,72	6.734.454.161,71
13	Peralatan Olahraga	633.227.543,36	633.227.543,36
	Jumlah	551.124.801.215,28	500.744.877.277,01

Penjelasan rincian masih-masing jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan uraian sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.161.709.349,62 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp23.387.819.142,37. Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin alat berat per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 31/12/2024	Belanja Modal	Saldo 31/12/2025
1	Excavator	0,00	1.629.480.000,00	1.629.480.000,00
2	Hauler	1.921.691.067,04		1.921.691.067,04
3	Compacting Equipment	255.050.841,75		255.050.841,75
4	Aggregate and Concrete Equipment	988.970.407,51		988.970.407,51
5	Loader	2.074.311.173,06		2.074.311.173,06
6	Alat Besar Darat Lainnya	8.508.715.413,42		8.508.715.413,42
7	Electric Generating Set	241.610.154,00	149.950.605,26	391.560.759,26
8	Pompa	9.397.470.085,59		10.391.929.687,58
	Jumlah Mutasi Alat Besar	23.387.819.142,37	1.779.430.605,26	26.161.709.349,62

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Berat dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

- Excavator belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.629.480.000,00.



- b. Electric Generating set pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp149.950.605,26.
- c. Pompa yang merupakan koreksi dari Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp994.459.601,99.

2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp118.241.468.312,25 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp115.737.018.094,66. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		115.737.018.094,29
Penambahan		3.746.769.639,54
1	Belanja Modal	3.474.570.173,00
2	Mutasi Masuk	271.719.420,72
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	480.045,45
4	Reklas ke aset Lain-lain	
5	Reklasifikasi Masuk	
6	Koreksi Tambah	0,37
7	Hibah masuk	
Pengurangan		(1.242.319.421,58)
8	Mutasi Keluar	(271.719.420,72)
9	Koreksi Reklas ke Aset Lain-lain 2024	(575.000.000,86)
10	Reklas ke aset Lain-lain	(395.600.000,00)
11	Penghapusan	
Saldo Akhir		118.241.468.312,25

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklasifikasi pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja modal alat angkutan tahun 2025 sebesar Rp3.474.570.173,00. terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp884.905.000,00
 2. Sekretariat DPRD senilai Rp843.986.300,00
 3. Dinas Kesehatan senilai Rp709.990.000,00
 4. Dinas Perikanan senilai Rp38.242.174,00
 5. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp492.648.000,00
 6. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp435.774.999,00
 7. Kecamatan Bunut Hulu senilai Rp28.320.000,00
 8. Kecamatan Silat Hilir senilai Rp40.703.700,00
- b. Atribusi/Penunjang atas belanja modal senilai Rp480.045,45 pada Dinas Kesehatan.
- c. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp271.719.420,72 pada beberapa OPD sebagai berikut:



1. Mutasi masuk pada Sekretariat Daerah senilai Rp20.988.020,80 atas Yamaha/B3w-S A/T tahun 2022 dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kab. Kapuas Hulu
2. Mutasi masuk pada Sekretariat DPRD sebesar Rp14.287.000,00 Yamaha Mio Soul GT tahun 2013 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Mutasi masuk pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 unit RX King tahun 2007 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp18.235.800,00
4. Mutasi masuk 1 unit Yamaha Jupiter MX CW tahun 2022 New dari Kecamatan Putussibau Utara ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp17.160.038,00
5. Mutasi masuk pada Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan berupa mutasi 11 unit Yamaha tahun 2018 dari kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp18.942.000,00
6. Mutasi masuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berupa HONDA NEW SCOOPY SPORTY VIN 2019 dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp19.725.089,20
7. Mutasi masuk pada Dinas Perhubungan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Yamaha N-Max Non ABS tahun 2017 sebesar Rp26.238.581,14
8. Mutasi masuk pada Satuan Polisi Pamong Praja 1 unit YAMAHA 1DY tahun 2013 sebesar Rp15.730.300
9. Mutasi masuk pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata 1 Unit YAMAHA VEGA RR tahun 2014 sebesar Rp15.056.250
10. Mutasi masuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 Yamaha (Jupite Z) 5 TP-684360 K611144 tahun 2005 dari Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata senilai Rp12.500.000,00
11. Mutasi masuk pada Badan Pendapatan Daerah 1 unit Yamaha Aerox 125 tahun 2016 dari Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata senilai Rp19.350.000,00
12. Mutasi masuk pada Kecamatan Putussibau Utara Mutasi dari Badan Pendapatan daerah senilai Rp23.006.341,58
13. Mutasi masuk pada kecamatan Kalis dari Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan senilai Rp33.500.000,00
14. Mutasi masuk 1 unit kendaraan bermotor pada Kecamatan Selimbau dari Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp17.000.000,00
- d. Mutasi keluar antar OPD senilai (Rp271.719.420,72)
- e. Koreksi selisih koma pada Sekretariat Daerah sebesar Rp0,06
- f. Koreksi kurang di reklas ke Aset lain-lain pada Tahun 2024 berdasarkan surat persetujuan Sekda atas 2 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang tahun 2009 sebesar Rp575.000.000,00 pada Dinas Perhubungan.
- g. Reklas ke Aset lain-lain senilai (Rp. 395.600.000) yaitu pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Rp45.600.000,00) dan Dinas Perhubungan senilai (Rp350.000.000).
- h. Koreksi desimal saldo awal alat angkutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp0,86)

3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Ukur

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 sebesar



Rp3.308.733.064,64 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.308.733.064,64. Pada tahun 2025 tidak terdapat kenaikan dan pengurangan.

Tabel 5.88 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		3.308.733.064,64
Penambahan		-
1	Belanja Modal	-
2	Mutasi Masuk	-
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Reklasifikasi Masuk	-
6	Koreksi Tambah	-
7	Hibah masuk	-
Pengurangan		-
8	Mutasi Keluar	-
9	Reklas ke aset Lain-lain	-
10	Reklasifikasi Kurang	-
11	Ekstrakomptabel	-
12	Koreksi Kurang	-
Saldo Akhir		3.308.733.064,64

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Alat Ukur Tangga dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Pada tahun 2025 tidak terdapat mutasi, koreksi pada aset tetap peralatan dan mesin alat bengkel dan ukur.

4) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.803.035.546,00 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.796.702.651,60 terdapat kenaikan sebesar Rp6.332.894,40 yang merupakan Reklas belanja modal BLUD.

Rincian Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.89 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.796.702.651,60
Penambahan		6.332.894,40
1	Belanja Modal	
2	Mutasi Masuk	
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	6.332.894,40
4	Reklas Belanja Modal BLUD	
5	Reklasifikasi Masuk	
6	Koreksi Tambah	
7	Hibah masuk	
Pengurangan		0,00
8	Mutasi Keluar	
9	Koreksi Kurang	
10	Reklas ke aset Lain-lain	



Uraian		Saldo 2025
11	Penghapusan	
Saldo Akhir		1.803.035.546,00

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.844.026.336,22 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp69.906.095.561,08 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		69.906.095.561,08
Penambahan		39.538.423.669,16
1	Belanja Modal	9.704.138.349,00
2	Mutasi Masuk	70.000.000,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	3.790.585,98
4	Reklasifikasi Masuk	25.806.888.203,11
5	Koreksi Tambah	70.007.250,07
6	Reklas BLUD	78.218.639,00
7	Reklas BOSP	3.805.380.642,00
Pengurangan		(10.600.492.894,02)
1	Mutasi Keluar	(70.000.000,00)
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi ke Beban LO	(10.020.919.414,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	(509.573.480,02)
5	Penghapusan	
Saldo Akhir		98.844.026.336,22

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Penjelasan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Modal senilai Rp9.704.138.349,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah senilai Rp 1.023.013.740,00
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp 8.129.727.402,00
3. Dinas Kesehatan senilai Rp 251.542.350,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 30.741.450,00
5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata senilai Rp 49.728.000,00
6. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp 20.757.000,00
7. Dinas Perikanan senilai Rp 9.524.910,00
8. Dinas Perhubungan sebesar Rp7.447.500,00
9. Inspektorat senilai Rp 54.112.500,00
10. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup senilai Rp 5.599.950,00



11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp 84.210.147,00
12. Badan Perencanaan Daerah senilai Rp 18.359.400,00
13. Kecamatan Pengkadan senilai Rp 4.500.000,00
14. Kecamatan Batang Lupar senilai Rp 14.874.000,00
- b. Mutasi Masuk Rp70.000.000 3 Unit White Board Elektronik dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pendapatan Daerah
- c. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang senilai Rp.3.790.585,98
- d. Reklasifikasi masuk sejumlah Rp25.806.888.203,11 dengan rincian sebagai berikut
 1. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan sejumlah Rp11.237.639.599,00 merupakan reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Reguler
 2. Reklasifikasi dari Bangunan Gedung pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp71.954.104,85
 3. Reklasifikasi dari belanja modal bangunan Gedung sebesar Rp14.497.294.499,26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Koreksi tambah senilai Rp70.007.250,07 yaitu pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp0,02, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai (Rp608.936,07) merupakan selisih lebih saji saldo awal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan senilai Rp680.000,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp70.000.000,00, pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana koreksi catat saldo awal sebesar Rp7.250,00, pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar (Rp71.064,91), dan koreksi saldo awal lainnya sebesar Rp1,03.
- f. Reklas belanja modal BLUD dr.Achmad Diponegoro Putussibau sebesar Rp78.218.639,00.
- g. Reklas belanja modal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.805.380.642,00.
- h. Mutasi keluar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp70.000.000,00).
- i. Koreksi aset tetap bernilai di bawah nilai Kapitalisasi minimum total sebesar (Rp10.020.919.414,00) terdiri dari Sekretariat Daerah sebesar (Rp485.149.920,00), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp9.520.295.394,00), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp8.026.600,00), Dinas Perhubungan sebesar (Rp7.447.500,00).
- j. Total reklas ke aset lain-lain sebesar (Rp509.573.480,02) terdiri dari barang bercorak seni dan budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp5.805.000,00), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar (Rp17.875.000,00), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp477.041.767,29), pada Satuan Polisi Praja sebesar (Rp8.851.712,73),

6) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Saldo Aset Tetap Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp 20.702.057.409,65 dan Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp19.878.078.491,91 Dimana selama TA 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



mengakui Penambahan Aset Tetap Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Mutasi Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		19.878.078.491,91
Penambahan		827.266.167,75
1	Belanja Modal	333.174.124,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	642.042,42
4	Reklasifikasi Masuk	464.420.001,33
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	29.030.000,00
Pengurangan		(3.287.250,01)
1	Mutasi Keluar	-
2	Koreksi Kurang	(0,01)
3	Koreksi ke Beban LO	(3.287.250,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Penghapusan	-
Saldo Akhir		20.702.057.409,65

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Penjelasan koreksi aset tetap Peralatan dan Mesin - Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi adalah sebesar Rp333.174.124,00 yang terdapat pada beberapa OPD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Studio Komunikasi, dan Pemancar

NO	NAMA OPD	Belanja Modal
1	Sekretariat Daerah	29.997.750,00
2	Sekretariat DPRD	149.966.550,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	81.337.524,00
4	Dinas Kesehatan	18.107.600,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.065.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	39.960.000,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.739.700,00
Jumlah		333.174.124,00

- Kapitalisasi / atribusi dan penunjang sebesar Rp642.042,42 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp6.113,02 dan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp635.929,40.
- Reklasifikasi masuk sebesar Rp474.420.001,33 reklasifikasi dari bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp464.420.001,33.
- Reklas belanja modal BOSP sebesar Rp29.030.000,00.
- Koreksi desimal saldo awal alat studio dan komunikasi dan pemancar sebesar (Rp0,01).



- f. Koreksi aset tetap bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum sebesar (Rp3.287.250,00) pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp1.637.250,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp1.650.000,00).

7) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Aset Tetap Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp126.016.047.628,34 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp119.640.730.771,25 Pada TA 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		119.640.730.771,25
Penambahan		6.375.316.857,09
1	Belanja Modal	6.103.859.934,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	2.060.623,09
4	Reklasifikasi Masuk	0,00
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	269.396.300,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Penghapusan	-
Saldo Akhir		126.016.047.628,34

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat – Kedokteran dan Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 12.

Penjelasan koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Modal senilai Rp6.103.859.934,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang senilai Rp2.060.623,09 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- Reklas BLUD senilai Rp269.396.300,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium

Saldo Aset Tetap Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp27.359.471.124,17 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.152.778.662,51 (*Audited*). Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui penambahan Aset Tetap Alat Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.94 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		26.152.778.662,51
Penambahan		1.658.187.928,56
1	Belanja Modal	1.579.557.473,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	883.955,56
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya	27.495.000,00
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	
7	Reklas BOSP	50.251.500,00
Pengurangan		(451.495.466,90)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	(299.489.985,00)
3	Koreksi desimal	0,00
4	Koreksi ke Beban LO	(152.005.481,90)
5	Reklas ke aset Lain-lain	-
6	Penghapusan	
Saldo Akhir		27.359.471.124,17

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Penjelasan koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium dengan uraian sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium sebesar Rp1.579.557.473,00 realisasi tersebut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp640.954.973,00, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp891.896.500,00. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.853.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp35.853.000,00.
- Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Laboratorium sebesar Rp883.955,56 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp301.098,42 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp582.857,14.
- Reklas masuk dari Aset tetap lainnya senilai Rp27.495.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reklas BOSP senilai RP50.251.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Terdapat koreksi menjadi Beban Barang LO pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp152.005.481,90).
- Reklas ke komputer pada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp299.489.985,00) .

9) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp112.272.544.911,53 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp105.571.184.330,30. Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui Penambahan Aset Tetap Peralatan Komputer dari Realisasi Belanja Modal bersumber dari APBD sebesar Rp2.714.921.469,00, selain itu juga terjadi mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.95 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Peralatan Komputer Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		105.571.184.330,30
Penambahan		7.038.343.386,75
1	Belanja Modal	2.714.921.469,00
2	Mutasi Masuk	89.776.846,97
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	6.655.164,18
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	299.489.985,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	358.025.239,60
7	Reklas BOSP	3.569.474.682,00
Pengurangan		(336.982.805,56)
1	Mutasi Keluar	(89.776.846,97)
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	(33.264.606,12)
4	Reklas ke aset Lain-lain	(213.941.352,42)
5	Koreksi desimal	(0,05)
Saldo Akhir		112.272.544.911,49

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Penjelasan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Modal selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp2.714.921.469,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.96 Rincian Belanja Modal Peralatan Komputer

No	NAMA SKPD	Belanja Modal 2025
1	Sekretariat Daerah	196.581.000,00
2	Sekretariat DPRD	76.273.650,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	194.520.142,00
4	Dinas Kesehatan	710.043.720,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.121.040,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	14.962.800,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	288.540.607,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	49.783.500,00
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	67.399.200,00
10	Dinas Perikanan	112.016.000,00
11	Inspektorat	78.033.000,00
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.827.500,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	343.134.300,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	17.748.900,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.998.440,00
16	Badan Perencanaan Daerah	11.877.000,00
17	Dinas Perhubungan	23.088.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	47.286.000,00
19	Badan Pengelola Perbatasan	23.532.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	240.403.170,00
21	Kecamatan Pengkadan	92.962.500,00



No	NAMA SKPD	Belanja Modal 2025
22	Kecamatan Selimbau	27.700.000,00
23	Kecamatan Batang Lupa	22.089.000,00
24	Kecamatan Empanang	4.000.000,00
	Jumlah	2.714.921.469,00

- b. Mutasi Masuk selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp89.776.846,97 terdiri dari beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp12.087.943,44, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.980.000, Sekretariat Daerah sebesar Rp15.924.143,24, Sekretariat DPRD sebesar Rp18.414.111,97, Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp23.370.648,32, dan Kecamatan Selimbau sebesar Rp10.000.000;
- c. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp6.655.164,18 terdiri dari beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebesar Rp239.706,15, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp4.662.857,12, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp1.072.600,91, Kecamatan Selimbau sebesar Rp680.000,00;
- d. Reklasifikasi masuk dari Alat Laboratorium selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp299.489.985,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Reklas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp358.025.239,60 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- f. Reklas BOSP selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp3.569.474.682 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Mutasi keluar selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp89.776.846,97) terdiri dari beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar (Rp15.924.143,24), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebesar (Rp8.345.648,32), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp33.439.111,97), Kecamatan Putussibau Utara sebesar (Rp22.087.943,44), dan Kecamatan Mentebah sebesar (Rp9.980.000);
- h. Koreksi ke Beban LO selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp33.264.606,12) terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp12.693.999,12), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp20.570.607);
- i. Reklas ke Aset Lain-lain selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp213.941.352,42) terdiri dari : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp84.675.323,58), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp24.336.032,23), Dinas Perhubungan sebesar (Rp76.650.196,61), Kecamatan Putussibau Selatan sebesar (Rp15.729.800), dan Kecamatan Suhaid sebesar (Rp12.550.000); dan
- j. Koreksi Desimal selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp0,05) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10) Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp296.902.382,91 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp296.902.382,91. Pada Tahun 2025 tidak terdapat kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Rekapitulasi koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan



Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat dilihat pada:

Tabel 5.97 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		296.902.382,91
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	0,00
2	Reklasifikasi ke komputer	0,00
3	Koreksi ke Beban LO	0,00
4	Reklas ke aset Lain-lain	0,00
5	Koreksi desimal	0,00
Saldo Akhir		296.902.382,91

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

11) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi

Saldo Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp773.227.673,50, dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00 terdapat penambahan aset alat eksplorasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.98 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		0,00
Penambahan		773.227.673,50
1	Belanja Modal	772.966.725,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	260.948,50
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	0,00
2	Reklasifikasi ke komputer	0,00
3	Koreksi ke Beban LO	0,00
4	Reklas ke aset Lain-lain	0,00
5	Koreksi desimal	0,00
Saldo Akhir		773.227.673,50

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Eksplorasi dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Penjelasan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi dengan uraian sebagai berikut:



- a. Belanja Modal selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp772.966.725,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- b. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp260.948,50 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

12) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja

Saldo Peralatan dan Mesin Alat-Alat Keamanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 228.885.136,67 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp66.806.439,69 terdapat kenaikan aset alat-alat keselamatan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Keamanan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		66.806.439,69
Penambahan		162.078.696,98
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	162.078.696,98
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		228.885.136,67

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Penjelasan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja adalah dikarenakan reklasifikasi masuk dari Alat Laboratorium selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp162.078.696,98 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

13) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Praktek per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.749.010.634,70 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.634.345.979,80 (*Audited*). Pada TA 2025 mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat Peraga Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		7.634.345.979,80
Penambahan		132.332.654,90
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	37.274.254,90
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00



Uraian		Saldo 2025
7	Reklas BOSP	95.058.400,00
Pengurangan		(17.668.000,00)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke computer	-
3	Koreksi ke Beban LO	(17.668.000,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		7.749.010.634,70

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Penjelasan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

- Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp 37.274.254,90 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- Reklas BOSP selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp95.058.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- Koreksi ke Beban LO selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp17.668.000) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

14) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap - Rambu-Rambu per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.734.454.161,72 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.734.454.161,71 tidak terdapat kenaikan dan penurunan pada tahun 2024. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu- Rambu dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 5.101 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu Tahun 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		6.734.454.161,71
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	0,00
5	Koreksi Tambah	-
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		0,01
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	0,01
Saldo Akhir		6.734.454.161,72

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

15) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Olah Raga

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap - Alat-alat Olah Raga per 31 Desember 2025 sebesar Rp633.227.543,36 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp633.227.543,36



Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin -Alat Olah Raga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin -Alat Olah Raga Tahun 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		633.227.543,36
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		633.227.543,36

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Olah Raga dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025
(Rp)

1.779.716.957.329,81

31 Desember 2024
(Rp)

1.588.697.933.685,69

Kebijakan Akuntansi terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan terkait biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan tersebut sampai siap digunakan. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.779.716.957.329,81 (*Audited*) sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.588.697.933.685,69.

1) Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum

Saldo Aset Tetap Bangunan Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum per 31 Desember 2025 Rp1.745.260.409.624,52 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.556.264.498.854,71. Adapun rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.103 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.556.264.498.854,71
Penambahan		226.248.587.263,03
1	Belanja Modal	84.322.974.103,73
2	Mutasi Masuk	107.907.000,00



Uraian		Saldo 2025
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	122.597.675,28
4	Reklasifikasi antar rekening neraca/ KDP	138.810.263.984,02
5	Hibah dari Kementerian Perdagangan	2.884.844.500,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(37.252.605.428,31)
1	Mutasi Keluar	(107.907.000,00)
2	Penghapusan	(7.638.261.503,62)
3	Reklasifikasi antar rekening neraca	(29.506.436.923,74)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	(0,95)
Saldo Akhir		1.745.260.480.689,43

*Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum dapat dilihat pada **Lampiran 21**.*

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum adalah sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal dan Atribusi/Penunjang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Gedung

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.484.831.995,00
2	Dinas Kesehatan	35.124.376.558,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.906.911.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	146.807.689,73
5	Dinas Pertanian dan Pangan	179.816.800,00
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	184.746.976,00
7	Dinas Perhubungan	95.641.022,00
8	Inspektorat	199.842.063,00
Jumlah		84.322.974.103,73

- Mutasi masuk dan keluar Aset Tetap Bangunan Gedung terdiri dari beberapa SKPD antara lain, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp107.907.000 dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar (Rp107.907.000)
- Realisasi atas atribusi penunjang belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 senilai Rp122.597.675,28 dengan rincian:

Tabel 5.105 Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Bangunan dan Gedung Kabupaten Kapuas Hulu TA 2024

No	OPD	Realisasi Atribusi/Penunjang
1	Dinas Kesehatan	11.857.759,23
2	Dinas Pertanian dan Pangan	99.325.979,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	8.160.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	2.940.090,89
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	313.846,16
Jumlah		122.597.675,28



- c. Reklasifikasi antar rekening Neraca/KDP pada tahun 2025 sebesar Rp138.810.263.984,02 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp138.730.399.484,02, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar Rp79.864.500,00.
- d. Hibah dari Kementerian Perdagangan selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp2.884.844.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan.
- e. Koreksi desimal atas saldo awal sebesar (Rp0,95).
- f. Penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung pada tahun 2025 dengan total nilai sebesar (Rp7.638.261.503,62) terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp1.189.153.448,10), Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp736.568.853,95), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp185.287.911,00), Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar (Rp214.981.460,14), Dinas Perikanan sebesar (Rp322.753.682,27), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp4.456.954.470,63), Dinas Perhubungan sebesar (Rp182.561.677,53) dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp350.000.000).
- g. Reklasifikasi antar rekening Neraca pada tahun berjalan tahun 2025 sebesar (Rp29.506.436.923,67) terdiri dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp5.145.425.068,85), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp24.323.737.599,92), Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup sebesar (Rp37.274.254,90), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp71.064,91).

2) Mutasi Aset Tetap Monumen

Saldo Aset Tetap Monumen Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.569.303.767,31 dan 2024 sebesar Rp1.142.480.375,27. Rincian mutasi masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.106 Mutasi Aset Tetap Monumen

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.142.480.375,27
Penambahan		2.426.823.392,04
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	2.426.823.392,04
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke computer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		3.569.303.767,31

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan –Monumen dapat dilihat pada **Lampiran 22**.



Reklasifikasi pada asset tetap monument sebesar Rp2.426.823.293,04 merupakan reklas pencatatan dari aset bangunan Gedung tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3) Mutasi Aset Tetap Menara

Saldo Aset Tetap Menara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp354.843.751,24 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp354.843.751,24. Rincian mutasi masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.107 Mutasi Aset Tetap Menara

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		354.843.751,24
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		354.843.751,24

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan –Menara dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

4) Aset tetap Tugu Titik Kontrol/ Prasasti

Saldo Aset Tetap Tugu Titik Kontrol/Prasasti Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.532.329.121,83 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp30.936.110.705,48, Rincian mutasi masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.108 Mutasi Aset Tetap Tugu Titik Kontrol Prasasti

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		30.936.110.705,48
Penambahan		2.132.535.864,98
1	Belanja Modal	2.132.464.800,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk	71.064,98
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(2.536.317.448,63)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi antar rekening	(2.426.894.456,00)
3	Penghapusan	(109.422.991,61)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	(1,02)
Saldo Akhir		30.532.329.121,83



*Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Tugu Titik Kontrol/Prasasti dapat dilihat pada **Lampiran 24**.*

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Tugu Titik Kontrol/Prasasti adalah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja modal senilai Rp. 2.132.464.800,00 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Reklasifikasi antar rekening sebesar (Rp.2.426.894.456,00) yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai (Rp.2.426.214.456,00) reklasifikasi ke monumen dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan senilai (Rp.680.000,00) reklasifikasi ke perlengkapan kantor
- Penghapusan senilai (Rp109.422.991,61) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi.
- Koreksi desimal atas saldo awal sebesar (Rp1,02).
- Reklas dari Bangunan Gedung sebesar Rp71.064,98 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2025
(Rp)

3.665.615.937.753,24

31 Desember 2024
(Rp)

3.589.990.166.611,55

Kebijakan Akuntansi terkait Jalan Irigasi dan Jaringan terkait biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.665.615.937.753,24 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.589.990.166.611,55. Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 5.109 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2025	Naik/(Turun)
1	Jalan dan Jembatan	3.235.733.380.160,16	3.306.566.461.975,71	70.833.081.815,55
2	Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air	183.553.014.015,43	186.191.565.550,53	2.638.551.535,10
3	Instalasi	62.060.342.898,41	63.003.171.626,82	487.988.820,47
4	Jaringan	108.643.429.537,52	109.854.738.600,18	1.666.148.970,57
	Jumlah	3.589.990.166.611,55	3.665.615.937.753,24	75.625.771.141,69

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.110 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		3.589.990.166.611,55
Penambahan		78.757.012.858,24
1	Belanja Modal	61.136.012.061,00
2	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	14.607.744,67



Uraian		Saldo 2025
3	Reklasifikasi Masuk	17.506.993.052,57
4	Koreksi tambah	99.400.000,00
Pengurangan		(3.131.241.716,60)
1	Reklas Kurang	(111.664.044,00)
2	Reklas ke KDP	(561.104.647,28)
3	Koreksi Kurang	(64.197.866,40)
4	Penghapusan	(1.762.538.994,81)
5	Koreksi Kurang	(631.736.164,11)
Saldo Akhir		3.665.615.937.753,24

Sedangkan penjelasan rincian masih-masing jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Saldo aset tetap Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.306.566.461.975,71 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.235.733.380.160,16. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.111 Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		3.235.733.380.160,16
Penambahan		72.805.425.202,80
1	Belanja Modal	59.258.110.017,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	3.973.565,24
4	Reklasifikasi antar rekening	13.543.341.620,56
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(1.972.343.387,25)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi antar rekening	
3	Penghapusan	(1.160.298.591,99)
4	Reklas ke KDP	(561.104.647,28)
5	Koreksi ke Beban	(25.511.429,00)
7	Koreksi penimbunan tanah	(225.428.718,98)
Saldo Akhir		3.306.566.461.975,71

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada Lampiran 25.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal dan Atribusi/Penunjang Aset Tetap Jalan dan Jembatan per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan

No	OPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.258.110.017,00
Jumlah		59.258.110.017,00



- b. Biaya Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp.3.973.565,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.113 Biaya Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan

No	SKPD	Realisasi Atribusi/Penunjang
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.973.565,24
Jumlah		3.973.565,24

- c. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Jalan dan Jembatan tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp13.543.341.620,56 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Penghapusan Aset Tetap Jalan dan Jembatan tahun 2025 sebesar (Rp1.160.298.591,99) yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai (234.639.000,00) dan Dinas Perikanan senilai (Rp925.659.591,99).
- e. Koreksi ke Beban senilai (Rp25.511.429,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Koreksi penimbunan tanah senilai (Rp225.428.718,98) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g. Reklas ke KDP senilai (Rp561.104.647,28) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi)

Saldo Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp186.191.565.550,53 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp183.553.014.015,43, Rincian mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.114 Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		183.553.014.015,43
Penambahan		3.460.194.461,59
1	Belanja Modal	1.194.250.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	9.992.277,34
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	2.156.552.184,25
5	Koreksi Tambah	99.400.000,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(821.642.926,49)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(111.664.044,00)
3	Koreksi ke Beban LO	(38.686.437,40)
4	Penghapusan	(264.985.000,00)
5	Koreksi lebih	(406.307.445,09)
Saldo Akhir		186.191.565.550,53

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dapat dilihat pada Lampiran 26.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) adalah berupa:



- a. Realisasi belanja modal Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp 1.194.250.000,00

Tabel 5.115 Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi)

No	OPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Kesehatan	593.250.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	904.667.044,00
Jumlah		1.497.917.044,00

- b. Kapitalisasi/atribusi/Penunjang Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar Rp9.992.277,34 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.277,31 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.792.000,03.
- c. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar Rp2.156.552.184,25 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Koreksi tambah Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar Rp99.400.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- e. Rekalsifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan tahun 2025 sebesar (Rp111.664.044,00) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Koreksi ke Beban LO Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar (Rp38.686.437,40) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g. Penghapusan Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar (Rp264.985.000) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
- h. Koreksi lebih senilai (Rp306.907.445,09) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan untuk pemeliharaan dan Peningkatan/Normalisasi Saluran Drainase Jalan Pesantren Kecamatan Putussibau Selatan sebesar.
- i. Koreksi selisih lebih pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar (Rp99.400.000,00).

3) Mutasi Aset Tetap Instalansi

Saldo Aset Tetap Instalansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp63.003.171.626,82 dan per 31 Desember 2024(*Audited*) sebesar Rp62.060.342.898,41. Rincian mutasi Aset Tetap Instalansi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.116 Mutasi Aset Instalansi Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		62.060.342.898,41
Penambahan		1.673.808.131,26
1	Belanja Modal	798.685.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	97.902,09
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	875.025.229,14
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(730.979.402,85)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(508.685.000,00)
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(222.294.402,82)
5	Koreksi lebih	0,03
Saldo Akhir		63.003.171.626,82



Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 27.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Instalasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Instalasi tahun 2025 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp798.685.000,00 yang terdiri dari belanja modal pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp290.000.000,00 dan sebesar Rp508.685.000,00 pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Atribusi/Penunjang dari Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp97.902,09 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Instalasi tahun 2025 sebesar Rp242.520.902,68 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar Rp632.504.326,46 pada Kecamatan Embaloh Hulu
- Reklas keluar antara rekening sebesar (Rp508.685.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Penghapusan Aset Tetap Instalasi tahun 2025 sebesar (Rp222.294.402,82) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

4) Mutasi Aset Tetap Jaringan

Saldo Aset Tetap Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp109.854.738.600,18 dan 2024 (Audited) sebesar Rp108.643.429.537,52. Rincian mutasi Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.117 Mutasi Aset Tetap Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		108.643.429.537,52
Penambahan		1.958.774.389,12
1	Belanja Modal	89.985.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	544.000,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	1.868.245.389,08
5	Koreksi Tambah	0,04
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(747.465.326,46)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(632.504.326,46)
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(114.961.000,00)
5	Koreksi lebih	
Saldo Akhir		109.854.738.600,18

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 28.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Jaringan adalah sebagai berikut.

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Jaringan tahun 2025 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp89.985.000,00 dengan biaya Atribusi/Penunjang senilai Rp544.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



- b. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Jaringan tahun 2025 sebesar Rp1.868.245.389,08 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar (Rp632.504.326,46) pada Kecamatan Embaloh Hulu
- c. Penghapusan Aset Tetap Jaringan tahun 2025 sebesar (Rp 114.961.000,00) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Koreksi desimal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,04.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**31 Desember 2025****31 Desember 2024****(Rp)****(Rp)****36.695.054.097,75****32.702.662.647,76**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.695.054.097,75 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp32.702.662.647,76 mengalami kenaikan sebesar Rp3.992.391.449,99 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.118 Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Aset Tetap Lainnya	Saldo per 31	Saldo per 31	Naik/(Turun)
		Desember 2025	Desember 2024	
1	Buku dan Perpustakaan	32.563.570.057,80	28.604.764.607,81	3.958.805.449,99
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	2.005.177.123,90	1.971.591.123,90	33.586.000,00
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	2.126.306.916,05	2.126.306.916,05	0,00
	Jumlah	36.695.054.097,75	32.702.662.647,76	3.992.391.449,99

1) Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan

Saldo Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2025 Rp32.563.570.057,80 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp28.604.764.607,81. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.119 Mutasi Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		28.604.764.607,81
Penambahan		20.332.432.399,99
1	Belanja Modal	14.660.861.299,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	3.499.999,99
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	5.668.071.101,00
Pengurangan		(16.373.626.950,00)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(11.265.134.599,00)
3	Koreksi ke Beban LO	(5.108.492.351,00)
4	Penghapusan	-
5	Koreksi lebih	-
Saldo Akhir		32.563.570.057,80

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan dapat dilihat pada **Lampiran 29**.



Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan adalah sebagai berikut:

- Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp14.660.861.299,00
- Koreksi Tambah senilai Rp3.499.999,99 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Reklas BOSP senilai Rp5.668.071.101,00
- Reklasifikasi Masuk antar rekening tahun 2025 sebesar Rp (11.265.134.599,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koreksi ke Beban LO senilai (Rp5.108.492.351,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Saldo Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp2.005.177.123,90 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp 1.971.591.123,90. Rincian mutasi Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.120 Mutasi Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.971.591.123,90
Penambahan		40.135.000,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	40.135.000,00
Pengurangan		(6.549.000,00)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	5.805.000,00
3	Koreksi ke Beban LO	(12.354.000,00)
4	Penghapusan	-
5	Koreksi lebih	-
Saldo Akhir		2.005.177.123,90

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dapat dilihat pada Lampiran 30.

- Reklas BOSP senilai Rp40.135.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reklasifikasi Masuk antar rekening tahun 2025 sebesar Rp (5.805.000,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koreksi ke Beban LO senilai (Rp12.354.000,00).

3) Aset Tetap lainnya Hewan, Ternak dan Tumbuhan

Saldo Aset Tetap Lainnya Hewan, Ternak dan Tanaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.126.306.916,05 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.126.306.916,05.

Tabel 5.121 Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan, Ternak dan Tumbuhan

Uraian		Saldo 2025	Saldo 2024
Saldo Awal		2.126.306.916,05	2.126.306.916,05
1	Aset Bertambah	0,00	0,00
2	Aset Berkurang	0,00	0,00
Saldo Akhir		2.126.306.916,05	2.126.306.916,05

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan dapat dilihat pada Lampiran 31,32,33.

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan****31 Desember 2025
(Rp)****114.678.040.197,59****31 Desember 2024
(Rp)****256.990.787.233,54**

Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pekerjaan konstruksi tertentu dinyatakan selesai direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp114.678.040.197,59 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp256.990.787.233,54. Mutasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.122 Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		256.990.787.233,54
Penambahan		5.634.575.611,28
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	
6	Kapitalisasi KDP	5.634.575.611,28
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(147.947.322.647,23)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	-
5	Koreksi ke Aset tetap/dikapitalisasi	(147.947.322.647,23)
Saldo Akhir		114.678.040.197,59

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 34.

Penjelasan koreksi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain:

1. Kapitalisasi KDP senilai Rp5.634.575.611,28 terdiri dari OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.073.470.964,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp561.104.647,28.
2. Koreksi ke Aset Tetap/dikapitalisasi senilai (Rp147.947.322.647,23) terdiri dari OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp 147.867.458.147,23) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar (Rp79.864.500,00).

**5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan****31 Desember 2025
(Rp)****31 Desember 2024
(Rp)****(3.613.048.623.888,60)****(3.365.654.831.588,45)**

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyusutan terhadap aset-asetnya dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Revisi lampiran kebijakan akuntansi pemerintah Kapuas Hulu dilakukan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 telah mengakomodir perubahan penetapan masa manfaat, ketentuan kapitalisasi renovasi dan pemeliharaan serta nilai kapitalisasi minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap sebagaimana yang tersaji dalam kertas kerja konsolidasi akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.123 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(460.318.701.979,23)	(424.562.522.467,46)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(14.255.354.993,16)	(11.912.600.177,47)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(106.083.912.692,82)	(102.220.994.618,04)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.288.753.957,41)	(3.241.985.590,83)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(1.764.112.017,52)	(1.750.021.900,98)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(69.030.354.254,64)	(59.180.408.667,71)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(15.099.708.303,34)	(12.973.454.990,59)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(114.870.789.522,64)	(108.244.921.690,29)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(23.818.586.971,02)	(21.703.225.663,01)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(24.074.400,00)	(24.074.400,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(96.934.434.224,64)	(89.091.068.598,19)
Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(296.902.382,90)	(237.521.906,32)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(154.645.534,70)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(75.147.779,09)	(40.878.939,69)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(7.412.539.289,54)	(7.008.256.516,17)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(6.668.027.621,12)	(6.518.396.282,15)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(541.358.034,69)	(414.712.526,02)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(557.517.397.218,35)	(520.587.516.566,55)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(550.401.124.070,72)	(514.331.385.756,09)
Akumulasi Penyusutan Monumen	(1.298.544.657,31)	(1.209.183.267,82)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(53.226.562,70)	(44.355.468,92)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(5.764.501.927,62)	(5.002.592.073,72)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.593.258.032.617,12)	(2.418.569.215.130,61)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.492.602.071.814,14)	(2.326.035.436.030,92)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(42.086.093.200,73)	(38.623.550.736,92)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(28.232.239.761,14)	(26.140.055.817,74)



Uraian	2025	2024
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(30.337.627.841,11)	(27.770.172.545,03)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.954.492.073,90)	(1.935.577.423,83)
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(1.954.492.073,90)	(1.935.577.423,83)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.613.048.623.888,60)	(3.365.654.831.588,45)

5.3.1.4 DANA CADANGAN**31 Desember 2025****31 Desember 2024****(Rp)****(Rp)****0,00****0,00**

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp 0,00. Dana Cadangan dibentuk didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024.

5.3.1.5 ASET LAINNYA**31 Desember 2025****31 Desember 2024****(Rp)****(Rp)****144.297.138.529,91****160.466.190.824,12**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp144.297.138.529,91 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp160.466.190.824,12. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.124 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Tagihan Penjualan Angsuran		
2	Tuntutan Ganti Rugi	1.987.894.004,00	1.987.894.004,00
3	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(1.987.894.004,00)	(1.987.894.004,00)
4	Kemitraan Dengan Pihak		-
5	Aset Tak Berwujud	2.015.772.082,99	1.911.184.082,99
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.373.786.734,32)	(1.184.597.132,79)
7	Aset Lain-lain	284.311.083.517,04	295.121.607.903,25
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(140.655.930.335,80)	(140.418.121.029,33)
9	TDF		5.036.117.000,00
	Jumlah	144.297.138.529,91	160.466.190.824,12

5.3.1.5.1 Tuntutan Ganti Rugi**31 Desember 2025****31 Desember 2024****(Rp)****(Rp)****1.987.894.004,00****1.987.894.004,00**

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 (*Audited*) terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar 1.987.894.004,00 sedangkan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.987.894.004,00. Rincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 5.125 Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	UUDP Tahun 2003	104.154.456,00	104.154.456,00
2	UYHD Tahun 2007	96.162.048,00	96.162.048,00
3	TGR Tahun 2019	1.787.577.500,00	1.787.577.500,00
Jumlah		Jumlah	1.987.894.004,00

Penjelasan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Tunggakan UUDP Tahun 2003 sebesar Rp104.154.456,00 merupakan sisa kas pada Dinas Kimpraswil yang belum disetor ke Kas Daerah;
- Tunggakan UYHD Tahun 2007 merupakan sisa kas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp96.162.048,00; dan
- Tuntutan ganti rugi Kapal Ferry sebesar Rp1.787.577.500,00 yang merupakan sisa atas temuan pengadaan kapal tidak sesuai spesifikasi kontrak dari nilai perolehan pertama kali sebesar Rp2.227.577.500,00.

5.3.1.5.2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		(1.987.894.004,00)	(1.987.894.004,00)

Saldo Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp1.987.894.004) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Tahun	Jumlah	Kondisi	%	Jumlah Penyisihan
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	2007	96.162.048,00	Macet	100%	96.162.048,00
2	Dinas Kimpraswil	2003	104.154.456,00	Macet	100%	104.154.456,00
3	TGRD Kapal Ferry Dinas Perhubungan	2019	1.787.577.500,00	Macet	100%	1.787.577.500,00
Jumlah			1.987.894.004,00			1.987.894.004,00

5.3.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		2.015.772.082,99	1.911.184.082,99

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar 2.015.772.082,99 sedangkan per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp1.911.184.082,99 Mutasi Aset Tidak Berwujud dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.127 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025	Saldo 2024
Saldo Awal		1.911.184.082,99	1.583.495.787,61
Penambahan			327.688.295,38
1	Belanja Modal	104.588.000,00	324.848.640,00
2	Mutasi Masuk		0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang		2.839.655,38
4	Belanja Jasa Ke Belanja Modal	0,00	



Pengurangan		0,00	0,00
5	Mutasi Keluar	0,00	0,00
6	Reklas Kurang	0,00	0,00
7	Koreksi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir		2.015.772.082,99	1.911.184.082,99

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 bertambah sebesar Rp.104.588.000,00 yaitu pada dinas komunikasi dan informatika dan statistik.

Tabel 5.128 Rincian Aset Tidak Berwujud Per SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024

No	OPD	Per 31 Des 2024	Bertambah / Berkurang	Per 31 Des 2025
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	125.208.000,00	0,00	125.208.000,00
2	Dinas kesehatan	397.855.000,00	0,00	397.855.000,00
3	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	49.907.000,00	0,00	49.907.000,00
4	Dinas komunikasi dan informatika dan statistik	380.936.090,99	104.588.000,00	485.524.090,99
5	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan	50.923.000,00	0,00	50.923.000,00
6	Dinas kepemudaan, olah raga dan pariwisata	227.790.000,00	0,00	227.790.000,00
7	Sekretariat daerah	371.324.992,00	0,00	371.324.992,00
8	Badan pendapatan daerah	208.440.000,00	0,00	208.440.000,00
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	98.800.000,00	0,00	98.800.000,00
Jumlah		1.911.184.082,99	104.588.000,00	2.015.772.082,99

5.3.1.5.4 Aset Lain – Lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
284.311.083.517,04	295.121.607.903,25

Saldo Aset Lain – Lain merupakan aset rusak berat yang telah dihentikan penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp284.311.083.517,04 sedangkan per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp295.121.607.903,25 Mutasi Aset Lain-Lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.129 Mutasi Aset Lain – Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		295.121.607.903,25
Penambahan		1.698.494.135,93
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	1.698.494.135,93
5	Koreksi Tambah	
6	Kapitalisasi KDP	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(12.509.018.522,14)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(12.439.018.522,14)
5	Koreksi lebih catat	(70.000.000,00)
Saldo Akhir		284.311.083.517,04



Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

Penjelasan mutasi.

- a. Reklasifikasi Masuk antar rekening senilai Rp1.698.494.135,93. Rincian reklas adalah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rp 148.150.323,58
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp 511.562.103,01
 - 3) Kecamatan Suhaid 12.550.000,00
 - 4) Dinas Perhubungan Rp1.001.650.196,61
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja 8.851.712,73
 - 6) Kecamatan Putussibau Selatan 15.729.800,00
- b. Penghapusan Aset lain-lain senilai Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 senilai (Rp.12.439.018.522,14). Yaitu pada Sekretariat Daerah (12.373.264.022,14), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Rp17.495.000), Badan Keuangan dan Aset Daerah (Rp32.259.500,00) dan pada Kecamatan Bunut Hilir sebesar (Rp16.000.000,00)
- c. Koreksi lebih catat Aset Lain-lain pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai (Rp70.000.000).

5.3.1.5.5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		(Rp1.373.786.734,32)	(1.184.597.132,79)

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.373.786.734,32) sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp1.184.597.132,79) Mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.130 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(62.604.000,00)	(41.736.000,00)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(397.855.000,00)	(397.855.000,00)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(49.907.000,00)	(49.907.000,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Statistik	(135.241.904,97)	(68.097.802,13)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	(50.923.000,00)	(50.923.000,00)
6	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	(227.790.000,00)	(227.790.000,00)
7	Sekretariat Daerah	(219.712.496,00)	(163.088.330,67)
8	Badan Pendapatan Daerah	(180.353.333,34)	(152.266.666,67)
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	(49.400.000,01)	(32.933.333,33)
JUMLAH		(1.373.786.734,32)	(1.184.597.132,79)



5.3.1.5.6

**Akumulasi Penyusutan Aset Lain –
Lain****31 Desember 2025****(Rp)****(140.655.930.335,80)****31 Desember 2024****(Rp)****(140.418.121.028,24)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp140.655.930.335,80) sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp140.418.121.028,24) Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per SKPD per 31 Desember 2025

NO	OPD	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.254.113.240,16)	(3.254.113.240,16)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(117.499.894.405,35)	(117.499.894.405,35)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(250.396.751,10)	(250.396.751,10)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	(716.310.432,80)	(707.458.720)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(131.845.736,07)	(131.845.736)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(64.563.482,99)	(64.563.482,99)
7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi		
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(282.742.820,06)	(300.237.820)
9	Dinas Perhubungan	(1.031.247.715,47)	(29.597.519)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Statistik	(17.495.000,00)	(17.495.000,00)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	(8.373.848,94)	(8.373.848,94)
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(29.211.787,49)	(29.211.787)
13	Dinas Perikanan	(404.704.611,64)	(404.704.611,64)
14	Dinas Pertanian dan Pangan	(570.813.180,53)	(570.813.180,53)
15	Sekretariat Daerah	(11.088.734.556,76)	(12.413.664.886)
16	Sekretariat DPRD	(126.114.716,75)	(126.114.717)
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.072.438.880,93)	(663.136.278)
18	Badan Pendapatan Daerah	(94.422.850,20)	(94.422.850,20)
19	Inspektorat	(110.892.500)	(110.892.500)
20	Kecamatan Putussibau Utara	(0,00)	(0,00)
21	Kecamatan Putussibau Selatan	(24.931.869,42)	(9.202.069)
22	Kecamatan Bika	(77.888.102)	(77.888.102)
23	Kecamatan Kalis	(15.500.000)	(15.500.000)
24	Kecamatan Embaloh Hilir	(0,00)	(0,00)
25	Kecamatan Bunut Hilir		(16.000.000)
26	Kecamatan Boyan Tanjung	(0,00)	(0,00)
27	Kecamatan Bunut Hulu	(50.483.800)	(50.483.800)
29	Kecamatan Empanang	(0,00)	(0,00)
30	Kecamatan Puring Kencana	(0,00)	(0,00)
31	Kecamatan Suhaid	(68.099.250,00)	(55.549.250,00)
32	Kecamatan Seberuang	(36.971.500)	(36.971.500)
33	Kecamatan Silat Hilir	(76.669.718,56)	(76.669.718,56)
34	Kecamatan Silat Hulu	(145.173.325)	(145.173.325)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(37.153.992)	(37.153.992)
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.141.091.938)	(3.141.091.938)
37	Kecamatan Embaloh Hulu	(79.500.000)	(79.500.000)
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	(148.150.323,58)	(0,00)
JUMLAH		(140.655.930.335,80)	(140.418.121.028,24)



5.3.1.5.7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		0,00	5.036.117.000,00

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.036.117.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132 Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Pajak	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan		
2	DBH PPh Pasal 21		471.862.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		50.303.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		682.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent		63.235.000
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty		4.450.035.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi		
	Jumlah	0,00	5.036.117.000,00

5.3.1.6	PROPERTI INVESTASI	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		3.262.190.700,00	Rp3.293.616.850,00

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi dilakukan oleh setiap entitas pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 17 Properti Investasi. PSAP Berbasis Akruwal Nomor 17 tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2024.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
- atau dijual dan/atau **diserahkan** dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Saldo Properti Investasi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.262.190.700,00 dan tahun 2024 (*Audited*) senilai Rp3.293.616.850,00 yang terdiri dari :

Tabel 5. 133 Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Properti Investasi – Tanah	2.696.520.000,00	2.696.520.000,00
2	Properti Investasi - Gedung Bangunan	1.257.046.000,00	1.257.046.000,00
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(691.375.300,00)	(659.949.150,00)
	Jumlah	3.262.190.700,00	3.293.616.850,00

**5.3.2 KEWAJIBAN****31 Desember 2025
(Rp)****31 Desember 2024
(Rp)****27.222.819.911,58****33.697.446.508,55**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.222.819.911,58 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp33.697.446.508,55. Kewajiban tersebut berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134 Mutasi Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		31 Desember 2024	Tambah	Kurang	31 Desember 2025
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	159.805.923,34	159.805.923,34	141.040.241,39	141.040.241,39
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.121.328.665,00	41.959.044,00	2.089.280.389,00	6.074.007.320,00
3	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	102.324.960,00	44.007.786,00	19.848.000,00	126.484.746,00
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.586.886.700,00	0	6.586.886.700,00	0
5	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.143.200.000,00	0	1.143.200.000,00	0
6	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	635.000.000,00	0	635.000.000,00	0
7	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	82.250.000,00	0	0	82.250.000,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.659.080,00	0	11.659.080,00	0
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	3.096.682.363,00	2.599.284.827,00	3.096.682.363,00	2.599.284.827,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.918.615.257,00	2.301.239.160,58	2.918.615.257,50	2.301.239.160,08
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	62.200.000,00	2.450.000,00	62.200.000,00	2.450.000,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	10.065.887.898,20	13.568.650.258,90	8.007.270.243,00	15.627.267.914,10
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	70.600.000,00	0	70.600.000,00	0
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	21.335.000,00	0	21.335.000,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.064.600,00	0	2.064.600,00	0
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	34.912.607,00	11.628.322,00	34.912.607,00	11.628.322,00



No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		31 Desember 2024	Tambah	Kurang	31 Desember 2025
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	11.773.900,00	27.250.200,00	11.773.900,00	27.250.200,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	452.572.818,00	186.556.498,00	452.572.818,00	186.556.498,00
19	Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	65.265.954,00	0	65.265.954,00	0
20	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.464.083,01	0	8.438.400,00	22.025.683,01
21	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0	188.999.864.222,00	188.999.864.222,00	0
22	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	43.951.700,00	0	43.951.700,00	0
TOTAL		33.697.446.508,55	279.530.528.313,12	286.005.154.910,09	27.222.819.911,58

Beberapa penjelasan terkait kewajiban jangka pendek antar lain:

1. Seluruh utang belanja pegawai khusus tambahan penghasilan dan iuran jaminan Kesehatan tahun 2024 adalah utang belanja pegawai bulan desember tahun 2024 yang telah dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025.
2. Dari saldo utang utang iuran jaminan kesehatan ASN dan Non ASN Per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.223.653.625,00 telah dilakukan pemungutan dan penyetoran di tahun 2025 sebesar Rp2.109.128.389,00 yang merupakan utang seluruh perangkat daerah karena utang tersebut melekat pada saat mengakui utang belanja pegawai tambahan penghasilan, sedangkan sisanya masih menjadi saldo utang pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp6.114.525.236,00, penambahan utang utang iuran jaminan kesehatan ASN dan Non ASN Per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.966.830,00 sehingga total utang utang iuran jaminan kesehatan ASN dan Non ASN yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp6.200.492.066,00.
3. Terdapat koreksi atas utang belanja pegawai Tambahan Penghasilan Guru Non PNS sebesar Rp1.000.000,00 dikarenakan data pertama yang disampaikan untuk penganggaran masih berupa estimasi atas nama :
 - a. AZHARI DHARMAWAN, S.Pd. dari SMPN 1 Selimbau Kecamatan Selimbau masuk dalam pelaporan usulan TPP Desember 2024 namun kemudian ternyata yang bersangkutan melaporkan telah menerima dana sertifikasi Pendidikan sehingga tidak dapat dibayarkan *double*.
 - b. TPP Non PNS atas nama NOBERTUS, S.Pd. dari SDN 04 Nanga Saray Kecamatan Kalis data rapel yang diserahkan ke BKAD adalah 2 bulan sedangkan yang dibayarkan hanya 1 bulan yaitu bulan desember tahun 2024.
4. Terdapat koreksi atas utang retensi belanja konsultasi dan pengawasan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD sebesar Rp5.333.400,00 dari yang tersaji pada neraca tahun 2024 sebesar Rp8.438.400,00 dengan surat pernyataan bermaterai dari PT. Bahtra Jasa Konsul Teknik. Surat Pernyataan Nomor: SP- 01 /PT. BJ KT/DI KB UD-KHI 2A24 tanggal 15 Juli 2024 di tanda tangani oleh SDr. Busni, S.T. selaku Direktur bahwa tidak akan menuntut Sisa Pembayaran Pencairan pada pekerjaan



- a. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD sebesar Rp300.000,00.
- b. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD sebesar Rp5.033.400.
5. Terdapat koreksi utang belanja hibah pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan tahun 2024 yang telah dilakukan pencairan dan dibayar pada tahun 2025 berupa pembayaran hasil penyelesaian paket pekerjaan belanja pengadaan pembangunan jalan produksi perkebunan untuk kelompok tani "Tahuk karya bersama kepala gurung kec. mentebah yang sisanya belum dilunasi pembayaran di tahun 2024 sebesar Rp43.952.700,00.
6. Utang bahan lainnya dan utang obat-obatan merupakan kewajiban pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari utang obat-obatan BLUD sebesar Rp2.301.239.160,08 dan utang bahan lainnya BLUD sebesar Rp2.599.284.827,00.
7. Utang jasa medis atas pelayanan Kesehatan sebesar Rp15.627.267.914,10 merupakan utang jasa pelayanan Kesehatan di puskesmas sebesar Rp4.174.654.482,00 dan utang jasa pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebesar Rp11.452.613.432,10 dan terdapat juga utang pelayanan umum sukarelawan sebesar Rp21.335.000,00 di Badan Layanan Umum RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. Dari utang jasa medis yang tersaji tahun 2024 sebesar Rp10.065.887.898,20, terbayarkan tahun 2026 sebesar Rp8.007.270.242,60, koreksi catat atas nilai estimasi utang BLUD RS dr. Achmad Diponegoro Putussibau tahun 2024 sebesar Rp1.577.133.622,00 dan penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp15.147.783.880,50.
8. Utang belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 sebesar Rp11.659.080,00 telah dibayarkan dengan SP2D nomor 61.06/04.0/000042/LS/1.030.000.00.01.0000/M/4/2025 tanggal 14 april 2025.
9. Terdapat koreksi catat atas penyajian utang jasa administrasi pada Dinas Perikanan tahun 2024 sebesar Rp70.600.000,00 dimana utang tersebut merupakan utang jasa tenaga administrasi bulan desember tahun 2023 yang dibayarkan bulan Februari tahun 2024, namun terjadi kesalahan jurnal yang seharusnya memilih akun debet pada kewajiban jangka pendek namun dilakukan jurnal kredit sehingga terjadi lebih catat yang seharusnya sudah nol menjadi dicatat dua kali yaitu $Rp35.300.000,00 \times 2 = Rp70.600.000,00$.
10. Pendapatan diterima dimuka pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 adalah pendapatan atas pajak reklame papan/billboard/ videotron/megatron yang dibayarkan dimuka sebesar Rp141.040.241,39 dari total yang dibayarkan pokok sebesar Rp242.544.498,72 denda sebesar Rp183.384,00. Rincian pada **Lampiran 36**.
11. Terdapat utang jasa tenaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 atas nama Suriana pada SMP NEGERI 5 SATU ATAP SILAT HULU sebesar Rp2.450.000,00 dengan perhitungan potongan BPJS sebesar Rp146.250,00 sehingga nilai bersih yang akan diterima adalah sebesar Rp2.420.750,00.
12. Terdapat koreksi pengakuan belanja barang dan jasa puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp65.265.954,00 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan seharusnya tidak diakui sebagai utang karena jumlah tersebut merupakan kebutuhan belanja yang dianggarkan pada tahun 2025.

Selain utang belanja di atas, terdapat kewajiban pembayaran belanja tenaga kesehatan pada tiga puskesmas yaitu Puskesmas Semitau, Puskesmas Putussibau Selatan, dan Puskesmas Hulu Gurung yang belum sepenuhnya diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi atas pembayaran



belanja tenaga kesehatan pada tiga puskesmas tersebut sebelumnya telah dipindahbukukan pada 9 Oktober 2025 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinkes PP KB) untuk disalurkan kepada tiga puskesmas tersebut.

Namun pada 15 Oktober 2025 terjadi tindak pidana penipuan dalam bentuk serangan digital (phising) melalui aplikasi sistem manajemen kas (CMS) milik Bank Kalbar pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinkes PP KB senilai Rp498.765.123,00. Atas hal tersebut Bendahara Pengeluaran bersama dengan 8 personel Dinkes PP KB berkoordinasi dan melakukan pemulihan sebagian sebesar Rp230.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum dipulihkan pada tiga puskesmas sebesar Rp268.765.123,00. Atas sisa dana yang belum disalurkan, Bendahara Pengeluaran dan 8 personel dari Dinkes PP KB telah berkomitmen dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas untuk menyelesaikan pembayaran sisa kewajiban pembayaran belanja tenaga kesehatan pada tiga puskesmas sampai dengan Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Penetapan Nilai Kewajiban	Nilai Kewajiban yang Sudah Dibayarkan ke Puskesmas	Sisa Kewajiban yang Belum Dibayarkan ke Puskesmas
1	Su	Kepala Dinas	35.000.000,00		35.000.000,00
2	NF	Sekretaris Dinas	35.000.000,00		35.000.000,00
3	KER	Kepala Bidang PSDK	35.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
4	NS	Bendahara Pengeluaran	150.000.000,00	150.000.000,00	
5	YF	Bendahara Penerimaan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6	As	Ketua Tim Kerja Keuangan	38.765.123,00		38.765.123,00
7	RA	Ketua Tim Kerja Pembiayaan	35.000.000,00		35.000.000,00
8	G	Staf Keuangan	35.000.000,00		35.000.000,00
9	AFN	Staf PSDK	35.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
Jumlah			498.765.123,00	230.000.000,00	268.765.123,00

Selain itu, terdapat pembayaran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp337.776.319,00 yang merupakan kewajiban pajak yang baru disetorkan pada tanggal 4 Mei 2026 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas tiga kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2025.

5.3.3 EKUITAS

31 Desember 2025**31 Desember 2024****3.202.742.452.533,66****3.192.745.487.362,20**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.202.742.452.533,66 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.192.745.487.362,20. Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

5.3.4 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

31 Desember 2025**31 Desember 2024****3.229.965.272.445,24****3.226.442.933.870,75**

Merupakan saldo Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.229.965.272.445,24 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.226.442.933.870,75.



5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan yang Sah tahun 2025 sebagaimana rincian di bawah ini mengalami kenaikan sebesar 0,39% dari tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 135 Rincian Realisasi Pendapatan – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN	1.558.607.145.013,94	1.552.608.662.139,54	5.998.482.874,40	0,39
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	140.239.015.411,16	91.081.085.428,43	49.157.929.982,73	53,97
4	Pajak Daerah-LO	54.274.378.375,57	26.586.247.671,26	27.688.130.704,31	104,14
5	Retribusi Daerah-LO	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	17.524.575.448,85	16.881.281.349,76	643.294.099,09	3,81
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	63.710.572.237,74	40.714.375.918,41	22.996.196.319,33	56,48
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	140.239.015.411,16	91.081.085.428,43	49.157.929.982,73	53,97
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.401.296.951.249,00	1.449.940.276.400,00	(48.643.325.151,00)	(3,35)
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.345.347.953.557,00	1.398.182.043.537,00	(52.834.089.980,00)	(3,78)
12	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	157.832.028.200,00	92.931.358.390,00	64.900.669.810,00	69,84
13	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	946.039.985.059,00	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)	(5,16)
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	234.146.372.298,00	300.705.764.602,00	(66.559.392.304,00)	(22,13)
15	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.338.018.385.557,00	1.391.139.202.537,00	(53.120.816.980,00)	(3,82)
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
17	Insentif Fiskal-LO	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
18	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
19					
20	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	51.758.232.863,00	4.190.764.829,00	8,10
21	Pendapatan Bagi Hasil-LO	50.380.117.963,00	50.177.619.863,00	202.498.100,00	0,40
22	Bantuan Keuangan	5.568.879.729,00	1.580.613.000,00	3.988.266.729,00	252,32
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	51.758.232.863,00	4.190.764.829,00	8,10
24	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.401.296.951.249,00	1.449.940.276.400,00	(48.643.325.151,00)	(3,35)
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	17.071.178.353,78	11.587.300.311,11	5.483.878.042,67	47,33
26	Pendapatan Hibah-LO	3.650.950.837,78	1.095.272.442,11	2.555.678.395,67	233,34
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-audirLO	13.420.227.516,00	10.492.027.869,00	2.928.199.647,00	27,91
28	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	17.071.178.353,78	11.587.300.311,11	5.483.878.042,67	47,33
29	JUMLAH PENDAPATAN	1.558.607.145.013,94	1.552.608.662.139,54	5.998.482.874,40	0,39

Realisasi masing-masing akun pendapatan dengan uraian sebagai berikut:



5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Merupakan seluruh Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya di tambah pengakuan secara akrual atas hak atau piutang yang menjadi hak daerah sesuai dokumen yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp140.239.015.411,16 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.081.085.428,43 Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp49.162.385.209,60 atau 53,98% dari Tahun 2024. Rincian mutasi Pendapatan Asli Daerah-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Daerah-LO	54.274.378.375,57	26.586.247.671,26	27.688.130.704,31	104,14
2	Retribusi Daerah-LO	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	17.524.575.448,85	16.881.281.349,76	643.294.099,09	3,81
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	63.710.572.237,74	40.714.375.918,41	22.996.196.319,33	56,48
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	140.239.015.411,16	91.081.085.428,43	49.157.929.982,73	53,97

Sumber : Data Olahan LO

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.274.378.375,57 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.586.247.671,26. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.688.130.704,31 atau 104,14% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Rincian Pendapatan Pajak – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	302.317.999,07	231.779.320,79	70.538.678,28	30,43
2	Pajak Reklame Kain-LO	131.749.614,42	138.564.675,00	(6.815.060,58)	(4,92)
3	Pajak Sarang Burung Walet-LO	6.697.600,00	26.016.960,00	(19.319.360,00)	(74,26)
4	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	775.603.574,72	395.663.519,25	379.940.055,47	96,03
5	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	353.361.885,00	905.271.072,00	(551.909.187,00)	(60,97)
6	PBB-P2-LO	1.710.833.075,00	1.668.387.266,00	42.445.809,00	2,54
7	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	11.908.927.000,00	7.931.788.492,00	3.977.138.508,00	50,14
8	PBJT-Restoran-LO	936.264.359,00	868.327.235,50	67.937.123,50	7,82
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.866.613.297,50	1.462.446.425,00	404.166.872,50	27,64
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	11.950.647.326,00	11.807.781.779,04	142.865.546,96	1,21
11	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	417.890.735,86	354.460.476,88	63.430.258,98	17,89
12	PBJT-Hotel-LO	584.777.927,30	556.490.637,00	28.287.290,30	5,08
13	PBJT-Motel-LO	46.420.000,00	32.785.200,00	13.634.800,00	41,59
14	PBJT-Losmen-LO	94.564.100,00	90.462.000,00	4.102.100,00	4,53



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
15	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	72.016.240,00	68.551.340,00	3.464.900,00	5,05
16	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	27.631.652,00	1.000.000,00	26.631.652,00	2.663,17
17	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	3.150.000,00	4.688.540,50	(1.538.540,50)	(32,81)
18	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	47.960.489,70	41.782.732,30	6.177.757,40	14,79
19	Opsen PKB-LO	8.185.727.500,00	0,00	8.185.727.500,00	100,00
20	Opsen BBNKB-LO	14.851.224.000,00	0,00	14.851.224.000,00	100,00
JUMLAH		54.274.378.375,57	26.586.247.671,26	27.688.130.704,31	104,14

Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak LO tahun 2024 bahwa pendapatan pajak LO tahun 2025 yang mengalami kenaikan terbesar adalah pada PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO meningkat sebesar 2.663,17%, pajak mineral bukan logam pasir dan kerikil meningkat 96,03%, BPHTB-Pemindahan Hak-LO meningkat sebesar 50,14%, kemudian penurunan terbesar ada pada pajak sarang burung walet menurun sebesar (74,26%). Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO menurun sebesar (60,97%).

Opsen PKB-LO dan opsen BBNKB-LO naik 100% karena mulai 5 Januari 2025, pemerintah memberlakukan opsen pajak kendaraan (PKB dan BBNKB) sebesar 66% dari pokok pajak, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) untuk memperkuat pendapatan daerah. Meskipun ada tambahan opsen, total beban pajak yang dibayar wajib pajak relatif sama karena diikuti penurunan tarif pokok PKB dan BBNKB. Terdapat koreksi-koreksi atas pendapatan pajak LO sebagaimana tabel rincian di bawah ini:

Tabel 5. 138 Koreksi atas pendapatan pajak LO

No.	Nama Rekening	Realisasi LRA	Penyesuaian		LO
			Debit	Kredit	
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	283.552.317,12	0,00	18.765.681,95	302.317.999,07
2	Pajak Reklame Kain-LO	127.509.112,50	4.013.461,87	8.253.963,79	131.749.614,42
3	Pajak Sarang Burung Walet-LO	6.697.600,00	0,00	0,00	6.697.600,00
4	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	775.603.574,72	0,00	0,00	775.603.574,72
5	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	353.361.885,00	0,00	0,00	353.361.885,00
6	PBBP2-LO	1.576.097.058,00	108.740.005,00	243.476.022,00	1.710.833.075,00
7	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	11.908.927.000,00	0,00	0,00	11.908.927.000,00
8	PBJT-Restoran-LO	936.264.359,00	0,00	0,00	936.264.359,00
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.866.613.297,50	0,00	0,00	1.866.613.297,50
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	11.950.647.326,00	0,00	0,00	11.950.647.326,00
11	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	393.772.870,69	14.396.889,24	38.514.754,41	417.890.735,86
12	PBJT-Hotel-LO	584.777.927,30	0,00	0,00	584.777.927,30
13	PBJT-Motel-LO	46.420.000,00	0,00	0,00	46.420.000,00
14	PBJT-Losmen-LO	94.564.100,00	0,00	0,00	94.564.100,00



No.	Nama Rekening	Realisasi LRA	Penyesuaian		LO
			Debit	Kredit	
15	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	73.882.240,00	1.866.000,00	0,00	72.016.240,00
16	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	27.631.652,00	0,00	0,00	27.631.652,00
17	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
18	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	47.960.489,70	0,00	0,00	47.960.489,70
19	Opsen PKB-LO	8.185.727.500,00	0,00	0,00	8.185.727.500,00
20	Opsen BBNKB-LO	14.851.224.000,00	0,00	0,00	14.851.224.000,00
JUMLAH PENDAPATAN PAJAK – LO		54.094.384.309,53	129.016.356,11	309.010.422,15	54.274.378.375,57

Penjelasan:

- a. Terdapat koreksi untuk mengakui Piutang 2025 sebagai pendapatan pajak LO sebagaimana rincian penyesuaian pada tabel di atas sebesar Rp309.010.422,15 dimana piutang tersebut adalah piutang yang baru diakui ditahun 2025 atau yang belum pernah tercatat di tahun sebelumnya. Antara lain:
 - Koreksi atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO sebesar Rp18.765.681,95 adalah penambahan atas pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2025.
 - Koreksi tambah pendapatan Pajak Reklame Kain-LO sebesar Rp8.253.963,79 merupakan pengakuan atas piutang 4 (empat) Wajib Pajak tahun 2025
 - Koreksi tambah atas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO sebesar Rp243.476.022,00 merupakan pengakuan atas penambahan piutang Wajib Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2025
 - Koreksi tambah atas pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO sebesar Rp38.514.754,41 merupakan pengakuan atas penambahan piutang Wajib Pajak tahun 2025
- b. Dilakukan koreksi kurang atas penerimaan piutang Pajak 2024 pada pendapatan pajak LO 2025 sebesar Rp129.016.356,11.
 - Koreksi kurang atas pendapatan Pajak Reklame Kain-LO sebesar Rp4.013.461,87 atas pelunasan piutang 3 (tiga) Wajib Pajak Reklame Kain tahun 2024
 - Koreksi kurang pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan LO sebesar Rp108.740.005,00 merupakan koreksi atas pelunasan piutang Wajib Pajak tahun 2024
 - Koreksi kurang atas pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO sebesar Rp14.396.889,24 merupakan koreksi atas pelunasan piutang Wajib Pajak pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO tahun 2024.
 - Koreksi kurang atas pendapatan PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO sebesar Rp1.866.000,00 atas pelunasan Piutang Wajib Pajak Tahun 2024



Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan uraian sebagai berikut:

a. PBJT- Jasa Perhotelan- LO

Rincian pendapatan PBJT- Jasa Perhotelan- LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp725.762.027,30 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp679.737.837,00. Kenaikan pendapatan pajak hotel – LO tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp46.024.190,30 atau 6,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian PBJT- Jasa Perhotelan- LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Hotel-LO	584.777.927,30	556.490.637,00	28.287.290,30	5,08
2	PBJT-Motel-LO	46.420.000,00	32.785.200,00	13.634.800,00	41,59
3	PBJT-Losmen-LO	94.564.100,00	90.462.000,00	4.102.100,00	4,53
JUMLAH		725.762.027,30	679.737.837,00	46.024.190,30	6,77

b. PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO

Rincian pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.802.877.656,50 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.330.773.660,50 mengalami peningkatan sebesar Rp472.103.996,00 atau 20,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Rincian PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Restoran-LO	936.264.359,00	868.327.235,50	67.937.123,50	7,82
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.866.613.297,50	1.462.446.425,00	404.166.872,50	27,64
JUMLAH		2.802.877.656,50	2.330.773.660,50	472.103.996,00	20,26

c. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO

Rincian pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.742.141,70 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp47.471.272,80 pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.270.868,90 atau 65,87% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	27.631.652,00	1.000.000,0	26.631.652,0	2.663,17
2	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	3.150.000,00	4.688.540,5	(1.538.540,50)	(32,81)
3	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	47.960.489,70	41.782.732,3	6.177.757,4	14,79
JUMLAH		78.742.141,70	47.471.272,80	31.270.868,90	65,87

d. Pajak Reklame- LO

Rincian pendapatan Pajak Reklame- LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp434.067.613,49 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp370.343.995,79. Tahun 2025 meningkat sebesar Rp63.723.617,70 atau 17,21% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 142 Rincian Pajak Reklame – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	302.317.999,07	231.779.320,79	70.538.678,28	30,43
2	Pajak Reklame Kain-LO	131.749.614,42	138.564.675,00	(6.815.060,58)	(4,92)
JUMLAH		434.067.613,49	370.343.995,79	63.723.617,70	17,21

Pada pendapatan pajak reklame LO jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp411.061.429,62 terdapat selisih sebesar Rp23.006.183,87 yang terdiri dari penerimaan piutang wajib pajak reklame tahun 2024 sebesar Rp4.013.461,87 dan penambahan terdiri pendapatan diterima di muka pengakuan atas piutang wajib pajak tahun 2025 sebesar Rp27.019.645,74.

e. PBJT-Tenaga Listrik-LO

Merupakan seluruh pendapatan PBJT-Tenaga Listrik-LO setelah disesuaikan dengan Piutang wajib pajak PBJT-Tenaga Listrik-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.368.538.061,86 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp12.162.242.255,92. Tahun 2025 meningkat sebesar Rp206.295.805,94 atau 1,70% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian PBJT- Tenaga Listrik-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	11.950.647.326,00	11.807.781.779,04	142.865.546,96	1,21
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	417.890.735,86	354.460.476,88	63.430.258,98	17,89
JUMLAH		12.368.538.061,86	12.162.242.255,92	206.295.805,94	1,70

Pada pendapatan PBJT-Tenaga Listrik-LO, jika dibandingkan dengan realisasi LRA sebesar Rp12.344.420.196,69 terdapat selisih sebesar Rp24.117.865,17 yang merupakan koreksi kurang atas penerimaan Piutang Wajib PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Tahun 2024 sebesar Rp14.396.889,24 dan juga mengakui piutang Wajib Pajak PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri tahun 2025 sebesar Rp38.514.754,41.

f. PBJT-Jasa Parkir-LO

Merupakan seluruh pendapatan PBJT-Jasa Parkir-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.016.240,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp68.551.340,00. Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.464.900,00 atau 5,05% dari Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan pendapatan pajak parkir Laporan Realisasi APBD sebesar Rp73.882.240,00, terdapat selisih lebih sebesar Rp1.866.000,00 yang merupakan penambahan atas penerimaan piutang wajib pajak parkir tahun 2024 sebesar Rp1.866.000,00.

g. Pajak Sarang Burung Walet-LO

Merupakan seluruh pendapatan Pajak Sarang Burung Walet – LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp6.697.600,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp26.016.960,00 menurun sebesar Rp19.319.360,00 atau 74,26%.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Merupakan seluruh pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.128.965.459,72 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.300.934.591,25. Tahun 2025



mengalami penurunan sebesar Rp171.969.131,53 atau 13,22% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	775.603.574,72	395.663.519,25	379.940.055,47	96,03
2	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	353.361.885,00	905.271.072,00	(551.909.187,00)	(60,97)
JUMLAH		1.128.965.459,72	1.300.934.591,25	(171.969.131,53)	(13,22)

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)- LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.710.833.075,00 merupakan seluruh pendapatan PBB-P2 LO yang diakui sebagai pendapatan LO setelah disesuaikan dengan penerimaan piutang wajib pajak tahun 2024 sebesar Rp108.740.005,00 dan piutang wajib pajak tahun 2025 sebesar Rp243.476.022,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, PBB-P2- LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.445.809,00 atau 2,54%.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Merupakan seluruh pendapatan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp11.908.927.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp7.931.788.492,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan pajak BPHTB mengalami kenaikan sebesar Rp3.977.138.508,00 atau 50,14%.

k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Merupakan seluruh pendapatan Opsen Kendaraan Bermotor (PKB)-LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp8.185.727.500,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami kenaikan sebesar Rp8.185.727.500,00 atau 100%.

l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO

Merupakan seluruh pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp14.851.224.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO mengalami kenaikan sebesar Rp14.851.224.000,00 atau 100%.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Merupakan seluruh pendapatan dan piutang yang diakui sebagai Pendapatan Retribusi Daerah- LO 2025 sebesar Rp Rp4.729.489.349,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.899.180.489,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, total Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.169.691.140,00 atau 31,45%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	3.601.135.164,00	6.151.117.927,00	(2.549.982.763,00)	(41,46)
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.026.378.764,00	5.664.957.127,00	(2.638.578.363,00)	(46,58)
7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.506.540.000,00	5.645.025.790,00	(4.138.485.790,00)	(73,31)
7.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	1.519.838.764,00	19.931.337,00	1.499.907.427,00	7.525,37



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	89.480.000,00	77.940.000,00	11.540.000,00	14,81
7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	89.480.000,00	77.940.000,00	11.540.000,00	14,81
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	82.288.000,00	46.308.000,00	35.980.000,00	77,70
7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	82.288.000,00	46.308.000,00	35.980.000,00	77,70
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	402.988.400,00	361.912.800,00	41.075.600,00	11,35
7.1.02.01.05.0002	Retribusi Los-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios-LO	402.988.400,00	361.912.800,00	41.075.600,00	11,35
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	675.776.000,00	688.411.000,00	(12.635.000,00)	(1,84)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	219.130.000,00	179.715.000,00	39.415.000,00	21,93
7.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	88.700.000,00	79.025.000,00	9.675.000,00	12,24
7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	130.430.000,00	100.690.000,00	29.740.000,00	29,54
7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	55.680.000,00	52.250.000,00	3.430.000,00	6,56
7.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	55.680.000,00	52.250.000,00	3.430.000,00	6,56
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	6.705.000,00	7.956.000,00	(1.251.000,00)	(15,72)
7.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	6.705.000,00	7.956.000,00	(1.251.000,00)	(15,72)
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	204.165.000,00	238.295.000,00	(34.130.000,00)	(14,32)
7.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	204.165.000,00	238.295.000,00	(34.130.000,00)	(14,32)
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	59.046.000,00	37.195.000,00	21.851.000,00	58,75
7.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	59.046.000,00	37.195.000,00	21.851.000,00	58,75
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	131.050.000,00	173.000.000,00	(41.950.000,00)	(24,25)
7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	131.050.000,00	173.000.000,00	(41.950.000,00)	(24,25)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	452.578.185,00	59.651.562,00	392.926.623,00	658,70
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	452.578.185,00	59.651.562,00	392.926.623,00	658,70
7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	452.578.185,00	59.651.562,00	392.926.623,00	658,70
JUMLAH		4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)

Penjelasan rincian pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO

Adalah seluruh pendapatan retribusi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang diakui sebagai pendapatan Retribusi Daerah- LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.026.378.764,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.664.957.127,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 menurun sebesar (Rp2.638.578.363,00) atau (46,58%). Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 5. 146 Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.506.540.000,00	5.645.025.790,00	(4.138.485.790,00)	(73,31)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	1.519.838.764,00	19.931.337,00	1.499.907.427,00	7.525,37
JUMLAH		3.026.378.764,00	5.664.957.127,00	(2.638.578.363,00)	(46,58)

Jika dibandingkan dengan realisasi Laporan Realisasi Anggaran pada pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan khususnya retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas, terdapat selisih sebesar Rp1.215.302,00 merupakan koreksi atas penerimaan pelunasan atas penyetoran retribusi pelayanan Kesehatan Puskesmas yang disajikan sebagai kas di Bendahara Penerimaan neraca Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.480.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp77.940.000,00. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp11.540.000,00 atau sebesar 14,81% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

c. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum-LO

Merupakan seluruh Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp82.288.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp46.308.000,00. Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.980.000,00 atau 77,70% dari tahun 2024.

d. Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Sewa Kios Dan Los per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LO sebesar Rp402.988.400,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp361.912.800,00. Pendapatan Retribusi Sewa Kios dan Los tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.075.600,00 atau 11,35%.

e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Merupakan seluruh pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp219.130.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp179.715.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.415.000,00 atau 21,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	88.700.000,00	79.025.000,00	9.675.000,00	12,24
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	130.430.000,00	100.690.000,00	29.740.000,00	29,54
JUMLAH		219.130.000,00	179.715.000,00	39.415.000,00	21,93

f. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp55.680.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp52.250.000,00. Tahun 2025, pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan – LO mengalami peningkatan sebesar Rp3.430.000,00 atau 6,56% dari tahun 2024.

**g. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO**

Merupakan seluruh pendapatan retribusi terminal per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp6.705.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp7.956.000,00. Tahun 2025, pendapatan retribusi terminal – LO mengalami penurunan sebesar Rp1.251.000,00 atau 15,72% dari tahun 2024.

h. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO

Merupakan seluruh Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila per 31 Desember 2025 sebesar Rp204.165.000,00 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp238.295.000,00. Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.130.000,00 atau 14,32% dibandingkan dengan tahun 2024.

i. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO

Merupakan seluruh pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi LO sebesar Rp59.046.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp37.195.000,00. Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21.851.000,00 atau 58,75% dibandingkan dengan tahun 2024.

j. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah - LO

Adalah seluruh pendapatan Retribusi Izin Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah merupakan penjualan bibit atau benih ikan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp131.050.000,00 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp173.000.000,00. Tahun 2025 pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah mengalami penurunan sebesar Rp41.950.000,00 atau 24,25% dibandingkan dengan tahun 2024.

k. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Merupakan seluruh pendapatan retribusi Persetujuan Gedung per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp452.578.185,00 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp59.651.562,00. Tahun 2025 pendapatan Retribusi Persetujuan Gedung mengalami peningkatan sebesar Rp392.926.623,00 atau 658,70% dibandingkan dengan tahun 2024.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan seluruh pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan daerah sebesar Rp17.524.575.448,85 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp16.881.281.349,76. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, total Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp643.294.099,09 atau 3,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	17.467.868.342,85	16.881.281.349,76	586.586.993,09	3,47



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	56.707.106,00	0,00	56.707.106,00	100,00
JUMLAH		17.524.575.448,85	16.881.281.349,76	643.294.099,09	3,81

Penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO dari PT. Bank Kalbar sebesar Rp17.467.868.342,85 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 nomor 1 tanggal 14 maret 2024 terdiri dari pembagian deviden sebesar Rp17.454.390.736,00 dan pembagian hasil tagihan collection kredit Ex Assets Management Unit (AMU)/Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2024 sebesar Rp13.477.606,85.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Merupakan seluruh pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang diakui sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.710.572.237,74 dan tahun 2024 sebesar Rp40.714.375.918,41 yaitu meningkat sebesar Rp22.996.196.319,33 atau 56,48% dari Tahun 2024, dengan rincian dengan berikut:

Tabel 5. 149 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

No.	URAIAN	Total Realisasi LRA	Total Koreksi tambah atas Piutang 2024 dan koreksi lain	Total Koreksi pembayaran Piutang 2024	Total Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	182.577.000,00			182.577.000,00
2	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.984.000,00			29.984.000,00
3	Hasil Sewa BMD	402.530.722,82	7.068.600,00		409.599.322,82
4	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.181.166.367,50			1.181.166.367,50
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	223.948.207,27			223.948.207,27
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.407.285.021,75			1.407.285.021,75
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.482.952,60			5.482.952,60
8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	254.777,00			254.777,00
9	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	69.985.348,00			69.985.348,00
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.474.069,00	39.273.811,92	6.471.911,76	46.275.969,16
11	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.800,00			19.800,00
12	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.390.600,00			12.390.600,00
13	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	32.600,00			32.600,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00			0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	13.754.000,00			13.754.000,00



No.	URAIAN	Total Realisasi LRA	Total Koreksi tambah atas Piutang 2024 dan koreksi lain	Total Koreksi pembayaran Piutang 2024	Total Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	591.971.267,00	41.697.131,00	21.850.000,00	611.818.398,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.025.243,00			4.025.243,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00			0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.719.842.000,00			1.719.842.000,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	115.920.000,00			115.920.000,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	511.859.575,00			511.859.575,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	186.261.500,00			186.261.500,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	103.146.982,00			103.146.982,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.350.582.886,00			9.350.582.886,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	543.566.000,00			543.566.000,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.290.500,00			33.290.500,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	716.992.950,69			716.992.950,69
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	37.789.188,63			37.789.188,63
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	31.484.000,00			31.484.000,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan	2.000.000,00			2.000.000,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	77.892.066,86			77.892.066,86
32	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	39.280.162.766,45	9.228.931.818	2.427.749.602,99	46.081.344.981,46
JUMLAH		56.849.672.391,57	9.316.971.360,92	2.456.071.514,75	63.710.572.237,74



Penjelasan atas koreksi pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dengan uraian sebagai berikut:

1	Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah LRA	56.849.672.391,57
	Koreksi Tambah:	
	Mengakui penambahan dari Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD 2025	9.228.361.818
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batang Lupar STS Nomor 147 – 2025	570.000
	Mengakui Penambahan dari Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Sewa BMD 2025 (BKAD)	7.068.600,00
	Koreksi mengakui penambahan dari Piutang Denda Wajib Pajak PBB tahun 2025 (Bapenda)	39.273.811,92
	Koreksi atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah Gaji dan Tunjangan tahun 2025 (BKAD)	41.697.131,00
2	Sub Jumlah	9.316.971.360,92
	Koreksi Kurang:	
	Koreksi kurang atas Pelunasan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD Tahun sebelumnya	2.780.503.830,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD yang dilunasi	(352.786.962,51)
	Koreksi kurang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD	32.735,50
	Koreksi kurang atas Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Denda Wajib Pajak PBB tahun sebelumnya (Bapenda)	6.471.911,76
	Koreksi atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah Gaji dan Tunjangan tahun tahun sebelumnya (BKAD)	21.850.000
3	Sub Jumlah	2.456.071.514,75
	Total Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO (1+2-3)	63.710.572.237,74

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer – LO adalah seluruh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.401.296.951.249,00 dan per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp1.449.940.276.400,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48.643.325.151,00 atau 3,35% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150 Rincian Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.338.018.385.557,00	1.391.139.202.537,00	(53.120.816.980,00)	(3,82)
2	Bagi Hasil Pajak-LO	27.768.561.200,00	21.041.176.390,00	6.727.384.810,00	31,97
3	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	123.025.811.000,00	71.890.182.000,00	51.135.629.000,00	71,13
4	Dana Bagi Hasil Sawit	7.037.656.000,00	0,00	7.037.656.000,00	-
5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	946.039.985.059,00	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)	(5,16)
6	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	234.146.372.298,00	300.705.764.602,00	(66.559.392.304,00)	(22,13)
7	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
8	Insentif Fiskal-LO	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	51.758.232.863,00	4.190.764.829,00	8,10
10	Pendapatan Bagi Hasil-LO	50.380.117.963,00	50.177.619.863,00	202.498.100,00	0,40
11	Bantuan Keuangan	5.568.879.729,00	1.580.613.000,00	3.988.266.729,00	252,32
12	Jumlah Pendapatan Transfer	1.401.296.951.249,00	1.449.940.276.400,00	(48.643.325.151,00)	(3,35)

**5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO**

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer antara realisasi LRA dengan Laporan Operasional dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 151 Koreksi Pendapatan Transfer Pusat-LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas TDF tahun 2024 dan Jasa Giro BOSP	Koreksi atas Dana Desa	Pendapatan LO
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	34.204.800,00			34.204.800,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	20.292.984.800,00			20.292.984.800,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	446.087.200,00			446.087.200,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	90.152.200,00			90.152.200,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	170.235.200,00			170.235.200,00
6	DBH PBB	20.424.083.400,00			20.424.083.400,00
7	DBH PPh Pasal 21	7.488.816.300,00	(471.862.000,00)		7.016.954.300,00
8	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	332.061.500,00	(50.303.000,00)		281.758.500,00
9	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	46.447.000,00	(682.000,00)		45.765.000,00
10	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	225.487.200,00	(63.235.000,00)		162.252.200,00
11	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	103.454.031.200,00	(4.450.035.000,00)		99.003.996.200,00
12	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.784.348.800,00			1.784.348.800,00
13	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	360.608.800,00			360.608.800,00
14	DBH SDA Perikanan	680.940.800,00			680.940.800,00
15	DBH Sawit	7.037.656.000,00			7.037.656.000,00
16	DAU	758.271.389.820,00			758.271.389.820,00
17	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00			800.000.000,00
18	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	38.648.620.239,00			38.648.620.239,00
19	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	89.248.839.000,00			89.248.839.000,00
20	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	59.071.136.000,00			59.071.136.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	299.463.988,00			299.463.988,00
22	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	235.137.790,00			235.137.790,00
23	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	215.924.595,00			215.924.595,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	18.084.810.175,00			18.084.810.175,00
25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	67.945.493,00			67.945.493,00



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas TDF tahun 2024 dan Jasa Giro BOSP	Koreksi atas Dana Desa	Pendapatan LO
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	23.026.957.796,00			23.026.957.796,00
27	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	7.775.937.446,00			7.775.937.446,00
28	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	5.113.940.000,00			5.113.940.000,00
29	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	323.703.000,00			323.703.000,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	53.189.862.532,00			53.189.862.532,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.518.250.000,00			2.518.250.000,00
32	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.904.418.131,17	(78.431,17)		4.904.339.700,00
33	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	887.861.850,00			887.861.850,00
34	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00			45.000.000,00
35	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.928.762.475,00			9.928.762.475,00
36	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.370.129.306,00			18.370.129.306,00
37	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	67.399.351.137,00			67.399.351.137,00
38	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.443.972.500,00			1.443.972.500,00
39	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	13.175.755.619,00			13.175.755.619,00
40	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.815.563.896,00			6.815.563.896,00
41	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	323.703.000,00			323.703.000,00
42	Dana Desa	188.999.864.222,00		(188.999.864.222,00)	0,00
43	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.329.568.000,00			7.329.568.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.539.384.013.210,17	(5.036.195.431,17)	(188.999.864.222,00)	1.345.347.953.557,00

Koreksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- Koreksi kurang sebesar Rp5.036.195.431,17,00 terdiri dari koreksi atas TDF tahun 2024 sebesar Rp5.036.117.000,00 dan koreksi jasa giro DAK Non Fisik BOP PAUD Reguler sebesar Rp78.431,17
- Koreksi kurang sebesar Rp188.999.864.222,00 merupakan alokasi dana desa yang menjadi hak dan Pemerintah Desa sehingga dilakukan koreksi akrual mengurangi pendapatan LO Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian koreksi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152 Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Pusat-LO

No.	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Insentif Fiskal-LO	0,00	7.042.841.000,00	(7.042.841.000,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	7.329.568.000,00	0,00	7.329.568.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu LO tahun 2025 sebesar Rp55.948.997.692,00 dan tahun 2024 sebesar Rp51.758.232.863,00. Realisasi Pendapatan transfer antar daerah LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 meningkat sebesar Rp4.190.764.829,00 atau 8,10 dari tahun 2024 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer antar Daerah terdapat perbedaan antara realisasi LRA dengan pendapatan Transfer antar Daerah LO sebesar selisih lebih rendah Rp4.190.764.829,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Piutang 2025	Koreksi atas Piutang 2024	Pendapatan LO
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.168.636.022,00	0,00	0,00	3.168.636.022,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.837.650.222,00	0,00	0,00	3.837.650.222,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.491.746.288,00	0,00	0,00	23.491.746.288,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.143.966.610,00	0,00	0,00	3.143.966.610,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.738.118.821,00	0,00	0,00	16.738.118.821,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.568.879.729,00	0,00	0,00	5.568.879.729,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	0,00	0,00	55.948.997.692,00

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.071.178.353,78 dengan uraian berikut:

1. Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp3.650.950.837,78 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pendapatan hibah sebesar Rp3.650.950.837,78 yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Hibah Pasar Rakyat Kecamatan Suhaid senilai Rp2.884.844.500,00 dasar hibah dengan surat persetujuan hibah dari Menteri Perdagangan PL.05/31/M-DAG/SD/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 445 tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Fisik Pasar pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan;



2. Pendapatan Hibah sebesar Rp264.732.000,00 merupakan pendapatan hibah berupa blanko KTP pada Disdukcapil.

b. Pendapatan yang tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berupa setoran temuan pemeriksaan dan tindak lanjut, setoran UYHD tahun sebelumnya dan setoran ke kasda yang tidak disertai STS atau uraian yang tidak bisa ditelusuri sebesar Rp501.374.337,78;

2. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp13.420.227.516,00.

5.4.2 BEBAN – LO

Beban LO merupakan Beban atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2025 dan Tahun 2024. Beban LO terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Tidak Terduga dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp1.532.340.279.232,84 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.572.294.791.412,54 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 BEBAN OPERASI – LO

Realisasi Beban Operasi- LO pada Tahun 2025 sebesar Rp1.416.090.575.349,84 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.462.096.210.472,54. Tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp46.005.635.122,70 atau 3,15%. Rincian Realisasi Beban Operasi-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Beban Operasi – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Beban Operasi				
1	Beban Pegawai	688.032.498.678,64	628.714.818.144,42	59.317.680.534,22	9,43
2	Beban Barang	135.645.467.106,90	128.144.112.797,21	7.501.354.309,69	5,85
3	Beban Jasa	127.242.072.146,27	142.805.737.747,25	(15.563.665.600,98)	(10,90)
4	Beban Pemeliharaan	8.299.976.710,57	10.537.389.568,97	(2.237.412.858,40)	(21,23)
5	Beban Perjalanan Dinas	65.720.932.759,00	97.338.362.189,00	(31.617.429.430,00)	(32,48)
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.639.149.282,00	28.342.358.009,00	(7.703.208.727,00)	(27,18)
7	Beban Subsidi	748.800.000,00	0,00	748.800.000,00	100%
8	Beban Hibah	115.196.828.047,91	163.860.314.613,52	(48.663.486.565,61)	(29,70)
9	Beban Bantuan Sosial	398.902.720,00	429.850.750,00	(30.948.030,00)	(7,20)
10	Beban Penyisihan Piutang	302.692.015,77	1.406.854.070,45	(1.104.162.054,68)	(78,48)
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	253.863.255.882,78	260.516.412.582,72	(6.653.156.699,94)	(2,55)
	Jumlah Beban Operasi	1.416.090.575.349,84	1.462.096.210.472,54	(46.005.635.122,70)	(3,15)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Merupakan seluruh Beban Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp688.032.498.678,64 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp628.714.818.144,42. Tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp59.317.680.534,22 atau 9,43% dari tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 5. 155 Rincian Beban Pegawai – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	229.594.075.316,00	234.406.259.390,00	(4.812.184.074,00)	(2,05)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	133.853.782.929,00	78.906.302.528,00	54.947.480.401,00	69,64
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	20.950.324.414,00	21.726.365.053,00	(776.040.639,00)	(3,57)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	9.871.833.200,00	5.818.816.970,00	4.053.016.230,00	69,65
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.582.596.000,00	4.763.451.000,00	(180.855.000,00)	(3,80)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	16.427.972.528,00	16.876.488.710,00	(448.516.182,00)	(2,66)
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.453.840.000,00	2.275.500.000,00	178.340.000,00	7,84
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.075.943.472,00	4.664.550.000,00	3.411.393.472,00	73,13
9	Beban Tunjangan Beras PNS	11.592.847.960,00	12.017.796.482,00	(424.948.522,00)	(3,54)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	7.665.946.680,00	4.404.294.720,00	3.261.651.960,00	74,06
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	501.483.790,00	422.373.383,00	79.110.407,00	18,73
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.933.510,00	3.152.349,00	(218.839,00)	(6,94)
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.940.584,00	1.739.907,00	1.200.677,00	69,01
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.896.593.748,00	14.974.995.009,60	(78.401.261,60)	(0,52)
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.040.132.516,00	3.642.528.602,00	3.397.603.914,00	93,28
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	466.327.995,00	480.562.961,00	(14.234.966,00)	(2,96)
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	285.439.937,00	165.736.864,00	119.703.073,00	72,22
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.402.331.254,00	1.477.594.560,00	(75.263.306,00)	(5,09)
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	853.064.129,00	499.256.217,00	353.807.912,00	70,87
20	Beban Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	630.252.000,00	0,00	630.252.000,00	-
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.841.055.602,64	94.055.787.110,63	(7.214.731.507,99)	(7,67)
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.504.375.671,00	11.980.772.372,00	6.523.603.299,00	54,45
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	968.440.000,00	1.039.820.000,00	(71.380.000,00)	(6,86)
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.939.570.000,00	7.249.671.620,00	689.898.380,00	9,52
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	15.202.200,00	0,00	15.202.200,00	-
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	258.650,00	0,00	258.650,00	-
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.341.650,00	0,00	25.341.650,00	-
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	49.579.200,00	0,00	49.579.200,00	-
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	388.155.224,00	0,00	388.155.224,00	-



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	516.159.216,00	0,00	516.159.216,00	-
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	264.912.930,00	0,00	264.912.930,00	-
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	403.734.972,00	0,00	403.734.972,00	-
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.143.875,00	0,00	2.143.875,00	-
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.849.754,00	0,00	1.849.754,00	-
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.911.373,00	0,00	15.911.373,00	-
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.110.250,00	0,00	8.110.250,00	-
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.911.002,00	0,00	1.911.002,00	-
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	290.663,00	0,00	290.663,00	-
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	6.882.600,00	0,00	6.882.600,00	-
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.642.682,00	0,00	1.642.682,00	-
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.429.840,00	0,00	3.429.840,00	-
42	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.457.500,00	0,00	3.457.500,00	-
43	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	51.323.410.217,00	0,00	51.323.410.217,00	-
44	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.525.812.879,00	0,00	6.525.812.879,00	-
45	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	351.065.000,00	0,00	351.065.000,00	-
46	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	16.075.940.920,00	0,00	16.075.940.920,00	-
47	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	6.669.164.340,00	0,00	6.669.164.340,00	-
48	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.092.907.500,00	0,00	1.092.907.500,00	-
49	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	13.207.079,00	(13.207.079,00)	(100,00)
50	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	33.593.992,00	(33.593.992,00)	(100,00)
51	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	987.246,00	(987.246,00)	(100,00)
52	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	10.607.373,00	(10.607.373,00)	(100,00)
53	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	272.823.494,00	(272.823.494,00)	(100,00)



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
54	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	1.274.552,00	(1.274.552,00)	(100,00)
55	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	384.996,00	(384.996,00)	(100,00)
56	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	27.647.996,00	(27.647.996,00)	(100,00)
57	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	147.365.674,00	(147.365.674,00)	(100,00)
58	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	10.730.000,00	(10.730.000,00)	(100,00)
59	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	3.207.750,00	(3.207.750,00)	(100,00)
60	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	1.260.184,00	(1.260.184,00)	(100,00)
61	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	14.068.275,00	(14.068.275,00)	(100,00)
62	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	4.516.500,00	(4.516.500,00)	(100,00)
63	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	0,00	1.880.450,00	(1.880.450,00)	(100,00)
64	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	9.165.000,00	(9.165.000,00)	(100,00)
65	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	5.535.000,00	(5.535.000,00)	(100,00)
66	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	2.779.950,00	(2.779.950,00)	(100,00)
67	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	1.443.487,00	(1.443.487,00)	(100,00)
68	Beban TPG PNSD	0,00	61.729.001.100,00	(61.729.001.100,00)	(100,00)
69	Beban TKG PNSD	0,00	8.668.325.900,00	(8.668.325.900,00)	(100,00)
70	Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	1.749.750.000,00	(1.749.750.000,00)	(100,00)
71	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	110.355.000,00	(110.355.000,00)	(100,00)
72	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	12.543.359.700,00	(12.543.359.700,00)	(100,00)
73	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.940.521.196,19	(1.940.521.196,19)	(100,00)
74	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	120.750.000,00	(120.750.000,00)	(100,00)
75	Beban TPG PPPK	0,00	671.500.000,00	(671.500.000,00)	(100,00)
76	Beban TKG PPPK	0,00	5.440.000,00	(5.440.000,00)	(100,00)
77	Beban Tamsil Guru PPPK	0,00	2.528.245.200,00	(2.528.245.200,00)	(100,00)
78	Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	667.905.000,00	3.885.000,00	0,58



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
79	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	64.077.300,00	67.076.100,00	(2.998.800,00)	(4,47)
80	Beban Tunjangan Beras DPRD	75.244.380,00	78.286.020,00	(3.041.640,00)	(3,89)
81	Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.193.500,00	388.500,00	0,68
82	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	968.462.250,00	5.633.250,00	0,58
83	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.022.600,00	77.099.400,00	2.923.200,00	3,79
84	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00	12.469.275,00	2.375.100,00	19,05
85	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00	3.722.500.000,00	1.569.500.000,00	42,16
86	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	630.000.000,00	693.000.000,00	110,00
87	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	297.585,00	290.736,00	6.849,00	2,36
88	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	58.633.596,00	58.335.018,00	298.578,00	0,51
89	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.397.088,00	1.376.424,00	20.664,00	1,50
90	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.191.264,00	4.129.272,00	61.992,00	1,50
91	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5.208.000.000,00	5.177.200.000,00	30.800.000,00	0,59
92	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.774.200.000,00	3.672.500.000,00	101.700.000,00	2,77
93	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	233.625.000,00	(233.625.000,00)	(100,00)
94	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	116.220.000,00	54.600.000,00	61.620.000,00	112,86
95	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.708.000,00	7.140.000,00	(432.000,00)	(6,05)
96	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	98.280.000,00	(7.020.000,00)	(7,14)
97	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.228.120,00	7.097.160,00	(869.040,00)	(12,24)
98	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	226.838,00	231.674,00	(4.836,00)	(2,09)
99	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.880,00	2.040,00	(160,00)	(7,84)
100	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.472.000,00	5.486.400,00	(14.400,00)	(0,26)
101	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	-
102	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	-
103	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	1.547.100,00	(1.547.100,00)	(100,00)
104	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	4.365.900,00	(4.365.900,00)	(100,00)
105	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	125.550,00	(125.550,00)	(100,00)
106	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.146.600,00	1.484.875,00	(338.275,00)	(22,78)



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
107	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	31.973.750,00	(31.973.750,00)	(100,00)
108	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	175.625,00	(175.625,00)	(100,00)
109	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	22.050,00	54.600,00	(32.550,00)	(59,62)
110	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.052.750,00	3.239.500,00	(1.186.750,00)	(36,63)
111	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.504.000,00	4.320.000,00	(816.000,00)	(18,89)
112	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.273.150,00	20.899.133,00	7.374.017,00	35,28
113	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	36.944.098,00	0,00	36.944.098,00	-
114	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.811.788,00	0,00	19.811.788,00	-
115	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.480.010,00	0,00	30.480.010,00	-
116	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.325,00	189.000,00	(58.675,00)	(31,04)
117	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	128.712,00	80.436,00	48.276,00	60,02
118	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	930.150,00	850.000,00	80.150,00	9,43
119	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	471.750,00	390.000,00	81.750,00	20,96
120	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	142.587,00	160.875,00	(18.288,00)	(11,37)
121	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	18.763,00	0,00	18.763,00	-
122	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	501.000,00	780.000,00	(279.000,00)	(35,77)
123	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	108.087,00	0,00	108.087,00	-
124	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	479.700,00	(479.700,00)	(100,00)
125	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	202.500,00	201.800,00	700,00	0,35
126	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	122.849,00	(122.849,00)	(100,00)
127	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	200.880,00	0,00	200.880,00	-



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
128	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	184.800.000,00	127.680.000,00	69,09
129	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	399.960.000,00	373.300.000,00	26.660.000,00	7,14
130	Beban Pegawai BLUD	217.670.000,00	0,00	217.670.000,00	-
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	688.032.498.678,64	628.714.818.144,42	59.317.680.534,23	9,43

Jika dibandingkan antara realisasi Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dengan realisasi Belanja Pegawai LRA terdapat selisih sebesar Rp10.387.248.259,00 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 156 Rincian Jenis Utang Koreksi Beban Pegawai –LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
1	Belanja Gaji Pokok PNS	229.594.075.316,00			229.594.075.316,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.853.782.929,00			133.853.782.929,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.950.324.414,00			20.950.324.414,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.871.833.200,00			9.871.833.200,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.582.596.000,00			4.582.596.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.427.972.528,00			16.427.972.528,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00			-
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.453.840.000,00			2.453.840.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.075.943.472,00			8.075.943.472,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.592.847.960,00			11.592.847.960,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.665.946.680,00			7.665.946.680,00
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	501.483.790,00			501.483.790,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.933.510,00			2.933.510,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.940.584,00			2.940.584,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.943.915.093,00	44.007.786,00	2.091.329.131,00	14.896.593.748,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.015.972.730,00	41.959.044,00	17.799.258,00	7.040.132.516,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	466.327.995,00			466.327.995,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	285.439.937,00			285.439.937,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.402.331.254,00			1.402.331.254,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	853.064.129,00			853.064.129,00
21	Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	630.252.000,00			630.252.000,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	93.427.942.302,64		6.586.886.700,00	86.841.055.602,64
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.646.575.671,00		1.142.200.000,00	18.504.375.671,00
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	968.440.000,00			968.440.000,00
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	8.574.570.000,00		635.000.000,00	7.939.570.000,00
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	15.202.200,00			15.202.200,00



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	258.650,00			258.650,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.341.650,00			25.341.650,00
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	49.579.200,00			49.579.200,00
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	388.155.224,00			388.155.224,00
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	516.159.216,00			516.159.216,00
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	264.912.930,00			264.912.930,00
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	403.734.972,00			403.734.972,00
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.143.875,00			2.143.875,00
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.849.754,00			1.849.754,00
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.911.373,00			15.911.373,00
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.110.250,00			8.110.250,00
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.911.002,00			1.911.002,00
39	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	290.663,00			290.663,00
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	6.882.600,00			6.882.600,00
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.642.682,00			1.642.682,00
42	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.429.840,00			3.429.840,00



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
43	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.457.500,00			3.457.500,00
44	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	51.323.410.217,00			51.323.410.217,00
45	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.525.812.879,00			6.525.812.879,00
46	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	351.065.000,00			351.065.000,00
47	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	16.075.940.920,00			16.075.940.920,00
48	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	6.669.164.340,00			6.669.164.340,00
49	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.092.907.500,00			1.092.907.500,00
50	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00			671.790.000,00
51	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	64.077.300,00			64.077.300,00
52	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.244.380,00			75.244.380,00
53	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00			57.582.000,00
54	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00			974.095.500,00
55	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.022.600,00			80.022.600,00
56	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00			14.844.375,00
57	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00			5.292.000.000,00
58	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00			1.323.000.000,00
59	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	297.585,00			297.585,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	58.633.596,00			58.633.596,00
61	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.397.088,00			1.397.088,00
62	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.191.264,00			4.191.264,00
63	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.208.000.000,00			5.208.000.000,00
64	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.774.200.000,00			3.774.200.000,00
65	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00			-
66	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	116.220.000,00			116.220.000,00
67	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.708.000,00			6.708.000,00
68	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00			91.260.000,00
69	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.228.120,00			6.228.120,00
70	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	226.838,00			226.838,00
71	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.880,00			1.880,00
72	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.472.000,00			5.472.000,00
73	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00			112.320,00
74	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00			336.960,00
75	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00			-



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
76	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00			-
77	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00			-
78	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.146.600,00			1.146.600,00
79	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00			-
80	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00			-
81	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	22.050,00			22.050,00
82	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.052.750,00			2.052.750,00
83	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.504.000,00			3.504.000,00
84	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.273.150,00			28.273.150,00
85	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	36.944.098,00			36.944.098,00
86	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(J.PKB],	19.811.788,00			19.811.788,00
87	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(J.BBNKB],	30.480.010,00			30.480.010,00
88	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.325,00			130.325,00
89	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	128.712,00			128.712,00
90	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	930.150,00			930.150,00
91	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	471.750,00			471.750,00
92	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	142.587,00			142.587,00
93	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	18.763,00			18.763,00
94	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	501.000,00			501.000,00



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
95	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	108.087,00			108.087,00
96	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00			-
97	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	202.500,00			202.500,00
98	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00			-
99	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	200.880,00			200.880,00
100	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00			312.480.000,00
101	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.960.000,00			399.960.000,00
102	Belanja Pegawai BLUD	217.670.000,00			217.670.000,00
	Jumlah Beban Pegawai LO	698.419.746.937,64	85.966.830,00	10.473.215.089,00	688.032.498.678,64

Koreksi tambah sebesar Rp85.966.830,00 merupakan koreksi atas utang belanja pegawai pada beberapa perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dan koreksi kurang atas beban pegawai LO sebesar Rp10.473.215.089,00 merupakan koreksi atas beban belanja pegawai yang disajikan sebagai utang belanja pegawai neraca per 31 Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025.

Selisih antara utang belanja pegawai yang disajikan di neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2024 (*Audited*) dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp6.114.525.236,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu adalah jumlah yang masih disajikan sebagai utang tahun 2025.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa- LO

Merupakan seluruh pengeluaran Beban Barang dan Jasa - LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp357.547.598.004,74 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp407.167.960.311,43. Tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp49.620.362.306,69 atau 12,19% dari tahun 2024. Pada beban barang persediaan tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang LRA Per 31 Desember 2025 terdapat selisih lebih sebesar Rp19.393.206.345,66 yang merupakan koreksi-koreksi atas Beban Barang dan Jasa tahun 2025 dan tahun 2024 serta koreksi atas utang beban tahun 2025 dan tahun 2024 koreksi reklas beban BLUD RS dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang digunakan untuk beban habis pakai dengan rincian koreksi sebagai berikut:

1 Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD	338.154.391.658,65
Koreksi yang menambah beban:	
Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	32.162.467.618,57
Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	38.580.003.276,00
Koreksi atas Beban Dibayar Dimuka	2.489.583,33
Koreksi reklasifikasi tambah atas aset tetap belanja modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi minimum	15.946.410.133,53
Koreksi tambah beban atas utang belanja tahun 2025	18.718.394.265,98



	Koreksi selisih belanja barang dan jasa- bahan lainnya BLUD antar rincian dengan realisasi LRA	570.000,43
	Koreksi tambah beban atas penambahan persediaan tahun 2024	11.998.210.890,41
	Koreksi tambah beban atas persediaan 2025 blanko KTP	152.730.000,00
2	sub jumlah	117.561.275.768,25
	Koreksi yang mengurangi beban:	
	Koreksi atas beban dibayar dimuka 2025 dan 2024	-3.450.672,48
	Koreksi atribusi beban honorarium pengadaan barang dan jasa ke aset tetap	-52.023.411,55
	Koreksi mengurangi beban perencanaan dan pengawasa LO dikapitalisasi ke aset tetap	-99.325.979,00
	Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	-32.162.467.618,57
	Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	-38.580.003.276,00
	Koreksi kurang beban atas utang belanja tahun 2024	-14.668.350.868,00
	Koreksi kurang beban atas penambahan persediaan tahun 2025	-12.601.767.596,56
	Koreksi reklasifikasi belanja honorarium pada Kec. Selimbau	-680.000,00
3	sub jumlah	-98.168.069.422,16
	jumlah Beban Barang dan Jasa - LO (1+2+3)	357.547.598.004,74

Beban barang dan jasa – LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sesuai uraian di bawah ini:

5.4.2.1.2.1 Beban Barang – LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban persediaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.645.467.106,90 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp128.144.112.797,21. Tahun 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp7.501.354.309,69 atau 5,85% dari tahun 2024. Pada beban barang persediaan tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang LRA Per 31 Desember 2025 terdapat selisih lebih sebesar Rp48.341.546.737,03 yang merupakan koreksi-koreksi atas Beban Persediaan tahun 2025 dan tahun 2024 serta koreksi atas utang beban tahun 2025 dan tahun 2024 koreksi reklas beban BLUD yang digunakan untuk beban habis pakai dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Rincian Beban Persediaan – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	79.131.120,00	228.420.399,00	(149.289.279,00)	(65,36)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	54.324.897,00	62.375.220,00	(8.050.323,00)	(12,91)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.294.741.775,00	16.353.863.322,00	(3.059.121.547,00)	(18,71)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	37.342.380,00	42.892.000,00	(5.549.620,00)	(12,94)
5	Beban Bahan-Barang dalam Proses	12.853.135,00	17.744.558.985,20	(17.731.705.850,20)	(99,93)
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.686.000,00	1.386.225,00	299.775,00	21,63
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	38.528.200,00	1.597.821.839,00	(1.559.293.639,00)	(97,59)
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.991.742.388,00	209.299.400,00	1.782.442.988,00	851,62
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.550.000,00	3.760.000,00	2.790.000,00	74,20
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	25.344.252.055,56	7.943.629.270,48	17.400.622.785,08	219,05
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.357.083.227,00	1.584.246.187,00	(227.162.960,00)	(14,34)



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	67.374.887,00	226.784.600,00	(159.409.713,00)	(70,29)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	47.672.400,00	(47.672.400,00)	(100,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	32.513.510,00	28.686.950,00	3.826.560,00	13,34
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.217.368.018,04	6.088.443.713,00	(871.075.694,96)	(14,31)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	182.781.975,00	188.594.655,00	(5.812.680,00)	(3,08)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.191.919.374,00	8.050.679.534,00	141.239.840,00	1,75
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	349.293.535,00	485.179.500,00	(135.885.965,00)	(28,01)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.182.112.427,00	2.729.906.034,00	(547.793.607,00)	(20,07)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	131.202.320,00	158.314.283,00	(27.111.963,00)	(17,13)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.157.683,00	1.537.605.289,00	337.552.394,00	21,95
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.118.750,00	18.525.000,00	(13.406.250,00)	(72,37)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.350.000,00	123.715.000,00	(119.365.000,00)	(96,48)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	414.270.390,00	661.312.012,00	(247.041.622,00)	(37,36)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.693.762.839,00	7.023.832.054,00	(5.330.069.215,00)	(75,89)
26	Beban Obat-Obatan-Obat	9.504.125.134,77	11.725.989.628,00	(2.221.864.493,23)	(18,95)
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.537.493.431,00	3.613.616.642,00	923.876.789,00	25,57
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.908.367.550,00	978.257.900,00	930.109.650,00	95,08
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	17.701.249.000,00	4.142.124.500,00	13.559.124.500,00	327,35
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.013.128.470,00	1.800.000,00	3.011.328.470,00	167.296,03
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	125.088.864,00	198.641.000,00	(73.552.136,00)	(37,03)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	275.000,00	(275.000,00)	(100,00)
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.415.948.600,00	8.722.326.332,00	(1.306.377.732,00)	(14,98)
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.676.146.220,00	3.366.702.566,00	(690.556.346,00)	(20,51)
35	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	7.155.400,00	11.400.000,00	(4.244.600,00)	(37,23)
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.282.923.000,00	1.424.822.500,00	(141.899.500,00)	(9,96)
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.481.898.682,00	1.481.811.675,00	87.007,00	0,01



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	19.768.000,00	39.934.000,00	(20.166.000,00)	(50,50)
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.723.049.300,00	7.509.964.601,00	(1.786.915.301,00)	(23,79)
40	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	149.124.060,00	19.752.000,00	129.372.060,00	654,98
41	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	184.223.992,00	74.970.000,00	109.253.992,00	145,73
42	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	119.000.000,00	(119.000.000,00)	(100,00)
43	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.293.925,00	0,00	3.293.925,00	0,00
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	496.757.180,00	455.907.185,00	40.849.995,00	8,96
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	216.194.600,00	208.407.250,00	7.787.350,00	3,74
46	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.293.925,00	1.080.000,00	2.213.925,00	204,99
47	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	64.500.000,00	(64.500.000,00)	(100,00)
48	Beban Pakaian KORPRI	0,00	21.995.000,00	(21.995.000,00)	(100,00)
49	Beban Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	10.000.000,00	(8.500.000,00)	(85,00)
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	181.331.095,00	303.252.500,00	(121.921.405,00)	(40,20)
51	Beban Pakaian Olahraga	191.752.600,00	610.950.330,00	(419.197.730,00)	(68,61)
52	Beban Pakaian Paskibraka	142.872.838,00	149.715.200,00	(6.842.362,00)	(4,57)
53	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
54	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.028.000,00	6.801.800,00	(5.773.800,00)	(84,89)
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	16.221.978,00	(16.221.978,00)	(100,00)
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	0,00	2.025.000,00	(2.025.000,00)	(100,00)
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	0,00	62.740.000,00	(62.740.000,00)	(100,00)
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.172.761,00	40.004.000,00	(11.831.239,00)	(29,58)
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.129.727.402,00	0,00	8.129.727.402,00	0,00
61	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	40.686.008,00	48.221.155,00	(7.535.147,00)	(15,63)
62	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.905.892.032,00	4.154.325.173,70	(2.248.433.141,70)	(54,12)



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	31.500.000,00	176.845.000,00	(145.345.000,00)	(82,19)
64	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.437.250,00	4.440.000,00	(2.002.750,00)	(45,11)
65	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
66	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	3.690.800,00	0,00	3.690.800,00	0,00
67	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	33.421.132,00	32.551.209,00	869.923,00	2,67
68	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	56.143.860,00	0,00	56.143.860,00	0,00
69	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	72.100.981,90	14.579.000,00	57.521.981,90	394,55
70	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	23.760.640,00	0,00	23.760.640,00	0,00
71	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	7.417.575,00	(7.417.575,00)	(100,00)
72	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00
73	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.844.000,00	0,00	11.844.000,00	0,00
74	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	21.800.000,00	(21.800.000,00)	(100,00)
75	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	32.272.106,12	28.543.000,00	3.729.106,12	13,06
76	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	17.668.000,00	0,00	17.668.000,00	0,00
77	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	99.400.000,00	(99.400.000,00)	(100,00)



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
78	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	250.940.148,00	0,00	250.940.148,00	0,00
79	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	345.593.882,51	0,00	345.593.882,51	0,00
80	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.110.377.351,00	4.782.302.480,00	328.074.871,00	6,86
81	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	27.040.245,90	(27.040.245,90)	(100,00)
82	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan	0,00	164.115.499,93	(164.115.499,93)	(100,00)
83	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	12.354.000,00	1.700.000,00	10.654.000,00	626,71
84	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	4.040.000,00	(4.040.000,00)	(100,00)
85	Beban Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	0,00	46.000.000,00	(46.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO	135.645.467.106,90	128.144.112.797,21	7.501.354.309,69	5,85

Penjelasan koreksi atau penyesuaian pada Beban Barang Persediaan – LO tahun 2025 sebagaimana uraian di bawah ini:

1	Realisasi belanja barang APBD	87.303.920.369,44
	Koreksi yang menambah beban:	
	Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	16.035.845.718,57
	Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	17.935.980.304,00
	Koreksi reklasifikasi tambah atas aset tetap belanja modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi minimum	15.946.410.133,53
	Koreksi tambah beban atas penambahan utang belanja barang tahun 2025	4.900.523.987,08
	Koreksi selisih belanja barang dan jasa- bahan lainnya BLUD antar rincian dengan realisasi LRA	570.000,43
	Koreksi tambah beban atas penambahan persediaan tahun 2024	11.998.210.890,41
	Hibah Blanko dari Pemerintah Pusat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	152.730.000,00
2	sub jumlah	66.970.271.034,02
	Koreksi yang mengurangi beban:	



	Koreksi kurang beban atas pembayaran utang belanja barang tahun 2024	-6.026.956.700,00
	Koreksi kurang beban atas penambahan persediaan tahun 2025	-12.601.767.596,56
3	sub jumlah	-18.628.724.296,56
	Jumlah Beban Persediaan- LO (1+2+3)	135.645.467.106,90

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa – LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp127.242.072.146,27 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp142.805.737.747,25. Pada tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp15.563.665.600,97 atau 10,90% dari tahun 2024. Jika dibandingkan antara realisasi Beban Jasa LO dengan realisasi belanja Jasa LRA per 31 Desember 2025 terdapat selisih sebesar Rp36.196.153.273,87 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Rincian Beban Jasa – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	14.411.130,00	-14.411.130,00	-100,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	762.150.000,00	1.001.415.000,00	-239.265.000,00	-23,89
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	953.254.800,00	1.564.590.000,00	-611.335.200,00	-39,07
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	664.525.000,00	73.200.000,00	591.325.000,00	807,82
5	Beban Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	4.800.000,00	-3.200.000,00	-66,67
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	180.060.000,00	225.620.000,00	-45.560.000,00	-20,19
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	28.000.000,00	-28.000.000,00	-100,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	334.100.000,00	449.200.000,00	-115.100.000,00	-25,62
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	17.719.355.229,00	24.513.839.680,00	-6.794.484.451,00	-27,72
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	41.240.001.039,94	36.257.917.130,21	4.982.083.909,73	13,74
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	205.818.000,00	93.843.500,00	111.974.500,00	119,32
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00	-100,00



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	640.000.000,00	1.445.900.000,00	-805.900.000,00	-55,74
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	151.850.000,00	421.800.000,00	-269.950.000,00	-64,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	20.600.000,00	44.850.000,00	-24.250.000,00	-54,07
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	144.600.000,00	158.400.000,00	-13.800.000,00	-8,71
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	909.650.000,00	2.270.785.000,00	-1.361.135.000,00	-59,94
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	184.275.000,00	193.900.000,00	-9.625.000,00	-4,96
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	50.400.000,00	58.800.000,00	-8.400.000,00	-14,29
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.081.628.320,00	27.070.850.500,00	-16.989.222.180,00	-62,76
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.411.190.894,00	3.303.400.000,00	-892.209.106,00	-27,01
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.528.588.000,00	3.448.852.000,00	-1.920.264.000,00	-55,68
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.261.748.200,00	1.699.899.800,00	-438.151.600,00	-25,78
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.386.966.000,00	2.832.934.000,00	-1.445.968.000,00	-51,04
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	261.200.000,00	1.442.500.000,00	-1.181.300.000,00	-81,89
26	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	88.200.000,00	-88.200.000,00	-100,00
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	239.400.000,00	113.500.000,00	125.900.000,00	110,93
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	32.872.000,00	13.646.100,00	19.225.900,00	140,89
29	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	-100,00
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00	24.000.000,00	-23.250.000,00	-96,88
31	Beban Jasa Tata Rias	13.390.000,00	16.560.000,00	-3.170.000,00	-19,14
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.961.034.240,00	33.867.880,00	3.927.166.360,00	11595,55
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	116.561.936,00	321.085.600,00	-204.523.664,00	-63,70
34	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	3.575.000,00	5.000.000,00	-1.425.000,00	-28,50
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	186.037.689,00	247.587.342,00	-61.549.653,00	-24,86



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	86.250.000,00	289.100.000,00	-202.850.000,00	-70,17
37	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
38	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	165.536.414,00	165.549.900,00	-13.486,00	-0,01
39	Beban Jasa Kalibrasi	257.649.853,00	178.006.366,00	79.643.487,00	44,74
40	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	345.379.632,00	463.895.000,00	-118.515.368,00	-25,55
41	Beban Tagihan Telepon	134.678.801,00	137.320.363,00	-2.641.562,00	-1,92
42	Beban Tagihan Air	697.778.111,00	622.489.538,00	75.288.573,00	12,09
43	Beban Tagihan Listrik	4.892.713.466,00	6.163.953.439,00	-1.271.239.973,00	-20,62
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	291.030.000,00	454.770.000,00	-163.740.000,00	-36,01
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.222.932.173,00	2.228.330.608,00	-5.398.435,00	-0,24
46	Beban Paket/Pengiriman	155.100.500,00	136.666.100,00	18.434.400,00	13,49
47	Beban Penambahan Daya	9.404.150,00	2.920.700,00	6.483.450,00	221,98
48	Beban Registrasi/Keanggotaan	189.749.259,00	371.014.378,00	-181.265.119,00	-48,86
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	349.170.740,00	323.401.928,00	25.768.812,00	7,97
50	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	777.761.891,00	0,00	777.761.891,00	0,00
51	Beban Pengolahan Air Limbah	6.882.000,00	6.549.000,00	333.000,00	5,08
52	Beban Medical Check Up	57.388.000,00	71.012.000,00	-13.624.000,00	-19,19
53	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8.358.249.900,00	0,00	8.358.249.900,00	0,00
54	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	319.771.588,45	0,00	319.771.588,45	0,00
55	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	100.500.000,00	0,00	100.500.000,00	0,00
56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.119.973.580,00	2.285.880.240,00	834.093.340,00	36,49
57	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	6.198.301.205,00	0,00	6.198.301.205,00	0,00



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
58	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	651.092.400,00	6.849.066.000,00	-6.197.973.600,00	-90,49
59	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.584.556.236,00	2.152.676.696,00	-568.120.460,00	-26,39
60	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	340.446.172,99	384.822.252,72	-44.376.079,73	-11,53
61	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	387.017.755,79	482.220.546,16	-95.202.790,37	-19,74
62	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	31.575.732,00	-31.575.732,00	-100,00
63	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	127.540.000,00	64.858.400,00	62.681.600,00	96,64
64	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	86.727.200,00	95.380.000,00	-8.652.800,00	-9,07
65	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	-100,00
66	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	29.890.000,00	30.000.000,00	-110.000,00	-0,37
67	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	412.080.000,00	600.250.000,00	-188.170.000,00	-31,35
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	58.750.000,00	10.000.000,00	48.750.000,00	487,50
69	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	243.200.000,00	-243.200.000,00	-100,00
70	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	174.500.000,00	416.750.000,00	-242.250.000,00	-58,13
71	Beban Sewa Peralatan Cetak	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
72	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	274.900.000,00	431.200.000,00	-156.300.000,00	-36,25
73	Beban Sewa Peralatan Umum	446.102.500,00	259.960.000,00	186.142.500,00	71,60
74	Beban Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00
75	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	178.163.910,85	150.700.000,00	27.463.910,85	18,22
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	227.500.000,00	43.000.000,00	184.500.000,00	429,07
77	Beban Sewa Bangunan Parkir	10.800.000,00	110.800.000,00	-100.000.000,00	-90,25
78	Beban Sewa Hotel	119.680.000,00	6.375.000,00	113.305.000,00	1777,33
79	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	289.625.000,00	315.703.589,15	-26.078.589,15	-8,26



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
80	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	14.420.000,00	23.660.000,00	-9.240.000,00	-39,05
81	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	-100,00
82	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	14.633.130,00	3.000.000,00	11.633.130,00	387,77
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	5.211.450,00	-5.211.450,00	-100,00
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	21.153.714,00	21.136.620,00	17.094,00	0,08
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	81.712.300,00	271.278.210,00	-189.565.910,00	-69,88
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	278.821.146,00	499.056.000,00	-220.234.854,00	-44,13
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	89.538.000,00	-89.538.000,00	-100,00
88	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	13.833.930,00	11.000.000,00	2.833.930,00	25,76
89	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	7.536.900,00	-7.536.900,00	-100,00
90	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	374.372.850,00	862.959.160,00	-488.586.310,00	-56,62
91	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	106.786.500,00	144.680.000,00	-37.893.500,00	-26,19
92	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	70.400.000,00	-70.400.000,00	-100,00
93	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	199.996.000,00	0,00	199.996.000,00	0,00



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
94	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	36.708.704,00	29.397.000,00	7.311.704,00	24,87
95	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	155.889.701,00	108.670.000,00	47.219.701,00	43,45
96	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	46.620.000,00	0,00	46.620.000,00	0,00
97	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	299.903.550,00	299.909.400,00	-5.850,00	0,00
98	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	37.657.000,00	58.336.200,00	-20.679.200,00	-35,45
99	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	747.998.013,00	0,00	747.998.013,00	0,00
100	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
101	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-100,00
102	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-100,00
103	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.054.534.000,00	636.375.210,00	1.418.158.790,00	222,85
104	Beban Bimbingan Teknis	1.646.270.526,00	1.569.052.379,00	77.218.147,00	4,92
105	Beban Diklat Kepemimpinan	928.836.043,25	1.549.469.996,00	-620.633.952,75	-40,05
106	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	117.143.916,00	0,00	117.143.916,00	0,00
107	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	172.137.154,00	0,00	172.137.154,00	0,00
108	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	10.109.100,00	-10.109.100,00	-100,00
109	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	23.198.820,00	-23.198.820,00	-100,00



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
110	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	830.490,00	-830.490,00	-100,00
111	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.960.100,00	7.277.232,00	-4.317.132,00	-59,32
112	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	197.857.488,00	-197.857.488,00	-100,00
113	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	879.438,00	-879.438,00	-100,00
114	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	69.300,00	260.400,00	-191.100,00	-73,39
115	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.148.825,00	19.995.000,00	-14.846.175,00	-74,25
116	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.840.800,00	44.438.048,00	-36.597.248,00	-82,36
117	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	89.001.157,00	99.672.768,00	-10.671.611,00	-10,71
118	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	-100,00
JUMLAH BEBAN JASA-LO		127.242.072.146,27	142.805.737.747,25	-15.563.665.600,97	-10,90

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat selisih lebih sebesar Rp36.198.642.857,20 dengan uraian sebagai berikut:

1 Realisasi Belanja Jasa	91.043.429.289,07
Koreksi atas jurnal persediaan, utang, reklas belanja BLUD dan BOSP :	
Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	14.946.871.997,00
Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	16.227.605.229,00
Koreksi tambah beban sewa bangunan gedung kantor Sekretariat Daerah	2.489.583,33
Koreksi atas beban dibayar dimuka 2025 dan 2024	-3.450.672,48
Koreksi Kapitalisasi ke aset tetap	-99.325.979,00
Koreksi tambah beban atas utang belanja tahun 2025	13.817.870.278,90
Koreksi kurang beban atas utang belanja tahun 2024	-8.641.394.168,00



Koreksi beban honorarium pengadaan barang dan jasa di atribusikan ke aset tetap

-52.023.411,55

2 jumlah koreksi

36.198.642.857,20

jumlah Beban Barang dan Jasa - LO (1+2)

127.242.072.146,27

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan - LO

Merupakan seluruh Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.299.976.710,57 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp10.537.389.568,97. Di tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp2.237.412.858,40 atau 21,23% dari tahun 2024. Jika dibandingkan antara Beban Pemeliharaan LO dengan realisasi belanja Pemeliharaan LRA, terdapat total selisih lebih sebesar Rp1.133.832.122,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Rincian Beban Pemeliharaan – LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi Reklas BLUD	Koreksi atas Reklas BOP dan Kecamatan Selimbau	Koreksi atas Reklas BOS	Beban LO
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.250.270.611,00	238.805.316,00	(680.000,00)		4.488.395.927,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.153.633.227,57	86.579.796,00	60.894.000	748.233.010	2.049.340.033,57
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.532.815.700,00				1.532.815.700,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	229.425.050,00				229.425.050,00
	JUMLAH	7.166.144.588,57	325.385.112,00	60.214.000,00	748.233.010,00	8.299.976.710,57

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas – LO

Merupakan seluruh Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp65.720.932.759,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp97.338.362.189,00. Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp31.617.429.430,00) atau 32,48% dari tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi LRA, Beban Perjalanan Dinas LO terdapat selisih sebesar Rp4.334.362.767,00. Selisih tersebut merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Pertanggungjawaban Dana BLUD Per 31 Desember 2025, reklas belanja barang dan jasa BOS Reguler dan Kinerja dan BOP PAUD dan Kesetaraan. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 160 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi Reklas BLUD	Koreksi atas Reklas BOP	Koreksi atas Reklas BOS	Beban LO
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30.172.146.164,00	477.382.400,00	126.750.000,00	3.480.540.733,00	34.256.819.297,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.044.798.828,00	113.727.900,00			31.158.526.728,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	105.865.000,00				105.865.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63.760.000,00	135.961.734,00			199.721.734,00
	JUMLAH	61.386.569.992,00	727.072.034,00	126.750.000,00	3.480.540.733,00	65.720.932.759,00

**5.4.2.1.2.5 Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat**

Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.639.149.282,00 dan per 31 Desember 2024 (Audited) adalah Rp28.342.358.009,00. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.703.208.727,00 atau 27,18 dari tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp20.511.856.525,00, terdapat selisih lebih sebesar Rp127.292.757,00 yang merupakan reklas atau penambahan dari Beban Barang dan Jasa BLUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tahun 2025.

Rincian Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	647.432.999,00	1.135.058.000,00	(487.625.001,00)	(42,96)
2	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	130.722.669,00	31.907.104,00	98.815.565,00	309,70
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	11.075.427.450,00	17.617.862.200,00	(6.542.434.750,00)	(37,14)
4	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	260.400.000,00	260.400.000,00	0,00	0,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.783.926.164,00	5.466.430.705,00	(1.682.504.541,00)	(30,78)
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.741.240.000,00	3.830.700.000,00	910.540.000,00	23,77
	JUMLAH	20.639.149.282,00	28.342.358.009,00	(7.703.208.727,00)	(27,18)

Jumlah Beban Uang/Jasa yang Diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD – LO Tahun Anggaran 2025

No.	Nama SKPD	Jumlah Per SKPD
1	Sekretariat Daerah	1.724.105.747,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	273.699.610,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.734.497.907,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.075.427.450,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	684.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	739.639.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	624.982.999,00
15	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	807.900,00
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	130.722.669,00
19	Dinas Perhubungan	1.776.000,00
21	Kecamatan Putussibau Utara	360.290.000,00
23	Kecamatan Putussibau Selatan	250.200.000,00
25	Kecamatan Boyan Tanjung	15.000.000,00



No.	Nama SKPD	Jumlah Per SKPD
27	Kecamatan Silat Hilir	24.000.000,00
Jumlah		20.639.149.282,00

5.4.2.1.2 Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp748.800.000,00 dan tahun 2024 Rp0,00. Belanja Subsidi tersebut ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yang diperuntukkan kegiatan operasi pasar murah.

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp115.196.828.047,91 dan tahun 2024 sebesar Rp163.860.314.613,52. Penurunan Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dari tahun 2024 adalah sebesar Rp48.663.486.565,61 atau 29,70%. Adapun rincian beban hibah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Rincian Beban Hibah – LO

No	Uraian	Total Realisasi LRA	Total Koreksi	Total Koreksi kurang	Total Beban LO
			Tambah		
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.053.182.748,00	15.367.581.690,23	8.659.816.648,16	9.760.947.790,07
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	577.500.000,00			577.500.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.085.765.000,00		4.055.311.424,15	4.030.453.575,85
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	52.458.228.000,00			52.458.228.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.937.150.205,00	11.977.919.478,99	47.056.700,00	31.868.012.983,99
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.398.435.000,00			5.398.435.000,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	185.791.498,00			185.791.498,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00			0,00
9	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.212.528.000,00			1.212.528.000,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.534.999.550,00			4.534.999.550,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.237.234.594,27		164.794,27	4.237.069.800,00
12	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	932.861.850,00			932.861.850,00
	JUMLAH BEBAN HIBAH	100.613.676.445,27	27.345.501.169,22	12.762.349.566,58	115.196.828.047,91

Penjelasan koreksi tambah sebesar Rp15.367.581.690,23 dan Rp11.977.919.478,99, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi tambah Hibah Barang kepada Instansi Pemerintah Pusat sebesar Rp15.367.581.690,23 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian:



Tabel 5. 164 Koreksi Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
1	Perencanaan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Putussibau	Nomor : 600.1.15 / 369 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	23 June 2025	Kejaksaan Negeri Putussibau	396.996.600,00
2	Rehabilitasi Barak Siswa SPN Polda Kalbar di Kota Singkawang	Nomor : 600.1.15 / 189 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	24 March 2025	Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	249.282.173,91
3	Pembangunan Gedung Pelayanan Polres Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara (Tahap II Lanjutan Tahun 2023)	Nomor : 600.1.15 / 368 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	16 June 2025	Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	7.091.734.580
4	Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara (Tahap III Lanjutan Tahun 2023)	Nomor : 600.1.15 / 369 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	23 June 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	6.990.034.157
5	Pembangunan Pagar Kantor POLSEK Kec. Boyan Tanjung	Nomor : 600.1 / 178 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kepolisian Sektor Boyan Tanjung	89.677.391
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor POLRES Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1.15 / 172 / BAST / BGJL / DPUPR - 2025	17 March 2025	Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	200.102.391
7	Penataan Halaman Rumah Dinas Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara (Tahap II Lanjutan Tahun 2023)	Nomor : 600.1.15 / 171 / BAST / BGJL / DPUPR-2025	17 March 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	199.677.006,00
8	Penataan Halaman Komplek Perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1.15 / 171 / BAST / BGJL / DPUPR-2025	17 March 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	150.077.391,32
Total					15.367.581.690,23

2. Koreksi tambah Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp11.977.919.478,99 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian:

Tabel 5. 165 Koreksi hibah kepada Pemerintah Pusat Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
1	Pembangunan Rabat Beton Jln. Kom Yos Sudarso Komplek Perumahan Kejaksaan RT. 003 / RW. 002 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1.15 / 171 / BAST / BGJL / DPUPR-2025	17 March 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	119.854.000,00
1	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Penepian Raya Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 140 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Penepian Raya	93.515.885,51
2	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Ujung Jambu Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 149 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Ujung Jambu	187.105.080,90
3	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Kapuas Raya Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 108.c / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Kapuas Raya	187.075.968,47
4	Pembangunan Gertak Kayu Jalan Perkebunan Rakyat Dsn. Sambus Hulu Ds. Sambus Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 108.b / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nanga Sambus	93.481.574,43
5	Rehabilitasi Gertak Kayu Menuju SD Dsn. Mensipang Ds. Ujung Jambu Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 108.d / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Ujung Jambu	168.341.077,82
6	Rehabilitasi Gertak Kayu Menuju PAUD Ds. Jongkong Kiri Hilir Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 109.a / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Kiri Hulu	84.156.238,16
7	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Jongkong Kanan Kec. Jongkong (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 110.a / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Jongkong Kanan	187.046.856,03
8	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Jongkong Tanjung Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 110.b / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Jongkong Tanjung	93.330.813,62



No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
9	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Jongkong Kiri Kec. Jongkong (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 109.b / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Kiri Hulu	168.341.077,82
10	Rehabilitasi Jembatan Kayu Menuju Steigher Ds. Jangkang Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 110.c / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Jangkang	70.039.827,14
11	Pembangunan Gertak Kayu Depan Masjid Al - Muttaqin Ds. Gudang Hilir Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 110.d / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Gudang Hilir	93.445.183,89
12	Pembangunan Gertak Kayu Sungai Lupit Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 108.a / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Pala Pulau	56.041.945,30
13	Pembangunan Gertak Kayu Jl. Soekarno Hatta Ds. Bunut Hulu Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 184 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Bunut Hulu	121.574.032,97
14	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Kaban dan Gg. Arwana RT. 002 Dsn. Ulak Landau Ds. Jongkong Kiri Hilir Kec. Jongkong (Lanjutan 2022/2023)	Nomor : 600.1 / 109.c / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Kiri Hilir	93.588.666,60
15	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Puskesmas Lama Ds. Jongkong Pasar Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 109.d / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Pasar	60.838.218,71
16	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Landau Ipoh Ds. Na. Awin Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 118.a / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Nanga Awin	85.188.689,82
17	Pembangunan Jembatan Kayu Pemakaman Muslim Yayasan Al - Khoir Dsn. Jon Parasum Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 111.a / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Semitau Hulu	93.558.514,43
18	Pembangunan Gertak Komposit Jl. Kalimantan Gg. Kaban RT.006 / RW. 002 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 112 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kecamatan Putussibau Selatan	93.216.443,34
19	Peningkatan Jembatan Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 107 / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nibung	187.046.856,03
20	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Kedaung I Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 108 / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nibung	93.541.878,76
21	Peningkatan Jembatan Dsn. Manda - Menuju Ds. Melapi Ds. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 113 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kecamatan Putussibau Selatan	93.457.660,65
22	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Kedaung II Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 109 / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nibung	93.473.256,59
23	Pembangunan Gertak Komposit Jl. Pangeran Suma Ds. Nanga Suhaid Kec. Suhaid (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 118 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Nanga Suhaid	140.289.168,75
24	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Azmi Ds. Madang Permai Kec. Suhaid	Nomor : 600.1 / 111.b / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Madang Permai	112.223.743,19
25	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Sekulat Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 112 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Sekulat	103.879.911,82
26	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Rakit Ds. Dalam Kec. Selimbau (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 117 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Dalam	103.894.468,03
27	Rehabilitasi Gertak Kayu Jl. H. AB Amul Yakin Ds. Titian Kuala Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 129 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Desa Titian Kuala	134.286.808,81
28	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Lupak Mawang Ds. Vega Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 116 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Vega	165.174.060,96
29	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Tempurau Kec. Selimbau (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 111 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Tempurau	155.845.605,50
30	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Beringin Ds. Tembang Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 185 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Tembang	74.812.186,76
31	Pembangunan Gertak Kayu Menuju Batas Dsn. Tanjung Bunga Ds. Tembang Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 186 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Tembang	159.029.258,04



No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
32	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 187 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Bunut Hilir	206.993.031,86
33	Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Usaha Tani Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 141 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Pala Pulau	149.527.167,71
34	Rehabilitasi Gertak Kayu Makan Mapan Ds. Na. Nyabau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 164 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Nanga Nyabau	46.770.674,98
35	Rehabilitasi Gertak Kayu Gg. Ilham Ds. Na. Suhaid Kec. Suhaid	Nomor : 600.1 / 182 / BAST / DPUPR / BGJL	27 Maret 2025	Desa Nanga Suhaid	165.923.706,12
36	Pembangunan Jembatan Sentra Madu Sungai Kedamin Ds. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 142 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Kedamin Darat	93.581.388,49
37	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Batas Ds. Jongkong Kiri Tengah Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 159.e / BAST / DPUPR / BGJL	21 February 2025	Desa Jongkong Kiri Tengah	112.183.193,73
38	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Ulak Landau Ds. Jongkong Kiri Hilir Kec. Jongkong (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 163.a / BAST / DPUPR / BGJL	07 March 2025	Desa Jongkong Kiri Hilir	163.636.300,63
39	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Bungkok Ds. Ujung Jambu Kec. Jongkong (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 167 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Ujung Jambu	62.210.662,00
40	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Suka Maju Ds. Gudang Hilir Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 183.a / BAST / DPUPR / BGJL	27 March 2025	Desa Gudang Hilir	93.506.527,95
41	Rehabilitasi Gertak Kayu Jl. H. Ahmad Hab Ds. Jongkong Kanan Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 163.b / BAST / DPUPR / BGJL	07 March 2025	Desa Jongkong Kanan	197.115.599,08
42	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Semalah Kec. Selimbau (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 110 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Semalah	155.902.790,64
43	Rehabilitasi Jembatan Kayu Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 183 / BAST / DPUPR / BGJL	27 March 2025	Desa Nibung	140.242.380,91
44	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 115 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kelurahan Putussibau Kota	166.671.195,85
45	Konsolidasi Pembangunan & Rehabilitasi Rabat Beton Gg. Saudara Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 114 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	172.264.309,96
46	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani Depan SMA 2 SLB Gg. Gek. Alimansyah Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 122 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	142.746.684,67
47	Pembangunan Rabat Beton Ds. Tanjung Karang Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 119 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Tanjung Karang	66.573.192,35
48	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Temedak Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 121 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Pala Pulau	190.544.889,41
49	Pembangunan Rabat Beton Jl. Ahmad Dogom Gg. Pelangi Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 120 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Hilir Kantor	85.596.979,48
50	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tani 2 Gg. Lestari 3 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 123 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	190.381.849,56
51	Pembangunan Rabat Beton Jl. Amanah RT. 08 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 132 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	142.781.621,78
52	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Amanah Gg. Karya Hidayah RT. 008 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 133 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	95.235.387,73
53	Pembangunan Rabat Beton Jl. Banin Gg. H. Mansur Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 138 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	28.529.852,91
54	Pembangunan Rabat Beton Jl. Taman Tapah Gg. Taman Tapah Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 134 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Putussibau Kota	142.718.099,76
55	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Kumang Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 139 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kecamatan Putussibau Selatan	190.493.013,10



No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
56	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Amal Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 135 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	105.745.106,40
57	Pembangunan Rabat Beton Gg. Punggur Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 137 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Hilir Kantor	85.551.455,36
58	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Taman Tapah Gg. M. Kedu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 178 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Putussibau Kota	76.207.365,81
59	Pembangunan Rabat Beton Gg. Rawa Hilir RT. IV/RW. III Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 170 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Hilir Kantor	57.029.008,43
60	Pengaspalan Jalan Lingkungan Gg. Taman Jl. KS Tubun Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 143 / BAST / DPUPR / BGJL	22 March 2025	Kelurahan Putussibau Kota	114.234.824,75
61	Pembangunan Rabat Beton Jl. Temenggung Dalling Kel. kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 150 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	171.304.068,71
62	Pembangunan Rabat Beton & Drainase Jl. Banin Gg. H. Thalib Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 151 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	76.068.676,06
63	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Abadi Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 152 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	142.711.747,56
64	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Tubai Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 157 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Pala Pulau	47.665.862,27
65	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Sibau Hulu Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 156 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Sibau Hulu	190.544.889,41
66	Pembangunan Rabat Beton Gg. Mandau Permai Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 159.c / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	95.105.167,59
67	Pembangunan Rabat Beton Ds. Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 159.a / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Desa Sibau Hilir	180.751.910,90
68	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Pesantren AL - Fatah (Baung) Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 159.b / BAST / DPUPR / BGJL	21 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.057.030,36
69	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. H. Mustaan Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 159.d / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.173.487,40
70	Pembangunan Rabat Beton Gg. Tuba 2 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 160 / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	85.697.556,01
71	Pengaspalan Jalan Lingkungan Gg. A. Pangkar Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 169 / BAST / DPUPR / BGJL	21 February 2025	Kelurahan Hilir Kantor	75.995.625,73
72	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Mangga Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 171 / BAST / DPUPR / BGJL	01 March 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	137.559.052,81
73	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Kunsali Patamuan Ds. Melapi Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 179 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Melapi	190.441.136,78
74	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Makmur Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 180 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.101.495,77
75	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Diponegoro Gg. Rahmat RT. 05/RW. 01 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 181 / BAST / DPUPR / BGJL	22 March 2025	Kelurahan Putussibau Kota	133.255.435,77
76	Pembangunan Rabat Beton Jl. W.R Supratman Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 172 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kelurahan Putussibau Kota	133.218.381,26
77	Pembangunan Rabat Beton Gg. Sinawa Anima Ds. Ingko' Tambe Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 173 / BAST / DPUPR / BGJL	22 March 2025	Desa Ingko' Tambe	180.912.833,36
78	Peningkatan Rabat Beton Jl. Anggrek Ds. Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu	Nomor : 600.1 / 130 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Nanga Semangut	95.354.555,44
79	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn. Enturin Ds. Tunas Muda Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 125 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Tunas Muda	71.507.329,39



No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
80	Peningkatan, Pelebaran & Pengaspalan Jl. Pasir Putih Dsn. Kampung Masjid Ds. Nanga Suhaid Kec. Suhaid (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 131 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Desa Nanga Suhaid	95.248.685,40
81	Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds. Mujan Kec. Boyan Tanjung	Nomor : 600.1 / 126 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Desa Mujan	113.405.396,91
82	Pembangunan Rabat Beton Gg. Usaha Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 127 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.297.948,60
83	Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 124 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Desa Boyan Tanjung	114.358.227,25
84	Pengaspalan Jalan Lingkungan Jl. Patih Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 136 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	171.475.112,74
85	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Perdana RT. 15/RW. 03 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 144 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	95.407.490,46
86	Pembangunan Rabat Beton Jl. Lintas Barat Gg. Nur RT. 01/RW. 02 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 128 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	47.607.168,31
87	Pembangunan Rabat Beton Ds. Pinang Laka Kec. Pengkadan	Nomor : 600.1 / 161 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Pinang Langka	142.890.202,48
88	Rehabilitasi Rabat Beton Jl. Manunggal Gg. Abas RT. 004/RW. 002 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 153 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	47.713.038,35
89	Pembangunan Rabat Beton Ds. Belikai Kec. Seberuang	Nomor : 600.1 / 158 / BAST / DPUPR / BGJL	01 March 2025	Desa Belikai	133.414.834,09
90	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Muhammad Razali RT. 03/RW. 02 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 154 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	47.638.929,33
91	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn. Mensasak Ds. Simpang Senara Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 162 / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Desa Simpang Senara	95.248.685,40
92	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Destinasi Wisata Dsn. Na. Serawag Ds. Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 145 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Karya Mandiri	47.670.690,34
93	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Pemakaman Umum Dsn. Riam Kenyalau Ds. Parang Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 123.a / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Parang	71.443.807,36
94	Pembangunan Rabat Beton Ds. Na. Ret Kec. Boyan Tanjung	Nomor : 600.1 / 159 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Nanga Ret	66.663.775,15
95	Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang Ds. Kelibang Kec. Bunut Hulu	Nomor : 600.1 / 146 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Kelibang	47.739.505,86
96	Pembangunan Rabat Beton Gg. Dusun Jaya Permai Ds. Pantas Bersatu Kec. Bunut Hulu	Nomor : 600.1 / 147 / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Desa Pantas Bersatu	57.288.983,29
97	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Bugang Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 148 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Bugang	95.248.685,40
98	Pembangunan Rabat Beton Dsn. Repun Ds. Pinang Laka Kec. Pengkadan	Nomor : 600.1 / 155 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Pinang Laka	71.443.807,36
99	Pembangunan Rabat Beton Ds. Buak Limbang Kec. Pengkadan	Nomor : 600.1 / 168 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Buak Limbang	85.737.638,80
100	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Marsedan Raya Kec. Semitau	Nomor : 600.1 / 165 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Marsedan Raya	76.255.600,59
101	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Keluarga Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir	Nomor : 600.1 / 174 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Pangeran	85.720.381,98
102	Pembangunan Rabat Beton Ds. Marsedan Raya Kec. Semitau	Nomor : 600.1 / 166 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Marsedan Raya	104.835.217,34
103	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Pelentar Jaya Ds. Dangan Kota Kec. Silat Hulu	Nomor : 600.1 / 175 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Dangan Kota	85.826.252,02



No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
104	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Lubuk Baung Ds. Landau Kumpang Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 163 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Landau Kumpang	85.720.381,98
105	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Ke Perkuburan Dsn. Nanga Suang Ds. Landau Rantau Kec. Silat Hulu	Nomor : 600.1 / 176 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Landau Rantau	95.407.490,46
106	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Trans Kalis Ds. Na. Kalis Kec. Kalis	Nomor : 600.1 / 177 / BAST / DPUPR / BGJL	28 February 2025	Desa Nanga Kalis	76.192.078,57
					11.858.065.478,68

Penjelasan koreksi kurang sebesar Rp12.762.349.566,58, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi keluar pada beban hibah barang pada pemerintah pusat sebesar Rp8.659.816.648,16 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:
 - a. Penataan Halaman Kantor KPU Kab. Kapuas Hulu 223.960.802,00
 - Pembangunan Gedung Paroki Kel. Putussibau Kota Kec.
 - b. Putussibau Utara (Tahap III Lanjutan Tahun 2022) 8.081.729.105,72
 - c. Pembangunan Pos Penjagaan POLRES Kapuas Hulu 354.126.740,44
 - Total 8.659.816.648,16**
2. Koreksi keluar beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.055.311.424,15 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

Tabel 5. 166 Hibah persediaan diserahkan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

NO.	URAIAN JENIS BARANG/ ASET	HARGA PEROLEHAN/UNIT
1	Pembangunan Jalan Amril Norman Kel. Kedamin Hulu kec. Putussibau Selatan	3.086.065.391,31
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Mensusai Kec. Suhaid	185.509.272,29
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani Gg. H. Gek Alamsyah Kec. Putussibau Selatan	185.499.106,01
4	Konsolidasi Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Cendana RT. 008/RW. 002 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2021)	92.771.353,88
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Kedamin Darat - Ds. Melapi Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2023)	185.488.804,07
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Riyan Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2023)	64.981.873,67
7	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Fadilah Gg. Haji Dolek Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	46.386.873,94
8	Pembangunan Rabat Beton Jl. Kenanga RT. 11/RW.04 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	139.027.059,59
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani 2 (Menuju BTN Owen Blok A) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	69.581.689,39
JUMLAH		4.055.311.424,15

3. Koreksi kurang Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp47.056.700,00 merupakan koreksi atas pembayaran hasil penyelesaian paket pekerjaan belanja pengadaan pembangunan jalan produksi perkebunan untuk kelompok tani "Tahuk karya bersama kepala gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu yang sisanya belum dilunasi pembayaran di tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp43.951.700,00 dan koreksi untuk menghapus utang belanja pengawasan belanja modal bangunan gedung tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.105.000,00.



4. Koreksi kurang atas beban hibah BOP PAUD swasta sebesar Rp164.794,27.

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp398.902.720,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp429.850.750,00 merupakan seluruh Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Rincian Beban Bantuan Sosial per Jenis Beban – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	202.402.720,00	0,00	202.402.720,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	170.000.000,00	295.000.000,00	(125.000.000,00)	(42,37)
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	10.350.750,00	(10.350.750,00)	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	26.500.000,00	84.500.000,00	(58.000.000,00)	(68,64)
	JUMLAH	398.902.720,00	429.850.750,00	(30.948.030,00)	(7,20)

Jumlah Beban Bantuan Sosial per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 168 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD – LO

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	170.000.000,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & PA	202.402.720,00
3	Kecamatan Bunut Hulu	26.500.000,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial Per SKPD	398.902.720,00

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Terdapat penyajian penyisihan piutang yang terjadi dalam Tahun 2025 sebesar Rp302.692.015,77 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.406.854.070,45 sebagai beban di LO. Rincian beban penyisihan piutang LO per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain	10.680.866,80	2.758.577,56	7.922.289,24	287,19
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.272.507,79	1.776.874,97	(504.367,18)	(28,39)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.508,00	161.202,00	(158.694,00)	(98,44)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	34.223.292,95	14.797.872,08	19.425.420,87	131,27
5	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	110.818.236,75	83.749.842,34	27.068.394,41	32,32
6	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	7.924.240,75	1.523.191,84	6.401.048,91	420,24



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	893.788.750,00	(893.788.750,00)	(100,00)
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	24.190.145,68	17.764.020,70	6.426.124,98	36,17
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12.271.205,66	5.271.580,00	6.999.625,66	132,78
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	101.309.011,39	385.262.158,97	(283.953.147,56)	(73,70)
	JUMLAH	302.692.015,77	1.406.854.070,45	(1.104.162.054,69)	(78,48)

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp253.863.255.882,78 dan 2024 (Audited) sebesar Rp260.516.412.582,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Beban Penyusutan per Jenis Aset Tetap – LO

No Rek	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37.380.288.342,11	37.643.324.006,35	-263.035.664,24	-0,70
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	2.342.754.814,78	2.136.407.286,03	206.347.528,75	9,66
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.833.518.075,79	5.256.068.096,45	-422.550.020,66	-8,04
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	46.768.366,58	58.815.154,12	-12.046.787,54	-20,48
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	14.090.116,54	19.820.002,28	-5.729.885,74	-28,91
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.283.714.066,95	5.810.790.468,44	4.472.923.598,51	76,98
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.124.739.494,75	2.417.337.922,50	-292.598.427,75	-12,1
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.625.867.832,35	8.511.579.308,83	-1.885.711.476,48	-22,15
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.115.361.308,01	2.526.220.815,62	-410.859.507,61	-16,26
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	0	1.853.100,00	-1.853.100,00	-100
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	8.064.619.794,67	10.354.936.885,64	-2.290.317.090,97	-22,12
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	59.380.476,58	0	59.380.476,58	100
8.1.08.01.14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	154.645.534,70	0	154.645.534,70	100
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	34.268.839,40	0	34.268.839,40	100
8.1.08.01.16	Beban Penyusutan Alat Peraga	404.282.773,37	0	404.282.773,37	100
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	149.631.338,97	422.849.457,77	-273.218.118,80	-64,61



No Rek	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	126.645.508,67	126.645.508,67	0	0
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.094.619.557,45	35.885.420.391,30	4.209.199.166,15	11,73
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	39.237.849.151,96	35.078.434.019,81	4.159.415.132,15	11,86
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	89.361.389,48	66.139.487,21	23.221.902,27	35,11
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	8.871.093,78	0	8.871.093,78	100
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	758.537.922,23	740.846.884,28	17.691.037,95	2,39
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.147.987.581,70	186.680.928.833,06	10.532.941.251,36	-5,64
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	167.764.827.449,42	178.389.942.765,98	10.625.115.316,56	-5,96
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	3.573.836.163,81	3.521.897.543,61	51.938.620,20	1,47
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	2.075.525.055,25	2.147.210.014,94	-71.684.959,69	-3,34
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	2.733.798.913,22	2.621.878.508,53	111.920.404,69	4,27
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	18.914.650,00	30.010.386,61	-11.095.736,61	36,97
8.1.08.04.01	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	18.914.650,00	30.010.386,61	-11.095.736,61	36,97
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	190.019.601,52	196.878.168,16	-6.858.566,64	-3,48
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	190.019.601,52	196.878.168,16	-6.858.566,64	-3,48
8.1.08.07	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0	79.850.797,24	-79.850.797,24	-100
8.1.08.07.01	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0	79.850.797,24	-79.850.797,24	-100
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	31.426.150,00	0	31.426.150,00	100
8.1.08.09.01	Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	31.426.150,00	0	31.426.150,00	100
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		253.863.255.882,78	260.516.412.582,72	-6.653.156.699,94	-2,55

5.4.3 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer periode 31 Desember 2025 terealisasi masing-masing sebesar Rp112.589.956.969,00 dan 2024 (*Audited*) Rp110.198.580.940,00. Beban transfer Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.391.376.029,00 atau 2,17% dari tahun 2024. Realisasi Beban Transfer merupakan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ke desa dan defisit non operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 171 Rincian Beban Transfer – LO

No Rek	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.3.01	Beban Bagi Hasil	4.973.717.564,00	3.119.275.000,00	1.854.442.564,00	59,45
8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.469.132.000,00	2.534.595.000,00	1.934.537.000,00	76,33
8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	504.585.564,00	584.680.000,00	(80.094.436,00)	(13,70)
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	107.616.239.405,00	107.079.305.940,00	536.933.465,00	0,50
8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	107.616.239.405,00	0,00	107.616.239.405,00	100,00
8.3.02.06.01.0001	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	107.079.305.940,00	(107.079.305.940,00)	(100,00)
JUMLAH		112.589.956.969,00	110.198.580.940,00	2.391.376.029,00	2,17

Penjelasan beban transfer sebagai berikut:

- Jumlah bagi hasil pajak dan retribusi ke desa tahun 2025 sebesar Rp4.973.717.564,00 dan tahun 2024 sebesar Rp3.119.275.000,00 meningkat sebesar Rp1.854.442.564,00 atau 59,45% dari tahun 2024
- Jumlah bantuan keuangan pada Pemerintah Desa tahun 2025 sebesar Rp107.616.239.405,00 dan tahun 2024 sebesar Rp107.079.305.940,00. pada tahun 2025 meningkat sebesar Rp536.933.465,00 atau 0,50%.

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 adalah terdiri dari:

1. Jumlah Pendapatan	Rp1.558.607.145.013,94
2. Jumlah Beban	<u>Rp 1.528.680.532.318,84</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 29.926.612.695,10

5.4.4 SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp(16.951.313.305,88) dan Defisit pada tahun 2024 sebesar Rp(12.878.619.925,98).

SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp607.682.519,85 dan Surplus pada tahun 2024 sebesar Rp326.921.531,18. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 172 Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO				
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	230.344.624,10	(230.344.624,10)	(100)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	607.682.519,85	96.576.907,08	511.105.612,77	555,32
	Jumlah Surplus Non Operasional - LO	607.682.519,85	326.921.531,18	280.760.988,67	85,88

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2025 terdiri dari:

- 1) Surplus atas aset non lancar sebesar Rp27.433.088,80
- 2) Surplus atas kenaikan nilai investasi pada BUMD sebesar Rp580.249.431,05, terdiri dari:
 - (a) Kenaikan nilai investasi pada Perumda Tirta Uncak Kapuas sebesar Rp559.314.146,05
 - (b) Kenaikan nilai investasi pada PT. Uncak Kapuas Mandiri sebesar Rp20.935.285,00.

DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.558.995.825,73 dan Defisit pada tahun 2024 sebesar Rp13.205.541.457,16. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Defisit Non Operasional - LO				
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	257.273.886,00	13.204.691.457,16	-12.947.417.571,16	(98,05)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	17.301.721.939,73	850.000,00	17.300.871.939,73	2.035.396,70
	Jumlah Surplus Non Operasional - LO	17.558.995.825,73	13.205.541.457,16	280.760.988,67	32,97

Penjelasan Defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO merupakan defisit non operasional atas penghapusan Bangunan Gedung Rumah Negara Golongan II nilai perolehan sebesar Rp1.189.153.448,10 yang telah di susutkan sebesar Rp931.879.562,10 sehingga nilai buku yang disajikan sebagai defisit non operasional adalah sebesar Rp257.273.886,00;
- 2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp17.301.721.939,73, terdiri dari:
 - a) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp16.191.725.713,73 dengan rincian:
 - (1) Koreksi atas selisih antara akumulasi penyusutan dengan nilai perolehan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor atas Penghapusan Bangunan Gedung yang tercatat pada Daftar Inventaris Aset Tetap BKAD sebesar Rp2.169.326.562,12
 - (2) Koreksi kurang saji akumulasi penyusutan Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif pada Laporan operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah sebesar sebesar Rp(58.791.947,57).
 - (3) Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp14.081.191.099,18 terdiri dari koreksi atas pelepasan atau penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 174 koreksi atas pelepasan atau penghapusan aset tetap

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	456.102.936,25
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.317.498,82
3	satuaanPolisi Pamong Praja	83.346.725,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	210.624.500,73
5	Dinas Perhubungan	446.749.686,91
6	Dinas Perikanan	794.231.850,89
7	Sekretariat Daerah	11.048.333.692,71
8	Sekretariat DPRD	1.513.818,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	933.157.068,59
10	Badan Pendapatan Daerah	1.813.321,28
	Jumlah	14.081.191.099,18

- b) Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO sebesar Rp1.109.996.226,00 merupakan defisit penurunan nilai investasi atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas yang menurunkan nilai investasi jangka Panjang.

5.4.5 POS LUAR BIASA

Merupakan jumlah Beban Luar Biasa dari Beban Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.659.746.914,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp933.056.277,00.

BEBAN TIDAK TERDUGA

Jumlah Beban Tidak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.659.746.914,00. Pada tahun 2024 Beban Tidak Terduga disajikan terpisah pada Beban Luar Biasa sebesar Rp933.056.277,00. Rincian Beban Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 berdasarkan SP2D sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Rincian SP2D Beban Tidak Terduga Tahun 2025

NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI
		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.659.746.914,00	3.659.746.914,00
1	SP2D NO. 61.06/04.0/000360/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 12 Juni 2025	34.800.000	34.800.000
2	SP2D NO. 61.06/04.0/000361/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 12 Juni 2025	110.000.000	110.000.000
3	SP2D NO. 61.06/04.0/000366/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	118.800.000	118.800.000
4	SP2D NO. 61.06/04.0/000364/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	78.000.000	78.000.000
5	SP2D NO. 61.06/04.0/000363/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	304.329.000	304.329.000



NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI
		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
6	SP2D NO. 61.06/04.0/000367/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	8.232.250	8.232.250
7	SP2D NO. 61.06/04.0/000365/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	41.250.000	41.250.000
8	SP2D NO. 61.06/04.0/000412/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 21 Juli 2025	182.000.000	182.000.000
9	SP2D NO. 61.06/04.0/000415/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 28 Juli 2025	42.352.831	42.352.831
10	SP2D NO. 61.06/04.0/000429/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	24.750.000	24.750.000
11	SP2D NO. 61.06/04.0/000425/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	20.625.000	20.625.000
12	SP2D NO. 61.06/04.0/000430/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	17.940.000	17.940.000
13	SP2D NO. 61.06/04.0/000426/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	24.750.000	24.750.000
14	SP2D NO. 61.06/04.0/000428/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	708.920.000	708.920.000
15	SP2D NO. 61.06/04.0/000427/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	705.634.875	705.634.875
16	SP2D NO. 61.06/04.0/000516/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/9/2025 TANGGAL 16 September 2025	300.000.000	300.000.000
17	SP2D NO. 61.06/04.0/000528/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/9/2025 TANGGAL 22 September 2025	13.211.312	13.211.312
18	SP2D NO. 61.06/04.0/000540/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025 TANGGAL 25 September 2025	110.000.000	110.000.000
19	SP2D NO. 61.06/04.0/000720/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025 TANGGAL 30 Oktober 2025	239.000.000	239.000.000
20	SP2D NO. 61.06/04.0/000904/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 5 Desember 2025	15.000.000	15.000.000



NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI
		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
21	SP2D NO. 61.06/04.0/000905/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 5 Desember 2025	68.250.000	68.250.000
22	SP2D NO. 61.06/04.0/000906/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 5 Desember 2025	319.000.000	319.000.000
23	SP2D NO. 61.06/04.0/000941/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 10 Desember 2025	153.500.000	153.500.000
24	SP2D NO. 61.06/04.0/000989/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 TANGGAL 23 Desember 2025	4.774.677	4.774.677
25	SP2D NO. 61.06/04.0/000988/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 TANGGAL 23 Desember 2025	14.626.969	14.626.969
JUMLAH		3.659.746.914,00	3.659.746.914,00

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Merupakan keseluruhan Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.315.552.475,22 dan 2024 (*Audited*) sebesar (Rp33.497.805.475,97).



5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		298.655.087.387,91	266.747.256.792,04

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 sebesar Rp298.655.087.387,91 sedangkan untuk TA 2024 (*Audited*) sebesar Rp266.747.256.792,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.742.240.173.254,90	1.829.056.387.084,05
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	1.443.585.085.866,99	1.562.309.130.292,01
Arus Kas Bersih		298.655.087.387,91	266.747.256.792,04

5.5.1.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		1.742.240.173.254,90	1.829.056.387.084,05

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2025 sebesar Rp1.742.240.173.254,90, sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.829.056.387.084,05. Rincian arus kas masuk dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penerimaan Pajak Daerah	54.094.384.309,53	26.579.810.709,77
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.524.575.448,85	17.074.176.833,76
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	56.637.111.391,57	41.549.639.329,41
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	49.325.072.400,00	24.307.680.390,00
6	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	106.505.416.800,00	86.863.402.000,00
7	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.037.656.000,00	
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	946.039.985.059,00	997.502.079.545,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	234.146.450.729,17	300.705.764.602,00
10	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	188.999.864.222,00	253.262.296.832,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.380.117.963,00	54.143.592.042,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.568.879.729,00	1.580.613.000,00
14	Penerimaan Hibah	501.374.337,78	1.053.282.442,11
15	Penerimaan Lainnya	13.420.227.516,00	10.492.027.869,00
Jumlah Arus Masuk Kas (1 s/d 15)		1.742.240.173.254,90	1.829.056.387.084,05

5.5.1.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		1.443.585.085.866,99	1.562.309.130.292,01

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 sebesar Rp1.443.585.085.866,99 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.562.309.130.292,01. Rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 178 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pembayaran Pegawai	698.419.746.937,64	628.077.888.879,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	338.154.391.659,08	392.692.858.955,72
3	Pembayaran Subsidi	748.800.000,00	
4	Pembayaran Hibah	100.613.676.445,27	176.714.597.658,29



No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5	Pembayaran Bantuan Sosial	398.902.720,00	429.850.750,00
6	Pembayaran Tidak Terduga	3.659.746.914,00	933.056.277,00
7	Pembayaran Bagi Hasil	4.973.717.564,00	3.119.275.000,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	296.616.103.627,00	360.341.602.772,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.443.585.085.866,99	1.562.309.130.292,01

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(212.581.666.908,73) **(277.121.774.591,10)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 adalah sebesar (Rp212.581.666.908,73) sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp277.121.774.591,10) Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 179 Rincian Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	212.561.000,00	2.215.169.800,00
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	212.794.227.908,73	279.336.944.391,10
	Arus Kas Bersih	(212.581.666.908,73)	(277.121.774.591,10)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
212.561.000,00 **2.215.169.800,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 adalah sebesar Rp212.561.000,00 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp2.215.169.800,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 180 Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	2.000.000.000,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	47.971.800,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	182.577.000,00	139.167.000,00
4.	Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.984.000,00	
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	28.031.000,00
	Total	212.561.000,00	2.215.169.800,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
212.794.227.908,73 **279.336.944.391,10**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 adalah sebesar Rp212.794.227.908,73 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp279.336.944.391,10. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 181 Rincian Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	0,00	240.000.000,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	34.723.736.544,00	35.193.168.507,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	86.455.438.903,73	70.599.092.543,10



No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.136.012.061,00	162.423.124.362,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	20.374.452.400,00	10.556.710.339,00
7	Perolehan Aset Lainnya	104.588.000,00	324.848.640,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		212.794.227.908,73	279.336.944.391,10

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **0,00**

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 maupun TA 2024 (*Audited*).

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **0,00**

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 maupun TA 2024 (*Audited*).

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **0,00**

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 maupun TA 2024 (*Audited*).

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS **31 Desember 2024** **31 Desember 2024**
0,00 **0,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
Arus Kas Bersih		0,00	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
97.809.294.820,64 **106.015.741.176,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 adalah sebesar Rp97.809.294.820,64 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp106.015.741.176,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Tabel 5. 183 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga

NO.	NAMA AKUN	JUMLAH
1	Total Beras (BULOG)	19.347,00
2	Total Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	751.989.169,00
3	Total Iuran Jaminan Kematian	2.255.988.561,00
4	Total Iuran Jaminan Kesehatan	10.680.120.715,00



NO.	NAMA AKUN	JUMLAH
5	Total Iuran Jaminan Kesehatan 4%	15.355.180.128,00
6	Total Iuran Wajib Pegawai 1%	4.970.205.667,00
7	Total Iuran Wajib Pegawai 8%	21.099.003.071,00
8	Total Lainnya	228.330.826,00
9	Total Pajak Penghasilan Ps 22	895.555.621,26
10	Total Pajak Penghasilan Ps 23	459.253.695,90
11	Total Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.670.121.087,04
12	Total Pajak Pertambahan Nilai	26.135.931.101,73
13	Total PPH 21	11.288.340.791,71
14	Total Sewa Rumah	7.554.574,00
15	Total Taperum	-
16	Total Taspen	5.491.298,00
17	Total Zakat	6.209.167,00
	JUMLAH PFK PER 31 DESEMBER 2025	97.809.294.820,64

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
97.809.294.820,64 **106.015.741.176,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 adalah sebesar Rp97.809.294.820,64 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp106.015.741.176,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.5.5 Kenaikan / Penurunan Kas Bersih **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
86.073.420.479,18 **(10.374.517.799,06)**

Kenaikan Kas Bersih TA 2025 adalah sebesar Rp86.073.420.479,18 sedangkan Penurunan Kas Bersih TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp10.374.517.799,06). Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Bersih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 184 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Bersih

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	298.655.087.387,91	266.747.256.792,04
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(212.581.666.908,73)	(277.121.774.591,10)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Kenaikan/Penurunan Kas Bersih	86.073.420.479,18	(10.374.517.799,06)

5.5.6 Saldo Awal Kas **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
15.612.640.711,47 **25.987.158.510,53**

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, BOS, dan FKTP TA 2025 adalah sebesar Rp15.612.640.711,47 yang merupakan saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo di BLUD, Kas Lainnya Kas Dana BOS, Kas Dana BOK, dan saldo di FKTP yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 (*Audited*) dengan sebagai berikut:



Jumlah saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 5. 185 Rincian Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS, BOP, BOK dan Kas Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas di BUD	90.884.935.566,82	10.488.646.925,55
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.215.302,00
3	Kas Bendahara Pengeluaran	197.937.032,00	888,00
4	Kas di BLUD	7.652.552.149,40	1.464.500.074,95
5	Kas Dana Kapitasi di FKTP	173.806.227,08	46.263.999,52
6	Kas Lainnya	0,00	34.800.000,00
7	Kas Dana Kas BOSP	31.336.146,35	33.829.228,45
8	Kas Dana Kas- BOK Puskesmas	2.745.494.069,00	3.543.384.293,00
Jumlah Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47



5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.192.745.487.362,20 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024, sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 (*Audited*).

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.315.552.475,22 dan saldo tahun 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp33.497.805.475,97) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional Tahun 2024 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan selisih pendapatan LO dikurangi beban operasional dan transfer LO.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

- Selain adanya pengurang ekuitas dari defisit atas kegiatan operasional pemerintah daerah Tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi dan penyesuaian pada Koreksi kas sebesar (Rp86.363,10) terdiri dari:
 - Kas Dana BOSP sebesar (Rp86.363,10) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Kas di kas daerah sebesar Rp875.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - Kas di Bendahara Penerimaan sebesar (Rp875.000,00) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp31.019.854,55 merupakan koreksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas selisih antara nilai tercatat di persediaan tahun 2024 dengan yang dikoreksi dengan rincian:

Tabel 5. 186 koreksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

No.	Nama Paket 2023	Nilai Kontrak	TOTAL BAST	SELISIH
1	Pembangunan Gertak Kayu Pemukiman RT. 03 SP. Danau Undang Dsn. Lintas Senara Ds. Jongkong Pasar Kec. Jongkong (Lanjutan 2022)	61.838.000	64.025.318,07	2.187.318,07
2	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Hulu Balang Ds. Jongkong Kanan Kec. Jongkong (Lanjutan 2022)	179.773.000	186.131.885,01	6.358.885,01
3	Rehabilitasi Gertak Kayu Lapangan Sepak Bola Dusun Hulu Balang Desa Jongkong Kanan Kec. Jongkong	64.778.000	67.069.311,01	2.291.311,01
4	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Citra Melati Ds. Jongkong Pasar Kec. Jongkong	179.773.000	186.131.885,01	6.358.885,01
5	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Tempurau Kec. Selimbau	197.093.000	204.064.523,66	6.971.523,66
6	Rehabilitasi Jembatan Sungai Tapang Ds. Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung	44.876.000	46.463.342,50	1.587.342,50
7	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Lubuk Keramat Ds. Sekulat Kec. Selimbau	148.836.000	154.100.589,29	5.264.589,29
8	Pembangunan Pendopo Ds. Nanga Dua Kec. Bunut Hulu	67.390.000	67.390.000,00	0,00
	Jumlah	944.357.000,00	975.376.854,55	31.019.854,55



3. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp0,01.
4. Koreksi Beban Dibayar Dimuka sebesar (Rp2.489.583,33).
5. Koreksi atas asset tetap sebesar Rp89.704.958,86 yang merupakan koreksi mutasi masuk dan mutasi keluar serta koreksi kurang lebih catat asset tetap terdiri dari:
 - a. Koreksi kurang saji Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan sebesar Rp0,14 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Koreksi lebih saji Alat Kantor Lainnya pada Dinas PUPR sebesar (Rp608.936,37)
 - c. Koreksi kurang saji alat pendingin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.249,95
 - d. Koreksi kurang saji Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp614.341.000,02 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e. Koreksi Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp99.400.000,00) yang merupakan koreksi selisih saldo awal bangunan air tercatat audited sebesar Rp8.334.857.190,82 namun di format rekon tercatat sebesar Rp Rp8.235.457.190,82 sehingga selisih sebesar Rp99.400.000,00 hal tersebut dikarenakan tahun lalu seharusnya dikoreksi ke beban LO namun tidak terjurnal
 - f. Koreksi asset tetap Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya sebesar (Rp515.485.000,02) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Merupakan koreksi salah saji Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya sebagai instalasi air kotor
 - g. Koreksi jaringan listrik sebesar Rp544.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan koreksi lebih saji Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
 - h. Koreksi jembatan sebesar Rp52.785.545,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan koreksi reklas dari beban ekstrakomtabel tahun sebelumnya
 - i. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp20.988.020,86. yaitu terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp18.235.800, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp30.786.550, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 12.500.000, Dinas Perhubungan Rp.26.238.581,14, Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata sebesar (Rp62.636.550), Sekretariat Daerah sebesar Rp.20.988.020.86, Sekretariat DPRD sebesar Rp.14.287.000, Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar (Rp.58.761.381,14), Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp.3.656.341.58), dan Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp.23.006.341.58
 - j. Koreksi pagar sebesar Rp608.936,04 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - k. Koreksi personal computer sebesar Rp15.924.143,24 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp12.087.943,44 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.980.000,00, pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar (Rp.8.345.648,32), pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.924.143,24, pada Sekretariat



DPRD sebesar Rp18.414.111,97, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp33.439.111,97) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp23.370.648,32, pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar (Rp.22.087.943,44), sebesar (Rp.9.980.000,00) pada Kecamatan Mentebah, sebesar Rp10.000.000,00 pada Kecamatan Selimbau

1. Koreksi Rumah Negara Golongan II sebesar (Rp107.907.000,00) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebesar Rp107.907.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud yang merupakan koreksi atas mutasi masuk dan mutasi keluar, koreksi kurang lebih catat aset tetap sebesar Rp489.174.891,92 terdiri dari:
 - a. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software senilai Rp829.999,99
 - b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp19.725.089,20 merupakan koreksi kurang saji pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
 - c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar (Rp16.907.219,31)
 - d. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar (Rp17.160.038,00)
 - e. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar (Rp18.942.000,00)
 - f. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp65.602.038,00
 - g. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Putussibau Selatan sebesar Rp21.000.000,00
 - h. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Kalis sebesar (Rp33.500.000,00)
 - i. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Selimbau sebesar (Rp17.000.000,00)
 - j. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar (Rp21.053.669,89)
 - k. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp30.786.550,00)
 - l. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp12.500.000,00)
 - m. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp26.238.581,14)



- n. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp62.636.550,00
- o. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Sekretariat Daerah (Rp8.994.866,06)
- p. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp14.287.000,00)
- q. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp58.761.381,14
- r. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.656.341,58
- s. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar (Rp23.006.341,58)
- t. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus sebesar Rp1,01
- u. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya sebesar (Rp0,91)
- v. Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp31.673.599,99, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp53.953.500,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp53.953.500,00)
- w. Koreksi pembulatan Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi sebesar (Rp0,01) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- x. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp8.106.136,46)
- y. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar (Rp0,01) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- z. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar (Rp999,96) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- aa. Koreksi Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif sebesar (Rp269.458.685,24) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
- bb. Koreksi Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar Rp134.729.342,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- cc. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp557.784.295,17 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- dd. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi sebesar Rp134.729.342,14 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- ee. Koreksi Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebesar (Rp2.216.000,00) pada Badan Pendapatan Daerah
- ff. Koreksi Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer sebesar (Rp25.670,14) terdiri dari (Rp12.087.943,44) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp9.980.000,00), Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp8.345.648,32, Sekretariat Daerah sebesar (Rp9.554.485,94), Sekretariat DPRD sebesar (Rp18.414.111,97), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar



Rp33.439.111,97, Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp13.841.832,52), Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp.22.087.943,44, Kecamatan Mentebah sebesar Rp9.980.000,00, Kecamatan Selimbau sebesar (Rp10.000.000,00),

gg. Koreksi Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar sebesar (Rp0,01) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar (Rp81.769.329,69),

7. Jumlah koreksi atas kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.599.354,00 terdiri dari:

- a. Koreksi hapus Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.333.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Koreksi hapus Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp65.265.954,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Koreksi hapus Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp. 1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp3.202.742.452.533,66 dan Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.192.745.487.362,20.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

1. Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)

Pada tanggal 16 Januari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan agenda pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang masa jabatannya telah berakhir.

Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c juncto Pasal 78 ayat (2) huruf a serta Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan pengumuman pemberhentian dilakukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, usulan pemberhentian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh keputusan pemberhentian secara resmi.

Pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- Fransiskus Diaan
- Sukardi

Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih periode 2025–2030 dengan perolehan suara sebanyak 80.618 suara atau sebesar 51,64% dari total suara sah.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025–2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2. Kepala OPD

Sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum melakukan pelantikan maupun pengangkatan pejabat pada jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Wakil Kepala OPD/pejabat setingkat selama tahun berjalan.

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan struktur pimpinan perangkat daerah yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan terkait peraturan lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *Good Government*.

Demikian catatan atas laporan keuangan (CALK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Lampiran 1

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Kegiatan perbaikan Mess Camat Badau menyambut kedatangan menteri ke Badau tanggal 10 November 2003 an. AY	75.000.000,00
2	Pembayaran Kegiatan penyambutan Menteri di Kecamatan Badau tanggal 10 November 2003 an. AY	50.000.000,00
3	Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ke Kabupaten Kutai Kerta Negara tanggal 28 April 2004 an. MKL	100.000.000,00
4	Perjalanan Dinas staf Sekretariat DPRD untuk mendampingi Anggota DPRD dalam Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. HA	3.885.000,00
5	Perjalanan Dinas Anggota DPRD yang belum teranggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. MKL (tanggal 1 April 2004), S (tanggal 20 April 2004 dan 1 April 2004), MS (tanggal 11 Maret dan 20 April 2004), AZ (tanggal 14 Januari dan 31 Maret 2004), FP (tanggal 21 April 2004) an. Masing-masing Anggota DPRD tersebut.	65.400.000,00
6	Perjalanan Dinas Camat Badau ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan camat perbatasan di Jakarta tanggal 25 Juni 2004 an. AY	5.000.000,00
7	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Tata Kota Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk mengikuti pertemuan di Pontianak tanggal 14 Juni 2004 an. BS	3.000.000,00
8	Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 11 Juni 2004 an. ES	2.000.000,00
9	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 26 Agustus 2004 an. J	2.110.000,00
10	Perjalanan Dinas Pegawai Kecamatan Silat Hilir dan bantuan transportasi masyarakat Kecamatan Silat Hilir ke putussibau untuk berkoordinasi tanggal 6 Agustus 2004 an. AMYYS.	2.000.000,00
11	Pembayaran operasional BBI Kelansin (pembayaran rekening listrik) tanggal 13 Mei 2004 an. WK	15.000.000,00
12	Bantuan kepada pegawai yang rumahnya digusur tanggal 27 Mei 2005 an K	5.500.000,00
13	Perjalanan Dinas pegawai di Kantor PUKM Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas PUKM Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2005 an. YMSP	2.460.000,00
14	Perjalanan Dinas Kepala PPSDM Kabupaten Kapuas Hulu ke Jakarta dalam rangka koordinasi ke kementrian di Jakarta an. DS	6.000.000,00
15	Perjalanan Dinas Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 30 Juli 2005 an. M	2.824.000,00
Jumlah		340.179.000,00

Rincian Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tahun Pengakuan	Nilai	Kualitas	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
					%	Jumlah
1	KA	2004	322.000.000,00	Macet	100	322.000.000,00
2	KBS	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
3	KAJ	2004	35.000.000,00	Macet	100	35.000.000,00
4	KH	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
5	KS	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
6	KUB	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
7	KR2	2004	182.000.000,00	Macet	100	182.000.000,00
8	KMP	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
9	KRM	2004	35.000.000,00	Macet	100	35.000.000,00
10	KP	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
11	KSB	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
12	KUK	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
13	KMK	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
14	UR	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
15	KPM	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
16	KKH	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
17	KRP	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
18	KUC	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
19	UI	2006	6.300.000,00	Macet	100	6.300.000,00
20	UR	2006	7.900.000,00	Macet	100	7.900.000,00
21	UJP	2006	6.300.000,00	Macet	100	6.300.000,00
22	UDS	2006	8.400.000,00	Macet	100	8.400.000,00
23	USL	2006	8.400.000,00	Macet	100	8.400.000,00
Jumlah			1.378.500.000,00			1.378.500.000,00

Lampiran 3

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2 per 31 Desember 2025

No	Tahun	Denda Piutang PBB	Kategori	Umur	Tarif 2025	Tarif 2024	Tarif Beban	Penyisihan Piutang	Nilai Buku	Beban
1	2008	352.035,36	Macet	17	100%	100%	0%	352.035,36	-	-
2	2009	623.693,52	Macet	16	100%	100%	0%	623.693,52	-	-
3	2010	1.208.955,36	Macet	15	100%	100%	0%	1.208.955,36	-	-
4	2011	774.025,68	Macet	14	100%	100%	0%	774.025,68	-	-
5	2012	2.142.899,52	Macet	13	100%	100%	0%	2.142.899,52	-	-
6	2013	4.335.915,36	Macet	12	100%	100%	0%	4.335.915,36	-	-
7	2014	3.427.708,56	Macet	11	100%	100%	0%	3.427.708,56	-	-
8	2015	3.737.772,96	Macet	10	100%	100%	0%	3.737.772,96	-	-
9	2016	3.300.900,24	Macet	9	100%	100%	0%	3.300.900,24	-	-
10	2017	4.384.216,56	Macet	8	100%	100%	0%	4.384.216,56	-	-
11	2018	4.488.257,52	Macet	7	100%	100%	0%	4.488.257,52	-	-
12	2019	6.051.695,76	Macet	6	100%	100%	0%	6.051.695,76	-	-
13	2020	13.378.597,20	Diragukan	5	100%	50%	50%	13.378.597,20	-	6.689.298,60
14	2021	17.149.580,64	Diragukan	4	50%	50%	0%	8.574.790,32	8.574.790,32	-
15	2022	28.877.658,72	Diragukan	3	50%	50%	0%	14.438.829,36	14.438.829,36	-
16	2023	38.466.967,92	Kurang Lancar	2	50%	10%	40%	19.233.483,96	19.233.483,96	15.386.787,17
17	2024	22.253.262,24	Lancar	1	10,00%	0,50%	9,5%	2.225.326,22	20.027.936,02	2.114.059,91
18	2025									
Jumlah		154.954.143,12						92.679.103,46	62.275.039,66	24.190.145,68

Lampiran 4

Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun	Nilai	Kualitas	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
					%	Jumlah
1	Pembayaran Kegiatan perbaikan Mess Camat Badau menyambut kedatangan menteri ke Badau tanggal 10 November 2003 an. AY	2003	75.000.000,00	Macet	100%	75.000.000
2	Pembayaran Kegiatan penyambutan Menteri di Kecamatan Badau tanggal 10 November 2003 an. AY	2003	50.000.000,00	Macet	100%	50.000.000
3	Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ke Kabupaten Kutai Kerta Negara tanggal 28 April 2004 an. MKL	2004	100.000.000,00	Macet	100%	100.000.000
4	Perjalanan Dinas staf Sekretariat DPRD untuk mendampingi Anggota DPRD dalam Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. HA		3.885.000,00	Macet	100%	3.885.000
5	Perjalanan Dinas Anggota DPRD yang belum teranggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. MKL (tanggal 1 April 2004), S (tanggal 20 April 2004 dan 1 April 2004), MS (tanggal 11 Maret dan 20 April 2004), AZ (tanggal 14 Januari dan 31 Maret 2004), FP (tanggal 21 April 2004) an. Masing-masing Anggota DPRD tersebut.	2004	65.400.000,00	Macet	100%	65.400.000
6	Perjalanan Dinas Camat Badau ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan camat perbatasan di Jakarta tanggal 25 Juni 2004 an. AY	2004	5.000.000,00	Macet	100%	5.000.000
7	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Tata Kota Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk mengikuti pertemuan di Pontianak tanggal 14 Juni 2004 an. BS	2004	3.000.000,00	Macet	100%	3.000.000
8	Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 11 Juni 2004 an. ES	2004	2.000.000,00	Macet	100%	2.000.000
9	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 26 Agustus 2004 an. J	2004	2.110.000,00	Macet	100%	2.110.000
10	Perjalanan Dinas Pegawai Kecamatan Silat Hilir dan bantuan transportasi masyarakat Kecamatan Silat Hilir ke putussibau untuk berkoordinasi tanggal 6 Agustus 2004 an. AMYYS.	2004	2.000.000,00	Macet	100%	2.000.000
11	Pembayaran operasional BBI Kelansin (pembayaran rekening listrik) tanggal 13 Mei 2004 an. WK	2004	15.000.000,00	Macet	100%	15.000.000
12	Bantuan kepada pegawai yang rumahnya digusur tanggal 27 Mei 2005 an K	2005	5.500.000,00	Macet	100%	5.500.000
13	Perjalanan Dinas pegawai di Kantor PUKM Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas PUKM Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2005 an. YMSP	2005	2.460.000,00	Macet	100%	2.460.000
14	Perjalanan Dinas Kepala PPSPM Kabupaten Kapuas Hulu ke Jakarta dalam rangka koordinasi ke kementrian di Jakarta an. DS		6.000.000,00	Macet	100%	6.000.000
15	Perjalanan Dinas Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 30 Juli 2005 an. M	2005	2.824.000,00	Macet	100%	2.824.000
Jumlah			340.179.000,00			340.179.000

No.	Uraian	Tahun	Jumlah	Kualitas	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
					%	JUMLAH
1	Pembayaran Kegiatan perbaikan Mess Camat Badau menyambut kedatangan menteri	2003	75.000.000	Macet	100%	75.000.000
2	Pembayaran Kegiatan penyambutan Menteri di Kecamatan Badau tanggal 10 Novemb	2003	50.000.000	Macet	100%	50.000.000
3	Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ke Kabupaten Kutai Kerta Negara tanggal 28 April 2004 an. M. Kebing Lyah (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)	2004	100.000.000	Macet	100%	100.000.000
4	Perjalanan Dinas staf Sekretariat DPRD untuk mendampingi Anggota DPRD dalam Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. Herry Ardiansyah		3.885.000	Macet	100%	3.885.000
5	Perjalanan Dinas Anggota DPRD yang belum teranggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. M. Kebing Lyah (tanggal 1 April 2004), Suhardi (tanggal 20 April 2004 dan 1 April 2004), M. Syafril (tanggal 11 Maret dan 20 April 2004), Ade Zulkifli (tanggal 14 Januari dan 31 Maret 2004), Filipus Piyan (tanggal 21 April 2004) an. Masing-masing Anggota DPRD tersebut..	2004	65.400.000	Macet	100%	65.400.000
6	Perjalanan Dinas Camat Badau ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan camat perbatasan di Jakarta tanggal 25 Juni 2004 an. Abdurahman Yacob, SH.	2004	5.000.000	Macet	100%	5.000.000
7	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Tata Kota Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk mengikuti pertemuan di Pontianak tanggal 14 Juni 2004 an. Buyung Sarifuddin.	2004	3.000.000	Macet	100%	3.000.000
8	Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 11 Juni 2004 an. Elham Syukur.	2004	2.000.000	Macet	100%	2.000.000
9	Perjadin Pegawai Dinas Pendidikan Kab.Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 26 Agustus 2004 an. Jantan, SH.	2004	2.110.000	Macet	100%	2.110.000
10	Perjalanan Dinas Pegawai Kecamatan Silat Hilir dan bantuan transportasi masyarakat Kecamatan Silat Hilir ke putussibau untuk berkoordinasi tanggal 6 Agustus 2004 an. A.M. Yohan YS.	2004	2.000.000	Macet	100%	2.000.000
11	Pembayaran operasional BBI Kelansin (pembayaran rekening listrik) tanggal 13 Mei 2004 an. Wan Kusnadi.	2004	15.000.000	Macet	100%	15.000.000
12	Bantuan kepada pegawai yang rumahnya digusur tanggal 27 Mei 2005 an Kurniawan	2005	5.500.000	Macet	100%	5.500.000
13	Perjalanan Dinas pegawai di Kantor PUKM Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untu	2005	2.460.000	Macet	100%	2.460.000
14	Perjalanan Dinas Kepala PPSDM Kabupaten Kapuas Hulu ke Jakarta dalam rangka koordinasi		6.000.000	Macet	100%	6.000.000
15	Perjalanan Dinas Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu ke	2005	2.824.000	Macet	100%	2.824.000
Jumlah			340.179.000			340.179.000

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	83.324.071.116,87												83.324.071.116,87
2	Sekretariat DPRD	12.800.000,00												12.800.000,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.808.988.023,75												23.808.988.023,75
4	Dinas Kesehatan	5.940.508.243,25												5.940.508.243,25
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.562.053.564,00												75.562.053.564,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	89.255.500,00												89.255.500,00
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	5.422.362.621,90												5.422.362.621,90
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	258.332.000,00												258.332.000,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	431.874.000,00												431.874.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1.426.881.226,45												1.426.881.226,45
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	4.599.366.000,00												4.599.366.000,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.949.709.000,00												2.949.709.000,00
14	Dinas Perikanan	948.098.865,44												948.098.865,44
15	Inspektorat	79.040.000,00												79.040.000,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85.200.000,00												85.200.000,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.754.427.220,00												12.754.427.220,00
18	Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	365.556.990,64												365.556.990,64
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	561.448.000,00												561.448.000,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.320.000,00												20.320.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.953.302.000,00												3.953.302.000,00
22	Dinas Perhubungan	18.520.000,00												18.520.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja													-
24	Badan Pengelola Perbatasan	7.200.000,00												7.200.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
27	Badan Pendapatan Daerah													-
28	Kecamatan Putussibau Utara	6.868.529.000,00												6.868.529.000,00
29	Kecamatan Putussibau Selatan	2.093.408.500,00												2.093.408.500,00
30	Kecamatan Bika	307.115.000,00												307.115.000,00
31	Kecamatan Kalis	335.925.000,00												335.925.000,00
32	Kecamatan Embaloh Hilir	14.039.000,00												14.039.000,00
33	Kecamatan Embaloh Hulu	236.123.500,00												236.123.500,00
34	Kecamatan Bunut Hilir	1.084.536.400,00												1.084.536.400,00
35	Kecamatan Bunut Hulu	113.025.000,00												113.025.000,00
36	Kecamatan Boyan Tanjung	1.697.850.000,00												1.697.850.000,00
37	Kecamatan Mentebah	436.867.000,00												436.867.000,00
38	Kecamatan Jongkong	176.220.000,00												176.220.000,00
39	Kecamatan Pengkadan	98.150.000,00												98.150.000,00
40	Kecamatan Hulu Gurung	165.875.200,00												165.875.200,00
41	Kecamatan Selimbau	1.350.179.500,00												1.350.179.500,00
42	Kecamatan Badau	1.229.937.500,00												1.229.937.500,00

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
43	Kecamatan Batang Lupar	465.510.000,00												465.510.000,00
44	Kecamatan Emanang	857.410.000,00												857.410.000,00
45	Kecamatan Puring Kencana	525.198.000,00												525.198.000,00
46	Kecamatan Semilau	495.768.500,00												495.768.500,00
47	Kecamatan Suhaid	188.342.000,00												188.342.000,00
48	Kecamatan Seberuang	1.007.485.000,00												1.007.485.000,00
49	Kecamatan Slat Hilir	256.812.000,00												256.812.000,00
50	Kecamatan Slat Hulu	153.625.000,00												153.625.000,00
		242.777.245.472,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.777.245.472,30

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		242.777.245.472,30
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	-
5	Koreksi lebih	-
Saldo Akhir		242.777.245.472,30

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT BESAR
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal APBD	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	499.950.000,00												499.950.000,00
2	Sekretariat DPRD	252.587.254,86												252.587.254,86
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan													-
4	Dinas Kesehatan	17.074.048.244,15	149.900.000,00		50.605,26									17.223.998.849,41
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.201.233.297,26								994.459.601,99				3.195.692.899,25
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan													-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan													-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata													-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan													-
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	116.610.154,00												116.610.154,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	3.038.790.192,10	1.629.480.000,00											4.668.270.192,10
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
21	Dinas Perhubungan													-
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	204.600.000,00												204.600.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir													-
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupar													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal APBD	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
43	Kecamatan Empanang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		23.387.819.142,37	1.779.380.000,00	-	50.605,26	-	-	-	-	994.459.601,99	-	-	-	26.161.709.349,62

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	23.387.819.142,37
Penambahan	1.779.430.605,26
1 Belanja Modal	1.779.380.000,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	50.605,26
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5 Koreksi Tambah	0,00
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	994.459.601,99
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	994.459.601,99
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Penghapusan	-
5 Koreksi lebih	-
Saldo Akhir	26.161.709.349,62

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT ANGKUTAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	reklas ke beban	penghapusan	Reklas dari aset tetap lainnya	Koreksi kurang	Reklass ke aset lain-lain	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	13.988.319.248,06	884.905.000,00		20.988.020,80					(0,86)		14.894.212.268,00
2	Sekretariat DPRD	5.549.061.147,80	843.986.300,00		14.287.000,00							6.407.334.447,80
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.355.645.254,95										3.355.645.254,95
4	Dinas Kesehatan	34.337.608.451,13	709.990.000,00	480.045,45	18.235.800,00	-19.725.089,20						35.046.589.207,38
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.032.282.128,93										7.032.282.128,93
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	1.785.714.471,84				-20.988.020,80						1.764.726.451,04
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	3.173.537.495,38										3.173.537.495,38
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.663.700.268,14									(45.600.000,00)	2.618.100.268,14
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.520.456.923,39			17.160.038,00							1.537.616.961,39
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	1.008.884.206,26										1.008.884.206,26
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1.671.236.040,93			18.942.000,00							1.690.178.040,93
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	1.150.720.191,07				-62.636.550,00						1.088.083.641,07
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	871.505.756,75										871.505.756,75
14	Dinas Penkakan	2.080.262.457,04	38.242.174,00									2.118.504.631,04
15	Inspektorat	1.514.124.100,39										1.514.124.100,39
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.265.104.528,98										1.265.104.528,98
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.262.991.205,99				- 58.761.381,14						3.204.229.824,85
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	4.366.258.136,59										4.366.258.136,59
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	477.518.468,48			19.725.089,20							497.243.557,68
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	484.165.319,52										484.165.319,52
21	Dinas Perhubungan	4.911.269.574,02			26.238.581,14					(575.000.000,00)	(350.000.000,00)	4.012.508.155,16
22	Satuan Polisi Pamong Praja	1.703.118.415,21	492.648.000,00		30.786.550,00							2.226.552.965,21
23	Badan Pengelola Perbatasan	1.132.274.932,94										1.132.274.932,94
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.500.793.131,97			12.500.000,00							5.513.293.131,97
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	511.677.276,00										511.677.276,00
26	Badan Pendapatan Daerah	686.496.392,82	435.774.999,00		19.350.000,00	-23.006.341,58						1.118.615.050,24
27	Kecamatan Putussibau Utara	613.231.807,92	-	-	23.006.341,58	-65.602.038,00	-	-	-	-	-	570.636.111,50
28	Kecamatan Putussibau Selatan	534.533.881,60	-	-	-	-21.000.000,00	-	-	-	-	-	513.533.881,60
29	Kecamatan Bika	268.432.111,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.432.111,18
30	Kecamatan Kalis	213.642.929,20	-	-	33.500.000,00	-	-	-	-	-	-	247.142.929,20
31	Kecamatan Embaloh Hilir	367.647.861,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367.647.861,21
32	Kecamatan Embaloh Hulu	235.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.370.000,00
33	Kecamatan Bunut Hilir	440.143.113,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.143.113,29
34	Kecamatan Bunut Hulu	331.246.761,79	28.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	359.566.761,79
35	Kecamatan Boyan Tanjung	296.095.390,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.095.390,63
36	Kecamatan Mentebah	390.366.462,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.366.462,14
37	Kecamatan Jongkong	341.816.583,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.816.583,95
38	Kecamatan Pengkadan	261.541.711,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.541.711,03
39	Kecamatan Hulu Gurung	320.640.230,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.640.230,42
40	Kecamatan Selimbau	501.982.549,16	-	-	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-	518.982.549,16

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PID85285.

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	reklas ke beban	penghapusan	Reklas dari aset tetap lainnya	Koreksi kurang	Reklass ke aset lain-lain	saldo akhir
41	Kecamatan Badau	257.342.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.342.850,00
42	Kecamatan Batang Lupar	393.809.612,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393.809.612,58
43	Kecamatan Empanang	214.328.242,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.328.242,45
44	Kecamatan Puring Kencana	250.600.594,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.600.594,33
45	Kecamatan Semilau	243.053.136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.053.136,00
46	Kecamatan Suhaid	273.997.932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.997.932,00
47	Kecamatan Seberuang	186.106.688,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.106.688,48
48	Kecamatan Silat Hilir	348.034.728,12	40.703.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	388.738.428,12
49	Kecamatan Silat Hulu	362.178.506,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.178.506,06
50	Badan Perencanaan Daerah	2.086.148.886,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.086.148.886,17
		115.737.018.094,29	3.474.570.173,00	480.045,45	271.719.420,72	- 271.719.420,72	-	-	-	- 575.000.000,86	- 395.600.000,00	118.241.468.311,88

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	115.737.018.094,29
Penambahan	3.746.769.639,54
1 Belanja Modal	3.474.570.173,00
2 Mutasi Masuk	271.719.420,72
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	480.045,45
4 Reklas ke aset Lain-lain	
5 Reklasifikasi Masuk	
6 Koreksi Tambah	0,37
7 Hibah masuk	
Pengurangan	(1.242.319.421,58)
8 Mutasi Keluar	(271.719.420,72)
9 Koreksi Kurang	(575.000.000,86)
10 Reklas ke aset Lain-lain	(395.600.000,00)
11 Penghapusan	
Saldo Akhir	118.241.468.312,25

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	reklas ke beban	penghapusan	Reklas dari aset tetap lainnya	Koreksi kurang	Reklass ke aset lain-lain	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah											-
2	Sekretariat DPRD											-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.926.000,00										14.926.000,00
4	Dinas Kesehatan	18.488.084,82										18.488.084,82
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.463.044.287,03										1.463.044.287,03
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	91.047.284,76										91.047.284,76
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	242.658.713,99										242.658.713,99
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil											-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.673.846,42										11.673.846,42
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik											-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	748.820.154,88										748.820.154,88
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	16.671.342,70										16.671.342,70
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11.606.076,43										11.606.076,43
14	Dinas Perikanan	310.459.498,28										310.459.498,28
15	Inspektorat	3.850.000,00										3.850.000,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	153.668.612,91										153.668.612,91
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	20.800.000,00										20.800.000,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak											-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											-
21	Dinas Perhubungan	28.668.572,72										28.668.572,72
22	Satuan Polisi Pamong Praja											-
23	Badan Pengelola Perbatasan	4.399.500,00										4.399.500,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.079.400,42										87.079.400,42
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											-
26	Badan Pendapatan Daerah	58.621.689,28										58.621.689,28
27	Kecamatan Putussibau Utara											-
28	Kecamatan Putussibau Selatan											-
29	Kecamatan Bika											-
30	Kecamatan Kalis											-
31	Kecamatan Embaloh Hilir											-
32	Kecamatan Embaloh Hulu											-
33	Kecamatan Bunut Hilir											-
34	Kecamatan Bunut Hulu	5.000.000,00										5.000.000,00
35	Kecamatan Boyan Tanjung											-
36	Kecamatan Mentebah	3.500.000,00										3.500.000,00
37	Kecamatan Jongkong											-
38	Kecamatan Pengkadan											-
39	Kecamatan Hulu Gurung	6.500.000,00										6.500.000,00
40	Kecamatan Selimbau											-
41	Kecamatan Badau											-
42	Kecamatan Batang Lupar											-
43	Kecamatan Emlanang											-
44	Kecamatan Puring Kencana											-
45	Kecamatan Semitau	5.750.000,00										5.750.000,00

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	rekas ke beban	penghapusan	Reklas dari aset tetap lainnya	Koreksi kurang	Reklass ke aset lain-lain	saldo akhir
46	Kecamatan Suhaid											-
47	Kecamatan Seberuang											-
48	Kecamatan Silat Hilir											-
49	Kecamatan Silat Hulu											-
50	Badan Perencanaan Daerah	1.500.000,00										1.500.000,00
		3.308.733.064,64		-	-	-	-	-	-	-	-	3.308.733.064,64

3.308.733.064,64

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		115.737.018.093,74
Penambahan		
1	Belanja Modal	
2	Mutasi Masuk	
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	
4	Reklas ke aset Lain-lain	
5	Reklasifikasi Masuk	
6	Koreksi Tambah	
7	Hibah masuk	
Pengurangan		0,00
8	Mutasi Keluar	
9	Koreksi Kurang	
10	Reklas ke aset Lain-lain	
11	Penghapusan	
Saldo Akhir		0,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT PERTANIAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Atribusi	Belanja Modal BLUD	Mutasi masuk	mutasi keluar	rekas ke beban	penghapusan	Reklas dari aset tetap lainnya	Koreksi kurang	Reklas ke aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.561.362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.561.362,00
4	Dinas Kesehatan	-	-	-	6.332.894,40	-	-	-	-	-	-	-	6.332.894,40
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	974.425.863,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.425.863,99
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Perikanan	630.381.425,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.381.425,61
15	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	114.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.180.000,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	22.654.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.654.000,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Perbatasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Putussibau Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Putussibau Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Kalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Embaloh Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Atribusi	Belanja Modal BLUD	Mutasi masuk	mutasi keluar	rekas ke beban	penghapusan	Reklas dari aset tetap lainnya	Koreksi kurang	Reklas ke aset tetap lainnya	saldo akhir
32	Kecamatan Embaloh Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Bunut Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Bunut Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Boyan Tanjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Mentebah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Jongkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Pengkadan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Hulu Gurung	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00
40	Kecamatan Selimbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Badau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Batang Lupar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Empanang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Puring Kencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Semitau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Suhaid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kecamatan Seberuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Kecamatan Silat Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Kecamatan Silat Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Badan Perencanaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.796.702.651,60	-	-	6.332.894,40	-	-	-	-	-	-	-	1.803.035.546,00

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.796.702.651,60
Penambahan		6.332.894,40
1	Belanja Modal	
2	Mutasi Masuk	
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	6.332.894,40
4	Reklas Belanja Modal BLUD	
5	Reklasifikasi Masuk	
6	Koreksi Tambah	
7	Hibah masuk	
Pengurangan		0,00
8	Mutasi Keluar	
9	Koreksi Kurang	
10	Reklas ke aset Lain-lain	
11	Penghapusan	
Saldo Akhir		1.803.035.546,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	reklas ke beban	penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	5.613.923.854,55	1.023.013.740,00					-485.149.920,00					6.151.787.674,55
2	Sekretariat DPRD	3.786.918.933,91									1,03		3.786.918.934,94
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20.160.189.607,91	8.129.727.402,00	3.805.380.642,00				-9.520.295.394,00		11.237.639.599,00	0,02	(5.805.000,00)	33.806.836.856,93
4	Dinas Kesehatan	17.075.946.147,68	251.542.350,00	78.218.639,00	84.921,48			-8.026.600,00		71.954.104,85	7.250,00		17.469.726.813,01
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.300.712.294,86	30.741.450,00		2.914.285,70					14.497.294.499,26	(608.936,07)		16.831.053.593,75
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	580.020.102,57											580.020.102,57
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.848.408.620,38									(71.064,91)		1.848.337.555,47
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.228.888.819,18										(17.875.000,00)	1.211.013.819,18
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	606.968.403,13											606.968.403,13
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	634.515.398,18											634.515.398,18
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	468.117.648,31									680.000,00		468.797.648,31
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	918.080.113,72	49.728.000,00		791.378,80								968.599.492,52
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	449.126.910,93	20.757.000,00										469.883.910,93
14	Dinas Perikanan	1.020.604.366,34											1.030.129.276,34
15	Inspektorat	294.509.396,74	54.112.500,00										348.621.896,74
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	147.542.069,23											147.542.069,23
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.530.444.833,48					- 70.000.000,00				70.000.000,00	(477.041.767,29)	1.053.403.066,19
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	1.997.712.694,73	5.599.950,00										2.003.312.644,73
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	204.486.863,88											204.486.863,88
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	415.500.766,70	84.210.147,00										499.710.913,70
21	Badan Perencanaan Daerah	964.530.071,64	18.359.400,00										982.889.471,64
22	Dinas Perhubungan	578.979.627,76	7.447.500,00					-7.447.500,00					578.979.627,76
23	Satuan Polisi Pamong Praja	358.285.567,22										(8.851.712,73)	349.433.854,49
24	Badan Pengelola Perbatasan	152.416.469,60											152.416.469,60
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.261.530.556,45											1.261.530.556,45
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.446.302,92											97.446.302,92
27	Badan Pendapatan Daerah	205.653.105,28				70.000.000,00							275.653.105,28
28	Kecamatan Putussibau Utara	236.172.176,48											236.172.176,48
29	Kecamatan Putussibau Selatan	113.005.303,00											113.005.303,00
30	Kecamatan Bika	146.011.122,72											146.011.122,72
31	Kecamatan Kalis	96.807.205,49											96.807.205,49
32	Kecamatan Embaloh Hilir	137.842.500,00											137.842.500,00
33	Kecamatan Embaloh Hulu	127.558.662,12											127.558.662,12
34	Kecamatan Bunut Hilir	273.980.750,00											273.980.750,00
35	Kecamatan Bunut Hulu	263.584.237,15											263.584.237,15
36	Kecamatan Boyan Tanjung	116.957.713,51											116.957.713,51
37	Kecamatan Mentebah	130.284.280,54											130.284.280,54
38	Kecamatan Jongkong	248.452.284,88											248.452.284,88
39	Kecamatan Pengkadan	162.668.238,74	4.500.000,00										167.168.238,74
40	Kecamatan Hulu Gurung	254.253.487,28											254.253.487,28
41	Kecamatan Selimbau	173.724.604,54											173.724.604,54

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	rekas ke beban	penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
42	Kecamatan Badau	834.690.676,56											834.690.676,56
43	Kecamatan Batang Lupar	323.768.739,40	14.874.000,00										338.642.739,40
44	Kecamatan Empanang	123.882.194,00											123.882.194,00
45	Kecamatan Puring Kencana	281.608.700,00											281.608.700,00
46	Kecamatan Semilau	148.064.000,00											148.064.000,00
47	Kecamatan Suhaid	300.858.854,47											300.858.854,47
48	Kecamatan Seberuang	130.372.791,02											130.372.791,02
49	Kecamatan Silat Hilir	228.926.000,00											228.926.000,00
50	Kecamatan Silat Hulu	151.161.491,90											151.161.491,90
		69.906.095.561,08	9.704.138.349,00	3.883.599.281,00	3.790.585,98	70.000.000,00	- 70.000.000,00	-10.020.919.414,00	-	25.806.888.203,11	70.007.250,07	- 509.573.480,02	98.844.026.336,22

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		69.906.095.561,08
Penambahan		39.538.423.669,16
1	Belanja Modal	9.704.138.349,00
2	Mutasi Masuk	70.000.000,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	3.790.585,98
4	Reklasifikasi Masuk	25.806.888.203,11
5	Koreksi Tambah	70.007.250,07
6	Reklas BLUD	78.218.639,00
7	Reklas BOSP	3.805.380.642,00
Pengurangan		(10.600.492.894,02)
1	Mutasi Keluar	(70.000.000,00)
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi ke Beban LO	(10.020.919.414,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	(509.573.480,02)
5	Penghapusan	
Saldo Akhir		98.844.026.336,22

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	rekas ke beban	penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	1.255.217.972,80	29.997.750,00					-1.637.250,00					1.283.578.472,80
2	Sekretariat DPRD	516.751.545,06	149.966.550,00										666.718.095,06
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10.226.632.387,86	81.337.524,00	29.030.000,00				-1.650.000,00					10.335.349.911,86
4	Dinas Kesehatan	1.799.447.924,33	18.107.600,00		6.113,02								1.817.561.637,35
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.101.781.926,14								464.420.001,33			1.566.201.927,47
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	86.800.864,00											86.800.864,00
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	429.694.721,40											429.694.721,40
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	388.842.443,14	9.065.000,00										397.907.443,14
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	117.232.780,48											117.232.780,48
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	1.109.870.488,30											1.109.870.488,30
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	58.241.343,63											58.241.343,63
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	120.840.999,50	39.960.000,00		635.929,40								161.436.928,90
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	54.508.646,20											54.508.646,20
14	Dinas Perikanan	643.761.307,41											643.761.307,41
15	Inspektorat	12.000.000,00											12.000.000,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.575.353,83											12.575.353,83
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	230.673.046,68											230.673.046,68
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	250.443.924,26											250.443.924,26
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18.118.788,99											18.118.788,99
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.871.153,03	4.739.700,00										17.610.853,03
21	Badan Perencanaan Daerah	327.206.298,96											327.206.298,96
22	Dinas Perhubungan	31.796.221,94											31.796.221,94
23	Satuan Polisi Pamong Praja	16.842.553,15											16.842.553,15
24	Badan Pengelola Perbatasan	46.849.250,00											46.849.250,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.531.940,31											78.531.940,31
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.150.000,00											20.150.000,00
27	Badan Pendapatan Daerah	9.900.000,00											9.900.000,00
28	Kecamatan Putussibau Utara	38.000.000,00											38.000.000,00
29	Kecamatan Putussibau Selatan	39.890.000,00											39.890.000,00
30	Kecamatan Bika	56.672.673,27											56.672.673,27
31	Kecamatan Kalis	12.000.000,00											12.000.000,00
32	Kecamatan Embaloh Hilir	22.666.729,62											22.666.729,62
33	Kecamatan Embaloh Hulu	6.999.660,00											6.999.660,00
34	Kecamatan Bunut Hilir	59.930.000,00											59.930.000,00
35	Kecamatan Bunut Hulu	46.324.672,00											46.324.672,00
36	Kecamatan Boyan Tanjung	23.395.653,00											23.395.653,00
37	Kecamatan Mentebah	57.724.951,46											57.724.951,46
38	Kecamatan Jongkong	63.300.000,00											63.300.000,00

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	rekas ke beban	penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
39	Kecamatan Pengkadan	42.500.000,00											42.500.000,00
40	Kecamatan Hulu Gurung	98.012.000,00											98.012.000,00
41	Kecamatan Selimbau	50.181.427,70											50.181.427,70
42	Kecamatan Badau	1.000.000,00											1.000.000,00
43	Kecamatan Batang Lupar	60.342.459,46											60.342.459,46
44	Kecamatan Empanang	24.526.036,87											24.526.036,87
45	Kecamatan Puring Kencana	43.865.000,00											43.865.000,00
46	Kecamatan Semitau	26.100.000,00											26.100.000,00
47	Kecamatan Suhaid	31.022.585,37											31.022.585,37
48	Kecamatan Seberuang	45.100.000,00											45.100.000,00
49	Kecamatan Silat Hilir	7.700.000,00											7.700.000,00
50	Kecamatan Silat Hulu	32.940.761,75											32.940.761,75
		19.878.078.491,91	333.174.124,00	29.030.000,00	642.042,42	-	-	3.287.250,00	-	464.420.001,33	-	-	20.691.757.409,65

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	19.878.078.491,91
Penambahan	827.266.167,75
1 Belanja Modal	333.174.124,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	642.042,42
4 Reklasifikasi Masuk	464.420.001,33
5 Koreksi Tambah	0,00
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	29.030.000,00
Pengurangan	(3.287.250,01)
1 Mutasi Keluar	-
2 Koreksi Kurang	(0,01)
3 Koreksi ke Beban LO	(3.287.250,00)
4 Reklas ke aset Lain-lain	-
5 Penghapusan	-
Saldo Akhir	20.702.057.409,65

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	reklas ke beban	penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.709.500,00											4.709.500,00
4	Dinas Kesehatan	119.262.155.281,08	6.103.859.934,00	269.396.300,00	2.060.623,09								125.637.472.138,17
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	-											-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	371.443.000,00											371.443.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata												-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.422.990,17											2.422.990,17
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	rekas ke beban	penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tatan lainnya	saldo akhir
42	Kecamatan Batang Lupar												-
43	Kecamatan Empanang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		119.640.730.771,25	6.103.859.934,00	269.396.300,00	2.060.623,09	-	-	-	-	-	-	-	126.016.047.628,34

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	119.640.730.771,25
Penambahan	6.375.316.857,09
1 Belanja Modal	6.103.859.934,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	2.060.623,09
4 Reklasifikasi Masuk	0,00
5 Koreksi Tambah	0,00
6 Reklas BLUD	269.396.300,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	-
1 Mutasi Keluar	-
2 Koreksi Kurang	-
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Reklas ke aset Lain-lain	-
5 Penghapusan	-
Saldo Akhir	126.016.047.628,34

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT LABORATORIUM
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kelompok aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.013.486.521,41	640.954.973,00	50.251.500,00				-152.005.481,90	-299.489.985,00	27.495.000,00	0,98		5.280.692.528,49
4	Dinas Kesehatan	10.434.550.129,72	891.896.500,00		301.098,42								11.326.747.728,14
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.361.025.219,09	10.853.000,00		582.857,14								1.372.461.076,23
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	666.266.203,00											666.266.203,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata												-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan	84.779.636,29											84.779.636,29
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	48.730.000,00											48.730.000,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	7.656.872.252,02	35.853.000,00										7.692.725.252,02
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan	703.878.700,00											703.878.700,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika	1.500.000,00											1.500.000,00
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir	92.040.000,00											92.040.000,00
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung	10.000.000,00											10.000.000,00
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong	4.000.000,00											4.000.000,00
38	Kecamatan Pengkadan	3.000.000,00											3.000.000,00
39	Kecamatan Hulu Gurung												-
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupar												-
43	Kecamatan Empang												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
44	Kecamatan Puring Kencana	69.650.000,00											69.650.000,00
45	Kecamatan Semilau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir	3.000.000,00											3.000.000,00
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		16.152.778.662,51	1.579.557.473,00	50.251.500,00	883.955,56	-	-	152.005.481,90	299.489.985,00	27.495.000,00	0,98	-	27.359.471.124,17

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	16.152.778.662,51
Penambahan	1.658.187.928,56
1 Belanja Modal	1.579.557.473,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	883.955,56
4 Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya	27.495.000,00
6 Reklas BLUD	
7 Reklas BOSP	50.251.500,00
Pengurangan	(451.495.466,90)
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi ke komputer	(299.489.985,00)
3 Koreksi ke Beban LO	(152.005.481,90)
4 Reklas ke aset Lain-lain	-
5 Penghapusan	-
Saldo Akhir	17.359.471.124,17

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT KOMPUTER
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	2.482.306.550,44	196.581.000,00			15.924.143,24							2.694.811.693,68
2	Sekretariat DPRD	1.394.945.129,01	76.273.650,00			18.414.111,97							1.489.632.890,98
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	55.760.877.251,61	194.520.142,00	3.569.474.682,00				-12.693.999,12		299.489.985,00			59.811.668.061,49
4	Dinas Kesehatan	14.135.939.696,35	710.043.720,00	358.025.239,60	239.706,15						(0,05)		15.204.248.362,05
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.997.872.028,26	61.121.040,00		4.662.857,12	12.087.943,44							5.075.743.868,82
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	660.480.534,46	14.962.800,00				-15.924.143,24						659.519.191,22
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.406.135.456,34											1.406.135.456,34
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.944.766.949,24	288.540.607,00					-20.570.607,00				(84.675.323,58)	3.128.061.625,66
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.191.040.017,78											1.191.040.017,78
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	1.334.290.314,93	49.783.500,00										1.384.073.814,93
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	423.671.845,65											423.671.845,65
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	380.461.355,06	67.399.200,00		1.072.600,91		-8.345.648,32						440.587.507,65
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	796.826.474,71											796.826.474,71
14	Dinas Perikanan	757.325.273,58	112.016.000,00										869.341.273,58
15	Inspektorat	824.850.026,64	78.033.000,00										902.883.026,64
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	977.922.031,00	5.827.500,00										983.749.531,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.693.168.880,92	343.134.300,00				33.439.111,97					(24.336.032,23)	3.978.528.036,72
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	785.723.526,64	17.748.900,00										803.472.426,64
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	323.133.153,26											323.133.153,26
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	224.301.497,15	5.998.440,00										230.299.937,15
21	Badan Perencanaan Daerah	1.308.667.306,72	11.877.000,00										1.320.544.306,72
22	Dinas Perhubungan	1.035.073.966,07	23.088.000,00									(76.650.196,61)	981.511.769,46
23	Satuan Polisi Pamong Praja	478.475.829,23	47.286.000,00			9.980.000,00							535.741.829,23
24	Badan Pengelola Perbatasan	176.328.038,48	23.532.000,00										199.860.038,48
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	366.077.259,24											366.077.259,24
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	233.251.040,20											233.251.040,20
27	Badan Pendapatan Daerah	278.239.557,45	240.403.170,00			23.370.648,32							542.013.375,77
28	Kecamatan Putussibau Utara	550.164.142,87					-22.087.943,44						528.076.199,43
29	Kecamatan Putussibau Selatan	511.625.879,39										(15.729.800,00)	495.896.079,39
30	Kecamatan Bika	77.069.379,17											77.069.379,17
31	Kecamatan Kalis	122.815.090,05											122.815.090,05
32	Kecamatan Embaloh Hilir	157.650.000,00											157.650.000,00
33	Kecamatan Embaloh Hulu	171.351.352,10											171.351.352,10
34	Kecamatan Bunut Hilir	261.263.000,00											261.263.000,00
35	Kecamatan Bunut Hulu	343.034.302,85											343.034.302,85
36	Kecamatan Boyan Tanjung	368.812.835,78											368.812.835,78
37	Kecamatan Mentebah	285.117.176,67					-9.980.000,00						275.137.176,67
38	Kecamatan Jongkong	422.369.440,00											422.369.440,00
39	Kecamatan Pengkadan	204.395.632,65	92.962.500,00										297.358.132,65
40	Kecamatan Hulu Gurung	486.764.469,23											486.764.469,23
41	Kecamatan Selimbau	294.803.379,63	27.700.000,00		680.000,00	10.000.000,00							333.183.379,63
42	Kecamatan Badau	213.906.378,02											213.906.378,02

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Belanja Modal BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
43	Kecamatan Batang Lupar	255.349.633,11	22.089.000,00										277.438.633,11
44	Kecamatan Empanang	173.049.147,46	4.000.000,00										177.049.147,46
45	Kecamatan Puring Kencana	161.483.000,00											161.483.000,00
46	Kecamatan Semilau	238.699.000,00											238.699.000,00
47	Kecamatan Suhaid	209.361.131,91										(12.560.000,00)	196.811.131,91
48	Kecamatan Seberuang	207.825.075,50											207.825.075,50
49	Kecamatan Silat Hilir	163.994.287,73											163.994.287,73
50	Kecamatan Silat Hulu	328.429.604,97											328.429.604,97
		105.571.184.330,30	2.714.921.469,00	3.927.499.921,60	6.655.164,18	89.776.846,97	- 89.776.846,97	- 33.264.606,12	-	299.489.985,00	- 0,05	- 213.941.352,42	112.282.844.910,70

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	105.571.184.330,30
Penambahan	7.038.343.386,75
1 Belanja Modal	2.714.921.469,00
2 Mutasi Masuk	89.776.846,97
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	6.655.164,18
4 Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	299.489.985,00
5 Koreksi Tambah	
6 Reklas BLUD	358.025.239,60
7 Reklas BOSP	3.569.474.682,00
Pengurangan	(336.982.805,56)
1 Mutasi Keluar	(89.776.846,97)
2 Reklasifikasi ke komputer	-
3 Koreksi ke Beban LO	(33.264.606,12)
4 Reklas ke aset Lain-lain	(213.941.352,42)
5 Koreksi desimal	(0,05)
Saldo Akhir	112.272.544.911,49

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT PRODUKSI
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kelass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan												-
4	Dinas Kesehatan	296.902.382,91											296.902.382,91
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata												-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupar												-
43	Kecamatan Empanang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		296.902.382,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.902.382,91

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	296.902.382,91
Penambahan	0,00
1 Belanja Modal	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Perunjang	0,00
4 Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	0,00
5 Koreksi Tambah	
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	-
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi ke komputer	-
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Reklas ke aset Lain-lain	-
5 Koreksi desimal	-
Saldo Akhir	296.902.382,91

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT EKSPLORASI
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan												-
4	Dinas Kesehatan	-	772.966.725,00		260.948,50								773.227.673,50
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata												-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupar												-
43	Kecamatan Empanang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		-	772.966.725,00	-	260.948,50	-	-	-	-	-	-	-	773.227.673,50

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		0,00
Penambahan		773.227.673,50
1	Belanja Modal	772.966.725,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	260.948,50
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		773.227.673,50

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT KESELAMATAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan												-
4	Dinas Kesehatan												-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									162.078.696,98			162.078.696,98
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata												-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja	33.339.900,00											33.339.900,00
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.466.539,69											33.466.539,69
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupar												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
43	Kecamatan Empanang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		66.806.439,69	-	-	-	-	-	-	-	162.078.696,98	-	-	228.885.136,67

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	66.806.439,69
Penambahan	162.078.696,98
1 Belanja Modal	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4 Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	162.078.696,98
5 Koreksi Tambah	
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	-
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi ke komputer	-
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Reklas ke aset Lain-lain	-
5 Koreksi desimal	-
Saldo Akhir	228.885.136,67

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - ALAT PERAGA
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	7.136.796.338,07		95.058.400,00				-17.668.000,00			0,02		7.214.186.738,09
4	Dinas Kesehatan												-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	199.853.980,57											199.853.980,57
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan	297.695.661,14											297.695.661,14
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup									37.274.254,90			37.274.254,90
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-
40	Kecamatan Selimbau												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupa												-
43	Kecamatan Empanang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semilau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		7.634.345.979,80	-	95.058.400,00	-	-	-	17.668.000,00	-	37.274.254,90	0,02	-	7.749.010.634,70

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		7.634.345.979,80
Penambahan		132.332.654,90
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	37.274.254,90
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	95.058.400,00
Pengurangan		(17.668.000,00)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	(17.668.000,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		7.749.010.634,70

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - RAMBU-RAMBU
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan												-
4	Dinas Kesehatan												-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.796.462,90									0,01		98.796.462,91
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata												-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan	17.354.017,98											17.354.017,98
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan	6.618.303.680,83											6.618.303.680,83
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupa												-
43	Kecamatan Empang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		6.734.454.161,71	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	6.734.454.161,72

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		6.734.454.161,71
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		0,01
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	0,01
Saldo Akhir		6.734.454.161,72

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - PERALATAN OLAHRAHA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	173.880.000,00											173.880.000,00
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	459.347.543,36											459.347.543,36
4	Dinas Kesehatan												-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata												-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupar												-
43	Kecamatan Empang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		633.227.543,36	-		-	-	-	-	-	-	-	-	633.227.543,36

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		633.227.543,36
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		633.227.543,36

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - BANGUNAN GEDUNG
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Penghapusan	Reklas dari KDP	Reklas Keluar/masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	42.283.638.741,06												42.283.638.741,06
2	Sekretariat DPRD	27.247.426.912,34												27.247.426.912,34
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	763.485.417.999,53	2.484.831.995,00						-1.189.153.448,10			(0,96)		764.781.096.545,47
4	Dinas Kesehatan	412.372.218.021,81	35.124.376.558,00		11.857.759,23				(736.568.853,95)		(5.145.425.068,85)			441.626.458.416,24
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.962.133.134,24	45.906.911.000,00		313.846,16				(185.287.911,00)	138.730.399.484,02	(24.323.737.599,92)			228.090.731.953,50
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	4.613.472.669,64							-214.981.460,14					4.398.491.209,50
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	15.513.799.940,74	179.816.800,00		99.325.979,00						71.064,91			15.793.013.784,65
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.176.562.571,09												9.176.562.571,09
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.346.322.940,67												1.346.322.940,67
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	1.385.010.071,51												1.385.010.071,51
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	31.469.083.913,91								79.864.500,00		2.884.844.500,00		34.433.792.913,91
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	30.457.212.125,93	184.746.976,00		2.940.090,89									30.644.899.192,82
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.252.121.335,76												12.252.121.335,76
14	Dinas Perikanan	15.076.869.052,39							-322.753.682,27					14.754.115.370,12
15	Inspektorat	1.637.812.180,71	199.842.063,00											1.837.654.243,71
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.222.721.000,00												1.222.721.000,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	28.381.788.145,21				107.907.000,00			- 4.456.954.470,63					24.032.740.674,58
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	5.904.525.057,55	146.807.689,73		8.160.000,00						(37.274.254,90)			6.022.218.492,38
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.783.484.465,87					-107.907.000,00							1.675.577.465,87
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.150.881.481,28												8.150.881.481,28
	Badan Perencanaan Daerah	2.960.352.640,80												2.960.352.640,80
21	Dinas Perhubungan	11.314.000.105,75	95.641.022,00						-182.561.677,53					11.227.079.450,22
22	Satuan Polisi Pamong Praja	350.000.000,00							-350.000.000,00					-
23	Badan Pengelola Perbatasan	-												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara	1.481.602.016,96												1.481.602.016,96
28	Kecamatan Putussibau Selatan	2.134.585.373,50												2.134.585.373,50
29	Kecamatan Bika	2.712.147.986,91												2.712.147.986,91
30	Kecamatan Kalis	1.901.264.521,59												1.901.264.521,59
31	Kecamatan Embaloh Hilir	1.845.645.102,02												1.845.645.102,02
32	Kecamatan Embaloh Hulu	889.267.948,43												889.267.948,43
33	Kecamatan Bunut Hilir	5.891.930.423,01												5.891.930.423,01
34	Kecamatan Bunut Hulu	5.020.760.649,52												5.020.760.649,52
35	Kecamatan Boyan Tanjung	888.748.858,45												888.748.858,45
36	Kecamatan Mentebah	2.983.656.824,68												2.983.656.824,68
37	Kecamatan Jongkong	3.293.389.227,50												3.293.389.227,50
38	Kecamatan Pengkadan	1.943.943.804,73												1.943.943.804,73
39	Kecamatan Hulu Gurung	3.862.060.813,30												3.862.060.813,30

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Penghapusan	Reklas dari KDP	Reklas Keluar/masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau	1.923.852.639,66												1.923.852.639,66
41	Kecamatan Badau	3.782.336.165,70												3.782.336.165,70
42	Kecamatan Batang Lupa	3.822.430.044,64												3.822.430.044,64
43	Kecamatan Empang	900.188.543,64												900.188.543,64
44	Kecamatan Puring Kencana	1.193.094.419,16												1.193.094.419,16
45	Kecamatan Semitau	3.668.462.791,81												3.668.462.791,81
46	Kecamatan Suhaid	1.208.050.862,56												1.208.050.862,56
47	Kecamatan Seberuang	2.327.446.462,17												2.327.446.462,17
48	Kecamatan Silat Hilir	3.719.828.595,21												3.719.828.595,21
49	Kecamatan Silat Hulu	2.522.879.206,80												2.522.879.206,80
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		1.556.264.427.789,74	84.322.974.103,73	-	122.597.675,28	107.907.000,00	- 107.907.000,00	-	7.638.261.503,62	138.810.263.984,02	- 29.506.365.858,76	2.884.844.499,04	-	1.745.260.480.689,43

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	1.556.264.498.854,71
Penambahan	226.248.587.263,03
1 Belanja Modal	84.322.974.103,73
2 Mutasi Masuk	107.907.000,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	122.597.675,28
4 Reklasifikasi antar rekening neraca/ KDP	138.810.263.984,02
5 Hibah dari Kementerian Perdagangan	2.884.844.500,00
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	(37.252.605.428,31)
1 Mutasi Keluar	(107.907.000,00)
2 Penghapusan	(7.638.261.503,62)
3 Reklasifikasi antar rekening neraca	-29.506.436.923,74
4 Reklas ke aset Lain-lain	-
5 Koreksi desimal	(0,95)
Saldo Akhir	1.745.260.480.689,43

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - MONUMEN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan												-
4	Dinas Kesehatan												-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									2.426.823.392,04			2.426.823.392,04
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	100.041.987,33											100.041.987,33
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	439.444.000,00											439.444.000,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
	Badan Perencanaan Daerah												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir	70.000.000,00											70.000.000,00
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah	106.681.282,98											106.681.282,98
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupar												-
43	Kecamatan Empanang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau	50.000.000,00											50.000.000,00
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir	201.711.104,96											201.711.104,96
49	Kecamatan Silat Hulu	174.602.000,00											174.602.000,00
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		1.142.480.375,27	-	-	-	-	-	-	-	2.426.823.392,04	-	-	3.569.303.767,31

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.142.480.375,27
Penambahan		2.426.823.392,04
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	2.426.823.392,04
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		3.569.303.767,31

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - MENARA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah												-
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan												-
4	Dinas Kesehatan												-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi												-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan												-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	354.843.751,24											354.843.751,24
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan												-
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah												-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
	Badan Perencanaan Daerah												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir												-
34	Kecamatan Bunut Hulu												-
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah												-
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke komputer	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupar												-
43	Kecamatan Empang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semitau												-
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu												-
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		354.843.751,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.843.751,24

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		354.843.751,24
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		354.843.751,24

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - TUGU TITIK KONTROL PRASASTI
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	908.633.376,83											908.633.376,83
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15.411.949.977,41	2.132.464.800,00										17.544.414.777,41
4	Dinas Kesehatan	2.162.870.055,18											2.162.870.055,18
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.742.582.601,86								(2.426.214.456,00)			4.316.368.145,86
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	1.119.701.357,19							-109.422.991,61				1.010.278.365,58
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	2.007.490.643,91											2.007.490.643,91
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	150.189.800,70											150.189.800,70
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	222.412.900,00								(680.000,00)			221.732.900,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	244.341.423,34											244.341.423,34
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	102.408.581,82											102.408.581,82
14	Dinas Perikanan												-
15	Inspektorat	25.000.000,00											25.000.000,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.775.000,00											109.775.000,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	553.569.638,60											553.569.638,60
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	211.600.000,00											211.600.000,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan	434.821.206,61											434.821.206,61
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan	125.000.000,00											125.000.000,00
29	Kecamatan Bika												-
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir												-
32	Kecamatan Embaloh Hulu												-
33	Kecamatan Bunut Hilir	94.870.000,00											94.870.000,00
34	Kecamatan Bunut Hulu	76.565.705,99											76.565.705,99
35	Kecamatan Boyan Tanjung												-
36	Kecamatan Mentebah	29.952.000,00											29.952.000,00
37	Kecamatan Jongkong												-
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung												-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau												-
41	Kecamatan Badau												-
42	Kecamatan Batang Lupa												-
43	Kecamatan Empang												-
44	Kecamatan Puring Kencana												-
45	Kecamatan Semtau	52.447.500,00											52.447.500,00
46	Kecamatan Suhaid												-
47	Kecamatan Seberuang												-
48	Kecamatan Silat Hilir												-
49	Kecamatan Silat Hulu	150.000.000,00											150.000.000,00
50	Badan Perencanaan Daerah												-
		30.936.110.705,48	2.132.464.800,00	-	-	-	-	-	109.422.991,61	2.426.894.456,00	-	-	30.532.329.121,83

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		30.936.110.705,48
Penambahan		2.132.535.864,98
1	Belanja Modal	2.132.464.800,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk	71.064,98
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(2.536.317.448,63)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	(2.426.894.456,00)
3	Penghapusan	(109.422.991,61)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	(1,02)
Saldo Akhir		30.532.329.121,83

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - JALAN DAN JEMBATAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Reklas Ke KDP	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	413.276.382,44											413.276.382,44
2	Sekretariat DPRD												-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	139.024.605,93											139.024.605,93
4	Dinas Kesehatan	11.070.084.403,40											11.070.084.403,40
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.118.491.090.605,70	59.258.110.017,00	-	561.104.647,28	3.973.565,24		-25.511.429,00	(234.639.000,00)	13.543.341.620,56	(225.428.718,98)		3.190.249.832.013,24
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	9.198.826.009,68											9.198.826.009,68
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.102.097.026,82											1.102.097.026,82
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.296.476.830,44											11.296.476.830,44
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik												-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan												-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	6.542.793.004,15											6.542.793.004,15
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	86.631.043,51											86.631.043,51
14	Dinas Perikanan	1.374.787.886,99							-925.699.591,99				449.128.295,00
15	Inspektorat												-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.055.319.503,00											13.055.319.503,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup												-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	59.897.000,00											59.897.000,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												-
21	Dinas Perhubungan												-
22	Satuan Polisi Pamong Praja												-
23	Badan Pengelola Perbatasan												-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												-
26	Badan Pendapatan Daerah												-
27	Kecamatan Putussibau Utara												-
28	Kecamatan Putussibau Selatan												-
29	Kecamatan Bika	353.208.139,03											353.208.139,03
30	Kecamatan Kalis												-
31	Kecamatan Embaloh Hilir	9.042.052.993,86											9.042.052.993,86
32	Kecamatan Embaloh Hulu	1.330.649.115,76											1.330.649.115,76
33	Kecamatan Bunut Hilir	4.228.677.619,31											4.228.677.619,31
34	Kecamatan Bunut Hulu	11.781.053.551,84											11.781.053.551,84
35	Kecamatan Boyan Tanjung	5.660.330.241,41											5.660.330.241,41
36	Kecamatan Mentebah	1.357.680.728,35											1.357.680.728,35
37	Kecamatan Jongkong	331.742.545,71											331.742.545,71
38	Kecamatan Pengkadan												-
39	Kecamatan Hulu Gurung	4.703.942.176,85											4.703.942.176,85

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	Reklas Ke KDP	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Penghapusan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklass ke aset lain-lain/aset tetap lainnya	saldo akhir	
40	Kecamatan Selimbau												-	
41	Kecamatan Badau												-	
42	Kecamatan Batang Lupar												-	
43	Kecamatan Empang	1.214.826.922,21											1.214.826.922,21	
44	Kecamatan Puring Kencana	14.329.821.749,38											14.329.821.749,38	
45	Kecamatan Semitau	357.355.174,15											357.355.174,15	
46	Kecamatan Suhaid	2.665.961.838,19											2.665.961.838,19	
47	Kecamatan Seberuang												-	
48	Kecamatan Silat Hilir	1.959.652.914,36											1.959.652.914,36	
49	Kecamatan Silat Hulu	3.586.120.147,69											3.586.120.147,69	
50	Badan Perencanaan Daerah												-	
		3.235.733.380.160,16	59.258.110.017,00	-	561.104.647,28	3.973.565,24	-	-	25.511.429,00	-	1.160.298.591,99	13.543.341.620,56	-	3.306.566.461.975,71

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	3.235.733.380.160,16
Penambahan	72.805.425.202,80
1 Belanja Modal	59.258.110.017,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	3.973.565,24
4 Reklasifikasi antar rekening	13.543.341.620,56
5 Koreksi Tambah	
6 Reklas BLUD	
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	(1.972.343.387,25)
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi antar rekening	
3 Penghapusan	(1.160.298.591,99)
4 Reklas ke KDP	(561.104.647,28)
5 Koreksi ke Beban	(25.511.429,00)
7 Koreksi penimbunan tanah	(225.428.718,98)
Saldo Akhir	3.306.566.461.975,71

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - BANGUNAN AIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke Jalan Jembatan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah													-
2	Sekretariat DPRD													-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan													-
4	Dinas Kesehatan	8.334.857.190,82	593.250.000,00		200.277,31						(99.400.000,00)			8.828.907.468,13
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.130.672.104,95	601.000.000,00		9.792.000,03			-38.686.437,40	(111.664.044,00)	2.156.552.184,25	(306.907.445,09)	99.400.000,00		157.540.158.362,74
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	179.556.299,28												179.556.299,28
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan													-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	59.298.613,17												59.298.613,17
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan	7.211.178.279,38												7.211.178.279,38
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah													-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
	Badan Perencanaan Daerah													-
21	Dinas Perhubungan	6.530.984.454,67											(264.985.000,00)	6.265.999.454,67
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	424.609.249,92												424.609.249,92
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika	54.653.239,05												54.653.239,05
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir	1.308.531.032,30												1.308.531.032,30
34	Kecamatan Bunut Hulu	1.067.729.696,24												1.067.729.696,24
35	Kecamatan Boyan Tanjung	216.768.961,82												216.768.961,82
36	Kecamatan Mentebah	856.369.884,91												856.369.884,91
37	Kecamatan Jongkong	292.826.152,22												292.826.152,22
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke Jalan Jembatan	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir	
40	Kecamatan Selimbau													-	
41	Kecamatan Badau													-	
42	Kecamatan Batang Lupar													-	
43	Kecamatan Empanang													-	
44	Kecamatan Puring Kencana	331.342.020,18												331.342.020,18	
45	Kecamatan Semitau													-	
46	Kecamatan Suhaid	1.553.636.836,52												1.553.636.836,52	
47	Kecamatan Seberuang													-	
48	Kecamatan Silat Hilir													-	
49	Kecamatan Silat Hulu													-	
50	Badan Perencanaan Daerah													-	
		183.553.014.015,43	1.194.250.000,00	-	9.992.277,34	-	-	-	38.686.437,40	- 111.664.044,00	2.156.552.184,25	- 406.307.445,09	99.400.000,00	- 264.985.000,00	186.191.565.550,53

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	183.553.014.015,43
Penambahan	3.460.194.461,59
1 Belanja Modal	1.194.250.000,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	9.992.277,34
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	2.156.552.184,25
5 Koreksi Tambah	99.400.000,00
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	(821.642.926,49)
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	(111.664.044,00)
3 Koreksi ke Beban LO	(38.686.437,40)
4 Penghapusan	(264.985.000,00)
5 Koreksi lebih	(406.307.445,09)
Saldo Akhir	186.191.565.550,53

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - INSTALASI
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Reklas Keluar	Kurang/lebih saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	242.871.150,00												242.871.150,00
2	Sekretariat DPRD	282.090.375,00												282.090.375,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan													-
4	Dinas Kesehatan	19.103.374.657,33	290.000.000,00		97.902,09									19.393.472.559,42
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.067.082.509,95	508.685.000,00							242.520.902,71	(508.685.000,00)	(0,03)		34.329.603.412,63
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	91.105.841,42												91.105.841,42
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	79.580.379,04												79.580.379,04
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	201.371.039,45												201.371.039,45
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan													-
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.042.636.308,00												2.042.636.308,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
	Badan Perencanaan Daerah													-
21	Dinas Perhubungan	4.737.787.203,23											(222.294.402,82)	4.515.492.800,41
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah	79.400.680,00												79.400.680,00
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu									632.504.326,46				632.504.326,46
33	Kecamatan Bunut Hilir													-
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung	857.709.389,58												857.709.389,58
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Reklas Keluar	Kurang/lebih saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupa													-
43	Kecamatan Empanang	255.333.365,41												255.333.365,41
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		62.060.342.898,41	798.685.000,00	-	97.902,09	-	-	-	-	875.025.229,17	- 508.685.000,00	- 0,03	- 222.294.402,82	63.003.171.626,82

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	62.060.342.898,41
Penambahan	1.673.808.131,26
1 Belanja Modal	798.685.000,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	97.902,09
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	875.025.229,17
5 Koreksi Tambah	
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	(730.979.402,85)
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	(508.685.000,00)
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Penghapusan	(222.294.402,82)
5 Koreksi lebih	(0,03)
Saldo Akhir	63.003.171.626,82

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas keluar	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	380.902.000,00												380.902.000,00
2	Sekretariat DPRD	179.621.326,66												179.621.326,66
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	159.771.920,00												159.771.920,00
4	Dinas Kesehatan	2.019.606.368,42												2.019.606.368,42
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.080.678.564,42	89.985.000,00		544.000,00					1.868.245.389,08				96.039.452.953,50
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	83.519.832,39												83.519.832,39
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	103.287.000,00												103.287.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	54.912.000,00												54.912.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	438.894.302,34												438.894.302,34
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata													-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	65.669.819,41												65.669.819,41
14	Dinas Perikanan	910.914.297,01												910.914.297,01
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.318.444.200,00												5.318.444.200,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	75.882.000,00												75.882.000,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.017.881,70												36.017.881,70
21	Badan Perencanaan Daerah													-
22	Dinas Perhubungan													-
23	Satuan Polisi Pamong Praja	114.961.000,00											(114.961.000,00)	-
24	Badan Pengelola Perbatasan	14.700.000,00												14.700.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
27	Badan Pendapatan Daerah													-
28	Kecamatan Putussibau Utara													-
29	Kecamatan Putussibau Selatan													-
30	Kecamatan Bika													-
31	Kecamatan Kalis													-
32	Kecamatan Embaloh Hilir													-
33	Kecamatan Embaloh Hulu	632.504.326,46							-632.504.326,46					-
34	Kecamatan Bunut Hilir													-
35	Kecamatan Bunut Hulu													-
36	Kecamatan Boyan Tanjung													-
37	Kecamatan Mentebah													-
38	Kecamatan Jongkong													-
39	Kecamatan Pengkadan													-
40	Kecamatan Hulu Gurung	1.152.488.885,42												1.152.488.885,42
41	Kecamatan Selimbau													-
42	Kecamatan Badau													-
43	Kecamatan Batang Lupar													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas keluar	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
43	Kecamatan Empang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir	2.820.653.813,31												2.820.653.813,31
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		108.643.429.537,54	89.985.000,00	-	544.000,00	-	-	-	632.504.326,46	1.868.245.389,08	-	-	114.961.000,00	109.854.738.600,16

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		108.643.429.537,52
Penambahan		1.958.774.389,12
1	Belanja Modal	89.985.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	544.000,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	1.868.245.389,08
5	Koreksi Tambah	0,04
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(747.465.326,46)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(632.504.326,46)
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(114.961.000,00)
5	Koreksi lebih	-
Saldo Akhir		109.854.738.600,18

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - BUKU PERPUSTAKAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah													-
2	Sekretariat DPRD	431.105.086,01												431.105.086,01
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	26.121.247.238,12	14.660.861.299,00	5.668.071.101,00				-5.108.492.351,00		(11.265.134.599,00)		3.499.999,99		30.080.052.688,11
4	Dinas Kesehatan	10.850.000,00												10.850.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.260.732.014,68												1.260.732.014,68
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	2.000.000,00												2.000.000,00
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	12.732.000,00												12.732.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan													-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	293.373.000,00												293.373.000,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	360.400.182,30												360.400.182,30
14	Dinas Perikanan	110.689.086,70												110.689.086,70
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	536.000,00												536.000,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.000.000,00												1.000.000,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
21	Dinas Perhubungan													-
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis	100.000,00												100.000,00
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir													-
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupar													-
43	Kecamatan Empang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaud													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		28.604.764.607,81	14.660.861.299,00	5.668.071.101,00	-	-	-	5.108.492.351,00	-	11.265.134.599,00	-	3.499.999,99	-	32.563.570.057,80

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	28.604.764.607,81
Penambahan	20.332.432.399,99
1 Belanja Modal	14.660.861.299,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5 Koreksi Tambah	3.499.999,99
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	5.668.071.101,00
Pengurangan	(16.373.626.950,00)
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	(11.265.134.599,00)
3 Koreksi ke Beban LO	(5.108.492.351,00)
4 Penghapusan	-
5 Koreksi lebih	-
Saldo Akhir	32.563.570.057,80

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - BARANG BERCORAK SENI DAN KEBUDAYAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah													-
2	Sekretariat DPRD													-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.257.501.551,13		40.135.000,00				-12.354.000,00		5.805.000,00				1.291.087.551,13
4	Dinas Kesehatan													-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan													-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan													-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	541.589.572,77												541.589.572,77
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan													-
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah													-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
	Badan Perencanaan Daerah													-
21	Dinas Perhubungan													-
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir	168.500.000,00												168.500.000,00
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupar													-
43	Kecamatan Empanang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang	4.000.000,00												4.000.000,00
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		1.971.591.123,90	-	40.135.000,00	-	-	-	12.354.000,00	-	5.805.000,00	-	-	-	2.005.177.123,90

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	1.971.591.123,90
Penambahan	40.135.000,00
1 Belanja Modal	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5 Koreksi Tambah	0,00
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	40.135.000,00
Pengurangan	(6.549.000,00)
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	5.805.000,00
3 Koreksi ke Beban LO	(12.354.000,00)
4 Penghapusan	-
5 Koreksi lebih	-
Saldo Akhir	2.005.177.123,90

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - HEWAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah													-
2	Sekretariat DPRD													-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan													-
4	Dinas Kesehatan													-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	171.049.865,61												171.049.865,61
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan													-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata													-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan													-
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah													-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
	Badan Perencanaan Daerah													-
21	Dinas Perhubungan													-
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir													-
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupa													-
43	Kecamatan Empanang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		171.049.865,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.049.865,61

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	171.049.865,61
Penambahan	0,00
1 Belanja Modal	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5 Koreksi Tambah	0,00
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	-
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Penghapusan	-
5 Koreksi lebih	-
Saldo Akhir	171.049.865,61

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - BIOTA PERAIRAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	42.815.886,40												42.815.886,40
2	Sekretariat DPRD													-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan													-
4	Dinas Kesehatan													-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													-
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan													-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan													-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata													-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan	1.795.193.664,04												1.795.193.664,04
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah													-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
	Badan Perencanaan Daerah													-
21	Dinas Perhubungan													-
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir													-
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupar													-
43	Kecamatan Empanang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		1.838.009.550,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.838.009.550,44

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.838.009.550,44
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	-
5	Koreksi lebih	-
Saldo Akhir		1.838.009.550,44

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - TANAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	102.150.000,00												102.150.000,00
2	Sekretariat DPRD													-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan													-
4	Dinas Kesehatan													-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.097.500,00												15.097.500,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan													-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik													-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan													-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata													-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan													-
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah													-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
	Badan Perencanaan Daerah													-
21	Dinas Perhubungan													-
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir													-
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Kurang saji saldo awal	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupa													-
43	Kecamatan Empanang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		117.247.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.247.500,00

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	117.247.500,00
Penambahan	0,00
1 Belanja Modal	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5 Koreksi Tambah	0,00
6 Reklas BLUD	0,00
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	-
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Penghapusan	-
5 Koreksi lebih	-
Saldo Akhir	117.247.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas dari KDP ke aset tetap	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah													-
2	Sekretariat DPRD													-
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	99.894.450,00												99.894.450,00
4	Dinas Kesehatan	79.415.363.167,73							5.073.470.964,00					84.488.834.131,73
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.672.506.369,10							561.104.647,28			(147.867.458.147,23)		28.366.152.869,15
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	353.010.262,38												353.010.262,38
7	Dinas Pertanian Dan Pangan													-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	44.880.000,00												44.880.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	79.864.500,00										(79.864.500,00)		-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	74.647.821,27												74.647.821,27
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan													-
15	Inspektorat													-
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah													-
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup													-
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													-
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													-
	Badan Perencanaan Daerah	12.658.158,41												12.658.158,41
21	Dinas Perhubungan	1.190.874.504,65												1.190.874.504,65
22	Satuan Polisi Pamong Praja													-
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.088.000,00												47.088.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													-
26	Badan Pendapatan Daerah													-
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan													-
29	Kecamatan Bika													-
30	Kecamatan Kalis													-
31	Kecamatan Embaloh Hilir													-
32	Kecamatan Embaloh Hulu													-
33	Kecamatan Bunut Hilir													-
34	Kecamatan Bunut Hulu													-
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung													-

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas dari KDP ke aset tetap	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupar													-
43	Kecamatan Empang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid													-
47	Kecamatan Seberuang													-
48	Kecamatan Silat Hilir													-
49	Kecamatan Silat Hulu													-
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		256.990.787.233,54	-	-	-	-	-	-	5.634.575.611,28	-	-	147.947.322.647,23	-	114.678.040.197,59

Uraian	Saldo 2025
Saldo Awal	256.990.787.233,54
Penambahan	5.634.575.611,28
1 Belanja Modal	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00
3 Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4 Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5 Koreksi Tambah	
6 Kapitalisasi KDP	5.634.575.611,28
7 Reklas BOSP	0,00
Pengurangan	(147.947.322.647,23)
1 Mutasi Keluar	-
2 Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3 Koreksi ke Beban LO	-
4 Penghapusan	-
5 Koreksi ke Aset tetap/dikapitalisasi	(147.947.322.647,23)
Saldo Akhir	114.678.040.197,59

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MUTASI ASET TLAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas dari KDP ke aset tetap	Penghapusan	saldo akhir
1	Sekretariat Daerah	23.461.998.578,90											(12.373.264.022,14)	11.088.734.556,76
2	Sekretariat DPRD	143.797.021,77												143.797.021,77
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	59.123.254.917,93												59.123.254.917,93
4	Dinas Kesehatan	6.123.050.519,91												6.123.050.519,91
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.783.891.410,81												149.783.891.410,81
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi													-
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	4.962.106.433,86												4.962.106.433,86
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	839.617.466,86								148.150.323,58				987.767.790,44
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	576.131.420,06											(17.495.000,00)	558.636.420,06
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	17.495.000,00												17.495.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8.373.848,94												8.373.848,94
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata													-
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-
14	Dinas Perikanan	404.704.611,64												404.704.611,64
15	Inspektorat	110.892.500,00												110.892.500,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	44.627.348.650,44								511.562.103,01	(70.000.000,00)		(32.259.500,00)	45.036.651.253,45
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	256.534.751,10												256.534.751,10
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	118.718.969,68												118.718.969,68
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.061.787,49												64.061.787,49
	Badan Perencanaan Daerah													-
21	Dinas Perhubungan	2.703.308.250,56								1.001.650.196,61				3.704.958.447,17
22	Satuan Polisi Pamong Praja	707.458.720,07								8.651.712,73				716.310.432,80
23	Badan Pengelola Perbatasan													-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	131.845.736,07												131.845.736,07
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.153.992,40												37.153.992,40
26	Badan Pendapatan Daerah	94.422.850,20												94.422.850,20
27	Kecamatan Putussibau Utara													-
28	Kecamatan Putussibau Selatan	9.202.069,42								15.729.800,00				24.931.869,42
29	Kecamatan Bika	77.888.101,77												77.888.101,77
30	Kecamatan Kalis	19.900.000,00												19.900.000,00
31	Kecamatan Embaloh Hilir	48.847.700,00												48.847.700,00
32	Kecamatan Embaloh Hulu	204.285.000,23												204.285.000,23
33	Kecamatan Bunut Hilir	16.000.000,00											(16.000.000,00)	-
34	Kecamatan Bunut Hulu	50.483.800,00												50.483.800,00
35	Kecamatan Boyan Tanjung													-
36	Kecamatan Mentebah													-
37	Kecamatan Jongkong													-
38	Kecamatan Pengkadan													-
39	Kecamatan Hulu Gurung	84.470.000,00												84.470.000,00

NO	NAMA OPD	saldo awal	Belanja Modal	BLUD/BOP/BOS	Atribusi	Mutasi masuk	mutasi keluar	Koreksi ke beban	Reklas ke KDP	Reklas masuk antar rekening	Koreksi kurang/Tambah	Reklas dari KDP ke aset tetap	Penghapusan	saldo akhir
40	Kecamatan Selimbau													-
41	Kecamatan Badau													-
42	Kecamatan Batang Lupar													-
43	Kecamatan Emapanang													-
44	Kecamatan Puring Kencana													-
45	Kecamatan Semitau													-
46	Kecamatan Suhaid	55.549.250,00								12.550.000,00				68.099.250,00
47	Kecamatan Seberuang	36.971.500,00												36.971.500,00
48	Kecamatan Silat Hilir	76.669.718,56												76.669.718,56
49	Kecamatan Silat Hulu	145.173.324,58												145.173.324,58
50	Badan Perencanaan Daerah													-
		295.121.607.903,25	-	-	-	-	-	-	-	1.698.494.135,93	- 70.000.000,00	-	- 12.439.018.522,14	284.311.083.517,04

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		295.121.607.903,25
Penambahan		1.698.494.135,93
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	1.698.494.135,93
5	Koreksi Tambah	
6	Kapitalisasi KDP	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(12.509.018.522,14)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(12.439.018.522,14)
5	Koreksi lebih catat	(70.000.000,00)
Saldo Akhir		284.311.083.517,04

No.	Nama WP	Periode	Ketetapan (Rp)	Denda (Rp)	Penerimaan (Rp)	Jmlh Bln	Tarif/Bln (Rp)	Bulan lebih (Rp)	Diterima dimuka
1	VRF	Feb 2025 - Jan	1.879.200,00	-	1.879.200,00	11	170.836,36	1,00	170.836,36
2	PGJ	Okt 2024 - Sep	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09		-
3	PGJ	Okt 2024 - Sep	504.000,00	-	504.000,00	11	45.818,18		-
4	PWA	Des 2024 - Nop	918.720,00	-	918.720,00	11	83.520,00		-
5	PWA	Des 2024 - Nop	756.000,00	-	756.000,00	11	68.727,27		-
6	PWA	Des 2024 - Nop	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09		-
7	PWA	Des 2024 - Nop	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09		-
8	PWA	Des 2024 - Nop	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09		-
9	FNA	Feb 2025 - Feb	2.505.600,00	-	2.505.600,00	12	208.800,00	2,00	417.600,00
10	FNA	Mar 2025 - Mar	1.879.200,00	-	1.879.200,00	12	156.600,00	3,00	469.800,00
11	PTI	Okt 2024 - Sep	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09		-
12	IMD	Feb 2025 - Jan	420.000,00	-	420.000,00	11	38.181,82	1,00	38.181,82
13	IMD	Feb 2025 - Jan	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	1,00	76.363,64
14	IMD	Feb 2025 - Jan	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	1,00	79.090,91
15	IMD	Feb 2025 - Jan	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	1,00	76.363,64
16	IMD	Feb 2025 - Jan	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	1,00	76.363,64
17	IMD	Feb 2025 - Jan	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	1,00	76.363,64
18	IMD	Feb 2025 - Jan	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	1,00	76.363,64
19	IMD	Feb 2025 - Jan	2.177.280,00	-	2.177.280,00	11	197.934,55	1,00	197.934,55
20	IMD	Feb 2025 - Jan	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	1,00	76.363,64
21	IMD	Mar 2025 - Feb	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	2,00	114.545,45
22	IMD	Mar 2025 - Feb	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	2,00	114.545,45
23	IMD	Mar 2025 - Feb	652.500,00	-	652.500,00	11	59.318,18	2,00	118.636,36
24	OID	Jan 2025 - Jan	5.184.000,00	-	5.184.000,00	12	432.000,00	11,00	4.752.000,00
25	HGP	Mar 2025 - Mar	16.704.000,00	-	16.704.000,00	12	1.392.000,00	3,00	4.176.000,00
26	PSA	Mar 2025 - Feb	201.600,00	-	201.600,00	11	18.327,27	2,00	36.654,55
27	PSA	Mar 2025 - Feb	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	2,00	272.709,82
28	PSA	Mar 2025 - Feb	201.600,00	-	201.600,00	11	18.327,27	2,00	36.654,55
29	PSA	Mar 2025 - Feb	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	2,00	272.709,82
30	PSA	Mar 2025 - Feb	201.600,00	-	201.600,00	11	18.327,27	2,00	36.654,55
31	PSA	Mar 2025 - Feb	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	2,00	272.709,82
32	PSA	Mar 2025 - Feb	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	2,00	272.709,82
33	PSA	Mar 2025 - Feb	201.600,00	-	201.600,00	11	18.327,27	2,00	36.654,55
34	PSA	Mar 2025 - Feb	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	2,00	272.709,82
35	PSA	Mar 2025 - Feb	201.600,00	-	201.600,00	11	18.327,27	2,00	36.654,55
36	PSA	Mar 2025 - Feb	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	2,00	272.709,82
37	HFS	Mar 2025 - Feb	231.517,44	-	231.517,44	11	21.047,04	2,00	42.094,08
38	HFS	Mar 2025 - Feb	216.483,84	-	216.483,84	11	19.680,35	2,00	39.360,70
39	JP	Mei 2025 - Apr	668.160,00	-	668.160,00	11	60.741,82	4,00	242.967,27
40	UML	Mei 2025 - Apr	2.283.750,00	-	2.283.750,00	11	207.613,64	4,00	830.454,55
41	OID	Apr 2025 - Mar	4.752.000,00	-	4.752.000,00	11	432.000,00	3,00	1.296.000,00
42	AA	Mei 2025 - Apr	601.344,00	-	601.344,00	11	54.667,64	4,00	218.670,55
43	AAC	Mei 2025 - Apr	793.440,00	-	793.440,00	11	72.130,91	4,00	288.523,64
44	PTH	Jun 2025 - Mei	939.600,00	-	939.600,00	11	85.418,18	5,00	427.090,91
45	EKA	Feb 2025 - Jan	1.252.800,00	37.584,00	1.290.384,00	11	117.307,64	1,00	117.307,64
46	HGP	Jun 2025 - Jun	2.851.200,00	-	2.851.200,00	12	237.600,00	6,00	1.425.600,00
47	PBK	Jun 2025 - Mei	403.200,00	-	403.200,00	11	36.654,55	5,00	183.272,73
48	PBK	Jun 2025 - Mei	403.200,00	-	403.200,00	11	36.654,55	5,00	183.272,73
49	PBK	Jun 2025 - Mei	403.200,00	-	403.200,00	11	36.654,55	5,00	183.272,73
50	PBK	Jun 2025 - Mei	417.600,00	-	417.600,00	11	37.963,64	5,00	189.818,18
51	PBK	Jun 2025 - Mei	790.272,00	-	790.272,00	11	71.842,91	5,00	359.214,55
52	PBK	Jun 2025 - Mei	453.600,00	-	453.600,00	11	41.236,36	5,00	206.181,82
53	BSI	Jun 2025 - Mei	219.240,00	-	219.240,00	11	19.930,91	5,00	99.654,55
54	BSI	Jun 2025 - Mei	548.100,00	-	548.100,00	11	49.827,27	5,00	249.136,36
55	BSI	Jun 2025 - Mei	835.200,00	-	835.200,00	11	75.927,27	5,00	379.636,36
56	BSI	Jun 2025 - Mei	2.192.400,00	-	2.192.400,00	11	199.309,09	5,00	996.545,45
57	PWG	Jun 2025 - Mei	835.200,00	-	835.200,00	11	75.927,27	5,00	379.636,36
58	IMD	Jun 2025 - Mei	2.352.000,00	-	2.352.000,00	11	213.818,18	5,00	1.069.090,91
59	PDS	Jul 2025 - Jul 2026	1.135.296,00	-	1.135.296,00	12	94.608,00	7,00	662.256,00
60	EKA	Mei 2025 - Mei	939.600,00	18.792,00	958.392,00	12	79.866,00	5,00	399.330,00
61	PKJ	Jul 2025 - Jul 2026	5.806.080,00	-	5.806.080,00	12	483.840,00	7,00	3.386.880,00
62	PSA	Jun 2025 - Mei	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	5,00	681.774,55
63	PSA	Jun 2025 - Mei	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	5,00	681.774,55
64	PSA	Jun 2025 - Mei	322.560,00	-	322.560,00	11	29.323,64	5,00	146.618,18
65	PSA	Jun 2025 - Mei	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	5,00	681.774,55
66	PSA	Jun 2025 - Mei	322.560,00	-	322.560,00	11	29.323,64	5,00	146.618,18
67	PSA	Jul 2025 - Jun	1.499.904,00	-	1.499.904,00	12	124.992,00	6,00	749.952,00
68	PSA	Jul 2025 - Jun	322.560,00	-	322.560,00	12	26.880,00	6,00	161.280,00
69	PSA	Jul 2025 - Jun	1.499.904,00	-	1.499.904,00	12	124.992,00	6,00	749.952,00
70	PSA	Jul 2025 - Jun	322.560,00	-	322.560,00	12	26.880,00	6,00	161.280,00
71	PSA	Jul 2025 - Jun	1.499.904,00	-	1.499.904,00	12	124.992,00	6,00	749.952,00
72	PSA	Jul 2025 - Jun	322.560,00	-	322.560,00	12	26.880,00	6,00	161.280,00
73	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00
74	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00
75	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00
76	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00
77	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00
78	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00
79	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00
80	IMD	Jul 2025 - Jun	840.000,00	-	840.000,00	12	70.000,00	6,00	420.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PID85285.

303.750,00
303.750,00

No.	Nama WP	Periode	Ketetapan (Rp)	Denda (Rp)	Penerimaan (Rp)	Jmlh Bln	Tarif/Bln (Rp)	Bulan lebih (Rp)	Diterima dimuka
83	IMD	Jul 2025 - Jun	405.000,00	-	405.000,00	12	33.750,00	6,00	202.500,00
84	IMD	Jul 2025 - Jun	810.000,00	-	810.000,00	12	67.500,00	6,00	405.000,00
85	PEC	Jul 2025 - Jul 2026	1.710.720,00	-	1.710.720,00	12	142.560,00	7,00	997.920,00
86	PPB	Agu 2025 - Agu	5.987.520,00	-	5.987.520,00	12	498.960,00	8,00	3.991.680,00
87	PHB	Jul 2025 - Jul 2026	5.927.040,00	-	5.927.040,00	12	493.920,00	7,00	3.457.440,00
88	YAM	Agu 2025 - Agu	1.814.400,00	-	1.814.400,00	12	151.200,00	8,00	1.209.600,00
89	YAM	Okt 2025 - Sep	1.512.000,00	-	1.512.000,00	11	137.454,55	9,00	1.237.090,91
90	HSA	Sep 2025 - Agu	2.419.200,00	-	2.419.200,00	11	219.927,27	8,00	1.759.418,18
91	IMD	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
92	IMD	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
93	IMD	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
94	IMD	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
95	IMD	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
96	IMD	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
97	IMD	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
98	IMD	Agu 2025 - Jul	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	7,00	400.909,09
99	IMD	Agu 2025 - Jul	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	7,00	400.909,09
100	IMD	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
101	IMD	Agu 2025 - Jul	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	7,00	400.909,09
102	JJ	Okt 2025 - Sep	145.152,00	-	145.152,00	11	13.195,64	9,00	118.760,73
103	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
104	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
105	TWA	Agu 2025 - Jul	1.680.000,00	-	1.680.000,00	11	152.727,27	7,00	1.069.090,91
106	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
107	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
108	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
109	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
110	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
111	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
112	TWA	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
113	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
114	TWA	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
115	TWA	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
116	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
117	TWA	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
118	TWA	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
119	TWA	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
120	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
121	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
122	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
123	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
124	TWA	Agu 2025 - Jul	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	7,00	553.636,36
125	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
126	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
127	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
128	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
129	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
130	TWA	Agu 2025 - Jul	435.000,00	-	435.000,00	11	39.545,45	7,00	276.818,18
131	TWA	Agu 2025 - Jul	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	7,00	400.909,09
132	TWA	Agu 2025 - Jul	1.260.000,00	-	1.260.000,00	11	114.545,45	7,00	801.818,18
133	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
134	TWA	Agu 2025 - Jul	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	7,00	534.545,45
135	JP	Okt 2025 - Sep	501.120,00	-	501.120,00	11	45.556,36	9,00	410.007,27
136	PGJ	Okt 2025 - Sep	504.000,00	-	504.000,00	11	45.818,18	9,00	412.363,64
137	PGJ	Okt 2025 - Sep	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09	9,00	659.781,82
138	PGJ	Okt 2025 - Sep	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09	9,00	659.781,82
139	PGJ	Okt 2025 - Sep	504.000,00	-	504.000,00	11	45.818,18	9,00	412.363,64
140	PBB	Agu 2025 - Agu	5.644.800,00	56.448,00	5.701.248,00	12	475.104,00	8,00	3.800.832,00
141	PGB	Agu 2025 - Agu	7.056.000,00	70.560,00	7.126.560,00	12	593.880,00	8,00	4.751.040,00
142	INA	Sep 2025 - Sep	2.088.000,00	-	2.088.000,00	12	174.000,00	9,00	1.566.000,00
143	INA	Okt 2025 - Sep	8.352.000,00	-	8.352.000,00	11	759.272,73	9,00	6.833.454,55
144	IMD	Sep 2025 - Agu	3.132.000,00	-	3.132.000,00	11	284.727,27	8,00	2.277.818,18
145	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
146	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
147	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
148	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
149	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
150	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
151	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
152	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
153	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
154	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
155	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
156	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
157	IMD	Okt 2025 - Sep	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	9,00	515.454,55
158	IMD	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
159	IMD	Okt 2025 - Sep	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	9,00	515.454,55
160	TWA	Okt 2025 - Sep	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	9,00	515.454,55
161	TWA	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
162	TWA	Okt 2025 - Sep	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	9,00	687.272,73
163	HNS	Okt 2025 - Sep	806.400,00	-	806.400,00	11	73.309,09	9,00	659.781,82
164	VSC	Nop 2025 - Okt	250.560,00	-	250.560,00	11	22.778,18	10,00	227.781,82
165	VSC	Nop 2025 - Okt	668.160,00	-	668.160,00	11	60.741,82	10,00	607.418,18

No.	Nama WP	Periode	Ketetapan (Rp)	Denda (Rp)	Penerimaan (Rp)	Jmlh Bln	Tarif/Bln (Rp)	Bulan lebih (Rp)	Diterima dimuka
168	VRF	Nop 2025 - Okt	1.181.250,00	-	1.181.250,00	11	107.386,36	10,00	1.073.863,64
169	STC	Sep 2025 - Agu	738.692,64	-	738.692,64	11	67.153,88	8,00	537.231,01
170	IMD	Des 2025 - Nop	1.392.000,00	-	1.392.000,00	11	126.545,45	11,00	1.392.000,00
171	IMD	Des 2025 - Nop	504.000,00	-	504.000,00	11	45.818,18	11,00	504.000,00
172	IMD	Des 2025 - Nop	504.000,00	-	504.000,00	11	45.818,18	11,00	504.000,00
173	IMD	Des 2025 - Nop	504.000,00	-	504.000,00	11	45.818,18	11,00	504.000,00
174	IMD	Des 2025 - Nop	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	11,00	870.000,00
175	IMD	Des 2025 - Nop	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	11,00	630.000,00
176	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
177	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
178	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
179	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
180	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
181	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
182	IMD	Des 2025 - Nop	870.000,00	-	870.000,00	11	79.090,91	11,00	870.000,00
183	IMD	Des 2025 - Nop	348.000,00	-	348.000,00	11	31.636,36	11,00	348.000,00
184	IMD	Des 2025 - Nop	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	11,00	630.000,00
185	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
186	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
187	IMD	Des 2025 - Nop	630.000,00	-	630.000,00	11	57.272,73	11,00	630.000,00
188	IMD	Des 2025 - Nop	1.392.000,00	-	1.392.000,00	11	126.545,45	11,00	1.392.000,00
189	IMD	Des 2025 - Nop	840.000,00	-	840.000,00	11	76.363,64	11,00	840.000,00
190	ISB	Des 2025 - Nop	504.000,00	-	504.000,00	11	45.818,18	11,00	504.000,00
191	JSJ	Des 2025 - Nop	1.890.000,00	-	1.890.000,00	11	171.818,18	11,00	1.890.000,00
192	PSA	Des 2025 - Nop	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	11,00	1.499.904,00
193	PSA	Des 2025 - Nop	322.560,00	-	322.560,00	11	29.323,64	11,00	322.560,00
194	PSA	Des 2025 - Nop	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	11,00	1.499.904,00
195	PSA	Des 2025 - Nop	322.560,00	-	322.560,00	11	29.323,64	11,00	322.560,00
196	PSA	Des 2025 - Nop	1.499.904,00	-	1.499.904,00	11	136.354,91	11,00	1.499.904,00
197	PSA	Des 2025 - Nop	322.560,00	-	322.560,00	11	29.323,64	11,00	322.560,00
198	PUK	Des 2025 - Des	5.806.080,00	-	5.806.080,00	12	483.840,00	12,00	5.806.080,00
199	AWD	Nop 2025 - Okt	213.811,20	-	213.811,20	11	19.437,38	10,00	194.373,82
200	AWM	Nop 2025 - Okt	213.811,20	-	213.811,20	11	19.437,38	10,00	194.373,82
J U M L A H			242.544.498,72	183.384,00	242.727.882,72		21.400.998,97		141.040.241,39



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025**



Nomor : 23B/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Ahmad Yani Pontianak**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
DI PUTUSSIBAU**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DI PONTIANAK**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1
BAB I	3
A. Belanja	3
1. Pembayaran Belanja Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 sebesar Rp223.736.960,00	3
2. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 sebesar Rp52.222.438,00.....	6
3. Pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non Personel atas Enam Paket Pekerjaan Jasa Konsultan pada DPUPR Tidak Sesuai Dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sebesar Rp64.257.400,00	7
4. Volume Pekerjaan, Perhitungan Harga Satuan Timpang, dan Spesifikasi Hasil Pekerjaan pada DPUPR dan DKPPKB Tidak Sesuai Kontrak Pengadaan Pekerjaan sebesar Rp2.002.410.000,00	11
5. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda pada Empat Paket Pengadaan dan Pekerjaan Konstruksi di Dua SKPD sebesar Rp62.612.000,00	20
6. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembelian Sembako Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 sebesar Rp354.002.875,00	25
B. Aset	28
1. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Enam SKPD Belum Sepenuhnya Memadai.....	28
2. Penagihan dan Penghapusan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 Berlarut-larut dan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	31
3. Penyelesaian Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uncak Kapuas berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) dari Pemerintah Pusat Berlarut-larut	34
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai	37
5. Penyelesaian Pelepasan dan/atau Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp284.311.083.517,04 dan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.987.894.004,00 Berlarut-larut	47
BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA	54

LAMPIRAN
DAFTAR SINGKATAN
RENCANA AKSI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

ii

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PID85285.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025.....	3
Tabel 1.2 Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS.....	3
Tabel 1.3 Rincian Belanja BBM yang Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban.....	6
Tabel 1.4 Daftar Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi DPUPR.....	8
Tabel 1.5 Kekurangan Volume, Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Timpang, dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Per Uraian Belanja.....	11
Tabel 1.6 Kekurangan Volume dan Selisih Harga Satuan Timpang atas BM GB pada DPUPR.....	12
Tabel 1.7 Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas BM JIJ pada DPUPR.....	13
Tabel 1.8 Jenis Pekerjaan Atas Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.....	15
Tabel 1.9 Rincian Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Hibah.....	16
Tabel 1.10 Kekurangan Penerimaan Denda Keterlambatan per Uraian Belanja.....	20
Tabel 1.11 Kekurangan Penerimaan Denda Keterlambatan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Disdikbud.....	21
Tabel 1.12 Kekurangan Penerimaan Denda Keterlambatan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada DPUPR.....	21
Tabel 1.13 Rincian Item Pekerjaan yang Terkena Denda Keterlambatan.....	24
Tabel 1.14 Realisasi SP2D Belanja Sembako Bersumber dari BTT.....	25
Tabel 1.15 Rincian Penarikan dan Realisasi Belanja Sembako BTT.....	26
Tabel 1.16 Realisasi Belanja Sembako oleh Penyedia.....	26
Tabel 1.17 Sisa UP yang Disetorkan Setelah 31 Desember 2025.....	28
Tabel 1.18 Realisasi Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.....	29
Tabel 1.19 Rincian atas Besaran Nilai yang Telah Teridentifikasi.....	35
Tabel 1.20 Perincian Aset Tetap Kabupaten Kapuas Hulu.....	37
Tabel 1.21 Perincian Tunggakan PKB atas 17 unit Kendaraan.....	38
Tabel 1.22 Perincian Dua Bidang Tanah Dikuasai Pihak Lain.....	40
Tabel 1.23 Rangkuman Aset Tetap Kewenangan Pemprov Kalbar yang Masih Dicatat pada KIB.....	44
Tabel 1.24 Perincian Aset Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	47
Tabel 1.25 Perincian Tren Aset Lain-lain Tahun 2021 s.d. 2025.....	48
Tabel 1.26 Perincian Empat Unit Aset Lainnya yang Dikuasai Pihak Lain.....	48

Tabel 1.27	Perincian Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025.....	49
Tabel 1.28	Perincian STS Atas Rekomendasi Pemulihan Kerugian Daerah.....	50
Tabel 2.1	Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Kapuas Hulu per 31 Desember 2025.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada Pegawai yang Menjalani Cuti Besar
- Lampiran 2 Daftar Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai atas Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan Anak, Tunjangan Pasangan dan Tunjangan Beras pada Pasangan Suami/Istri
- Lampiran 3 Daftar Kelebihan Pembayaran atas Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras
- Lampiran 4 Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Berakhir Masa Kerjanya
- Lampiran 5 Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Menjalani Hukuman Disiplin
- Lampiran 6 Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara
- Lampiran 7 Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Berstatus Cerai
- Lampiran 8 Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi BLP dan BLNP Dinas PUPR
- Lampiran 9 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)
- Lampiran 10 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Tribun GOR Uncak Kapuas
- Lampiran 11 Perhitungan Selisih Harga Timpang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)
- Lampiran 12 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simp.Bati (Lintas Selatan) - Menapar
- Lampiran 13 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simp. Sekubah - Jongkong
- Lampiran 14 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mawan - Tapang Tua
- Lampiran 15 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk
- Lampiran 16 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk
- Lampiran 17 Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Peniung Tahap 2
- Lampiran 18 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas PUPR
- Lampiran 19 Rincian Kelebihan Pembayaran atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas PUPR
- Lampiran 20 Rincian Kelebihan Pembayaran atas Pembangunan Gedung Paroki Kel. Putussibau Kota

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PID85285.

- Lampiran 21 Rincian Kelebihan Pembayaran atas Pembangunan Lanjutan Klinik Pratama Polres
- Lampiran 22 Perhitungan Denda Keterlambatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Disdikbud
- Lampiran 23 Perhitungan Denda Keterlambatan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada DPUPR
- Lampiran 24 Rincian Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang Belum Sepenuhnya Diselesaikan
- Lampiran 25 Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu
- Lampiran 26 Perincian atas Status Pencatatan Aset Tetap Tanah, Lokasi, dan Data Menara BTS
- Lampiran 27 Daftar Aset Tetap Kewenangan Pemprov Kalbar yang Masih Dicatat pada KIB



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tanggal 21 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Penyelesaian tambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uncak Kapuas berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya dari Pemerintah Pusat senilai Rp49,73 miliar berlarut-larut sehingga mengakibatkan substansi kepemilikan penuh (100%) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu atas Perumda Tirta Uncak Kapuas belum sepenuhnya didukung aspek formalnya;
2. Penyelesaian pelepasan dan/atau pemindahtanganan dan/atau penghapusan Aset Lain-Lain senilai Rp284,31 miliar dan Tagihan Jangka Panjang senilai Rp1,98 miliar berlarut-larut sehingga mengakibatkan penyajian Aset Lain-Lain dan Tagihan Jangka Panjang tersebut di Neraca tidak memberikan kontribusi dan/atau manfaat terhadap penerimaan dan/atau operasional Pemkab Kapuas Hulu; dan
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya memadai yang diantaranya mengakibatkan potensi penyalahgunaan aset tetap atas pemanfaatan BMD yang belum ditetapkan penunjukan penggunaannya, adanya risiko penguasaan oleh pihak lain dan kehilangan BMD serta sengketa hukum, dan salah saji atas penyajian saldo aset tetap yang bukan merupakan milik Pemkab Kapuas Hulu.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

1

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kapuas Hulu antara lain agar:

1. Bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu memproses penyelesaian status BPYBDS senilai Rp49,73 miliar menjadi tambahan penyertaan modal Pemkab Kapuas Hulu pada Perumda Tirta Uncak Kapuas sesuai ketentuan;
2. Bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memproses penyelesaian pelepasan dan/atau pemindahtanganan dan/atau penghapusan Aset Lain-Lain senilai Rp284,31 miliar sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
3. Menetapkan keputusan terkait penghapusan Tagihan Jangka Panjang senilai Rp1,98 miliar sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan putusan hukum tetap/inkrah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di Tahun 2025 terhadap tagihan tersebut; dan
4. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk melakukan pengamanan fisik BMD secara berkesinambungan untuk seluruh BMD yang dikuasai pihak lain; menyusun program bidang kegiatan untuk percepatan proses sertifikasi 1.108 bidang tanah dan penyerahan hibah 120 bidang tanah dan menyelesaikan pemindahtanganan atas BMD yang bukan merupakan milik Pemkab Kapuas Hulu.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 21 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP

Register CSFA Nomor R.0099

BAB I HASIL PEMERIKSAAN

ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 11 temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut.

A. Belanja

1. Pembayaran Belanja Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 sebesar Rp223.736.960,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (*audited*) Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp772.929.895.447,00 dengan realisasi sebesar Rp698.419.746.937,64 atau 90,36% dari anggaran. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	506.119.956.504,00	472.543.571.521,00	93,37
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	247.627.510.885,00	206.995.054.410,64	83,59
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.643.398.300,00	17.599.375.688,00	99,75
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	608.804.958,00	351.635.318,00	57,76
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000,00	712.440.000,00	99,99
6	Belanja Pegawai BLUD	217.744.800,00	217.670.000,00	99,97
Jumlah		772.929.895.447,00	698.419.746.937,64	90,36

Pengelolaan gaji pegawai pada Pemkab Kapuas Hulu dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGaji). Aplikasi tersebut menyusun daftar pembayaran gaji dan tunjangan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan surat keputusan bupati terkait pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan status PNS.

Hasil pemeriksaan atas pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp223.736.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS

No.	Belanja Pegawai	Indikasi Permasalahan	Jumlah Pegawai (Orang)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Rincian
1	Tunjangan Pelaksana/ Fungsional/ Umum	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sedang melaksanakan cuti besar	4	2.779.000,00	Lampiran 1
2	Tunjangan Suami/ Istri dan Tunjangan Anak/ Beras	Tunjangan yang diberikan bersamaan atas pasangan suami/istri yang berstatus ASN	1	10.118.796,00	Lampiran 2

No.	Belanja Pegawai	Indikasi Permasalahan	Jumlah Pegawai (Orang)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Rincian
3	Tunjangan Anak/ Beras	Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang memiliki anak yang berusia melewati 21 tahun atau lebih 21 tahun namun telah menikah atau tidak kuliah (termasuk tunjangan beras)	50	79.432.062,00	Lampiran 3
4	Gaji pokok dan Tunjangan Melekat	Pembayaran gaji yang masih diberikan kepada pegawai yang telah pensiun atau berakhir masa kerjanya	17	126.516.750,00	Lampiran 4
5	Tunjangan Fungsional	Tunjangan yang masih diberikan kepada pegawai yang menjalani hukuman disiplin	1	2.943.000,00	Lampiran 5
6	Tambahan Penghasilan Pegawai	TPP yang masih diberikan kepada pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara	1	430.952,00	Lampiran 6
7	Tunjangan Suami/Istri dan Beras	Tunjangan yang masih diberikan kepada suami/istri Pegawai yang telah bercerai	2	1.516.400,00	Lampiran 7
Jumlah				223.736.960,00	

Hasil konfirmasi kepada Operator Gaji di BKAD diketahui bahwa:

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menginformasikan peraturan terkait pemutusan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menjalani cuti besar;
- Operator penggajian tidak mengetahui bahwa tunjangan diberikan kepada pasangan pegawai yang sama-sama berprofesi sebagai ASN. Hal ini dikarenakan tidak ada laporan dari pegawai bersangkutan dan laporan verifikasi dari bagian umum dan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan;
- Keterlambatan atas pembayaran tunjangan anak dan beras dikarenakan pemutakhiran dan penyesuaian data pegawai tidak dilakukan secara rutin serta belum pernah dilakukan sinkronisasi data antara BKAD dan BKPSDM. Hal ini menyebabkan data keluarga pada aplikasi masih belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Selain itu, pegawai tidak melampirkan dokumen pendukung atas perubahan status keluarga pada saat anak telah lulus kuliah ataupun menikah; dan
- SK pensiun, cerai, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) terlambat diterima oleh operator gaji, sehingga gaji dan tunjangan yang melekat serta tambahan penghasilan yang seharusnya tidak menjadi hak pegawai masih terbayarkan.

Atas permasalahan kelebihan pembayaran tersebut telah diinformasikan ke SKPD terkait dan akan ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada pasal 16:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok; dan
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah; dan
 - 4) Ayat (5) menyatakan bahwa Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Duda pada:
- 1) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku tanggal 1 pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun; dan
 - 2) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai dibayarkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan pada tanggal berlakunya surat keputusan pensiun.
- c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pasal 7, Ayat (2) pada:
- 1) Huruf a, Nomor 4, menyatakan bahwa hal lain dalam penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF; dan
 - 2) Huruf c menyatakan bahwa hal lain dalam penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: menjalani cuti besar.
- d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural pada Lampiran II Bagian III huruf A angka 1 poin e menyatakan bahwa Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural dihentikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara atau menjalani cuti besar;
- e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada pasal 32 menyatakan bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai akan diberhentikan selama jangka waktu tertentu apabila cuti besar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp223.736.960,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala BKAD dan Kepala BKPSDM belum sepenuhnya melakukan pengendalian terhadap pengelolaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN dan Non ASN di lingkup entitasnya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala BKAD bersama Kepala BKPSDM memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp223.736.960,00 dengan penyetoran ke RKUD sesuai ketentuan kepegawaian.

2. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 sebesar Rp52.222.438,00

LRA (*audited*) Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas sebesar Rp5.623.718.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.372.742.078,60 atau 95,54%. Belanja tersebut di antaranya direalisasikan oleh Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan penetapan pagu anggaran di masing-masing bidang.

Berdasarkan hasil konfirmasi secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak kepada pihak ketiga diketahui bendahara membuat bukti belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk mencairkan anggaran. Menurut keterangan bendahara, bukti belanja tersebut untuk menampung pembayaran utang dan kegiatan yang anggarannya tidak tersedia.

Pemeriksa telah meminta bendahara pengeluaran untuk menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai realisasi kepada pihak ketiga. Hingga pemeriksaan berakhir, bendahara pengeluaran hanya menyerahkan sebagian bukti pertanggungjawaban yang diakui asli.

Atas kondisi tersebut menunjukkan adanya bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp52.222.438,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Rincian Belanja BBM yang Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban

No	Pihak Ketiga	Realisasi sesuai BKU (Rp)	SPJ Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	MR	28.423.938,00	2.310.000,00	26.113.938,00
2	TV	21.839.500,00	11.339.500,00	10.500.000,00
3	YK	1.062.500,00	260.000,00	802.500,00
4	FT	2.976.000,00	-	2.976.000,00
5	SF	11.830.000,00	-	11.830.000,00
Jumlah		66.131.938,00	13.909.500,00	52.222.438,00

Kelebihan pembayaran tersebut telah dikomunikasikan kepada Kepala BPBD dan selanjutnya akan dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti dengan penyetoran ke RKUD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- a. Pasal 10 Ayat 1 Huruf e menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas salah satunya mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- b. Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
- c. Pasal 14 Ayat 2 Huruf a dan c menyatakan bahwa PPK-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; dan
 - 2) Melakukan verifikasi pelaporan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- d. Pasal 128 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp52.222.438,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala Pelaksana BPBD belum sepenuhnya melakukan pengendalian terhadap bendahara pengeluaran dalam pertanggungjawaban pengadaan BBM pada satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp52.222.438,00 dengan penyetoran ke RKUD.

3. Pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non Personel atas Enam Paket Pekerjaan Jasa Konsultan pada DPUPR Tidak Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sebesar Rp64.257.400,00

LRA (*audited*) Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp358.359.339.771,00 dengan realisasi sebesar Rp338.154.391.659,08 atau 94,36% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.212.711.123,00 dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp384.180.550,00.

Belanja Jasa Konsultansi merupakan belanja jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Komponen biaya pada Belanja Jasa Konsultansi terdiri dari Biaya Langsung Personel (BLP) dan Biaya Langsung Non Personel (BLNP). BLP adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan kontrak, sedangkan BLNP adalah biaya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan jasa konsultansi menunjukkan bahwa terdapat realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak sesuai ketentuan pada Dinas PUPR sebesar Rp64.257.400,00.

Pada tahun 2025, DPUPR merealisasikan paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang beberapa di antaranya adalah paket Pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.4 Daftar Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi DPUPR

No.	Nama Paket Pekerjaan	No Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)
1	Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT) Kabupaten Kapuas Hulu	600.1.16/19/PUPR/PPK-PL.KSTN/2025	13 Okt 25	13 Okt s.d. 26 Nov 2025	45 hari kalender	99.998.000,00
2	Paket Pekerjaan Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Kapuas Hulu	600.1.16/PUPR/PPKPL.KSN/2025	03 Okt 25	03 Okt s.d. 16 Des 2025	75 hari kalender	648.000.000,00
3	Paket Pekerjaan Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Kapuas Hulu	600.1.16/38/PUPR/PPKPL.KSTN/2025	20 Okt 25	20 Okt s.d. 3 Des 2025	45 hari kalender	99.987.000,00
4	Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Kapuas Hulu	600.1.15/24/PUPR/PPK-PL.KSTN/2025	13 Okt 25	13 Okt s.d. 26 Des 2025	45 hari kalender	99.998.000,00
5	Paket Pekerjaan Feasibility Study Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Kapuas Hulu	600.1.16/05/PUPR/PPKPL.KSTN/2025	05 Agu 25	5 Agu s.d. 18 Sept 2025	45 hari kalender	99.998.013,00
6	Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan	600.1.9/12-PK/CCO/DPUPR/BM	04 Jul 25	4 Jul s.d. 31 Okt 2025	120 hari kalender	316.164.000,00

Hasil konfirmasi kepada Tenaga Ahli, Pejabat Pengadaan dan PPTK, diketahui permasalahan sebagai berikut.

- Pada kontrak paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL IPLT Kabupaten Kapuas Hulu dan *invoice* pembayaran tenaga ahli diketahui sebanyak 5 orang tenaga ahli dan tenaga pendukung. Hasil konfirmasi yang dilakukan secara *online* melalui *Google Meet* pada tanggal 29 April 2026 diketahui bahwa terdapat tenaga ahli pada posisi *Drafter* yang tidak bisa membuktikan keterlibatan dalam pekerjaan tersebut melalui komunikasi dengan personel yang lain terkait koordinasi pekerjaan. Bukti komunikasi yang disampaikan tidak berhubungan

dengan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut atas konfirmasi BLNP tersebut diketahui bahwa pemakaian kendaraan sewa roda dua hanya untuk *Surveyor* sementara pada *invoice* terdapat penyewaan kendaraan roda dua sebanyak tiga unit;

- b. Pada kontrak paket Pekerjaan Perencanaan TPST Kabupaten Kapuas Hulu dan *invoice* pembayaran tenaga ahli diketahui sebanyak sebelas orang tenaga ahli dan tenaga pendukung. Hasil konfirmasi yang dilakukan secara *online* melalui *Google Meet* pada tanggal 28 April 2026 diketahui bahwa terdapat BLNP pemakaian kendaraan sewa roda empat hanya digunakan pada saat awal mulai pekerjaan dan untuk kendaraan sewa roda dua digunakan pada awal mulai pekerjaan.
- c. Pada kontrak paket Pekerjaan Perencanaan IPLT Kabupaten Kapuas Hulu dan *invoice* pembayaran tenaga ahli diketahui sebanyak lima orang tenaga ahli dan tenaga pendukung. Hasil konfirmasi yang dilakukan secara *online* melalui *Google Meet* pada tanggal 29 April 2026 diketahui bahwa terdapat BLNP pemakaian kendaraan sewa roda dua digunakan pada awal mulai pekerjaan.
- d. Pada kontrak paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL TPST Kabupaten Kapuas Hulu dan *invoice* pembayaran tenaga ahli diketahui sebanyak 5 orang tenaga ahli dan tenaga pendukung. Hasil konfirmasi yang dilakukan secara *online* melalui *Google Meet* pada tanggal 29 April 2026 diketahui bahwa terdapat tenaga ahli pada posisi Ahli Teknik Lingkungan tidak bisa membuktikan keterlibatan dalam pekerjaan tersebut melalui komunikasi dengan personel yang lain terkait koordinasi pekerjaan. Bukti komunikasi yang disampaikan tidak berhubungan dengan Pekerjaan yang sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut konfirmasi atas BLNP diketahui bahwa pemakaian kendaraan sewa roda dua hanya untuk *surveyor* sementara pada *invoice* terdapat penyewaan kendaraan roda dua sebanyak tiga unit;
- e. Pada kontrak *Feasibility Study* TPST Kabupaten Kapuas Hulu dan *invoice* pembayaran tenaga ahli diketahui sebanyak lima orang tenaga ahli dan tenaga pendukung. Hasil konfirmasi yang dilakukan secara *online* melalui *Google Meet* pada tanggal 29 April 2026 diketahui bahwa atas BLNP diketahui bahwa pemakaian kendaraan sewa roda dua hanya untuk *Surveyor* sementara pada *invoice* terdapat penyewaan kendaraan roda dua sebanyak tiga unit; dan
- f. Pada kontrak Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan dan *invoice* pembayaran tenaga ahli diketahui sebanyak tujuh orang tenaga ahli dan tenaga pendukung. Hasil konfirmasi yang dilakukan pada tanggal 25 April 2026 diketahui bahwa terdapat tenaga ahli pada posisi *Mat/Lab Technician* tidak bisa membuktikan keterlibatan dalam pekerjaan tersebut melalui komunikasi dengan personel yang lain terkait koordinasi pekerjaan ataupun dokumentasi kegiatan pengawasan selama di lapangan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultansi atas enam paket pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp64.257.400,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Kelebihan pembayaran tersebut telah dikomunikasikan kepada Kepala DPUPR untuk selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dengan penyetoran ke RKUD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada Lampiran II Klausul Penetapan Pemenang menyatakan bahwa Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi lain/yang sedang berjalan, maka:
 - 1) Apabila menawarkan tenaga ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi tenaga ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi;
 - 2) Apabila menawarkan tenaga ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan tenaga ahli tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket Pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada tenaga ahlinya dan dinyatakan gugur; dan
 - 3) Ketentuan pada huruf a dan huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultasi, dikecualikan:
 - a) Apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;
 - b) Pada pekerjaan jasa konsultasi yang menggunakan kontrak lumsom (paling banyak tiga paket); atau
- b. Peraturan LKPP No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Nomor II Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Konstruksi Poin 2.2.2 Proses Metode Perhitungan berbasis Biaya (*cost-based rates*) menyatakan bahwa Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*) di antaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs *web*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp64.257.400,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala DPUPR belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pada satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala DPUPR memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp64.257.400,00 dengan penyetoran ke RKUD.

4. Volume Pekerjaan, Perhitungan Harga Satuan Timpang, dan Spesifikasi Hasil Pekerjaan pada DPUPR dan DKPPKB Tidak Sesuai Kontrak Pengadaan Pekerjaan sebesar Rp2.002.410.000,00

LRA (audited) Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp205.167.710.321,00 dengan realisasi sebesar Rp202.794.227.908,73 atau sebesar 98,84%. Atas realisasi belanja tersebut di antaranya digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BM PM), Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BM GB), serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (BM JIJ). Anggaran Belanja Barang sebesar Rp95.654.530.392,00 dengan realisasi sebesar Rp87.303.920.369,44 atau 91,27% dari anggaran. Atas realisasi belanja tersebut di antaranya dianggarkan untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp17.704.580.844,00 dengan realisasi sebesar Rp17.701.248.997,00 atau 99,98% dari anggaran dan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp104.677.374.220,00 dengan realisasi Rp100.613.676.445,27 atau sebesar 96,12% dari anggaran.

Hasil pengujian fisik serta perhitungan bersama antara BPK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pelaksana pekerjaan, dan konsultan pengawas diketahui terdapat kekurangan volume, kesalahan perhitungan harga satuan timpang, dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2.912.265.000,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 1.5 Kekurangan Volume, Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Timpang, dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Per Uraian Belanja

(dalam Rupiah)

Akun Belanja	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai Temuan				Total
			Kelebihan Bayar atas Kekurangan Volume	Kelebihan Pembayaran atas Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi dengan Pengembalian ke RKUD	Potensi Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi dengan Usulan Perbaikan	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 + 5 + 6 + 7)
BM GB	2	44.746.670.000,00	657.484.000,00	70.345.000,00	0,00	0,00	727.829.000,00
BM JIJ	6	43.813.747.280,00	274.707.000,00	0,00	20.514.000,00	909.855.000,00	1.205.076.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13	5.530.997.000,00	240.361.000,00	0,00	684.865.000,00	0,00	925.226.000,00
Hibah	2	8.156.850.000,00	54.134.000,00	0,00	0,00	0,00	54.134.000,00
Total	23	102.248.264.280,00	1.226.686.000,00	70.345.000,00	705.379.000,00	909.855.000,00	2.912.265.000,00

Atas kekurangan volume, kesalahan perhitungan harga satuan timpang dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2.912.265.000,00 belum ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke RKUD Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.002.410.000,00 (Rp1.226.686.000,00 +

Rp70.345.000,00 + Rp705.379.000,00) serta potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp909.855.000,00 yang belum ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut.

4.1 Kekurangan Volume dan Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Timpang atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp727.829.000,00

Hasil pengujian dokumen kontrak, addendum kontrak, dokumen back up volume dan dokumen pembayaran serta pengujian fisik di lapangan secara uji petik terhadap dua paket pekerjaan BM GB di DPUPR diketahui terdapat permasalahan berupa kekurangan volume dan selisih harga satuan timpang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp727.829.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.6 Kekurangan Volume dan Selisih Harga Satuan Timpang atas BM GB pada DPUPR

(dalam Rupiah)

Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Kekurangan Volume	Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Timpang	Tindak Lanjut	Sisa Nilai Temuan	Lampiran
1	2	3	4	5	6 = ((3 + 4) – 5)	7
Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)	39.950.000.000,00	611.757.000,00	70.345.000,00	0,00	682.102.000,00	Lampiran 9 dan Lampiran 11
Pembangunan Tribun GOR Uncak Kapuas	4.796.670.000,00	45.727.000,00	0,00	0,00	45.727.000,00	Lampiran 10
Total	44.746.670.000,00	657.484.000,00	70.345.000,00	0,00	727.829.000,00	

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp657.484.000,00 serta selisih harga satuan timpang sebesar Rp70.345.000,00. Harga satuan timpang sendiri terjadi akibat adanya item-item pekerjaan yang memiliki harga satuan penawaran melebihi 110% dari Harga Perhitungan Sendiri (HPS). Dalam kondisi perlu dilakukan penambahan volume item pekerjaan dari kontrak awal, maka harga satuan item pekerjaan tambahan tersebut akan menggunakan HPS.

Hasil pengujian dokumen kontrak, addendum kontrak, HPS dan dokumen *back up* volume lebih lanjut diketahui bahwa pada addendum kedua pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024), terdapat penambahan volume atas item-item pekerjaan dengan harga timpang. Selain itu, diketahui juga bahwa harga satuan atas tambahan item pekerjaan tersebut tidak menggunakan HPS, melainkan tetap menggunakan harga satuan penawaran. Kondisi ini mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas selisih harga satuan terhadap HPS pada penambahan item-item pekerjaan dengan harga timpang. Perincian atas selisih harga satuan timpang dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Nilai kelebihan pembayaran atas kekurangan volume tersebut telah dikonfirmasi dan dikomunikasikan kepada PPK DPUPR dan Penyedia. Atas hal tersebut PPK DPUPR dan Penyedia menyanggupi pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyeter ke RKUD. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum terdapat penyeteran ke RKUD

4.2 Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.205.076.000,00

Hasil pengujian dokumen kontrak, adendum kontrak, dokumen *back up* volume, dan dokumen pembayaran serta pengujian fisik di lapangan secara uji petik terhadap enam paket pekerjaan BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) di DPUPR diketahui terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti berupa kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp295.221.000,00 (Rp274.707.000,00 + Rp20.514.000,00) dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp909.855.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.7 Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas BM JIJ pada DPUPR

(dalam Rupiah)

Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume	Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi dengan Pengembalian Kas	Potensi Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi dengan Usulan Perbaikan	Tindak Lanjut	Sisa Nilai Temuan	Lampiran
1	2	3	4	5	6	7 = ((3 + 4 + 5) – 6)	8
Peningkatan Ruas Jalan Simp. Bati (Lintas Selatan) - Menapar	4.573.000.000,00	15.798.000,00	0,00	134.448.000,00	0,00	150.246.000,00	Lampiran 12
Peningkatan Ruas Jalan Simp. Sekubah - Jongkong	9.976.000.000,00	10.636.000,00	0,00	0,00	0,00	10.636.000,00	Lampiran 13
Peningkatan Ruas Jalan Mawan - Tapang Tua	8.280.000.000,00	15.949.000,00	20.514.000,00	0,00	0,00	36.463.000,00	Lampiran 14
Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk	9.974.541.584,00	16.920.000,00	0,00	98.565.000,00	0,00	115.485.000,00	Lampiran 15
Peningkatan Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk	2.938.205.696,00	0,00	0,00	676.842.000,00	0,00	676.842.000,00	Lampiran 16
Pembangunan Jembatan Sungai Peniung Tahap 2	8.072.000.000,00	215.404.000,00	0,00	0,00	0,00	215.404.000,00	Lampiran 17
Total	43.813.747.280,00	274.707.000,00	20.514.000,00	909.855.000,00	0,00	1.205.076.000,00	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp1.205.076.000,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp274.707.000,00 serta ketidaksesuaian spesifikasi yang akan dikembalikan ke RKUD sebesar Rp20.514.000,00 dan yang akan diperbaiki sebesar Rp909.855.000,00. Berdasarkan konfirmasi bersama PPK dan Penyedia pada masing-masing pekerjaan, diketahui bahwa pihak Penyedia atas tiga paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi menyatakan bersedia untuk memperbaiki pekerjaan tersebut. Sedangkan Penyedia atas satu paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi menyatakan bersedia untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pekerjaan setelah dikenakan faktor pembayaran. Atas kondisi ini, ketidaksesuaian spesifikasi memiliki akibat kelebihan pembayaran sebesar Rp20.514.000,00 atas paket pekerjaan yang tidak diperbaiki, serta potensi

kelebihan pembayaran sebesar Rp909.855.000,00 atas paket pekerjaan yang diusulkan untuk diperbaiki. Atas kekurangan volume pada paket pekerjaan tersebut belum terdapat penyetoran ke RKUD.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, kondisi ketidaksesuaian spesifikasi terjadi disebabkan oleh kekurangan ketebalan dan/atau kepadatan hasil pekerjaan jalan telah melewati batas toleransi sebagaimana diatur pada bagian spesifikasi teknis di masing-masing kontrak. Ketidaksesuaian spesifikasi ini kemudian mewajibkan Penyedia untuk melakukan perbaikan pada segmen yang tidak sesuai dengan justifikasi atau *feasibility* Tenaga Ahli atau menerima penyesuaian faktor pembayaran pekerjaan hingga 0%. Apabila tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan, maka biaya perbaikan tersebut akan menjadi tanggung jawab Penyedia dan PPK kemudian melakukan pengawasan tindak lanjut perbaikan dibantu dengan Konsultan Pengawas. Hasil tindak lanjut perbaikan kemudian harus divalidasi/diaudit oleh Inspektorat disertai dengan pengujian ketebalan dan berat jenis sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi teknis di masing-masing kontrak.

Nilai kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut telah dikonfirmasi dan dikomunikasikan kepada PPK DPUPR dan Penyedia. Atas hal tersebut PPK DPUPR dan Penyedia menyanggupi pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke RKUD.

4.3 Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas 13 Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada DPUPR sebesar Rp925.226.000,00

BPK telah melakukan pemeriksaan fisik secara uji petik atas realisasi Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain berupa 13 paket pekerjaan jalan rabat beton, dan pekerjaan pengaspalan latasir pada DPUPR, yang didampingi oleh PPTK, pelaksana dan pengawas lapangan. Pemeriksaan dilakukan dengan pengujian dokumen kontrak, adendum kontrak, dokumen *back up* volume, dan dokumen pembayaran serta pemeriksaan fisik berupa mengukur panjang dan lebar jalan serta pengambilan sampel titik *coredrill* beton untuk dilakukan pengukuran ketebalan. Pelaksanaan 13 paket pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan BAST Pekerjaan pada masing-masing kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan, kelebihan biaya mobilisasi alat. Atas kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan tersebut belum terdapat penyetoran ke RKUD.

Rekapitulasi kekurangan volume atas Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain berdasarkan Jenis Pekerjaan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.8 Jenis Pekerjaan Atas Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pekerjaan	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume	Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi dengan Pengembalian Kas
1	2	3	4
1	Beton struktur, fc'20 Mpa	30.000.000,00	684.865.000,00
2	Cor Beton fc = 10 Mpa	120.034.000,00	
3	Penghamparan dan Pemadatan Latasir	68.444.000,00	
4	Perpipaan SPAM	21.883.000,00	
Jumlah		240.361.000,00	684.865.000,00
Jumlah Total (3+4)		925.226.000,00	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp925.226.000,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp240.361.000,00 serta ketidaksesuaian spesifikasi yang akan dikembalikan ke RKUD sebesar Rp684.865.000,00. Rincian perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan jalan rabat beton, dan pekerjaan pengaspalan latasir dan perpipaan SPAM serta ketidaksesuaian spesifikasi pada DPUPR dapat dilihat pada **Lampiran 18** dan **Lampiran 19**.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, kondisi ketidaksesuaian spesifikasi terjadi disebabkan oleh kekurangan ketebalan dan/atau kepadatan hasil pekerjaan jalan telah melewati batas toleransi sebagaimana diatur pada bagian spesifikasi teknis di masing-masing kontrak. Ketidaksesuaian spesifikasi ini kemudian mewajibkan Penyedia untuk melakukan perbaikan pada segmen yang tidak sesuai dengan justifikasi atau *feasibility* tenaga ahli atau menerima penyesuaian faktor pembayaran pekerjaan hingga 0%. Apabila tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan, maka biaya perbaikan tersebut akan menjadi tanggung jawab Penyedia dan PPK kemudian melakukan pengawasan tindak lanjut perbaikan dibantu dengan Konsultan Pengawas. Hasil tindak lanjut perbaikan kemudian harus divalidasi/diaudit oleh Inspektorat disertai dengan pengujian ketebalan dan berat jenis sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi teknis di masing-masing kontrak.

Nilai kelebihan pembayaran atas kekurangan volume tersebut telah dikonfirmasi dan dikomunikasikan kepada PPK DPUPR dan Penyedia. Atas hal tersebut PPK DPUPR dan Penyedia menyanggupi pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke RKUD.

4.4 Kekurangan Volume Belanja Hibah atas Dua Paket Pekerjaan sebesar Rp54.134.000,00

Hasil pengujian fisik secara uji petik terhadap hasil pekerjaan, kontrak, addendum kontrak, dokumen *back up* volume pekerjaan atas paket pekerjaan Pembangunan Gedung Paroki Kelurahan Putussibau Kota di DPUPR sebesar Rp7.986.000.000,00, serta paket pekerjaan Pembangunan Lanjutan Klinik Kepolisian Resor (Polres) Kapuas Hulu di DKPPKB sebesar Rp170.850.000,00 yang telah dinyatakan selesai 100% oleh penyedia, PPK dan PPTK. Atas dua

paket tersebut diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan atas beberapa item pekerjaan sebesar Rp54.134.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.9 Rincian Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Hibah

No.	Paket Pekerjaan	SKPD	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Gedung Paroki Kel. Putussibau Kota	DPUPR	CV. KM	7.986.000.000,00	45.877.000,00	Lampiran 20
2	Pembangunan Lanjutan Klinik Polres Kapuas Hulu	DKPPKB	CV. MPS	170.850.000,00	8.257.000,00	Lampiran 21
Jumlah				8.156.850.000,00	54.134.000,00	

Nilai kelebihan pembayaran atas kekurangan volume tersebut telah dikonfirmasi dan dikomunikasikan kepada PPK DPUPR dan Penyedia. Atas hal tersebut PPK DPUPR dan Penyedia menyanggupi pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyeteror ke RKUD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 78:

- a) Ayat (3) Huruf d menyatakan bahwa “Dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
- b) Ayat (3) Huruf e menyatakan bahwa “Dalam hal Penyedia menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
- c) Ayat (4) menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif di antaranya berupa sanksi ganti kerugian”;

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Bagian IV Angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran, huruf d evaluasi harga, Angka 3) Evaluasi Harga Satuan Timpang, yang menyatakan bahwa “Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS. Apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya

berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS”;

- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
 - 1) Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen pada pasal 5.2.1.3).a) menyatakan bahwa “tebal minimum tidak boleh kurang dari 1 cm terhadap tebal yang ditunjukkan dalam gambar kecuali disetujui oleh pengawas pekerjaan sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal 5.2.5.1) dari Spesifikasi ini”;
 - 2) Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen pada pasal 5.2.1.7).a) menyatakan bahwa “lokasi dengan tebal dan kerataan permukaan yang tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.3), atau yang permukaannya bergelombang selama atau sesudah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan menggemburkan permukaannya dan membuang atau menambah bahan yang diperlukan, dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali”;
 - 3) Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen pada pasal 5.2.5.1).a) menyatakan bahwa tebal minimum perkerasan berbutir jalan tanpa penutup aspal yang diterima tidak boleh kurang dari tebal dan toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.3).a). Bilamana tebal rata-rata perkerasan berbutir jalan tanpa penutup aspal untuk suatu segmen tebalnya kurang dari toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.3).a), maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan lapis perkerasan berbutir jalan tanpa penutup aspal dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 1.5.2.5.1)”;

**Faktor Pembayaran Harga Satuan Ketebalan Kurang atau Diperbaiki
(Tabel 1.5.2.5.1)**

Kekurangan Tebal	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0,0 – 1,0 cm	100%
> 1,0 – 2,0 cm	90% atau diperbaiki
> 2,0 – 3,0 cm	80% atau diperbaiki
> 3,0 cm	Harus diperbaiki

- 4) Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen pada pasal 5.2.5.2) menyatakan bahwa “perbaikan perkerasan berbutir jalan tanpa penutup aspal yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam Tabel 5.2.5.1) dan/atau Tabel 5.2.5.2) dilaksanakan setelah diperintahkan oleh pengawas pekerjaan sesuai Pasal 5.2.1.7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas berdasarkan tebal terpasang yang memenuhi toleransi pada Pasal 5.2.5.1).a) dan tidak melebihi tebal dalam gambar untuk setiap lapisnya, serta memenuhi kepadatan pada Pasal 5.2.5.1).b). Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut”;

- 5) Divisi 5 Perkerasan Beton Semen pada Pasal 5.3.10).1).a) menyatakan bahwa bilamana tebal rata-rata perkerasan beton semen untuk setiap lot tebalnya kurang sampai dari 5mm, tetapi tidak lebih dari 12,5mm, suatu penyesuaian harga satuan akan dilakukan, ditentukan dari kuantitas aktual perkerasan beton semen atau perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan tunggal pada lot ini di lapangan, dan harga satuan harus dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai Tabel 5.3.10.1).

Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki (Tabel 5.3.10.1)

Kekurangan Tebal rata-rata	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0 - 5 mm	100%
> 5 - 8 mm	80% atau diperbaiki
> 8 - 10 mm	72% atau diperbaiki
> 10 - 12,5 mm	68% atau diperbaiki
> 12,5 mm	harus diperbaiki

- 6) Divisi 6 Perkerasan Aspal pada Pasal 6.3.1.4).i) menyatakan bahwa “Bilamana campuran beraspal yang dihamparkan sebagai lapis perata maka lapis perata untuk perbaikan bentuk ini harus diaplikasikan bersama-sama dengan sebagian atau seluruh tebal pelapisan (*overlay*) untuk perkuatan (*strengthening*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan pengawas pekerjaan. Tebal lapis perata tidak boleh melebihi 2,5 kali tebal nominal yang diberikan dalam Tabel 1.6.3.1.1) dan tidak boleh kurang dari diameter maksimum partikel yang digunakan kecuali aplikasi perataan setempat (*spot levelling*) secara manual yang disetujui oleh pengawas pekerjaan”;

Tebal Nominal Campuran Beraspal (Tabel 1.6.3.1.1)

Jenis Campuran	Simbol	Tebal Nominal Minimum (cm)
Stone Matrix Asphalt Tipis	SMA Tipis	3,0
Stone Matrix Asphalt Halus	SMA Tipis	4,0
Stone Matrix Asphalt Kasar	SMA Tipis	5,0
Lataston	Lapis Aus	3,0
	Lapis Fondasi	3,5
Laston	Lapis Aus	4,0
	Lapis Antara	6,0
	Lapis Fondasi	7,5

- 7) Divisi 6 Perkerasan Aspal pada Pasal 6.3.1.8) menyatakan bahwa “bilamana campuran beraspal yang dihampar tidak memenuhi tebal yang ditunjukkan dalam gambar dengan toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f) maka kekurangan tebal ini dapat diperbaiki dengan penyesuaian tebal dari lapis berikutnya atau dipotong pembayarannya sesuai dengan Pasal 6.3.8.1).j)”;
- 8) Divisi 6. Perkerasan Aspal pada Pasal 6.3.8.1).j).i) menyatakan bahwa “kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar) tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada pasal 6.3.1.4).f), maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 1.6.3.8.1)”;

**Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki
(Tabel 1.6.3.8.1)**

Kekurangan Tebal	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0 – 1 kali toleransi	100%
> 1 – 2 kali toleransi	75% atau diperbaiki
> 2 – 3 kali toleransi	55% atau diperbaiki
> 3 kali toleransi	Harus diperbaiki

- 9) Divisi 6. Perkerasan Aspal pada Pasal 6.3.8.1).j).ii) menyatakan bahwa “jika kepadatan rata-rata semua jenis campuran beraspal panas yang telah dipadatkan, seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2022, kurang dari ketentuan pada Pasal 6.3.7.2), tetapi semua aspek memenuhi spesifikasi, maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas tersebut dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai Tabel 1.6.3.8.2)”;

**Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Kepadatan Kurang atau Diperbaiki
(Tabel 1.6.3.8.2)**

Jenis Campuran	Kepadatan	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
Campuran Beraspal Lainnya	≥ 98%	100%
	97 - < 98%	90% atau diperbaiki
	96 - < 97%	80% atau diperbaiki
	< 96%	Harus diperbaiki
Lataston (HRS)	≥ 97%	100%
	96 - < 97%	90% atau diperbaiki
	95 - < 96%	80% atau diperbaiki
	< 95%	Harus diperbaiki

- d. Syarat-Syarat Umum masing-masing Kontrak/SPK/Surat Pesanan menyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”;

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.002.410.000,00;
- b. Pekerjaan jalan harus diperbaiki, yaitu pada:
 - 1) Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal pada paket Peningkatan Ruas Jalan Simp.Bati (Lintas Selatan) – Menapar oleh CV CM;
 - 2) Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) pada paket Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan – Nanga Suruk oleh CV PLB; dan
 - 3) Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) pada paket Peningkatan Ruas Jalan Mataso – Ulak Pauk oleh CV SAP.

Hal tersebut disebabkan Kepala DPUPR, dan Kepala DKPPKB selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasi Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan:

- a. Kepala DPUPR dan Kepala DKPPKB untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.002.410.000,00 dengan penyetoran ke RKUD, terdiri dari:

1) DPUPR sebesar Rp1.994.153.000,00; dan

2) DKPPKB sebesar Rp8.257.000,00.

b. Kepala DPUPR memproses perbaikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sesuai rekomendasi teknis dari tenaga ahli kepada:

1) CV CM untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simp.Bati (Lintas Selatan) – Menapar;

2) CV PLB untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan – Nanga Suruk; dan

3) CV SAP untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mataso – Ulak Pauk.

5. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda pada Empat Paket Pengadaan dan Pekerjaan Konstruksi di Tiga SKPD sebesar Rp62.612.000,00

LRA (*audited*) Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp205.167.710.321,00 dengan realisasi sebesar Rp202.794.227.908,73 atau sebesar 98,84%. Atas realisasi belanja tersebut di antaranya digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp104.677.374.220,00 dengan realisasi Rp100.613.676.445,27 atau sebesar 96,12% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), laporan progres fisik, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat dua paket pekerjaan yang melewati masa pelaksanaan kontrak awal dan belum membayar denda keterlambatan sebesar Rp62.612.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.10 Kekurangan Penerimaan Denda Keterlambatan per Uraian Belanja

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah Paket Pekerjaan	Denda Keterlambatan	Denda Keterlambatan Telah Dibayar/Dipotong dari Pembayaran	Sisa Denda Keterlambatan yang Belum Ditindaklanjuti	Pembulatan	Sisa Denda Keterlambatan yang Belum Ditindaklanjuti Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5 = (3 – 4)	6	7 = (5 – 6)
BM Peralatan dan Mesin	1	8.157.921,08	0,00	8.157.921,08	921,08	8.157.000,00
BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2	55.871.953,38	4.733.153,41	51.138.799,97	1.799,97	51.137.000,00
Belanja Hibah	1	3.318.980,00	0,00	3.318.980,00	980,00	3.318.000,00
Total	4	67.348.854,46	4.733.153,41	62.615.701,05	3.701,05	62.612.000,00

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut belum ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke RKUD. Atas hal tersebut maka masih terdapat kekurangan penerimaan denda yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp62.612.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. Kekurangan penerimaan denda keterlambatan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.157.000,00

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan terhadap realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum ditindaklanjuti sebanyak satu paket pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan denda keterlambatan sebesar Rp8.157.000,00. Perincian atas denda keterlambatan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel 1.11 Kekurangan Penerimaan Denda Keterlambatan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Disdikbud

(dalam Rupiah)

Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Denda Keterlambatan Belum Dikenakan	Denda Keterlambatan Telah Dibayar/Dipotong dari Pembayaran	Sisa Denda Keterlambatan yang Belum Ditindaklanjuti	Lampiran
1	2	3	4	5 = (3 – 4)	6
Konsolidasi Pengadaan Mebeler Jenjang SD 1	445.360.100,00	8.157.000,00	0,00	8.157.000,00	Lampiran 22
Total	445.360.100,00	8.157.000,00	0,00	8.157.000,00	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat denda keterlambatan yang belum dihitung oleh PPK sebesar Rp8.157.000,00. Nilai denda keterlambatan ini dihitung berdasarkan ketentuan pada SSKK dalam surat pesanan, yaitu sisa barang yang belum diterima oleh masing-masing sekolah sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan kontrak. Sampai dengan akhir pelaksanaan kontrak, masih terdapat 297 unit dari 309 unit mebel yang belum diterima oleh sekolah. Untuk itu, Penyedia dikenakan denda keterlambatan atas sepermil (1/1000) lamanya keterlambatan (28 hari) dengan dasar pengenaan denda atas nilai 297 unit mebel yang belum diterima, yaitu sebesar Rp291.354.324,32.

5.2. Kekurangan Penerimaan Denda Keterlambatan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp51.137.000,00

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan terhadap realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang belum ditindaklanjuti sebanyak dua paket pekerjaan pada DPUPR dengan denda keterlambatan sebesar Rp51.137.000,00. Perincian atas denda keterlambatan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.12 Kekurangan Penerimaan Denda Keterlambatan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada DPUPR

(dalam Rupiah)

Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Denda Keterlambatan Belum Dikenakan	Denda Keterlambatan Telah Dibayar/ Dipotong dari Pembayaran	Sisa Denda Keterlambatan yang Belum Ditindaklanjuti	Pembulatan (Rp)	Sisa Perhitungan Denda Keterlambatan Setelah Pembulatan (Rp)	Lampiran
1	2	3	4	5 = (3 – 4)	6	7 = (5 – 6)	8
Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Jaya - TPA Kalis	2.880.634.920,00	31.733.137,79	1.081.266,41	30.651.871,38	871,38	30.651.000,00	Lampiran 23

Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Denda Keterlambatan Belum Dikenakan	Denda Keterlambatan Telah Dibayar/ Dipotong dari Pembayaran	Sisa Denda Keterlambatan yang Belum Ditindaklanjuti	Pembulatan (Rp)	Sisa Perhitungan Denda Keterlambatan Setelah Pembulatan (Rp)	Lampiran
1	2	3	4	5 = (3 – 4)	6	7 = (5 – 6)	8
Peningkatan Ruas Jalan Nanga Payang - Landau Kaloi (Batu Tiga)	2.949.000.000,00	24.138.815,59	3.651.887,00	20.486.928,59	928,59	20.486.000,00	
Total	5.829.634.920,00	55.871.953,38	4.733.153,41	51.138.799,97	1.799,97	51.137.000,00	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat dua paket pekerjaan pada DPUPR yang masih memiliki sisa denda keterlambatan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp51.137.000,00. Nilai ini merupakan selisih dari perhitungan ulang denda keterlambatan sesuai kontrak oleh BPK RI terhadap perhitungan denda keterlambatan oleh PPK.

Berdasarkan konfirmasi kepada PPK untuk kedua paket pekerjaan tersebut, diketahui bahwa semula masing-masing PPK telah menghitung denda keterlambatan berdasarkan sisa volume atas item pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir masa pelaksanaan kontrak. Hasil ini kemudian tercantum pada berita acara perhitungan denda keterlambatan dan menjadi besaran pembayaran denda keterlambatan oleh masing-masing Penyedia ke RKUD.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, adendum waktu pelaksanaan, dan berita acara perhitungan denda keterlambatan, diketahui bahwa perhitungan denda keterlambatan oleh PPK belum sesuai dengan ketentuan yang diatur pada SSKK. Ketentuan dalam SSKK mengatur perhitungan dasar pengenaan denda keterlambatan atas kedua paket dihitung dari harga bagian Kontrak. Dalam hal SSKK tidak mengatur lebih lanjut atas harga bagian kontrak, maka bagian kontrak akan didefinisikan sebagai bagian pekerjaan atau divisi pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Perbedaan perhitungan dasar denda keterlambatan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.

1) Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Jaya – TPA Kalis

Pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Jaya – TPA Kalis, PPK telah menghitung nilai denda sebesar Rp1.081.266,41. Nilai ini diperoleh dari sepermil (1/1000) lamanya keterlambatan (21 hari) dengan dasar pengenaan denda berupa sisa nilai pekerjaan yang belum selesai, yaitu sebesar Rp51.488.876,59.

Atas nilai tersebut, dilakukan perhitungan ulang dasar pengenaan denda berdasarkan ketentuan yang berlaku diperoleh nilai sebesar Rp1.511.101.799,57. Dasar pengenaan denda tersebut dihitung dari item pekerjaan mobilisasi sebesar Rp19.120.000,00 dan item pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian sebesar Rp1.491.981.799,57. Kedua item pekerjaan ini diketahui mengalami keterlambatan, sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kontrak yang tercantum pada adendum waktu

pelaksanaan. Dengan penyesuaian dasar pengenaan denda tersebut, maka perhitungan ulang nilai denda keterlambatan menjadi sebesar Rp31.733.137,79 ($1/1000 \times 21 \text{ hari} \times \text{Rp}1.511.101.799,57$).

2) Paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nanga Payang – Landau Kaloi

Pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nanga Payang – Landau Kaloi, PPK telah menghitung nilai denda sebesar Rp3.651.887,00. Nilai ini diperoleh dari sepermil ($1/1000$) lamanya keterlambatan (42 hari) dengan dasar pengenaan denda berupa sisa nilai pekerjaan yang belum selesai, yaitu sebesar Rp86.949.676,57.

Perhitungan ulang dasar pengenaan denda berdasarkan ketentuan yang berlaku memperoleh nilai sebesar Rp574.733.704,61, yaitu nilai dari item pekerjaan :

- a) mobilisasi sebesar Rp216.996.706,76;
- b) penggantian rantai kayu sebesar Rp110.836.658,38;
- c) penggantian gelegar kayu sebesar Rp33.633.000,00;
- d) penggantian balok kepala tiang sebesar Rp153.643.705,00;
- e) penggantian papan lajur kendaraan sebesar Rp30.884.373,53;
- f) perbaikan sandaran kayu sebesar Rp16.051.292,94; dan
- g) pengecatan sandaran sebesar Rp12.687.968,00.

Ketujuh item pekerjaan ini diketahui mengalami keterlambatan, sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kontrak yang tercantum pada addendum waktu pelaksanaan. Dengan penyesuaian dasar pengenaan denda tersebut, maka perhitungan ulang nilai denda keterlambatan menjadi sebesar Rp24.138.815,59 ($1/1000 \times 42 \text{ hari} \times \text{Rp}574.733.704,61$).

Atas denda keterlambatan kedua paket di atas, telah dilakukan penyetoran total sebesar Rp4.733.153,41 ($\text{Rp}1.081.266,41 + \text{Rp}3.651.887,00$) ke RKUD. Dengan demikian masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke RKUD sebesar Rp51.138.799,97 ($\text{Rp}55.871.953,38 - \text{Rp}4.733.153,41$) dengan pembulatan menjadi sebesar Rp51.137.000,00.

5.3. Denda Pekerjaan atas Pembangunan Lanjutan Klinik Polres Putussibau sebesar Rp3.318.000,00

Pekerjaan atas Pembangunan Lanjutan Klinik Polres Putussibau telah selesai 100% sesuai BAST tanggal 28 Oktober 2025 dan telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp170.850.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama PPTK DKPPKB, Pelaksana dan Konsultan Pengawas diketahui terdapat dua *item* pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur di dalam kontrak. Atas kondisi tersebut, penyedia akan melakukan perbaikan dengan pertimbangan agar pemanfaatan klinik dapat berjalan baik dengan didukung ketersediaan fasilitas listrik dan pompa air yang sesuai dengan spesifikasi kontrak. Atas hal tersebut maka pelaksanaan pekerjaan mengalami

keterlambatan selama 151 hari. Adapun dua *item* pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13 Rincian Item Pekerjaan yang Terkena Denda Keterlambatan

No.	Item Pekerjaan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Waktu Keterlambatan	Denda Keterlambatan (Rp)
1	Listrik 3 phase 10.600 watt	1	20.380.000,00	151	3.077.380,00
2	Pompa air otomatis	1	1.600.000,00	151	241.600,00
Jumlah					3.318.980,00
Pembulatan					3.318.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 78 Ayat (3) Huruf f menyatakan bahwa “Dalam hal Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Penyedia dikenai sanksi administrasi”;
 - 2) Pasal 79 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan”; dan
 - 3) Pasal 79 Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”;
- b. Syarat-Syarat Umum masing-masing Kontrak/SPK/Surat Pesanan
 - 1) bagian penjelasan denda yang menyatakan bahwa “Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak”; dan
 - 2) bagian perhitungan denda yang menyatakan bahwa “Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - a) 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - b) 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
 - c) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK”; dan
- c. Syarat-Syarat Khusus masing-masing Kontrak/SPK/Surat Pesanan pada bagian yang menyatakan bahwa “Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga bagian Kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN)”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab Kapuas Hulu memiliki potensi penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp62.612.000,00 (Rp8.157.000,00 + Rp51.137.000,00 + Rp3.318.000,00).

Hal tersebut disebabkan Kepala Disdikbud, Kepala DPUPR dan DKPPKB selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan terhadap PPK dalam pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala Disdikbud, Kepala DPUPR dan Kepala DKPPKB untuk memerintahkan PPK untuk memproses pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp62.612.000,00 dengan penyetoran ke RKUD, terdiri dari:

- Disdikbud sebesar Rp8.157.000,00;
- DPUPR sebesar Rp51.137.000,00; dan
- DKPPKB sebesar Rp3.318.000,00.

6. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembelian Sembako Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 sebesar Rp354.002.875,00

LRA (*audited*) Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.659.746.914,00 atau 66,54%. Belanja tersebut direalisasikan oleh BPBD dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) yang dikoordinir oleh BKAD untuk penanganan bencana daerah dan bantuan sosial tidak direncanakan.

BPBD merealisasikan bantuan sembako kepada masyarakat korban bencana di sepuluh kecamatan dari sumber dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.013.249.000,00 berupa pengadaan mie instan, sarden dan minyak goreng yang dilaksanakan oleh CV. WTP.

Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa CV. WTP menerima transfer dari RKUD dalam tiga tahap dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.14 Realisasi SP2D Belanja Sembako Bersumber dari BTT

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Keterangan Dokumen	Nilai (Rp)
1	61.06/04.0/000363/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025	12 Juni 2025	BTT untuk pembayaran belanja barang sembako akibat bencana banjir sesuai SK Nomor 83/BPBD/2025	304.329.000,00
2	61.06/04.0/000367/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025	31 Juli 2025	BTT untuk pembayaran kedua barang sembako akibat penanganan bencana banjir sesuai SK Nomor 83/BPBD/2025	212.473.894,00
3	61.06/04.0/000412/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025	31 Juli 2025	BTT untuk pembayaran belanja barang sembako akibat bencana banjir sesuai SK Nomor 83/BPBD/2025	496.446.106,00
Jumlah				1.013.249.000,00

Setelah uang masuk ke rekening penyedia, bendahara pengeluaran BPBD meminta kepada penyedia untuk melakukan penarikan secara tunai (*cash*) melalui *cheque* Bank

Kalbar untuk disimpan oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan dokumen rekening koran diketahui penarikan dana dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.15 Rincian Penarikan dan Realisasi Belanja Sembako BTT

No.	Tanggal	Keterangan Dokumen	Nilai (Rp)
1	16 Juni 2025	Penarikan dana BTT belanja sembako tahap pertama	304.329.000,00
2	4 Agustus 2025	Penarikan dana BTT belanja sembako tahap kedua	708.920.000,00

Belanja sembako dilakukan di hari yang sama dengan penarikan dana secara tunai oleh penyedia dan bendahara pengeluaran di kota Pontianak. Berdasarkan dokumen bukti pembelian barang yang diserahkan oleh penyedia. Adapun rincian belanja sembako dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16 Realisasi Belanja Sembako oleh Penyedia

Dana BTT (Rp)	Tanggal	Item	Jumlah	Nilai (Rp)	Selisih (Rp)
304.329.000,00	19 Juni 2025	Minyak goreng kita	3.924	56.898.000,00	168.326.250,00
		Sarden kaleng kecil	8.200	46.084.000,00	
	21 Juni 2025	Gudang penyimpanan		3.437.000,00	
	4 Juli 2025	Mie instan kaldu	45	4.528.125,00	
	8 Juli 2025	Mie instan kaldu	249	25.055.625,00	
708.920.000,00	4 Agustus 2025	Tambahan	762	9.144.000,00	185.676.625,00
	4 Agustus 2025	Sarden kaleng kecil	14.000	80.640.000,00	
		Minyak goreng	9.144	132.588.000,00	
	18 Agustus 2025	Biaya angkut Putussibau – Kalis dan Embaloh Hulu		2.000.000,00	
	19 Agustus 2025	Biaya angkut Putussibau – Bunut Hilir		4.000.000,00	
	20 Agustus 2025	Jasa tarik dan penitipan truk		500.000,00	
	22 Agustus 2025	Minyak goreng	263	3.156.000,00	
		Minyak goreng	3.156	45.762.000,00	
		Minyak goreng	6.000	93.000.000,00	
	23 Agustus 2025	Biaya angkut Putussibau – Silat Hilir		3.000.000,00	
	25 Agustus 2025	Sarden Kaleng kecil	100	576.000,00	
	26 Agustus 2025	Mie instan kaldu	316	31.560.500,00	
	26 Agustus 2025	Biaya penginapan		5.000.000,00	
	28 Agustus 2025	Mie instan kaldu	1.024	102.272.000,00	
		Biaya bongkar muat		450.000,00	
		Carter truk PTK – PTS		5.500.000,00	
	27 September 2025	Mie instan kaldu	41	4.094.875,00	
Jumlah				659.246.125,00	354.002.875,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat selisih nilai belanja dengan pencairan dana BTT sebesar Rp354.002.875,00 (Rp1.013.249.000,00-Rp659.246.125,00). Hingga pemeriksaan berakhir, bendahara pengeluaran tidak dapat menjelaskan sisa dana dan penggunaannya. Keterangan dari bendahara pengeluaran diketahui bahwa:

- a. Bendahara pengeluaran bersama penyedia melakukan penarikan uang secara *cash* setelah uang ditransfer dari RKUD ke rekening penyedia;
- b. Bendahara mengakui adanya penggunaan dana BTT untuk kepentingan pribadi kepala pelaksana sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan secara tunai; dan
- c. Penggunaan dana BTT tidak sesuai peruntukan dilakukan untuk kepentingan di luar penanganan bencana yang diakui bendahara terdapat arahan dan permintaan dari kepala pelaksana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban penyaluran sembako diketahui distribusi sembako mulai dilakukan pada bulan Juni, sedangkan SK tanggap darurat bencana menetapkan status penanganan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan 5 April 2025.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPBD akan melakukan koordinasi dan upaya pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke RKUD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- a. Pasal 10 Ayat 1 Huruf e menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas salah satunya mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- b. Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
- c. Pasal 14 Ayat 2 Huruf a dan c menyatakan bahwa PPK-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; dan
 - 2) Melakukan verifikasi pelaporan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- d. Pasal 128 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp354.002.875,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala Pelaksana BPBD belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp354.002.875,00 dengan penyetoran ke RKUD.

B. Aset

1. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tujuh SKPD Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca (*audited*) per 31 Desember 2025 menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp197.937.032,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp888,00 mengalami kenaikan sebesar Rp197.936.144,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kas di Bendahara Pengeluaran diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

1.1 Penyetoran Sisa Uang Persediaan (UP) Melewati Akhir Tahun Anggaran

Berdasarkan rekapitulasi sisa kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 terdapat lima SKPD yang belum menyetorkan sisa UP ke RKUD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 1.17 Sisa UP yang Disetorkan Setelah 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp)	Tanggal Penyetoran Sisa UP	Nilai Penyetoran Sisa UP ke RKUD (Rp)	Jumlah Hari Keterlambatan
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik	8.570.444,00	15 Januari 2026	8.570.444,00	5 hari
2.	Kecamatan Batang Lupar	86.425.000,00	4 Februari 2026	30.000.000,00	25 hari
			26 Februari 2026	56.425.000,00	47 hari
3.	Kecamatan Embaloh Hulu	67.553.000,00	5 Januari 2026	27.106.000,00	-
			27 Januari 2026	40.447.000,00	17 hari
4.	Kecamatan Puring Kencana	28.733.500,00	28 Januari 2026	28.733.500,00	18 hari
5.	Kecamatan Semitau	6.654.200,00	28 Januari 2026	6.654.200,00	18 hari
6.	Kecamatan Badau	888,00	6 Mei 2026	888,00	126 hari
Jumlah		197.937.032,00		197.937.032,00	

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kewajiban pengembalian sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD yang melewati batas pengembalian ke RKUD hingga batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan penjelasan dari bidang Akuntansi BKAD diketahui bahwa menjelang akhir Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan rekonsiliasi dokumen pertanggungjawaban fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memastikan jumlah sisa uang yang tersisa di SKPD di akhir TA 2025. Hasil rekonsiliasi tersebut juga telah diinformasikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran jumlah sisa UP ke RKUD. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih terdapat sisa UP yang belum dikembalikan ke RKUD hingga 126 hari.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Badau sebesar Rp888,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Sisa

saldo tersebut merupakan bagian dari nilai penarikan kas sebesar Rp221.189,00 pada tanggal 30 Desember 2025. Atas sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp888,00 telah disetorkan kembali ke RKUD pada 6 Mei 2026.

Selain di Kecamatan Badau, permasalahan pengelolaan kas diantaranya juga terjadi di Kecamatan Batang Lupar dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Sisa UP yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Batang Lupar ke RKUD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp86.425.000,00. Uang tersebut digunakan untuk *reimburse* perjalanan dinas, belanja BBM, dan kegiatan operasional yang tidak tersedia anggarannya pada DPA. Namun penjelasan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan rincian penggunaan masing-masing pengeluaran yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban belanja. Sisa UP kemudian disetorkan ke RKUD sebagai berikut.

a) Pada tanggal 4 Februari 2026 sebesar Rp30.000.000,00; dan

b) Pada tanggal 26 Februari 2026 sebesar Rp56.425.000,00.

Pengembalian tersebut diketahui merupakan hasil talangan dari pegawai kecamatan dikarenakan jumlah kas yang sudah tidak tersedia.

- 2) Penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa di awal tahun 2026 BKAD tidak memproses pencairan UP TA 2026 Kecamatan Batang Lupar dikarenakan masih ada kewajiban penyetoran UP tahun 2025 yang belum disetor ke RKUD. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Batang Lupar karena UP TA 2026 yang belum dapat dicairkan.

1.2 Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Tiga Puskesmas Belum Sepenuhnya Selesai

DKPPKB telah merealisasikan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp519.191.100,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.18 Realisasi Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

No	Puskesmas	No SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)
1.	Puskesmas Hulu Gurung	61.06/04.0/000343/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PR/10/2025	7 Oktober 2025	388.642.300,00
2.	Puskesmas Putussibau Selatan	61.06/04.0/000347/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PR/10/2025	7 Oktober 2025	31.482.900,00
3.	Puskesmas Semitau	61.06/04.0/000348/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/PR/10/2025	7 Oktober 2025	99.065.900,00
Jumlah				519.191.100,00

Atas realisasi tersebut posisi belanja telah rampung sedangkan posisi dana jasa pelayanan (Jaspel) per tanggal 15 Oktober 2025 sebesar Rp498.765.123,00 yang menjadi hak para Tenaga Kesehatan masih dititip di rekening bendahara pengeluaran mengingat pola penyaluran dengan menggunakan *Cash Management System* (CMS).

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat tindak pidana penipuan dalam bentuk serangan digital (*phising*) melalui aplikasi sistem manajemen kas/ CMS milik Bank Kalbar pada rekening Bendahara Pengeluaran DKPPKB pada 15 Oktober 2025. Kejadian tersebut menyebabkan dana sebesar Rp498.765.123,00 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dana non kapitasi tiga puskesmas tidak dapat disalurkan. Tiga puskesmas tersebut di antaranya Puskesmas Semitau, Puskesmas Putussibau Selatan, dan Puskesmas Hulu Gurung. Atas permasalahan tersebut, Bendahara Pengeluaran Dinkes PP KB telah membuat laporan ke Kepolisian Resor (Polres) Kapuas Hulu dengan laporan nomor LAPMAS/78/X/2025/Kalbar/Res KH pada 16 Oktober 2025, namun hingga saat ini Polres Kapuas Hulu masih menunggu jawaban dari Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat untuk bantuan penyelidikan.

Dinkes PP KB telah melakukan upaya pembayaran jasa pelayanan kesehatan dana non kapitasi pada tiga puskesmas tersebut dengan menggunakan dana pribadi secara tanggung renteng antara Bendahara Pengeluaran bersama dengan beberapa Personel dari Dinkes PP KB dan telah tersalurkan sebesar Rp230.000.000,00 secara tunai kepada tiga puskesmas sehingga masih terdapat sisa dana yang belum disalurkan sebesar Rp268.765.123,00. Bendahara Pengeluaran dan beberapa Personel dari Dinkes PP KB telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran sampai dengan Tahun 2028. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - 1) Pasal 153 pada:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 2) Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Bagian II Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang daerah, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keempat menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran mempunyai

tugas menyelenggarakan pembukuan pertanggungjawaban atas pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko penggunaan kas UP di Bendahara Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya; dan
- b. Hak keuangan para tenaga kesehatan di tiga puskesmas belum sepenuhnya diterima.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik, Camat Batang Lupar, Camat Embaloh Hulu, Camat Puring Kencana, Camat Semitau, Camat Badau kurang optimal melakukan pengendalian terhadap Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan kas pada satuan kerjanya; dan
- b. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang optimal melakukan upaya percepatan penyelesaian jasa pelayanan bagi para tenaga kesehatan di tiga puskesmas.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik, Camat Batang Lupar, Camat Embaloh Hulu, Camat Puring Kencana, Camat Semitau, dan Camat Badau melakukan evaluasi terhadap bendahara pengeluaran masing-masing dilengkapi pernyataan komitmen untuk menyetorkan sisa UP/TU secara tepat waktu sesuai ketentuan; dan
- b. Kepala DKPPKB melakukan percepatan penyelesaian jasa pelayanan sebesar Rp268.765.123,00 bagi para tenaga kesehatan di tiga puskesmas.

2. Penagihan dan Penghapusan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 Berlarut-larut dan Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Neraca (*audited*) per 31 Desember 2025 menyajikan saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp862.539.000,00 dan telah disisihkan seluruhnya sebesar Rp862.539.000,00 dengan penyisihan 100%, sehingga nilai bersih yang tersaji adalah sebesar Rp0,00.

Penyisihan sebesar 100% dari nilai bruto Dana Bergulir tersebut menunjukkan bahwa seluruh nilai investasi secara akuntansi telah dianggap tidak dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* (NRV) dengan nilai sebesar Rp0,00. Kondisi penyisihan penuh ini telah berlangsung selama 10 tahun anggaran berturut-turut yaitu pada tahun 2015 s.d. 2025, yang mengindikasikan bahwa:

- a. Dana yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak dapat ditarik kembali dan tidak menunjukkan adanya prospek pengembalian;

- b. Tidak terdapat aktivitas program berupa pencairan baru, penagihan, maupun pelaporan perkembangan Dana Bergulir yang dapat mengkonfirmasi kelangsungan program; dan
- c. Aset secara substansi ekonomi telah kehilangan nilainya, namun masih tetap tersaji di Neraca dalam nilai bruto tanpa penyelesaian status akuntansi yang tuntas berupa penghapusbukuan (*write-off*).

Lebih lanjut, tim pemeriksa tidak menemukan adanya dokumen sumber berupa surat keputusan, peraturan kepala daerah, maupun keputusan pejabat yang berwenang lainnya yang secara resmi menyatakan penghentian total program Dana Bergulir atau divestasi atas Dana Bergulir tersebut. Ketiadaan dokumen keputusan formal tersebut menjadi hambatan mendasar bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat memproses penghapusbukuan Dana Bergulir secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga aset dengan NRV nihil ini terus muncul di Neraca dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian yang memadai.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan bahwa program Dana Bergulir tidak dapat lagi diidentifikasi dikarenakan sudah berlangsung cukup lama dan telah berganti-ganti kepala bidang yang menangani program tersebut. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan belum melakukan koordinasi dengan BKAD terkait usulan penghentian total program Dana Bergulir atau divestasi atas Dana Bergulir. Selain itu dijelaskan juga bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum melakukan koordinasi dengan PUPN terkait pemenuhan persyaratan dalam pengajuan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah Dana Bergulir.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir pada Bab V Penyajian dan Pengungkapan Dana Bergulir Poin A. Penyajian Dana Bergulir Paragraf 24 menyatakan bahwa, “Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku”;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah pada:
 - 1) Pasal 2, pada:
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari perbukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/ Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.;
 - b) Ayat (2) menyatakan bahwa Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan

- Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.;
- c) Ayat (2a) menyatakan bahwa Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.;
 - d) Ayat (3) menyatakan bahwa Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.
- 2) Pasal 13, pada ayat (1) menyatakan bahwa Penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:
- a) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b) melampirkan surat keterangan dari aparat pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 199 menyatakan bahwa Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah pada:
- 1) Pasal 11 menyatakan bahwa, “Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - a) Penentuan Kualitas Dana Bergulir;
 - b) Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir;
 - c) Pencatatan dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - d) Pelaporan Dana Bergulir; dan
 - e) Penghapusan Dana Bergulir”
 - 2) Pasal 16, pada:
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa, “Penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf e meliputi:
 - a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir”.
 - b) Ayat (2) menyatakan bahwa, “Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan”;

Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 di Neraca tidak memberikan kontribusi dan/atau manfaat terhadap penerimaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal tersebut disebabkan Bupati Kapuas Hulu belum sepenuhnya melaksanakan upaya penagihan dan/atau penghapusan piutang dana bergulir sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan pihak kantor Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKN) setempat untuk menyerahkan penagihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 yang memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN termasuk penyelesaian penghapusannya; dan
- b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk melakukan penertiban dan penyediaan dokumen, data dan informasi berkaitan dengan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 guna mendukung kelancaran upaya penagihan dan/atau penghapusan piutang tersebut.

3. Penyelesaian Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uncak Kapuas berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) dari Pemerintah Pusat Berlarut-larut

Neraca (*audited*) per 31 Desember 2025 menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) sebesar Rp164.237.423.844,95. Dari jumlah tersebut, penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uncak Kapuas pada tahun 2025 sebesar Rp20.703.951.702,95. PMPD tersebut dinilai dengan metode ekuitas untuk kepemilikan 50% atau 20% - 50%, namun memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa Pemerintah Daerah berhak memperoleh laba usaha PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian laba atas hasil usaha PMPD Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke RKUD.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa nilai Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal pada Perumda Tirta Uncak Kapuas yang disajikan sebesar Rp20.703.951.702,95. Nilai tersebut berasal dari akumulasi penyertaan modal sebesar Rp20.087.930.450,91 dan koreksi ekuitas terhadap laba tahun berjalan sebesar Rp616.021.252,04.

Berdasarkan Neraca pada Laporan Keuangan Perumda Tirta Uncak Kapuas Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam pos ekuitas terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Pusat YBDS sebesar Rp49.736.328.325,00. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat YBDS tersebut merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang telah disalurkan dan dimanfaatkan oleh Perumda Tirta Uncak Kapuas dalam rangka mendukung operasional dan penguatan struktur permodalan perusahaan. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan status YBDS tersebut,

dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian seharusnya dana tersebut sudah dialihkan kepemilikannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemkab Kapuas Hulu. Namun hingga akhir tahun 2025, pengalihan dana tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemkab Kapuas Hulu melalui mekanisme hibah dari Pemerintah Pusat. Sehingga belum dapat diakui secara sah sebagai PMPD dalam laporan keuangan. Apabila hibah tersebut telah ditetapkan, maka pemerintah daerah wajib mencatatnya sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah secara Non Kas pada BUMD yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pengalihan tersebut, total nilai PMPD yang seharusnya mencerminkan total modal Perumda Tirta Uncak Kapuas adalah sebesar Rp70.440.280.027,95 (Rp20.703.951.702,95 + Rp49.736.328.325,00).

Berdasarkan keterangan Kepala Bagian Keuangan Perumda Tirta Uncak Kapuas, diketahui bahwa dari total nilai Rp49.736.328.325,00 yang dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (YBDS) merupakan nilai aset tetap yang diterima Perumda Tirta Uncak Kapuas dari Proyek/Satuan Kerja non Vertikal Tertentu (SNVT) yang bersumber dananya dari pemerintah pusat (APBN) per 31 Desember 2013 dan 2012. Namun dari nilai tersebut yang berhasil diidentifikasi sebesar Rp13.295.577.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.19 Rincian atas Besaran Nilai yang Telah Teridentifikasi

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai Kontrak (Rp)	No Kontrak	Sumber Dana
1	Pengadaan Pipa PVC 150 MM	Embaloh	2360 MM	1.267.528.000,00	BA-ST/PKPAM-CK/2012	APBN 2012
2	Pengadaan Pipa PVC 100 MM		2420 MM	1.360.862.000,00		
3	Pembuatan IPA Kapasitas 10 L/dt	Embaloh	1	5.128.000.000,00	47/BA-ST/PKPAM-CK/2012	APBN 2013
4	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan	Selimbau		594.687.000,00	05/KU.08.08/PKPAM-CK/2013	APBN 2013
5	Rehab IPA	Kedamin		4.944.500.000,00	BAPP-AM/PKPAM-CK/2013	APBN 2013
Total				13.295.577.000,00		

Berdasarkan tabel di atas, maka masih terdapat selisih Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (YBDS) sebesar Rp36.440.751.325,00 (Rp49.736.328.325,00 – Rp13.295.577.000,00). Atas selisih tersebut belum dapat diidentifikasi dan ditelusuri lebih rinci ke dokumen sumbernya baik berupa dokumen hibah, berita acara serah terima, maupun dokumen pengesahan lainnya. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen yang telah lama dan Kepala Bagian Keuangan Perumda Tirta Uncak Kapuas telah dilakukan pergantian. Sampai dengan pemeriksaan berakhir data-data dan dokumen terkait rincian atas nilai tersebut belum didapatkan.

Pemkab Kapuas Hulu hingga akhir tahun 2025 belum menyesuaikan nilai penyertaan modal dalam LKPD, sehingga nilai penyertaan modal masih sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 dengan nilai penyertaan sebesar Rp47.182.000.000,00. Perda tersebut belum dilakukan perubahan untuk mengakomodir tambahan penyertaan modal maksimal sebesar Rp49.736.328.325,00 dari hibah pemerintah pusat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas PMK nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara dijelaskan bahwa bentuk pemindahtanganan Barang Milik Negara meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahtanganan atau pemberian Barang Milik Negara ke Pemerintah Daerah/BUMD bukan selalu merupakan penyertaan modal.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada:

1) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham; dan

2) Pasal 21:

a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilakukan dalam rangka pendirian BUMD atau penambahan modal BUMD; dan

a. Ayat (5) yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas PMK nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada:

1) Pasal 99 pada:

a. Ayat (1) yang menyatakan “Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Ayat (2) yang menyatakan “Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:

1. Huruf a yang menyatakan “BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah”;

2. Huruf b yang menyatakan “BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk”.

c. Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

2) Pasal 104 ayat (2) yang menyatakan “BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat yang berada pada Pengguna Barang meliputi BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dan/

atau selain tanah dan/ atau bangunan sesuai dokumen penganggaran dalam rangka penugasan pemerintah”.

- 3) Pasal 104A yang menyatakan “Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran pengadaan BMN; atau 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran kontrak tahun jamak”.
- c. Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 6:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Bagian laba usaha yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM merupakan komponen pendapatan asli daerah;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan PDAM; dan
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah

Permasalahan tersebut mengakibatkan substansi kepemilikan penuh (100%) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atas Perumda Tirta Uncak Kapuas belum sepenuhnya didukung aspek formalnya.

Hal tersebut disebabkan Bupati Kapuas Hulu dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selaku pihak yang merepresentasikan pemilik satu-satunya dari Perumda Tirta Uncak Kapuas belum sepenuhnya melakukan pengendalian terhadap pengelolaan BUMD di lingkungan entitas yang dipimpinnya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar memproses penyelesaian status bantuan pemerintah YBDS sebesar Rp49.736.328.325,00 menjadi tambahan penyertaan modal Pemkab Kapuas Hulu pada Perumda Tirta Uncak Kapuas sesuai ketentuan.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca (*audited*) per 31 Desember 2025 menyajikan nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.777.559.412.177,37. Jumlah ini menurun sebesar Rp68.689.429.162,03 dibandingkan nilai Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp2.846.248.841.339,40. Perincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.20 Perincian Aset Tetap Kabupaten Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo TA 2025	Saldo TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Tanah	242.777.245.472,30	242.777.245.472,30	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	551.124.801.215,28	500.744.877.277,01	50.379.923.938,27
3.	Gedung dan Bangunan	1.779.716.957.329,81	1.588.697.933.685,69	191.019.023.644,12

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo TA 2025	Saldo TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.665.615.937.753,24	3.589.990.166.611,55	75.625.771.141,69
5.	Aset Tetap Lainnya	36.695.054.097,75	32.702.662.647,76	3.992.391.449,99
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.678.040.197,59	256.990.787.233,54	(142.312.747.035,95)
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.613.048.623.888,60)	(3.365.654.831.588,45)	(247.393.792.300,15)
Jumlah		2.777.559.412.177,37	2.846.248.841.339,40	(68.689.429.162,03)

Pengelolaan BMD pada Pemkab Kapuas Hulu dilakukan oleh seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, yang dikoordinasi oleh BKAD selaku Pembantu Pengelola BMD. Penatausahaan laporan BMD TA 2025 yang meliputi Aset Tetap dan Aset Lainnya, menggunakan bantuan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIP-BMD). Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari aplikasi SIP-BMD berupa buku dan kartu inventaris barang (KIB), buku inventaris barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel, daftar penyusutan per KIB, serta rekapitulasi BMD di Neraca. Laporan-laporan tersebut digunakan sebagai sumber data untuk penyusunan dan pemutakhiran Neraca Pemkab Kapuas Hulu TA 2025.

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Aset Tetap TA 2025 pada Pemkab Kapuas Hulu masih ditemukan permasalahan sebagai berikut.

4.1 Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Tidak Sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD Bentuk pemanfaatan BMD di antaranya yaitu pinjam pakai. Berdasarkan hasil analisa dokumen pemanfaatan aset tetap diketahui bahwa pemanfaatan aset tetap dalam bentuk pinjam pakai dilaksanakan tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas 17 unit aset tetap peralatan dan mesin kendaraan bermotor yang dipinjam-pakaikan.

Hasil pemeriksaan terhadap perjanjian pinjam pakai aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau (ADP) diketahui bahwa terdapat 17 unit kendaraan bermotor yang belum membayar PKB sampai dengan akhir tahun 2025. Unit-unit tersebut terdiri dari delapan unit kendaraan bermotor roda empat dan sembilan unit kendaraan bermotor roda dua dengan lama tunggakan bervariasi antara 1 s.d. 7 tahun. Perincian tunggakan PKB masing-masing kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.21 Perincian Tunggakan PKB atas 17 unit Kendaraan

No	No Register	Plat Nomor	Nama Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal Pembayaran Terakhir	Masa Berlaku PKB Terakhir	SKPD Pengelola
1	1.3.2.02.01.01.003.0001	KB 1556 FA	Toyota/Avanza	189.300.000,00	04/06/2024	04/06/2025	RSUD ADP
2	1.3.2.02.01.01.003.0001	KB 1568 F	Toyota/Rush	170.860.000,00	23/08/2022	23/08/2023	RSUD ADP
3	1.3.2.02.01.01.003.0001	KB 1695 FA	Toyota/Avanza	191.150.000,00	01/09/2024	01/09/2025	RSUD ADP

No	No Register	Plat Nomor	Nama Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal Pembayaran Terakhir	Masa Berlaku PKB Terakhir	SKPD Pengelola
4	1.3.2.02.01.01.003.0001	KB 1715 F	Toyota/Rush	207.500.000,00	10/07/2023	10/07/2024	RSUD ADP
5	1.3.2.02.01.01.003.0001	KB 1822 FA	Toyota/Avanza	190.315.000,00	15/09/2024	15/09/2025	RSUD ADP
6	1.3.2.02.01.01.003.0002	KB 1823 FA	Toyota/Avanza	190.315.000,00	15/09/2020	15/09/2021	RSUD ADP
7	1.3.2.02.01.01.001.0001	KB 1868 FB	Daihatsu/Ayla	119.852.775,00	26/10/2019	26/10/2020	RSUD ADP
8	1.3.2.02.01.01.001.0002	KB 1869 FB	Daihatsu/Ayla	119.852.775,00	26/10/2024	26/10/2025	RSUD ADP
9	1.3.2.02.01.04.001.00002	KB.4189 FD	Yamaha/Vixion	27.552.791,47	17/09/2023	17/09/2024	Sekretariat DPRD
10	1.3.2.02.01.04.001.000001	KB 5092 FU	Yamaha/WR 155 R	37.730.000,00	17/10/2024	17/10/2025	Sekretariat Daerah
11	1.3.2.02.01.04.001.000003	KB 5091 FU	Yamaha/WR 155 R	37.730.000,00	17/10/2022	17/10/2023	Sekretariat Daerah
12	1.3.2.02.01.04.001.000004	KB 4210 FU	Kawasaki/151 BF SE Xtreme	41.472.000,00	19/08/2022	19/08/2023	Sekretariat Daerah
13	1.3.2.02.01.04.001.000006	KB 4765 FU	Yamaha/GEAR 125 S	19.770.000,00	27/09/2022	27/09/2023	Sekretariat Daerah
14	1.3.2.02.01.04.001.000007	KB 4766 FU	Yamaha/GEAR 125 S	19.770.000,00	27/09/2022	27/09/2023	Sekretariat Daerah
15	1.3.2.02.01.04.001.000011	KB 4769 FU	Yamaha/GEAR 125 S	19.770.000,00	27/09/2022	27/09/2023	Sekretariat Daerah
16	1.3.2.02.01.04.001.000016	KB 5149 FU	Yamaha/GEAR 125 S	19.770.000,00	18/10/2024	18/10/2025	Sekretariat Daerah
17	1.3.2.02.01.04.001.000005	KB 5722 FW	Yamaha/Mio M3 125	21.030.000,00	21/08/2024	21/08/2025	Sekretariat Daerah

Atas hal ini, Kepala Bidang Aset Daerah BKAD (Kabid Aset BKAD) dan Subkor Penatausahaan dan Perencanaan BMD menyatakan bahwa telah menyampaikan pengaturan terkait biaya operasional dan biaya pemeliharaan untuk dicantumkan pada Berita Acara Pinjam Pakai dan/atau Pakta Integritas pemakaian BMD di masing-masing SKPD. Bidang Aset BKAD juga menyampaikan kepada masing-masing pengurus barang untuk memeriksa kembali aset-aset kendaraan saat pihak pengguna mengembalikan kendaraan tersebut, termasuk tunggakan pajak selama pemakaian.

4.2 Pengamanan dan Pemeliharaan atas Aset Tetap Belum Tertib Dilaksanakan

Pengamanan aset tetap BMD meliputi pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa aspek pengamanan BMD Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai dengan uraian permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat 1.108 bidang tanah yang belum mempunyai sertifikat

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menyebutkan bahwa aspek pengamanan hukum dilakukan untuk aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat atau yang sudah bersertifikat namun belum atas nama

Pemerintah Daerah. Kepemilikan sertifikat hak milik atau Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan tindakan terkait upaya pengamanan dalam bentuk hukum untuk aset tetap tanah yang berada dalam penguasaan Pemkab Kapuas Hulu.

Hasil pemeriksaan atas aset tanah menunjukkan bahwa per 31 Desember 2025, dari 1.593 bidang tanah terdapat 1.108 bidang atau sebesar Rp127.341.470.314,48 yang belum mempunyai aspek pengamanan kepemilikan yaitu berupa sertifikat ataupun SKT atas nama Pemkab Kapuas Hulu. Perincian 1.108 bidang aset tanah yang belum mempunyai sertifikat atau SKT terdapat pada **Lampiran 25**.

- 2) Aset tetap tanah sebanyak dua bidang dengan nilai sebesar Rp1.471.800.000,00 dikuasai pihak lain

Pemerintah daerah diamanatkan untuk menggunakan BMD dan mengamankan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan baik secara fisik, administrasi, dan hukum. Langkah pengamanan antara lain adalah dengan melakukan inventarisir, memelihara, dan melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap BMD yang berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik, ditemukan adanya dua bidang aset tetap tanah yang masih dikuasai pihak lain seperti pejabat yang telah usai masa jabatannya, pegawai yang sudah mutasi dan/atau pegawai yang telah pensiun. Perincian dua bidang aset tanah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.22 Perincian Dua Bidang Tanah Dikuasai Pihak Lain

No	No Register	Alamat	Luas	Nilai Perolehan (Rp)	Sertifikasi	Pihak yang Menguasai
1	1.3.1.01.01.04.001	Putussibau Kota, Jl Antasari	4.590 m ²	91.800.000,00	Hak Pakai No. 111 Tahun 1983	M. Arif wahyudi dan Rusmin
2	1.6.1.01.01.01.001	Jl. Patimura	185 m ²	1.380.000.000,00	Hak pakai No.00296 Tahun 2019	Edi Jhunpiktor
Jumlah				1.471.800.000,00		

Hasil wawancara dengan Kabid Aset dan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan BMD (Subkor Penilaian dan Penghapusan BMD) diketahui bahwa kedua bidang tanah tersebut semula merupakan tanah pemerintah daerah yang tidak difungsikan. Seiring berjalanan waktu, terdapat individu yang kemudian mendirikan hunian permanen pada tanah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 Pemkab Kapuas Hulu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penilaian ulang biaya sewa atas seluruh aset gedung dan tanah milik Pemkab Kapuas Hulu. Hasil penilaian tersebut kemudian ditetapkan dalam beberapa surat keputusan, di antaranya adalah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 171/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengguna Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemkab Kapuas Hulu, serta Keputusan Bupati

Kapuas Hulu Nomor 185/BKAD/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004 tentang Penunjukan Penghuni dan Besarnya Sewa Bangunan dan/atau Tanah Milik Pemkab Kapuas Hulu. Kedua keputusan ini memuat daftar nama penghuni, alamat aset tanah, serta nilai besaran sewa per tahun. Namun sampai dengan akhir pemeriksaan, upaya pengamanan aset melalui kesepakatan perjanjian sewa belum terjadi lantaran pihak pengguna aset merasa telah membeli aset tersebut dan tidak bersedia membayar sewa tanah kepada Pemkab Kapuas Hulu.

- 3) Aset tetap peralatan dan mesin sebanyak satu unit dengan nilai sebesar Rp7.548.000,00 tidak diketahui keberadaannya

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik, diketahui bahwa terdapat satu unit aset tetap peralatan dan mesin berupa laptop pada RSUD ADP yang tidak diketahui keberadaannya. Aset tetap tersebut memiliki nomor register 1.3.2.10.01.02.002.000037 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.548.000,00 pada tahun 2025.

Hasil wawancara dengan pengurus barang RSUD ADP diketahui bahwa laptop tersebut semula dipinjamkaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha RSUD ADP dengan nomor BAST 400.7.5.6/203.a/DKKB/RSUD-ADP/TU-A pada tanggal 5 Februari 2025 dengan kondisi baik dan layak pakai. Namun berdasarkan keterangan pengurus barang, pada awal tahun 2026 sekitar bulan Januari, laptop tersebut tidak berada di tempat penyimpanannya.

Dalam pelaksanaannya, laptop tersebut rutin digunakan secara bersama oleh seluruh bidang untuk mendukung kegiatan. Proses peminjaman dilakukan secara lisan melalui Bidang Administrasi dan Umum, selanjutnya peminjam mengambil langsung laptop di ruang Kepala Bagian Tata Usaha. Setelah penggunaan, laptop dikembalikan ke ruang Bidang Administrasi dan Umum atau langsung ke ruang Kepala Bagian Tata Usaha tanpa melalui mekanisme yang terkoordinasi. Proses peminjaman dan pengembalian tersebut tidak didukung dengan pencatatan administrasi yang memadai, seperti daftar peminjam, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian, sehingga penggunaan dan keberadaan laptop tidak dapat ditelusuri secara tertib dan akuntabel.

- 4) Aset tetap peralatan dan mesin sebanyak satu unit dengan nilai sebesar Rp460.930.000,00 dikuasai pihak lain

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik, ditemukan adanya satu unit aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat yang masih dikuasai oleh pejabat yang telah usai masa jabatannya. Unit tersebut terdaftar dengan nomor register 1.3.2.02.01.02.003 pada KIB B sebagai Mini Bus Toyota Voxy 2.0 AT yang memiliki plat nomor KB 1192 FC dengan nilai perolehan sebesar Rp460.930.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Aset, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Kabag Umum Sekda) serta pengurus barang, diketahui bahwa semula unit tersebut merupakan kendaraan jabatan yang dialokasikan untuk operasional mantan Wakil Bupati periode 2021 s.d. 2025. Saat masa

jabatan Wakil Bupati telah berakhir, kendaraan tersebut belum dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah karena adanya minat mantan Wakil Bupati untuk membeli kendaraan yang dimaksud melalui mekanisme penjualan tanpa lelang. Namun, dengan mempertimbangkan masa jabatan mantan Wakil Bupati yang kurang dari satu bulan lagi untuk genap menjadi empat tahun, Bagian Umum Sekretariat Daerah mempertimbangkan ulang untuk menarik kendaraan tersebut sampai memperoleh kepastian jawaban mengenai boleh tidaknya penjualan kendaraan tersebut melalui mekanisme tanpa lelang.

- 5) Aset tetap gedung dan bangunan sebanyak satu unit dengan nilai sebesar Rp22.827.607,14 dikuasai pihak lain

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik, ditemukan adanya satu unit aset tetap gedung dan bangunan berupa Rumah Negara Tipe II yang masih dikuasai oleh keluarga pejabat yang telah usai masa jabatannya. Unit tersebut masih terdaftar secara gabungan pada KIB C bersama dengan 55 unit rumah lainnya. Aset gabungan terdaftar dengan nomor register 1.3.3.01.01.01.002 dengan keterangan Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen berlokasi di Jl. A. Pangkar, Komplek M. Yamin sebesar Rp1.278.346.000,00 di tahun 2004. Dengan begitu, dapat dikalkulasi bahwa satu unit rumah tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp22.827.607,14 per unit (Rp1.278.346.000,00 : 56 unit rumah).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Aset dan Subkor Penilaian dan Penghapusan BMD diketahui bahwa semula unit tersebut merupakan rumah dinas yang disewakan kepada seorang PNS bernama sdr. JH dengan tarif sebesar Rp32.394,00 per bulan, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 89 Tahun 2005 tentang Penunjukan Penghuni dan Penetapan Besarnya Sewa atas Rumah Dinas Milik Pemkab Kapuas Hulu. Seiring berjalannya waktu, rumah dinas tersebut kemudian dilanjutkan oleh sdr. YLH yang merupakan keluarga dari penyewa pertama. Pembayaran sewa ini kemudian terhenti di tahun 2021, sehingga terdapat tunggakan sewa selama beberapa tahun.

Pada tahun 2024, Pemkab Kapuas Hulu dibantu dengan KPKNL Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penilaian ulang biaya sewa atas seluruh aset gedung dan tanah milik Pemkab Kapuas Hulu, termasuk 56 rumah di Komplek M. Yamin. Hasil penilaian tersebut kemudian ditetapkan dalam beberapa surat keputusan, di antaranya adalah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 186/BKAD/2025 tentang Penunjukan Penghuni dan Penetapan Besarnya Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemkab Kapuas Hulu Komplek M. Yasim, Putussibau. Salah satu penunjukan penghuni tersebut adalah rumah sdr. YLH dengan besaran sewa terbaru sebesar Rp2.163.900,00 per tahun. Namun, dengan adanya tunggakan pembayaran sewa sejak tahun 2021, Bidang Aset BKAD tidak melanjutkan penerbitan perjanjian sewa terhadap rumah tersebut. Sampai dengan pemeriksaan dilakukan, belum terdapat kesepakatan sewa antara Bidang Aset BKAD dengan sdr. YLH.

4.3 Pemindahtanganan Aset Tetap atas Perubahan Kewenangan Daerah Belum Sepenuhnya Tertib Dilaksanakan

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur bahwa BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dipindahtangankan sesuai ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelaahan atas status penguasaan dan/atau pengelolaan aset tetap yang saat ini berada pada Pemkab Kapuas Hulu, apakah tetap menjadi kewenangannya atau telah beralih kepada pemerintah daerah lain, maupun sebaliknya. Dalam hal terdapat pengalihan kewenangan dari Pemkab Kapuas Hulu kepada pemerintah daerah lain, maka Bidang Aset BKAD perlu menyusun dan menindaklanjuti proses Pengalihan Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) secara memadai kepada pihak yang menerima kewenangan. Sebaliknya, apabila Pemkab Kapuas Hulu menerima pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah lain, maka perlu dilakukan penatausahaan dan pengamanan aset yang terkait, termasuk mendorong proses pemindahtanganan aset sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pemindahtanganan aset tetap dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Pemkab Kapuas Hulu belum mendorong percepatan hibah aset tetap tanah oleh pemerintah desa (pemdes)

Berdasarkan hasil pemeriksaan data sebaran lokasi *Base Transceiver Station* (BTS) program BAKTI Komdigi, diketahui bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 160 titik lokasi pembangunan menara BTS yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dalam pelaksanaannya, dari rencana 160 titik, 5 titik di antaranya telah dilakukan terminasi pada tahun 2025, sehingga tersisa 155 titik tower yang masih menjadi bagian dari program tersebut.

Pembangunan infrastruktur menara BTS kemudian melibatkan pemdes sebagai pihak yang akan memberikan lahan. Lahan tersebut kemudian dihibahkan kepada Pemkab Kapuas Hulu. Proses hibah tanah ini dilakukan melalui surat hibah tanah dari pemdes dan menjadi dasar pencatatan dan kepengurusan sertifikasi tanah oleh Bidang Aset BKAD. Perbandingan antara pencatatan aset tetap tanah pada KIB A terhadap data sebaran lokasi BTS, diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2025, aset tanah di bawah menara BTS berjumlah 28 bidang. Artinya, terdapat 127 bidang tanah di bawah menara BTS yang belum dihibahkan oleh pemdes terkait. Perincian atas status pencatatan aset tanah, lokasi, dan data menara BTS dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

Hasil wawancara dengan Subkor Penatausahaan dan Perencanaan BMD diketahui bahwa atas 127 bidang tanah, 7 di antaranya baru dihibahkan pada awal tahun 2026. Sehingga pencatatan dalam KIB A 2025 belum memperhitungkan 7 bidang tersebut. Selain itu dijelaskan juga bahwa sejauh

ini belum terdapat percepatan penyerahan hibah atas 120 bidang aset tetap tanah yang belum dilaksanakan. Bidang Aset BKAD juga belum berkoordinasi dengan pemdes terkait kendala dalam penyusunan surat hibah tanah atau dokumen yang dipersamakan lainnya.

- 2) Pemindahtanganan P3D kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) belum diselesaikan dan masih tercatat pada masing-masing KIB

Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 130/1523/SETDA/PEM-A/14/PEM/2016 tanggal 3 November 2016, diketahui bahwa telah terdapat serah terima P3D antara Pemkab Kapuas Hulu kepada Pemprov Kalbar dengan rangkuman sebagai berikut.

- a) 338 daftar nama ASN, dengan rincian 292 orang dari bidang pendidikan, 41 orang dari bidang kehutanan, 4 orang dari bidang ketenagakerjaan, dan 1 orang dari bidang ketenagalistrikan;
- b) 15 bidang aset tetap tanah dibawah bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN);
- c) 176 unit aset tetap gedung dan bangunan berupa gedung SMAN, SMKN, bangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan bangunan terminal;
- d) 14 unit aset tetap jalan, irigasi dan jaringan kantor; dan
- e) 1.848 unit aset tetap lainnya berupa buku SMAN dan SMKN, serta 1 cluster tanaman persemaian kehutanan.

Namun, hasil analisa dokumen KIB menunjukkan bahwa masih terdapat aset tetap yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar selain yang telah diserahkan. Aset tetap tersebut tercatat pada masing-masing KIB per 31 Desember 2025 dengan rangkuman sebagai berikut.

Tabel 1.23 Rangkuman Aset Tetap Kewenangan Pemprov Kalbar yang Masih Dicatat pada KIB

No	Jenis Aset Tetap / KIB	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	Tanah / KIB A	2 Bidang	890.108.450,00
2	Gedung dan Bangunan / KIB C	19 Unit	4.874.091.478,58
3	Aset Tetap Lainnya / KIB E	166 Item	169.374.240,15
Jumlah			5.933.574.168,73

Rincian atas tabel di atas dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Aset serta Subkor Penatausahaan dan Perencanaan BMD, diketahui bahwa aset tetap tersebut merupakan aset yang seharusnya diserahkan karena menjadi kewenangan Pemprov Kalbar sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Disampaikan pula bahwa pada saat pelaksanaan P3D di tahun 2016, proses inventarisir dan identifikasi aset belum dilakukan secara memadai serta belum didukung dengan dokumen perolehan yang lengkap dan handal. Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat aset-aset tetap yang terlewat dalam

proses pengalihan, sehingga masih terdapat aset yang secara kewenangan telah beralih kepada Pemprov Kalbar, namun secara administratif masih tercatat dalam KIB Pemkab Kapuas Hulu.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 menyatakan bahwa “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
 - 1) Pasal 12 ayat (3) butir c, menyatakan bahwa “Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”;
 - 2) Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa “Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di antaranya bertanggung jawab meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu”;
 - 3) Pasal 16 ayat (2) di antaranya menyatakan bahwa “Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pencatatan dan inventarisasi serta membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang”; dan
 - 4) Pasal 483 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya risiko membebani keuangan daerah atas pembayaran PKB beserta denda untuk kendaraan dinas yang dipinjamkaikan.
- b. Adanya risiko penguasaan oleh pihak lain dan kehilangan BMD serta sengketa hukum minimal terhadap:
 - 1) 1.108 aset tetap tanah yang belum dilakukan proses sertifikasi di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu;
 - 2) Aset tetap tanah sebanyak 2 bidang dengan nilai sebesar Rp1.471.800.000,00 dikuasai pihak lain;
 - 3) Aset tetap peralatan dan mesin berupa satu unit kendaraan bermotor roda empat dengan nilai sebesar Rp460.930.000,00 dikuasai pihak lain; dan

- 4) Aset tetap gedung dan bangunan berupa satu unit rumah dinas dengan nilai sebesar Rp22.827.607,14 dikuasai pihak lain.
- c. Potensi kerugian daerah atas aset tetap peralatan dan mesin berupa satu unit laptop sebesar Rp7.548.000,00 yang hilang dan belum dipertanggungjawabkan;
- d. Pengelolaan aset tetap tanah di bawah menara BTS sebanyak 120 bidang yang belum memiliki dasar pencatatan;
- e. Terdapat salah saji atas penyajian saldo aset tetap yang bukan merupakan milik Pemkab Kapuas Hulu, minimal terhadap:
 - 1) 2 bidang tanah sebesar Rp890.108.450,00;
 - 2) 19 unit gedung dan bangunan sebesar Rp4.874.091.478,58; dan
 - 3) 166 item aset tetap lainnya sebesar Rp169.374.240,15.

Hal tersebut disebabkan Sekretaris Daerah, Kepala BKAD dan Kepala SKPD terkait selaku pengelola dan pengguna barang milik daerah tidak cermat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan entitasnya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasi Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk:
 - 1) Melakukan pengamanan fisik BMD secara berkesinambungan untuk seluruh BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, minimal terhadap BMD tanah sebanyak dua bidang dengan nilai sebesar Rp1.471.800.000,00, BMD peralatan dan mesin berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 dengan nilai sebesar Rp460.930.000,00, BMD gedung dan bangunan berupa satu unit rumah dinas dengan nilai sebesar Rp22.827.607,14 yang dikuasai pihak lain;
 - 2) Menyusun program bidang kegiatan untuk percepatan proses sertifikasi 1.108 bidang tanah dan penyerahan hibah 120 bidang tanah;
 - 3) Menyelesaikan pemindahtanganan atas BMD yang bukan merupakan milik Pemkab Kapuas Hulu, minimal terhadap:
 - a) 2 bidang tanah sebesar Rp890.108.450,00;
 - b) 19 unit gedung dan bangunan sebesar Rp4.874.091.478,58; dan
 - c) 166 item aset tetap lainnya sebesar Rp169.374.240,15.
 - 4) Memerintahkan pengguna kendaraan bermotor sebanyak 17 unit di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau (ADP) untuk melakukan pembayaran PKB sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian pinjam pakai.
- b. Masing-masing Kepala SKPD terkait untuk:
 - 1) Melakukan pencatatan penggunaan kendaraan dinas operasional; dan

- 2) Berkoordinasi dengan TPKD dalam rangka memproses kerugian daerah atas BMD berupa satu unit laptop sebesar Rp7.548.000,00 yang hilang dan belum dipertanggungjawabkan.

5. Penyelesaian Pelepasan dan/atau Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp284.311.083.517,04 dan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.787.577.500,00 Berlarut-larut

Neraca (*audited*) per 31 Desember 2025 menyajikan nilai Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp144.297.138.529,91. Jumlah ini menurun sebesar Rp16.169.052.294,21 dibandingkan nilai Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp160.466.190.824,12. Perincian aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.24 Perincian Aset Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo TA 2025	Saldo TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tagihan Jangka Panjang	1.987.894.004,00	1.987.894.004,00	0
2	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	-1.987.894.004,00	-1.987.894.004,00	0
3	Aset Tidak Berwujud	2.015.772.082,99	1.911.184.082,99	104.588.000,00
4	Aset Lain-lain	284.311.083.517,04	295.121.607.903,25	-10.810.524.386,21
5	Akumulasi Amortisasi ATB	-1.373.786.734,32	-1.184.597.132,79	-189.189.601,53
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-140.655.930.335,80	-140.418.121.029,33	-237.809.306,47
7	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	0	5.036.117.000,00	-5.036.117.000,00
Jumlah		144.297.138.529,91	160.466.190.824,12	-16.169.052.294,21

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kartu Inventaris Aset Lainnya, kertas kerja aset lainnya, dan kebijakan akuntansi serta konfirmasi dengan Bidang Aset Daerah BKAD, Kepala Bidang Akuntansi BKAD, serta pengurus barang SKPD terkait pengelolaan Aset Lainnya TA 2025, ditemukan permasalahan sebagai berikut.

5.1 Penyajian Aset Lain-Lain Belum Optimal dan Didukung dengan Hak Kepemilikan

Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2025, Pemkab Kapuas Hulu menyajikan saldo Aset Lain-lain sebesar Rp284.311.083.517,04 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp140.655.930.335,80. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemkab Kapuas Hulu, akun ini terdiri dari aset tetap rusak berat yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset fasilitas sosial dan fasilitas umum, aset tetap yang belum ditetapkan statusnya, dan kas dikonsinyasikan.

Berdasarkan penyajian nilai tren atas Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya selama 2021 s.d. 2025, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, nilai *net value* atas Aset Lain-lain masih stagnan dan perlu menjadi perhatian. Perincian data tren selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.25 Perincian Tren Aset Lain-lain Tahun 2021 s.d. 2025

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Saldo TA 2025	Saldo TA 2024	Saldo TA 2023	Saldo TA 2022	Saldo TA 2021
1	Aset Lain-lain	284.311.083.517,04	295.121.607.903,25	304.412.505.302,94	298.166.383.785,59	279.495.726.845,48
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(140.655.930.335,80)	(140.418.121.029,33)	(156.081.104.145,70)	(150.896.028.718,32)	(140.645.730.028,71)
3	Net Value	143.655.153.181,24	154.703.486.873,92	148.331.401.157,24	147.270.355.067,27	138.849.996.816,77

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aset Lain-lain yang tersaji pada Neraca selama tahun 2021 s.d. 2025 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp292.301.461.470,86 sepanjang tahun 2021 s.d. 2025. Nilai tersebut memiliki *net value* rata-rata sebesar Rp146.562.078.619,29 dengan rata-rata akumulasi penyusutan sebesar Rp145.739.382.851,57. Nilai *net value* Aset Lain-lain yang relatif stagnan selama periode 2021 s.d. 2025 ini memberikan gambaran bahwa proses penyelesaian atas aset yang telah dihentikan dari penggunaan aktif, baik melalui penghapusan, pemindahtanganan, maupun penjualan, belum berjalan optimal. Selain itu, dengan penyajian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya hingga Rp140.655.930.335,80 di Neraca tahun 2025, menunjukkan bahwa sebagian besar Aset Lain-lain telah mengalami penurunan nilai buku hingga mencapai 100%. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa aset yang secara substansi sudah tidak memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan masih terus dipertahankan dalam pencatatan neraca tanpa tindak lanjut memadai.

Selain itu, hasil pengujian secara uji petik atas dokumen inventaris Aset Lain-lain diketahui bahwa saldo sebesar Rp284.311.083.517,04 seluruhnya terdiri atas aset tetap dalam kondisi rusak berat. Selain itu, konfirmasi kepada pengurus barang serta wawancara dengan pengurus barang Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa sebagian aset dalam kelompok tersebut belum sepenuhnya didukung dengan informasi terkini mengenai keberadaan fisik maupun status penguasaannya. Kondisi tersebut antara lain ditunjukkan dengan masih terdapat kendaraan dinas rusak berat sejumlah empat unit sebesar Rp274.707.400,00 yang tercatat dalam Aset Lain-lain namun masih dikuasai oleh pihak lain, seperti pejabat yang telah usai masa jabatannya, pegawai yang sudah mutasi dan/atau pegawai yang telah pensiun. Perincian empat unit aset lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.26 Perincian Empat Unit Aset Lainnya yang Dikuasai Pihak Lain

No	No. Register	Jenis Aset	Plat Nomor	Nama Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Tahun Perolehan
1	1.5.4.01.01.01.002.00001	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	KB 1546 F	Toyota/ Kijang Innova	220.000.000,00	2006
2	1.5.4.01.01.01.002.00017	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	KB 4099 FC	Yamaha/ RX King	18.235.800,00	2007
3	1.5.4.01.01.01.002.00019	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	KB 4127 FC	Yamaha/ Jupiter	18.235.800,00	2007
4	1.5.4.01.01.01.002.00021	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	KB 4208 FC	Yamaha/ Vixion	18.235.800,00	2007
Jumlah					274.707.400,00	

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset Daerah BKAD (Kabid Aset) dan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator

Penatausahaan dan Perencanaan BMD (Subkor Penatausahaan dan Perencanaan BMD) diketahui bahwa saat ini BKAD belum memiliki rencana pengelolaan Aset Lain-lain. Pemkab Kapuas Hulu juga belum memiliki langkah sistematis untuk menelusuri keberadaan Aset Lain-lain yang tercatat dalam neraca. Penelusuran keberadaan aset tersebut belum dilakukan melalui inventarisasi aset.

Berdasarkan keterangan lebih lanjut, sensus aset terakhir dilaksanakan pada tahun 2010 dan setelah sensus terakhir tersebut belum dilakukan inventarisasi secara menyeluruh sehingga Pemkab Kapuas Hulu belum memiliki data terkini mengenai keberadaan dan kondisi aset yang tercatat sebagai Aset Lain-lain. Inventarisasi diperlukan untuk mengetahui keberadaan aset serta menilai kelayakan aset untuk dihapus sesuai kondisi dan status penggunaannya. Tanpa inventarisasi, Pemkab Kapuas Hulu belum memiliki data mengenai keberadaan fisik, kondisi, serta status penguasaan aset yang memadai sebagai dasar untuk menetapkan tindak lanjut pengelolaan atas Aset Lain-lain. Hal ini juga mempersulit pengambilan keputusan dan menilai apakah aset masih dapat dimanfaatkan, serta mengidentifikasi aset yang telah memenuhi kriteria untuk dihapus.

5.2 Penyelesaian Tagihan Jangka Panjang atas Tuntutan Kerugian Daerah sebesar Rp1.787.577.500,00 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap/ Inkrah Berlarut-larut

Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2025, Pemkab Kapuas Hulu menyajikan saldo Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.987.894.004,00 disertai dengan saldo penyesaiannya sebesar Rp1.987.894.004,00. Pada saldo tersebut, di antaranya merupakan tagihan penjualan angsuran dan/atau tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Perincian pembentuk saldo Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.27 Perincian Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No. Akun	Uraian	Saldo Per 31 Des 2025	Saldo Penyesaian	Saldo Netto
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	1.987.894.004,00	1.987.894.004,00	0,00
1.5.01.01	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00
1.5.01.02	Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah	1.987.894.004,00	1.987.894.004,00	0,00
1.5.01.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	200.316.504,00	200.316.504,00	0,00
1.5.01.02.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.787.577.500,00	1.787.577.500,00	0,00

Berdasarkan pemeriksaan kertas kerja saldo Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan Kabupaten Kapuas Hulu per semester 2 Tahun 2025, diketahui bahwa saldo sebesar Rp1.787.577.500,00 merupakan sisa tuntutan ganti rugi atas temuan pengadaan kapal penumpang angkutan sungai pada Dinas Perhubungan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dengan nilai pencatatan awal sebesar Rp2.227.577.500,00. Temuan tersebut telah diungkapkan pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor

24/LHP/XIX.PNK/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan rekomendasi kepada Bupati Kapuas Hulu yang di antaranya agar memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk memastikan bahwa pemulihan kerugian daerah sebesar Rp2.227.577.500,00 telah dilaksanakan.

Atas rekomendasi tersebut, masih terdapat pemulihan kerugian daerah sebesar dengan saldo Rp1.787.577.500,00 yang masih belum sesuai rekomendasi hingga semester 2 tahun 2025. Perincian STS atas rekomendasi pemulihan kerugian daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.28 Perincian STS Atas Rekomendasi Pemulihan Kerugian Daerah

No	No. STS	Tanggal STS	Nominal STS (Rp)	Sisa Saldo Pemulihan (Rp)
1	STS No. 934/ /DHUB/SET-A/2020	17 September 2020	200.000.000,00	2.027.577.500,00
2	STS Nomor: 934/04/DHUB/SET-A/2021	2021	10.000.000,00	2.017.577.500,00
3	934/ /DHUB/SET-A/2022	2022	150.000.000,00	1.867.577.500,00
4	STS Nomor: 934/152/DHUB/SET-A/2023	18 April 2023	50.000.000,00	1.817.577.500,00
5	934/ /DHUB/SET-A/2023	2 Oktober 2023	30.000.000,00	1.787.577.500,00
Jumlah			440.000.000,00	

Selain melalui proses penyetoran ke RKUD, diketahui juga bahwa temuan ini telah diproses melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 037/157/DISHUB/SET-B tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp2.227.577.500,00 oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dengan jaminan berupa aset tanah seluas 98.278 m². SKTJM tersebut juga telah melampirkan Surat Pernyataan Jaminan yang menyatakan bahwa aset tanah seluas 98.278 m² yang tercantum dalam SKTJM adalah milik Direktur CV RN yang tidak dalam sengketa dan telah diserahkan kepada Bidang Aset Daerah BKAD untuk dijadikan Jaminan Pemulihan Kerugian Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77/INKAB/2024, diketahui bahwa temuan pengadaan kapal penumpang angkutan sungai pada Dinas Perhubungan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak telah diproses secara hukum dan menghasilkan putusan hukum tetap/inkrah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di tahun 2025. Selain itu diketahui juga bahwa dokumen SKTJM Nomor 037/157/DISHUB/SET-B, jaminan sertifikat tanah seluas 98.278 m², serta Surat Pernyataan Jaminan telah diserahkan ke pengadilan saat pelimpahan berkas perkara.

Atas kondisi ini, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah telah memiliki dasar untuk kembali bersidang dan memutuskan kelanjutan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah tersebut. Selain itu, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah perlu untuk menyiapkan laporan kepada Bupati serta usulan pertimbangan bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti atas alasan yang sah kepada BPK sesuai dengan hasil persidangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah pada:

- 1) Pasal 2:

- a) Ayat (1) menyatakan bahwa “Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/ Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang”;
- b) Ayat (2) menyatakan bahwa “Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah”;
- c) Ayat (2a) menyatakan bahwa “Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat”; dan
- d) Ayat (3) menyatakan bahwa Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pasal 483 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 199 menyatakan bahwa “Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- d. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:

- 1) Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab, diantaranya adalah:
 - a) Huruf c, mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b) Huruf d, mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

- c) Huruf e, mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
 - d) Huruf f, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - e) Huruf g, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah”.
- e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah pada:
- 1) Pasal 51 menyatakan bahwa “Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:
 - a) mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - b) memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - c) memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain; dan
 - d) menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan”; dan
 - 2) Pasal 56 menyatakan bahwa “Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian Aset Lain-Lain sebesar Rp284.311.083.517,04 dan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.787.577.500,00 di Neraca TA 2025 tidak memberikan kontribusi dan/atau manfaat terhadap penerimaan dan/atau operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Bupati Kapuas Hulu belum sepenuhnya melakukan pengendalian terhadap penyelesaian Tagihan Jangka Panjang yang tidak memberikan kontribusi dan/atau manfaat bagi penerimaan dan/atau operasional entitas yang dipimpinnya; dan
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD belum sepenuhnya melakukan koordinasi dalam pengelolaan BMD, yang diantaranya berupa pelaksanaan inventarisasi sebagai pertimbangan untuk mengidentifikasi aset-aset yang masih dapat dimanfaatkan atau aset yang telah memenuhi kriteria untuk penghapusan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar:

- a. Menetapkan keputusan terkait penghapusan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.787.577.500,00 sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan putusan hukum tetap/inkrah oleh Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di Tahun 2025 terhadap tagihan tersebut; dan
- b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melakukan inventarisasi Aset Lain-Lain sebagai dasar pertimbangan untuk mengidentifikasi aset-aset yang masih dapat dimanfaatkan atau aset yang telah memenuhi kriteria untuk penghapusan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil inventarisasi tersebut.

BAB II
IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Kapuas Hulu Tahun 2025, BPK memantau tindak lanjut Pemkab Kapuas Hulu terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Kapuas Hulu Tahun 2020 s.d. 2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemkab Kapuas Hulu terhadap rekomendasi dalam LHP tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2.1 Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Kapuas Hulu per 31 Desember 2025

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2020	5	12	10	2	0	0
2	2021	13	35	32	3	0	0
3	2022	9	20	12	8	0	0
4	2023	22	57	41	16	0	0
5	2024	23	65	28	37	0	0

Temuan pemeriksaan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Kapuas Hulu Tahun 2020 s.d. 2024 tidak ada yang memengaruhi opini atas laporan keuangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada Pegawai yang Menjalani Cuti Besar

(dalam Rupiah)

No	Nama	NIP	SKPD / Unit Kerja	Mulai Cuti	Cuti Berakhir	Jenis Tunjangan	Nilai Tunjangan per Bulan (Rp)	Jumlah Bulan	Total Kelebihan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 x 9)
1	An	1966xxxxxxxxxx003	SDN 01 Badau	27 Mei 2025	19 Juli 2025	Fungsional	327.000,00	2	654.000,00
2	Ha	1969xxxxxxxxxx003	SDN 10 Nanga Temenang	14 Mei 2025	19 Juli 2025	Fungsional	389.000,00	2	778.000,00
3	Nu	1966xxxxxxxxxx003	SDN 11 Sungai Besar	28 Mei 2025	28 Juli 2025	Fungsional	510.000,00	2	1.020.000,00
4	Ra	1983xxxxxxxxxx002	SDN 02 Jongkong	14 Mei 2025	25 Juni 2025	Fungsional	327.000,00	1	327.000,00
Jumlah									2.779.000,00

Daftar Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai atas Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Anak, Tunjangan Pasangan dan Tunjangan Beras pada Pasangan Suami/Istri

(dalam Rupiah)

Nama 1	NIP 2	SKPD 3	Bulan 4	Jumlah Bulan 5	Gaji Pokok per Bulan 6	Tunjangan Pasangan per Bulan 7 = (10% x 6)	Tunjangan Pasangan 8 = (5 x 7)	Tunjangan Anak per Bulan 9 = (2% x 6)	Tunjangan Anak 10 = (5 x 9)	Tunjangan Beras per Bulan 11	Tunjangan Beras 12 = (5 x 11)	Jumlah (Rp) 13 = (8 + 10 + 12)	Total 14
Fi	1971xxxxxxxxxx000	UPTD Puskesmas Boyan Tanjung	Januari - April 2025	4	4.720.500	472.050,00	1.888.200,00	94.410,00	377.640	144.840	579.360	2.845.200,00	10.118.796,00
			THR	1	4.720.500	472.050,00	472.050,00	94.410,00	94.410	144.840	144.840	711.300,00	
			Mei - Desember 2025	8	4.869.200	486.920,00	3.895.360,00	97.384,00	779.072	144.840	1.158.720	5.833.152,00	
			Gaji 13	1	4.869.200	486.920,00	486.920,00	97.384,00	97.384	144.840	144.840	729.144,00	

Daftar Kelebihan Pembayaran atas Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras

(dalam Rupiah)

No	Nama	SKPD	Jumlah Bulan	Gaji Pokok	Keterlambatan Jumlah Anak yang Ditanggung	Jumlah Anak yang Ditanggung Seharusnya	Jumlah Anggota Keluarga	Tunjangan Anak yang Dibayarkan	Tunjangan Anak Setahun	Tunjangan Anak Setahun Seharusnya	Selisih Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Tunjangan Beras Setahun	Tunjangan Beras Seharusnya	Selisih Tunjangan Beras	Total Selisih (Netto)	Total per Orang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9 x 4)	11 = ((2% x 5) x 4 x 7)	12 = (10 - 11)	13	14 = (13 x 4)	15 = ((7.242 x 10) x 8 x 4)	16 = (14 - 15)	17 = (12 + 16)	18	19
1	An	UPT Satuan Pendidikan SDN 01 Badau	1	5.399.900,00	2	1	3	215.996,00	215.996,00	107.998,00	107.998,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	180.418,00	180.418,00	Januari 2025
2	Ma	UPT Satuan Pendidikan SDN 08 Ribang Kadeng	6	5.180.700,00	1	0	2	103.614,00	621.684,00	-	621.684,00	217.260,00	1.303.560,00	869.040,00	434.520,00	1.056.204,00	1.232.238,00	Juni - November 2025
			1	5.180.700,00				103.614,00	103.614,00	-	103.614,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	176.034,00		Gaji 13
3	Mu	UPT Satuan Pendidikan SMPN 01 Suhaid	12	5.399.900,00	1	0	2	107.998,00	1.295.976,00	-	1.295.976,00	217.260,00	2.607.120,00	1.738.080,00	869.040,00	2.165.016,00	2.525.854,00	Januari - Desember 2025
			2	5.399.900,00				107.998,00	215.996,00	-	215.996,00	217.261,00	434.522,00	289.680,00	144.842,00	360.838,00		THR dan Gaji 13
4	Up	UPT Satuan Pendidikan SDN 14 Landau Kaloi	8	5.075.200,00	2	1	3	203.008,00	1.624.064,00	812.032,00	812.032,00	289.680,00	2.317.440,00	1.738.080,00	579.360,00	1.391.392,00	3.130.632,00	Januari - Agustus 2025
			2	5.075.200,00				203.008,00	406.016,00	203.008,00	203.008,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	347.848,00		THR dan Gaji 13
			4	5.075.200,00		0	2	203.008,00	812.032,00	-	812.032,00	289.680,00	1.158.720,00	579.360,00	579.360,00	1.391.392,00		September - Desember 2025
5	We	UPT Satuan Pendidikan SMPN 01 Semitau	12	4.770.000,00	1	0	2	95.400,00	1.144.800,00	-	1.144.800,00	217.260,00	2.607.120,00	1.738.080,00	869.040,00	2.013.840,00	2.349.480,00	Januari - Desember 2025
			2	4.770.000,00				95.400,00	190.800,00	-	190.800,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	335.640,00		THR dan Gaji 13
6	Ah	UPT Satuan Pendidikan SDN 15 Pulau Sayat	5	4.869.200,00	2	1	3	194.768,00	973.840,00	486.920,00	486.920,00	289.680,00	1.448.400,00	1.086.300,00	362.100,00	849.020,00	1.188.628,00	Januari - Mei 2025
			2	4.869.200,00				194.768,00	389.536,00	194.768,00	194.768,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	339.608,00		THR dan Gaji 13
			8	4.436.700,00				88.734,00	709.872,00	-	709.872,00	217.260,00	1.738.080,00	1.158.720,00	579.360,00	1.289.732,00		Januari - Agustus 2025
7	Ha	UPT Satuan Pendidikan SDN 13 Bugang	3	4.720.500,00	1	0	2	94.410,00	283.230,00	-	283.230,00	217.260,00	651.780,00	434.520,00	217.260,00	500.490,00	2.112.030,00	September - November 2025
			2	4.436.700,00				88.734,00	177.468,00	-	177.468,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	322.308,00		THR dan Gaji 13
8	BS	UPT Satuan Pendidikan SMPN 01 Putussibau	3	4.169.900,00	2	1	3	166.796,00	500.388,00	250.194,00	250.194,00	289.680,00	869.040,00	651.780,00	217.260,00	467.454,00	467.454,00	Oktober - Desember 2025
9	DS	UPT Satuan Pendidikan SMPN 01 Jongkong	12	5.456.400,00	2	1	3	218.256,00	2.619.072,00	1.309.536,00	1.309.536,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	2.178.576,00	2.541.672,00	Januari - Desember 2025
			2	5.456.400,00				218.256,00	436.512,00	218.256,00	218.256,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	363.096,00		THR dan Gaji 13
10	AM	Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Bunut Hulu	3	5.128.300,00	2	1	3	205.132,00	615.396,00	307.698,00	307.698,00	289.680,00	869.040,00	651.780,00	217.260,00	524.958,00	699.944,00	Januari - Maret 2025
			1	5.128.300,00				205.132,00	205.132,00	102.566,00	102.566,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	174.986,00		THR
11	ATJ	Kecamatan Batang Lupar	2	3.461.100,00	2	1	3	138.444,00	276.888,00	138.444,00	138.444,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	283.284,00	424.926,00	Januari - Februari 2025
			1	3.461.100,00				138.444,00	138.444,00	69.222,00	69.222,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	141.642,00		THR
12	Ta	UPT Satuan Pendidikan SDN 08 Semeluang	3	4.869.200,00	1	0	2	97.384,00	292.152,00	-	292.152,00	217.260,00	651.780,00	434.520,00	217.260,00	509.412,00	509.412,00	Juni - Agustus 2025
13	AE	Kecamatan Badau	12	4.869.200,00	2	1	3	194.768,00	2.337.216,00	1.168.608,00	1.168.608,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	2.037.648,00	2.377.256,00	Januari - Desember 2025
			2	4.869.200,00				194.768,00	389.536,00	194.768,00	194.768,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	339.608,00		THR dan Gaji 13
14	AR	Dinas Perikanan	12	2.843.000,00	1	0	2	56.860,00	682.320,00	-	682.320,00	217.260,00	2.607.120,00	1.738.080,00	869.040,00	1.551.360,00	1.809.920,00	Januari - Desember 2025
			2	2.843.000,00				56.860,00	113.720,00	-	113.720,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	258.560,00		THR dan Gaji 13
15	Ag	UPT Satuan Pendidikan SDN 09 Ukit-Ukit	4	4.720.500,00	2	1	3	188.820,00	755.280,00	377.640,00	377.640,00	289.680,00	1.158.720,00	869.040,00	289.680,00	667.320,00	667.320,00	September - Desember 2025
16	Mu	Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Jongkong	10	5.128.300,00	2	1	3	205.132,00	2.051.320,00	1.025.660,00	1.025.660,00	289.680,00	2.896.800,00	2.172.600,00	724.200,00	1.749.860,00	2.099.832,00	Januari - Oktober 2025
			2	5.128.300,00				205.132,00	404.264,00	205.132,00	205.132,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	349.972,00		THR dan Gaji 13
17	Da	UPT Satuan Pendidikan SMPN 01 Silat Hulu	1	5.235.000,00	2	1	3	209.400,00	209.400,00	104.700,00	104.700,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	177.120,00	2.522.554,00	Januari 2025
			11	5.399.900,00				215.996,00	2.375.956,00	1.187.978,00	1.187.978,00	289.680,00	3.186.480,00	2.389.860,00	796.620,00	1.984.598,00		Februari - Desember 2025
			2	5.399.900,00				215.996,00	431.992,00	215.996,00	215.996,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	360.836,00		THR dan Gaji 13
18	YPS	UPT Satuan Pendidikan SDN 06 Batu Pansap	12	5.075.200,00	1	0	2	101.504,00	1.218.048,00	-	1.218.048,00	217.260,00	2.607.120,00	1.738.080,00	869.040,00	2.087.088,00	2.434.936,00	Januari - Desember 2025
			2	5.075.200,00				101.504,00	203.008,00	-	203.008,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	347.848,00		THR dan Gaji 13
19	AI	UPTD Puskesmas Bunut Hilir	12	4.212.500,00	2	1	3	168.500,00	2.022.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	1.880.040,00	2.193.380,00	Januari - Desember 2025
			2	4.212.500,00				168.500,00	337.000,00	168.500,00	168.500,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	313.340,00		THR dan Gaji 13
20	AH	Kecamatan Putussibau Utara	3	4.345.100,00	1	0	2	86.902,00	260.706,00	-	260.706,00	217.260,00	651.780,00	434.520,00	217.260,00	477.966,00	2.260.626,00	Januari - Maret 2025
			9	4.482.000,00				89.640,00	806.760,00	-	806.760,00	217.260,00	1.955.340,00	1.303.560,00	651.780,00	1.458.540,00		April - Desember 2025
			2	4.482.000,00				89.640,00	179.280,00	-	179.280,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	324.120,00		THR dan Gaji 13
21	AS	UPT Satuan Pendidikan SDN 02 Jongkong	3	5.075.200,00	2	1	3	203.008,00	609.024,00	304.512,00	304.512,00	289.680,00	869.040,00	651.780,00	217.260,00	521.772,00	521.772,00	Oktober - Desember 2025

No	Nama	SKPD	Jumlah Bulan	Gaji Pokok	Keterangan Jumlah Anak yang Ditanggung	Jumlah Anak yang Ditanggung Seharusnya	Jumlah Anggota Keluarga	Tunjangan Anak yang Dibayarkan	Tunjangan Anak Setahun	Tunjangan Anak Setahun Seharusnya	Selisih Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Tunjangan Beras Setahun	Tunjangan Beras Seharusnya	Selisih Tunjangan Beras	Total Selisih (Netto)	Total per Orang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9 x 4)	11 = ((2% x 5) x 4 x 7)	12 = (10 - 11)	13	14 = (13 x 4)	15 = ((7.242 x 10) x 8 x 4)	16 = (14 - 15)	17 = (12 + 16)	18	19
22	La	UPT Satuan Pendidikan SDN 07 Sungkin	12	5.628.300,00	1	0	2	112.566,00	1.350.792,00	-	1.350.792,00	217.260,00	2.607.120,00	1.738.080,00	869.040,00	2.219.832,00	2.589.804,00	Januari - Desember 2025
			2	5.628.300,00				112.566,00	225.132,00	-	225.132,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	369.972,00		THR dan Gaji 13
23	MM	UPT Satuan Pendidikan SDN 21 Nanga Nyabau	4	4.720.500,00	1	0	2	94.410,00	377.640,00	-	377.640,00	217.260,00	869.040,00	579.360,00	289.680,00	667.320,00	667.320,00	September - Desember 2025
24	JS	Kecamatan Putussibau Utara	3	4.720.500,00	1	0	1	94.410,00	283.230,00	-	283.230,00	144.840,00	434.520,00	217.260,00	217.260,00	500.490,00	500.490,00	Oktober - Desember 2025
25	Mu	Kecamatan Bunut Hilir	5	3.185.800,00	1	0	2	63.716,00	318.580,00	-	318.580,00	217.260,00	1.086.300,00	724.200,00	362.100,00	680.680,00	816.816,00	Januari - Mei 2025
			1	3.185.800,00				63.716,00	63.716,00	-	63.716,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	136.136,00		THR
			2	4.869.200,00				194.768,00	389.536,00	194.768,00	194.768,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	339.608,00		Januari - Februari 2025
26	AK	Kecamatan Putussibau Utara	1	4.869.200,00	2	1	3	194.768,00	194.768,00	97.384,00	97.384,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	169.804,00	2.410.982,00	THR
			10	5.022.500,00				200.900,00	2.009.000,00	1.004.500,00	1.004.500,00	289.680,00	2.896.800,00	2.172.600,00	724.200,00	1.728.700,00		Maret - Desember 2025
			1	5.022.500,00				200.900,00	200.900,00	100.450,00	100.450,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	172.870,00		Gaji 13
27	WBA	UPT Satuan Pendidikan SDN 10 Na. Kalis	12	5.289.800,00	2	1	3	211.592,00	2.539.104,00	1.269.552,00	1.269.552,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	2.138.592,00	2.495.024,00	Januari - Desember 2025
			2	5.289.800,00				211.592,00	423.184,00	211.592,00	211.592,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	356.432,00		THR dan Gaji 13
28	Pu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	4.346.200,00	2	1	3	173.848,00	1.216.936,00	608.468,00	608.468,00	289.680,00	2.027.760,00	1.520.820,00	506.940,00	1.115.408,00	1.434.096,00	Januari - Juli 2025
			2	4.346.200,00				173.848,00	347.696,00	173.848,00	173.848,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	318.688,00		THR dan Gaji 13
29	So	Kecamatan Bunut Hulu	7	3.533.100,00	1	0	2	70.662,00	494.634,00	-	494.634,00	217.260,00	1.520.820,00	1.013.880,00	506.940,00	1.001.574,00	1.144.656,00	Mei - Desember 2025
			1	3.533.100,00				70.662,00	70.662,00	-	70.662,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	143.082,00		Gaji 13
30	AA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	12	4.301.200,00	2	1	3	172.048,00	2.064.576,00	1.032.288,00	1.032.288,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	1.901.328,00	2.218.216,00	Januari - Desember 2025
			2	4.301.200,00				172.048,00	344.096,00	172.048,00	172.048,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	316.888,00		THR dan Gaji 13
31	Su	UPT Satuan Pendidikan SMPN 01 Putussibau	12	5.289.800,00	2	1	3	211.592,00	2.539.104,00	1.269.552,00	1.269.552,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	2.138.592,00	2.495.024,00	Januari - Desember 2025
			2	5.289.800,00				211.592,00	423.184,00	211.592,00	211.592,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	356.432,00		THR dan Gaji 13
32	AS	UPT Satuan Pendidikan SDN 10 Gerayau	6	5.289.800,00	2	1	3	211.592,00	1.269.552,00	634.776,00	634.776,00	289.680,00	1.738.080,00	1.303.560,00	434.520,00	1.069.296,00	1.960.376,00	Mei - Oktober 2025
			1	5.289.800,00				211.592,00	211.592,00	105.796,00	105.796,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	178.216,00		Gaji 13
			2	5.289.800,00	2	0	2	211.592,00	423.184,00	-	423.184,00	289.680,00	579.360,00	289.680,00	289.680,00	712.864,00		November - Desember 2025
33	Aw	Kecamatan Semitau	2	3.152.800,00	2	1	3	126.112,00	252.224,00	126.112,00	126.112,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	270.952,00	270.952,00	November - Desember 2025
34	Ra	UPT Satuan Pendidikan TK Nanga Kalis	12	4.720.500,00	1	0	2	94.410,00	1.132.920,00	-	1.132.920,00	217.260,00	2.607.120,00	1.738.080,00	869.040,00	2.001.960,00	2.335.620,00	Januari - Desember 2025
			2	4.720.500,00				94.410,00	188.820,00	-	188.820,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	333.660,00		THR dan Gaji 13
35	AN	UPT Satuan Pendidikan SDN 05 Gurung	12	4.042.500,00	2	0	2	161.700,00	1.940.400,00	-	1.940.400,00	289.680,00	3.476.160,00	1.738.080,00	1.738.080,00	3.678.480,00	4.291.560,00	Januari - Desember 2025
			2	4.042.500,00				161.700,00	323.400,00	-	323.400,00	289.680,00	579.360,00	289.680,00	289.680,00	613.080,00		THR dan Gaji 13
36	It	Kecamatan Bunut Hulu	12	3.570.100,00	2	1	3	142.804,00	1.713.648,00	856.824,00	856.824,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	1.725.864,00	2.013.508,00	Januari - Desember 2025
			2	3.570.100,00				142.804,00	285.608,00	142.804,00	142.804,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	287.644,00		THR dan Gaji 13
37	EZ	UPTD Puskesmas Putussibau Selatan	1	4.213.500,00	1	0	2	84.270,00	84.270,00	-	84.270,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	156.690,00	156.690,00	Desember 2025
38	Ra	UPT Satuan Pendidikan SDN 07 Slut	12	5.289.800,00	1	0	2	105.796,00	1.269.552,00	-	1.269.552,00	217.260,00	2.607.120,00	1.738.080,00	869.040,00	2.138.592,00	2.495.024,00	Januari - Desember 2025
			2	5.289.800,00				105.796,00	211.592,00	-	211.592,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	356.432,00		THR dan Gaji 13
			6	5.075.200,00				101.504,00	609.024,00	-	609.024,00	217.260,00	1.303.560,00	869.040,00	434.520,00	1.043.544,00		Januari - Juni 2025
39	NAA	Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Kalis	2	5.075.200,00	1	0	2	101.504,00	203.008,00	-	203.008,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	347.848,00	1.747.824,00	THR dan Gaji 13
			2	5.289.800,00				105.796,00	211.592,00	-	211.592,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	356.432,00		Juli - Agustus 2025
40	Na	UPT Satuan Pendidikan SDN 07 Temuyuk	12	4.920.200,00	2	1	3	196.808,00	2.361.696,00	1.180.848,00	1.180.848,00	289.680,00	3.476.160,00	2.607.120,00	869.040,00	2.049.888,00	2.391.536,00	Januari - Desember 2025
			2	4.920.200,00				196.808,00	393.616,00	196.808,00	196.808,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	341.648,00		THR dan Gaji 13
			3	4.869.200,00				97.384,00	292.152,00	-	292.152,00	217.260,00	651.780,00	434.520,00	217.260,00	509.412,00		Januari - Maret 2025
41	Ro	UPTD Puskesmas Silat Hilir	1	4.869.200,00	1	0	2	97.384,00	97.384,00	-	97.384,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	169.804,00	1.197.826,00	THR
			2	5.022.500,00				100.450,00	200.900,00	-	200.900,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	345.740,00		April - Mei 2025
			1	5.022.500,00				100.450,00	100.450,00	-	100.450,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	172.870,00		Gaji 13
			2	4.720.500,00				188.820,00	377.640,00	188.820,00	188.820,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	333.660,00		Januari - Februari 2025
			10	4.720.500,00				188.820,00	188.820,00	94.410,00	94.410,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	166.830,00		THR
42	TM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	4.869.200,00	2	1	3	194.768,00	1.947.680,00	973.840,00	973.840,00	289.680,00	2.896.800,00	2.172.600,00	724.200,00	1.698.040,00	2.368.334,00	Maret - Desember 2025
			1	4.869.200,00				194.768,00	194.768,00	97.384,00	97.384,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	169.804,00		Gaji 13

No	Nama	SKPD	Jumlah Bulan	Gaji Pokok	Keterangan Jumlah Anak yang Ditanggung	Jumlah Anak yang Ditanggung Seharusnya	Jumlah Anggota Keluarga	Tunjangan Anak yang Dibayarkan	Tunjangan Anak Setahun	Tunjangan Anak Setahun Seharusnya	Selisih Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Tunjangan Beras Setahun	Tunjangan Beras Seharusnya	Selisih Tunjangan Beras	Total Selisih (Netto)	Total per Orang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9 x 4)	11 = ((2% x 5) x 4 x 7)	12 = (10 - 11)	13	14 = (13 x 4)	15 = ((7.242 x 10) x 8 x 4)	16 = (14 - 15)	17 = (12 + 16)	18	19
43	As	UPT Satuan Pendidikan SDN 10 Selaup	3	4.301.200,00	1	0	2	86.024,00	258.072,00	-	258.072,00	217.260,00	651.780,00	434.520,00	217.260,00	475.332,00	475.332,00	Oktober - Desember 2025
44	SM	UPD Puskesmas Pengkadan	4	4.482.000,00	2	1	3	179.280,00	717.120,00	358.560,00	358.560,00	289.680,00	1.158.720,00	869.040,00	289.680,00	648.240,00	648.240,00	September - Desember 2025
45	Az	Kecamatan Bunut Hilir	2	4.576.400,00	2	1	3	183.056,00	366.112,00	183.056,00	183.056,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	327.896,00	658.674,00	Januari - Februari 2025
			1	4.576.400,00				183.056,00	183.056,00	91.528,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	163.948,00	THR		
			1	4.720.500,00				188.820,00	188.820,00	94.410,00	289.680,00	289.680,00	217.260,00	72.420,00	166.830,00	April		
46	SC	UPT Satuan Pendidikan SDN 04 Kurak	3	5.399.900,00	1	0	2	107.998,00	323.994,00	-	323.994,00	217.260,00	651.780,00	434.520,00	217.260,00	541.254,00	541.254,00	Januari - April 2025
47	Mu	UPT Satuan Pendidikan SDN 01 Embalah Hilir	2	3.721.100,00	2	1	3	148.844,00	297.688,00	148.844,00	148.844,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	293.684,00	293.684,00	November - Desember 2025
48	Sr	UPT Satuan Pendidikan SMPN 02 Silat Hilir	7	4.169.900,00	2	1	3	166.796,00	1.167.572,00	583.786,00	583.786,00	289.680,00	2.027.760,00	1.520.820,00	506.940,00	1.090.726,00	2.194.582,00	Januari - Juli 2025
			2	4.169.900,00				166.796,00	333.592,00	166.796,00	166.796,00	289.680,00	579.360,00	434.520,00	144.840,00	311.636,00		THR dan Gaji 13
			5	4.301.200,00				172.048,00	860.240,00	430.120,00	430.120,00	289.680,00	1.448.400,00	1.086.300,00	362.100,00	792.220,00		Agustus - Desember 2025
49	MS	UPD Puskesmas Selimbau	5	4.869.200,00	1	0	2	97.384,00	486.920,00	-	486.920,00	217.260,00	1.086.300,00	724.200,00	362.100,00	849.020,00	1.188.628,00	Januari - Mei 2025
			2	4.869.200,00				97.384,00	194.768,00	-	194.768,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	339.608,00		THR dan Gaji 13
50	RE	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	4.720.500,00	1	0	2	94.410,00	188.820,00	-	188.820,00	217.260,00	434.520,00	289.680,00	144.840,00	333.660,00	1.179.706,00	Januari - Februari 2025
			1	4.720.500,00				94.410,00	94.410,00	-	94.410,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	166.830,00		THR
			3	4.869.200,00				97.384,00	292.152,00	-	292.152,00	217.260,00	651.780,00	434.520,00	217.260,00	509.412,00		Maret - Mei 2025
			1	4.869.200,00				97.384,00	97.384,00	-	97.384,00	217.260,00	217.260,00	144.840,00	72.420,00	169.804,00		Gaji 13
JUMLAH																79.432.062,00	79.432.062,00	

Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Berakhir Masa Kerjanya

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Alasan Pensiun	Unit Organisasi	TMT Pensiun	Tanggal Pembayaran Gaji Terakhir	Bulan yang Masih Dibayar	Gaji Pokok Per Bulan	Jumlah Bulan Masih Dibayar	Kelebihan Bayar (Rp)	Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Sisa Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 x 9)	11	12	13 = (10 - 11)
1	ATH	Tidak cakap jasmani	Pemerintah Kab. Kapuas hulu	01 Januari 2025	31 Desember 2024	Januari, Feburari, THR	3.533.100,00	3	10.599.300,00	-	-	10.599.300,00
2	Nu	Batas usia pensiun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 Februari 2025	31 Januari 2025	Februari, THR	5.513.600,00	2	11.027.200,00	5.776.100,00	06 Februari 2025	5.251.100,00
3	Mu	Mengundurkan diri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 Maret 2025	28 Februari 2025	April - Juni, Gaji 13	3.838.300,00	4	15.353.200,00	4.843.200,00	09 Juli 2025	10.510.000,00
4	SN	Meninggal dunia	Pemerintah Kab. Kapuas hulu	01 Maret 2025	06 Februari 2025	Juli	3.497.300,00	1	3.497.300,00	-	-	3.497.300,00
5	RS	Meninggal dunia	Kantor Kelurahan Putussibau Kota	01 Maret 2025	26 Februari 2025	Juli	4.000.600,00	1	4.000.600,00	-	-	4.000.600,00
6	Su	Batas usia pensiun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 April 2025	31 Maret 2025	April	4.301.200,00	1	4.301.200,00	-	-	4.301.200,00
7	Nu	Mengundurkan diri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 Juli 2025	30 Juni 2025	Juli	4.169.900,00	1	4.169.900,00	-	-	4.169.900,00
8	Ab	Batas usia pensiun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 Juli 2025	30 Juni 2025	Juli	3.606.500,00	1	3.606.500,00	-	-	3.606.500,00
9	SA	Batas usia pensiun	Pemerintah Kab. Kapuas hulu	01 Juli 2025	30 Juni 2025	Juli - Agustus	4.623.200,00	2	9.246.400,00	-	-	9.246.400,00
10	AJ	Berhenti tanpa hak pensiun	Dinas Perhubungan	01 Juli 2025	30 Juni 2025	Juli	2.360.250,00	1	2.360.250,00	-	-	2.360.250,00
11	MA	Berhenti tanpa hak pensiun	Pemerintah Kab. Kapuas hulu	01 Juli 2025	30 Juni 2025	Juli	2.434.600,00	1	2.434.600,00	-	-	2.434.600,00
12	CTO	Batas usia pensiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Kelu	01 September 2025	31 Agustus 2025	September	5.399.900,00	1	5.399.900,00	-	-	5.399.900,00
13	AZ	Batas usia pensiun	Pemerintah Kab. Kapuas hulu	01 September 2025	31 Agustus 2025	September	4.528.900,00	1	4.528.900,00	-	-	4.528.900,00
14	AS	Batas usia pensiun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 September 2025	31 Agustus 2025	September	5.866.400,00	1	5.866.400,00	-	-	5.866.400,00
15	Ma	Batas usia pensiun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 Oktober 2025	30 September 2025	Oktober - Desember	5.866.400,00	3	17.599.200,00	-	-	17.599.200,00
16	FS	Batas usia pensiun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 Oktober 2025	30 September 2025	Oktober - Desember	5.866.400,00	3	17.599.200,00	-	-	17.599.200,00
17	Nu	Batas usia pensiun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	01 Oktober 2025	30 September 2025	Oktober - Desember	5.182.000,00	3	15.546.000,00	-	-	15.546.000,00
Jumlah									137.136.050,00	10.619.300,00	-	126.516.750,00

Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Menjalani Hukuman Disiplin

(dalam Rupiah)

No	Nama	SKPD	Nomor SK Bupati	Tanggal SK Bupati	Tanggal TMT	Periode Keterlambatan Pembayaran	Jumlah Bulan	Tunjangan	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan	Penyetoran (Rp)	Tanggal Penyetoran	Sisa Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12	13	14 = 10 - 12
1	Ha	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.1.6.2/721.b/BKS/P2DK	14 April 2025	02 Mei 2025	Mei - Desember, Gaji 13	9	327.000,00	2.943.000,00	Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan			2.943.000,00
Jumlah									2.943.000,00		-		2.943.000,00

Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara*(dalam Rupiah)*

No.	Nama	NIP	SKPD	Tanggal Mulai Cuti	Tanggal Selesai Cuti	Periode Keterlanjuran Pembayaran	Kelebihan Pembayaran TPP
1	MH	1988xxxxxxxxxx003	RSUD dr. Achmad Diponegoro	01 Desember 2025	30 November 2028	Desember 2025	430.952,00

Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Berstatus Cerai (dalam Rupiah)

No	Nama	SKPD	Tanggal Akte Cerai	Periode Ketelanjuran Pembayaran	Jumlah Bulan Masih Dibayar	Tunjangan Suami/Istri per Bulan (Rp)	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Suami/Istri (Rp)	Tunjangan Beras (Rp)	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Beras (Rp)	Total Kelebihan Pembayaran Tunjangan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Tanggal Penyetoran	Sisa Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 x 7)	9	10 = (8 x 9)	11 = (8 + 10)	12	13	14 = (11 - 12)
1	Ab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13 Oktober 2025	November - Desember	2	434.510,00	869.020,00	72.420,00	144.840,00	1.013.860,00			1.013.860,00
2	PG	Badan Pendapatan Daerah	04 Juni 2025	Juli	1	430.120,00	430.120,00	72.420,00	72.420,00	502.540,00			502.540,00
Jumlah										1.516.400,00	-		1.516.400,00

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi BLP dan BLNP Dinas PUPR

(dalam Rupiah)

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	Jenis	Komponen Pembayaran	Nilai Setelah dikurangi PPh 23 (Rp)				Keterangan	Keterangan Tindak Lanjut	SKPD
					Kontrak	Pemeriksaan	Tindak Lanjut Penyetoran ke RKUD	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6-7)	10	11	12
A Dinas PUPR											
1	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT) Kabupaten Kapuas Hulu	CV UEK	BLP	Drafter	5.000.000,00	-		5.000.000,00	Bukti komunikasi yang disampaikan tidak berhubungan dengan pekerjaan sesuai kontrak		PUPR
			BLNP	Biaya Sewa Kendaraan Roda 2	4.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00	Berdasarkan konfirmasi, yang memakai kendaraan dilapangan hanya 1 yaitu surveyor sementara pembayaran di invoice atas penyewaa 3 kendaraan		
Jumlah								8.000.000,00			
2	Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Kapuas Hulu	PT TEK	BLNP	Biaya sewa kendaraan roda 4	18.750.000,00	7.500.000,00		11.250.000,00	Berdasarkan konfirmasi, yang memakai kendaraan dilapangan hanya surveyor dan tenaga ahli yang lain hanya menggunakan saat awal kegiatan dan akhir kegiatan		PUPR
			BLNP	Biaya sewa kendaraan roda 2	11.250.000,00	4.500.000,00		6.750.000,00	Berdasarkan konfirmasi, kendaraan yang dipakai hanya 1 bulan		
Jumlah								18.000.000,00			
3	Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Kapuas Hulu	PT RPND DHI	BLNP	Biaya Sewa Kendaraan Roda 2	4.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00	Berdasarkan konfirmasi, yang memakai kendaraan dilapangan hanya 1 yaitu surveyor sementara pembayaran di invoice atas penyewaa 3 kendaraan		PUPR
Jumlah								3.000.000,00			
4	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Kapuas Hulu	CV GE	BLP	Ahli Teknik Lingkungan	28.972.200,00	19.314.800,00		9.657.400,00	Tidak ada komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, hanya koordinasi terkait dokumentasi kegiatan		PUPR
			BLNP	Biaya Sewa Kendaraan Roda 2	4.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00	Berdasarkan konfirmasi, yang memakai kendaraan dilapangan hanya 1 yaitu surveyor sementara pembayaran di invoice atas penyewaa 3 kendaraan		
Jumlah								12.657.400,00			
5	Feasibility Study Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Kapuas Hulu	CV GE	BLNP	Biaya kendaraan dan peralatan	4.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00	Berdasarkan konfirmasi, yang memakai kendaraan dilapangan hanya 1 yaitu surveyor sementara pembayaran di invoice atas penyewaa 3 kendaraan		PUPR
Jumlah								3.000.000,00			
6	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan	CV HJC	BLP	Mat/Lab Technician	19.600.000,00	-		19.600.000,00	Berdasarkan hasil konfirmasi tidak dapat dibuktikan terlibat dalam kegiatan, baik melalui komunikasi via chat ataupun dokumentasi		PUPR
Jumlah								19.600.000,00			
Jumlah Total								64.257.400,00			

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/1.5/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 10 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.1.5.B/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 12 Agustus 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 01.05/BGJL-B/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp39.950.000.000,00
 Rekanan : PT CS

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
PENERAPAN SMK										
ASURANSI DAN PERIZINAN										
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	1,00	-	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00		- BPJS TK merupakan Biaya Tidak Langsung. Dalam hal biaya tersebut muncul pada saat BOQ/proses tender, maka akan dicatat sebagai pemborosan.
PEKERJAAN DRAINASE LINGKUNGAN										
Saluran Terbuka Uk.0,7 x 0,55 x 0,15										
Beton K250 Ready Mix	m3	70,62	68,92	1,70	3.000.000,00	3.000.000,00	211.860.000,00	206.760.000,00	5.100.000,00	
Bekisting	m2	941,60	922,73	18,87	296.194,00	296.194,00	278.896.270,40	273.307.089,62	5.589.180,78	
Penutup saluran beton										
Beton K250 Ready Mix	m3	28,13	26,40	1,73	3.000.000,00	3.000.000,00	84.390.000,00	79.200.000,00	5.190.000,00	
PEKERJAAN AREA PARKIR										
Galian tanah	m3	1.327,20	1.293,62	33,58	50.000,00	50.000,00	66.360.000,00	64.681.000,00	1.679.000,00	
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	548,70	494,53	54,17	1.000.000,00	1.000.000,00	548.700.000,00	494.530.000,00	54.170.000,00	
Beton K250 Ready Mix	m3	546,00	469,40	76,60	3.000.000,00	3.000.000,00	1.638.000.000,00	1.408.200.000,00	229.800.000,00	
PEKERJAAN PAGAR DAN GERBANG										
PAGAR SAMPING (TYPE 1)										
Sloof / Balok Bawah										

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)
Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/1.5/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 10 Maret 2025
Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.1.5.B/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 12 Agustus 2025 (Adendum II)
Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 01.05/BGJL-B/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp39.950.000.000,00
Rekanan : PT CS

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
beton mutu fc 14,5 Mpa (K175)	m3	48,61	44,62	3,99	2.500.000,00	2.500.000,00	121.525.000,00	111.550.000,00	9.975.000,00	
<i>Kolom Pagar</i>										
Bekesting	m2	832,00	826,56	5,44	300.000,00	300.000,00	249.600.000,00	247.968.000,00	1.632.000,00	
beton mutu fc 14,5 Mpa (K175)	m3	87,36	82,66	4,70	2.500.000,00	2.500.000,00	218.400.000,00	206.650.000,00	11.750.000,00	
<i>Pengadaan ornamen Pagar</i>										
Pengadaan Ornamen Laser Cutting Plat 3mm	m2	246,49	218,78	27,71	2.000.000,00	2.000.000,00	492.980.000,00	437.560.000,00	55.420.000,00	
PAGAR DEPAN (TYPE 2)										
<i>Finshing Kolom dan Balok Pagar</i>										
Dinding batako	m2	33,73	25,93	7,80	176.017,85	176.017,85	5.937.082,08	4.564.142,85	1.372.939,23	
GERBANG UTAMA 2 UNIT										
Pekerjaan Ukiran Laser Cutting Stainless	m2	215,21	133,44	81,77	2.000.000,00	2.000.000,00	430.420.000,00	266.880.000,00	163.540.000,00	
PAGAR DEPAN (TYPE 3)										
<i>Sloof / Balok Bawah</i>										
Beton mutu fc 14,5 Mpa (K175)	m3	2,88	2,71	0,17	2.500.000,00	2.500.000,00	7.200.000,00	6.775.000,00	425.000,00	
<i>Dinding</i>										
Batako	m2	70,98	65,11	5,87	176.017,85	176.017,85	12.493.746,99	11.460.522,21	1.033.224,78	
Plesteran	m2	141,96	130,21	11,75	120.000,00	120.000,00	17.035.200,00	15.625.200,00	1.410.000,00	
Acian	m2	141,96	130,21	11,75	62.134,50	62.134,50	8.820.613,62	8.090.533,25	730.080,37	
PEKERJAAN POS SATPAM										
Pekerjaan Plafond GRC										
Rangka Plafond Metal Furing	m2	53,56	24,61	28,95	74.015,15	74.015,15	3.964.251,43	1.821.512,84	2.142.738,59	
Plafond GRC	m2	53,56	24,61	28,95	74.015,15	74.015,15	3.964.251,43	1.821.512,84	2.142.738,59	
<i>Aktivasi Instalasi jaringan WIFI dan DATA</i>										
Material Bantu	Bh	45,00	45,00	-	200.000,00	200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
	lot	1,00	-	1,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/1.5/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 10 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.1.5.B/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 12 Agustus 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 01.05/BGJL-B/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp39.950.000.000,00
 Rekanan : PT CS

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
PEKERJAAN KANTIN DAN KOPERASI (4 lokal)										
Pekerjaan Electrical dan Plumbing										
<i>Stop Kontak</i>	unit	12,00	11,00	1,00	960.000,00	960.000,00	11.520.000,00	10.560.000,00	960.000,00	
<i>Floor drain 1/2 inch</i>	unit	4,00	-	4,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	-	800.000,00	
PEMBANGUNAN RUMAH LIMBAH RB 3										
Pekerjaan Electrical										
<i>Stop Kontak</i>	unit	3,00	-	3,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	-	240.000,00	
<i>Pemasangan Lampu LED + saklar</i>	unit	5,00	4,00	1,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00	
PEMBANGUNAN MUSHOLA										
Pekerjaan Keramik Lantai, Tangga, Tempat Wudhu										
<i>Keramik Lantai + selasar</i>	m2	76,00	70,27	5,73	200.000,00	200.000,00	15.200.000,00	14.054.000,00	1.146.000,00	
Pekerjaan Plafond										
<i>Pemasangan Rangka Plafond Metal Furing</i>	m2	76,00	63,27	12,73	74.015,15	74.015,15	5.625.151,40	4.682.938,54	942.212,86	
<i>Pemasangan Plafond GRC</i>	m2	76,00	63,27	12,73	77.564,05	77.564,05	5.894.867,80	4.907.477,44	987.390,36	
Pekerjaan Electrical dan Plumbing										
<i>Floor Drain Area Wudhu</i>	unit	3,00	1,00	2,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/1.5/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 10 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.1.5.B/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 12 Agustus 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 01.05/BGJL-B/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp39.950.000.000,00
 Rekanan : PT CS

(dalam Rupiah)

Uraian		Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
			Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
PEMBANGUNAN RUMAH GENSET (POWER HOUSE)											
PEKERJAAN STRUKTUR											
Pekerjaan Dudukan Genset											
Bekisting	m2	56,96	43,82	13,14	259.141,00	259.141,00	14.760.671,36	11.355.558,62	3.405.112,74		
Tulangan Dudukan Genset Besi D16 mm	Kg	1.819,00	1.782,95	36,05	30.000,00	30.000,00	54.570.000,00	53.488.500,00	1.081.500,00		
PEKERJAAN POMPA TRANSFER											
Pompa Transfer	unit	1,00	-	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00		
GATE VALVE											
Gate valve "kitz" 4"	Bh	6,00	4,00	2,00	8.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00		
Flange Gate Valve 4"	Bh	12,00	8,00	4,00	170.000,00	170.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	680.000,00		
Swing Check valve "kitz" 4"	Bh	2,00	1,00	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
Fleng Swing Check valve 4"	Bh	4,00	2,00	2,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00	340.000,00	340.000,00		
Y - Strainer Kitz 4"	Bh	2,00	1,00	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
Fleng Y - Strainer Kitz 4"	Bh	4,00	2,00	2,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
Rubber Flexibel Join 4"	Bh	4,00	2,00	2,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
Fleng Rubber Flexibel Join 4"	Bh	8,00	4,00	4,00	170.000,00	170.000,00	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00		
LOGO ORNAMEN PAGAR											
Logo Pemda KAB. KAPUAS HULU	Bh	80,00	79,00	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00	144.000.000,00	142.200.000,00	1.800.000,00		
PANGGUNG AULA											
PEKERJAAN PANGGUNG											
Lantai Panggung Multiplek t = 18 mm	m2	56,02	52,06	3,96	440.502,90	440.502,90	24.676.972,46	22.932.580,97	1.744.391,49		
PEKERJAAN FINISHING											
Finishing HPL (area dinding panggung arah penonton)	m2	15,32	7,75	7,57	357.811,58	357.811,58	5.481.673,33	2.773.039,71	2.708.633,62		
PEKERJAAN WC MUSHOLA DAN KANTIN											
Pekerjaan Pintu Jendela Ventilasi											
PV (pintu & ventilasi)											
kunci tanam	Bh	2,00	1,00	1,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		
Engsel	Bh	6,00	2,00	4,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00		
Subtotal									611.757.143,41		

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/1.5/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 10 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.1.5.B/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025 tanggal 12 Agustus 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 01.05/BGJL-B/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp39.950.000.000,00
 Rekanan : PT CS

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
Pembulatan....									(143,41)	
Total (A)									611.757.000,00	
Perhitungan Selisih Harga Timpang(B)									70.345.000,00	Rincian Perhitungan di Lampiran 11
Total.....(A + B)									682.102.000,00	Pengembalian ke RKUD

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Tribun GOR Uncak Kapuas

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan : Pembangunan Tribun Gor Uncak Kapuas
Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/4.5/PUPR/PPK.2-BGJL-B/2025 tanggal 16 Juni 2025
Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.4.5.A/PUPR/PPK.2-BGJL-B/2025 tanggal 21 Agustus 2025 (Adendum I)
Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 4.5.08/BGJL-B/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025
Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp4.796.670.000,00
Rekanan : CV CM

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG										
E. PEKERJAAN PLAFOND										
Rangka Plafond	m2	17,78	17,19	0,59	170.000,00	170.000,00	3.022.600,00	2.922.300,00	100.300,00	
Plafond GRC 4 mm (Toilet)	m2	17,78	17,19	0,59	85.000,00	85.000,00	1.511.300,00	1.461.150,00	50.150,00	
G. PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI + KUNCI, PENGGANTUNG										
PJV1										
Ventilasi Kaca 5 mm	m2	2,05	1,93	0,12	400.000,00	400.000,00	820.000,00	772.000,00	48.000,00	
PJV2										
Jendela Kaca T 5 mm	m2	12,00	7,90	4,10	400.000,00	400.000,00	4.800.000,00	3.160.000,00	1.640.000,00	
P1										
Kusen Kayu Klas I 4V8	m3	0,03	0,01	0,02	13.000.000,00	13.000.000,00	390.000,00	130.000,00	260.000,00	
Ventilasi Kaca 5 mm	m2	0,87	0,83	0,04	400.000,00	400.000,00	348.000,00	332.000,00	16.000,00	
P2										
Kusen Kayu Klas I 4V8	m3	0,03	0,01	0,02	13.000.000,00	13.000.000,00	390.000,00	130.000,00	260.000,00	
Ventilasi Kaca 5 mm	m2	0,81	0,74	0,07	400.000,00	400.000,00	324.000,00	296.000,00	28.000,00	
P3										
Kusen Kayu Klas I 4V8	m3	0,01	-	0,01	13.000.000,00	13.000.000,00	130.000,00	-	130.000,00	
Ventilasi Kaca 5 mm	m2	0,44	0,39	0,05	400.000,00	400.000,00	176.000,00	156.000,00	20.000,00	
P4										
Kusen Kayu Klas I 4V8	m3	0,05	0,02	0,03	13.000.000,00	13.000.000,00	650.000,00	260.000,00	390.000,00	
Ventilasi Kaca 5 mm	m2	2,18	1,98	0,20	400.000,00	400.000,00	872.000,00	792.000,00	80.000,00	
P5										
Kusen Kayu Klas I 4V8	m3	0,02	-	0,02	13.000.000,00	13.000.000,00	260.000,00	-	260.000,00	
Kusen Alluminium 3	m	18,80	-	18,80	190.000,00	190.000,00	3.572.000,00	-	3.572.000,00	
JV2										
Kusen Alluminium 3	m	62,40	54,00	8,40	190.000,00	190.000,00	11.856.000,00	10.260.000,00	1.596.000,00	
Bingkai Alluminium Jendela Kaca	m2	49,92	46,80	3,12	230.000,00	230.000,00	11.481.600,00	10.764.000,00	717.600,00	
Jendela Kaca T 5 mm	m2	11,47	9,70	1,77	400.000,00	400.000,00	4.588.000,00	3.880.000,00	708.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Tribun GOR Uncak Kapuas

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan : Pembangunan Tribun Gor Uncak Kapuas
Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/4.5/PUPR/PPK.2-BGJL-B/2025 tanggal 16 Juni 2025
Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.4.5.A/PUPR/PPK.2-BGJL-B/2025 tanggal 21 Agustus 2025 (Adendum I)
Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 4.5.08/BGJL-B/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025
Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp4.796.670.000,00
Rekanan : CV CM

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
Ventilasi Kaca 5 mm	m2	4,82	4,16	0,66	400.000,00	400.000,00	1.928.000,00	1.664.000,00	264.000,00	
J. PEKERJAAN PEMBANGUNAN PANGGUNG UTAMA										
PEKERJAAN PONDASI										
Balok Sloof SL 1 20V40										
Acian	m2	28,00	-	28,00	55.000,00	55.000,00	1.540.000,00	-	1.540.000,00	
Balok Lantai BL 1 25V60										
Acian	m2	84,01	-	84,01	55.000,00	55.000,00	4.620.550,00	-	4.620.550,00	
PEKERJAAN COR LANTAI BELAKANG										
Cor Beton FC 15 Mpa	m3	5,28	4,81	0,47	1.700.000,00	1.700.000,00	8.976.000,00	8.177.000,00	799.000,00	
Plastik beton	kg	7,33	6,69	0,64	32.000,00	32.000,00	234.560,00	214.080,00	20.480,00	
Wiremesh M6	kg	134,86	122,94	11,92	25.000,00	25.000,00	3.371.500,00	3.073.500,00	298.000,00	
K. PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN & PAGAR										
PEKERJAAN COR HALAMAN AREA 1										
Plastik beton	kg	461,98	448,66	13,32	32.000,00	32.000,00	14.783.360,00	14.357.120,00	426.240,00	
Cor Beton Fc 15 Mpa	m3	287,14	277,70	9,44	1.700.000,00	1.700.000,00	488.138.000,00	472.090.000,00	16.048.000,00	
PEKERJAAN COR HALAMAN AREA 2										
Plastik beton	kg	270,88	269,15	1,73	32.000,00	32.000,00	8.668.160,00	8.612.800,00	55.360,00	
Cor Beton Fc 15 Mpa	m3	187,97	186,93	1,04	1.700.000,00	1.700.000,00	319.549.000,00	317.781.000,00	1.768.000,00	
PEKERJAAN PAVING BLOCK AREA 3										
Pengecatan	m2	65,81	-	65,81	30.000,00	30.000,00	1.974.300,00	-	1.974.300,00	
M. REHABILITASI TRIBUN PENONTON										
Lantai Cor WC										
Dinding keramik Uk. 25 x 40 cm polyrshed	m2	57,70	54,04	3,66	30.000,00	30.000,00	1.731.000,00	1.621.200,00	109.800,00	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
Box Panel	Bh	1,00	1,00	-	15.000.000,00	10.500.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	Material on site (Pembayaran 70%)
Septic Tank										
Tutup beton fc 15 Mpa	m3	0,77	0,51	0,26	1.700.000,00	1.700.000,00	1.309.000,00	867.000,00	442.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Tribun GOR Uncak Kapuas

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Pembangunan Tribun Gor Uncak Kapuas
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.15/4.5/PUPR/PPK.2-BGJL-B/2025 tanggal 16 Juni 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.15/ADD-SPK.4.5.A/PUPR/PPK.2-BGJL-B/2025 tanggal 21 Agustus 2025 (Adendum I)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.15/PUPR/BA.PHO/SPK 4.5.08/BGJL-B/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp4.796.670.000,00
 Rekanan : CV CM

(dalam Rupiah)

Uraian		Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
REHABILITASI TOILET											
PEKERJAAN PLAFOND											
Rangka Plafond Kayu Klas II Uk. 4V6		m2	27,46	15,75	11,71	170.000,00	170.000,00	4.668.200,00	2.677.500,00	1.990.700,00	
Plafond GRC 4 mm		m2	27,46	15,75	11,71	85.000,00	85.000,00	2.334.100,00	1.338.750,00	995.350,00	
Subtotal(A)										45.727.830,00	
Pembulatan.....(B)										(830,00)	
Total.....(A + B)										45.727.000,00	Pengembalian ke RKUD

Perhitungan Selisih Harga Timpang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Tahap 3 (Lanjutan Tahun 2024)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN HARGA HPS (Rp.)	KONTRAK AWAL				CCO 2				SELISIH VOLUME	KETERANGAN	HASIL ANALISA			SELISIH HARGA TIMPANG (Rp)
			SATUAN	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	SATUAN	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)			Persentase Satuan Harga Kontrak terhadap HPS	Apakah terdapat penambahan volume?	Apakah Harga Satuan kembali ke HPS?	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 x 6)	8	9	10	11 = (9 x 10)	12 = (9 - 5)	13	14 = (10 / 3)	15	16	17 = ((10 - 3) x 12)
1	Latason Lapis Aus (HRS-WC)	2.108.965,36	Ton	240,24	2.500.000,00	600.600.000,00	Ton	246,64	2.500.000,00	616.611.446,25	6,40	BERTAMBAH	118,54%	Iya	Tidak	2.504.412,04
2	Bekisting	259.141,00	m2	-	300.000,0000	-	m2	3,84	300.000,00	1.152.000,00	3,84	BERTAMBAH	115,77%	Iya	Tidak	156.898,56
3	Bekisting	259.141,00	m2	3,84	300.000,0000	1.152.000,00	m2	14,40	300.000,00	4.320.000,00	10,56	BERTAMBAH	115,77%	Iya	Tidak	431.471,04
4	Wiremesh M5 x 1 Lapis	24.244,88	kg	31,32	30.000,0000	939.600,00	kg	294,72	30.000,00	8.841.600,00	263,40	BERTAMBAH	123,74%	Iya	Tidak	1.515.898,61
5	Bekisting	272.735,44	m2	30,80	500.000,0000	15.400.000,00	m2	38,60	500.000,00	19.300.000,00	7,80	BERTAMBAH	183,33%	Iya	Tidak	1.772.663,57
6	Pemasangan Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	416.000,00	m2	-	500.000,0000	-	m2	165,00	500.000,00	82.500.000,00	165,00	BERTAMBAH	120,19%	Iya	Tidak	13.860.000,00
7	Pemasangan Atap Zincalume 0,35mm	112.723,00	m2	-	150.000,0000	-	m2	165,00	150.000,00	24.750.000,00	165,00	BERTAMBAH	133,07%	Iya	Tidak	6.150.705,00
8	Pekerjaan Dinding batako	176.017,85	m2	32,88	200.000,0000	6.576.000,00	m2	123,25	200.000,00	24.650.800,00	90,37	BERTAMBAH	113,62%	Iya	Tidak	2.167.362,82
9	Acian Dinding	62.134,50	m2	65,76	70.000,0000	4.603.200,00	m2	246,51	70.000,00	17.255.500,00	180,75	BERTAMBAH	112,66%	Iya	Tidak	1.421.673,39
10	Pemasangan Lampu LED	150.000,00	unit	1,00	180.000,0000	180.000,00	unit	7,00	180.000,00	1.260.000,00	6,00	BERTAMBAH	120,00%	Iya	Tidak	180.000,00
11	Bekisting	259.141,00	m2	2,40	300.000,0000	720.000,00	m2	6,40	300.000,00	1.920.000,00	4,00	BERTAMBAH	115,77%	Iya	Tidak	163.436,00
12	Wiremesh M5 x 1 Lapis	24.244,88	kg	19,57	30.000,0000	587.100,00	kg	110,52	30.000,00	3.315.600,00	90,95	BERTAMBAH	123,74%	Iya	Tidak	523.428,16
13	Pemasangan Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	416.000,00	m2	-	500.000,0000	-	m2	58,24	500.000,00	29.120.000,00	58,24	BERTAMBAH	120,19%	Iya	Tidak	4.892.160,00
14	Pemasangan Atap Zincalume 0,35mm	112.723,00	m2	-	150.000,0000	-	m2	58,24	150.000,00	8.736.000,00	58,24	BERTAMBAH	133,07%	Iya	Tidak	2.171.012,48
15	Pekerjaan Dinding batako	176.017,85	m2	32,88	200.000,0000	6.576.000,00	m2	50,69	200.000,00	10.138.000,00	17,81	BERTAMBAH	113,62%	Iya	Tidak	427.122,09
16	Acian Dinding	62.134,50	m2	65,76	70.000,0000	4.603.200,00	m2	101,38	70.000,00	7.096.600,00	35,62	BERTAMBAH	112,66%	Iya	Tidak	280.169,11
17	Wiremesh M5 x 2 Lapis	24.244,88	Kg	100,93	30.000,0000	3.027.900,00	Kg	466,64	30.000,00	13.996.200,00	365,71	BERTAMBAH	123,74%	Iya	Tidak	2.104.704,94
18	Pemasangan Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	416.000,00	m2	43,59	500.000,0000	21.795.000,00	m2	134,00	500.000,00	67.000.000,00	90,41	BERTAMBAH	120,19%	Iya	Tidak	7.594.440,00
19	Pemasangan Atap Zincalume 0,35mm	112.723,00	m2	43,59	150.000,0000	6.538.500,00	m2	134,00	150.000,00	20.100.000,00	90,41	BERTAMBAH	133,07%	Iya	Tidak	3.370.213,57
20	Dinding Batako	176.017,85	m2	34,21	200.000,0000	6.842.000,00	m2	68,30	200.000,00	13.660.800,00	34,09	BERTAMBAH	113,62%	Iya	Tidak	817.647,42
21	Acian Dinding	62.134,50	m2	34,21	70.000,0000	2.394.700,00	m2	136,61	70.000,00	9.562.500,00	102,40	BERTAMBAH	112,66%	Iya	Tidak	805.411,47
22	Dinding Bak Wudhu	176.017,85	m2	-	200.000,0000	-	m2	1,47	200.000,00	294.000,00	1,47	BERTAMBAH	113,62%	Iya	Tidak	35.253,76
23	Dinding Penutup Wudhu	176.017,85	m2	-	200.000,0000	-	m2	4,50	200.000,00	900.000,00	4,50	BERTAMBAH	113,62%	Iya	Tidak	107.919,68
24	Kaca Mael T = 5 mm	367.462,95	m2	1,44	500.000,0000	720.000,00	m2	2,76	500.000,00	1.380.000,00	1,32	BERTAMBAH	136,07%	Iya	Tidak	174.548,91
25	cat dinding dan kolom	69.057,50	m2	81,62	98.957,5000	8.076.911,15	m2	136,61	98.957,50	13.518.386,16	54,99	BERTAMBAH	143,30%	Iya	Tidak	1.644.141,20
26	cat tutup kolom	69.057,50	m2	-	98.957,5000	-	m2	15,20	98.957,50	1.504.154,00	15,20	BERTAMBAH	143,30%	Iya	Tidak	454.480,00
27	cat dinding area wudhu	69.057,50	m2	-	98.957,5000	-	m2	22,00	98.957,50	2.177.065,00	22,00	BERTAMBAH	143,30%	Iya	Tidak	657.800,00
28	cat plafond	69.057,50	m2	-	98.957,5000	-	m2	76,00	98.957,50	7.520.770,00	76,00	BERTAMBAH	143,30%	Iya	Tidak	2.272.400,00
29	Stop Kontak	80.000,00	unit	-	1.600.000,0000	-	unit	3,00	1.600.000,00	4.800.000,00	3,00	BERTAMBAH	2000,00%	Iya	Tidak	4.560.000,00
30	Bekisting	259.141,00	M2	-	350.408,9158	-	M2	19,20	350.408,92	6.727.851,18	19,20	BERTAMBAH	135,22%	Iya	Tidak	1.752.343,98
31	Pemasangan Rangka Plafond Metal Furing	74.015,15	M2	-	140.000,0000	-	M2	66,00	140.000,00	9.240.000,00	66,00	BERTAMBAH	189,15%	Iya	Tidak	4.355.000,10
32	Lampu LED Downlight 14W	75.000,00	Titik	2,00	150.000,0000	300.000,00	Titik	10,00	150.000,00	1.500.000,00	8,00	BERTAMBAH	200,00%	Iya	Tidak	600.000,00
33	Wiremesh M5 x 2 Lapis	24.244,88	Kg	-	30.000,0000	-	Kg	10,38	30.000,00	311.512,50	10,38	BERTAMBAH	123,74%	Iya	Tidak	59.759,73
34	Wiremesh M5 x 2 Lapis	24.244,88	Kg	-	30.000,0000	-	Kg	62,69	30.000,00	1.880.625,00	62,69	BERTAMBAH	123,74%	Iya	Tidak	360.774,40
Subtotal(A)																70.345.652,83
Pembulatan.....(B)																(652,83)
Total.....(A + B)																70.345.000,00

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simp.Bati (Lintas Selatan) - Menapar

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Simp.Bati (Lintas Selatan) - Menapar
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.9/7-PK/DPUPR/BM tanggal 10 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.9/17.A-PKCCO/DPUPR/BM tanggal 10 Juli 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.9/7/BA-PHO/DPUPR/BM tanggal 5 September 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp4.573.000.000,00
 Rekanan : CV CM

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
DIVISI 1. UMUM										
Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Ls	1,00	-	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	BPJS TK merupakan Biaya Tidak Langsung. Dalam hal biaya tersebut muncul pada saat Adendum, maka akan dicatat sebagai kelebihan pembayaran.
Petugas Pengatur Lalu Lintas	Org	2,00	2,00	-	48.000.000,00	48.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-	
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	712,14	702,80	9,34	1.100.000,00	1.100.000,00	783.354.000,00	773.080.000,00	10.274.000,00	
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	150,52	148,99	1,53	1.650.000,00	1.650.000,00	248.358.000,00	245.833.500,00	2.524.500,00	
Subtotal									15.798.500,00	
Pembulatan									(500,00)	
Total (A)									15.798.000,00	Pengembalian ke RKUD
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	130,50	113,10	17,40	1.100.000,00	990.000,00	143.550.000,00	111.969.000,00	31.581.000,00	Pengenaan faktor pembayaran 90%
Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	208,50	173,73	34,77	1.100.000,00	880.000,00	229.350.000,00	152.882.400,00	76.467.600,00	Pengenaan faktor pembayaran 80%
Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	24,00	16,00	8,00	1.100.000,00	-	26.400.000,00	-	26.400.000,00	Pengenaan faktor pembayaran 0%
Subtotal									134.448.600,00	
Pembulatan									(600,00)	
Total (B)									134.448.000,00	Diusulkan untuk perbaikan pekerjaan
Total (A + B)									150.246.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simp. Sekubah - Jongkong

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Simp. Sekubah - Jongkong
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.9/8-PK/DPUPR/BM tanggal 10 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.9/8.A-PKCCO/DPUPR/BM tanggal 7 Juli 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.9/8/BA-PHO/DPUPR/BM tanggal 11 Agustus 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp9.976.000.000,00
 Rekanan : CV ARB

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
DIVISI 1. UMUM Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Ls	1,00	-	1,00	10.537.388,00	10.537.388,00	10.537.388,00	-	10.537.388,00	BPJS TK merupakan Biaya Tidak Langsung. Dalam hal biaya tersebut muncul pada saat Adendum, maka akan dicatat sebagai kelebihan pembayaran.
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	761,87	761,81	0,06	1.650.000,00	1.650.000,00	1.257.085.500,00	1.256.986.500,00	99.000,00	
Subtotal(A)									10.636.388,00	
Pembulatan.....(B)									(388,00)	
Total (A + B)									10.636.000,00	Pengembalian ke RKUD

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mawan - Tapang Tua

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Mawan - Tapang Tua
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.9/10-PK/DPUPR/BM tanggal 10 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.9/10.A-PKCCO/DPUPR/BM tanggal 10 Juli 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.9/10/BA-PHO/DPUPR/BM tanggal 21 Agustus 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp8.280.000.000,00
 Rekanan : CV ARB

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
DIVISI 1. UMUM Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Ls	1,00	-	1,00	9.009.460,00	9.009.460,00	9.009.460,00	-	9.009.460,00	BPJS TK merupakan Biaya Tidak Langsung. Dalam hal biaya tersebut muncul pada saat Adendum, maka akan dicatat sebagai kelebihan pembayaran.
DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	207,17	203,70	3,47	2.000.000,00	2.000.000,00	414.340.000,00	407.400.000,00	6.940.000,00	
Subtotal									15.949.460,00	
Pembulatan									(460,00)	
Total (A)									15.949.000,00	Pengembalian ke RKUD
DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	76,56	73,67	2,89	2.000.000,00	1.800.000,00	153.120.000,00	132.606.000,00	20.514.000,00	Pengenaan faktor pembayaran 90%
Subtotal (B)									20.514.000,00	Pengembalian ke RKUD
Total (A + B)									36.463.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.9/9-PK/DPUPR/BM tanggal 27 Maret 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.9/9.A-PKCCO/DPUPR/BM tanggal 3 Juli 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.9/9/BA-PHO/DPUPR/BM tanggal 11 Agustus 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp9.974.541.584,00
 Rekanan : CV PLB

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
DIVISI 1. UMUM Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Ls	1,00	-	1,00	10.536.073,00	10.536.073,00	10.536.073,00	-	10.536.073,00	BPJS TK merupakan Biaya Tidak Langsung. Dalam hal biaya tersebut muncul pada saat Adendum, maka akan dicatat sebagai kelebihan pembayaran.
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	219,94	216,90	3,04	2.100.000,00	2.100.000,00	461.874.000,00	455.490.000,00	6.384.000,00	
Subtotal									16.920.073,00	
Pembulatan									(73,00)	
Total (A)									16.920.000,00	Pengembalian ke RKUD
DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	379,99	370,06	9,93	2.100.000,00	1.890.000,00	797.979.000,00	699.413.400,00	98.565.600,00	Pengenaan faktor pembayaran 90%
Subtotal									98.565.600,00	
Pembulatan									(600,00)	
Total (B)									98.565.000,00	Diusulkan untuk perbaikan pekerjaan
Total (A + B)									115.485.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.9/13-PK/DPUPR/BM tanggal 4 Juli 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.9/13-PKCCO/DPUPR/BM tanggal 18 September 2025 (Adendum I)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.9/13/BA-PHO/DPUPR/BM tanggal 29 Oktober 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp2.938.205.696,00
 Rekanan : CV SAP

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
DIVISI 1. UMUM										
Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Ls	1,00	1,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-	BPJS TK merupakan Biaya Tidak Langsung. Dalam hal biaya tersebut muncul pada saat BOQ/proses tender, maka akan dicatat sebagai pemborosan.
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	-	-	2.515.742,14	2.515.742,14	-	-	-	
Subtotal (A)									-	Pengembalian ke RKUD
DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL										
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	79,50	77,47	2,03	2.515.742,14	2.264.167,93	200.001.500,13	175.405.089,23	24.596.410,90	Pengenaan faktor pembayaran 90%
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	116,59	112,88	3,71	2.515.742,14	2.012.593,71	293.310.376,10	227.181.578,21	66.128.797,89	Pengenaan faktor pembayaran 80%
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	232,98	219,72	13,26	2.515.742,14	-	586.117.603,78	-	586.117.603,78	Pengenaan faktor pembayaran 0%
Subtotal									676.842.812,57	
Pembulatan									(812,57)	
Total (B)									676.842.000,00	Diusulkan untuk perbaikan pekerjaan
Total (A + B)									676.842.000,00	

Perhitungan Nilai Temuan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Peniung Tahap 2

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Sungai Peniung Tahap 2
 Nomor & Tanggal Kontrak : 600.1.10/15-PK/DPUPR/BM tanggal 4 Juli 2025
 Nomor & Tanggal Add Terakhir : 600.1.10/15.A-PKCCO.A/DPUPR/BM tanggal 28 November 2025 (Adendum II)
 Nomor & Tanggal PHO : 600.1.10/15/BA-PHO/DPUPR/BM tanggal 19 Desember 2025
 Nilai Kontrak (termasuk Pajak) : Rp8.072.000.000,00
 Rekanan : CV CM

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Volume Diterima			Harga Satuan Final (Rp)		Nilai Pembayaran (Rp)			Keterangan
		Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	Kontrak	Pemeriksaan	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (3x6)	9 = (4x7)	10 = (8-9)	11
DIVISI 1. UMUM										
Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Ls	1,00	1,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	BPJS TK merupakan Biaya Tidak Langsung. Dalam hal biaya tersebut muncul pada saat BOQ/proses tender, maka akan dicatat sebagai pemborosan.
DIVISI 7. STRUKTUR										
Pasangan Batu	m3	165,73	165,73	-	2.400.000,00	2.400.000,00	397.752.000,00	397.752.000,00	-	
Pasangan Batu (Negosiasi)	m3	192,47	69,37	123,10	1.749.836,37	1.749.836,37	336.791.006,13	121.386.148,99	215.404.857,14	
Subtotal(A)									215.404.857,14	
Pembulatan.....(B)									(857,14)	
Total.....(A + B)									215.404.000,00	Pengembalian ke RKUD

Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas PUPR

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	Pembangunan Jalan Amril Norman Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	2.986.000.000,00	717.510.000,000
2	Pembangunan Rabat Beton Gg. Kenari Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara (Lanjutan T.A 2023)	71.818.000,00	2.079.000,000
3	Pembangunan Rabat Beton Gg. Kapuas RT. 02/RW. 03 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	80.850.000,00	5.923.000,000
4	Pembangunan Rabat Beton Jl. Simpang Melapi Gg. Ahmad Kec. Putussibau Selatan	134.850.000,00	7.020.000,000
5	Pembangunan Rabat Beton Jl. Temenggung Dalling Ds. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2024)	134.900.000,00	17.748.000,000
6	Pembangunan Rabat Beton Jl. Banin Gg. Smp 07 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	89.850.000,00	21.643.000,000
7	Pembangunan Rabat Beton Gg. A. Pangkar Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	96.885.000,00	2.807.000,000
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani 2 (Menuju BTN Owen Blok A) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	67.390.000,00	21.567.000,000
9	Pembangunan Rabat Beton Jl. Sentosa Gg. Akur RT. 10/RW. 4 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	89.805.000,00	37.830.000,000
10	Pembangunan Rabat Beton Gg. Sahabat RT. 002/RW. 003 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	80.850.000,00	1.839.000,000
11	Pengaspalan Jalan Lingkungan Gg. Bujai M. Yusuf Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	179.800.000,00	22.218.000,000
12	Pengaspalan Jalan Lingkungan Jl. Agrowisata Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	179.818.000,00	45.159.000,000
13	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah	1.338.181.000,00	21.883.000,000
	Jumlah Total	5.530.997.000,00	925.226.000,00

Rincian Kelebihan Pembayaran atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas PUPR

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Amril Norman Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan
 Nomor Kontrak : 600.1.8/ADD.2-SPK.3.5B/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025
 Tanggal Kontrak : 2 Mei 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV PLB

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Harga Satuan Pemeriksaan	Kelebihan Pembayaran atas Kurang Volume	Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi	Ketidaksesuaian Spesifikasi yang di Setor ke RKUD	Ketidaksesuaian Spesifikasi yang di Setor ke RKAD	Nilai Keseluruhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8	9 = (6 x 7)	10	11	12 = 8 + 9 + 10	13 = (9 + 11 + 12)	14
Mobilisasi													
1	Excavator 80-140 Hp	1,00	Unit	0,000	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	30.000.000,00	Item pekerjaan yang tidak direalisasikan
Pekerjaan Jalan													
Segmen 1													
1	Beton strukur, fc'20 Mpa	5,18	M3	5,18		14.748.750,00	14.748.750,00		-	-	-	-	
2	Beton strukur, fc'20 Mpa	5,63	M3	5,63		16.031.250,00	16.031.250,00		-	-	-	-	
3	Beton strukur, fc'20 Mpa	1,80	M3	1,44		5.130.000,00			5.130.000,00	5.130.000,00	-	5.130.000,00	
Segmen 2													
1	Beton strukur, fc'20 Mpa	33,75	M3	27,052		96.187.500,00	-		96.187.500,00	-	96.187.500,00	96.187.500,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
2	Beton strukur, fc'20 Mpa	33,75	M3	30,769		96.187.500,00	-		96.187.500,00	-	96.187.500,00	96.187.500,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
3	Beton strukur, fc'20 Mpa	67,50	M3	63,900		192.375.000,00	145.692.000,00		46.683.000,00		46.683.000,00	46.683.000,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
4	Beton strukur, fc'20 Mpa	33,75	M3	28,941		96.187.500,00	-		96.187.500,00	-	96.187.500,00	96.187.500,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
5	Beton strukur, fc'20 Mpa	33,75	M3	29,756		96.187.500,00	-		96.187.500,00	-	96.187.500,00	96.187.500,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
6	Beton strukur, fc'20 Mpa	33,75	M3	29,728		96.187.500,00	-		96.187.500,00	-	96.187.500,00	96.187.500,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
7	Beton strukur, fc'20 Mpa	33,75	M3	28,491		96.187.500,00	-		96.187.500,00	-	96.187.500,00	96.187.500,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
8	Beton strukur, fc'20 Mpa	67,50	M3	64,463		192.375.000,00	146.974.500,00		45.400.500,00	-	45.400.500,00	45.400.500,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
9	Beton strukur, fc'20 Mpa	33,75	M3	32,822		96.187.500,00	93.542.343,75		2.645.156,25	2.645.156,25	-	2.645.156,25	
10	Beton strukur, fc'20 Mpa	16,20	M3	15,633		46.170.000,00	35.643.240,00		10.526.760,00	-	10.526.760,00	10.526.760,00	Ketidaksesuaian Spesifikasi
Total												717.510.416,25	
Pembulatan												717.510.000,00	

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Gg. Kenari Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara (Lanjutan T.A 2023)
 Nomor Kontrak : 600.1.8/77.7.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juli 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV DM

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah	Pembulatan	Jumlah Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = (6 x 7)	9	10 = (8 + 9)
Rabat Beton									
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	6,37	M3	5,793	0,577	1.752.500,00	1.011.564,91	435,09	1.012.000,00
Latasir									
1	Penghamparan dan Pemadatan Latasir	3,72	M3	3,640	0,08	12.586.918,57	1.067.370,70	370,70	1.067.000,00
Total							2.078.935,60		2.079.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Gg. Kapuas RT. 02/RW. 03 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara
 Nomor Kontrak : 600.1.8/79.9.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 14 Agustus 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV JM

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							

1	Cor Beton fc = 10 Mpa	31,38	M3	28,000	3,380	1.752.500,00	5.923.450,00
Total							5.923.450,00
Pembulatan							5.923.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Jl. Simpang Melapi Gg. Ahmad Kec. Putussibau Selatan
 Nomor Kontrak : 600.1.8/24.4.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 08 Agustus 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV SJK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	64,98	M3	60,974	4,006	1.752.500,00	7.020.734,06
Total							7.020.734,06
Pembulatan							7.020.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Jl. Temenggung Dalling Ds. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2024)
 Nomor Kontrak : 600.1.8/46.13.08/SPK/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 15 AGUSTUS 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV NP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	67,96	M3	57,829	10,129	1.752.200,00	17.748.165,22
Total							17.748.165,22
Pembulatan							17.748.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Jl. Banin Gg. Smp 07 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan
 Nomor Kontrak : 600.1.8/27.7.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 8 Agustus 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV RAK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	42,29	M3	29,940	12,350	1.752.500,00	21.643.375,00
Total							21.643.375,00
Pembulatan							21.643.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Gg. A. Pangkar Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara
 Nomor Kontrak : 600.1.8/29.9.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 28 AGUSTUS 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV PS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	46,56	M3	44,964	1,598	1.757.400,00	2.807.552,82
Total							2.807.552,82
Pembulatan							2.807.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani 2 (Menuju BTN Owen Blok A) Kel. Keadamin Hilir Kec. Putussibau Selatan
 Nomor Kontrak : 600.1.8/56.10.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 07 Agustus 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV ARP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	33,10	M3	20,796	12,307	1.752.500,00	21.567.588,79
Total							21.567.588,79
Pembulatan							21.567.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Jl. Sentosa Gg. Akur RT. 10/RW. 4 Kel. Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan
 Nomor Kontrak : 600.1.8/42.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 10 November 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV SJK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	42,59	M3	21,000	21,587	1.752.500,00	37.830.341,25
Total							37.830.341,25
Pembulatan							37.830.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Gg. Sahabat RT. 002/RW. 003 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara
 Nomor Kontrak : 600.1.8/80.10.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 14 Agustus 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV RFK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Rabat Beton							
1	Cor Beton fc = 10 Mpa	31,38	M3	30,331	1,050	1.752.500,00	1.839.564,20
Total							1.839.564,20
Pembulatan							1.839.000,00

Nama Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Lingkungan Gg. Bujai M. Yusuf Kel. Keadamin Hilir Kec. Putussibau Selatan
 Nomor Kontrak : 600.1.8/33.13.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 28 Agustus 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV MS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Latasir							
1	Penghamparan dan Pemadatan Latasir	12,44	M3	10,680	1,76	12.641.469,06	22.218.646,02
Total							22.218.646,02
Pembulatan							22.218.000,00

Nama Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Lingkungan Jl. Agrowisata Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara
 Nomor Kontrak : 600.1.8/75.5.08/PUPR/PPK.3-BGJL-C/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juli 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV DM

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
Latasir							
1	Penghamparan dan Pemadatan Latasir	12,43	M3	8,843	3,59	12.592.973,58	45.159.032,91
Total							45.159.032,91
Pembulatan							45.159.000,00

Nama Pekerjaan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah
 Nomor Kontrak : 600.1.16.3/BA.CCO.2-PKS.41/PL-DAK/DPUPR/2025
 Tanggal Kontrak : 18 November 2025
 Pelaksana Pekerjaan : ABSK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7	8 = 6 x 7
PEKERJAAN PENGADAAN PIPA							
1	Pipa PVC Ø 3"	198,00	M'	179,30	18,70	111.000,00	2.075.700,00
PEKERJAAN GALIAN TANAH PIPA							
1	Pipa PVC Ø 3"	194,00	M'	93,20	100,80	15.395,90	1.551.906,56
2	Pipa HDPE Ø 4"	1.050,00	M'	150,00	900,00	18.915,63	17.024.062,50
PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
1	Pipa PVC Ø 3"	198,00	M'	93,200	104,80	11.750,00	1.231.400,00
Total							21.883.069,06
Pembulatan							21.883.000,00

Rincian Kelebihan Pembayaran atas Pembangunan Gedung Paroki Kel. Putussibau Kota

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Paroki Kel. Putussibau Kota
 Nomor Kontrak : 600.1.15/2.5/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2025
 Tanggal Kontrak : 10 Maret 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV KM

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Kelebihan Pembayaran atas Kurang Volume	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume	Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi	Kelebihan Pembayaran Keseluruhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8 = (6 x 7)	9 = (6 x 7)	10	11 = (8 + 9 + 10)	12
Persiapan											
1	Job Mix Formula K 125	1,00	Bh	0,000	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	Item pekerjaan yang tidak direalisasikan
2	Job Mix Formula K 250	1,00	Bh	1,000	-	10.000.000,00		8.875.000,00		8.875.000,00	Penyesuaian Harga Job Mix
Pekerjaan Lantai											
Lantai Atas											
1	Keramik 60 x 60 Anti Gores Balkon Atas	59,91	m2	59,53	0,38	446.200,00	169.556,00			169.556,00	Kekurangan volume
2	Keramik 30 x 30	21,89	m2	9,57	12,32	300.000,00	3.696.000,00			3.696.000,00	Kekurangan volume
Pekerjaan Tangga ke Ruang VIP											
1	Bekisting	5,52	m2	5,08	0,44	400.000,00	176.000,00			176.000,00	Kekurangan volume
2	Cor Beton Ready Mix K-250	2,76	m3	2,54	0,22	3.200.000,00	704.000,00			704.000,00	Kekurangan volume
Pekerjaan Tangga ke Ruang VIP 2											
1	Bekisting	5,52	m2	5,48	0,04	341.700,00	13.668,00			13.668,00	Kekurangan volume
2	Cor Beton Ready Mix K-250	2,76	m3	2,74	0,02	3.200.000,00	64.000,00			64.000,00	Kekurangan volume
3	Keramik 60 x 60	20,78	m2	12,46	8,32	500.000,00	4.160.000,00			4.160.000,00	Kekurangan volume
Pekerjaan Atap											
1	Kuda-kuda baja ringan	117,00	m2	104,00	13,00	387.900,00	5.042.700,00			5.042.700,00	Kekurangan volume
2	Atap Seng Zinalume 0,35 mm	1.317,00	m2	1.304,00	13,00	165.100,00	2.146.300,00			2.146.300,00	Kekurangan volume
Pekerjaan Lain-Lain											
1	Finishing ACP (Ambang Pintu)	70,92	m2	69,10	1,82	1.500.000,00	2.730.000,00			2.730.000,00	Kekurangan volume
Lantai Basement											
1	Instalasi penerangan	44,00	titik	35,00	9,00	300.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00	Kekurangan volume
Lantai Satu											
1	Instalasi penerangan	99,00	titik	95,00	4,00	300.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	Kekurangan volume
Instalasi Fan Lantai Basement & Lantai Satu											
1	Instalasi exhaust fan 1 phase (NYM 3x2 5mm2)	4,00	titik	-	4,00	300.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	Kekurangan volume
Instalasi Tata Suara Lantai Satu											
1	Instalasi ceiling speaker	10,00	titik	8,00	2,00	500.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	Kekurangan volume
Mekanikal Plumbing											
Air Bersih Lantai Basement & Lantai Satu											
1	Paket pompa booster dan pompa transfer air bersih	2,00	Bh	1,00	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
Total										45.877.224,00	
Pembulatan										45.877.000,00	

Rincian Kelebihan Pembayaran atas Pembangunan Lanjutan Klinik Pratama Polres

Nama Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Klinik Pratama Polres
 Nomor Kontrak : 003.2/002/SPK/FISIK.PL/DKKB/2025
 Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2025
 Pelaksana Pekerjaan : CV. MPS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Volume Kontrak	Satuan	Volume Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan Kontrak	Kelebihan Pembayaran atas Kurang Volume	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume	Kelebihan Pembayaran atas Ketidaksesuaian Spesifikasi	Kelebihan Pembayaran Keseluruhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8 = (6 x 7)	9 = (6 x 7)	10	11 = (8 + 9 + 10)	12
Pekerjaan Atap											
1	Pengecatan no droop dak + perekat bocor	48,00	m2	0,000	48,00	167.000,00	8.016.000,00	-	-	8.016.000,00	Item pekerjaan yang tidak direalisasikan
Pekerjaan Lain-Lain											
<i>Pekerjaan tutup kolong</i>											
1	Dinding batako uk. 7 x 15 x 30 cm	14,85	m2	14,21	0,64	210.300,00	134.592,00	-	-	134.592,00	Kekurangan volume
2	Plesteran semen	14,85	m2	14,21	0,64	109.000,00	69.760,00	-	-	69.760,00	Kekurangan volume
3	Pengecatan dinding	14,85	m2	14,21	0,64	57.400,00	36.736,00	-	-	36.736,00	Kekurangan volume
Total										8.257.088,00	
Pembulatan										8.257.000,00	

Perhitungan Denda Keterlambatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Disdikbud

(dalam Rupiah)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak Setelah PPN (Rp)	Nilai Kontrak Sebelum PPN (Rp)	Waktu Pelaksanaan Kontrak		Tanggal PHO/BAST	Jumlah Hari Keterlambatan	Metode Hitung Denda	Dasar Pengenaan Denda Diluar Pajak (Rp)	Perhitungan Denda Keterlambatan (Rp)	Denda Keterlambatan Telah Dibayar/Dipotong dari Pembayaran (Rp)	Sisa Perhitungan Denda Keterlambatan (Rp)	Keterangan
					Awal	Akhir								
1	2	3	4	5 = (4 x 100/111)	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	12 = (1/1000 x 9 x 11)	13	14 = (12 - 13)	15
1	Konsolidasi Pengadaan Mebeler Jenjang SD 1	CV TJK	445.360.100,00	401.225.315,32	22 Mei 2025	20 Juli 2025	17 Agustus 2025	28 Hari	Harga Bagian Kontrak per sisa barang yang belum diterima	291.354.324,32	8.157.921,08	-	8.157.921,08	Nilai Dasar Pengenaan Denda dihitung dari sisa 297 unit mebel yang belum diterima
Subtotal (A)													8.157.921,08	
Pembulatan (B)													(821,08)	
Total (A + B)													8.157.000,00	

Perhitungan Denda Keterlambatan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada DPUPR

(dalam Rupiah)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak Setelah PPN (Rp)	Nilai Kontrak Sebelum PPN (Rp)	Waktu Pelaksanaan Kontrak		Tanggal PHO/BAST	Jumlah Hari Keterlambatan	Metode Hitung Denda	Dasar Pengenaan Denda Diluar Pajak - Item Pekerjaan (Rp)	Perhitungan Denda Keterlambatan (Rp)	Denda Keterlambatan Telah Dibayar/Dipotong dari Pembayaran (Rp)	Sisa Perhitungan Denda Keterlambatan (Rp)	Pembulatan (Rp)	Sisa Perhitungan Denda Keterlambatan Setelah Pembulatan (Rp)	Keterangan
					Awal	Akhir										
1	2	3	4	5 = (4 x 100/111)	6	7	8	9 = (8- 7)	10	12	13 = (1/1000 x 9 x 12)	14	15 = (13 - 14)	16	17 = (15 - 16)	18
1	Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Jaya - TPA Kalis	CV SF	2.880.634.920,00	2.595.166.594,59	10 Oktober 2025	31 Desember 2025	21 Januari 2026	21 Hari	Harga Bagian Kontrak	1.511.101.799,57	31.733.137,79	1.081.266,41	30.651.871,38	871,38	30.651.000,00	Nilai Dasar Pengenaan Denda Keterlambatan dihitung dari Nilai Bagian Item pekerjaan: a. mobilisasi; dan b. timbunan pilihan dari sumber galian.
2	Peningkatan Ruas Jalan Nanga Payang - Landau Kalo (Batu Tiga)	CV CM	2.949.000.000,00	2.656.756.756,76	04 Juli 2025	31 Oktober 2025	12 Desember 2025	42 Hari	Harga Bagian Kontrak	574.733.704,61	24.138.815,59	3.651.887,00	20.486.928,59	928,59	20.486.000,00	Nilai Dasar Pengenaan Denda Keterlambatan dihitung dari Nilai Bagian Item pekerjaan: a. mobilisasi; b. penggantian lantai kayu; c. penggantian gelagar kayu; d. penggantian balok kepala tiang; e. penggantian papan lajur kendaraan; f. perbaikan sandaran kayu; dan g. pengecatan sandaran.
Total											55.871.953,38	4.733.153,41	51.138.799,97	1.799,97	51.137.000,00	

Rincian Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang Belum Sepenuhnya Diselesaikan

(dalam Rupiah)

No	Nama	Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan yang Seharusnya Diterima	Pembayaran Tahap 1	Sisa yang Belum Dibayar
1	2	3	4	5 = (3 - 4)
A	Puskesmas Putussibau Selatan			
1	dIM	4.250.000,00	4.250.000,00	-
2	TW	3.436.150,00	1.735.650,00	1.700.500,00
3	ES	3.861.750,00	1.631.661,00	2.230.089,00
4	EDA	3.809.200,00	1.000.000,00	2.809.200,00
5	SM	399.950,00	399.950,00	-
6	SK	370.000,00	370.000,00	-
7	DYP	409.000,00	409.000,00	-
8	SL	375.250,00	375.250,00	-
9	MM	498.750,00	498.750,00	-
10	SJ	375.250,00	375.250,00	-
11	Ne	803.000,00	408.000,00	395.000,00
12	PTI	861.650,00	437.000,00	424.650,00
13	RD	1.138.100,00	375.250,00	762.850,00
14	Ma	881.000,00	421.000,00	460.000,00
15	ML	1.671.000,00	-	1.671.000,00
16	Yu	950.000,00	-	950.000,00
17	Ne	750.500,00	-	750.500,00
18	DM	525.000,00	-	525.000,00
19	MA	498.750,00	-	498.750,00
20	KL	460.000,00	-	460.000,00
21	RW	412.300,00	-	412.300,00
22	AF	387.600,00	-	387.600,00
23	HA	387.600,00	-	387.600,00
Jumlah A		27.511.800,00	12.686.761,00	14.825.039,00
B	Puskesmas Hulu Gurung			
1	DT	9.097.852,00	4.195.373,60	4.902.478,40
2	DA	14.274.000,00	6.582.296,65	7.691.703,35
3	DD	14.274.000,00	6.582.296,65	7.691.703,35
4	dDT	38.610.000,00	17.804.572,92	20.805.427,08
5	dSR	11.427.000,00	5.269.434,21	6.157.565,79
6	ERK	21.405.418,00	9.870.870,84	11.534.547,16
7	HF	14.446.843,00	6.662.001,22	7.784.841,78
8	He	14.274.000,00	6.582.296,35	7.691.703,65
9	IAS	14.274.000,00	6.582.296,65	7.691.703,35
10	IZ	24.078.259,00	11.103.422,00	12.974.837,00
11	MR	5.709.600,00	2.632.918,66	3.076.681,34
12	MFD	88.980.913,00	41.032.560,24	47.948.352,76
13	NVV	19.262.607,00	8.882.737,40	10.379.869,60
14	No	40.941.517,00	18.879.726,10	22.061.790,90
15	RK	14.274.000,00	6.582.296,65	7.691.703,35
16	Ri	15.040.033,00	6.935.544,20	8.104.488,80
17	Ro	14.274.000,00	6.582.296,65	7.691.703,35
18	SPR	4.282.200,00	1.974.689,00	2.307.511,00
Jumlah B		378.926.242,00	174.737.630,00	204.188.612,01
C	Puskesmas Semitau			
1	AO	2.553.661,00	1.177.595,00	1.376.066,00
2	DYh	4.939.623,00	2.277.858,00	2.661.765,00
3	dFD	27.493.303,00	12.678.262,00	14.815.041,00
4	Er	11.114.812,00	5.125.484,00	5.989.328,00
5	Fe	3.951.623,00	1.822.252,00	2.129.371,00
6	Ha	4.614.623,00	2.127.987,00	2.486.636,00
7	LL	2.521.623,00	1.162.821,00	1.358.802,00
8	MI	4.528.985,00	2.088.496,00	2.440.489,00
9	NS	1.228.500,00	566.510,00	661.990,00
10	NF	3.032.080,00	1.398.214,00	1.633.866,00
11	SN	3.951.623,00	1.822.252,00	2.129.371,00
12	TN	5.940.812,00	2.739.546,00	3.201.266,00
13	VE	2.724.287,00	1.256.277,00	1.468.010,00
14	VM	5.914.623,00	2.727.469,00	3.187.154,00
15	DVS	7.816.903,00	3.604.586,00	4.212.317,00
Jumlah C		92.327.081,00	42.575.609,00	49.751.472,00
Jumlah A+B+C		498.765.123,00	230.000.000,00	268.765.123,01

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0001	609	1996	Jl. Pancasila	Hak Pakai		Aminah - Swasta	-	Rp	8.526.000,00	PENGELOLA
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0001	164	2004	Jl. Imelda (Komp. Dikes)	-		Mulyawan - PNS	-	Rp	3.298.000,00	PENGELOLA
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0002	360	2004	Gang Beringin	-		Ab. Usman - PNS	-	Rp	5.040.000,00	PENGELOLA
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0003	345	2004	Gang Beringin	-		Martinus - PNS	-	Rp	4.830.000,00	PENGELOLA
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0004	624	2004	Jl. A. Dogom	-		Lamun - PNS	-	Rp	8.746.500,00	PENGELOLA
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0005	500	2004	Jl. A. Dogom	-		Irwani, S.Sos - PNS	-	Rp	5.000.000,00	PENGELOLA
7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0008	574	2004	Jl. Adisucipto	-		Ir. H. Amsal B. - PNS	-	Rp	11.480.000,00	PENGELOLA
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0018	240	2004	Jl. D.I. Panjaitan (Komp. DPRD)	-		Wibantoko - PNS	-	Rp	6.480.000,00	PENGELOLA
9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0021	1	2004	Jl. Danau Luar	-		Ahmat Tabri (Mess Diknas) - PNS	-	Rp	415.800.000,00	PENGELOLA (Satu Hampanan SHP NO. 56 / 21 Desember 1979 dengan Luas 5.400 M2)
10	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0025	574	2004	Jl. Danau Luar (Komp. Kehutanan)	-		Pulo Tambunan - PNS	-	Rp	11.480.000,00	PENGELOLA
11	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0027	524	2004	Jl. Danau Luar (Komp. Kehutanan)	-		Rumah Dinas No. 8 - PNS	-	Rp	10.496.000,00	PENGELOLA
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0028	406	2004	Jl. Danau Luar (Komp. Kehutanan)	-		Sahman - PNS	-	Rp	8.120.000,00	PENGELOLA
13	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0037	1	2004	Jl. Gusti Ngu Rahrai	-		RD. Kakan Koperasi dan UKM - PNS	-	Rp	71.045.000,00	PENGELOLA
14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0039	93	2004	Jl. Jeranding A. Rahman	-		Abdul Haji - PNS	-	Rp	1.870.000,00	PENGELOLA
15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0040	71	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Agusjam A.R. - PNS	-	Rp	1.430.000,00	PENGELOLA
16	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0041	137	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Ahmad Mohtar - PNS	-	Rp	2.750.000,00	PENGELOLA
17	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0042	93	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Dayang Andriyanti - PNS	-	Rp	1.870.000,00	PENGELOLA
18	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0043	172	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Edison Sihombing - PNS	-	Rp	3.450.000,00	PENGELOLA
19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0044	190	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Marta S./Usman - PNS	-	Rp	3.800.000,00	PENGELOLA
20	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0045	540	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Mawardi - PNS	-	Rp	10.810.000,00	PENGELOLA
21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0046	540	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Johan - PNS	-	Rp	10.810.000,00	PENGELOLA
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0047	540	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Drs. M. Yusuf - PNS	-	Rp	10.810.000,00	PENGELOLA
23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0048	540	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		H. Marwan, S.Sos. - PNS	-	Rp	10.810.000,00	PENGELOLA
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0049	209	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Mohtar - PNS	-	Rp	4.180.000,00	PENGELOLA
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0050	90	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Muhani - PNS	-	Rp	1.800.000,00	PENGELOLA
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0051	60	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Nyalang - PNS	-	Rp	1.210.000,00	PENGELOLA
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0052	280	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Parmari/Suyono - PNS	-	Rp	5.610.000,00	PENGELOLA
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0053	203	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Ramlil - PNS	-	Rp	4.070.000,00	PENGELOLA
29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0054	367	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Syamsudin/Utin Agustini - PNS	-	Rp	7.350.000,00	PENGELOLA
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0055	137	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Syeh Abdul Azis - PNS	-	Rp	2.750.000,00	PENGELOLA
31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0056	220	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	-		Wiloyo/Anita - PNS	-	Rp	4.400.000,00	PENGELOLA
32	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0057	161	2004	Jl. Ks. Tubun	-		Abdul Kadir - PNS	-	Rp	3.220.000,00	PENGELOLA
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0060	385	2004	Jl. Lapangan Bola	-		M. Seban - PNS	-	Rp	7.700.000,00	PENGELOLA

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0062	500	2004	Jl. Meranti	-		Imanuel - PNS	-	Rp 10.000.000,00	PENGELOLA
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0064	493	2004	Jl. Pancasila	-		Drs. Alexander R., M.Si. - PNS	-	Rp 9.860.000,00	PENGELOLA
36	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0065	680	2004	Jl. Pancasila	-		Marius Abun - PNS	-	Rp 13.600.000,00	PENGELOLA
37	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0066	680	2004	Jl. Pancasila	-		Drs. A.J. Lintungan Pandji - PNS	-	Rp 13.600.000,00	PENGELOLA
38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0067	609	2004	Jl. Pancasila	-		P. Dubai - PNS	-	Rp 12.180.000,00	PENGELOLA
39	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0068	637	2004	Jl. Pancasila	-		Drs. Timotius Ahie - PNS	-	Rp 12.740.000,00	PENGELOLA
40	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0069	400	2004	Jl. Pancasila	-		Gunawan, S.E. - PNS	-	Rp 8.000.000,00	PENGELOLA
41	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0070	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	-		Anang Suarman - PNS	-	Rp 471.045.000,00	PENGELOLA (Satu Hampanan SHP NO. 201 / 1 Maret 2004 dengan Luas 1.870 M2)
42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0071	440	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	-		Ijah - PNS	-	Rp 6.160.000,00	PENGELOLA
43	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0072	1	2004	Jl. Patimura	-		Antonius Haang - PNS	-	Rp 1.380.000.000,00	PENGELOLA (Satu Hampanan No 110 / 5 Januari 1983 dengan Luas 6.900 M2)
44	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0073	560	2004	Jl. S. Parman	-		Jabarudin, S.Sos., M.Si. - PNS	-	Rp 7.840.000,00	PENGELOLA
45	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0074	560	2004	Jl. S. Parman	-		Abang Japar - PNS	-	Rp 7.840.000,00	PENGELOLA
46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0075	400	2004	Jl. S. Parman	-		Agustusuma Yuda - PNS	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
47	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0076	600	2004	Jl. S. Parman	-		M. Zailani Bakar - PNS	-	Rp 8.400.000,00	PENGELOLA
48	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0077	400	2004	Jl. S. Parman	-		Heri N. - PNS	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
49	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0078	400	2004	Jl. S. Parman	-		Adi - PNS	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0079	400	2004	Jl. S. Parman	-		Anwar Rusdi - PNS	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
51	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0080	400	2004	Jl. S. Parman	-		Derani - PNS	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
52	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0081	1.000	2004	Jl. S. Parman	-		Patrisia Radu - PNS	-	Rp 14.000.000,00	PENGELOLA
53	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0084	512	2004	Komplek BTN	-		Andreas Yan L. - PNS	-	Rp 5.120.000,00	PENGELOLA
54	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0085	368	2004	Komplek BTN	-		Damianus - PNS	-	Rp 3.680.000,00	PENGELOLA
55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0086	384	2004	Komplek BTN	-		Daniel - PNS	-	Rp 3.840.000,00	PENGELOLA
56	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0087	325	2004	Komplek BTN	-		Dominikus Igong - PNS	-	Rp 3.255.000,00	PENGELOLA
57	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0088	252	2004	Komplek BTN	-		E. Sardiyana - PNS	-	Rp 2.520.000,00	PENGELOLA
58	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0089	496	2004	Komplek BTN	-		Emerita Dara - PNS	-	Rp 4.960.000,00	PENGELOLA
59	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0090	220	2004	Komplek BTN	-		Emiliana - PNS	-	Rp 2.205.000,00	PENGELOLA
60	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0091	368	2004	Komplek BTN	-		P. Gancil - PNS	-	Rp 3.680.000,00	PENGELOLA
61	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0092	241	2004	Komplek BTN	-		Tugang - PNS	-	Rp 2.415.000,00	PENGELOLA
62	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0093	336	2004	Komplek BTN	-		Y.T. Kosmas A.R. - PNS	-	Rp 3.360.000,00	PENGELOLA
63	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0094	303	2004	Kompleks Eks Depsos	-		F. Pardal - PNS	-	Rp 4.242.000,00	PENGELOLA
64	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0095	238	2004	Kompleks Eks Depsos	-		Jhoni Silaban - PNS	-	Rp 3.332.000,00	PENGELOLA
65	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0096	281	2004	Kompleks Eks Depsos	-		Sugianti - PNS	-	Rp 3.937.500,00	PENGELOLA
66	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0097	234	2004	Kompleks Eks Depsos	-		Tamsil - PNS	-	Rp 3.276.000,00	PENGELOLA

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0098	153	2004	Kompleks Eks Depsos	-		Ramses Simamora - PNS	-	Rp 2.142.000,00	PENGELOLA
68	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0100	319	2004	Jl. Jerandang Abdurrahman	-		Yusuf/Pini	-	Rp 6.380.000,00	PENGELOLA
69	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0101	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan Kantor Perkebunan.	-	Rp 58.460.000,00	PENGELOLA
70	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0102	-	2004		-		Ex Tanah Bagunan: 2 Unit Kantor, 2 Unit Rumah dinas dan 1 unit Gudang.	-	Rp 345.000.000,00	PENGELOLA
71	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0103	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan Kantor KBKPH Putussibau.	-	Rp 20.000.000,00	PENGELOLA
72	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0104	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: 1 Unit Kantor dan 1 Unit Bangunan Rumah Dinas.	-	Rp 40.000.000,00	PENGELOLA
73	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0105	-	2004		-		Ex. Tanah Tanah Bagunan Kantor BKPH dan Ex Tanah Bangunan Rumah Dinas KBKPH Embalah Hilir.	-	Rp 4.500.000,00	PENGELOLA
74	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0106	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: Kantor dan Bangunan Rumah Dinas RPH dan KRPH Embalah Hilir.	-	Rp 5.000.000,00	PENGELOLA
75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0107	-	2004		-		Ex Tanah Bangunan: 1 Unit Kantor dan 1 Unit Bangunan Rumah Dinas PRPTE.	-	Rp 15.000.000,00	PENGELOLA
76	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0108	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: Kantor dan Rumah Dinas BKPH Kec. Bunut Hilir.	-	Rp 1.080.000,00	PENGELOLA
77	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0109	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: Kantor, Balai Pertemuan dan Bagunan Rumah Dinas PRPTE Bunut Hilir.	-	Rp 13.942.500,00	PENGELOLA
78	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0110	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan Kantor KPH Semitau	-	Rp 10.570.000,00	PENGELOLA
79	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0111	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: Kantor, Balai Pertemuan dan rumah dinas PRPTE Semitau	-	Rp 10.500.000,00	PENGELOLA
80	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0112	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: 1 Unint Kantor RPH dan 1 Unit Bangunan Rumah Dinas KRPH Badau.	-	Rp 2.075.000,00	PENGELOLA
81	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0113	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan Kantor BKPH, RPH dan Ex Tanah Bangunan Rumah Dinas KBKPH, KRPH Jongkong	-	Rp 7.475.000,00	PENGELOLA
82	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0114	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: 1 Unit Kantor dan 1 Unit Bangunan Rumah Dinas PRPTE.	-	Rp 6.395.000,00	PENGELOLA
83	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0115	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan Rumah Dinas RPH dan Ex Tanah Bangunan Rumah Dinas KRPH Slat Hilir.	-	Rp 5.000.000,00	PENGELOLA
84	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0116	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: Kantor, Balai Pertemuan dan rumah dinas PRPTE Slat Hilir.	-	Rp 34.005.000,00	PENGELOLA
85	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0117	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: kantor, Balai Pertemuan dan Rumah Dinas PRPTE Seberuang.	-	Rp 50.000.000,00	PENGELOLA
86	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0118	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: 1 Unit Bangunan Rumah Dinas PRPTE.	-	Rp 10.500.000,00	PENGELOLA
87	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0119	-	2004		-		Ex. Tanah Bangunan: 2 unit Rumah Dinas dan 1 Unit Balai Pertemuan PRPTE.	-	Rp 71.828.900,00	PENGELOLA
88	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0001	174	1994	Gang Beringin	Hak Pakai		Maulidi/Amiau - Swasta	-	Rp 2.436.000,00	PENGELOLA
89	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0001	246	1995	Gang Beringin	Hak Pakai		Sabot/Abol - Swasta	-	Rp 3.451.000,00	PENGELOLA
90	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0002	195	1995	Gang Beringin	Hak Pakai		Siregar - Swasta	-	Rp 2.730.000,00	PENGELOLA
91	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0003	377	1995	Gang Beringin	Hak Pakai		Sumadi - Swasta	-	Rp 5.278.000,00	PENGELOLA
92	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0004	252	1995	Gang Beringin	Hak Pakai		Yoyok - Swasta	-	Rp 3.528.000,00	PENGELOLA
93	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0001	217	2002	Gang Beringin	Hak Pakai		Masran - Swasta	-	Rp 3.045.000,00	PENGELOLA

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	00001	20.000	2011	Badau	Hak Pakai	78 /BDU/VP/PEM-DES/2011	Tanah Lokasi Pembangunan Perumahan Kemenpera	APBD	Rp 407.150.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan Daerah dengan Nomor BA: 032/1646/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
95	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0001	1.610	1995	Kecamatan Putussibau Utara	Hak Pakai		Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II kapuas Hulu berkedudukan diputussibau	-	Rp 57.960.000,00	Tanah Bangunan Puskesmas Pala Pulau (P1268)
96	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0002	1.820	1995	Kecamatan Putussibau Utara	Hak Pakai		Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta	-	Rp 65.520.000,00	Tanah Bangunan Perumahan Dinas pala Pulau (P1268)
97	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0003	2.160	1995	Kecamatan Putussibau Utara	Hak Pakai		Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta	-	Rp 77.760.000,00	SMPN 5 Putussibau Padua Mendalam (P1268)
98	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0001	733	2014	Kecamatan Boyan Tanjung	Hak Pakai		Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	Rp 5.240.950,00	SMAN 1 Benua martinus (P1268)
99	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	0001	110	1994	Jl. Imelda	Hak Pakai		Abdullah Aljas (Warung) - Swasta	-	Rp 1.540.000,00	PENGELOLA
100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	0009	357	1994	Jl. Diponegoro	Hak Pakai		Afri/Katarina - Swasta	-	Rp 7.150.000,00	PENGELOLA
101	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	00001	658	1995	Jl. Pasar merdeka Putussibau	Hak Pakai		Ruko	APBD	Rp 23.688.000,00	Mutasi ke Badan Keuangan Daerah 032/ 2047 /SETDA/UM-A tanggal 21 Desember 2018 (Tanah)
102	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	0001	400	1995	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Maria Cit Bui - Swasta/Bisnis	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
103	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0001	400	1993	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Ondang - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
104	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0001	400	1994	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Sedek - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
105	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0001	400	1995	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Malik - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
106	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0002	400	1995	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Syahril - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
107	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0003	400	1995	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Atoi - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
108	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0004	400	1995	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Diman - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
109	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0005	400	1995	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Sunarto - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
110	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0006	400	1995	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Yohanes Cristian Pit (Valenty) - Swasta/Bisnis	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
111	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0001	400	1996	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Agom Ismail - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
112	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0001	400	1999	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Jumli - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
113	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Terminal Transfortasi Air	0001	400	2002	Jl. S. Parman	Hak Pakai		Samat - Swasta	-	Rp 5.600.000,00	PENGELOLA
114	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00001	4.590	1981	Putussibau Kota, Jl Antasari	Hak Pakai		Kantor Mawil Hansip	APBD	Rp 91.800.000,00	Mutasi ke Badan Keuangan Daerah 032/ 2047 /SETDA/UM-A tanggal 21 Desember 2018 (Tanah)
115	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00001	600	1982	Putussibau Kota, Putussibau	Hak Pakai		Eks Kandep Penerangan	APBD	Rp 12.000.000,00	Mutasi ke Badan Keuangan Daerah 032/ 2047 /SETDA/UM-A tanggal 21 Desember 2018 (Tanah)
116	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	13.760	1992	Kecamatan Semitau	Hak Pakai		Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar berkedudukan di Pontianak	-	Rp 137.600.000,00	Rumah Dinas Puskesmas Semitau (P1268)
117	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00001	9.218	2004	Putussibau Kota, Putussibau	Hak Pakai		Kantor Kajari	APBD	Rp 184.360.000,00	Mutasi ke Badan Keuangan Daerah 032/ 2047 /SETDA/UM-A tanggal 21 Desember 2018 (Tanah)
118	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00001	1.180	2011	Kecamatan Suhaid	Hak Pakai	593/337/Pem-2004 dan 593/353/Pem/2004	Tanah PDAM	APBD	Rp 13.800.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan Daerah dengan Nomor BA: 032/1646/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
119	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00002	1.709	2011	Embaloh Hilir	Hak Pakai	593.2/25/SKT-NE/2015	Tanah Lokasi PDAM Kecamatan Embaloh Hilir	APBD	Rp 36.208.520,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan Daerah dengan Nomor BA: 032/1646/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
120	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00003	2.500	2011	Kalis	Hak Pakai	04/PEMDES-NK.A/2010	Tanah Pengembangan Air Minum Kecamatan Kalis	APBD	Rp 64.762.500,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan Daerah dengan Nomor BA: 032/1646/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	19.748	2005	Kecamatan Mentebah Desa Suka Maju	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	Rp 141.198.200,00	SMPN Suka maju (P1268)
122	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	12.446	2005	Kecamatan Putussibau Utara	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	Rp 62.230.000,00	Tanah Desa Gudang Hilir (P1268)
123	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	14.141	2006	Kecamatan mentebah	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	Rp 101.108.150,00	Tanah Bangunan Perumahan Dinas Pegawai (P1268)
124	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	32.100	2007	Jalan Lintas Utara Dusun Apan	Hak Pakai	-	SMPN 3 EMBALOH HULU	APBD	Rp 143.000.000,00	SMPN 3 EMBALOH HULU
125	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	1.454	2009	Kecamatan Selimbau	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	Rp 39.258.000,00	Tanah Perumahan kantor (P1268)
126	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	7.074	2014	Kecamatan Boyan Tanjung	Hak Pakai	593.2/2/Pemdes ND/Pem	SMPN 5 BOYAN TANJUNG	N 5 BOYAN TAN	Rp 50.579.100,00	SMPN 5 BOYAN TANJUNG
127	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	2.526	2014	Kecamatan Boyan Tanjung	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	Rp 18.060.900,00	Lapangan Bola Nanga danau (P1268)
128	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	481	2016	Jl. Niaga/Jl. Prabu Anom Dilaga Desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir	-	-	SMA Panca Bhakti Nanga Bunut	APBD	Rp 3.439.150,00	puskesmas Boyan Tanjung (P1268)
129	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	1.860	1995	Kecamatan Putussibau Utara	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II kapuas Hulu berkedudukan di Putussibau	-	Rp 66.960.000,00	Tanah Bangunan Perumahan Dinas pala Pulau (P1268)
130	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	2.874	2014	Kecamatan Boyan Tanjung	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu berkedudukan di Putussibau	-	Rp 20.549.100,00	SDN 7 Boyan Tanjung (P1268)
131	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	5.293	2014	Kecamatan Semitau	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu	-	Rp 52.930.000,00	Kantor Desa Semitau Hulu + Tanah Pertanian (P1268)
132	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	2.677	1983	Kecamatan Selimbau	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II kapuas Hulu	-	Rp 72.279.000,00	USB TK Selimbau Gudang Hilir (P1268)
133	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	51.400	1995	Kecamatan Hulu Gurung	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II kapuas Hulu berkedudukan di Putussibau	-	Rp 367.510.000,00	SMP 1 Bika (P1268)
134	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	50.700	2004	Kecamatan Semilau	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu	-	Rp 507.000.000,00	PENGELOLA
135	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Kebun Entres	0001	3.177	2004	JALAN LINTAS TIMUR MELAPI	-	-	SDN 12 MELAPI	-	Rp 50.000.000,00	SDN 12 MELAPI
136	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Kebun Entres	0002	46.300	2004	-	-	-	Perkebunan Karet Entrys	-	Rp 231.500.000,00	PENGELOLA
137	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tanah Lapangan Sepak Bola	0001	5.875	2014	Kecamatan Boyan Tanjung	Hak Pakai	-	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	-	Rp 42.006.250,00	Komplek perumahan guru (P1268)
138	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0001	220	2004	Jln Ngurah Rai	Hak Pakai	Aug 9 2000 12:00AM	Rumah Dinas Gol. 3	APBD	Rp 4.400.000,00	Putussibau Utara
139	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0002	324	2011	Desa Empaik	Hak Pakai	Mar 28 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Empaik	APBD	Rp 2.316.600,00	Badau
140	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0001	100	2014	Komplek Puskesmas Putussibau Selatan	Hak Pakai	Jan 24 2001 12:00AM	Bangunan Rumah Dokter Gigi	APBD	Rp 715.000,00	Putussibau Selatan
141	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0002	165	2014	Komplek Puskesmas Putussibau Selatan	Hak Pakai	Jun 12 2013 12:00AM	Bangunan Rumah Paramedis	APBD	Rp 1.179.750,00	Putussibau Selatan
142	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0003	200	2014	Komplek Puskesmas Putussibau Selatan	Hak Pakai	Jun 12 2013 12:00AM	Bangunan Rumah Paramedis	APBD	Rp 1.430.000,00	Putussibau Selatan
143	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	600	2010	Dsn.Keptiat Kec. Jongkong	Hak Pakai	Aug 20 2010 12:00AM	Bangunan Poskesdes Keptiat	APBD	Rp 3.000.000,00	Jongkong
144	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Sakit	0001	10.836	1979	Jln. Imelda	Hak Pakai	Aug 20 2010 12:00AM	Dinas Kesehatan	APBD	Rp 209.100.000,00	DINAS KESEHATAN (Hasil telusur tahun 2017)
145	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Sakit	0001	-	1981	Jln. Kom. Yos Sudarso	-	Aug 20 2010 12:00AM	Bangunan RSUD	APBD	Rp 57.780.000,00	RUMAH SAKIT ACHMAD DIPONEGORO
146	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Sakit	0001	9	2013	Jalan Lintas Semitau - Suhaid	Hak Pakai	Jun 10 2013 12:00AM	Bangunan Rumah Sakit Semitau	APBD	Rp 200.000.000,00	Semitau
147	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Rumah Sakit	0001	8.220	2015	Jalan Lintas Semitau - Suhaid	Hak Pakai	Jun 12 2013 12:00AM	Bangunan Rumah Sakit Semitau	APBD	Rp 697.310.000,00	Semitau
148	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	225	2007	Ds.Nanga Nuar Kec.Silat Hilir	Hak Pakai	Oct 12 2007 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nanga Nuar	APBD	Rp 1.608.750,00	Silat Hilir
149	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	455	2008	Ds.Miau Merah Kec.Silat Hilir	Hak Pakai	Aug 7 2008 12:00AM	Bangunan Poskesdes Miau Merah	APBD	Rp 3.253.250,00	Silat Hilir
150	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	100	2008	Desa Na.Nyabau Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	May 16 2008 12:00AM	Bangunan Pustu Nanga Nyabau	APBD	Rp 500.000,00	Putussibau Utara
151	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0003	1.925	2008	Dsn.Peneperan Permai Ds.Ujung Said Kec.Jongkong	Hak Pakai	May 31 2008 12:00AM	Bangunan Pustu Ujung Said	APBD	Rp 9.625.000,00	Jongkong
152	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	198	2009	Ds.Utak Pauk Kec.Embaloh Hulu	Hak Pakai	593/27/SKT/D-UP/K-EBU/VIII/2017	Bangunan Poskesdes Utak Pauk	APBD	Rp 1.415.700,00	Embaloh Hulu
153	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	1.340	2009	Ds.Sei.Ujung Giling Manik	Hak Pakai	Jun 9 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Sei.Ujung Giling Manik	APBD	Rp 9.581.000,00	Embaloh Hulu
154	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0003	160	2009	Ds.Setunggul Kec.Silat Hilir	Hak Pakai	Jun 9 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Setunggul	APBD	Rp 1.144.000,00	Silat Hilir
155	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0004	324	2009	Dsn. Belbis Desa Mawan Kec.Pengkadan	Hak Pakai	593/63/MW/N/PEM	Bangunan Poskesdes Mawan	APBD	Rp 2.316.600,00	Pengkadan

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0005	900	2009	Dsn. Sengkalu Desa Mawan Kec.Pengkadan	Hak Pakai	May 15 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Sengkalu	APBD	Rp 6.435.000,00	Pengkadan
157	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0006	500	2009	Dsn.Penemur Ds.Nanga Boyan Kec.Boyan Tanjung	Hak Pakai	May 25 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Penemur	APBD	Rp 135.000,00	Boyan Tanjung
158	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0007	840	2009	Ds.Nanga Sangan Kec.Boyan Tanjung	Hak Pakai	May 16 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nanga Sasan	APBD	Rp 6.006.000,00	Boyan Tanjung
159	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0008	750	2009	Ds.Nanga Danau Kec.Kalis	Hak Pakai	Nov 27 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nanga Danau	APBD	Rp 3.750.000,00	Kalis
160	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0010	300	2009	Desa Sekulat	Hak Pakai	593/95/DS-SKLT/PEM	Bangunan Pustu Sekulat	APBD	Rp 2.145.000,00	Selimbau
161	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0011	60	2009	Desa Engkerengas	Hak Pakai	593/2/DS-ENG-K/2015	Bangunan Poskesdes Engkerengas	APBD	Rp 429.000,00	Selimbau
162	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0012	400	2009	Dusun Suka Maju Desa Gudang Hilir	Hak Pakai	Aug 19 2008 12:00AM	Bangunan Polindes Gudang Hilir	APBD	Rp 2.860.000,00	Selimbau
163	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0013	340	2009	Dusun Mensak Desa Laboyan	Hak Pakai	593/02/DS-LBY/PEM	Bangunan Pustu Na.Laboyan	APBD	Rp 2.431.000,00	Selimbau
164	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	96	2010	Dsn.Pemawan Ds.Mujan Kec.Boyan Tanjung	Hak Pakai	Dec 18 2010 12:00AM	Bangunan Poskesdes Mujan	APBD	Rp 686.400,00	Boyan Tanjung
165	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0003	598	2010	Ds.Rantau Kalis Kec.Kalis	Hak Pakai	Mar 2 2010 12:00AM	Bangunan Poskesdes Rantau Kalis	APBD	Rp 2.990.000,00	Kalis
166	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0004	260	2010	Ds.Perjuk Kec.Silat Hulu	Hak Pakai	Mar 3 2010 12:00AM	Bangunan Poskesdes Perjuk	APBD	Rp 1.859.000,00	Silat Hulu
167	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0007	150	2010	Ds.Lunsara Kec.Putussibau Selatan	Hak Pakai	Mar 1 2010 12:00AM	Bangunan Poskesdes Lunsara	APBD	Rp 40.500,00	Putussibau Selatan
168	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0008	408	2010	Ds.Kedamin Darat Kec.Putussibau Selatan	Hak Pakai	Jul 15 2010 12:00AM	Bangunan Poskesdes Kedamin Darat	APBD	Rp 110.160,00	Putussibau Selatan
169	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	225	2011	Dsn.Sukaramai Ds.Hulu Pengkadan Kec.Pengkadan	Hak Pakai	593.3/65/SKT-DES.HP/PEM	Bangunan Pustu Sukaramai	APBD	Rp 1.608.750,00	Pengkadan
170	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	100	2011	Dsn.Sei Sedik Ds.Sei.Abau Kec.Batang Lupar	Hak Pakai	May 2 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Sei.Abau	APBD	Rp 715.000,00	Batang Lupar
171	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0003	200	2011	Ds.Nanga Jemah Kec.Boyan Tanjung	Hak Pakai	Mar 23 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nanga Jemah	APBD	Rp 54.000,00	Boyan Tanjung
172	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0004	270	2011	Dsn.Nanga Arong Kec.Kalis	Hak Pakai	May 10 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nanga Raun	APBD	Rp 1.350.000,00	Kalis
173	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0005	150	2011	Desa Selimu Kec.Silat Hulu	Hak Pakai	Mar 29 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Selimu	APBD	Rp 1.072.500,00	Silat Hulu
174	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0006	400	2011	Ds.Urang Unsa Kec.Putussibau Selatan	Hak Pakai	Apr 12 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Urang Unsa	APBD	Rp 108.000,00	Putussibau Selatan
175	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0007	150	2011	Dsn.Nanga Lapung	Hak Pakai	Mar 23 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nanga Lapung	APBD	Rp 40.500,00	Putussibau Selatan
176	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0008	80	2011	Desa Entibab Kec.Bunut Hilir	Hak Pakai	Apr 4 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Kampung Baru Entibab	APBD	Rp 572.000,00	Bunut Hilir
177	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0009	132	2011	Ds.Pala Pintas Kec.Embaloh Hilir	Hak Pakai	Mar 26 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Pala Pintas	APBD	Rp 943.800,00	Embaloh Hilir
178	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0010	1.368	2011	Dusun Batu Rawan Desa Semangit	Hak Pakai	Apr 18 2011 12:00AM	Bangunan Poskesdes Batu Rawan	APBD	Rp 9.781.200,00	Selimbau
179	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0011	600	2011	Dusun Semalah Jaya 2 Desa Semalah	Hak Pakai	1.3.1.01.01.04.006.	Bangunan Poskesdes Semalah	APBD	Rp 4.290.000,00	Selimbau
180	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	120	2012	Dsn.Nanga Sarai Kec.Kalis	Hak Pakai	Mar 11 2012 12:00AM	Bangunan Poskesdes Tapang Da'an	APBD	Rp 600.000,00	Kalis
181	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	375	2012	Desa Selangkai Kec. Silat Hulu	Hak Pakai	Mar 14 2012 12:00AM	Bangunan Poskesdes Selangkai	APBD	Rp 2.681.250,00	Silat Hulu
182	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0003	380	2012	Ds.Lebak Najah	Hak Pakai	Mar 22 2012 12:00AM	Bangunan Poskesdes Lebak Najah	APBD	Rp 2.717.000,00	Silat Hulu
183	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0004	525	2012	Dusun Parit Jl.Kiai Martalaya Desa Dalam	Hak Pakai	593/106/D.D/PEM	Bangunan Poskesdes Desa Dalam	APBD	Rp 3.753.750,00	Selimbau
184	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0005	405	2012	Dusun Sawah Desa Benuis	Hak Pakai	593/84/DS-BNS/PEM	Bangunan Pustu Benuis	APBD	Rp 2.895.750,00	Selimbau
185	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0006	450	2012	Dusun Lemedak Desa Lemedak	Hak Pakai	593/79/DS-NLP/PEM-2012	Bangunan Pustu Desa Lemedak	APBD	Rp 3.217.500,00	Semtau
186	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	140	2013	Ds.Bakong Permai Kec.Bunut Hulu	Hak Pakai	Sep 2 2013 12:00AM	Bangunan Poskesdes Bakong Permai	APBD	Rp 490.000,00	Bunut Hulu
187	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0003	1.518	2013	Dsn.Gertak Baru 2 Desa Titian Kuala Kec.Selimbau	Hak Pakai	593/19/DS-TKA/PEMDES	Bangunan Puskesmas Selimbau dan Rumah Dokter serta paramedis	APBD	Rp 10.859.062,50	Selimbau
188	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0004	96	2013	Dusun Kedaung 1 Desa Nibung	Hak Pakai	Apr 2 2013 12:00AM	Bangunan Polindes Nibung	APBD	Rp 686.400,00	Selimbau

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0005	100	2013	Dsn.Kuala Kapar Desa Mawan Kec.Selimbau	Hak Pakai	593/11/DS-MWN/PEM	Bangunan Poskesdes Mawan	APBD	Rp 715.000,00	Selimbau
190	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0006	420	2013	Dsn.Melingkung Desa Tempurau Kec.Selimbau	Hak Pakai	593/19/DS-TMP/PEM	Bangunan Polindes Desa Tempurau	APBD	Rp 3.003.000,00	Selimbau
191	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	5.000	2014	Jalan Raya Desa Benua Martinus Kec.Embaloh Hulu	Hak Pakai	Nov 27 2014 12:00AM	Bangunan Puskesmas, Rumah Dokter dan Paramedis	APBD	Rp 35.750.000,00	Embaloh Hulu
192	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0002	832	2014	Dusun Mungguk Desa Rantau Prapat	Hak Pakai	Nov 28 2014 12:00AM	Bangunan Pustu Mungguk	APBD	Rp 5.948.800,00	Embaloh Hulu
193	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0004	680	2014	Dusun Kelayam Desa Menua Sadap	Hak Pakai	590/4/D-MS/K-EBU/SKT/Pem/2014	Bangunan Poskesdes Kelayam	APBD	Rp 4.862.000,00	Embaloh Hulu
194	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0005	272	2014	Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang	Hak Pakai	145.08/05/D-BLK EBU/XI/2014	Bangunan Pustu Sei.Utik	APBD	Rp 1.944.800,00	Embaloh Hulu
195	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0006	595	2014	Dusun Pulan Desa Batu Lintang	Hak Pakai	145.08/06/D-BLK EBU/XI/2014	Bangunan Poskesdes dan Mess Poskesdes Pulan	APBD	Rp 4.254.250,00	Embaloh Hulu
196	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0007	192	2014	Dusun Paat Desa Saujung Giling Manik	Hak Pakai	592.3/97/K-EBU-Pem	Bangunan Poskesdes Saujung Giling Manik	APBD	Rp 1.372.800,00	Embaloh Hulu
197	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0009	416	2014	Jalan Pendidikan Dsn.Tintin Kemantan	Hak Pakai	Apr 7 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Tintin Kemantan	APBD	Rp 2.974.400,00	Pengkadan
198	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0010	250	2014	Dusun Meliau Desa Melemba	Hak Pakai	Nov 3 2014 12:00AM	Bangunan Pustu Meliau	APBD	Rp 1.787.500,00	Batang Lupar
199	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0011	324	2014	Dusun Margin Desa Melemba	Hak Pakai	Nov 3 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Melemba	APBD	Rp 2.316.600,00	Batang Lupar
200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0013	1.490	2014	Kecamatan Batang Lupar	Hak Pakai	Jan 16 2004 12:00AM	Bangunan Rumah Dinas	APBD	Rp 7.450.000,00	Batang Lupar
201	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0017	2.978	2014	Dsn.Pelemtar Jaya Desa Dangikan Kota	Hak Pakai	Dec 17 2014 12:00AM	Bangunan Puskesmas Silat Hulu,Rumah Dokter,Rumah Paramedis	APBD	Rp 21.298.849,00	Silat Hulu
202	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0018	604	2014	Jl. Antar Dusun Ds.Landau Rantau Kec.Silat Hulu	Hak Pakai	Dec 4 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Landau	APBD	Rp 4.322.175,00	Silat Hulu
203	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0019	135	2014	Dsn.Usaha Baru Ds.Nanga Luan Kec.Silat Hulu	Hak Pakai	Dec 22 2014 12:00AM	Bangunan Pustu Nanga Luan	APBD	Rp 965.250,00	Silat Hulu
204	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0020	600	2014	Dsn.Jangkang Ds.Jangkang Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	Dec 6 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Jangkang	APBD	Rp 2.100.000,00	Putussibau Utara
205	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0021	400	2014	Desa Sibau Hilir Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	Dec 10 2014 12:00AM	Bangunan Pustu Sibau Hilir	APBD	Rp 2.860.000,00	Putussibau Utara
206	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0022	176	2014	Desa Sibau Hilir Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	Dec 10 2014 12:00AM	Bangunan Polindes Sibau Hilir	APBD	Rp 1.258.400,00	Putussibau Utara
207	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0023	600	2014	Desa Ariung Mendalam Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	Nov 26 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Ariung Mendalam	APBD	Rp 3.000.000,00	Putussibau Utara
208	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0024	744	2014	Jalan Lintas Utara Desa Seluan Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	Nov 27 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes dan Mess Poskesdes Seluan	APBD	Rp 677.040,00	Putussibau Utara
209	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0025	390	2014	Jalan Lintas Utara Desa Sibau Hulu	Hak Pakai	Dec 1 2014 12:00AM	Bangunan Polindes Sibau Hulu	APBD	Rp 2.788.500,00	Putussibau Utara
210	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0027	360	2014	Jalan Lintas Utara (57) Km	Hak Pakai	Dec 4 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Sei.Buluh	APBD	Rp 2.574.000,00	Putussibau Utara
211	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0028	1.400	2014	Jalan KS.Tubun Putussibau	Hak Pakai	Dec 4 2014 12:00AM	Bangunan Instalasi Farmasi dan Rehabilitasi Gizi Buruk	APBD	Rp 28.000.000,00	Putussibau Utara
212	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0029	400	2014	Dsn.Rantau Duata Ds.Bontal Kec.Jongkong	Hak Pakai	Dec 23 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Bontal	APBD	Rp 2.860.000,00	Jongkong
213	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0030	250	2014	Desa Jongkong Kiri lengah Kec.Jongkong	Hak Pakai	Dec 2 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Penelat	APBD	Rp 1.250.000,00	Jongkong
214	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0031	202	2014	Dsn.Ujung Ubut Ds.Joki Hulu	Hak Pakai	Nov 1 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Joki Hulu	APBD	Rp 1.012.500,00	Jongkong
215	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0032	750	2014	Dsn.Bungku Ds.Ujung Jambu Kec.Jongkong	Hak Pakai	Dec 17 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Ujung Jambu	APBD	Rp 3.750.000,00	Jongkong
216	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0033	322	2014	Dsn.Pinang Permai Ds.Ujung Said Kec.Jongkong	Hak Pakai	Mar 15 2010 12:00AM	Bangunan Poskesdes Ujung Said	APBD	Rp 45.000.000,00	Jongkong
217	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0034	457	2014	Dsn.Jaya Cemerlang Desa Kandung Suli	Hak Pakai	Nov 28 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Kandung Suli	APBD	Rp 2.287.500,00	Jongkong
218	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0035	450	2014	Desa Karya Baru Kec.Jongkong	Hak Pakai	Nov 10 2014 12:00AM	Bangunan Polindes Karya Baru	APBD	Rp 2.250.000,00	Jongkong
219	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0036	165	2014	Komplek Puskesmas Putussibau Selatan	Hak Pakai	Nov 10 2014 12:00AM	Bangunan Rumah Dokter Umum	APBD	Rp 1.179.750,00	Putussibau Selatan
220	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0038	150	2014	Dsn.Jaung Dua Ds.teluk Aur	Hak Pakai	Jan 27 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Jaung Dua	APBD	Rp 1.072.500,00	Burnt Hilir
221	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0039	80	2014	Dusun Lubuk Guntur Desa Vega Kec.Selimbau	Hak Pakai	593/48/DS-VG/PEM	Bangunan Poskesdes Vega	APBD	Rp 572.000,00	Selimbau

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0040	150	2014	Dusun Kedaung 1 Desa Nibung	Hak Pakai	593/38/DS-NBG/PEM	Bangunan Polindes Nibung	APBD	Rp 1.072.500,00	Selimbau
223	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0041	240	2014	Dusun Bukit Raya 1 Desa Gerayau Kec.Selimbau	Hak Pakai	593/65/DS-GRY/PEM	Bangunan Poskesdes Gerayau	APBD	Rp 1.716.000,00	Selimbau
224	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0042	910	2014	Jalan Perkebunan Rakyat Desa Kenerak	Hak Pakai	593/86/KNK/PEM	Bangunan Poskesdes Kenerak	APBD	Rp 6.506.500,00	Semitau
225	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0043	600	2014	PUSKESMAS Semitau	Hak Pakai	593/90/DS-NSB/PEM	Bangunan Poskesdes Na.Seberuang	APBD	Rp 4.290.000,00	Semitau
226	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0044	221	2014	Dusun Entipan Hilir Desa Entipan	Hak Pakai	Nov 13 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Entipan	APBD	Rp 1.580.150,00	Semitau
227	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0045	108	2014	Dusun Sekedai I Desa Tua'Abang	Hak Pakai	593/64/DS-TA/PEM	Bangunan Poskesdes Tua'Abang (Sekedai I)	APBD	Rp 772.200,00	Semitau
228	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0046	400	2014	Dusun Nanga Bian Desa Tua'Abang	Hak Pakai	593/70/DS-TA/PEM	Bangunan Polindes Nanga Bian	APBD	Rp 2.860.000,00	Semitau
229	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0047	233	2014	Desa Nanga Kenapai	Hak Pakai	593/93/DS-NK/PEM	Bangunan Polindes Nanga Kenapai	APBD	Rp 1.670.955,00	Semitau
230	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0049	625	2014	Dsn.Sungai Incit-Impres Desa Kenepai Komplek	Hak Pakai	Dec 18 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Kenepai Komplek	APBD	Rp 4.468.750,00	Semitau
231	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0050	814	2014	Dsn.Sungai Incit-Impres Desa Kenepai Komplek	Hak Pakai	Dec 18 2014 12:00AM	Bangunan Pustu Kenepai Komplek	APBD	Rp 5.820.100,00	Semitau
232	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0051	120	2014	Jalan Riak Puja Dusun Sungai Asun	Hak Pakai	Dec 18 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Sungai Asun	APBD	Rp 858.000,00	Semitau
233	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0052	144	2014	Jalan Simpang Tiga Dusun Sempedik	Hak Pakai	Oct 23 2014 12:00AM	Bangunan Polindes Jongkong Hulu	APBD	Rp 1.029.600,00	Suhaid
234	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0053	80	2014	Jalan Menapar-Suhaid Desa Menapar	Hak Pakai	Nov 9 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Menapar	APBD	Rp 28.000,00	Suhaid
235	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0054	900	2014	Perairan Sungai Batang Sumpak Dusun Lubuk Pengail	Hak Pakai	Nov 5 2014 12:00AM	Bangunan Pustu Lubuk Pengail	APBD	Rp 315.000,00	Suhaid
236	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0055	287	2014	Jalan Suka Damai Desa Tanjung Harapan	Hak Pakai	Nov 10 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Tanjung Harapan	APBD	Rp 2.052.050,00	Suhaid
237	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0056	225	2014	Jalan Kopranudin Desa Madang Permai	Hak Pakai	Nov 4 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Desa Madang Permai	APBD	Rp 1.608.750,00	Suhaid
238	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0057	49	2014	Jalan Rasyid Amir Desa Tanjung	Hak Pakai	Nov 11 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Desa Tanjung	APBD	Rp 350.350,00	Suhaid
239	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0058	80	2014	Jalan Mantan-Suhaid Desa Mantan	Hak Pakai	Nov 3 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Mantan	APBD	Rp 400.000,00	Suhaid
240	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0059	81	2014	Jalan Lintas Mensusai Desa Mensusai	Hak Pakai	Nov 3 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes Mensusai	APBD	Rp 405.000,00	Suhaid
241	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0060	475	2014	Dusun Kerengas Desa Kerengas	Hak Pakai	Nov 10 2014 12:00AM	Bangunan Pustu Desa Kerengas	APBD	Rp 166.250,00	Suhaid
242	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0064	157	2014	Desa Lubuk Antuk Kec.Hulu Gurung	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Mubung	APBD	Rp 9.478.000,00	Hulu Gurung
243	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0069	3.506	2014	Kecamatan Badau	Hak Pakai	Aug 9 2000 12:00AM	Bangunan Rumah Dinas Dokter Badau	APBD	Rp 17.530.000,00	Badau
244	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0071	427	2014	Desa Tanjung Kec.Mentebah	Hak Pakai	Nov 20 2014 12:00AM	Bangunan Poskesdes dan Mess Poskesdes Tanjung	APBD	Rp 149.556,75	Mentebah
245	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0073	625	2014	Desa Tanjung Intan Kec.Mentebah	Hak Pakai	Dec 10 2014 12:00AM	Bangunan Polindes Semedang	APBD	Rp 218.750,00	Mentebah
246	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0001	9.996	2016	Desa Jongkong Pasar	Hak Pakai	Oct 29 2008 12:00AM	Bangunan Puskesmas Jongkong	APBD	Rp 697.411.000,00	Jongkong
247	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0008	2.360	2017	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Pustu HTI	APBD	Rp 2.145.000,00	Kalis
248	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0009	300	2017	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	549.3/29/PEMDES-SG/2016	Bangunan Poskesdes Segiam	APBD	Rp 1.069.000,00	Kalis
249	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0010	393	2017	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	590/04/SKT/PEMDES.N.T.A/2015	Bangunan Poskesdes Nanga Tubuk	APBD	Rp 1.302.000,00	Kalis
250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0011	182	2017	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	445/128/PEMDES.N.L/2014	Bangunan Poskesdes Nanga Lebang	APBD	Rp 3.718.000,00	Kalis
251	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0012	520	2017	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Kensuray	APBD	Rp 3.525.000,00	Kalis
252	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0013	493	2017	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Bahanap	APBD	Rp 2.475.000,00	Kalis
253	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0014	247	2017	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Peniung	APBD	Rp 2.145.000,00	Kalis
254	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0015	750	2017	Kecamatan Bunut Hulu	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Landau Apus	APBD	Rp 7.500.000,00	Bunut Hulu

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0016	189	2017	Kecamatan Bunut Hulu	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Betung Raya	APBD	Rp 1.357.000,00	Bunut Hulu
256	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0017	1.000	2017	Kecamatan Pengkadan	Hak Pakai	593/151/Des-RPj/Pem	Bangunan Poskesdes Riam Panjang	APBD	Rp 5.934.000,00	Pengkadan
257	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0018	400	2017	Kecamatan Pengkadan	Hak Pakai	593.3/231/Des.PMT/Ekon	Bangunan Poskesdes Permata	APBD	Rp 2.860.000,00	Pengkadan
258	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0020	240	2017	Kecamatan Pengkadan	Hak Pakai	593/129/DES-BL/PEM	Bangunan Poskesdes Buak Limbang	APBD	Rp 1.716.000,00	Pengkadan
259	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0021	150	2017	Kecamatan Pengkadan	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Buak Mau	APBD	Rp 1.073.000,00	Pengkadan
260	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0022	6.638	2017	Kecamatan Pengkadan	Hak Pakai	593/61/DES-MTD/PEM	Bangunan Puskesmas Pengkadan	APBD	Rp 47.462.000,00	Pengkadan
261	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0024	750	2017	Kecamatan Boyan Tanjung	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Pustu Nangan Sangau	APBD	Rp 5.363.000,00	Boyan Tanjung
262	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0025	900	2017	Kecamatan Boyan Tanjung	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Landau Mentail	APBD	Rp 6.435.000,00	Boyan Tanjung
263	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0027	157	2017	Kecamatan Hulu Gurung	Hak Pakai	05	Bangunan Poskesdes Mubung/Lubuk Antuk	APBD	Rp 1.123.000,00	Hulu Gurung
264	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0028	750	2017	Kecamatan Hulu Gurung	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nangan Yen	APBD	Rp 4.450.000,00	Hulu Gurung
265	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0030	33	2017	Semitau	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Polindes Nanga Kenepai Komplek	APBD	Rp 1.671.000,00	Semitau
266	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0031	625	2017	Semitau	Hak Pakai	470/98/Des-Knk/Pem	Bangunan Polindes Kenerak	APBD	Rp 3.230.000,00	Semitau
267	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0032	225	2017	Suhaid	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Medang Permai	APBD	Rp 1.609.000,00	Suhaid
268	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0033	375	2017	Suhaid	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Pustu Nanga kenelang	APBD	Rp 2.682.000,00	Suhaid
269	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0034	1.200	2017	Suhaid	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes tanjung	APBD	Rp 8.580.000,00	Suhaid
270	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0035	1.800	2017	Silat Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Pustu Bongkong	APBD	Rp 16.290.000,00	Silat Hilir
271	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0036	455	2017	Silat Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Polindes Miau Merah	APBD	Rp 1.557.000,00	Silat Hilir
272	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0037	405	2017	Embaloh Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Pustu kirin Nangka	APBD	Rp 2.896.000,00	Embaloh Hilir
273	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0038	117	2017	Embaloh Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Ujung Bayur	APBD	Rp 837.000,00	Embaloh Hilir
274	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0039	1.635	2017	Embaloh Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Puskesmas Embaloh Hilir	APBD	Rp 14.797.000,00	Embaloh Hilir
275	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0040	80	2017	Bunut Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Entibab	APBD	Rp 475.000,00	Bunut Hilir
276	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0041	150	2017	Bunut Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Poskesdes Nangan Tuan	APBD	Rp 1.073.000,00	Bunut Hilir
277	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0042	255	2017	Bunut Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Pustu Empangau	APBD	Rp 1.457.000,00	Bunut Hilir
278	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0043	315	2017	Bunut Hilir	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Pustu Tembang	APBD	Rp 2.027.000,00	Bunut Hilir
279	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0044	2.968	2017	Bunut Hilir	Hak Pakai	593.2/26/PEMDES-BH/PEM	Bangunan Puskesmas Bunut Hilir	APBD	Rp 21.228.000,00	Bunut Hilir
280	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0045	322	2017	Jongkong	Hak Pakai	Sep 14 2009 12:00AM	Bangunan Pustu Ujung Said	APBD	Rp 2.303.000,00	Jongkong
281	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0046	10.034	2017	Jongkong	Hak Pakai	Oct 29 2008 12:00AM	Bangunan Puskesmas Jongkong Baru	APBD	Rp 71.257.000,00	Jongkong
282	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0047	340	2017	Selimbau	Hak Pakai	Oct 29 2008 12:00AM	Bangunan Pustu Nanga Leboyan	APBD	Rp 2.431.000,00	Selimbau
283	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0048	1.860	2017	Putussibau Utara	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Puskesmas Putussibau Utara	APBD	Rp 119.040.000,00	Putussibau Utara
284	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0049	3.800	2017	Batang Lupar	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Pustu Ukik-ukit	APBD	Rp 27.170.000,00	Batang Lupar
285	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0050	600	2017	Badau	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Pustu Tangit IV	APBD	Rp 4.290.000,00	Badau
286	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0051	314	2017	Badau	Hak Pakai	593.2/11/PEMDES-2015	Bangunan Pustu Majang	APBD	Rp 2.249.000,00	Badau
287	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0052	1.000	2017	Badau	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Polindes Semuntik	APBD	Rp 7.150.000,00	Badau

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0053	80	2017	Badau	Hak Pakai	195/167/PEM-DES/SB/IX/2017	Bangunan Poskesdes Sebindang	APBD	Rp 572.000,00	Badau
289	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0054	20.000	2017	Badau	Hak Pakai	Mar 30 1995 12:00AM	Bangunan Poskesdes Kekurak	APBD	Rp 143.000.000,00	Badau
290	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0055	300	2017	Empanang	Hak Pakai	SK Bupati No 625 Tahun 2017	Bangunan Poskesdes Kumang jaya	APBD	Rp 2.145.000,00	Empanang
291	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0056	36	2017	Empanang	Hak Pakai	SK Bupati No 625 Tahun 2017	Bangunan Pustu Ensanak	APBD	Rp 258.000,00	Empanang
292	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0057	4.345	2017	Kecamatan Pengkadan	Hak Pakai	593/127/DES-BL/PEM	Bangunan Pustu Buak Limbang	APBD	Rp 3.000.000,00	Kecamatan Pengkadan
293	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0058	-	2017	Kecamatan Hulu Gurung	Hak Pakai	SK Bupati No 625 Tahun 2017	Bangunan Poskesdes Bugang	APBD	Rp 3.000.000,00	Kecamatan Hulu Gurung
294	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0061	80	2017	Selimbau	Hak Pakai	SK Bupati No 625 Tahun 2017	Bangunan Poskesdes Vega	APBD	Rp 10.000.000,00	Selimbau
295	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0062	247	2017	Selimbau	Hak Pakai	SK Bupati No 625 Tahun 2017	Bangunan Poskesdes Plasak Hilir	APBD	Rp 74.250.000,00	Selimbau
296	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0063	513	2017	Selimbau	Hak Pakai	593/05/DS-PSKHU/PEM	Bangunan Poskesdes Plasak Hulu	APBD	Rp 20.250.000,00	Selimbau
297	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0064	700	2017	Putussibau Utara	Hak Pakai	SK Bupati No 625 Tahun 2017	Bangunan Pustu Sambus	APBD	Rp 500.000,00	Putussibau Utara
298	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0065	5.000	2017	Embaloh Hulu	Hak Pakai	132/DS.BMK-EBU/SKT/2014	Bangunan Puskesmas Embaloh Hulu	APBD	Rp 850.000,00	Embaloh Hulu
299	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0066	400	2017	Puring Kencana	Hak Pakai	SK Bupati No 625 Tahun 2017	Bangunan Pustu Merakai Panjang	APBD	Rp 500.000,00	Puring Kencana
300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0004	-	2019	KECAMATAN MENTEBAH	Hak Pakai	-	Bangunan Pusk. Mentebah	APBD	Rp 496.981.000,00	TANAH PUSKESMAS MENTEBAH
301	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0005	-	2019	PUSKESMAS BUNUT HULU KECAMATAN BUNUT HULU	Hak Pakai	-	BANGUNAN PUSKESMAS BUNUT HULU	APBD	Rp 384.304.000,00	PUSKESMAS BUNUT HULU
302	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0006	560	2019	Nanga Nyabau Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	-	Tanah Puskesmas Pembantu Nanga Nyabau	APBD	Rp 11.942.910,00	Nanga Nyabau Kec.Putussibau Utara
303	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0007	-	2019	Desa Datah Diaan Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	-	Pos Kesehatan Desa Datah Diaan	APBD	Rp 14.110.000,00	Tanah Pos Kesehatan Desa Datah Diaan
304	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0008	16	2019	Desa Sibau Hilir Kec.Putussibau Utara	Hak Pakai	-	Tanah Pos Kesehatan Desa Sibau Hilir	APBD	Rp 11.942.910,00	Tanah Pos Kesehatan Desa Sibau Hilir
305	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0009	1.890	2019	Dusun Apan KECAMATAN EMBALOH HULU	Hak Pakai	-	Tanah Puskesmas Pembantu Apan	APBD	Rp 19.845.000,00	Tanah Puskesmas Pembantu Apan
306	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0010	397	2019	Desa Ulak Pauk KECAMATAN EMBALOH HULU	Hak Pakai	-	Tanah Puskesmas Pembantu Ulak Pauk	APBD	Rp 9.919.885,00	Tanah Puskesmas Pembantu Ulak Pauk
307	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	0011	-	2019	Tanah Pondok Bersalin Lengan Baru (Pulan)	Hak Pakai	-	Tanah Pondok Bersalin Lengan Baru (Pulan)	APBD	Rp 4.551.750,00	Tanah Pondok Bersalin Lengan Baru (Pulan)
308	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	000001	19.500	1994	Lawik, Embaloh Hilir	SKT	(593.2 /091/SKT-LK/2014)	Di Gunakan Poskesdes	APBD	Rp 97.500.000,00	Mutasi ke Dinas Kesehatan (Nomor BA: 032/1252/SETDA/UM-A) Tanggal 20 Juli 2020
309	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	000002	2.892	1994	Kelling Semulung, Embaloh Hilir	SKT	(No. 140 /91/SKT-KS/2014)	Polindes	APBD	Rp 14.460.000,00	Mutasi ke Dinas Kesehatan (Nomor BA: 032/1252/SETDA/UM-A) Tanggal 20 Juli 2020
310	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Batu Bara	000001	-	2010	Kecamatan Kalis	Hak Pakai	593/03/Pemdes-NK/2007	Tanah Pertambangan Lokasi Briket batu Bara	APBD	Rp 58.485.000,00	Mutasi ke Dinas Kesehatan (Nomor BA: 032/1252/SETDA/UM-A) Tanggal 20 Juli 2020
311	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0001	900	2016	Desa Sungai Uluk Paten	Hak Pakai	593/19/pemdes-SUP/2015	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 13.500.000,00	Mutasi Dari Perhubungan (Tanah Tower)
312	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0002	600	2016	Desa Lauk	Hak Pakai	19/skt/pemdes-lk/2015	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 30.000.000,00	Mutasi Dari Perhubungan (Tanah Tower)
313	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0003	900	2016	Desa Rantau Perapat	Hak Pakai	593.2/146K.EBU_Pem	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 2.700.000,00	Mutasi Dari Perhubungan (Tanah Tower)
314	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0004	900	2016	Desa Ulak Pauk	Hak Pakai	593.2/148K.EBU-Pem	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 2.250.000,00	Mutasi Dari Perhubungan (Tanah Tower)
315	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0005	625	2016	Desa Bungan Jaya	Hak Pakai	593/21/ds.bj/2015	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 31.250.000,00	Mutasi Dari Perhubungan (Tanah Tower)
316	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0006	225	2016	Desa Kareho	Hak Pakai	01/pemd.kh./kec.putsel/2016	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 11.250.000,00	Mutasi Dari Perhubungan (Tanah Tower)
317	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0001	400	2017	Desa Tani Makmur	Hak Pakai	593.2/182/117-08/pem-2015	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 12.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2017
318	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0002	400	2017	Desa Pulau Majang	Hak Pakai	593.2/85/pemdes/pm-2017	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 25.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2018
319	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0003	400	2017	Desa Nanga Lauk	Hak Pakai	140/124/pemdes-nl/2017	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 10.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2019
320	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0004	400	2017	Desa Ujung said	Hak Pakai	591.1/2/ds-pr/ekbang-2016	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 12.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2020

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0005	400	2017	Desa Sekubah	Hak Pakai	593/03/ds-skb/pem	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 20.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2021
322	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0006	400	2017	Desa Setulang	Hak Pakai	094/182/pemdes-stg/2016	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 6.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2022
323	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0007	400	2017	Desa Nanga Jemah	Hak Pakai	540/70/des-nj/pem	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 2.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2023
324	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0008	400	2017	Desa Nanga Boyan	Hak Pakai	593.2/88/kec.bt-des-nby/pem	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 20.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2024
325	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0009	400	2017	Desa Riam Tapang	Hak Pakai	140/251/d-r/k.slu/pem	MENARA KOMUNIKASI	APBD	Rp 2.000.000,00	SK Bupati Kapuas Hulu No 513 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2025
326	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0001	900	2018	Jln. antasari no.8 putussibau	SKT	140/10/PEMDES BLU/2017	MENARA KOMUNIKASI	HIBAH	Rp 9.000.000,00	TANAH PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
327	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0002	400	2018	Jln. antasari no.8 putussibau	SKT	593/101/SKTD/NS/2018	MENARA KOMUNIKASI	HIBAH	Rp 10.000.000,00	Tanah menara desa nanga awin kec. putussibau utara
328	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0003	900	2018	Jln. antasari no. 8 putussibau	SKT	13/SKT/DS BJ/PEM	MENARA KOMUNIKASI	HIBAH	Rp 2.000.000,00	Tanah pembangunan menara telekomunikasi disun nanga balang desaberingin jaya kec. putussibau selatan
329	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0004	900	2018	Jln. antasari no.8 putussibau	SKT	12/SKT/DS BJ/PEM	MENARA KOMUNIKASI	HIBAH	Rp 2.000.000,00	tanah menara telekomunikasi disun nanga balang desa beringin jaya kec. putussibau selatan
330	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0005	400	2018	Jln. antasari no.8 putussibau	SKT	140/20/DMS/K-EBU/SKT/2018	MENARA KOMUNIKASI	HIBAH	Rp 20.000.000,00	tanah pembangunan menara telekomunikasi desa menua sadap kec. embalah hulu
331	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0006	400	2018	Jln. antasari no. 8 putussibau	SKT	593/14/SKT/DS-MS/2018	MENARA KOMUNIKASI	HIBAH	Rp 8.000.000,00	Tanah menara telekomunikasi pamtas klawik, desa mensiau kec. batang lupar
332	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0007	400	2018	Jl. Antasari No 8 Putussibau	SKT	593.2/205/Pemdes-ETB/Pem	MENARA KOMUNIKASI	HIBAH	Rp 10.000.000,00	Tanah menara telekomunikasi dusun kampung baru, desa entibab kec. bunut hilir
333	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0001	400	2022	Dusun Landau Bunu, Desa Tubang Jaya, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	SKT	410/157/PEMDES-TJ/KESRA	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 3.360.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
334	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0002	400	2022	Dusun Landau, Desa Landau Mentali, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	SKT	555.3/27/DS-LM/EKBANG	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 3.360.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
335	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0003	400	2022	Dusun Sungai Jambu, Desa Suka Maju, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	SKT	555.3/230/D.SML/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 3.360.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
336	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0004	400	2022	Dusun Sangang, Desa Nanga Sangang, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	SKT	541/192/D-NS/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 3.360.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
337	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0005	400	2022	Dusun Gurung Ladang, Desa Sri Wangi, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	SKT	541/37/D-SW/KESRA	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 3.360.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
338	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0006	400	2022	Dusun Mabang Jaya, Desa Kelakar, Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	SKT	555/84/PEMDES/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 3.360.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
339	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0007	400	2022	Jalan Kantor Desa Kumang Jaya, Desa Kumang Jaya, Kec. Empanang	SKT	593/016/PEMDES-KJ/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 4.800.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
340	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0008	400	2022	Jl. Harapan, Dusun Suka Maju, Desa Gudang Hilir, Kec. Selimbau	SKT	593/163/DS-GHI/PEM/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 4.000.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
341	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0009	400	2022	Jl. Lintas Utara, Dusun Sungai Telian, Desa Tinting Seligi, Kec. Badau	SKT	593/113/PEMDES/ITS/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 4.800.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
342	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0010	400	2022	Jl. Puri Kemuning, Desa Bajau Andai, Kec. Empanang	SKT	593/093/PEMDES-BA/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 4.800.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
343	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0011	400	2022	Jl. Dantau Suay, Dusun Kirin Nangka, Desa Kirin Nangka, Kec. Embalah Hilir	SKT	593/180/SKT/KN/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 4.800.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
344	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0012	400	2022	Jl. Maju bersama, Dusun Pintas Hilir, Desa Pala Pintas, Kec. Embalah Hilir	SKT	593/047/D-PP/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 4.800.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
345	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0013	400	2022	Jl. Pendidikan, Dusun Nanga Lemedak II, Desa Nanga Lemedak, Kec. Semitau	SKT	593/129/DS-LMK/PEM/2022	Lahan Untuk Pembangunan Tower BTS	HIBAH	Rp 6.800.000,00	Untuk Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station)
346	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0001	400	2023	DUSUN SAWAH, DESA BENUIS, KEC.SELIMBAU	SKT	475/113/DES-BNS/PEM.2022	TOWER BTS DUSUN SAWAH, DESA BENUIS, KEC.SELIMBAU	HIBAH	Rp 4.000.000,00	TOWER BTS DUSUN SAWAH, DESA BENUIS, KEC.SELIMBAU
347	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0002	400	2023	DUSUN KELUIN, DESA MENSAU, KEC.BATANG LUPAR	SKT	593/103/Ds.Ms/PEM.2022	TOWER BTS DUSUN KELUIN, DESA MENSAU, KEC.BATANG LUPAR	HIBAH	Rp 4.000.000,00	DUSUN KELUIN, DESA MENSAU, KEC.BATANG LUPAR
348	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0004	400	2023	DUSUN REPUN, DESA PINANG LAKA, KEC.PENGKADAN	SKT	593/17/DES-PLPEM	TOWER BTS DUSUN REPUN, DESA PINANG LAKA, KEC.PENGKADAN	HIBAH	Rp 4.000.000,00	DUSUN REPUN, DESA PINANG LAKA, KEC.PENGKADAN
349	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0005	400	2023	Jl. DUSUN SADAP, DESA MENUA SADAP, KEC.EMBALOH HULU	SKT	591.4/45/KEC.EBU/MS KED/2022	TOWER BTS Jl. DUSUN SADAP, DESA MENUA SADAP, KEC.EMBALOH HULU	HIBAH	Rp 4.000.000,00	TOWER BTS Jl. DUSUN SADAP, DESA MENUA SADAP, KEC.EMBALOH HULU

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0007	400	2023	DUSUN TELUK SAKA, DESA JONGKONG KIRI HULU, KEC.JONGKONG	SKT	593.2/229/DS-JKHU/Ekon-2022	TOWER BTS DUSUN TELUK SAKA, DESA JONGKONG KIRI HULU, KEC.JONGKONG	HIBAH	Rp 4.000.000,00	DUSUN TELUK SAKA, DESA JONGKONG KIRI HULU, KEC.JONGKONG
351	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0008	400	2023	JL.MANGGIS, DUSUN KEDAUNG 2, DESA NIBUNG, KEC.SELIMBAU	SKT	593/151/Ds-NBG/PEM	Tower BTS JL.MANGGIS, DUSUN KEDAUNG 2, DESA NIBUNG, KEC.SELIMBAU	HIBAH	Rp 4.000.000,00	JL.MANGGIS, DUSUN KEDAUNG 2, DESA NIBUNG, KEC.SELIMBAU
352	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0009	400	2023	DUSUN NANGA LOT, DESA NANGA LOT, KEC.SEBERUANG	-	593/5/X/PEM	Tower BTS	HIBAH	Rp 2.000.000,00	Tanah untuk bangunan tower BTS DUSUN NANGA LOT, DESA NANGA LOT, KEC.SEBERUANG
353	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0010	400	2023	DESA BATI, KEC.SEBERUANG	SKT	591.4/07/1/VI/PEM	TOWER BTS DESA BATI, KEC.SEBERUANG	HIBAH	Rp 4.000.000,00	TOWER BTS DESA BATI, KEC.SEBERUANG
354	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0011	400	2023	DUSUN SUKA MAKMUR JALAN MERSAT DESA BELIMBING KEC.SILAT HULU	SKT	412/130/D-BLG/PEM/2022	TOWER BTS DUSUN SUKA MAKMUR JALAN MERSAT DESA BELIMBING KEC.SILAT HULU	HIBAH	Rp 4.000.000,00	DUSUN SUKA MAKMUR JALAN MERSAT DESA BELIMBING KEC.SILAT HULU
355	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0012	400	2023	JL. SINGA LAYANG DUSUN SEPAN PADANG DESA BAHENAP KEC.KALIS	SKT	555.3/476/k.kis/EKBA NG	TOWER BTS JL. SINGA LAYANG DUSUN SEPAN PADANG DESA BAHENAP KEC.KALIS	HIBAH	Rp 4.000.000,00	JL. SINGA LAYANG DUSUN SEPAN PADANG DESA BAHENAP KEC.KALIS
356	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0013	400	2023	JALAN LINTAS TIMUR DUSUN ROBAN DESA TANJUNG KEC.MENTEBAH	SKT	555.3/171/D-TJG/EKBANG	TOWER BTS JALAN LINTAS TIMUR DUSUN ROBAN DESA TANJUNG KEC.MENTEBAH	HIBAH	Rp 364.000,00	JALAN LINTAS TIMUR DUSUN ROBAN DESA TANJUNG KEC.MENTEBAH
357	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0014	400	2023	JL. LINTAS BATANG KALIS DUSUN LANDAU BELABAN DESA KENSURAY KEC.KALIS	SKT	555.4/98/PEMDESS-KSY/2022	TOWER BTS JL. LINTAS BATANG KALIS DUSUN LANDAU BELABAN DESA KENSURAY KEC.KALIS	HIBAH	Rp 4.000.000,00	JL. LINTAS BATANG KALIS DUSUN LANDAU BELABAN DESA KENSURAY KEC.KALIS
358	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	0015	400	2023	JALAN BBM DUSUN SEGITAK KANAN DESA SEGITAK KEC.BUNUT HULU	SKT	425.11/45/D-SGT/PEM/2022	TOWER BTS JALAN BBM DUSUN SEGITAK KANAN DESA SEGITAK KEC.BUNUT HULU	HIBAH	Rp 5.600.000,00	JALAN BBM DUSUN SEGITAK KANAN DESA SEGITAK KEC.BUNUT HULU
359	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Tanah Bangunan Pasar	0001	391	1984	Jl. Prabu Anom Nanga Bunut Kecamatan Bunut Hilir	Hak Pakai		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	APBD	Rp 5.982.000,00	Tanah Pasar Inpres
360	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Tanah Bangunan Pasar	0001	4.802	2013	Jl. Pesantren Kedamin Hulu Putussibau Selatan	Hak Pakai		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Hibah	Rp 873.909.226,45	Tanah hibah dari pihak ketiga
361	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	1.590	1992	Jl. Komyos Sudarso Nomor 22 Putussibau Kota	Hak Pakai		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	APBD	Rp 71.040.000,00	Tanah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
362	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	0001	42.300	2003	JL. Komplek Perumahan Pemda (dalam Kota Putussibau)	Hak Pakai	593/817/Kel.H.K/PEM	JL. Komplek Perumahan Pemda (dalam Kota Putussibau)	APBD	Rp 423.000.000,00	Pematangan Lahan Perumahan PNS JL. Komplek Perumahan Pemda (dalam Kota Putussibau)
363	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	61	1986	JALAN KOM YOS SUDARSO NOMOR 53 PUTUSSIAU UTARA GG. HASAN BASRI	Hak Pakai	0	DINAS PUPR	HIBAH	Rp 51.067.421,00	HIBAH DARI KEMENTERIAN KEUANGAN
364	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	78.750	2004	Jalan Simpang Silat - Nanga Silat	Hak Pakai	5593/61/DS.PGN/PEM	Jalan Simpang Silat - Nanga Silat	APBD	Rp 787.500.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Silat - Nanga Silat
365	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0002	302.400	2004	Jalan Nanga Silat - Sekedau	Hak Pakai	593/14/DS-SB/PEM	Jalan Nanga Silat - Sekedau	APBD	Rp 3.024.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Nanga Silat - Sekedau
366	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0003	299.771	2004	Jalan Semitau - Nanga Kantuk	Hak Pakai	SKT.593/141/KNP/PEM	Jalan Semitau - Nanga Kantuk	APBD	Rp 9.152.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Semitau - Nanga Kantuk SKT.593/47/DES-STU HLP/PEM tgl 31/10/2017, SKT.593/125/STUHL/PEM tgl 12/09/2018, SKT.593/90/DS.SKD/PEM tgl 01/11/2017
367	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0004	46.350	2004	Jalan Semitau - Suhaid	Hak Pakai	593/66/DS.PRG/PEM	Jalan Semitau - Suhaid	APBD	Rp 927.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Semitau - Suhaid
368	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0005	41.132	2004	Jalan Lingkar Semitau (Lingkar Puja)	Hak Pakai	593/136/DES-KNK/PEM	Jalan Lingkar Semitau (Lingkar Puja)	APBD	Rp 810.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Lingkar Semitau (Lingkar Puja) 593/43/X/PEM tgl 07/10/2017
369	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0006	23.311	2004	Jalan Bongkong - Nanga Dangkan	Hak Pakai	593/03/D-ND/PEM	Jalan Bongkong - Nanga Dangkan	APBD	Rp 562.500.000,00	Tanah Ruas Jalan Bongkong - Nanga Dangkan 593/03/D-ND/PEM
370	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0007	55.189	2004	Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang	Hak Pakai	SKT.593/26/D-NLU/PEM, SKT.593/04/D-ND/PEM, SKT.59	Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang	APBD	Rp 2.826.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang SKT.593/26/D-NLU/PEM, SKT.593/04/D-ND/PEM, SKT.593/050/DS-NN/PEM, SKT.593/153/D.DK-IX/PEMDES-2018, SKT.593.2/192/D-LB/K.S.LU/PEM, SKT.593/070/D-NLU/PEM
371	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0008	117.577	2004	Jalan Suhaid - Mensusai	Hak Pakai	SKT.593/13/D.MNS/PEM.2018, SKT.593/25/D.MTN/PEM.20	Jalan Suhaid - Mensusai	APBD	Rp 694.980.000,00	Tanah Ruas Jalan Suhaid - Mensusai SKT.593/13/D.MNS/PEM.2018, SKT.593/25/D.MTN/PEM.2018, SKT.593/188/D.NA.SHD/PEM.2018
372	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0009	51.300	2004	Jalan Kenerak - Menapar	Hak Pakai	593/25/D.KRS/PEM	Jalan Kenerak - Menapar	APBD	Rp 366.795.000,00	Tanah Ruas Jalan Kenerak - Menapar 593/25/D.KRS/PEM
373	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0010	101.423	2004	Jalan Simpang Sekubah - Jongkong	Hak Pakai	SKT.593/51/04/PEM-2018, SKT.593/12/06/PEM	Jalan Simpang Sekubah - Jongkong	APBD	Rp 756.112.500,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Sekubah - Jongkong SKT.593/51/04/PEM-2018, SKT.593/12/06/PEM

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
374	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0011	131.840	2004	Jalan Simpang Sekubah - Selimbau	Hak Pakai	SKT.593/08/DS.GHU/PEM, SKT.593/DS.ENGK/PEM, SKT.593/02/DS.GRY/PEM	Jalan Simpang Sekubah - Selimbau	APBD	Rp 949.162.500,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Sekubah - Selimbau SKT.593/08/DS.GHU/PEM, SKT.593/DS.ENGK/PEM, SKT.593/02/DS.GRY/PEM
375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0012	10.352	2004	Jalan Simpang Senara - Simpang Sekubah	Hak Pakai	SKT.593/37/DES/PT/PEM	Jalan Simpang Senara - Simpang Sekubah	APBD	Rp 694.980.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Senara - Simpang Sekubah SKT.593/37/DES/PT/PEM
376	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0013	61.200	2004	Jalan Tepuai - Nanga Taman	Hak Pakai	5SKT.593.2/189/236-08/PEM-2017	Jalan Tepuai - Nanga Taman	APBD	Rp 1.652.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Tepuai - Nanga Taman SKT.593.2/189/236-08/PEM-2017
377	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0014	65.250	2004	Jalan Menendang - Tapang Tua	Hak Pakai	593/166/DES-PL/PEM	Jalan Menendang - Tapang Tua	APBD	Rp 466.537.500,00	Tanah Ruas Jalan Menendang - Tapang Tua SKT.593/166/DES-PL/PEM, SKT.593/122/DS.MAWAN/PEM, SKT.593/178/DES.SRJ/PEM
378	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0015	54.152	2004	Jalan Tapang Tua - Ujung Said	SKT	SKT.593/72/DS-US/PEM-2018 DAN SKT.593/37/DES-BT/PEM	Jalan Tapang Tua - Ujung Said	APBD	Rp 457.600.000,00	Tanah Ruas Jalan Tapang Tua - Ujung Said SKT.593/72/DS-US/PEM-2018 DAN SKT.593/37/DES-BT/PEM
379	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0016	10.650	2004	Jalan Mawan - Nanga Temenang	Hak Pakai	593/166/DES-PL/PEM	Jalan Mawan - Nanga Temenang	APBD	Rp 466.537.500,00	Tanah Ruas Jalan Mawan - Nanga Temenang 593/166/DES-PL/PEM 2194,145M2, 593/263/06/DS-NT/PEMDES 2020 317,386M2, 593/329/DS-KP/PEM.DES 5083,213M2, 593/145/DES.SSN/PEM.DES 2072,496M2, 593/139/DS.MWN-PEM.DES 982,586M2
380	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0017	64.800	2004	Jalan Simpang Suka Ramai - Kuala Baru(Nanga Sangan)	Hak Pakai	SKT.593/209/DES-RPJ/PEM	Jalan Simpang Suka Ramai - Kuala Baru(Nanga Sangan)	APBD	Rp 463.320.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Suka Ramai - Kuala Baru(Nanga Sangan) SKT.593/209/DES-RPJ/PEM, SKT.593/120/PEMDES/PEM, SKT.593/101/DS.HPJ/PEM-DES
381	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0018	139.950	2004	Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman	Hak Pakai	SKT.593/72/DS-US/PEM-2018	Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman	APBD	Rp 1.000.642.500,00	Tanah Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman SKT.593/72/DS-US/PEM-2018
382	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0019	60.525	2004	Jalan Boyan Tanjung - Nanga Boyan	Hak Pakai	593/128/Pemdes -ND /PEM	Jalan Boyan Tanjung - Nanga Boyan	APBD	Rp 1.210.500.000,00	Tanah Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Boyan 593/128/Pemdes -ND /PEM
383	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0020	167.963	2004	Jalan Nanga Danau - Nanga Bunut	Hak Pakai	593/128/Pemdes -ND /PEM	Jalan Nanga Danau - Nanga Bunut	APBD	Rp 1.200.931.875,00	Tanah Ruas Jalan Nanga Danau - Nanga Bunut 593/128/Pemdes -ND /PEM
384	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0021	36.900	2004	Jalan Temunuk - Nanga Suruk	Hak Pakai	593/28/SKT/PEM/DS-NS/2020 dan 593/107/DS-TMY/PEM	Jalan Temunuk - Nanga Suruk	APBD	Rp 263.835.000,00	Tanah Ruas Jalan Temunuk - Nanga Suruk
385	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0022	80.000	2004	Jalan Semangut - Segitak(Kelibang)	Hak Pakai	593/13/SKT/PEM-DES/NA.SMT/2020 5715	Jalan Semangut - Segitak(Kelibang)	APBD	Rp 800.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Semangut - Segitak(Kelibang)
386	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0023	904	2004	Jalan Simpang Empat Suruk - Nanga Payang	Hak Pakai	593/29/SKT/PEM/DS-NS/2020	Jalan Simpang Empat Suruk - Nanga Payang	APBD	Rp 595.237.500,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Empat Suruk - Nanga Payang
387	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0024	21.988	2004	Jalan Nanga Payang - Landau Kalo(Batu Tiga)	Hak Pakai	593/04/SKT/PEM-DS-ND/2020 DAN 593/141/DNP/PEM/2020	Jalan Nanga Payang - Landau Kalo(Batu Tiga)	APBD	Rp 1.984.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Nanga Payang - Landau Kalo(Batu Tiga) 593/04/SKT/PEM-DS-ND/2020 (19712,28M2) DAN 593/141/DNP/PEM/2020 (2275,83M2)
388	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0025	8.565.002	2004	Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk	Hak Pakai	593/104/SKT/PEM-DES-NA.BY	Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk	APBD	Rp 777.920.000,00	Tanah Ruas Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk
389	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0026	80.100	2004	Jalan Rantau Kalis - Nanga Lebang	Hak Pakai	SKT.593/124/PEMDES-NU/SKT/2017	Jalan Rantau Kalis - Nanga Lebang	APBD	Rp 572.715.000,00	Tanah Ruas Jalan Rantau Kalis - Nanga Lebang SKT.593/124/PEMDES-NU/SKT/2017, SKT.593/25/PEMDES-NS/SKT/2017, SKT.593/213/SKT-RK/2017
390	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0027	107.100	2004	Jalan Tekalong - Tanjung	Hak Pakai	SKT.593/038/SKT-TJG/PEM	Jalan Tekalong - Tanjung	APBD	Rp 1.071.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Tekalong - Tanjung SKT.593/038/SKT-TJG/PEM dan SKT.593/08/D.SMJ/PEM
391	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0029	656.000	2004	Jalan Nanga Erak - Batas Propinsi	Hak Pakai	SKT.593/038/SKT-TJG/PEM	Jalan Nanga Erak - Batas Propinsi	APBD	Rp 4.690.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Nanga Erak - Batas Propinsi

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0030	80.100	2004	Jalan Mataso - Ulak Pauk	Hak Pakai	SKT.593/222/DBU/PEM-2017	Jalan Mataso - Ulak Pauk	APBD	Rp 801.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk SKT.593/222/DBU/PEM-2017, SKT.593/22/PEMDES-PM/2017, SKT.593/23/PEMDES-PM/2017, SKT.593/30/SKT/D-UP/2017, SKT.593/144/DS.BM/PEM, SKT.593/109/V/SGM/PEM/2017
393	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0031	96.868	2004	Jalan Apan - Ulak Pauk	Hak Pakai	593/109/V/SGM/PEM/2017	Jalan Apan - Ulak Pauk	APBD	Rp 306.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Apan - Ulak Pauk Desa Saujung Giling Manik 593/109/V/SGM/PEM/2017 (8.796) Desa Langan Baru 593/65/PDLB/PEM (50.000) Desa Ulak Pauk 593/31/SKT/PEM-D-UP/2017 (38.072)
394	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0032	30.932	2004	Jalan Mataso - Sadap	Hak Pakai	593/79/DMS/EBU/SKT/2017	Jalan Mataso - Sadap	APBD	Rp 114.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Mataso - Sadap
395	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0033	52.570	2004	Jalan Ukit-Ukit - Sumpak Sengkuang(Simpang Jalan Nasional Lanjak - Badau)	Hak Pakai	593/47/Ds.STG/PEM-2018	Jalan Ukit-Ukit - Sumpak Sengkuang(Simpang Jalan Nasional Lanjak - Badau)	APBD	Rp 625.803.750,00	Tanah Ruas Jalan Ukit-Ukit - Sumpak Sengkuang(Simpang Jalan Nasional Lanjak - Badau)
396	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0034	199.443	2004	Jalan Badau - Pesayah	Hak Pakai	593/174/JTG/PEM dan 593/954/BDU/PEM	Jalan Badau - Pesayah	APBD	Rp 1.680.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Badau - Pesayah Desa Janting 593/174/JTG/PEM (66453) dan Desa Badau 593/954/BDU/PEM (22531) Desa Semuntik 593/096/MTK/PEM (110459)
397	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0035	151.200	2004	Jalan Berangan - Nanga Kantuk	Hak Pakai	SKT. 593/109/PEM-BA/2021	Jalan Berangan - Nanga Kantuk	APBD	Rp 3.024.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Berangan - Nanga Kantuk SKT. 593/109/PEM-BA/2021, 593/350/PEMDES/JTG-2021, 593/002/PEM-DES/KRK/2021, 2002/152/PEMDES-NK/2021, 591.1/32/X1/SB/PEMDES/2021, 112/200/PEMDES-TAP/2021, 593/77/PEM-DES/TTS 2021
398	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0036	2.178	2004	Jalan Sungai Tembaga - Empaik	Hak Pakai	593/492/PM/PEM	Jalan Sungai Tembaga - Empaik	APBD	Rp 371.800.000,00	Tanah Ruas Jalan Sungai Tembaga - Empaik
399	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0037	19.321	2004	Jalan Nanga Kantuk - Sungai Antu	SKT	593/226/K.EMP/PEM dan 593/ 93 /K.EMP/PEM	Tanah Ruas Nanga Kantuk - Sungai Antu	APBD	Rp 1.032.000.000,00	Tanah Ruas Nanga Kantuk - Sungai Antu
400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0038	253.800	2004	Jalan Simpang Nanga Kantuk - Jaung (Batas Kabupaten Sintang)	Hak Pakai	593/228/K.EMP/PEM	Desa Nanga Kantuk	APBD	Rp 1.814.670.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Nanga Kantuk - Jaung (Batas Kabupaten Sintang)
401	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0039	72.000	2004	Jalan Simpang Nanga Kantuk - Kayu Baung	Hak Pakai	593/230/K.EMP/PEM	Nanga Kantuk - Kayu Jaung	APBD	Rp 720.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Nanga Kantuk - Kayu Baung
402	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0040	1.796.296	2004	Jalan Simpang Sungai Luar - Nanga Bunut	Hak Pakai	593/10/Ds.M/PEM	Jalan Simpang Sungai Luar - Nanga Bunut	APBD	Rp 2.791.360.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Sungai Luar - Nanga Bunut Desa Malemba 593/10/Ds.M/PEM (31/10/2017, Luas 154888) Desa Sungai Ajung 593/06/Ds.S.Aj/PEM (2010/2017, Luas 1599661) Desa Sungai Abau 593/82/Ds.Sab.Ab/PEM (2010/2017, Luas 41.767)
403	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0041	261.288	2004	Jalan Kedamin - Nanga Manday	Hak Pakai	593/1.001/Pemdes - BK/PEM	Jalan Kedamin - Nanga Manday	APBD	Rp 1.644.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Kedamin - Nanga Manday Desa Bika 593/1.001/Pemdes - BK/PEM (51442m2)(06/11/2017) Desa Bika Hulu 593/163/BH/PEM (66924m2) (07/11/2017) Desa Teluk Sindur 593/132/DTS /PEM (52206m2) (08/11/2017) Desa Nanga Manday 593/86/PEM- Des/NM (72392m2)(06/11/2017) Desa Nanga Manday 593/87/PEM- Des/NM (18324m2) (06/11/2017)
404	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0042	165.604	2004	Jalan Nanga Manday - Nanga Embaloh	Hak Pakai	593/90/DES.PP/PEM	Jalan Nanga Manday - Nanga Embaloh	APBD	Rp 560.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Nanga Manday - Nanga Embaloh Ujung Bayur 593/38/DES.UB/PEM (26801m2)(7 /09/ 2017) Pala Pintas 593/38/DES.PP/PEM (90.780)(6/9/2017) Kirin Nangka 593/90/DES.PP/PEM (48.023)(04/10/2017)

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0043	347	2004	Jalan Simpang Mupa - Datah Dian	Hak Pakai	593/106/SKT/PEM/PEMDES/PP	Jalan Simpang Mupa - Datah Dian	APBD	Rp 3.206.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Mupa - Datah Dian
406	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0044	7.215	2004	Jalan Tanjung Kerja - Nangau Nyabau	Hak Pakai	593/77/SKT/PEM/DS. NY/2020 593/49/SKT/PEM/SUP/2020	Jalan Tanjung Kerja - Nangau Nyabau	APBD	Rp 405.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Tanjung Kerja - Nangau Nyabau
407	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0045	146.134	2004	Jalan Simpang Bati(Lintas Selatan) - Gurung	Hak Pakai	593/84/XI/PEM	Jalan Simpang Bati(Lintas Selatan) - Gurung	APBD	Rp 498.712.500,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Bati(Lintas Selatan) - Gurung Tanjung Keliling (593/84/XI/PEM 4 Maret 2017) Empiring (593/84/XI/PEM 4 Maret 2017) Bati (593/07/PEM-DES/BATI 13 April 2018) Gurung (593/04/III/PEM 30 Maret 2018)
408	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0046	112.185	2004	Jalan Simpang Nanga Lot - Nanga Luan	Hak Pakai	593/21/VI/PEM DAN 593/155/XI/PEM	Jalan Simpang Nanga Lot - Nanga Luan	APBD	Rp 418.500.000,00	Tanah Ruas Jalan Simpang Nanga Lot - Nanga Luan
409	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0047	8.560	2004	Jalan Sejiram - Menapar	Hak Pakai	593/120/III/PEM DAN 593/120/VI/PEM	Jalan Sejiram - Menapar	APBD	Rp 1.373.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Sejiram - Menapar
410	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0048	59.499	2004	Jalan Kalis - Teluk Entudung	Hak Pakai	593/22/NK/PEM 593/45/PEM 593/26/PEMDES-NS	Jalan Kalis - Teluk Entudung	APBD	Rp 840.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Kalis - Teluk Entudung Desa Nanga Kalis 593/22/NK/PEM 31/10/2017 Desa Kalis Raya 593/45/PEM 08/11/2017 Desa Nanga Sebitang 593/26/PEMDES-NS 7 /11/2017
411	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0049	274.005	2004	Jalan Tekudak - Tanjung	Hak Pakai	593.2/22/PEMDES-TKD/SKT/ 2017 593.2/23/SKT/ PEMDES	Jalan Tekudak - Tanjung	APBD	Rp 1.216.215.000,00	Tanah Ruas Jalan Tekudak - Tanjung Tekudak 593.2/22/PEMDES-TKD/SKT/ 2017 02/11/2020 Nanga Tubuk 593.2/23/SKT/ PEMDES.N.T.A/2017 2/11/2017 Nanga Danau 593/142/SKT/ PEMDES-ND/2017 6/11/2017 Rantau Kalis 593/214/SKT-RK/ PEM/2017 6/11/2017 Kensuray 593/146/ PEMDES-KSY/SKT/2017 2/11/2017
412	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0050	3.915	2004	Jalan Gajah Mada	Hak Pakai	593/1755/KEL.PK/PEM	Jalan Gajah Mada	APBD	Rp 487.705.000,00	Tanah Ruas Jalan Gajah Mada
413	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0051	3.054	2004	Jalan Kirin Durian	Hak Pakai	593/1761/KEL.PK/PEM	Jalan Kirin Durian	APBD	Rp 311.472.000,00	Tanah Ruas Jalan Kirin Durian
414	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0052	4.390	2004	Jalan D.I Panjaitan	Hak Pakai	593/1769/KEL.PK/PEM	Jalan D.I Panjaitan	APBD	Rp 728.000.000,00	Tanah Ruas Jalan D.I Panjaitan
415	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0053	2.298	2004	Jalan Pasar Inpres	Hak Pakai	593/1983/KEL.PK/PEM	Jalan Pasar Inpres	APBD	Rp 134.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Pasar Inpres
416	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0054	892	2004	Jalan S.Parman	Hak Pakai	593/1761/KEL.PK/PEM	Jalan S.Parman	APBD	Rp 353.600.000,00	Tanah Ruas Jalan S.Parman
417	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0055	2.764	2004	Jalan Ks.Tubun	Hak Pakai	593/1785/KEL.PK/PEM	Jalan Ks.Tubun	APBD	Rp 195.840.000,00	Tanah Ruas Jalan Ks.Tubun
418	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0056	16.197	2004	Ruas A.Dogom	Hak Pakai	593/831/Kel-H.K/PEM	Ruas A.Dogom	APBD	Rp 551.040.000,00	Tanah Ruas A.Dogom
419	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0057	5.000	2004	Jalan Kopral A.Rahman	Hak Pakai	593/833/Kel-H.K/PEM	Jalan Kopral A.Rahman	APBD	Rp 410.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Kopral A.Rahman
420	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0058	5.791	2004	Jalan Hasanudin	Hak Pakai	593/835/Kel-H.K/PEM	Jalan Hasanudin	APBD	Rp 344.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Hasanudin
421	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0059	4.541	2004	Jalan Patimura	Hak Pakai	593/837/Kel-H.K/PEM	Jalan Patimura	APBD	Rp 363.200.000,00	Tanah Ruas Jalan Patimura
422	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0060	1.948	2004	Jalan Merdeka	Hak Pakai	593/1727/KEL.PK/PEM	Jalan Merdeka	APBD	Rp 523.200.000,00	Tanah Ruas Jalan Merdeka
423	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0061	2.364	2004	Jalan DR.A.Diponegoro	Hak Pakai	593/1719/KEL.PK/PEM	Jalan DR.A.Diponegoro	APBD	Rp 482.400.000,00	Tanah Ruas Jalan DR.A.Diponegoro
424	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0062	3.612	2004	Jalan Rahadi Usman	Hak Pakai	593/1745/KEL.PK/PEM	Jalan Rahadi Usman	APBD	Rp 392.800.000,00	Tanah Ruas Jalan Rahadi Usman
425	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0063	3.076	2004	Jalan I.G.Ngurai Rai	Hak Pakai	593/1765/KEL.PK/PEM	Jalan I.G.Ngurai Rai	APBD	Rp 401.185.000,00	Tanah Ruas Jalan I.G.Ngurai Rai
426	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0064	2.327	2004	Jalan Jeranding A.R	Hak Pakai	593/1793/KEL.PK/PEM	Jalan Jeranding A.R	APBD	Rp 169.576.000,00	Tanah Ruas Jalan Jeranding A.R
427	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0065	810	2004	Jalan Perwira	Hak Pakai	593/1717/KEL.PK/PEM	Jalan Perwira	APBD	Rp 88.065.000,00	Tanah Ruas Jalan Perwira
428	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0066	808	2004	Jalan Melati	Hak Pakai	593/1725/KEL.PK/PEM	Jalan Melati	APBD	Rp 58.092.000,00	Tanah Ruas Jalan Melati
429	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0067	155.007	2004	Jalan Ruai	Hak Pakai	593/835/KEL-PK/PEMKES	Jalan Ruai	APBD	Rp 59.946.000,00	Tanah Ruas Jalan Ruai
430	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0068	1.016	2004	Jalan Moch.Dahar	Hak Pakai	593/1721/KEL.PK/PEM	Jalan Moch.Dahar	APBD	Rp 82.984.000,00	Tanah Ruas Jalan Moch.Dahar
431	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0069	832	2004	Jalan Amin	Hak Pakai	593/1729/KEL.PK/PEM	Jalan Amin	APBD	Rp 168.800.000,00	Tanah Ruas Jalan Amin
432	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0070	3.680	2004	Jalan Beringin	Hak Pakai	593/829/Kel.H.K/PEM	Jalan Beringin	APBD	Rp 118.784.000,00	Tanah Ruas Jalan Beringin
433	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0071	676	2004	Jalan Budi Utomo	Hak Pakai	593/1737/KEL.PK/PEM	Jalan Budi Utomo	APBD	Rp 49.408.000,00	Tanah Ruas Jalan Budi Utomo
434	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0072	1.000	2004	Jalan Iskandar Muda	Hak Pakai	593/1735/KEL.PK/PEM	Jalan Iskandar Muda	APBD	Rp 61.440.000,00	Tanah Ruas Jalan Iskandar Muda
435	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0073	498	2004	Jalan DR.Syamsudin	Hak Pakai	593/1759/KEL.PK/PEM	Jalan DR.Syamsudin	APBD	Rp 40.960.000,00	Tanah Ruas Jalan DR.Syamsudin
436	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0074	560	2004	Jalan Chairil Anwar	Hak Pakai	-	Jalan Chairil Anwar	APBD	Rp 45.920.000,00	Tanah Ruas Jalan Chairil Anwar
437	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0075	4.801	2004	Jalan M.Yasin	Hak Pakai	593/825/Kel.H.K/PEM	Jalan M.Yasin	APBD	Rp 156.672.000,00	Tanah Ruas Jalan A.Yasin

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
438	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0076	3.728	2004	Jalan Piere Tendeau	Hak Pakai	593/1777/KEL.PK/PEM	Jalan Piere Tendeau	APBD	Rp 303.936.000,00	Tanah Ruas Jalan Piere Tendeau
439	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0077	2.004	2004	Jalan WR.Supratman	Hak Pakai	593/1779/KEL.PK/PEM	Jalan WR.Supratman	APBD	Rp 206.000.000,00	Tanah Ruas Jalan WR.Supratman
440	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0078	4.770	2004	Jalan Antasari	Hak Pakai	593/1771/KEL.PK/PEM	Jalan Antasari	APBD	Rp 490.280.000,00	Tanah Ruas Jalan Antasari
441	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0079	2.190	2004	Jalan Danau Luar	Hak Pakai	593/1773/KEL.PK/PEM	Jalan Danau Luar	APBD	Rp 165.888.000,00	Tanah Ruas Jalan Danau Luar
442	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0080	840	2004	Jalan Pendidikan	Hak Pakai	593/1775/KEL.PK/PEM	Jalan Pendidikan	APBD	Rp 86.520.000,00	Tanah Ruas Jalan Pendidikan
443	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0081	1.026	2004	Jalan Pancasila	Hak Pakai	593/1789/KEL.PK/PEM	Jalan Pancasila	APBD	Rp 109.470.000,00	Tanah Ruas Jalan Pancasila
444	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0082	996	2004	Jalan Danau Kayan - 1	Hak Pakai	593/200/KEL.PK/PEM	Jalan Danau Kayan -1	APBD	Rp 128.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Danau Kayan -1
445	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0083	1.000	2004	Jalan Danau Kayan - 2	Hak Pakai	593/1751/KEL.PK/PEM	Jalan Danau Kayan - 2	APBD	Rp 28.728.000,00	Tanah Ruas Jalan Danau Kayan - 2
446	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0084	700	2004	Jalan Danau Kayan - 3	Hak Pakai	593/1753/KEL.PK/PEM	Jalan Danau Kayan - 3	APBD	Rp 28.944.000,00	Tanah Ruas Jalan Danau Kayan - 3
447	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0085	953	2004	Jalan Danau Sentarum	Hak Pakai	593/1795/KEL.PK/PEM	Jalan Danau Sentarum	APBD	Rp 103.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Danau Sentarum
448	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0086	2.295	2004	Jalan Patinggisari	Hak Pakai	593/490/DS-PP/PEM	Jalan Patinggisari	APBD	Rp 58.320.000,00	Tanah Ruas Jalan Patinggisari
449	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0087	1.000	2004	Jalan Imelda	Hak Pakai	593/1739/KEL.PK/PEM	Jalan Imelda	APBD	Rp 64.512.000,00	Tanah Ruas Jalan Imelda
450	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0088	840	2004	Jalan Cempaka	Hak Pakai	593/1741/KEL.PK/PEM	Jalan Cempaka	APBD	Rp 53.504.000,00	Tanah Ruas Jalan Cempaka
451	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0089	600	2004	Jalan Flamboyen	Hak Pakai	593/1743/KEL.PK/PEM	Jalan Flamboyen	APBD	Rp 38.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Flamboyen
452	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0090	444	2004	Jalan Meranti	Hak Pakai	593/1747/KEL.PK/PEM	Jalan Meranti	APBD	Rp 45.732.000,00	Tanah Ruas Jalan Meranti
453	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0091	792	2004	Jalan Nusa Indah	Hak Pakai	593/1749/KEL.PK/PEM	Jalan Nusa Indah	APBD	Rp 34.048.000,00	Tanah Ruas Jalan Nusa Indah
454	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0092	540	2004	Jalan Kenanga	Hak Pakai	593/1757/KEL.PK/PEM	Jalan Kenanga	APBD	Rp 57.680.000,00	Tanah Ruas Jalan Kenanga
455	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0093	1.170	2004	Jalan Darunnadwah	Hak Pakai	593/1791/KEL.PK/PEM	Jalan Darunnadwah	APBD	Rp 95.940.000,00	Tanah Ruas Jalan Darunnadwah
456	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0094	1.072	2004	Jalan Danau Kayan - 4	Hak Pakai	593/1763/KEL.PK/PEM	Jalan Danau Kayan - 4	APBD	Rp 56.640.000,00	Tanah Ruas Jalan Danau Kayan - 4
457	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0095	7.175	2004	Jalan Kenanga - Dogom	Hak Pakai	593/821/Kel.H.K/PEM	Jalan Kenanga - Dogom	APBD	Rp 194.560.000,00	Tanah Ruas Jalan Kenanga - Dogom
458	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0096	9.227	2004	Jalan Dogom - I	Hak Pakai	593/827/Kel.H.K/PEM	Jalan Dogom - I	APBD	Rp 151.920.000,00	Tanah Ruas Jalan Dogom - I
459	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0097	4.497	2004	Jalan Kirin Brown	Hak Pakai	593/490/DS-PP/PEM	Jalan Kirin Brown	APBD	Rp 135.424.000,00	Tanah Ruas Jalan Kirin Brown
460	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0098	234.783	2004	Jalan Komplek Perumahan KPN	Hak Pakai	593/850/KEL-PK/PEMKES	Jalan Komplek Perumahan KPN	APBD	Rp 96.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Komplek Perumahan KPN
461	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0099	133.398	2004	Jalan Komplek Transmigrasi	Hak Pakai	593/107/SKT/PEMDES/PP	Jalan Komplek Transmigrasi	APBD	Rp 81.200.000,00	Tanah Ruas Jalan Komplek Transmigrasi
462	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0100	1.857	2004	Jalan Pantai Sibau	Hak Pakai	593/1731/KEL.PK/PEM	Jalan Pantai Sibau	APBD	Rp 203.940.000,00	Tanah Ruas Jalan Pantai Sibau
463	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0101	12.325	2004	Jalan Lintas Utara - Mupa	Hak Pakai	593/490/SKT/PEMDES/PP	Jalan Lintas Utara - Mupa	APBD	Rp 216.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Lintas Utara - Mupa
464	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0102	8.772	2004	Jalan Iskandar Muda - Dogom	Hak Pakai	593/815/Kel.H.K/PEM	Jalan Iskandar Muda - Dogom	APBD	Rp 305.450.000,00	Tanah Ruas Jalan Iskandar Muda - Dogom
465	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0103	3.300	2004	Jalan Komplek Perumahan Pemda	Hak Pakai	593/817/Kel.H.K/PEM	Jalan Komplek Perumahan Pemda	APBD	Rp 100.800.000,00	Tanah Ruas Jalan Komplek Perumahan Pemda
466	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0104	561	2004	Jalan Swadaya	Hak Pakai	593/925/KEL-PK/PEMKES	Jalan Swadaya	APBD	Rp 26.928.000,00	Tanah Ruas Jalan Swadaya
467	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0105	640	2004	Jalan Dipenogoro - Pantai Sibau	Hak Pakai	593/1733/KEL.PK/PEM	Jalan Dipenogoro - Pantai Sibau	APBD	Rp 77.044.000,00	Tanah Ruas Jalan Dipenogoro - Pantai Sibau
468	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0106	1.950	2004	Jalan Escape	Hak Pakai	593/1787/KEL.PK/PEM	Jalan Escape	APBD	Rp 98.816.000,00	Tanah Ruas Jalan Escape
469	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0107	1.334	2004	Jalan Raun	Hak Pakai	593/107/SKT/PEM/PEMDES/PP	Jalan Raun	APBD	Rp 64.000.000,00	Tanah Ruas Jalan Raun
470	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0108	4.680	2004	Jalan Beringin - Iskandar Muda	Hak Pakai	593/1735/KEL.PK/PEM DAN 593/829/Kel.H.K/PEM	Jalan Beringin - Iskandar Muda	APBD	Rp 60.180.000,00	Tanah Ruas Jalan Beringin - Iskandar Muda 593/1735/KEL.PK/PEM (1.000m2)DAN Beringin 593/829/Kel.H.K/PEM (3680m2)
471	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0109	11.475	2004	Jalan Tanjung Pandan	Hak Pakai	593/713/Kel.KDR/PEM	Jalan Tanjung Pandan	APBD	Rp 145.800.000,00	Tanah Ruas Jalan Tanjung Pandan
472	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0110	11.736	2004	Jalan Tanjungpura	Hak Pakai	593/189/Kel.H.K/PEM	Jalan Tanjungpura	APBD	Rp 217.215.000,00	Tanah Ruas Jalan Tanjungpura
473	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0111	3.760	2004	Jalan Bukit Tilung	Hak Pakai	593/191/Kel.H.K/PEM	Jalan Bukit Tilung	APBD	Rp 63.450.000,00	Tanah Ruas Jalan Bukit Tilung
474	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0112	4.270	2004	Jalan Adi Sucipto	Hak Pakai	593/185/Kel.H.K/PEM	Jalan Adi Sucipto	APBD	Rp 80.730.000,00	Tanah Ruas Jalan Adi Sucipto
475	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0113	3.640	2004	Jalan Untung Sridadi	Hak Pakai	593/187/Kel.H.K/PEM	Jalan Untung Sridadi	APBD	Rp 32.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Untung Sridadi
476	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0114	8.232	2004	Jalan Penjara	Hak Pakai	593/179/Kel.H.K/PEM	Jalan Penjara	APBD	Rp 89.100.000,00	Tanah Ruas Jalan Penjara
477	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0115	3.960	2004	Jalan Kalimantan	Hak Pakai	593/193/Kel.H.K/PEM	Jalan Kalimantan	APBD	Rp 53.460.000,00	Tanah Ruas Jalan Kalimantan
478	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0116	77.980	2004	Jalan Kedamin - Teluk Sindur	Hak Pakai	593/181/Kel.H.K/PEM	Jalan Kedamin - Teluk Sindur	APBD	Rp 157.300.000,00	Tanah Ruas Jalan Kedamin - Teluk Sindur
479	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0117	4.318	2004	Jalan Sentosa	Hak Pakai	593/177/Kel.H.K/PEM	Jalan Sentosa	APBD	Rp 86.400.000,00	Tanah Ruas Jalan Sentosa
480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0118	21.800	2004	Jalan Kedamin Hulu	Hak Pakai	593/183/Kel.H.K/PEM	Jalan Kedamin Hulu	APBD	Rp 189.661.500,00	Tanah Ruas Jalan Kedamin Hulu
481	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0119	21.600	2004	Jalan R.A Kartini	Hak Pakai	593/195/Kel.H.K/PEM	Jalan R.A Kartini	APBD	Rp 48.600.000,00	Tanah Ruas Jalan R.A Kartini
482	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0120	6.800	2004	Jalan Fadilah	Hak Pakai	593/721/Kel.KDR/PEM	Jalan Fadilah	APBD	Rp 115.200.000,00	Tanah Ruas Jalan Fadilah
483	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0121	4.712	2004	Jalan Angkasa Pura	Hak Pakai	593/175/Kel.H.K/PEM	Jalan Angkasa Pura	APBD	Rp 72.900.000,00	Tanah Ruas Jalan Angkasa Pura
484	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0122	8.075	2004	Jalan Banin	Hak Pakai	593/717/Kel.KDR/PEM	Jalan Banin	APBD	Rp 25.650.000,00	Tanah Ruas Jalan Banin
485	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0123	2.506	2004	Jalan Tani	Hak Pakai	593/719/Kel.KDR/PEM	Jalan Tani	APBD	Rp 86.400.000,00	Tanah Ras Jalan Tani

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
486	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0124	434.428	2004	Jalan Pangsuma	Hak Pakai	593/916/KEL.KEDHU/PEM/2020	Jalan Pangsuma	APBD	Rp 22.680.000,00	Tanah Ruas Jalan Pangsuma
487	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	441	2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	Hak Pakai	SKT (593.3/83/SKT/DS KP/2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	APBD	Rp 33.390.572,00	Mutasi dari SETDA K.H Desa kerangan panjang (Pengkadan.an. Sahanuddin)
488	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0002	129	2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	Hak Pakai	SKT(593.3/86/SKT/DS-KP/2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	APBD	Rp 36.128.893,00	Mutasi dari SETDA K.H Desa kerangan panjang (Pengkadan, an. Samli)
489	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0003	221	2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	Hak Pakai	SKT (593.3/84/SKT/DS KP/2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	APBD	Rp 69.639.066,00	Mutasi dari SETDA K.H Desa kerangan panjang (Pengkadan, an. Effendi)
490	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0004	97	2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	Hak Pakai	SKT (593.3/88/SKT/DS KP/2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	APBD	Rp 5.272.800,00	Mutasi dari SETDA K.H Desa kerangan panjang (Pengkadan, an. Yusr)
491	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0005	99	2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	Hak Pakai	SKT (593.3/85/SKT/DS KP/2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	APBD	Rp 36.251.987,00	Mutasi dari SETDA K.H Desa kerangan panjang (Pengkadan,an. Menarit)
492	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0006	2.472	2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	Hak Pakai	SKT (593.3/82/SKT/DS KP/2012	Desa kerangan panjang (Pengkadan)	APBD	Rp 4.815.200,00	Mutasi dari SETDA K.H Desa kerangan panjang (Pengkadan, an. Sahrn)
493	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0001	1.016	1979	Jln. Antasari	Hak Pakai	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	APBD	Rp 20.320.000,00	Tanah Exs. Kantor KPH Putussibau
494	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	000001	7.000	1975	Desa Bongkong	Hak Pakai	-	SMPN Bongkong	APBD	Rp 20.000,00	MUTASI DARI SILAT HILIR KE PEMNDIDIKAN
495	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	000001	223	1980	Desa Bongkong	Hak Pakai	-	SDN Bongkong	APBD	Rp 20.000,00	MUTASI DARI SILAT HILIR KE PEMNDIDIKAN
496	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0003	1.440	2004	Pemda	Hak Pakai	Feb 16 1999 12:00AM	-	APBD	Rp 7.200.000,00	Tanah Kantor/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
497	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0009	1.384	2004	Kedamin Darat	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 9.895.600,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
498	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0012	308	2004	Kedamin Darat	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.202.200,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
499	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0013	300	2004	Kedamin Darat	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.145.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0014	200	2004	Kedamin Darat	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.430.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
501	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0015	200	2004	Kedamin Darat	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.430.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
502	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0017	243	2004	Kedamin Darat	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.737.450,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
503	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0018	90	2004	Kedamin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 643.500,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
504	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0019	90	2004	Kedamin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 643.500,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
505	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0020	90	2004	Kedamin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 643.500,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
506	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0021	360	2004	Kedamin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.574.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
507	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0022	225	2004	Kedamin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.608.750,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
508	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0023	90	2004	Kedamin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 643.500,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
509	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0024	210	2004	Kedamin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.501.500,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
510	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0026	150	2004	Lia (R. Dinas Guru) - PNS Jl. Lapangan Bola No.362	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.500.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
511	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0027	150	2004	Agok Syahrir (R. Dinas Guru) - PNS Jl. Lapangan Bola No.364	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.500.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
512	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0028	150	2004	Nazarman - PNS Komplek SDN 6	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.100.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
513	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0029	150	2004	Yosef Jasman - PNS Komplek SDN 6	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.100.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
514	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0030	150	2004	Wan Ramli - PNS Komplek SDN 6	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.100.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
515	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0031	150	2004	Drs. Buchari Saferi - PNS Komplek SDN 6	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.100.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
516	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0032	272	2004	R. Dinas Guru - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 3.808.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
517	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0033	250	2004	Burdi - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 3.500.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
518	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0034	250	2004	Gulam - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 3.500.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
519	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0035	250	2004	Haryana - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 3.500.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
520	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0036	272	2004	Joni - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 3.808.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
521	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0037	340	2004	M. Ridwan - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 4.760.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
522	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0038	340	2004	R. Dinas Guru - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 4.760.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
523	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0039	300	2004	Asrama Siswa - PNS Kompleks SLTPN 2 Putussibau	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 4.200.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
524	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0040	140	2004	Agus Dwi - PNS Kompleks SMK Negeri	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.960.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
525	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0041	130	2004	Agus Triono - PNS Kompleks SMK Negeri	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.820.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
526	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0044	170	2004	Anwar - PNS Kompleks SMK Negeri	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.380.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
527	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0045	117	2004	Faisal - PNS Kompleks SMK Negeri	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.638.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
528	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0047	140	2004	Pianto - PNS Kompleks SMK Negeri	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.960.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
529	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0048	130	2004	Supriadi - PNS Kompleks SMK Negeri	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 1.820.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
530	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0049	174	2004	Yusi - PNS/Guru Gang Beringin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 2.436.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
531	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0050	351	2004	R. Dian - PNS/Guru Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 4.914.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
532	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0051	550	2004	Triwati - PNS/Guru Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	7.700.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
533	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0052	150	2004	Emelia Elia - PNS/Guru Komp. SD 6	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	2.100.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
534	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0053	261	2004	Sukirman - PNS/Pj.Skl Gang Beringin	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	3.654.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
535	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0054	561	2004	Jawawi - PNS/Pj.Skl Jl. Pancasila	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	7.854.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
536	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0055	150	2004	Gusti Suandi - Pensiunan Komp. SDN 6	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	2.100.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
537	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0056	150	2004	Murjani (R. Dinas Guru) - Swasta Jl. Lapangan Bola	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	2.100.000,00	Tanah Lain-lain/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
538	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0057	150	2004	A. Rani (R. Dinas Guru) - Swasta Jl. Lapangan Bola	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	2.100.000,00	Tanah Lain-lain/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
539	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0058	1	2004	Jl. Tj. Pura (RDG)	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	20.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
540	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0059	1	2004	Jl. Tj. Pura (RDG)	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	20.000,00	Tanah Rumah Dinas/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
541	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0060	178	2004	Jl. Tanjung Pandan	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	1.782.500,00	Tanah Lain-lain/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
542	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0061	186	2004	Jl. Tanjung Pandan	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	1.860.000,00	Tanah Lain-lain/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
543	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0062	232	2004	Jl. Tanjung Pandan	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	2.325.000,00	Tanah Lain-lain/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
544	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0063	5.616	2004		-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	84.240.000,00	Tanah Sarana Umum / Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
545	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0064	68.523	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	1.370.432.700,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
546	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0065	13.500	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	337.458.850,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
547	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0066	-	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	50.000.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
548	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0067	-	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	112.950.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
549	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0068	8.000	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	50.000.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
550	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0069	382	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	10.700.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
551	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0070	450	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	30.000.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
552	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0071	28.000	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	572.508.140,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
553	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0073	1.750	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	27.300.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
554	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0074	525	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	7.862.400,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
555	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0075	30.000	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	686.400.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
556	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0076	20.000	2004	Pemda	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp	457.600.000,00	Tanah Pemda/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
557	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	00001	5.550	1999	Cinta Damai,Embau	Hak Pakai		Perumahan dinas	APBD	Rp	27.750.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Nomor BA: 032/1648/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
558	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	00001	787	2004	Entipan Hilir, Semitau	Hak Pakai	593/52/DS-ENT/PEM	-	APBD	Rp 27.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Nomor BA: 032/1648/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
559	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	13.175	1961	Negeri 1 Selimbau	-	Dec 31 1961 12:00AM	-	APBD	Rp 46.112.500,00	SLTP Negeri 1 Selimbau
560	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	4.020	1966	Jl. Muhi Amin No. 30	SKT	953.4/34/PEM/2001	SLTP Negeri 1 Semitau	APBD	Rp 14.070.000,00	SLTP Negeri 1 Semitau
561	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	5.166	1969	7 Bika	-	Dec 31 1969 12:00AM	-	APBD	Rp 25.830.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
562	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	8.100	1970	Dusun Parit Desa Dalam Selimbau	-	Aug 2 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 40.500.000,00	SDN 2 Selimbau/ Penilaian berdasarkan NJOP
563	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	5.520	1970	Jl Munggu Batu, Desa Gudang Hulu	SKT	594/011/PEM-2005	SDN 03 Selimbau	APBD	Rp 27.600.000,00	SDN 3 Selimbau/ Penilaian berdasarkan NJOP
564	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	3.500	1972	Jl. Lintas Utara	-	Dec 31 1972 12:00AM	-	APBD	Rp 17.500.000,00	Tanah Kantor - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
565	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	3.694	1973	Nanga Silat	Hak Pakai	Apr 23 2003 12:00AM	-	APBD	Rp 18.470.000,00	SDN 1 Nanga Silat
566	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	4.200	1973	Dsn Perbu, Desa Na. Boyan	SKT	593/353/KEC-BT/PEM	SDN 03 Nanga Boyan	APBD	Rp 21.000.000,00	SDN 03 Nanga Boyan
567	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	402	1973	Desa Ulak Pauk	SKT	593/24/SHT/PEMDES/ D-UPV/2018	SDN 01 Ulak Pauk	APBD	Rp 18.000.000,00	SDN 01 Ulak Pauk
568	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	5.000	1973	Kantuk Asam	-	Dec 31 1973 12:00AM	-	APBD	Rp 25.000.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
569	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	4.819	1974	JL. LINTAS UTARA PALA PULAU	Hak Pakai	Jan 8 1983 12:00AM	-	APBD	Rp 67.466.000,00	Tanah Lain-lain - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
570	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	1.406	1974	EMBALOH HULU	SKT	Dec 3 2014 12:00AM	-	Hibah	Rp 7.030.000,00	SDN 3 Ulak Pauk/ Penilaian berdasarkan NJOP
571	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	4.040	1974	Desa Benua Martinus	SKT	145/157/PEMDES/BN/ 01/2008	SDN 02 Benua Martinus	APBD	Rp 20.200.000,00	SDN 02 Benua Martinus
572	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	15.875	1974	Desa Nanga Dua	SKT	593/049/SKT/DS-ND/PEM	SDN 03 NANGA DUA	APBD	Rp 22.500.000,00	SDN 03 NANGA DUA
573	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	18.352	1974	Desa Kelling Semulung	SKT	593.2/122/SKT-KLS/2015	SDN 03 Kelling Semulung	APBD	Rp 89.400.000,00	SDN 03 Kelling Semulung
574	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	3.200	1974	Desa baru	-	Dec 31 1974 12:00AM	SDN 08 Benua Ujung	APBD	Rp 16.000.000,00	SDN 8 Benua Ujung - Penilaian berdasarkan NJOP/
575	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	6.136	1974	JLN. BHAKTI KARYA, 001/001, UJUNG UBUT, JONGKONG KIRI HULU KEC. JONGKONG	SKT	593.2/438/103/EKON2 014	SDN 01 Jongkong	APBD	Rp 78.715.000,00	SDN 01 Jongkong
576	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	665	1974	Nanga Raum	-	Dec 31 1974 12:00AM	-	APBD	Rp 3.325.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
577	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	340	1974	Suka Maju	SKT	Dec 31 1974 12:00AM	-	APBD	Rp 1.700.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
578	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	3.350	1974	Jl. Patimura No 20	-	Dec 31 1974 12:00AM	-	APBD	Rp 46.900.000,00	Tanah Lain-lain - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
579	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0014	11.200	1974	Jl. Pemuyang Lintas Selatan, Desa Ranyai	SKT	593/20/VI/PEM	SDN 03 Ranyai Hilir	APBD	Rp 40.600.000,00	SDN 03 Ranyai Hilir
580	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	7.800	1974	Dusun Bati	SKT	Dec 31 1974 12:00AM	SDN 04 BATI	APBD	Rp 39.000.000,00	SDN 04 BATI
581	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0017	4.945	1974	Dusun Nanga Entibah, Desa Nanga Dangkan	SKT	593.2/02/D-ND/SKT-2015	SDN 01 Nanga Dangkan	APBD	Rp 75.000.000,00	SDN 01 Nanga Dangkan
582	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	20.000	1974	Dusun Kepala Gunung, Desa Nanga Ngeri	SKT	593.2/015/D-NNK/SLU/PEM	SDN 03 Nanga Ngeri	APBD	Rp 2.430.000,00	SDN 03 Nanga Ngeri
583	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0019	24.752	1974	Na. Awini	SKT	034/SPPT/NA/2008	SDN 20 Nanga Awini	APBD	Rp 162.000.000,00	Tanah SDN No. 4 Na. Awini/ Nilai dalam SPHMT
584	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	4.488	1975	Jl. Simpang Bugang, Dusun Pengulu, Desa Bugang	SKT	593.2/10/110-08/PEMDES-2017	SDN 13 Bugang	APBD	Rp 24.000.000,00	SDN 13 Bugang
585	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	5.980	1975	Jl. Saridan, Desa Nanga Sebitang	SKT	421.2/104/PT.K-KLS/SD03/201	SDN 03 Nanga Sebitang	APBD	Rp 91.000.000,00	SDN 03 Nanga Sebitang
586	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	21.055	1975	Kenepai Komplek	SKT	593/133/KNP/PEM	SDN 5 Kenepai Komplek	APBD	Rp 1.988.000,00	SDN 5 Kenepai Komplek
587	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	12.000	1975	Dusun Keduai, Desa Nanga Nuar	SKT	594.1/004/DS.NN/AGR ARIA	SDN 06 Nanga Nuar	APBD	Rp 1.785.000,00	SDN 06 Nanga Nuar
588	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	3.939	1975	Jl. Pasir Putih, Desa Nanga Suahid	SKT	593/71/DS.NA.SHD/PEM	SDN 02 Nanga Suahid	APBD	Rp 1.680.000,00	SDN 02 Nanga Suahid
589	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	9.750	1975	Na. Nyaba	-	Dec 31 1975 12:00AM	-	APBD	Rp 243.750.000,00	Tanah SDN No. 5 Na. Nyaba/ Nilai dalam SPHMT
590	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	4.890	1976		Hak Pakai	May 1 1989 12:00AM	-	APBD	Rp 97.800.000,00	Tanah
591	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	8.436	1976	Desa Belatung	SKT	593.2/114/SKT-BL	SDN 04 Belatung	APBD	Rp 34.830.000,00	SDN 04 Belatung
592	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	4.900	1976	Desa Landau Apus	SKT	593/08/DSA-PB/PEM	SDN 04 Landau Apus	APBD	Rp 24.560.000,00	SDN 04 Landau Apus

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
593	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	16.512	1976	Desa Riam Piyang	Hak Pakai	KAWASAN	SDN 09 RIAM PIYANG	APBD	Rp 27.000.000,00	SDN 09 RIAM PIYANG
594	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	11.000	1976	Jl. Pendidikan, Dusun Peneipan Permai, Desa Peneipan Raya	SKT	591.1/109/12/BPMD/2011	SDN 16 Ujung Said	APBD	Rp 26.897.500,00	SDN 16 Ujung Said
595	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	189	1976	Batu Pansap	-	Dec 31 1976 12:00AM	-	APBD	Rp 945.000,00	SDN 12 Semalah - Penilaian berdasarkan NJOP/
596	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	4.000	1976	Dusun Nanga Keduai, Desa Parang	SKT	593.2/131/14/08/PEM-DES/2017	SDN 04 Nanga Keduai	APBD	Rp 20.000.000,00	SDN 04 Nanga Keduai
597	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	5.600	1976	Nanga Mandai	SKT	140/170/Pemdes-2009	SDN 02 Nanga Manday	APBD	Rp 28.000.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
598	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	7.500	1976	Kesurai	-	Dec 31 1976 12:00AM	-	APBD	Rp 37.500.000,00	Tanah Taman Kanak-Kanak - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
599	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	9.715	1976	Dusun Tanjung Keliling, Desa Penai	SKT	594.1/024/0P/PEM-2018	SDN 06 PB PENAI	APBD	Rp 2.240.000,00	SDN 06 PB PENAI
600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	532	1977	Desa Kirin Nangka	SKT	140/48/SKT-KN/PEMDES-2014	SDN 05 Kirin Nangka	APBD	Rp 8.580.000,00	SDN 05 Kirin Nangka
601	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	3.500	1977	-	-	Dec 31 1977 12:00AM	-	APBD	Rp 25.025.000,00	SDN 5 Nanga Ret
602	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	219	1977	Desa Kapuas Raya	SKT	593.2/128/PEMDES-KR/PEM	SDN 04 Nanga Bunut	APBD	Rp 25.000.000,00	SDN 04 Nanga Bunut
603	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	315	1977	Batu Ampar	-	Dec 31 1977 12:00AM	-	APBD	Rp 1.575.000,00	SDN 7 Nibung - Penilaian berdasarkan NJOP/
604	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	47.615	1977	Dusun Lubuk Baung, Desa Landau Kumpang	SKT	593.2/22/115-08/PEM-2021	SDN 06 LANDAU KUMPANG	APBD	Rp 33.150.000,00	SDN 06 LANDAU KUMPANG
605	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	4.500	1977	0 Mataluni	SKT	Dec 31 1977 12:00AM	-	APBD	Rp 22.500.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
606	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	5.000	1977	Melapi Mandai	-	Dec 31 1977 12:00AM	-	APBD	Rp 25.000.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
607	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	20.000	1977	Nanga Tubuk	SKT	593.2/01B/SKT/PEMD ES.N.T.A/2019	SDN 18 Nanga Tubuk	APBD	Rp 25.000.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
608	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	10.000	1977	2 Tanjung Durian	-	Dec 31 1977 12:00AM	-	APBD	Rp 50.000.000,00	Sarana Pendidikan - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
609	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0016	6.400	1977	JALAN LINTAS UTARA DESA SIBAU HILIR	SKT	590/516/PEMDES/S-HR/2021	SDN 18 Sibau Hilir	APBD	Rp 128.000.000,00	SDN 18 Sibau Hilir
610	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	3.780	1977	Jl. Lintas Selatan, Desa Seneban	SKT	593/19/2005/PEM	SDN 06 Seneban	APBD	Rp 24.000.000,00	SDN 06 Seneban
611	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0020	40.000	1977	Tungkup Dsn Emperiang	SKT	Dec 31 1977 12:00AM	-	APBD	Rp 200.000.000,00	Tanah Pemda - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
612	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0021	10.000	1977	Dusun Beluis Lelam, Desa Beluis Harum	SKT	593/07/DS/BLS/PEM	SDN 09 Beluis Lelam	APBD	Rp 50.000.000,00	SDN 09 Beluis Lelam
613	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0022	11.500	1977	Nanga Seberuang	SKT	593/146/DS-NSB/PEM/2012	SDN 6 Nanga Seberuang	APBD	Rp 1.624.000,00	SDN 6 Nanga Seberuang
614	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	5.400	1978	-	Hak Pakai	Sep 24 1979 12:00AM	-	APBD	Rp 54.000.000,00	Tanah
615	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	4.337	1978	Benua Tengah Kec. Pts Utara	-	425.1/67/PBS_A/2006	SDN 23 Benua Tengah	Hibah	Rp 21.685.000,00	SDN 9 Benua Tengah/ Penilaian berdasarkan NJOP
616	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	3.949	1978	Dusun Lauk Rugun, Desa Rantau Prapat	SKT	Nov 28 2014 12:00AM	SDN 7 LAUK RUGUN	Hibah	Rp 63.863.800,00	SDN 7 LAUK RUGUN
617	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	2.093	1978	Hulu Gurung	-	Dec 31 2014 12:00AM	SDN 12 Simpang Mas	APBD	Rp 21.035.300,00	SDN 12 Simpang Mas/ Penilaian berdasarkan NJOP
618	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	1.577	1978	Dusun Gertak Baru 2 Desa Titan Kuala Selimbau	-	Jul 4 2014 12:00AM	-	APBD	Rp 5.519.500,00	SDN 5 Selimbau/ Penilaian berdasarkan NJOP
619	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	4.350	1978	Lawik, Kec. Embaloh Hilir	SKT	593.2/10/SKT-LK/2014	SDN 06 Lawik	Hibah	Rp 21.750.000,00	SDN 06 Lawik
620	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	10.000	1978	Kaper Tekalong	SKT	425/63K-870/SDN/05/2014	SDN 05 Kaper Tekalong	APBD	Rp 490.000,00	SDN 05 Kaper Tekalong
621	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	14.000	1978	Dusun Meliau, Desa Melemba	SKT	593/02/DS.MU/PEM	SDN 06 Meliau	APBD	Rp 931.000,00	SDN 06 Meliau
622	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	6.555	1978	Jl. H. Zanul, Nanga Semangut	SKT	593/18/SKT/PEM-DES/SM/2014	SDN 01 Nanga Semangut	APBD	Rp 32.775.000,00	SDN 01 Nanga Semangut
623	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	8.307	1978	Desa Temuyuk	SKT	593/145/KEC-D	SDN 07 Temuyuk	APBD	Rp 36.000.000,00	SDN 07 Temuyuk
624	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	20.000	1978	Nanga Sarai	-	Dec 31 1978 12:00AM	-	APBD	Rp 100.000.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
625	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0016	9.934	1978	Tanah Putih	-	593.2/33/PEMDES-KR/PEM	SDN 05 TANAH PUTIH	APBD	Rp 33.000.000,00	SDN 05 TANAH PUTIH

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
626	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	16.500	1978	Lunsara	SKT	Dec 31 1978 12:00AM	-	APBD	Rp 82.500.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
627	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0019	384	1978	Lunsa	SKT	Dec 31 1978 12:00AM	-	APBD	Rp 1.920.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0020	384	1978	7 Melapi	-	Dec 31 1978 12:00AM	-	APBD	Rp 1.920.000,00	Tanah Lain-lain - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
629	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0021	3.080	1978	Desa Jelemuk, Kecamatan Bika	SKT	140/024/Pemdes-2006	SDN 04 Jelemuk	APBD	Rp 15.400.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
630	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0024	357	1978	Nanga Silat	-	Dec 31 1978 12:00AM	-	APBD	Rp 1.785.000,00	SDN 2 Nanga Silat
631	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0026	1.025	1978	Jl.Pendidikan	SKT	Dec 31 1978 12:00AM	-	APBD	Rp 33.005.000,00	SDN 2 Na Embaloh/ Digunakan untuk PAUD Tunas Harapan (Nilai KPKNL)
632	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	4.000	1979	Kec. Bika	SKT	590/28/PEM	SDN 09 Patah Sandung	Hibah	Rp 20.000.000,00	SDN 11 Patah Sandung/ Penilaian berdasarkan NJOP
633	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	15.596	1979	Jln Niaga No 1 Bunut Hilir	SKT	593.2/184/PEMDES-87/PEM	SDN 01 Nanga Bunut	APBD	Rp 54.731.000,00	SDN 01 Nanga Bunut
634	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	6.500	1979	Dusun Bukit Raya 1, Desa Gerayau	SKT	593/175/DS-GRY/PEM	SDN 10 Gerayau	APBD	Rp 32.500.000,00	SDN 10 Gerayau
635	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	1.296	1979	Dusun Letang, Desa Engkerangas	SKT	593/542/DS-ENGK/PEM	SDN 14 Engkerangas	APBD	Rp 9.266.400,00	SDN 14 Engkerangas
636	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	10.000	1979	Dusun Buak Trans Sejahtera, Desa Buak Limbang	SKT	593/427/DS-DL/PEM	SDN 16 Buak Limbang UPT XI	APBD	Rp 17.500.000,00	SDN 16 Buak Limbang UPT XI
637	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	4.200	1979	Jl. Lintas Embau KM 15, Desa Nanga Yen	SKT	593.2/142/116-08/PEMDES-2016	SDN 10 Nanga Taman	APBD	Rp 21.000.000,00	SDN 10 Nanga Taman
638	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	3.150	1979	Dusun Sapit, Desa Beringin	SKT	593.2/152/232.08/PEM DES-2017	SDN 11 Nanga Tempiu	APBD	Rp 70.000.000,00	SDN 11 Nanga Tempiu
639	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	2.500	1979	Dusun Suku Damai, Desa Rumbih	SKT	594.1/06/DS.RBH/PE	SDN 08 Semeluang	APBD	Rp 945.000,00	SDN 08 Semeluang
640	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	1.026	1979	Desa Riam Tapang	SKT	592/26/VII/SKT/PEMD ES-2007	SDN 04 Riam Tapang	APBD	Rp 2.430.000,00	SDN 04 Riam Tapang
641	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0014	1.994	1979	Nanga Luan	SKT	593.2/53/D-NLN/K.SLU/PEM	SDN 7 Nanga Luan	APBD	Rp 2.430.000,00	SDN 7 Nanga Luan
642	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	8.000	1979	Dusun Bukit Pulu, Desa Landau Rantau	SKT	593/23/DES-XI/PEM	SDN 08 Landau Rantau	APBD	Rp 2.430.000,00	SDN 08 Landau Rantau
643	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0016	1.488	1979	Dusun Suang Abadi, Desa Landau Rantau	SKT	593/19/DES-XI/PEM	SDN 20 Nanga Suang	APBD	Rp 405.000,00	SDN 20 Nanga Suang
644	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0017	1.144	1979	Na Embaloh	SKT	Dec 31 1979 12:00AM	-	APBD	Rp 36.837.000,00	SDN 12 Na Embaloh/ berubah status menjadi SDN 03 Na. Embaloh (Nilai KPKNL)
645	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	5.378	1979	EMBALOH HULU	SKT	Dec 31 1979 12:00AM	-	APBD	Rp 38.452.700,00	SDN 8 Benua Ujung/ Penilaian berdasarkan NJOP
646	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0019	300	1979	Dusun Jaung II, Desa Teluk Aur	SKT	593.2/23/PEMDES-TA/PEM	SDN 09 Jaung II	APBD	Rp 2.145.000,00	SDN 09 Jaung II
647	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	4.615	1980	Jl. Pendidikan, Dusun Sungai Buluh, Desa Riam Panjang	SKT	593/200/DES-Rpj/PEM	SDN 02 Riam Panjang	APBD	Rp 1.477.000,00	SDN 02 Riam Panjang
648	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	3.200	1980	Dusun Nanga Serawak, Desa Karya Mandiri	SKT	593.2/187/DS.KM/PEM 2017	SDN 08 Nanga Serawak	APBD	Rp 20.000.000,00	SDN 08 Nanga Serawak
649	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	4.500	1980	Dusun Mensasak Selatan, Desa Simpang Senara	SKT	593.2/231-08/PEMDES SS/2017	SDN 14 Mensasak	APBD	Rp 36.695.000,00	SDN 14 Mensasak
650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	4.536	1980	Jl. Rajali, Desa Samarantau	SKT	421.2/12/UPT DPOR.K.KLS/SD6/2014	SDN 06 Samarantau	APBD	Rp 2.130.000,00	SDN 06 Samarantau
651	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	426	1980	Na Lehangian	-	Dec 31 1980 12:00AM	-	APBD	Rp 2.130.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
652	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	192	1980	6 Trans Na. Sahui	-	Dec 31 1980 12:00AM	-	APBD	Rp 960.000,00	Tanah Lain-lain - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
653	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	12.412	1980	Biang II	-	045.2/193/D.TJG.PEM	SDN 05 BIANG 2	APBD	Rp 710.000,00	SDN 05 BIANG 2
654	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	1.575	1980	Dusun Nanga Lot, Desa Nanga Lot	SKT	593/15/DESA NANGA LOT/X/PEM	SDN 12 Nanga Lot	APBD	Rp 9.000.000,00	SDN 12 Nanga Lot
655	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	3.210	1980	Jl. Gusti Mas Juman, Dusun Keluaga, Desa Pangeran	SKT	594/45/DS Pgrn/PEM	SDN 03 Nanga Silat	APBD	Rp 830.000,00	SDN 03 Nanga Silat
656	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	7.400	1980	Desa Rantau Prapat	SKT	146/04/2008/RP-2006	SDN 09 Mungguk	APBD	Rp 52.910.000,00	SDN 09 Mungguk
657	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	2.000	1981	Paat	SKT	Nov 25 2014 12:00AM	-	APBD	Rp 14.300.000,00	SDN 11 Paat/ Penilaian berdasarkan NJOP
658	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	3.200	1981	0 Selaup/Jakok	-	Dec 31 1981 12:00AM	SDN 13 PULAN	APBD	Rp 16.000.000,00	SDN 13 Pulan - Penilaian berdasarkan NJOP/
659	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	17.000	1981	4 Nanga Sauk	SKT	Dec 31 1981 12:00AM	-	APBD	Rp 85.000.000,00	SDN 8 Kual Buin - Penilaian berdasarkan NJOP/

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
660	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	7.200	1981	Jl. Lintas Selatan, Desa Kalis Raya	SKT	421.2/165/UPT.KLS/S D10-2014	SDN 10 Nanga Kalis	APBD	Rp 55.770.000,00	SDN 10 Nanga Kalis
661	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	3.780	1981	Jl. Lintas Senara Nanga Serian	-	Dec 31 1981 12:00AM	-	APBD	Rp 18.900.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
662	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	6.300	1981	Desa Tanjung Kelling	SKT	593/92/DS-TJ KLLG/PEM	SDN 10 Tanjung Kelling	APBD	Rp 31.500.000,00	SDN 10 Tanjung Kelling
663	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	5.030	1981	Jl. Banda Behujan, Dusun Mulla Baru, Desa Jerenjang	SKT	593/12/XIII/DS-JRG/PEM	SDN 11 Jerenjang	APBD	Rp 26.330.000,00	SDN 11 Jerenjang
664	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	3.000	1981	Jl. Raya, Desa Bekuan	SKT	593/01/DS BK/PEM	SDN 15 Bekuan	APBD	Rp 30.800.000,00	SDN 15 Bekuan
665	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	224	1981	Nanga Sentabai	-	Dec 31 1981 12:00AM	-	APBD	Rp 1.120.000,00	SDN 4 Nanga Sentabai
666	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	7.920	1981	Sungai Canggai	SKT	594.1/086/DS.SS/PEM	SDN 09 Sungai Canggai	APBD	Rp 945.000,00	SDN 09 Sungai Canggai
667	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	10.000	1981	2 Sungai Mali	SKT	591.1/114/DS-SBR/PEM-2022	SDN 12 Sungai Mali	APBD	Rp 840.000,00	SDN 12 Sungai Mali
668	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0014	112	1981	0 Sungai Putat	-	Dec 31 1981 12:00AM	-	APBD	Rp 560.000,00	SDN 20 Sungai Putat
669	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	476	1981	Desa Dangkan Kota	SKT	593.2/191/D.DK-IX/PEMDES-2012	SDN 10 Landau Temiang	APBD	Rp 2.340.000,00	SDN 10 Landau Temiang
670	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0016	10.017	1981	Jl. Kopranudin, Desa Madang Permai, Kec. Suhaid	SKT	593/261/D.MP/PEM.2017	SDN 03 Nanga Suhaid	APBD	Rp 2.835.000,00	SDN 03 Nanga Suhaid
671	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0017	4.058	1981	Desa Nanga Tuan	SKT	93/PMDS/NT/2006	SDN 10 Nanga Tuan	APBD	Rp 2.606.175,00	SDN 10 Nanga Tuan
672	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	10.464	1981	Desa Ujung Bayur	SKT	593.2/01/SKT-UB/2014	SDN 07 Ujung Bayur	APBD	Rp 52.320.000,00	SDN 07 Ujung Bayur
673	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	9.889	1982	Desa Pinjawan	SKT	593.5/025/SKT/TDPM-2006	SDN 05 Pinjawan	APBD	Rp 70.704.383,75	SDN 05 Pinjawan
674	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	4.711	1982	KEC. SELIMBAU	SKT	May 25 2009 12:00AM	-	APBD	Rp 23.555.000,00	SDN 13 Sekula/ Penilaian berdasarkan NJOP
675	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	2.609	1982	Desa Boyan Tanjung	Hak Pakai	593.2/18/Pemdes/KM/ Pem	SDN 07 SUNGKIN	APBD	Rp 48.262.500,00	SDN 07 SUNGKIN
676	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	240	1982	Kec. Puring Kencana	SKT	145/18/DL/2017	SDN 2 Langau	Hibah	Rp 74.880.000,00	SDN 2 Langau/ Penilaian berdasarkan NJOP
677	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	5.600	1982	Dusun Semalah Jaya 1 Desa Semalah	SKT	593/10/DS-SML/PEM	SDN 12 Semalah	APBD	Rp 28.000.000,00	SDN 12 Semalah
678	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	7.828	1982	Dusun Langan, Desa Langan Baru	SKT	049/112/D-BU/K-EBU/SKT/2014	SDN 06 Apan	APBD	Rp 306.720.000,00	SDN 06 Apan
679	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	8.000	1982	Dusun Repun, Desa Martadana	SKT	593/177/21.2003/PEMDES-2006	SDN 10 Repun	APBD	Rp 28.000.000,00	SDN 10 Repun
680	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	1.980	1982	Dusun Penembur, Desa Nanga Boyan	SKT	594.3/115/KEC.BT/DE S-NB/IEKON	SDN 12 PENEMBUR	APBD	Rp 36.608.000,00	SDN 12 PENEMBUR
681	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	12.500	1982	5 Seluan	-	Dec 31 1982 12:00AM	-	APBD	Rp 62.500.000,00	SDN 10 Sungai Jaung II - Penilaian berdasarkan NJOP/
682	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0014	4.026	1982	Jl. Kampung, Dusun Kelampai, Desa Nanga Seriang	SKT	591.3/106/230/PEMDES NS-2014	SDN 09 Kelampai	APBD	Rp 5.250.000,00	SDN 09 Kelampai
683	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0017	2.500	1982	Dusun Tanjung Besar, Desa Parang	SKT	593.2/101/14/08/PEMDES/2017	SDN 03 Parang	APBD	Rp 12.500.000,00	SDN 03 Parang
684	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0021	1.750	1982	Teluk Barak	-	Dec 31 1982 12:00AM	-	APBD	Rp 8.750.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
685	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	13.640	1982	Jl. Sungai Kapuas, Dusun Tunas Baru, Desa Ujung Jambu	SKT	593.2/101/PEMDES/UB-2014	SDN 15 Ujung Jambu	APBD	Rp 50.750.000,00	SDN 15 Ujung Jambu
686	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0022	2.500	1982	JALAN TEMENGUNGUNG DALING	-	Dec 31 1982 12:00AM	SDN 28 KEDAMIN DARAT	APBD	Rp 2.745.600,00	SDN 28 KEDAMIN DARAT
687	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0023	28.000	1982	Siut	-	Dec 31 1982 12:00AM	-	APBD	Rp 140.000.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
688	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0024	192	1982	2 Melapi	SKT	Dec 31 1982 12:00AM	-	APBD	Rp 960.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
689	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0025	384	1982	3 Kedamin Hilir	-	Dec 31 1982 12:00AM	-	APBD	Rp 2.745.600,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
690	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0028	9.932	1982	SDN 13 LAUNG	-	Dec 31 1982 12:00AM	SDN 13 LAUNG	APBD	Rp 42.210.000,00	SDN 13 LAUNG
691	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0029	2.260	1982	Entipan Hilir	SKT	593/50/DS-ENT/PEM	SDN 07 Entipan Hilir	APBD	Rp 868.000,00	SDN 7 Entipan Hilir
692	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0030	2.500	1982	Jl. Poros, Desa Setunggul	SKT	594.1/103/SKPT/DS-STGL/PEM/IX/2022	SDN 11 Setunggul	APBD	Rp 4.190.000,00	SDN 11 Setunggul
693	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0031	5.910	1982	Jl. Kerapa, Desa Belimbing	SKT	422/07/UPT.K.SLU/SD N06/2015	SDN 06 Belimbing	APBD	Rp 2.430.000,00	SDN 06 Belimbing
694	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0033	1.326	1982	Desa Kerengas	SKT	593/104/D.KRS/PEM.2012	SDN 06 Kerengas	APBD	Rp 60.000.000,00	SDN 06 Kerengas

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
695	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0034	9.250	1982	Tanjung Kerja	-	Dec 31 1982 12:00AM	-	APBD	Rp	231.250.000,00	Tanah SDN No. 16 Tanjung Kerja/ Nilai dalam SPHMT
696	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	3.600	1983	Engkerengas	SKT	594.1/418/DS-NN/PEM	-	APBD	Rp	25.740.000,00	SDN 17 Engkerengas/ Penilaian berdasarkan NJOP
697	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	16.546	1983	Temau	SKT	Nov 11 2014 12:00AM	-	APBD	Rp	82.730.000,00	SDN 12 Temau/ Penilaian berdasarkan NJOP
698	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	3.672	1983	DUSUN SUKA RAMAI DESA HULU PENGKADAN	SKT	595/121/DES.HP/SEK DES	-SDN 06 SUKA RAMAI	APBD	Rp	18.000.000,00	SDN 6 Suka Ramai
699	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	1.386	1983	Nanga Betung Desa Riam Menggelai	SKT	08/pds/NB/IV/05	SDN 08 Nanga Betung	APBD	Rp	62.162.100,00	SDN 11 Landau Bunus - luas= 1.492 m2/
700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	2.500	1983	6 Segitak	-	Dec 31 1983 12:00AM	SDN 06 Segitak	APBD	Rp	8.750.000,00	SDN 06 Segitak
701	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	9.284	1983	1 Gudang Suai	SKT	140/40/PEMDES-JG/2014	SDN 27 Gudang Suai	APBD	Rp	12.000.000,00	SDN 14 Usaha Baru - Penilaian berdasarkan NJOP/
702	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	2.211	1983	DUSUN KELINAU JAYA DESA KANDUNG SULI	SKT	591.3/141/11/KS/PEM-2014	-SDN 11 KANDUNG SULI	APBD	Rp	13.125.000,00	SDN 5 Enturin - Penilaian berdasarkan NJOP/
703	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	721	1983	Jl. Pendidikan No. 44 Sukma	SKT	642004/PEMDES/NS/WSKT/2011	-SDN 09 Sukma	APBD	Rp	34.320.000,00	SDN 7 Teluk Aur - Luas = 30 x 65 /
704	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	30.000	1983	2 Keping	SKT	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	105.000.000,00	SDN 9 Nanga Yen - Penilaian berdasarkan NJOP/
705	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0014	189	1983	Upak Hilir	SKT	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	945.000,00	SDN 8 Piasak - Penilaian berdasarkan NJOP/
706	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0016	15.520	1983	Jl. Lintas, Desa Na. Sebitang	SKT	140/64/PEMDES C 2006	-SDN 08 Ribang Kadeng	APBD	Rp	200.000.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
707	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0017	426	1983	Dsn Sepan Padang, Desa Bahenap	SKT	421.1/205/UPT-K.KLS/SD.11/2015	-SDN 11 Sepan Padang	APBD	Rp	2.130.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
708	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	384	1983	Ekok Tambai	SKT	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	1.920.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
709	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0020	192	1983	4 Suai	SKT	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	960.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
710	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	7.500	1983	Geruguk	SKT	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	37.500.000,00	SDN 10 Gerayau - Penilaian berdasarkan NJOP/
711	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0021	5.160	1983	5 Pulau Sayat	SKT	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	25.800.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
712	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0022	192	1983	6 Sepan I / II	-	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	960.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
713	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0023	2.400	1983	7 Nanga Bungan	-	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	12.000.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
714	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0025	384	1983	5 Kedamin Hilir	-	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	2.745.600,00	Tanah Lain-lain - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
715	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0026	12.000	1983	1 Telutuk	SKT	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	60.000.000,00	Tanah Lain-lain - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
716	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0029	243	1983	1 Na. Menyebai	-	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	1.215.000,00	SDN 11 Na. Menyebai
717	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0030	6.404	1983	Dsn. Sumber Rejeki, Desa Lebak Najah	SKT	593.2/48/DES-IX/Pem-2007	SDN 12 Selimu	APBD	Rp	1.215.000,00	SDN 12 Selimu
718	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0031	1.430	1983	Dsn Tunas Permata, Desa Perjuk	SKT	422.2/25/PEM/TU-C/2006	-SDN 13 Perjuk	APBD	Rp	5.200.000,00	SDN 13 Perjuk
719	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0032	9.361	1983	Dsn. Lebak Lestari, Desa Lebak Najah	SKT	593.2/155/DLNH-IX/K.SLU/PEM.	-SDN 14 Lebak Najah	APBD	Rp	50.000.000,00	SDN 14 Lebak Najah
720	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0033	4.500	1983	Mantan Kenabak	SKT	593/105/PEM-2007	SDN 08 Mantan	APBD	Rp	24.960.000,00	SDN 08 Mantan
721	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0034	20.000	1983	Jl. Lapter Pangsuma	-	Dec 31 1983 12:00AM	-	APBD	Rp	143.000.000,00	SLTP Negeri 2 Putussibau
722	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0035	7.000	1983	Tanah Penyeluang	SKT	140/65/PEMDES-P/2017	SDN 10 Penyeluang	APBD	Rp	175.000.000,00	Tanah SDN No. 18 Tanah Penyeluang/ Nilai dalam SPHMT
723	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	10.336	1984	Tanjung Beruang	SKT	593.3/6/SKT/PEMDES-2006	SDN 19 Tanjung Beruang	APBD	Rp	51.680.000,00	SDN 19 Tanjung Beruang
724	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	4.015	1984	Pala Pintas	SKT	Dec 2 2014 12:00AM	-	APBD	Rp	20.075.000,00	SDN 20 Pala Pintas
725	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	6.300	1984	Jl. Pendidikan Dsn Usaha Baru	-	Jan 1 2014 12:00AM	-	APBD	Rp	45.045.000,00	SDN 14 Usaha Baru/ Penilaian berdasarkan NJOP

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
726	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	3.000	1984	DUSUN TIN TIN KEMANTAN DESA RIAM PANJANG	SKT	593/33/31/DES-RP/PEM	-SDN 05 TIN TIN KEMANTAN	APBD	Rp 17.500.000,00	SDN 5 Tin-tin Kemantan
727	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	2.000	1984	Na. Samalangit	SKT	593/185/DES.MTD/PEM	SDN 07 NANGA SEMELANGIT	APBD	Rp 10.000.000,00	SDN 07 Na Samalangit
728	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	8.000	1984	DUSUN SASAN LINTAS DESA SASAN	SKT	593/05/SKT/DS-SSN/PEM 2017	-SDN 13 SASAN	APBD	Rp 18.900.000,00	SDN 13 Sasan
729	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	10.500	1984	Jalan Pendidikan Nomor 1 Desa Nanga Jemah	SKT	04/08/2014	SDN 10 Nanga Jemah	APBD	Rp 20.020.000,00	SDN 10 Nanga Jemah
730	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0014	6.480	1984	Kelbang	-	Dec 31 1984 12:00AM	-	APBD	Rp 22.680.000,00	SDN 3 Ulak Pauk - Penilaian berdasarkan NJOP/
731	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	5.000	1984	5 Kerantik	-	Dec 31 1984 12:00AM	-	APBD	Rp 17.500.000,00	SDN 11 Tanjung Karang - Penilaian berdasarkan NJOP/
732	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0016	7.275	1984	Desa Nanga Lauk	SKT	593/2/11/SKT-NU/2014	SDN 08 Nanga Lauk	APBD	Rp 12.500.000,00	SDN 11 Nanga Tuan - Penilaian berdasarkan NJOP/
733	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0017	22.000	1984	2 Landau Ipoh	-	Dec 31 1984 12:00AM	-	APBD	Rp 110.000.000,00	SDN 15 Landau Mentail - Penilaian berdasarkan NJOP/
734	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	4.675	1984	Desa Rantau Bumbun	SKT	140/10/Pemdes/RB/2014	-SDN 13 Rantau Bumbun	APBD	Rp 23.375.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
735	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0019	3.780	1984	Jl. Lintas Senara Nanga Serian	-	Dec 31 1984 12:00AM	-	APBD	Rp 18.900.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
736	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0020	5.980	1984	0 Ujung Pinang	SKT	593/112/SK/2003	SDN 07 Ujung Pinang	APBD	Rp 29.904.000,00	Tanah Sekolah - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
737	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0021	2.000	1984	7 Nanga Lebuyan	-	Dec 31 1984 12:00AM	-	APBD	Rp 10.000.000,00	Tanah SDN No. 7 Sungai Uluk Palin - Nilai dalam SPHMT/
738	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0022	14.850	1984	Jl. Pendidikan, Desa Sungai Sena	SKT	594.1/088/DS.SS/PEM	-SDN 13 UPT I SILAT HILIR	APBD	Rp 2.700.000,00	SDN 13 UPT I Silat
739	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0023	33.625	1984	Jl. Poros, Desa Setunggul	SKT	594.1/101/DS-STGL/PEM	-SDN 14 UPT II SILAT HILIR	APBD	Rp 1.820.000,00	SDN 14 UPT II Silat
740	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0024	12.542	1984	Jl. Sekolah, Dsn. Rejosari II, Desa Pangeran	SKT	594.1/77/DS Pgrn/PEM	-SDN 15 UPT III SILAT HILIR	APBD	Rp 1.820.000,00	SDN 15 UPT III Silat
741	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0025	5.000	1984	Desa Nanga Dangkan	SKT	593.2/46/D.DKX/PEM DES/2016	SDN 2 Nanga Dangkan	APBD	Rp 2.025.000,00	SDN 2 Nanga Dangkan
742	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0026	1.000	1984	Desa Entebi	SKT	593/19/DES-XI/PEM	SDN 15 Gedabang	APBD	Rp 1.215.000,00	SDN 15 Gedabang
743	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0027	3.569	1984	Dsn Bersatu, Desa Nanga Ngeri	SKT	593.2/141/D-NNK.SLU/PEM-2022	SDN 16 Pelanjau	APBD	Rp 1.215.000,00	SDN 16 Pelanjau
744	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0028	12.396	1984	Negeri 1 Badau	-	Dec 31 1984 12:00AM	-	APBD	Rp 61.980.000,00	SLTP Negeri 1 Badau
745	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0029	2.622	1984	Jl.Pendidikan Dusun Jaya Laksana Nanga Embaloh	SKT	593.2/26/SKT-NE/2013	SDN 1 Na Embaloh	APBD	Rp 82.436.000,00	SDN 1 Na Embaloh
746	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0030	40.000	1984	Desa Batu Lintang	SKT	145.08/63/D-BLK.EBU/II/2014	SDN 13 Pulau-	APBD	Rp 286.000.000,00	SDN 13 Pulau/ Penilaian berdasarkan NJOP
747	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	608	1985		Hak Pakai	Nov 5 1992 12:00AM	-	APBD	Rp 8.512.000,00	Tanah
748	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	4.900	1985	Dusun Sekubah	-	Sep 5 2007 12:00AM	-	APBD	Rp 24.500.000,00	SDN 15 Sekubah/ Penilaian berdasarkan NJOP
749	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	5.200	1985	Dsn. Landau Mentail Benit Desa Na. Boyan	SKT	594.3/117/KEC-BT/DES-NB/KEON	-SDN 15 Landau Mentail	APBD	Rp 37.180.000,00	SDN 15 Landau Mentail/ Penilaian berdasarkan NJOP
750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	3.200	1985	Kec. Puring Kencana	-	Jan 12 2014 12:00AM	SDN 6 KANTUK BUNUT	Hibah	Rp 16.000.000,00	SDN 6 Kantuk Bunut/ Penilaian berdasarkan NJOP
751	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	3.000	1985	Laja Sadang	-	Nov 27 2014 12:00AM	-	APBD	Rp 15.000.000,00	SDN 10 Seridan / Penilaian berdasarkan NJOP
752	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	2.800	1985	Kec. Puring Kencana	SKT	593/01/PEMDES/IMP-2017	SDN 05 Kedang	Hibah	Rp 14.000.000,00	SDN 5 Kedang/ Penilaian berdasarkan NJOP
753	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	3.680	1985	Dusun Kejering Desa Kerengas Kec Selimbau	SKT	593/46/DS-EKS/PEM	-SDN 16 Kejering	APBD	Rp 18.400.000,00	SDN 16 Kejering/ Penilaian berdasarkan NJOP
754	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	264	1985	Kec. Puring Kencana	SKT	549/24/DS.SM/PEMDES/IX/2014	SDN 3 Sungai Mawang	Hibah	Rp 40.000.000,00	SDN 3 Sungai Mawang/ Penilaian berdasarkan NJOP
755	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	4.200	1985	Desa Saujung Giling Manik	SKT	05/X/WSGM/PEM-DES/2005	-SDN 10 Nanga Sungai	APBD	Rp 30.030.000,00	SDN 10 nanga Sungai/ Penilaian berdasarkan NJOP
756	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	378	1985	Pulau Majang	-	Dec 31 1985 12:00AM	SDN 02 Pulau Majang	APBD	Rp 1.890.000,00	SDN 2 Pulau Majang
757	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0016	189	1985	Deesa Mensiau	SKT	140/TI/II/PEMDES/2004	-SDN 11 Kelawik	APBD	Rp 661.500,00	SDN 11 Kelawik

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0018	3.198	1985	Desa Manua Sadap	SKT	593/17/K-EBU/PEM	SDN 15 Menua Sadap	APBD	Rp 19.360.000,00	SDN 15 Menua Sadap
759	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0019	8.000	1985	DUSUN RANTAU DUATA DESA BONTAI	SKT	E/16/P-6/2007	-SDN 07 BONTAI	APBD	Rp 12.250.000,00	SDN 11 Paat - Penilaian berdasarkan NJOP/
760	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0020	4.100	1985	JLN LINTAS SENARA JONGKONG DESA NANGA SERIAN	SKT	593.2.21/18/230/PEM-DES-NS/2011	-SDN 08 NANGA SERIAN	APBD	Rp 28.000.000,00	SDN 12 Temau - Penilaian berdasarkan NJOP/
761	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0021	2.462	1985	DUSUN TELUK SAKA DESAJPNKONG KIRI HULU	SKT	593.2/435/103/EKON-2014	SDN 14 SAKA	APBD	Rp 30.625.000,00	SDN 14 SAKA
762	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0023	126	1985	semirah	SKT	Dec 31 1985 12:00AM	-	APBD	Rp 630.000,00	SDN 16 Kejereng - Penilaian berdasarkan NJOP/
763	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0024	1.500	1985	Dusun Baberuk, Desa Bahenap, Kecamatan Kalis	SKT	593.2/01.a/KEC.KLS/P EM	SDN 14 Baberuk	APBD	Rp 7.500.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
764	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0025	128	1985	9 Nanga Balang	-	Dec 31 1985 12:00AM	-	APBD	Rp 640.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
765	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0027	10.000	1985	Dusun Lubuk Mantuk, Desa Nanga Tubuk	SKT	140/47/Pemdes-2006	SDN 12 Lubuk Mantuk	APBD	Rp 10.000.000,00	SDN 21 Lubuk Mantuk
766	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0029	2.355	1985	Nanga Kenepai	SKT	593/47/DS-NK/PEM 2021	SDN 04 Nanga Kenepai	APBD	Rp 49.000.000,00	Tanah Sekolah - 032/1.424/SETDA/UM-A/
767	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0030	3.500	1985	16 Salat	-	594.1/197/DS.PR/PE M-2021	-	APBD	Rp 980.000,00	SDN 16 Salat
768	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0031	2.053	1985	Jl. Lintas Selatan, Dsn. Jeleum, Desa Miau Merah	SKT	594.1/025/DS.MM/PE M.2013	-SDN 18 UPT IV SILAT	APBD	Rp 1.820.000,00	SDN 18 UPT IV Silat
769	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0032	364	1985	9 UPT V Silat	-	Dec 31 1985 12:00AM	-	APBD	Rp 1.820.000,00	SDN 19 UPT V Silat
770	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0033	1.000	1985	Dsn. Nanga Pengga, Desa Landau Badai	SKT	593.2/148/DES-IV/PEM	SDN 17 Nanga Pengga	APBD	Rp 12.000.000,00	SDN 17 Nanga Pengga
771	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0034	4.686	1985	Dsn. Bangan Baru, Desa Riam tapang	SKT	543.2/305/O-RT/PEM	SDN 18 Bangan Baru	APBD	Rp 810.000,00	SDN 18 Bangan Baru
772	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0035	1.470	1985	Dsn Na. Selangkai, Desa Selangkai	SKT	543.2/25/D-SLK/KSU/PEM/2017	SDN 19 Selangkai	APBD	Rp 810.000,00	SDN 19 Selangkai
773	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0036	2.775	1985	Jalan Piang Banang Nanga Embaloh	SKT	421.2/44/SDP-A/2006	SDN 02 Nanga Embaloh	APBD	Rp 87.246.000,00	Dulu SDN 23 Nanga Embaloh sekarang SDN 02 Nanga Embaloh
774	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	5.000	1986	Sungai Jaung	SKT	Feb 20 2014 12:00AM	-	Hibah	Rp 35.750.000,00	SDN 16 Sungai Jaung/ Penilaian berdasarkan NJOP
775	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	5.670	1986	Desa Nanga Yen Lintas Embau KM 10 Na. Yen	-	Dec 3 2014 12:00AM	-	APBD	Rp 28.350.000,00	SDN 9 Nanga Yen/ Penilaian berdasarkan NJOP
776	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	162	1986	0 Nanga Salin	-	Dec 31 1986 12:00AM	-	APBD	Rp 810.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
777	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	7.200	1986	1 Nanga Lapung	-	Dec 31 1986 12:00AM	-	APBD	Rp 36.000.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
778	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	6.278	1986	Jl. Lintas Selatan, Dsn. Sekar Jaya, Desa Seberu	SKT	594.1/38/DS.SBR/PEM	-SDN 21 Seberu	APBD	Rp 840.000,00	SDN 21 Seberu
779	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	5.820	1986	2 Beran VII	-	594.1/49/DP/PEM-2021	SDN 22 Beran III	APBD	Rp 560.000,00	SDN 22 Beran III
780	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	6.600	1986	0 Nanga Suhaid	-	Dec 31 1986 12:00AM	-	APBD	Rp 33.000.000,00	SDN 10 Nanga Suhaid
781	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0013	2.074	1986	Jln Lintas Belatung Lama Dea Belatung	SKT	593.2/113/SKT-BL/2014	SDN 10 Sengkuang Kuning	Hibah	Rp 10.370.000,00	SDN 10 Sengkuang Kuning
782	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	126	1987	Empaik	-	Dec 31 1987 12:00AM	-	APBD	Rp 630.000,00	SDN 9 Empaik
783	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	5.400	1987	Simpang Boyan Nanga Sangan	SKT	593.2/26/Pemdes NS/PEM	-SDN 06 Nanga Sangan	APBD	Rp 34.320.000,00	SDN 6 Nanga Sangan
784	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	1.890	1987	Teluk Sindur	Hak Pakai	140/525/Pem-D/2004	SDN 01 Teluk Sindur	APBD	Rp 9.450.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014/
785	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	6.804	1987	Dusun Nanga Kenelang, Desa Laut Tawang	SKT	No : 593/163/Pem-2006	SDN 05 Nanga Kenelang	APBD	Rp 1.620.000,00	SDN 05 Nanga Kenelang
786	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	3.000	1988	Sempedik Sarai	SKT	593/110/DS-JH/Pem.2014	SDN 10 Jongkong Sarai	APBD	Rp 1.375.000,00	SDN 10 Jongkong sarai
787	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	5.528	1992	Dusun Perdah Desa Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir	SKT	020/SKT/Pemdes/1990	SDN 08 Nanga Bunut	APBD	Rp 39.521.625,00	SDN 08 Nanga Bunut
788	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	4.500	1993	Desa Tanjung Karang, Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	140/464/DES-TK/2015	SDN 11 Tanjung Karang	Hibah	Rp 22.500.000,00	SDN 11 Tanjung Karang/ Penilaian berdasarkan NJOP
789	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	4.050	1993	Dusun Setia Usaha, Desa Sungai Sena	SKT	594.1/40/DS.SS/AGR	SDN 23 Sungai Sena	APBD	Rp 480.000,00	SDN 23 Sei Sena

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
790	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	10.000	1994	Dusun Lubuk Guntur Desa Vega	SKT	593/49/DS-VG/PEM	SDN 18 Vega	APBD	Rp 50.000.000,00	SDN 18 Vega
791	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	22.600	1994	Desa Nanga Payang	SKT	593.3/67/PEM/DS-NP/2015	SDN 13 Nanga Payang	APBD	Rp 15.750.000,00	SDN 13 Nanga Payang
792	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	16.650	1994	Dusun Landau Kaloi Desa Nanga Dua	-	Dec 31 1994 12:00AM	SDN 14 Landau Kaloi	APBD	Rp 12.250.000,00	SDN 14 Landau Kaloi
793	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	10.125	1994	Dusun Pala Tengah, Desa Pala Kota	SKT	593/109/VIII/Pem-2006	SDN 14 Pala Kota	APBD	Rp 50.000.000,00	SDN 14 Pala Kota
794	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	8.455	1995	7 Pala Pulau	SKT	Dec 31 1995 12:00AM	SDN 17 Pala Pulau	APBD	Rp 84.550.000,00	Tanah Pemda - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
795	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	4.560	1996	Desa Temparau	SKT	593/20/DS-TMP/PEM	SDN 19 Tempurau	HIBAH	Rp 22.800.000,00	SDN 19 Tempurau
796	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	19.920	1997	Negeri 3 Selimbau	Hak Pakai	Aug 26 1997 12:00AM	-	APBD	Rp 69.720.000,00	SLTP Negeri 3 Selimbau
797	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	19.800	1997	Negeri 2 Boyan tanju	Hak Pakai	Aug 26 1997 12:00AM	-	APBD	Rp 99.000.000,00	SLTP Negeri 2 Boyan tanjung
798	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	5.074	1997	DUSUN SRI DATANG DESA KARYA BARU	SKT	591.3/86/13/KB/PEMD ES-2014	SDN 10 Nanga Temenang	APBD	Rp 20.300.000,00	SDN 10 Nanga Temenang
799	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	3.944	1995	Semedang	SKT	594.3/20/SKT/K.MTB/DS.TJI	SDN 09 SUMEDANG	APBD	Rp 19.720.000,00	SDN 09 SUMEDANG
800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0009	384	1997	Kedamin	-	Dec 31 1997 12:00AM	-	APBD	Rp 1.920.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
801	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0010	3.250	1997	8 Kedamin Darat	-	Dec 31 1997 12:00AM	-	APBD	Rp 23.237.500,00	Tanah Lain-lain - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
802	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0011	3.000	1997	6 Nanga Ubat	-	Dec 31 1997 12:00AM	-	APBD	Rp 15.000.000,00	Tanah Pemda - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
803	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0012	189	1997	6 TSM Engkaras	-	Dec 31 1997 12:00AM	-	APBD	Rp 945.000,00	SDN 26 TSM Engkaras
804	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	1.500	1998	-	-	Dec 31 1998 12:00AM	-	APBD	Rp 5.250.000,00	SDN 14 Buak Mau UPT XI
805	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	2.640	1998	Dusun Sulang Desa Marta dana	SKT	593/451/Des.MTD/Pe m-2008	SDN 15 Sulang	APBD	Rp 644.000,00	SDN 15 Sulang
806	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	10.950	1998	Dusun Tanjung Kapuas Desa Ujung Pandang	SKT	SPPT 001	SDN 14 Tanjung Kapuas	APBD	Rp 2.788.500,00	SDN 14 Tanjung Kapuas
807	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	192	1998	1 Tanjung Lokan	SKT	Dec 31 1998 12:00AM	-	APBD	Rp 960.000,00	Tanah Rumah Dinas - Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl. 24 Nop 2014/
808	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0008	5.000	1998	Nanga Bian	SKT	593/72/DS - TA/PEM	SDN 9 Nanga Bian	APBD	Rp 17.500.000,00	SDN 9 Nanga Bian
809	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	1.950	1999	Teluk Aur	SKT	593.2/19/Pedes-TA/2011	SDN 06 Teluk Aur	APBD	Rp 40.635.000,00	SDN 06 Teluk Aur
810	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	22.500	1999	JLN SUNGAI KAPUAS DUSUN MENSIPANG DESA UJUNG JAMBU	SKT	593.2/102/PEMDEWS/UJB-2014	SDN 17 MENSIPANG	APBD	Rp 18.900.000,00	SDN 17 MENSIPANG
811	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	281	2000	Dusun Pangeran Desa Piasak	SKT	513.2/34/EKON/2004	SDN 08 PIASAK	APBD	Rp 994.375,00	SDN 08 PIASAK
812	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	4.800	2000	Dusun Kedaung 2 Desa Nibung	SKT	593/20/DS-NBG/2011	SDN 07 NIBUNG	APBD	Rp 16.800.000,00	SDN 07 NIBUNG
813	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	3.331	2000	LINTAS UTARA BATU LINTANG DESA BATU LINTANG	-	140/133/PEMDES/D-BLXI/2021	SMPN 2 SATU ATAP EMBALOH HULU	APBD	Rp 12.500.000,00	SMPN 2 SATU ATAP EMBALOH HULU
814	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	10.228	2000	Dsn. Sungai Raya, Desa Bongkong	SKT	594.1/233/DS/RB/HPE M/2022	SDN 27 Keranji	APBD	Rp 480.000,00	SDN 27 Keranjik
815	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0007	5.000	2000	Jl. Lintas Tawang, Dsn. Na. Empanang, Desa Laut Tawang	SKT	593/165/D.LT/Pem.	SDN 11 Na. Empanang dan SLTP Satu Atap	APBD	Rp 810.000,00	SDN 11 Na. Empanang dan SLTP Satu Atap
816	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	8.500	2001	Jln. Sumpak Layang, Desa Setulang	SKT	421.2/97/UPT.K.BTL/SDN/10/2014	SDN 10 Libung	APBD	Rp 850.500,00	SDN 10 Libung
817	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	896	2001	24 Rumbih	-	Dec 31 2001 12:00AM	SDN 24 Rumbih	APBD	Rp 560.000,00	SDN 24 Rumbih
818	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	20.000	2001	Metebah	-	Dec 31 2001 12:00AM	-	APBD	Rp 67.445.000,00	Tanah Sekolah/ 032/1.424/SETDA/UM-A
819	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	441	2002	Nanga Kantuk	SKT	Dec 31 2002 12:00AM	-	APBD	Rp 2.205.000,00	SDN 6 Selimbau - Penilaian berdasarkan NJOP/
820	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	5.000	2002	Danau Mawan	-	Dec 31 2002 12:00AM	-	APBD	Rp 17.500.000,00	Tanah SDN No. 5 Na. Nyabau - Nilai dalam SPHMT/
821	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	12.500	2002	Entipan Hulu	SKT	593.2/34/DS-ENT/SKT/2022	SDN 8 Entipan Hulu	APBD	Rp 766.500,00	SDN 8 Entipan Hulu
822	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	5.544	2002	Bongkong	-	Dec 31 2002 12:00AM	SDN 7 Bongkong	APBD	Rp 980.000,00	SDN 7 Bongkong
823	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	4.900	2003	Nanga Empangau	SKT	SPPT 01	SDN 03 Empangau	APBD	Rp 24.500.000,00	SDN 03 Empangau
824	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	13.500	2003	sebangkan	-	Dec 31 2003 12:00AM	-	APBD	Rp 67.500.000,00	SDN 15 Sekubah - Penilaian berdasarkan NJOP/
825	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	6.000	2003	Jl. Sauk Atas, Desa Seberu, Silat Hilir	SKT	594.1/131/DS.SBR/PE M-2022	SDN 25 Sauk Atas	APBD	Rp 525.000,00	SDN 25 Sauk Atas
826	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	8.951	2003	N.a Sambus	SKT	595.3/93/D.NS/2011	SDN 10 Na. Sambus	APBD	Rp 223.778.125,00	Tanah SDN No. 10 Na. Sambus/ Nilai dalam SPHMT
827	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	00001	27.000	2004	Kenepal Komplek, Semitau	Hak Pakai	593/146/KNP/PEM	SMPN 03 Satap Semitau	APBD	Rp 20.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Nomor BA: 032/1648/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
828	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	00035	1.454	2004	Gudang Hilir, Selimbau	Hak Pakai		Diduga Pembangunan TK Gudang Hilir	APBD	Rp 12.300.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Nomor BA: 032/1648/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
829	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0004	18.600	2004	Jalan Lintas Saltan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir	Hak Pakai	Dec 22 1998 12:00AM	SMPN 3 SILAT HILIR	APBD	Rp 30.000.000,00	SMPN 3 SILAT HILIR
830	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0005	28.496	2004	Kedamin Hulu	Hak Pakai	Aug 21 2000 12:00AM	-	APBD	Rp 284.960.000,00	Tanah Sekolah/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
831	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0006	1.660	2004	Sebindang	Hak Pakai	Jan 24 2001 12:00AM	-	APBD	Rp 5.810.000,00	Tanah Sekolah/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
832	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0015	4.112	2004		Hak Pakai	Apr 16 2002 12:00AM	-	APBD	Rp 20.560.000,00	Tanah Sekolah/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
833	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0019	6.895	2004	Seriang, Badau	Hak Pakai	094.11/45/Pem-Die/TJM	SDN 10 TANGIT I	APBD	Rp 24.132.500,00	SDN 10 TANGIT I
834	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0025	3.600	2004	Putussibau Selatan	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 18.000.000,00	TK Negeri Putussibau
835	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0026	3.964	2004	Dusun Ngaung Keruh, Desa Labian	SKT	593/89/DS.LBN/PEM-2017	SDN 12 LABIAN	APBD	Rp 567.000,00	SDN 12 LABIAN
836	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0027	3.694	2004	Silat Hilir	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 18.470.000,00	Tanah Sekolah/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
837	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0029	857	2004	Jl Merdeka	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 30.852.000,00	Tanah Sekolah/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
838	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0030	15.000	2004	Puring Kecanian	-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 107.250.000,00	Tanah Sekolah/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
839	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0031	32.466	2004		-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 487.000.000,00	Sarana Pendidikan/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
840	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0032	65.644	2004		-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 984.666.000,00	Sarana Pendidikan/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
841	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0033	9.386	2004		-	Dec 31 2004 12:00AM	-	APBD	Rp 140.790.000,00	Sarana Pendidikan/ Mutasi dari SETDA Dasar BASTB No. 020/360/Setda/Um-B tgl..24 Nop 2014
842	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0034	5.437	2004	Trans Na. Suruk	SKT	593/17/DS-NS/2012	Dinas Pendidikan	APBD	Rp 32.078.300,00	SDN 18 Trans Na. Suruk
843	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	000002	84.000	2005	Gudang Hilir, Selimbau	SKT	593/129/DS-GHI/PEM	Bangunan SD Suka Maju	APBD	Rp 87.935.000,00	Mutasi ke Dinas Pendidikan (Nomor BA: 032/970/SETDA/UM-A) Tanggal 24 Juni 2020
844	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	250	2006	Dusun Simpang Empat Desa Nanga Suruk	SKT	593/07/SKT/DS-NS/PEM	SDN 19 Simpang Empat SURUK	Hibah	Rp 12.500.000,00	SDN 19 Simpang Empat Nanga Suruk
845	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0002	5.400	2014	Pintas Temeru	SKT	Dec 1 2014 12:00AM	-	APBD	Rp 38.610.000,00	SDN 14 Pintas Temeru / Penilaian berdasarkan NJOP
846	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0001	-	2015	-	-	Dec 31 2015 12:00AM	-	APBD	Rp 143.115.000,00	Tanah
847	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	000001	51.850	1994	Kelling Semulung, Embalah Hilir	SKT	(SKT)593.2/121/SKT-KLS(2015)	Sekolah Dasar 03	APBD	Rp 259.250.000,00	Mutasi ke Dinas Pendidikan (Nomor BA: 032/970/SETDA/UM-A) Tanggal 24 Juni 2020
848	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	000002	9.800	1994	Lawik, Embalah Hilir	SKT	(593.2/081/SKT-LK/2014)	SDN No. 6 Desa Lawik	APBD	Rp 49.000.000,00	Mutasi ke Dinas Pendidikan (Nomor BA: 032/970/SETDA/UM-A) Tanggal 24 Juni 2020
849	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00001	5.152	2004	Kenerak, Semitau	Hak Pakai	593/190/Kds/Ix/2012		APBD	Rp 27.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Nomor BA: 032/1648/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
850	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00002	11.500	2004	Nanga Seberuang, Semitau	Hak Pakai	593/146/DS-NSB/PEM/2012		APBD	Rp 27.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Nomor BA: 032/1648/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
851	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00001	1.750	2005	Sejiram, Seberuang	Hak Pakai		Tanah Bekas Perumahan Dinas Sebelah TK	APBD	Rp 110.000.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Nomor BA: 032/1648/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
852	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0001	-	2004	Jalan S Parman, Putussibau	Hak Milik	-	TANAH Eks LLASD	APBD	Rp 5.000,00	Tanah SDF
853	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0002	-	2004	Jalan S Parman, Putussibau	Hak Milik	-	TANAH POS JAGA	APBD	Rp 5.000,00	Tanah SDF
854	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0003	-	2004	Jalan S Parman, Putussibau	Hak Milik	-	TANAH Eks LLASD	APBD	Rp 5.000,00	Tanah SDF
855	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0004	-	2004	Jalan S Parman, Putussibau	Hak Milik	-	TANAH POS JAGA	APBD	Rp 5.000,00	Tanah SDF

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
856	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Terminal Darat	0002	9.800	2002	Jalan Lintas Selatan, Kelurahan Keadamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan	SKT	593/144/KEL-KDU/PEMKES/2017	POS KEDAMIN	APBD	Rp 5.000.000,00	Tanah Terminal Keadamin
857	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	0001	240	2002	Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir	SKT	594.1/047/DS	POS SIMPANG SILAT	APBD	Rp 5.000.000,00	Tanah Pos Simpang Silat
858	DINAS PERIKAMAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	17.000	2012	Silat Hilir Desa Rumbih	-	594.1/02/DS.Bkg/Pem	Kolam Percontohan	APBD	Rp 309.400.000,00	Hibah dari Setda (2017)
859	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	995	1957	JL.MERANTI KEC. PUTUSSIBAU UTARA	Hak Milik	-	0	APBD	Rp 19.900.000,00	
860	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	2.000	1981	JL.KOM.YOS. SUDARSO KEC. PUTUSSIBAU UTARA	Hak Milik	-	0	APBD	Rp 40.000.000,00	
861	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	3.000	1981	SAWAI KEC.PUTUSSIBAU UTARA	Hak Milik	-	0	APBD	Rp 60.000.000,00	
862	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	416	1982	JL. KOM. YOS. SUDARSO KEC. PUTUSSIBAU UTARA	Hak Milik	-	0	APBD	Rp 8.320.000,00	
863	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	25.000	1996	NANGA TEPUAI KEC. HULU GURUNG	Hak Milik	-	KANTOR BPP/RUMAH PPL	APBD	Rp 178.750.000,00	
864	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	20.000	1997	PENELAT KEC. JONGKONG	Hak Milik	-	KANTOR BPP	APBD	Rp 100.000.000,00	
865	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	4.650	2010	SELIMBAU KEC. SELIMBAU	Hak Milik	No. 593/168/DS-GHU/PEM & No. 593/169/DS-GHU/PEM	Tanah Sarana Umum Lokasi Balai Penyuluhan	APBD	Rp 14.820.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah
866	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	20.000	2011	Kec. Pengkadan	Hak Milik	SKT No. 593/103/DES.MTD/PEM	Tanah Lokasi BP3K Kec. Pengkadan	APBD	Rp 196.940.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah
867	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00002	10.000	2012	Desa Seluan Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	-	Tanah Untuk BP3K Desa Seluan (An. Yuliana Haran)	APBD	Rp 150.000.000,00	Mutasi ke Dinas Pertanian dan Pangan no BA: 032/1645/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
868	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00003	10.000	2012	Desa Seluan Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	-	Tanah Untuk BP3K Desa Seluan (An. Yuliana Haran)	APBD	Rp 150.000.000,00	Mutasi ke Dinas Pertanian dan Pangan no BA: 032/1645/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
869	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	36.384	2013	Kec. Boyan Tanjung	Hak Milik	SKT No. 422/PEMDES-BT/SK17/2009	Kantor BPP Boyan Tanjung	APBD	Rp 170.000.000,00	
870	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	13.110	2016	Lintas Timur Dusun Sauwe Melapi Putussibau Selatan	Hak Milik	SPL no. 520.5/L.356/DISTAN/ENY-A	Tanah Kosong untuk kantor BPP	APBD	Rp 113.758.147,90	
871	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kandang Hewan	00001	787	2012	Kec. Putussibau Selatan	Hak Pakai	-	Tanah untuk Rumah Potong Hewan Kec. Pts Selatan (An. Benny Irawan)	APBD	Rp 16.205.904,00	Mutasi ke Dinas Pertanian dan Pangan no BA: 032/1645/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
872	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Kebun Induk	00001	20.000	2012	Kec. Bunut Hilir	Hak Pakai	-	Tanah untuk Balai Penyuluhan Pertanian (An. Titi Sumarni)	APBD	Rp 284.000.000,00	Mutasi ke Dinas Pertanian dan Pangan no BA: 032/1645/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019
873	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Usaha	0001	15.000	2001	KELANSIN KEC. MENTEBAH	Hak Milik	-	BALAI BENIH INDUK	APBD	Rp 75.000.000,00	
874	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah dan Bangunan Pertanian	0001	240.000	2001	MENTEBAH KEC. MENTEBAH	Hak Milik	-	RANCH SAPI	APBD	Rp 1.200.000.000,00	
875	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah dan Bangunan Pertanian	0002	171.748	2001	TEKUDAK KEC. KALIS	Hak Milik	-	0	APBD	Rp 100.000.000,00	
876	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Terminal Darat	0002	1.200	2001	Jalan Lintas Utara Kec. Badau	-	-	Terminal	APBD	Rp 4.200.000,00	Terminal Bdau (Mutasi dari setda 2015)
877	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	50.000	1959	-	-	-	Kec.Badau	HIBAH	Rp 500.000.000,00	Hibah dari panglima Belayung
878	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	870	2003	Jalan Panglima Belayong Desa Janting Kec. Badau	-	-	Desa Janting	APBD	Rp 10.000.000,00	Kantor Desa Janting
879	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	5.200	2003	Jalan Bukit Perak Kec. Badau	-	-	Camat Badau	APBD	Rp 37.180.000,00	Tanah Rumah dinas (Mutasi dari setda 2015)
880	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	17.950	2004	Jalan Tarmin Kec. Badau	-	-	Kantor Kecamatan badau	APBD	Rp 62.825.000,00	Tanah Rumah Dinas (Mutasi dari setda 2015)
881	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	4.383	2005	Jalan Bukit Perak No. 07 Nanga Badau	-	-	Kantor kecamatan Badau	APBD	Rp 98.892.500,00	Tanah Kantor (Mutasi dari setda 2015)
882	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	144	2008	Jalan Lintas Utara Desa Kekurak Kec. Badau	-	-	Desa Kekurak Kec.Badau	APBD	Rp 3.000.000,00	Kantor Desa Kekurak
883	KECAMATAN BADAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	30.000	2008	Jalan Letnan Zakaria No. 65	-	-	Desa Sebindang Kec. Badau	APBD	Rp 10.000.000,00	Kantor Desa Sebindang
884	KECAMATAN BATANG LUPAR	Tanah Bangunan Pasar	0001	-	1974	Kecamatan Batang Lupar	Hak Pakai	-	Tanah Pasar	-	Rp 22.000.000,00	Hibah
885	KECAMATAN BATANG LUPAR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	2.625	2004	Kecamatan Batang Lupar	Hak Pakai	-	Kecamatan Batang Lupar	-	Rp 9.187.500,00	-
886	KECAMATAN BATANG LUPAR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	875	2004	Kecamatan Batang Lupar	Hak Pakai	-	Kecamatan Batang Lupar	-	Rp 3.062.500,00	-
887	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	15.000	1999	JL. LINTAS SELATAN KM. 83 MUJAN	-	SKT 593.2/PEMDES.MJ/PEM	KANTOR CAMAT	APBD	Rp 1.692.000.000,00	PENILIAN BMD
888	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	22.754	2006	JL. LINTAS KM.88 MUJAN	-	893.83/519/KEC.BT.PEM	KANTOR CAMAT BOYAN TANJUNG	APBD	Rp 5.850.000,00	PENILAIAN BMD
889	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0001	2.469	2004	Jl. Beringin Bunut Hilir	Hak Milik	-	Digunakan Untuk Bangunan Gedung Kehutan,Rumah Dinas Sekcam,Rumah Dinas Kepala Sekolah SMA Negeri dan Gedung Dharma Wanita	APBD	Rp 34.072.000,00	Kecamatan
890	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Pasar	0001	2.842	2004	Jl Niaga Bunut Hilir	SKT	593.2/49/PEMDES-BHR/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Gedung Pasar Infres,Gedung Serbaguna dan Gedung Bumdes Sejuta warna	APBD	Rp 33.414.000,00	Digunakan Untuk Bangunan Gedung Pasar Infres,Gedung Serbaguna dan Gedung Bumdes Sejuta warna
891	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	120	1970	DESA EMPANGAU	SKT	593.2/104/PEMDES-EM/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Kantor Desa Empangau	Hibah	Rp 1.500.000,00	TANAH KANTOR DESA EMPANGAU]

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
892	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	120	1986	JL. ALFALAH DESA BUNUT HULU	SKT	593.2/93/PEMDES-BH/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Gedung PKK Desa Bunut Hulu	APBD	Rp 858.000,00	TANAH GEDUNG PKK
893	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	192	1990	DESA TELUK AUR	SKT	593.2/130/PEMDES-TA/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Gedung Serbaguna Dusun Puring	APBD	Rp 1.098.000,00	UNTUK GEDUNG SERBA GUNA DUSUN PURING
894	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	132	1997	DESA UJUNG PANDANG	Hak Milik	593.2/10/PEMDES-UP/PEM	Digunakan untuk Bangunan Kantor Desa	APBD	Rp 3.000.000,00	KANTORDESA DI DUSUN KUBU
895	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	200	1998	DESA BUNUT HULU	Hak Milik	593.2/83/PEMDES-BH/PEM	Tanah Kosong	APBD	Rp 143.000.000,00	TANAH KAS DESA DANAU LIPAT
896	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	321	2004	Dusun Tanjung Bunga Desa Tembang	Hak Milik	593.2/321/PEMDES-TB/PEM	Digunakan Untuk Gedung Balai Pertemuan Desa	APBD	Rp 6.375.000,00	Dusun Tanjung Bunga Desa Tembang Digunakan Untuk Gedung Balai Pertemuan Desa
897	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	440	2007	JL. SOEKARNO HATTA DESA BUNUT HULU	Hak Milik	593.2/97/PEMDES-BH/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Kantor Desa Bunut Hulu	APBD	Rp 2.500.000,00	TANAH KANTOR DESA
898	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	547	2008	Jl.Pendidikan Dusun Dilaga Desa Bunut Hilir	SKT	593.2/46/PEMDES-BHR/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Kantor Desa dan Balai Pertemuan Desa Bunut Hilir	APBD	Rp 4.000.000,00	TANAH KANTOR DESA
899	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	200	2008	DUSUN SIAWAN DESA NANGA TUAN	SKT	593.2/67/PEMDES-NI/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Kantor Desa Nanga Tuan	APBD	Rp 5.000.000,00	TANAH KANTOR DESA NANGA TUAN DSN SIAWAN
900	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0003	528	2008	JL. SOEKARNO HATTA DESA BUNUT HULU	SKT	593.2/98/PEMDES-BH/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Gedung Serbaguna	APBD	Rp 6.500.000,00	TANAH KAS DESA UTK GEDUNG DESA
901	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0004	112	2008	DESA TELUK AUR	SKT	593.2/040/PEMDES-TA/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Kantor Desa Teluk Aur	APBD	Rp 12.000.000,00	TANAH KANTOR DESA DI DUSUN PURING
902	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0005	360	2008	JL. EDI RUSLI NO. 56 DSN KARYA BHAKTI DESA BUNUT TENGAH	Hak Milik	593.2/96/PEMDES-BT/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Kantor Desa Bunut Tengah	APBD	Rp 16.000.000,00	KANTOR DESA KARYA BHAKTI
903	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0006	50	2008	DESA TELUK AUR	SKT	593.2/131/PEMDES-TA/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Balai Adat Dusun Jaung I	APBD	Rp 286.000,00	UMAH ADAT DUSUN JAUNG I
904	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	198	2009	JL. SOEKARNO HATTA DESA BUNUT HULU	SKT	593.2/99/PEMDES-BH/PEM	Tanah Kosong	APBD	Rp 12.000.000,00	TANAH KAS DESA
905	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	2.070	2009	JALAN ALFALAH DESA BUNUT HULU	Hak Milik	593.2/91/PEMDES-BH/PEM	Digunakan Untuk Tempat Pemakaman Umum Muslim Desa Bunut Hulu	APBD	Rp 16.000.000,00	TANAH KAS DESA BUNUT HULU
906	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0003	400	2009	JL LINTAS SELATAN DESA BUNUT HULU	SKT	593.2/96/PEMDES-BH/PEM	Sebagian Tanah sudah Digunakan Untuk Bangunan Gedung Pertanian	APBD	Rp 286.000.000,00	TANAH KAS DESA Sebagian Tanah sudah Digunakan Untuk Bangunan Gedung Pertanian
907	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	110	2010	DESA TEMBANG	SKT	593.2/107/PEMDES-UP/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Kantor Desa Ujung Pandang	APBD	Rp 3.000.000,00	BALAI PERTEMUAN DUSUN BERINGIN
908	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	0001	950	2004	Dusun Tanjung Bunga Desa Tembang	SKT	593.2/321/PEMDES-TB/PEM	Digunakan Untuk Gedung Balai Pertemuan Desa	APBD	Rp 6.792.500,00	TANAH BALAI DESA
909	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	0001	5.000	1992	DUSUN SIAWAN DESA NANGA TUAN	Hak Milik	-	-	Hibah	Rp 125.000.000,00	TANAH KAS DESA UTK KOLAM DUSUN SIAWAN
910	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Hutan Wisata	0001	3.565	2001	Wisata Danau Empangau	SKT	593.2/106/PEMDES-EM/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Pondok Wisata Danau Empangau	APBD	Rp 10.000.000,00	PONOK WISATA DESA EMPANGAU
911	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Lapangan Badminton/Bukutangkis	0001	275	2009	DUSUN KARYA BHAKTI DESA BUNUT TENGAH	SKT	593.2/97/PEMDES-BH/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Gedung Pertemuan Desa Bunut Tengah	APBD	Rp 12.500.000,00	GEDUNG SERBA GUNA
912	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Lapangan Sepak Bola	0001	630	1980	DESA TEMBANG	Hak Milik	593.2/17/PEMDES-TBG/PEM	Digunakan untuk Lapangan sepak bola	APBD	Rp 3.000.000,00	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN BERINGIN
913	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Lapangan Sepak Bola	0001	5.700	2007	DESA TEMBANG	SKT	593.2/147/PEMDES-TBG/PEM	Digunakan Untuk Lapangan Sepak Bola	APBD	Rp 3.000.000,00	KANTOR DESA DI DUSUN BERINGIN
914	KECAMATAN BUNUT HILIR	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Listrik	0001	49	2009	DUSUN TANJUNG BUNGA DESA TEMBANG	SKT	593.2/205/PEMDES-TBG/PEM	Digunakan Untuk Bangunan Perumahan Listrik Desa Tembang	APBD	Rp 1.000.000,00	BANGUNAN LISTRIK DESA Digunakan Untuk Bangunan Perumahan Listrik Desa Tembang
915	KECAMATAN EMBALOH HILIR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0002	140	2004	Dusun Jaya Laksana Desa Nanga Embaloh	Hak Pakai	593.2/53/SKT-NE/2014	Perumahan Posyandu	APBD	Rp 20.000,00	Perumahan Posyandu
916	KECAMATAN EMBALOH HULU	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0001	1.169	1980	Banua Martinus,Dusun Banyu Jln. Tamanggung L. Kasso	Hak Pakai	137/DS DMK-EBU/SKT/2014	Rumah Dinas Camat	APBD	Rp 8.395.000,00	Rumah Dinas Camat
917	KECAMATAN EMBALOH HULU	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0001	756	1974	Banua Martinus,Dusun Banyu Jln. Tamanggung L. Kasso	Hak Pakai	137/DS DMK-EBU/SKT/2014	Rumah Dinas Pegawai	APBD	Rp 5.406.000,00	Rumah Dinas Pegawai
918	KECAMATAN EMBALOH HULU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	288	1985	Banua Martinus,Dusun Banyu, GG. Ton Ambun, Jln. Tamanggung L. Kasso	Hak Pakai	593/103/D/ BMK-EBU/SKT/2017	Rumah Dinas Pegawai	APBD	Rp 2.060.000,00	Kantor Camat
919	KECAMATAN EMBALOH HULU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	7.687	1986	Banua Martinus,Dusun Banyu Jln. Tamanggung L. Kasso	Hak Pakai	593/103/D/ BMK-EBU/SKT/2017	Rumah Dinas Pegawai	APBD	Rp 57.652.500,00	Kantor Camat
920	KECAMATAN EMBALOH HULU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	7.290	1997	Desa Pulau Manak, Jln Lintas Utara	Hak Pakai	BA NO.020/1436/SETDA UIM-B	Rumah Dinas Pegawai	APBD	Rp 36.450.000,00	Kantor Dinas Kehutanan
921	KECAMATAN EMPANANG	Tanah Lainnya	0004	10.000	2004	Kec. Empanang	Hak Pakai	-	Kec.Empanang	APBD	Rp 100.000.000,00	Mutasi dari SETDA No. BA 020/1317/SETDA/UM-B Tgl 17 Sep 2015 (Berdasarkan Tahun LKPD)
922	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0002	9.600	2004	Sungai Antu	-	-	Komplek Kantor Camat	HIBAH	Rp 14.400.000,00	Kecamatan Puring Kencana
923	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0003	8.000	2004	Sungai Antu	Hak Pakai	-	Persiapan	HIBAH	Rp 12.000.000,00	Kecamatan Puring Kencana

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
924	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0004	3.750	2004	Sungai Antu	Hak Pakai	-	Persiapan	HIBAH	Rp 5.250.000,00	Kecamatan Puring Kencana
925	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0005	3.750	2004	Sungai Antu	Hak Pakai	-	Persiapan	HIBAH	Rp 5.250.000,00	Kecamatan Puring Kencana
926	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0006	3.000	2004	Sungai Antu	Hak Pakai	-	Persiapan	HIBAH	Rp 4.500.000,00	Kecamatan Puring Kencana
927	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0007	2.500	2004	Jl.Langgau	Hak Pakai	-	Persiapan	HIBAH	Rp 3.750.000,00	Kecamatan Puring Kencana
928	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Bangunan Gedung Pameran	0008	-	2004	Sungai Antu	-	-	Persiapan	HIBAH	Rp 325.000,00	Kecamatan Puring Kencana
929	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0002	9.530	2004	-	-	-	Perapau Jaya, Puring Kencana	-	Rp 68.139.500,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
930	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0003	261	2004	-	-	-	Aon - Swasta,Air Mancur, Puring Kencana	-	Rp 3.654.000,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
931	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0004	364	2004	-	-	-	Bujang Usman - Swasta,Air Mancur, Puring Kencana	-	Rp 5.096.000,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
932	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0005	24.150	2004	-	-	-	Katek - Swasta,Parapau Jaya, Puring Kencana	-	Rp 3.381.000,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
933	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0006	8.000	2004	-	-	-	Lambat - Swasta,Puring Kencana, Puring Kencana	-	Rp 1.120.000,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
934	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0007	12.000	2004	-	-	-	Maulana - Swasta, Puring Kencana	-	Rp 1.680.000,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
935	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0008	20.300	2004	-	-	-	Masnawati - Swasta, Puring Kencana	-	Rp 2.842.000,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
936	KECAMATAN PURING KENCANA	Tanah Lainnya	0009	27.700	2004	-	-	-	Air Mancur, Puring Kencana	-	Rp 138.500.000,00	Mutasi dari SETDA. Dasar BASTB Nomor. 020/1438/Setda/UM-B Tgl. 23 Sep 2014
937	KECAMATAN SEBERUANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	20.000	2015	Kecamatan Seberuang	Hak Pakai	SKT No. 593/04/XVIII/DS.SJR/PEM.2 018	BALAI PENYULUH PERTANIAN	APBD	Rp 5.000,00	Tanah yang digunakan BALAI PENYULUH PERTANIAN
938	KECAMATAN SEBERUANG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	3.362	1995	JALAN LINTAS SELATAN DUSUN RANYAI HULU DESA PALA,KOTA KECAMATAN SEBERUANG	Hak Pakai	SKT NO 593/116/IX/PEM	Tanah Kosong	APBD	Rp 102.305.000,00	Tanah Kosong (Jalan Lintas Selatan)
939	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	52.280	2004	DESA DALAM KEC. SELIMBAU	Hak Pakai	SKT NO 593 / 106 / D.D / PEM	TANAH KANTOR DESA DALAM	APBD	Rp 182.980.000,00	TANAH KANTOR DESA DALAM
940	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0003	51.150	2004	DESA PIASAK KEC. SELIMBAU	Hak Pakai	SKT NO 593 / 34 / DS-PSK / PEM	TANAH KANTOR DESA PIASAK	APBD	Rp 179.025.000,00	TANAH KANTOR DESA PIASAK
941	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0004	50.200	2004	DESA NIBUNG KEC. SELIMBAU	Hak Pakai	SKT NO / 593 / 04 / DS - NIBG / PEM	TANAH KANTOR DESA NIBUNG	APBD	Rp 175.000.000,00	
942	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0005	50.000	2004	DESA GUDANG HILIR KEC. SELIMBAU	Hak Pakai	SKT NO / 593 / 127 / DS - GHI / PEM	TANAH KANTOR DESA	APBD	Rp 175.000.000,00	TANAH KANTOR DESA
943	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0006	50.000	2004	DESA BENUIS KEC. SELIMBAU	Hak Pakai	SKT NO / 593 / 27 / DS - BNS / PEM	TANAH KANTOR DESA	APBD	Rp 175.000.000,00	B.A. No. 020/1372/SETDA/UM-B Tgl 23-9-2014
944	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0007	1.320	2004	-Desa Gudang Hulu	SKT	- 594.594.4/KEC/SLB/P-EM	Kantor camat - Eks Tanah Negara,Gudang Hulu, Selimbau	HIBAH	Rp 33.150.000,00	B.A. No. 020/1372/SETDA/UM-B Tgl 23-9-2014
945	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0009	400	2004	-Desa Piasak	SKT	594.4/175/K.SLB/PEM	Piasak, Selimbau	APBD	Rp 20.000,00	B.A. No. 020/1372/SETDA/UM-B Tgl 23-9-2014
946	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0010	143	2004	-Desa Gudang Hilir	SKT	594.4/600/KSLB/PEM	Gudang Hilir, Selimbau	APBD	Rp 20.000,00	B.A. No. 020/1372/SETDA/UM-B Tgl 23-9-2014
947	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	52.400	2004	DESA GUDANG HILIR KEC. SELIMABU	Hak Pakai	SKT NO / 593 / 128 / DS - GHI / PEM	TANAH KAS DESA GUDANG HLIR KEC. SELIMBAU	APBD	Rp 183.400.000,00	TANAH KAS DESA GUDANG HLIR KEC. SELIMBAU
948	KECAMATAN SELIMBAU	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0002	52.850	2004	DESA GUDANG HILIR KEC. SELIMBAU	Hak Pakai	SKT NO / 593 / 129 / DS - GHI / PEM	TANAH KAS DESA GUDANG HLIR KEC. SELIMBAU	APBD	Rp 184.975.000,00	TANAH KAS DESA GUDANG HLIR KEC. SELIMBAU
949	KECAMATAN SEMITAU	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	419	2009	-Jl. Abang Umar Junied Rt.01/Rw.02 Dsn.Yon Parasum Semitau Hulu	-	Nomor B.A. 020/1320/SETDA/UM-B Tgl. 17 September 2012	Kantor Desa	APBD	Rp 4.190.000,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah
950	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0001	88	1975	Desa Perigi	Hak Pakai	-	Kantor Kades Perigi	APBD	Rp 20.000,00	Mutasi dari setda 2015
951	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Pasar	0001	380	1980	Desa Perigi Na. Silat	Hak Milik	-	Pasar Inpres Desa Perigi	APBD	Rp 1.885.000,00	SKT No. 594.1/318/DS.PRG/PEM
952	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Pasar	0002	1.554	1980	simpang silat	Hak Milik	-	Pasar Inpres Simpang Silat	APBD	Rp 7.770.000,00	SKT No. 594.1/74/DS.MM/PEM2014
953	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	1.308	1946	Desa Baru Na. Silat	Hak Milik	-	Eks. Kantor Camat I / TK	APBD	Rp 5.174.000,00	SKT No. 594.1/101/DS.BR/PEM
954	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	10.835	1946	Desa Baru Na. Silat	Hak Milik	-	Kantor Camat II (baru)	APBD	Rp 54.175.000,00	SKT No. 594.1/102/DS.BR/PEM
955	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0003	99	1946	Desa Baru Na. Silat	Hak Milik	-	Kantor Pesisir Kapuas	APBD	Rp 500.000,00	SKT No. 594.1/96/DS.BR/PEM 2014
956	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	225	1975	Desa Bongkong	Hak Milik	-	Puskesmas Desa Bongkong	APBD	Rp 20.000,00	Mutasi dari setda 2015
957	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	375	1980	Desa Pangeran	Hak Milik	-	Kantor Kades Pangeran	APBD	Rp 100.000.000,00	Mutasi dari setda 2015
958	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	76	1997	Desa Sebaru	Hak Milik	-	Kantor Desa Baru	APBD	Rp 546.000,00	Tanah Masyarakat
959	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	1.875	1998	Desa Setunggul	Hak Milik	-	Kantor Desa Setunggul	APBD	Rp 11.125.000,00	Kantor Desa Setunggul
960	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	900	1999	Desa Sungai sSena	Hak Milik	-	Kantor Desa Sei Sena	APBD	Rp 6.435.000,00	DEPTRAN
961	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	210	2001	Jl. Makarti SP IV	Hak Milik	-	Kantor Desa Miau Merah	APBD	Rp 1.652.000,00	DEPTRAN
962	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	43	2008	Desa Penai	Hak Milik	-	Kantor Desa PB. Penai	APBD	Rp 21.000,00	Hibah

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
963	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	280	2008	Desa Seberu	Hak Milik	-	Kantor Desa Seberu	APBD	Rp 3.000.000,00	Kantor Desa Seberu
964	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	380	2009	Desa Sentabai	Hak Milik	-	Kantor Desa Sentabai	APBD	Rp 4.000.000,00	Kantor Desa Sentabai
965	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	1.500	1980	Desa Perigi Na. Silat	Hak Milik	-	Tanah Kosong disbun	APBD	Rp 750.000,00	SKT No. 594.1/319/DS-PRG/PEM
966	KECAMATAN SILAT HILIR	Tanah Lapangan Sepak Bola	0001	10.000	1975	Desa Nanga Nuar	Hak Milik	-	Lapangan sepak bola	APBD	Rp 14.000,00	Mutasi dari setda 2015
967	KECAMATAN SUHAID	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	29.700	1998	Jalan SUHAID - MENSUSAI	Hak Milik	594/210/Pem-1998	KECAMATAN SUHAID	APBD	Rp 14.000,00	Berita acara serah terima Nomor : 020/1374/SETDA/UM-B tanggal 23 September 2014
968	KECAMATAN SUHAID	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	14.400	1998	Jalan SUHAID - MENSUSAI	Hak Milik	594/212/Pem-1998	Kantor POLSEK dan MES, Taman Kanak-Kanak, PAUD, Kantor UPT DIPOKOR	APBD	Rp 14.000,00	Berita acara serah terima Nomor : 020/1374/SETDA/UM-B tanggal 23 September 2014
969	KELURAHAN HILIR KANTOR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	000001	1.110	2008	Jl. A. Dogom No. 45 Kelurahan Hilir Kantor	Hak Pakai	SP No.1.20.33/01/Kel. HK 2014	SKPD Kelurahan Hilir Kantor	APBD	Rp 195.043.000,00	Sebab Peraturan
970	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0001	3.552	1996	Jl. Achamd Dogom	Hak Pakai	1	Perumahan Perumahan / Kemungkinan Komplek Kehutanan	APBD	Rp 127.872.000,00	Perumahan Perumahan / Kemungkinan Komplek Kehutanan
971	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0003	488	2004	Semitau Desa Entipan	SKT	SKT No. 593/51/DS-ENT/PEM	Rumah Dinas Guru SDN 07 Entipan	APBD	Rp 20.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah
972	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0004	686	2004	Semitau, Desa Kenepai	SKT	SKT. No.593/115/DS-NK/PEM/2022	Rumah Dinas Guru /Perumahan Guru	APBD	Rp 20.000,00	Perumahan Dinas Guru di Kenepai Komplek
973	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	0001	709	1981	-	Hak Pakai	-	Ruko	APBD	Rp 25.524.000,00	Ruko (belum jelas keberadaannya dan data dukung)
974	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Gudang	0001	29.333	2008	Jl. Lintas Selatan Kalis	Hak Pakai	-	Tanah Pergudangan, Workshop & Gedung Kantor	APBD	Rp 440.000.000,00	Tanah dibelakang Kantor Camat Kalis yang digunakan untuk workshop dan pergudangan
975	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0002	11.110	1995	Jl. Komyos Sudarso (Harapan Mulya)	Hak Pakai	-	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	APBD	Rp 55.550.000,00	belum jelas keberadaannya masih dalam inventarisasi dan pencarian data dukung
976	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0003	1.982	2009	Kec. Hulu Gurung	Hak Pakai	1	ALHIDAYAH Tani Makmur	APBD	Rp 14.171.300,00	MTS AL HUDA Lubuk Antuk
977	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	0001	19.025	2010	Putussibau Kota	Hak Pakai	-	Pemda Kab. Kapuas Hulu	APBD	Rp 475.600.300,00	Dugaan deretan Kordik dan Kantor Gapensi belakang PLN lama
978	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	0001	-	1995	Kec. Mentebah	Hak Pakai	-	Tanah lokasi Balai Benih Induk (BBI) Kelasin	APBD	Rp 600.000.000,00	Tanah lokasi Balai Benih Induk (BBI) Kelasin (belum memiliki dokumen dan lokasi yang belum jelas)
979	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	16.900	1990	Desa Tanjung Mentebah	SKT	No. 08/24/SKT/1990	Perumahan Guru dan SD 14	APBD	Rp 259.250.000,00	Perumahan Guru dan SD 14 Desa Tanjung
980	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	1.542	1993	Nanga Awih, Embaloh Hilir	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)	APBD	Rp 7.710.000,00	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan) (belum jelas keberadaannya dan data dukung)
981	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0005	1.219	1994	Desa Tanjung Mentebah	SKT	No. 594.3/SK/870/Ekon	Tanah Kantor Desa Tanjung	APBD	Rp 252.500.000,00	Digunakan untuk Kantor Kas Desa Tanjung
982	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0014	10.140	1994	Keling Panggau, Emapanang	SKT	070/007/PEMDES-KP/2022	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)	APBD	Rp 50.700.000,00	Dijadikan Kolam Ikan di desa untuk kegiatan BUMDES
983	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0015	5.990	1994	Nanga Kalis, Kalis	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)	APBD	Rp 29.950.000,00	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)
984	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0018	20.000	1994	Sungai Uluk, Kedamin	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)	APBD	Rp 100.000.000,00	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)
985	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0019	17.900	1994	Jaras, Kedamin	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)	APBD	Rp 228.500.000,00	Konfirmasi Data
986	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0020	4.500	1994	Beringin Jaya, Putussibau Selatan	SKT	SPPT No.009/02/DSBJ/PEM	Tanah hamparan fasum dan sekolah Matalunai	APBD	Rp 248.800.000,00	Tanah untuk fasum sekolah Matalunai
987	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0021	51.000	1994	Desa Suka Maju Putussibau Selatan	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)	APBD	Rp 148.250.000,00	Konfirmasi Data
988	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0031	27.450	1994	Kompleks Eks Depsos & Perumahan	Hak Pakai	-	-	APBD	Rp 137.250.000,00	Kemungkinan belakang Kominfo (belum pegang data dukung)
989	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0033	29.850	1994	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 149.250.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
990	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0034	19.930	1994	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 99.650.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
991	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0036	25.200	1994	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 126.000.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
992	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0037	13.520	1994	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 67.600.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
993	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0040	10.020	1994	Sibau Hulu, Putussibau	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 50.100.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
994	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0041	19.220	1994	Sibau Hulu, Putussibau	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 96.100.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
995	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0003	12.144	1995	Kelling Semulung, Embaloh Hilir	SKT	593.2/16/SKT-KLS/2023	Tanah Kas desa semulung	APBD	Rp 175.750.000,00	Tanah Kebun Karet (Kas Desa)

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
996	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0004	11.440	1995	Nanga Nyebau, Embalah Hilir	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 57.200.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
997	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0011	2.000	1995	Jl. Melapi	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa Info pertanahan	APBD	Rp 10.000.000,00	Sudah dilakukan inventarisasi tetapi belum diketahui pasti keberadaannya
998	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0013	2.130	1995	Malapi, Kedamin	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 10.650.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
999	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0014	2.650	1995	Sungai Uluk, Kedamin	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 13.250.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
1000	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0017	19.900	1995	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 199.000.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
1001	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0020	3.100	1995	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 31.000.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
1002	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0021	1.840	1995	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 18.400.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
1003	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0022	31.550	1995	Jl. Pancasila I	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas Pegawai	APBD	Rp 157.750.000,00	Perumahan Dinas Pegawai
1004	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0023	50.000	1995	Sibau Hilir, Putussibau	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info pertanahan)	APBD	Rp 175.000.000,00	Tanah Kas Desa (Info pertanahan)
1005	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0030	6.510	1995	Putussibau Kota	Hak Pakai	-	Kapuas Hulu	APBD	Rp 32.550.000,00	Pemerintah Kapuas Hulu
1006	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0039	8.010	1995	Pala Pulau, Putussibau	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa Info pertanahan	APBD	Rp 40.050.000,00	Tanah Kas desa info bagian pertanahan
1007	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0002	9.350	1996	Nanga Awun, Embalah Hilir	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 46.750.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
1008	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0003	9.450	1996	Nanga Awun, Embalah Hilir	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 47.250.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
1009	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0004	225	2001	Jl. Pancasila II (Gig Semen)	Hak Pakai	-	Tanah Kosong (K9)	APBD	Rp 4.500.000,00	Tanah Kosong (K9)
1010	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	9.800	2002	Nanga Awun, Putussibau Utara	Hak Pakai	-	-	APBD	Rp 286.000.000,00	Konfirmasi Data
1011	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0006	1.414	2004	Jl. Tj. Pandan	SKT	SKT NO 593.21/125/LRH-E	GEDUNG SEKRETARIAT PODSI	APBD	Rp 30.700.000,00	Dugaan sementara tanah bekas bangunan SDLB dan sekarang digunakan untuk poyandu
1012	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0007	215	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 3.010.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1013	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0008	367	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 5.145.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1014	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0009	1.020	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 14.280.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1015	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0010	181	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 2.541.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1016	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0011	480	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 6.720.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1017	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0012	2.800	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 28.000.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1018	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0013	1.600	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 16.000.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1019	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0014	560	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 5.600.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1020	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0015	1.400	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 28.000.000,00	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1021	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0016	6.158	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 44.031.487,50	Dugaan Hamparan Tanah bekas Pasar Inpres dekat Mesjid Darussalam
1022	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0017	208	2004	Desa Tajau Mada Kec. Seberuang	SKT	SKT.No 593/02/XII/PE M	Tanah digunakan untuk PAUD di Desa Tajau Mada.	APBD	Rp 2.824.080,00	Tanah digunakan untuk PAUD di Desa Tajau Mada
1023	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0023	364	2004	Jl. Jerandang Abdurrahman	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 7.280.000,00	Dugaan hampan tanah di belakang SMP 1 dan Bappeda (deretan surau)
1024	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0024	148	2004	Jl. Jerandang Abdurrahman	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 2.970.000,00	Dugaan hampan tanah di belakang SMP 1 dan Bappeda (deretan surau)
1025	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0025	240	2004	Jl. Danau Luar	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 4.800.000,00	Tanah Kosong
1026	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0026	5.030	2004	Putussibau	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 4.800.000,00	belum diketahui secara rinci keberadaan lokasi tanah
1027	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0030	240	2004	Jl. Meranti (Sp. Jumanang)	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 4.800.000,00	Tanah Kosong
1028	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0031	210	2004	Jl. Meranti (Sp. Emanuel)	Hak Pakai	-	Tanah Kosong	APBD	Rp 4.200.000,00	Tanah Kosong

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1029	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0040	5.710	2004	Putussibau Kota, Putussibau, Jl.Melati/Jembatan Pelita	Hak Pakai	-	Pasar Pagi terbakar	APBD	Rp 175.000.000,00	Tanah Antara Sekitaran Surau dekat Rumah Dinas
1030	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0041	50.000	2004	Sibau Hilir, Putussibau	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)	APBD	Rp 175.000.000,00	Tanah Kas Desa (Info Pertanahan)
1031	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0044	2.100	2004	Gerayau, Selimbau	Hak Pakai	593/168/DS-GRY/PEM	Untuk Kantor Desa	APBD	Rp 20.000,00	Untuk Kantor Desa
1032	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0045	2.100	2004	Engkerengas, Selimbau	Hak Pakai	-	Tanah Kas desa	APBD	Rp 20.000,00	Untuk Tanah Kantor Desa (info pertanahan)
1033	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0048	4.210	2004	Kenerak, Semitau	SKT	593/062/Des-Knk/PEM.2022	Untuk SDN 10 KENERAK	APBD	Rp 27.000,00	Untuk SDN 10 KENERAK
1034	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0051	1.326	2004	Kerengas, SUHAID	SKT	No.593/124/D.KRS/PEM.2021	Tanah untuk SDN.06 Kerengas (Suhaid)	APBD	Rp 27.000,00	Tanah untuk SDN 06. Kerengas (Suhaid)
1035	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0055	1	2004	Kecamatan Batu Datu	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)	APBD	Rp 14.000,00	Tanah Kas Desa (Info Bag Pertanahan)
1036	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0056	1	2004	Jl. Jeranding Abdurrahman	Hak Pakai	-	Kemungkinan Rumah Dinas	APBD	Rp 20.000,00	Perumahan Dinas
1037	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0057	1	2004	Jl. Ks. Tubun	Hak Pakai	-	Kemungkinan Rumah Dinas	APBD	Rp 20.000,00	Perumahan Dinas
1038	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0058	1	2004	Jl. Ks. Tubun	Hak Pakai	-	Kemungkinan Rumah Dinas	APBD	Rp 20.000,00	Perumahan Dinas
1039	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0059	1	2004	Jl. Meranti	Hak Pakai	-	Kemungkinan Rumah Dinas	APBD	Rp 20.000,00	Perumahan Dinas
1040	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0060	1	2004	Jl. Meranti	Hak Pakai	-	Kemungkinan Rumah Dinas	APBD	Rp 20.000,00	Perumahan Dinas
1041	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0061	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1042	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0062	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1043	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0063	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1044	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0064	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1045	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0065	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1046	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0066	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1047	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0067	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1048	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0068	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1049	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0069	1	2004	Jl. Pancasila II (Gg.Semen)	Hak Pakai	-	Perumahan Dinas	APBD	Rp 14.000,00	Perumahan Dinas
1050	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0093	1	2004	Jl. Amin	Hak Pakai	-	Pasar Daerah depan Toko Mama Bakery (Sekarang Deretan Ruko Matahan)	APBD	Rp 60.000,00	Pasar Daerah depan Toko Mama Bakery (Sekarang Deretan Ruko Matahan)
1051	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0094	1	2004	Jl. Tj. Pura	Hak Pakai	-	Kemungkinan Pasar Inpres dekat mesjid darussalam (info pertanahan)	APBD	Rp 100.000,00	Pasar Inpres dekat mesjid darussalam
1052	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0104	1	2004	Jl. Danau Luar	Hak Pakai	-	Dugaan Kompleks Eks Disbun	APBD	Rp 10.000,00	Kompleks Eks Disbun (dugaan sementara)
1053	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0107	126	2004	Kecamatan Siliat Hilir (Desa Pangeran)	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa	APBD	Rp 630.000,00	Tanah Kas Desa (dugaan sementara tanah dekat perkuburan muslim Desa Pangeran)
1054	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0108	120	2004	Kecamatan Siliat Hilir (Desa Pangeran)	Hak Pakai	-	Tanah Kas Desa	APBD	Rp 600.000,00	Tanah Kas Desa (Digunakan Untuk Surau Tua Desa Pangeran)
1055	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0003	-	2005	Dinas Perikanan	Hak Pakai	-	Komplek Kolam BBI Klansen	APBD	Rp 72.436.000,00	Komplek Kolam BBI Klansen
1056	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0004	-	2005	Dinas Perikanan	Hak Pakai	-	Komplek Kolam BBI Klansen	APBD	Rp 98.857.000,00	Komplek Kolam BBI Klansen
1057	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0005	-	2005	Dinas Perikanan	Hak Pakai	-	Komplek Kolam BBI Klansen	APBD	Rp 189.869.000,00	Komplek Kolam BBI Klansen
1058	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0006	-	2005	Dinas Perikanan	Hak Pakai	-	Komplek Kolam BBI Klansen	APBD	Rp 83.369.000,00	Komplek Kolam BBI Klansen
1059	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0007	-	2005	Dinas Perikanan	Hak Pakai	-	Komplek Kolam BBI Klansen	APBD	Rp 49.060.000,00	Komplek Kolam BBI Klansen
1060	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0008	-	2005	Dinas Perikanan	Hak Pakai	-	Komplek Kolam BBI Klansen	APBD	Rp 143.000.000,00	Komplek Kolam BBI Klansen

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1061	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0002	212.386	2006	Jl. Pala Pulau Masuk Kantor Bina Marga	Hak Pakai	SK Pengadaan Tanah No. 580.1-21-42.6-2006	Komplek Perkantoran Pala Pulau Sengketa Pengadilan	APBD	Rp 1.762.735.551,00	Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan Komplek Perkantoran dan Rumah Dinas di Desa Pala Pulau
1062	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	27.138	2009	Desa Sungai Uluk Kec. Putussibau Selatan	Hak Pakai	SET-PAN/13/2009	BMT	APBD	Rp 212.458.850,00	Fasum (BMT) di Desa Sungai Uluk Pembelian dari Zainudin, S.Ag
1063	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	195	2010	Tanah Jln Simpang Pesantren Keadamin	Hak Pakai	BA /020/28/TNH-B/2010	Pelebaran Jalan Simpang Pesantren	APBD	Rp 19.500.000,00	Ganti Rugi An, Abdul Muis
1064	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0002	360	2010	Tanah Jln Simpang Pesantren Keadamin	Hak Pakai	BA/020/27/TNH-B/2010	Pelebaran Jalan Simpang Pesantren	APBD	Rp 30.000.000,00	Ganti Rugi An. Boy Syapawi
1065	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	13.340	2011	Kecamatan Seberuang	Hak Pakai	Surat Ukur Kepala Desa 9 Mei 2011	Tanah Kas Desa Gurung	APBD	Rp 250.000.000,00	Untuk Kantor Desa Gurung
1066	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	8.500	2012	Selaup, Bunut Hulu	SKT	SKT.No 593/SKT/SLP-Pem/2012	SDN.10 Selaup	APBD	Rp 47.500.000,00	Tanah untuk SDN.10 Selaup
1067	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	10.000	2018	Jl. Pesantren, RT 10/ RW 4 kelurahan Keadamin hilir	SKT	593/39/KEL-KDUI/PEM	Sekretariat Daerah	APBD	Rp 1.533.487.500,63	Pembelian Tanah (Jl. Pesantren) a.n. NURSEHAN (Akhlmaidi Jubin)
1068	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	507	2020	Nanga Mentebah, Mentebah	SKT	No. 594.3/24/D.NMTB/PE	Tanah Kantor Desa	APBD	Rp 107.000.000,00	Tanah Kantor Desa
1069	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	13.061	2021	Jl. Ruas Putussibau Kalis yang direncanakan dibangun Tol	Hak Milik	No : 590/21/SETDA/TNH-B/2021	SETDA	APBD	Rp 690.159.831,33	Ganti Rugi Tanah yang terdampak Pembangunan FLYOVER Ruas Jalan Putussibau -Kalis
1070	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0002	13.061	2021	Jl. Ruas Putussibau Kalis yang direncanakan akan di Bangun Tol	Hak Milik	No : 590/21/SETDA/TNH-B/2021	SETDA	APBD	Rp 951.336.374,67	Ganti Rugi Tanah yang terdampak Pembangunan FLYOVER Ruas Jalan Putussibau -Kalis
1071	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0001	12.144	2023	Kelting Semulung, Embalohi Hilir	SKT	593.2/16/SKT-KLS/2023	Tanah Kas Desa Kelting Semulung	APBD	Rp 101.000.000,00	Tanah Milik Desa
1072	SEKRETARIAT DAERAH	Batu Bara	0001	2.666	2009	Kalis	Hak Pakai	-	Tanah Lokasi Pengelolaan Briket	APBD	Rp 40.000.000,00	Diduga kawasan berada arah belakang Kantor Camat Kalis lokasi tempat penambangan Batu Briket dan diperkirakan masih satu hamparan dengan Tanah pergudangan, workshop
1073	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	0001	43.297	2020	Kecamatan Kalis	SKT	BA Musyawarah No. 593.83/2496/Setda/TN H-B/2020	TPA Kalis	APBD	Rp 476.587.000,00	Pengadaan Tanah Untuk TPAS Kalis
1074	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0001	120	2010	Desa Tanjung Jati Kec. Putussibau Selatan	SKT	SKT.No 590/72/DT/09	Tanah Sarana umum Lokasi pemindahan Tower jaringan listrik	APBD	Rp 6.000.000,00	Tanah Sarana umum Lokasi pemindahan Tower jaringan listrik
1075	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	0002	229	2010	Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan	SKT	SPPT No.500.17/420/Kel.KD R/PEM	Tanah Sarana umum Lokasi pemindahan Tower jaringan listrik dari kampung taman	APBD	Rp 28.000.000,00	Tanah sarana umum untuk tower listrik dari kampung taman kedamin hilir
1076	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	3.505	2002	Kelurahan Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Hak Pakai	SET-PAN/48/2012	Tanah untuk Pembangunan Pengamanan Approach Light Runway Bandara Pangsuma (An. Ensela)	APBD	Rp 236.938.000,00	Ganti Rugi Untuk Pembangunan Approach Light Runway
1077	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	3.608	2011	Putussibau Utara	Hak Pakai	SET-PAN /14/2011	Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau (An. Bpk Cengkeh)	APBD	Rp 219.092.000,00	Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau
1078	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0002	12.408	2011	Putussibau Utara	Hak Pakai	SET-PAN /14/2011	Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau (An. Bpk Aloysius Sarek)	APBD	Rp 603.212.000,00	Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau
1079	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	9.045	2012	Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	SET-PAN/4/2012	Tanah untuk Jalan Lingkar Pala Pulau (An. Antonius Husini)	APBD	Rp 271.350.000,00	Ganti Kerugian Atas Tanah untuk pembangunan jalan lingkar Pala Pulau
1080	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0002	9.045	2012	Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	SET-PAN /4/2012	Tanah untuk Jalan Lingkar Pala Pulau (An. Antonius Husini)	APBD	Rp 126.630.000,00	Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau
1081	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0003	10.366	2012	Kelurahan Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Hak Pakai	SET-PAN/39/2012	Tanah untuk Pembangunan Pengamanan Approach Light Runway Bandara Pangsuma (An. Muhammad Yunan Said)	APBD	Rp 360.916.400,00	Ganti Rugi Atas Pembangunan Aproach Light Runway
1082	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0004	20.000	2012	Kelurahan Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Hak Pakai	SET-PAN/42/2012	Tanah untuk Pembangunan Pengamanan Approach Light Runway Bandara Pangsuma (An. Fatimah)	APBD	Rp 252.283.200,00	Ganti Rugi Pembangunan Aproach Light Runway
1083	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0005	17.186	2012	Kelurahan Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Hak Pakai	SET-PAN/45/2012	Tanah untuk Pembangunan Pengamanan Approach Light Runway Bandara Pangsuma (An. Aloysius Abau)	APBD	Rp 136.078.800,00	Ganti Rugi Atas Pembangunan Aproach Light Runway
1084	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	196	2015	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Surat Pengajuan 46/ND/SETDA/TNH/2015	Pelebaran jalan Komyos Sudarso	APBD	Rp 294.300.000,00	Tanah yang berdampak pelebaran Jalan (Asyura, Che Ui Hong, Hamdan, Hardimasyah, M.Azis, M. Nurdin, Samuji dan Sarbani)
1085	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	16	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Abun Kamarullah	APBD	Rp 23.625.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1086	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0002	26	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Hajjah	APBD	Rp 39.375.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos

Daftar Aset Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Pemkab Kapuas Hulu

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Nama aset	No. Register	Luas Tanah	Tahun Perolehan	Alamat	Nama Hak	No. Sertifikat	Pengguna	Asal - Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1087	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0003	24	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Syarif Amrullah	APBD	Rp 36.000.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1088	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0004	25	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Bahtiar	APBD	Rp 36.787.500,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1089	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0005	21	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Andreas Yan Ianting	APBD	Rp 32.400.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1090	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0006	18	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Ito Bin Abang Thaha	APBD	Rp 27.000.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1091	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0007	18	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Penetapan Harga (SPH) No. 590/575/SETDA-TNH/2010	An. Muchran	APBD	Rp 27.000.000,00	Ganti Rugi Penyelesaian Konflik Pelebaran Jalan
1092	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0008	37	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Penetapan Harga (SPH) No. 590/575/SETDA-TNH/2010	An. Nursidah	APBD	Rp 56.025.000,00	Ganti Rugi Penyelesaian Konflik Tanah
1093	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0009	13	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Theodoros Lanting	APBD	Rp 19.800.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1094	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0010	46	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Suhartini	APBD	Rp 68.625.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1095	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0011	22	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. LENI /Che lu Hong	APBD	Rp 32.625.000,00	Ganti Rugi Penyelesaian Konflik Tanah
1096	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0012	18	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Idris Edwarsyah	APBD	Rp 27.000.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1097	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0013	15	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Furiyanto	APBD	Rp 22.500.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1098	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0014	20	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Surat Penetapan Harga No. 590/575/Setda-TNH-B/2010	An. Ros Fatjah	APBD	Rp 30.375.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1099	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0015	9	2016	Jl. Komyos Sudarso Putussibau	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	Ganti Rugi/ Penyelesaian Konflik Tanah (An. Irwan Haidin Nur)	APBD	Rp 13.500.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1100	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0001	8	2017	Pelebaran Jl. Kom Yos Sudarso	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	An. Irwan Haidin Nur	APBD	Rp 11.925.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1101	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0002	11	2017	Pelebaran Jl. Kom Yos Sudarso	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	Ganti Rugi/ Penyelesaian Konflik Tanah (An. LENI)	APBD	Rp 17.325.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1102	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0003	9	2017	Pelebaran Jl. Kom Yos Sudarso	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	Ganti Rugi/ Penyelesaian Konflik Tanah (An. LENI)	APBD	Rp 14.175.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1103	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	0004	6	2017	Pelebaran Jl. Kom Yos Sudarso	Hak Pakai	Setda-TNH-B/2010	Ganti Rugi/ Penyelesaian Konflik Tanah (An. LENI)	APBD	Rp 9.000.000,00	Ganti Rugi Pelebaran Jalan Komyos
1104	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jembatan	0001	210	2012	Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	SPPT : 590/47/Pemdes/PP/2011	Tanah(untuk Pembangunan Jembatan Mupa (An. Syeh Kamal)	APBD	Rp 12.012.000,00	Tanah(untuk Pembangunan Jembatan Mupa (An. Syeh Kamal)
1105	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jembatan	0002	581	2012	Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	SETPAN/9/V/2012	Tanah untuk Pembangunan Jembatan Mupa (An. Syeh Kamal)	APBD	Rp 33.233.200,00	Pada Saat Pembelian Tanah Sertifikat Milik Penjual Hilang berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian No.SKK/241/V/2012
1106	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jembatan	0003	170	2012	Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	SETPAN 8/V/2012	Tanah untuk Pembangunan Jembatan Mupa (An. Abadi Siswanto)	APBD	Rp 9.350.000,00	Tanah untuk Pembangunan Jembatan Mupa (An. Abadi Siswanto)
1107	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Untuk Jembatan	0005	720	2012	Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Hak Pakai	SKT No. 590/142/Pemdes/PP/2012	Tanah untuk Pembangunan Jembatan Mupa (An. M. Yusuf)	APBD	Rp 39.600.000,00	Tanah untuk Pembangunan Jembatan Mupa (An. M. Yusuf)
1108	SEKRETARIAT DPRD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0001	6.640	2014	Jl. Antasari No. 1 Putussibau	Hak Pakai	SKT No.593/1619/Kel.PK/P/EM	Sekretariat DPRD	APBD	Rp 12.800.000,00	Tanah Kantor DPRD Kab. Kapuas Hulu

Perincian atas Status Pencatatan Aset Tetap Tanah, Lokasi, dan Data Menara BTS

(dalam Rupiah)

No.	Site ID	Site ID Opsel	Kecamatan	Desa	STATUS OPERATION	Tercatat di KIB (Sudah /Belum)	Nilai yang Tercatat di KIB (Rp)	Luas (M2)	Penyerahan Sertifikat (Sudah/Belum)	Keterangan
1	UXB072	1901B610601004	PURING KENCANA	PAMTAS KANTUK ASAM	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
2	UXB043	1901B610601045	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAI ULUK PALING	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
3	UXB071	1901B610601018	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
4	UXB045	1901B610601041	EMBALOH HULU	LAUK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
5	UXB067	1901B610601044	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
6	UXB076	1901B610600945	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUNUK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
7	UXA818	1901B610600952	BATANG LUPAR	LABIAN	Terminasi 2025	-				
8	UXB069	1901B610601036	PUTUSSIBAU SELATAN	KAREHO	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
9	UXB068	1901B610601049	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
10	UXB080	1901B610600950	BATANG LUPAR	MELEMBAH	Terminasi 2025	-				
11	UXB048	1901B610601040	BATANG LUPAR	RANTAU PRAPAT	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
12	16PTS048	1919B610600702	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
13	16PTS049	1919B610600704	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
14	16PTS050	1919B610600700	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	Terminasi 2025	-				
15	16PTS051	1919B610600703	BATANG LUPAR	PAMTAS KELAWIK	Terminasi 2025	-				
16	16PTS054	1919B610600708	BUNUT HILIR	KAMPUNG BARU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
17	16PTS052	1919B610600706	PUTUSSIBAU SELATAN	NANGA BALANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
18	16PTS053	1919B610600705	PUTUSSIBAU SELATAN	MATA LUNAI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
19	16PTS022	1901B610600739	HULU GURUNG	TANI MAKMUR	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
20	16PTS024	1904B610600732	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
21	16PTS027	1904B610600747	BATANG LUPAR	SETULANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
22	16PTS028	1904B610600745	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
23	16PTS023	1901B610600736	BADAU	PULAU MAJANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
24	16PTS046	1904B610600748	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	Terminasi 2025	-				
25	16PTS047	1904B610600744	SILAT HULU	RIAM TAPANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
26	16PTS026	1904B610600743	SELIMBAU	SEKUBAH	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
27	16PTS025	1904B610600746	JONGKONG	UJUNG SAID	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
28	UXB104	1917B610600329	PUTUSSIBAU UTARA	BENUA TENGAH	AKTIF	Belum		400		Dokumen hibah di lakukan pada tahun 2026
29	KLB5396	1917B610601104	BUNUT HULU	NANGA KELIBANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
30	KLB5434	1917B610601308	SILAT HULU	NANGA LUAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
31	KLB5432	1917B610601306	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
32	KLB00289	ZZJ722	BUNUT HULU	SELAUP	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan

Perincian atas Status Pencatatan Aset Tetap Tanah, Lokasi, dan Data Menara BTS

(dalam Rupiah)

No.	Site ID	Site ID Opsel	Kecamatan	Desa	STATUS OPERATION	Tercatat di KIB (Sudah /Belum)	Nilai yang Tercatat di KIB (Rp)	Luas (M2)	Penyerahan Sertifikat (Sudah/Belum)	Keterangan
33	KLB00339	ZZJ748	SILAT HILIR	PENAI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
34	KLB00350	ZZJ689	SILAT HULU	ENTEBI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
35	KLB00348	ZZJ752	SILAT HULU	PERJUK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
36	KLB00357	ZZJ600	KALIS	BAHENAP	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
37	KLB00385	ZZJ703	SUHAID	KERENGAS	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
38	KLB00683	ZZJ736	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
39	KLB00265	ZZJ653	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
40	KLB00267	ZZJ714	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	AKTIF	Belum		400		Dokumen hibah di lakukan pada tahun 2026
41	KLB00269	ZZJ716	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
42	KLB00288	ZZJ665	BUNUT HULU	NANGA DUA	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
43	KLB00290	ZZJ666	BUNUT HULU	NANGA PAYANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
44	KLB00302	ZZJ727	HULU GURUNG	NANGA YEN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
45	KLB00304	ZZJ596	HULU GURUNG	BERINGIN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
46	KLB00305	ZZJ672	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
47	KLB00321	ZZJ678	SEMITAU	NANGA LEMEDAK	AKTIF	Sudah	6.800.000,00	400	Belum bersertifikat	
48	KLB00323	ZZJ738	SEMITAU	SEKEDAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
49	KLB00324	ZZJ598	SEBERUANG	BATI	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
50	KLB00326	ZZJ739	SEBERUANG	TANJUNG KELILING	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
51	KLB00327	ZZJ740	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
52	KLB00328	ZZJ741	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
53	KLB00332	ZZJ742	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
54	KLB00333	ZZJ683	EMPANANG	KUMANG JAYA	AKTIF	Sudah	4.800.000,00	400	Belum bersertifikat	
55	KLB00345	ZZJ686	SILAT HULU	NANGA LUNGU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
56	KLB00349	ZZJ688	SILAT HULU	LANDAU RANTAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
57	KLB00352	ZZJ754	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	AKTIF	Belum		400		Dokumen hibah di lakukan pada tahun 2026
58	KLB00355	ZZJ690	KALIS	NANGA LEBANGAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
59	KLB00356	ZZJ691	KALIS	NANGA RAUN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
60	KLB00362	ZZJ759	KALIS	TEKUDAK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
61	KLB00273	ZZJ657	BIKA	MELAPI MANDAY	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
62	KLB00283	ZZJ662	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
63	KLB00285	ZZJ663	BUNUT HILIR	EMPANGAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
64	KLB00299	ZZJ669	JONGKONG	BONTAI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan

Perincian atas Status Pencatatan Aset Tetap Tanah, Lokasi, dan Data Menara BTS

(dalam Rupiah)

No.	Site ID	Site ID Opsel	Kecamatan	Desa	STATUS OPERATION	Tercatat di KIB (Sudah /Belum)	Nilai yang Tercatat di KIB (Rp)	Luas (M2)	Penyerahan Sertifikat (Sudah/Belum)	Keterangan
65	KLB00300	ZZJ670	JONGKONG	KARYA BARU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
66	KLB00309	ZZJ674	SELIMBAU	GERAYAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
67	KLB00308	ZZJ729	SELIMBAU	PIASAK HILIR	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
68	KLB00276	ZZJ659	EMBALOH HILIR	LAWIK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
69	KLB00366	ZZJ763	KALIS	RANTAU BUMBUN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
70	KLB00375	ZZJ767	BOYAN TANJUNG	TELUK GERUGUK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
71	KLB00378	ZZJ700	MENTEBAH	KEPALA GURUNG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
72	KLB00387	ZZJ705	SUHAID	LAUT TAWANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
73	KLB00393	ZZJ711	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
74	KLB00630	ZZJ723	BUNUT HULU	PANTAS BERSATU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
75	KLB00633	ZZJ765	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	AKTIF	Sudah	4.800.000,00	400	Belum bersertifikat	
76	KLB00638	ZZJ710	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
77	KLB00698	ZZJ750	SILAT HULU	SELANGKAI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
78	KLB00700	ZZJ747	EMPANANG	BAJAU ANDAI	AKTIF	Sudah	4.800.000,00	400	Belum bersertifikat	
79	KLB00628	ZZJ654	PENGKADAN	HULU PENGKADAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
80	KLB00384	ZZJ702	SUHAID	MENSUSAI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
81	KLB00275	ZZJ658	BIKA	JONGKONG MANDAY	AKTIF	Belum		400		Dokumen hibah di lakukan pada tahun 2026
82	KLB00317	ZZJ735	SEMITAU	NANGA SEBERUANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
83	KLB00291	ZZJ595	BUNUT HULU	BATU TIGA	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
84	KLB00331	ZZJ682	EMPANANG	KELING PANGGAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
85	KLB00343	ZZJ599	SILAT HULU	BELIMBING	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
86	KLB00282	ZZJ719	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
87	KLB00319	ZZJ677	SEMITAU	KENEPAI KOMPLEK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
88	KLB00353	ZZJ755	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG LOKANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
89	KLB00363	ZZJ760	KALIS	TAPANG DAAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
90	KLB00394	ZZJ712	PURING KENCANA	LANGAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
91	KLB00391	ZZJ709	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
92	KLB00695	ZZJ697	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	AKTIF	Sudah	3.360.000,00	400	Belum bersertifikat	
93	KLB00374	ZZJ698	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	AKTIF	Sudah	3.360.000,00	400	Belum bersertifikat	
94	KLB00334	ZZJ743	BADAU	SERANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
95	KLB00266	ZZJ593	PUTUSSIBAU UTARA	BENUA TENGAH	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
96	KLB00293	ZZJ724	BUNUT HULU	SEGITAK	AKTIF	Sudah	5.600.000,00	400	Belum bersertifikat	

Perincian atas Status Pencatatan Aset Tetap Tanah, Lokasi, dan Data Menara BTS

(dalam Rupiah)

No.	Site ID	Site ID Opsel	Kecamatan	Desa	STATUS OPERATION	Tercatat di KIB (Sudah /Belum)	Nilai yang Tercatat di KIB (Rp)	Luas (M2)	Penyerahan Sertifikat (Sudah/Belum)	Keterangan
97	KLB00372	ZZJ696	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
98	KLB00268	ZZJ715	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
99	KLB00297	ZZJ725	JONGKONG	TEMENANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
100	KLB00682	ZZJ744	BATANG LUPAR	MENSIAU	AKTIF	sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
101	KLB00344	ZZJ685	SILAT HULU	LANDAU BADAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
102	KLB00360	ZZJ693	KALIS	KENSURAY	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
103	KLB00368	ZZJ694	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
104	KLB00307	ZZJ728	SELIMBAU	NIBUNG	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
105	KLB00371	ZZJ766	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	AKTIF	Sudah	3.360.000,00	400	Belum bersertifikat	
106	KLB00337	ZZJ746	BADAU	TAJUM	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
107	KLB00347	ZZJ687	SILAT HULU	LEBAK NAJAH	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
108	KLB00379	ZZJ769	MENTEBAH	TANJUNG	AKTIF	Sudah	3.360.000,00	400	Belum bersertifikat	
109	KLB00637	ZZJ751	SILAT HILIR	SENTABAI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
110	KLB00701	ZZJ684	BADAU	KEKURAK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
111	KLB00318	ZZJ676	SEMITAU	ENTIPAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
112	KLB00322	ZZJ737	SEMITAU	PADUNG KUMANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
113	KLB00341	ZZJ749	SILAT HILIR	SEBERU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
114	KLB00315	ZZJ733	SELIMBAU	SEMALAH	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
115	KLB00316	ZZJ734	SELIMBAU	TEMPURAU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
116	KLB00377	ZZJ768	MENTEBAH	SUKA MAJU	AKTIF	Sudah	364.000,00	400	Belum bersertifikat	
117	KLB00699	ZZJ667	SELIMBAU	GUDANG HILIR	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
118	KLB00716	ZZJ770	SEBERUANG	NANGA LOT	AKTIF	Sudah	2.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
119	KLB00325	ZZJ679	SEBERUANG	EMPERIANG	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
120	KLB00336	ZZJ745	BADAU	TINTING SELIGI	AKTIF	Sudah	4.800.000,00	400	Belum bersertifikat	
121	KLB00351	ZZJ753	SILAT HULU	SELIMU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
122	KLB00370	ZZJ695	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	AKTIF	Sudah	3.360.000,00	400	Belum bersertifikat	
123	KLB00627	ZZJ713	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	AKTIF	Belum		400		Dokumen hibah di lakukan pada tahun 2026
124	KLB00634	ZZJ660	HULU GURUNG	MENTAWIT	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
125	KLB00376	ZZJ699	BOYAN TANJUNG	NANGA RET	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
126	KLB00280	ZZJ594	EMBALOH HILIR	BELATUNG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
127	KLB00310	ZZJ597	SELIMBAU	BENUIS	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
128	KLB00272	ZZJ656	BIKA	NANGA MANDAY	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan

Perincian atas Status Pencatatan Aset Tetap Tanah, Lokasi, dan Data Menara BTS

(dalam Rupiah)

No.	Site ID	Site ID Opsel	Kecamatan	Desa	STATUS OPERATION	Tercatat di KIB (Sudah /Belum)	Nilai yang Tercatat di KIB (Rp)	Luas (M2)	Penyerahan Sertifikat (Sudah/Belum)	Keterangan
129	KLB00278	ZZJ661	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGKA	AKTIF	Sudah	4.800.000,00	400	Belum bersertifikat	
130	KLB00295	ZZJ668	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
131	KLB00314	ZZJ675	SELIMBAU	MAWAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
132	KLB00632	ZZJ680	PENGKADAN	PINANG LAKA	AKTIF	Sudah	4.000.000,00	400	Belum bersertifikat	
133	KLB00330	ZZJ681	BATANG LUPAR	LABIAN IRAANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
134	KLB00359	ZZJ692	KALIS	NANGA DANAU	AKTIF	Belum		400		Dokumen hibah di lakukan pada tahun 2026
135	KLB00274	ZZJ717	BIKA	PENYELUANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
136	KLB00313	ZZJ732	SELIMBAU	SEKULAT	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
137	KLB00364	ZZJ761	KALIS	SEGIAM	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
138	KLB00365	ZZJ762	KALIS	RIBANG KADENG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
139	KLB00301	ZZJ726	JONGKONG	NANGA SERIAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
140	KLB00386	ZZJ704	SUHAID	MANTAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
141	KLB00358	ZZJ757	KALIS	NANGA TUBUK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
142	KLB00271	ZZJ655	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	AKTIF	Belum		400		Dokumen hibah di lakukan pada tahun 2026
143	KLB00281	ZZJ718	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
144	KLB00279	ZZJ773	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
145	KLB00286	ZZJ664	BUNUT HILIR	EMPANGAU HILIR	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
146	KLB00284	ZZJ720	EMBALOH HULU	TAMAO	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
147	KLB00354	ZZJ756	KALIS	NANGA SEBINTANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
148	KLB00388	ZZJ706	SUHAID	JONGKONG HULU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
149	KLB00383	ZZJ772	PENGKADAN	SASAN	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
150	KLB00382	ZZJ771	PENGKADAN	PERMATA	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
151	KLB00626	ZZJ774	SEBERUANG	GURUNG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
152	KLB00389	ZZJ707	SUHAID	MENAPAR	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
153	KLB00361	ZZJ758	KALIS	RANTAU KALIS	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
154	KLB00298	ZZJ775	JONGKONG	UJUNG JAMBU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
155	KLB00380	ZZJ701	PENGKADAN	KERANGAN PANJANG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
156	KLB00312	ZZJ731	SELIMBAU	PIASAK HULU	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
157	KLB00367	ZZJ764	KALIS	PENIUNG	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
158	KLB00631	ZZJ730	BUNUT HILIR	TELUK AUR	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan
159	KLB00303	ZZJ671	HULU GURUNG	KELAKAR	AKTIF	Sudah	3.360.000,00	400	Belum bersertifikat	
160	KLB00629	ZZJ721	BUNUT HULU	BAKONG PERMAI	AKTIF	Belum				Dokumen Hibah belum di sampaikan

Daftar Aset Tetap Kewenangan Pemprov Kalbar yang Masih Dicatat pada KIB

(dalam Rupiah)

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
1	1.3.1.01.01.01.004.0001	KIB A	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2004	884.867.500,00	-	884.867.500,00	SMK di Desa Kekurak
2	1.3.1.01.01.04.002.0002	KIB A	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2014	5.240.950,00	-	5.240.950,00	SMAN 1 Benua martinus (P1268)
3	1.3.3.01.01.10.002.00094	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2006	500.000.000,00	237.500.000,00	262.500.000,00	SMKN 2 Putussibau (Dana Sharing Blok Grant USB)
4	1.3.3.01.01.10.002.00081	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2008	449.483.000,00	191.030.275,00	258.452.725,00	Pembangunan USB SMAN I Embaloh Hilir
5	1.3.3.01.01.10.002.00009	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2009	269.615.546,40	107.846.218,56	161.769.327,84	Bangun Baru Gedung SMA Negeri 01 Putussibau Kec. Putussibau Utara
6	1.3.3.01.01.10.002.00003	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2011	262.214.000,00	91.774.900,00	170.439.100,00	Lokal SMK Negeri 2 Putussibau
7	1.3.3.01.01.10.002.00002	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2013	344.785.652,95	103.435.695,89	241.349.957,06	SMK Negeri 2 Putussibau
8	1.3.3.01.01.10.002.00044	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2013	445.905.428,46	133.771.628,54	312.133.799,92	SMKN 2 Putussibau
9	1.3.3.01.01.10.002.00065	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2013	259.222.071,16	77.766.621,35	181.455.449,81	SMKN 2 Putussibau
10	1.3.3.01.01.10.002.00068	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2014	320.698.437,50	88.192.070,31	232.506.367,19	SMKN 2 PTS
11	1.3.3.01.01.10.002.00182	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2014	205.686.102,04	56.563.678,06	149.122.423,98	SMAN 1 Embaloh Hilir
12	1.3.3.01.01.10.002.00183	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2014	204.487.708,46	56.234.119,83	148.253.588,63	SMKN 2 Putussibau
13	1.3.3.01.01.10.002.00020	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2015	169.434.332,51	42.358.583,13	127.075.749,38	SMAN 1 EMBALOH HILIR
14	1.3.3.01.01.10.002.00007	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2016	189.855.000,00	42.717.375,00	147.137.625,00	SMAN 2 PUTUSSIBAU
15	1.3.3.01.01.10.002.00008	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2016	209.844.000,00	47.214.900,00	162.629.100,00	SMAN 1 PUTUSSIBAU
16	1.3.3.01.01.10.002.00009	KIB C	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	2016	147.623.000,00	33.215.175,00	114.407.825,00	SMAN 2 PUTUSSIBAU
17	1.3.3.01.01.25.005.00001	KIB C	Pendopo	2014	95.607.244,76	26.291.992,31	69.315.252,45	Pembangunan Pendopo SMA Negeri 1 Jongkong kiri
18	1.3.3.01.02.02.011.00005	KIB C	Permanen	2004	49.900.000,00	26.197.500,00	23.702.500,00	Rumah Dinas Kepala SMAN 1
19	1.3.3.01.02.05.002.00001	KIB C	Asrama Semi Permanen	2014	389.958.954,55	107.238.712,50	282.720.242,05	SMKN 2 Putussibau
20	1.3.3.04.01.04.002.00011	KIB C	Pagar Semi Permanen	2016	207.186.471,59	46.616.956,11	160.569.515,48	Pagar SMAN 1 PTS
21	1.3.3.04.01.04.002.00012	KIB C	Pagar Semi Permanen	2016	152.584.528,20	34.331.518,85	118.253.009,35	Pagar SMAN 2 PTS
22	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
23	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
24	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
25	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
26	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
27	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
28	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
29	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
30	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
31	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
32	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
33	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
34	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
35	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
36	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
37	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
38	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
39	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
40	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
41	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
42	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
43	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
44	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
45	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
46	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
47	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
48	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
49	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
50	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
51	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
52	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
53	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
54	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
55	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
56	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
57	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
58	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
59	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
60	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
61	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
62	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
63	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
64	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
65	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
66	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
67	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
68	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
69	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
70	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
71	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
72	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
73	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
74	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
75	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
76	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
77	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
78	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
79	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
80	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
81	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
82	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
83	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
84	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
85	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
86	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
87	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
88	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
89	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
90	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
91	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
92	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
93	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
94	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
95	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
96	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
97	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
98	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
99	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
100	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
101	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
102	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
103	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
104	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
105	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
106	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
107	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
108	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
109	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
110	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
111	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
112	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
113	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
114	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
115	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
116	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
117	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
118	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
119	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
120	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
121	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
122	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
123	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
124	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
125	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
126	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
127	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
128	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
129	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
130	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
131	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
132	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
133	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
134	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
135	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
136	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
137	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
138	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
139	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
140	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
141	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
142	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
143	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
144	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
145	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
146	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
147	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
148	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
149	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
150	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
151	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
152	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
153	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
154	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
155	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
156	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
157	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
158	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
159	1.3.5.01.01.01.006	KIB E	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2019	123.661,16	-	123.661,16	KAMUS BAHASA INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR
160	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.998.644,03	-	1.998.644,03	SNARE DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
161	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.998.644,03	-	1.998.644,03	SNARE DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
162	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.998.644,03	-	1.998.644,03	SNARE DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
163	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.998.644,03	-	1.998.644,03	SNARE DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
164	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.998.644,03	-	1.998.644,03	SNARE DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
165	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.998.644,03	-	1.998.644,03	SNARE DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
166	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,90	-	2.058.335,90	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
167	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,75	-	2.058.335,75	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
168	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,75	-	2.058.335,75	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
169	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,75	-	2.058.335,75	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
170	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,75	-	2.058.335,75	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
171	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,75	-	2.058.335,75	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
172	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,75	-	2.058.335,75	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
173	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.058.335,75	-	2.058.335,75	MARCHING BELLS (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
174	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.997.614,86	-	1.997.614,86	TONOR DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
175	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.997.614,86	-	1.997.614,86	TONOR DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
176	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.997.614,86	-	1.997.614,86	TONOR DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
177	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.997.614,86	-	1.997.614,86	TONOR DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
178	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.997.614,86	-	1.997.614,86	TONOR DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)

No	No. Register	KIB	Uraian Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9
179	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	1.997.614,86	-	1.997.614,86	TONOR DRUM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
180	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.984.586,86	-	2.984.586,86	QUARD TOM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
181	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.984.586,86	-	2.984.586,86	QUARD TOM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
182	1.3.5.02.01.01.002	KIB E	Alat Musik Modern/Band	2016	2.984.586,86	-	2.984.586,86	QUARD TOM (alat drum band SMAN 2 Putussibau)
183	1.3.5.02.01.02.006	KIB E	Peralatan Olahraga	2011	20.582.200,00	-	20.582.200,00	Perlengkapan/peralatan olahraga SMA ()
184	1.3.5.02.01.02.006	KIB E	Peralatan Olahraga	2011	20.582.200,00	-	20.582.200,00	Perlengkapan/peralatan olahraga SMA ()
185	1.3.5.02.01.02.006	KIB E	Peralatan Olahraga	2011	20.582.200,00	-	20.582.200,00	Perlengkapan/peralatan olahraga SMA ()
186	1.3.5.02.01.02.006	KIB E	Peralatan Olahraga	2011	20.582.200,00	-	20.582.200,00	Perlengkapan/peralatan olahraga SMA ()
187	1.3.5.02.01.02.006	KIB E	Peralatan Olahraga	2011	20.582.200,00	-	20.582.200,00	Perlengkapan/peralatan olahraga SMA ()
Jumlah					5.933.574.168,73	1.550.297.920,44	4.383.276.248,29	

DAFTAR SINGKATAN

BAST	: Berita Acara Serah Terima
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
BLP	: Biaya Langsung Personel
BLNP	: Biaya Langsung Non Personel
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
YBDS	: Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
BTT	: Bantuan Tidak Terduga
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BM PM	: Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BM GB	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan
BM JIJ	: Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan
CMS	: <i>Cash Management System</i>
CLTN	: Cuti di Luar Tanggungan Negara
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KDH	: Kepala Daerah
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PA	: Pengguna Anggaran
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Perda	: Peraturan Daerah
PHO	: <i>Provisional Hand Over</i>
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPMK	: Surat Perintah Mulai Kerja
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
STS	: Surat Tanda Setoran
TA	: Tahun Anggaran
UP	: Uang Persediaan
WKDH	: Wakil Kepala Daerah

**RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025**

NO. LHP : 23B/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026
TANGGAL : 21 Mei 2026
DJPKN/PERWAKILAN : VI/Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A.	Belanja				
1.	Pembayaran Belanja Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 sebesar Rp223.736.960,00	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala BKAD bersama Kepala BKPSDM memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp223.736.960,00 dengan penyetoran ke RKUD sesuai ketentuan kepegawaian.	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan Kepala BKAD bersama Kepala BKPSDM memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp223.736.960,00 dengan penyetoran ke RKUD sesuai ketentuan kepegawaian.	Minggu ke III Juli 2026	
2.	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 sebesar Rp52.222.438,00	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp52.222.438,00 dengan penyetoran ke RKUD.	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp52.222.438,00 dengan penyetoran ke RKUD.	Minggu ke III Juli 2026	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3.	Pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non Personel atas Enam Paket Pekerjaan Jasa Konsultan pada DPUPR Tidak Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sebesar Rp64.257.400,00	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala DPUPR memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp64.257.400,00 dengan penyetoran ke RKUD.	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan Kepala DPUPR memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp64.257.400,00 dengan penyetoran ke RKUD.	Minggu ke III Juli 2026	
4.	Volume Pekerjaan, Perhitungan Harga Satuan Timpang, dan Spesifikasi Hasil Pekerjaan pada DPUPR dan DPPKB Tidak Sesuai Kontrak Pengadaan Pekerjaan sebesar Rp2.002.410.000,00	BPK merekomendasi Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan: a. Kepala DPUPR dan Kepala DKPPKB untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.002.410.000,00 dengan penyetoran ke RKUD, terdiri dari: 1) DPUPR sebesar Rp1.994.153.000,00; dan 2) DKPPKB sebesar Rp8.257.000,00. b. Kepala DPUPR memproses perbaikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan: a) Kepala DPUPR dan Kepala DKPPKB untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.002.410.000,00 dengan penyetoran ke RKUD, terdiri dari: 1) DPUPR sebesar Rp1.994.153.000,00; dan 2) DKPPKB sebesar Rp8.257.000,00. b) Kepala DPUPR memproses perbaikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai	Minggu ke III Juli 2026	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		spesifikasi sesuai rekomendasi teknis dari tenaga ahli kepada: 1) CV CM untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simp.Bati (Lintas Selatan) – Menapar; 2) CV PLB untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan – Nanga Suruk; dan 3) CV SAP untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mataso – Ulak Pauk.	spesifikasi sesuai rekomendasi teknis dari tenaga ahli kepada: 1) CV CM untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simp.Bati (Lintas Selatan) – Menapar; 2) CV PLB untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Nanga Boyan – Nanga Suruk; dan 3) CV SAP untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mataso – Ulak Pauk.		
5.	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda pada Empat Paket Pengadaan dan Pekerjaan Konstruksi di Tiga SKPD Sebesar Rp62.612.000,00	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala Disdikbud, Kepala DPUPR dan Kepala DKPPKB untuk memerintahkan PPK untuk memproses pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp62.612.000,00 dengan penyetoran ke RKUD, terdiri dari: a) Disdikbud sebesar Rp8.157.000,00; b) DPUPR sebesar Rp51.137.000,00; dan c) DKPPKB sebesar Rp3.318.000,00.	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan Kepala Disdikbud, Kepala DPUPR dan Kepala DKPPKB untuk memerintahkan PPK untuk memproses pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp62.612.000,00 dengan penyetoran ke RKUD, terdiri dari: a) Disdikbud sebesar Rp8.157.000,00; b) DPUPR sebesar Rp51.137.000,00; dan c) DKPPKB sebesar Rp3.318.000,00.	Minggu ke III Juli 2026	
6.	Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembelian Sembako Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 Sebesar Rp354.002.875,00	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp354.002.875,00 dengan penyetoran ke RKUD.	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp354.002.875,00 dengan penyetoran ke RKUD.	Minggu ke III Juli 2026	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
B. Aset					
1.	Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tujuh SKPD Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan: a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik, Camat Batang Lupar, Camat Embaloh Hulu, Camat Puring Kencana, Camat Semitau, dan Camat Badau melakukan evaluasi terhadap bendahara pengeluaran masing-masing dilengkapi pernyataan komitmen untuk menyetorkan sisa UP/TU secara tepat waktu sesuai ketentuan; b) Kepala DKPPKB melakukan percepatan penyelesaian jasa pelayanan sebesar Rp268.765.123,00 bagi para tenaga kesehatan di tiga puskesmas.	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan: a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik, Camat Batang Lupar, Camat Embaloh Hulu, Camat Puring Kencana, Camat Semitau, dan Camat Badau melakukan evaluasi terhadap bendahara pengeluaran masing-masing dilengkapi pernyataan komitmen untuk menyetorkan sisa UP/TU secara tepat waktu sesuai ketentuan; b) Kepala DKPPKB melakukan percepatan penyelesaian jasa pelayanan sebesar Rp268.765.123,00 bagi para tenaga kesehatan di tiga puskesmas.	Minggu ke III Juli 2026	
2.	Penagihan dan Penghapusan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 Berlarut-larut dan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan: a) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan pihak kantor Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKN) setempat untuk menyerahkan penagihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 yang memenuhi syarat untuk diserahkan	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan: a) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan pihak kantor Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKN) setempat untuk menyerahkan penagihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 yang memenuhi syarat untuk diserahkan kepada	Minggu ke III Juli 2026	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		kepada PUPN termasuk penyelesaian penghapusannya; dan b) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk melakukan penertiban dan penyediaan dokumen, data dan informasi berkaitan dengan Piutang Dana Bergulir senilai Rp862.539.000,00 guna mendukung kelancaran upaya penagihan dan/atau penghapusan piutang tersebut.	PUPN termasuk penyelesaian penghapusannya; dan b) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk melakukan penertiban dan penyediaan dokumen, data dan informasi berkaitan dengan Piutang Dana Bergulir senilai Rp862.539.000,00 guna mendukung kelancaran upaya penagihan dan/atau penghapusan piutang tersebut.		
3.	Penyelesaian Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uncak Kapuas berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) dari Pemerintah Pusat Berlarut-larut	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar memproses penyelesaian status bantuan pemerintah YBDS senilai Rp49.736.328.325,00 menjadi tambahan penyertaan modal Pemkab Kapuas Hulu pada Perumda Tirta Uncak Kapuas sesuai ketentuan.	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui koordinasi bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar memproses penyelesaian status bantuan pemerintah YBDS senilai Rp49.736.328.325,00 menjadi tambahan penyertaan modal Pemkab Kapuas Hulu pada Perumda Tirta Uncak Kapuas sesuai ketentuan.	Minggu ke III Juli 2026	
4.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasi Bupati Kapuas Hulu agar menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk: 1) Melakukan pengamanan fisik BMD secara berkesinambungan untuk seluruh BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, minimal terhadap BMD tanah	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk: 1) Melakukan pengamanan fisik BMD secara berkesinambungan untuk seluruh BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, minimal terhadap BMD tanah	Minggu ke III Juli 2026	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		sebanyak dua bidang dengan nilai sebesar Rp1.471.800.000,00, BMD peralatan dan mesin berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 dengan nilai sebesar Rp460.930.000,00, BMD gedung dan bangunan berupa satu unit rumah dinas dengan nilai sebesar Rp22.827.607,14 yang dikuasai pihak lain; 2) Menyusun program bidang kegiatan untuk percepatan proses sertifikasi 1.108 bidang tanah dan penyerahan hibah 120 bidang tanah; 3) Menyelesaikan pemindahtanganan atas BMD yang bukan merupakan milik Pemkab Kapuas Hulu, minimal terhadap: a) 2 bidang tanah senilai Rp890.108.450,00; b) 19 unit gedung dan bangunan senilai Rp4.874.091.478,58; dan c) 166 item aset tetap lainnya senilai Rp169.374.240,15. 4) Memerintahkan pengguna kendaraan bermotor sebanyak 17 unit di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau (ADP) untuk	sebanyak dua bidang dengan nilai sebesar Rp1.471.800.000,00, BMD peralatan dan mesin berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 dengan nilai sebesar Rp460.930.000,00, BMD gedung dan bangunan berupa satu unit rumah dinas dengan nilai sebesar Rp22.827.607,14 yang dikuasai pihak lain; 2) Menyusun program bidang kegiatan untuk percepatan proses sertifikasi 1.108 bidang tanah dan penyerahan hibah 120 bidang tanah; 3) Menyelesaikan pemindahtanganan atas BMD yang bukan merupakan milik Pemkab Kapuas Hulu, minimal terhadap: a) 2 bidang tanah senilai Rp890.108.450,00; b) 19 unit gedung dan bangunan senilai Rp4.874.091.478,58; dan c) 166 item aset tetap lainnya senilai Rp169.374.240,15. 4) Memerintahkan pengguna kendaraan bermotor sebanyak 17 unit di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau (ADP) untuk melakukan		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		melakukan pembayaran PKB sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian pinjampakai. b. Masing-masing Kepala SKPD terkait untuk: 1) Melakukan pencatatan penggunaan kendaraan dinas operasional; dan 2) Berkoordinasi dengan TPKD dalam rangka memproses kerugian daerah atas BMD berupa satu unit laptop senilai Rp7.548.000,00 yang hilang dan belum dipertanggungjawabkan.	pembayaran PKB sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian pinjampakai. b. Masing-masing Kepala SKPD terkait untuk: 1) Melakukan pencatatan penggunaan kendaraan dinas operasional; dan 2) Berkoordinasi dengan TPKD dalam rangka memproses kerugian daerah atas BMD berupa satu unit laptop senilai Rp7.548.000,00 yang hilang dan belum dipertanggungjawabkan.		
5.	Penyelesaian Pelepasan dan/atau Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Lain-Lain Sebesar Rp284.311.083.517,04 dan Tagihan Jangka Panjang Sebesar Rp1.787.577.500,00 Berlarut-larut	BPK merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar: a. menetapkan keputusan terkait penghapusan Tagihan Jangka Panjang senilai Rp1.787.577.500,00 sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan putusan hukum tetap/inkrah oleh Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di Tahun 2025 terhadap tagihan tersebut; dan b. menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melakukan inventarisasi Aset Lain-Lain sebagai dasar pertimbangan untuk mengidentifikasi aset-aset yang masih	Bupati Kapuas Hulu akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan: a. menetapkan keputusan terkait penghapusan Tagihan Jangka Panjang senilai Rp1.787.577.500,00 sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan putusan hukum tetap/inkrah oleh Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di Tahun 2025 terhadap tagihan tersebut; dan b. menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melakukan inventarisasi Aset Lain-Lain sebagai dasar pertimbangan untuk mengidentifikasi aset-aset yang masih dapat dimanfaatkan	Minggu ke III Juli 2026	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		dapat dimanfaatkan atau aset yang telah memenuhi kriteria untuk penghapusan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil inventarisasi tersebut.	atau aset yang telah memenuhi kriteria untuk penghapusan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil inventarisasi tersebut.		


 Patussibau, 20 Mei 2026
 Bupati Kapuas Hulu,
 Fransiskus Diaan, S.H., M.H

